

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	2 - 3 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	4 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 September 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	8 September 2020
Tanggal Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330;
Email: investor@pln.co.id, www.pln.co.id

Kantor Perwakilan:
Terdapat diseluruh wilayah Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Obligasi Seri E

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP376.500.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau Rp86.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN LANGSUNG DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL, MARJIN, ATAU IMBAL JASA SUKUK

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH PENGENDALIAN DILAKUKAN SECARA LANGSUNG OLEH PEMERINTAH TERHADAP PERSEROAN SEBAGAIMANA TARIF LISTRIK YANG DIATUR LANGSUNG OLEH PEMERINTAH SEHINGGA DAPAT BERMAMPAK MATERIAL ATAS KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

AAA (Triple A)

AAA_{sy} (Triple A Syariah)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Danareksa
Sekuritas (Terafiliasi)



PT Indo Premier
Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 2 September 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV kepada OJK dengan Surat No. 12118/KEU.01.08/B01060100/2020 tanggal 29 Juni 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk No. S-04261/BEI.PP2/07-2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KE P-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Tidak terdapat pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus selain Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab Definisi dan Singkatan.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO. IX.C.11").



DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI	xix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xxi
RINGKASAN	xxii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI.....	1
2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH	16
3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	37
4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	38
5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	39
6. PERPAJAKAN.....	40
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	41
III. PERNYATAAN UTANG	43
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	82
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	87
VI. FAKTOR RISIKO.....	111
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	125
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	126
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	126
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	126
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	127
3. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	128
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	133
5. ASURANSI.....	146
6. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	147
7. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.....	148
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN.....	150
9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	151
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG)...	166
11. SUMBER DAYA MANUSIA	190
12. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	194



13. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI.....	195
B. KEGIATAN USAHA	204
1. SEJARAH PERSEROAN	206
2. KEGIATAN USAHA DAN PENGORGANISASIAN	207
3. TARIF TENAGA LISTRIK.....	210
4. KOMPENSASI PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (“KP-PSO”).....	217
5. PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	218
6. SARANA DAN FASILITAS	224
7. PRODUKSI	226
8. PEMASARAN	228
9. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENINGKATAN MUTU DAN KEANDALAN	230
10. TEKNOLOGI INFORMASI	232
11. STRATEGI USAHA PERSEROAN.....	233
12. PROSPEK USAHA	235
13. PERSAINGAN	236
14. KECENDERUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	237
15. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	239
16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI	239
17. KETERGANTUNGAN PERSEROAN	276
IX. PERPAJAKAN.....	278
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	280
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	282
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	285
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	292
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH.....	297
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	298
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	299



DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah	: berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah.
Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut.hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Akad Ijarah	: berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2020 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Akad Wakalah	: berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2020 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
AMDAL	: berarti singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BAPEPAM	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.



- BAPEPAM dan LK : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Bunga Obligasi : berarti tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
- BEI : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan
- Cicilan Imbalan Ijarah : berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Daftar Pemegang Rekening : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Penawaran Umum : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Akad Ijarah, Akad Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi/Sukuk Ijarah sebagaimana disampaikan kepada OJK, sesuai Peraturan No. IX.A.2, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus sebagaimana akan diedarkan kepada Masyarakat.



- Efek** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 UUPM.
- Efek Syariah** : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.
- Efektif** : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu :
- atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Emisi** : berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Entitas Anak** : berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Gagal Bayar** : berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor, sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
- Hari Bursa** : berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender** : berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
- Hari Kerja** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah.
- Imbalan Ijarah** : berarti semua jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.



IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISAK 8	: berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 8 : Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.
ISAK 16	: berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 16 : Perjanjian Konsesi Jasa.
Jumlah Yang Terutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, termasuk jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	: berarti jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp213.889,- (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;- Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp229.167,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;- Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp247.222,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;- Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp268.056,- (dua ratus enam puluh delapan ribu lima puluh enam Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati;- Sukuk Ijarah Seri E sebesar Rp273.889,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi/Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi/pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi/Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.



KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi Obligasi/Sukuk Ijarah bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Pembayaran Sukuk Ijarah dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan , Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah (“FPPO”), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	: berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



- Obligasi : berarti surat utang dengan nama “Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020”, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri yang masing-masing nilainya ditentukan dalam Perjanjian Perwalianan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
 - Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
 - Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
 - Seri D: Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
 - Seri E: Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi.
- Obligasi Berkelanjutan IV : berarti Obligasi Berkelanjutan IV PLN, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000.000.000 (dua puluh empat triliun Rupiah).



Objek Ijarah	: berarti berupa jaringan listrik di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").
Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Sukuk Ijarah	: berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah; dan/atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan yang disetujui sebagai pengantarnya oleh Wali Amanat.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pengakuan Utang Obligasi	: berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 122 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta



Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah	: berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 125, tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek dan Efek Syariah yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	: berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dalam hal ini adalah, PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.11	: berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 7 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah	: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 8 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-007/OBL/KSEI/0620 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat di bawah tangan.



- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-016/SKK/KSEI/0620 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat di bawah tangan.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk : berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan berdasarkan Surat No. S-04261/BEI.PP2/07-2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020, yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 55 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 133, tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 50, tanggal 10 Agustus 2020 dan diubah dengan Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 121, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020, yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 57 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 135, tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 52, tanggal 10 Agustus 2020 dan diubah dengan Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 124, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliananatan Obligasi : berarti Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No.54 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No.132, tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 49, tanggal 10 Agustus 2020, dan diubah dengan Akta Adendum III Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 120, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.



- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 56 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 134 tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 51 tanggal 10 Agustus 2020 dan diubah dengan Akta Adendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 123, tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal *juncto* POJK No. 7/2017.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN No. 53 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN No. 131 tanggal 21 Juli 2020 yang diubah dengan Akta Adendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN No. 48 tanggal 10 Agustus 2020 dan diubah dengan Akta Adendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN No. 119, tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini perseroan terbatas PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA atau disingkat PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia : berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten karena:
a. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau
b. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Prinsip Syariah di Pasar Modal : berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
- POJK No. 6/2017 : berarti Peraturan OJK No. 6/POJK.04/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.



- POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 15/2015 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 32/2014 : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
- POJK No. 33/2014 : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/2014 : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 55/2015 : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 19/2020 : berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

**Pokok Obligasi**

: berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri yang masing-masing nilainya ditentukan dalam Adendum Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri D: Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri E: Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Prospektus

: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 7/2017.



Prospektus Awal	: Berarti berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi, penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, tanggal 22 Juni 2017.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal
PSAK 30	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 (Revisi 2011) : Sewa.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPSI	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: berarti singkatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi atau Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	: berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sisa Imbalan Ijarah	: berarti jumlah pokok bagian dari Imbalan Ijarah atas pengalihan manfaat kepada pihak ketiga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.



- Sukuk : berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
- kepemilikan aset berwujud tertentu;
 - nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu;
 - jasa yang sudah ada maupun akan ada;
 - aset proyek tertentu; dan/atau kegiatan yang sudah ditentukan.
- Sukuk Ijarah : berarti "SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020" yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam 5 (lima) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri D: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.



Seri E: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

sejak Tanggal Emisi dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

- Tanggal Distribusi : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.
- Tanggal Emisi : berarti Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterima KSEI dari Emiten yang juga merupakan Tanggal Pembayaran
- Tanggal Pelunasan Pokok : berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah : berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk Ijarah Seri E.
- Tanggal Pembayaran : berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Emiten yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam rekening Emiten (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 8 September 2020



Tanggal Pembayaran Bunga : berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dana Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Obligasi Seri E.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020
2	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021
3	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021
4	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021
5	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021
6	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022
7	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022
8	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022
9	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022
10	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023
11	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023
12	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023
13	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023
14	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
15	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
16	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
17	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
18	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025
19	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025
20	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025
21		8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025
22		8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026
23		8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026
24		8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026
25		8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026
26		8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027
27		8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027
28		8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027
29			8 Desember 2027	8 Desember 2027	8 Desember 2027
30			8 Maret 2028	8 Maret 2028	8 Maret 2028
31			8 Juni 2028	8 Juni 2028	8 Juni 2028
32			8 September 2028	8 September 2028	8 September 2028
33			8 Desember 2028	8 Desember 2028	8 Desember 2028
34			8 Maret 2029	8 Maret 2029	8 Maret 2029
35			8 Juni 2029	8 Juni 2029	8 Juni 2029
36			8 September 2029	8 September 2029	8 September 2029
37			8 Desember 2029	8 Desember 2029	8 Desember 2029
38			8 Maret 2030	8 Maret 2030	8 Maret 2030
39			8 Juni 2030	8 Juni 2030	8 Juni 2030
40			8 September 2030	8 September 2030	8 September 2030
41				8 Desember 2030	8 Desember 2030
42				8 Maret 2031	8 Maret 2031
43				8 Juni 2031	8 Juni 2031
44				8 September 2031	8 September 2031
45				8 Desember 2031	8 Desember 2031
46				8 Maret 2032	8 Maret 2032
47				8 Juni 2032	8 Juni 2032
48				8 September 2032	8 September 2032



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
49				8 Desember 2032	8 Desember 2032
50				8 Maret 2033	8 Maret 2033
51				8 Juni 2033	8 Juni 2033
52				8 September 2033	8 September 2033
53				8 Desember 2033	8 Desember 2033
54				8 Maret 2034	8 Maret 2034
55				8 Juni 2034	8 Juni 2034
56				8 September 2034	8 September 2034
57				8 Desember 2034	8 Desember 2034
58				8 Maret 2035	8 Maret 2035
59				8 Juni 2035	8 Juni 2035
60				8 September 2035	8 September 2035
61					8 Desember 2035
62					8 Maret 2036
63					8 Juni 2036
64					8 September 2036
65					8 Desember 2036
66					8 Maret 2037
67					8 Juni 2037
68					8 September 2037
69					8 Desember 2037
70					8 Maret 2038
71					8 Juni 2038
72					8 September 2038
73					8 Desember 2038
74					8 Maret 2039
75					8 Juni 2039
76					8 September 2039
77					8 Desember 2039
78					8 Maret 2040
79					8 Juni 2040
80					8 September 2040

Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

: berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk Ijarah Seri E

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020
2	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021
3	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021
4	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021
5	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021
6	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022
7	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022
8	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022
9	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022
10	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023
11	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023
12	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023
13	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023



Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
14	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
15	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
16	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
17	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
18	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025
19	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025
20	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025
21		8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025
22		8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026
23		8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026
24		8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026
25		8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026
26		8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027
27		8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027
28		8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027
29			8 Desember 2027	8 Desember 2027	8 Desember 2027
30			8 Maret 2028	8 Maret 2028	8 Maret 2028
31			8 Juni 2028	8 Juni 2028	8 Juni 2028
32			8 September 2028	8 September 2028	8 September 2028
33			8 Desember 2028	8 Desember 2028	8 Desember 2028
34			8 Maret 2029	8 Maret 2029	8 Maret 2029
35			8 Juni 2029	8 Juni 2029	8 Juni 2029
36			8 September 2029	8 September 2029	8 September 2029
37			8 Desember 2029	8 Desember 2029	8 Desember 2029
38			8 Maret 2030	8 Maret 2030	8 Maret 2030
39			8 Juni 2030	8 Juni 2030	8 Juni 2030
40			8 September 2030	8 September 2030	8 September 2030
41				8 Desember 2030	8 Desember 2030
42				8 Maret 2031	8 Maret 2031
43				8 Juni 2031	8 Juni 2031
44				8 September 2031	8 September 2031
45				8 Desember 2031	8 Desember 2031
46				8 Maret 2032	8 Maret 2032
47				8 Juni 2032	8 Juni 2032
48				8 September 2032	8 September 2032
49				8 Desember 2032	8 Desember 2032
50				8 Maret 2033	8 Maret 2033
51				8 Juni 2033	8 Juni 2033
52				8 September 2033	8 September 2033
53				8 Desember 2033	8 Desember 2033
54				8 Maret 2034	8 Maret 2034
55				8 Juni 2034	8 Juni 2034
56				8 September 2034	8 September 2034
57				8 Desember 2034	8 Desember 2034
58				8 Maret 2035	8 Maret 2035
59				8 Juni 2035	8 Juni 2035
60				8 September 2035	8 September 2035
61					8 Desember 2035
62					8 Maret 2036
63					8 Juni 2036
64					8 September 2036
65					8 Desember 2036
66					8 Maret 2037
67					8 Juni 2037
68					8 September 2037
69					8 Desember 2037
70					8 Maret 2038
71					8 Juni 2038
72					8 September 2038
73					8 Desember 2038
74					8 Maret 2039
75					8 Juni 2039
76					8 September 2039
77					8 Desember 2039
78					8 Maret 2040
79					8 Juni 2040
80					8 September 2040



Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah : berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan-hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan/ atau Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI

BBTU	: berarti singkatan dari <i>Billion British Thermal Unit</i> .
BSCF	: berarti singkatan dari <i>Billion Standard Cubic Feet</i> , yaitu sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan satu kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi.
BTU	: berarti singkatan dari <i>British Thermal Unit</i> , yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 (satu) pound air 1 (satu) derajat Fahrenheit pada temperatur 60 derajat Fahrenheit, pada tekanan absolut 14,7 pound per square inch.
GWh	: berarti singkatan dari Giga-Watt-hour, setara dengan 1.000 MWh.
IPP	: berarti singkatan dari <i>Independent Power Producer</i> , yaitu perusahaan produsen listrik swasta yang dibentuk oleh konsorsium untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBL") (<i>power purchase agreement</i> atau PPA) dengan Perseroan.
JTM	: berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Menengah, yaitu bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari gardu induk sampai pada suatu gardu distribusi. Di Indonesia, JTM memiliki tegangan 20 kV.
JTR	: berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Rendah, yaitu bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari rel pembagi pada suatu gardu distribusi sampai pada KWh meter konsumen. Di Indonesia, tegangan diturunkan sampai 110V, 220V dan 80V.
KMS	: berarti singkatan dari Kilometer Sirkuit, yaitu satuan panjang jaringan transmisi atau distribusi listrik.
KVA	: berarti singkatan dari Kilo-Volt-Ampere.
KWh	: berarti singkatan dari Kilo-Watt-hour, yaitu satuan energi listrik nyata (aktif) selama 1 (satu) jam.
LWBP	: berarti singkatan dari Luar Waktu Beban Puncak, yaitu pemakaian listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam 22.00 – 18.00 waktu setempat.
MFO	: berarti singkatan dari Marine Fuel Oil, yaitu bahan bakar minyak yang digunakan untuk pembakaran langsung pada pembangkitan tenaga listrik.
MMBTU	: berarti singkatan dari Million British Thermal Unit.
MW	: berarti singkatan dari Mega-Watt.
MWh	: berarti singkatan dari Mega-Watt hour, setara dengan 1.000 KWh.



PKUK	: berarti singkatan dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Perseroan tidak lagi menjadi PKUK dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan badan usaha milik daerah.
PLTA	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan tenaga listrik.
PLTD	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula (<i>prime mover</i>).
PLTG	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas, yaitu pembangkit listrik yang mengkonversi energi kinetik dari gas untuk menghasilkan putaran pada turbin gas sehingga menggerakkan generator dan kemudian menghasilkan tenaga listrik.
PLTGU	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap, yaitu gabungan antara PLTG dan PLTU, dimana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU.
PLTP	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi (<i>geothermal</i>) sebagai energi penggerak.
PLTU	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan tenaga listrik.
PJBL atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	: berarti perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan Perseroan.
SAIDI	: berarti singkatan dari <i>System Average Interruption Duration Index</i> atau Indeks Lama Gangguan, yaitu rata-rata indeks lama waktu pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIDI dihitung dengan membandingkan lama gangguan pada konsumen dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
SAIFI	: berarti singkatan dari <i>System Average Interruption Frequency Index</i> atau Indeks Frekuensi Gangguan, yaitu rata-rata indeks jumlah pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIFI dihitung dengan membandingkan jumlah total gangguan dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
SR	: berarti singkatan dari Sambungan Rumah, yaitu sambungan listrik ke rumah tangga.
SUTET	: berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yaitu sistem distribusi dengan kekuatan 500kV yang ditujukan untuk meyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga tenaga listrik bisa disalurkan dengan efisien.



SUTT	: berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi, yaitu sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk lainnya.
TBTU	: berarti singkatan dari Trillion British Thermal Unit.
TWh	: berarti singkatan dari Tera – Watt – hour, setara dengan 1.000 GWh.
TDL	: berarti singkatan dari Tarif Dasar Listrik, yaitu tarif yang boleh dikenakan oleh Pemerintah untuk para pelanggan PLN.
TM	: berarti singkatan dari Tegangan Menengah, yaitu tegangan antara 6kV sampai dengan 20kV.
TR	: berarti singkatan dari Tegangan Rendah, yaitu tegangan antara 40V sampai dengan 1.000 V.
TT	: berarti singkatan dari Tegangan Tinggi, yaitu tegangan antara 30kV sampai dengan 150kV.
VA	: berarti singkatan dari Volt-Ampere.
WBP	: berarti singkatan dari Waktu Beban Puncak, yaitu pemakaian listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam 18.00 – 22.00 waktu setempat.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

DP-PLN	: Dana Pensiun PLN.
MH	: Majapahit Holding BV.
PT BAg atau BAg	: PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
PT HP atau HP	: PT Haleyora Power.
PT ICON+ atau ICON+	: PT Indonesia Comnets Plus.
PT IP atau IP	: PT Indonesia Power (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I).
PT PJB atau PJB	: PT Pembangkitan Jawa Bali (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II).
PT PLN Batam atau PLN Batam	: PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
PT PLN Batubara atau PLNBB	: PT PLN Batubara.
PT PLNE atau PLNE	: PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.
PT PLNGG atau PLNGG	: PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal.
PT PLNT atau PLNT	: PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 30 lokasi dari 34 lokasi yang direncanakan dengan kapasitas sebesar 9.697 MW atau setara 97,7% dari total kapasitas yang direncanakan telah beroperasi. Empat lokasi lainnya mewakili sekitar 2,3% dari total kapasitas (230 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2020 (180 MW), tahun 2021 (20 MW), dan tahun 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor

Sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014, Pemerintah kembali menugaskan Perseroan tahap kedua program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP II untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di Indonesia di luar penyelesaian FTP I. Sama dengan FTP I, Perpres No. 194/2014 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dimana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 11.629 MW.

Pada tanggal 31 Desember 2019, dari total kapasitas 15.074 MW di bawah FTP II, delapan proyek Fast Track Program II (termasuk IPP) yang terdiri dari total kapasitas 2.057 MW, atau sekitar 12% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW, beroperasi; 5.006 MW (atau 38% dari total kapasitas yang direncanakan 15.074 MW) berada di tahap konstruksi; 2.695 MW (atau 21% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap penutupan keuangan; dan 5.316 MW (atau 29% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap perencanaan dan pengadaan. Semua proyek di bawah FTP II diharapkan beroperasi pada tahun 2028. Perseroan saat ini pada berbagai tahapan perencanaan dan negosiasi kontrak EPC terkait dengan sisa lokasi yang ditugaskan. Target penyelesaian FTP II telah secara formal diperpanjang oleh Pemerintah dari tahun 2014 menjadi tahun 2028. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM dan tanggungan subsidi Pemerintah serta memenuhi permintaan listrik di Indonesia yang terus bertumbuh.

Perseroan mencatatkan pendapatan dan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp285.640.589 juta dan Rp4.322.130 juta. Volume listrik yang disalurkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,7% menjadi 244.665 GWh dari 233.778 GWh. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 18,5 jam per pelanggan per tahun dan 11,51 pemadaman per pelanggan per tahun.



Tarif tenaga listrik yang ditagihkan Perseroan kepada konsumennya diatur oleh Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) No. 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“Permen ESDM No. 28/2016”) sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 (“Permen ESDM No. 19/2019”).

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu ke waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dikarenakan tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (“PMK No. 44/PMK.02/2017”), sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 174/PMK.02/2019 tanggal 25 November 2019.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap bahan bakar minyak (“BBM”) dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus bertambah, Pemerintah memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan *Fast Track Program I* (“FTP I”) pada tahun 2006 dan *Fast Track Program II* (“FTP II”) pada tahun 2011. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW. Pemerintah kembali memperkenalkan Program 35.000 MW pada tahun 2015 dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian (Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan No. 169, tanggal 30 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11-519HT01.01TH'94, tanggal 1 Agustus 1994), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 63.000.000.000.000
 Modal ditempatkan/disetor : Rp 13.000.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 13.000.000 lembar saham prioritas dan 50.000.000 lembar saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	Negara Republik Indonesia	12.999.999.000.000	12.999.999 saham prioritas	99,99
2.	Bapa Lego Noormandiri	1.000.000	1 saham prioritas	0,01
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		13.000.000.000.000	13.000.000 saham prioritas	100
Saham dalam Portepel		50.000.000.000.000	50.000.000 saham biasa	-



Struktur Permodalan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 02/2019, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp109.826.527.000.000 menjadi Rp115.181.002.000.000 dengan cara pengeluaran/penempatan saham portepel sebanyak 5.354.475 saham yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN

a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

- Nama Obligasi Berkelanjutan : Obligasi Berkelanjutan IV PLN.
Target Dana : sebesar Rp24.000.000.000.000,- (dua puluh empat triliun Rupiah).
Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi").
Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) seri:
- Seri A dalam jumlah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah);
 - Seri B dalam jumlah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah);
 - Seri C dalam jumlah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah);
 - Seri D dalam jumlah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah); dan
 - Seri E dalam jumlah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah).
- Jangka Waktu :
 - Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;
 - Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - Seri D dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan
 - Seri E dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- Tingkat Bunga Obligasi :
 - Seri A sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun;
 - Seri B sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun;
 - Seri C sebesar 7,90% (tujuh koma Sembilan nol persen) per tahun;
 - Seri D sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun; dan
 - Seri E sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen) per tahun.



Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Obligasi Seri E.

Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga Jaminan	:	Triwulanan.
	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemingkatan	:	^{id} AAA (<i>Triple A</i>) dari Pefindo.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	:	Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan halaman 6 (enam).
Masa Penawaran Umum	:	2 - 3 September 2020

b. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah

Nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN.
Target Sisa Imbalan Ijarah	:	sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).
Nama Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 ("Sukuk Ijarah").



- Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI.
- Sisa Imbalan Ijarah : Sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) seri:
- Seri A dalam jumlah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah);
 - Seri B dalam jumlah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah);
 - Seri C dalam jumlah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah);
 - Seri D dalam jumlah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah); dan
 - Seri E dalam jumlah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu :
 - Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;
 - Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - Seri D dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan
 - Seri E dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- Cicilan Imbalan Ijarah :
 - Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.
 - Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.
 - Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.
 - Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.



- Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

- Harga Penawaran Objek Ijarah : 100% dari nilai nominal Sukuk Ijarah.
- Objek Ijarah : Objek Ijarah berupa jaringan listrik di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah).
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah : Triwulanan.
- Jaminan : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.

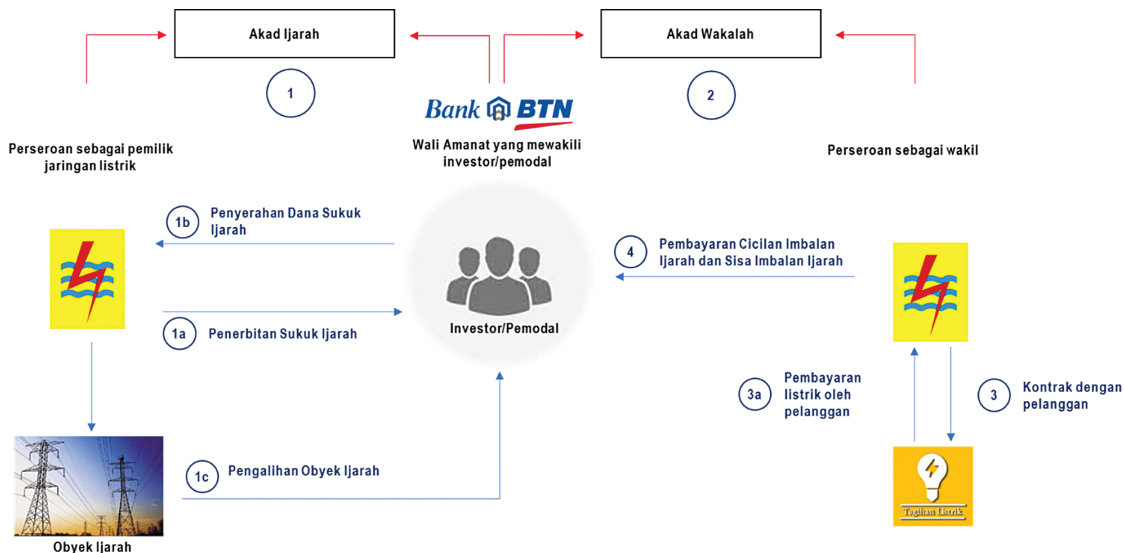
Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemingkatan : $AAA_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*) dari Pefindo.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan halaman 26 (dua puluh enam).

Masa Penawaran Umum : 2 - 3 September 2020

c. Skema Sukuk Ijarah



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
 - b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - c. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah. Berdasarkan Akad Ijarah, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan hal manfaat atas Objek Ijarah berupa Jaringan Listrik berupa peralatan distribusi terpasang di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.



2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.
Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
 - mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
 - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.
3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.
 - Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2020 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk tahap-tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN (Jika ada).

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi dalam Rupiah

Keterangan	Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	(dalam jutaan Rupiah)
			Tingkat Bunga/imbalan ijarah per tahun
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019			
Seri A	795.700	1 Oktober 2024	7,90%
Seri B	445.000	1 Oktober 2026	8,40%
Seri C	6.200	1 Oktober 2029	8,60%
Seri D	166.000	1 Oktober 2034	9,40%
Seri E	500.000	1 Oktober 2039	9,90%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019			
Seri A	6.500	1 Oktober 2024	Rp513
Seri B	10.000	1 Oktober 2026	Rp 840
Seri C	92.000	1 Oktober 2029	Rp 7.912
Seri D	135.000	1 Oktober 2034	Rp 12.690
Seri E	554.000	1 Oktober 2039	Rp 54.846
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019			
Seri A	637.000	1 Agustus 2024	8,00%

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/imbalan ijarah per tahun
Seri B	315.250	1 Agustus 2026	8,50%
Seri C	549.000	1 Agustus 2029	8,70%
Seri D	395.000	1 Agustus 2034	9,50%
Seri E	1.057.370	1 Agustus 2039	9,98%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019			
Seri A	274.000	1 Agustus 2024	Rp 21.920
Seri B	368.000	1 Agustus 2026	Rp 31.280
Seri C	20.000	1 Agustus 2029	Rp 1.740
Seri D	49.000	1 Agustus 2034	Rp 4.655
Seri E	539.000	1 Agustus 2039	Rp 53.765
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019			
Seri A	369.000	19 Februari 2022	8,50%
Seri B	1.212.000	19 Februari 2024	9,10%
Seri C	183.000	19 Februari 2026	9,35%
Seri D	211.000	19 Februari 2029	9,60%
Seri E	263.000	19 Februari 2034	9,80%
Seri F	155.000	19 Februari 2039	9,95%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019			
Seri A	263.000	19 Februari 2022	Rp 22.355
Seri B	263.000	19 Februari 2024	Rp 23.933
Seri C	204.000	19 Februari 2026	Rp 19.074
Seri D	45.000	19 Februari 2029	Rp 4.320
Seri E	60.000	19 Februari 2034	Rp 5.880
Seri F	28.000	19 Februari 2039	Rp 2.786
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018			
Seri A	210.000	10 Oktober 2023	8,65%
Seri B	483.000	10 Oktober 2025	9,00%
Seri C	78.000	10 Oktober 2028	9,10%
Seri D	15.000	10 Oktober 2033	9,30%
Seri E	46.000	10 Oktober 2038	9,65%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018			
Seri A	114.000	10 Oktober 2023	Rp 9.861
Seri B	45.000	10 Oktober 2025	Rp 4.050
Seri C	15.000	10 Oktober 2028	Rp 1.365
Seri D	50.000	10 Oktober 2038	Rp 4.825
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018			
Seri A	78.500	10 Juli 2023	7,80%
Seri B	442.000	10 Juli 2025	8,35%
Seri C	138.000	10 Juli 2028	8,40%
Seri D	281.000	10 Juli 2033	8,90%
Seri E	339.000	10 Juli 2038	9,00%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018			
Seri A	127.000	10 Juli 2023	Rp 9.906
Seri B	150.000	10 Juli 2025	Rp 12.525
Seri C	258.000	10 Juli 2028	Rp 21.672
Seri D	105.000	10 Juli 2033	Rp 9.345
Seri E	110.000	10 Juli 2038	Rp 9.900
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018			
Seri A	457.000	22 Februari 2023	6,50%
Seri B	10.000	22 Februari 2025	6,80%
Seri C	341.000	22 Februari 2028	7,25%
Seri D	362.000	22 Februari 2033	8,20%
Seri E	1.365.000	22 Februari 2038	8,75%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018			
Seri A	104.000	22 Februari 2023	Rp 6.760
Seri B	88.000	22 Februari 2028	Rp 6.380
Seri C	57.500	22 Februari 2033	Rp 4.715
Seri D	449.000	22 Februari 2038	Rp 39.287



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/imbalan ijarah per tahun
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017			
Seri A	451.500	3 November 2022	7,20%
Seri B	201.000	3 November 2024	7,50%
Seri C	800.000	3 November 2027	8,20%
Seri D	1.093.000	3 November 2032	8,70%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017			
Seri A	83.500	3 November 2022	Rp6.012
Seri B	121.000	3 November 2027	Rp9.922
Seri C	490.000	3 November 2032	Rp42.630
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017			
Seri A	214.000	11 Juli 2022	7,70%
Seri B	169.000	11 Juli 2024	8,10%
Seri C	1.217.000	11 Juli 2027	8,50%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017			
Seri A	186.000	11 Juli 2022	Rp14.322
Seri B	214.000	11 Juli 2027	Rp18.190
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013			
Seri B	651.000	10 Desember 2023	9,60%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013			
Seri B	108.000	10 Desember 2023	Rp10.368
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013			
Seri B	697.000	5 Juli 2023	8,25%
Obligasi PLN XII Tahun 2010			
Seri B	1.855.000	8 Juli 2022	10,40%
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010			
Seri B	340.000	8 Juli 2022	Rp35.360
Obligasi PLN IX Tahun 2007			
Seri B	1.200.000	10 Juli 2022	10,90%
Obligasi PLN VIII Tahun 2006			
Seri B	865.000	21 Juni 2021	13,75%
Jumlah	27.444.020		

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Terjamin – US\$

Keterangan	Pokok (dalam US\$)	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Surat utang jangka menengah				
<u>Penerbitan tahun 2019</u>				
Jatuh tempo 2030	500.000.000	99,775%	5 Februari 2030	3,88%
Jatuh tempo 2050	500.000.000	99,567%	5 Februari 2050	4,375%
Jatuh tempo 2029	700.000.000	99,385%	17 Juli 2029	3,88%
Jatuh tempo 2049	700.000.000	98,834%	17 Juli 2049	4,88%
Sub jumlah	2.400.000.000			
<u>Penerbitan tahun 2018</u>				
Jatuh tempo 2028	1.000.000.000	99,62%	21 Mei 2028	5,45%
Jatuh tempo 2029	500.000.000	99,00%	25 Oktober 2029	5,375%
Jatuh tempo 2048	1.000.000.000	99,32%	21 Mei 2048	6,15%
Jatuh tempo 2049	500.000.000	99,29%	25 Oktober 2049	6,25%
Sub jumlah	3.000.000.000			
<u>Penerbitan tahun 2017</u>				
Jatuh tempo 2027	1.500.000.000	98,99%	15 Mei 2027	4,13%
Jatuh tempo 2047	500.000.000	98,51%	15 Mei 2047	5,25%
Sub jumlah	2.000.000.000			



Keterangan	Pokok (dalam US\$)	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
<u>Penerbitan tahun 2012</u>				
Jatuh tempo 2042	1.000.000.000	98,51%	24 Oktober 2042	5,25%
<u>Penerbitan tahun 2011</u>				
Jatuh tempo 2021	1.000.000.000	99,05%	22 November 2021	5,50%
<u>Obligasi terjamin</u>				
<u>Penerbitan tahun 2007</u>				
Jatuh tempo 2037	288.312.000	98,59%	29 Juni 2037	7,87%
Jumlah	9.688.312.000			

Keterangan	Pokok EUR	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Surat utang jangka menengah				
<u>Penerbitan tahun 2019</u>				
Jatuh tempo 2031	500.000.000	99,42%	5 November 2031	1,88%
<u>Penerbitan tahun 2018</u>				
Jatuh tempo 2025	500.000.000	99,22%	25 Oktober 2025	2,88%
Jumlah	1.000.000.000			

Keterangan	Pokok JPY	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Obligasi				
<u>Penerbitan tahun 2019</u>				
Jatuh tempo 2022	3.700.000.000	100%	20 September 2022	0,430%
Jatuh tempo 2024	18.500.000.000	100%	20 September 2024	0,870%
Jatuh tempo 2029	1.000.000.000	100%	20 September 2029	1,050%
Jumlah	23.200.000.000			

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan efek bersifat utang di atas tidak memiliki ketentuan yang membatasi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.



6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0645) yang dalam laporannya tanggal 21 Juli 2020 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan atas hal-hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, dan juga menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Laporan Keuangan Interim 31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang telah direviu oleh Akuntan Publik yang terbit pada tanggal 19 Juni 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Aset Tidak Lancar	1.453.404.424	1.433.688.340	1.379.072.494	1.241.160.406
Aset Lancar	136.082.475	151.366.673	113.415.251	93.797.251
Jumlah Aset	1.589.486.899	1.585.055.013	1.492.487.745	1.334.957.657
Jumlah Ekuitas	894.687.956	929.380.413	927.413.857	869.416.604
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	537.006.844	496.376.447	407.177.934	326.466.395
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	157.792.099	159.298.153	157.895.954	139.074.658
Jumlah Liabilitas	694.798.943	655.674.600	565.073.888	465.541.053

*tidak diaudit



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Usaha	72.700.371	68.918.963	285.640.589	272.897.742	255.295.243
Beban Usaha	78.790.779	73.635.316	315.440.938	308.188.889	275.474.094
Rugi Usaha Sebelum Subsidi	(6.090.408)	(4.716.353)	(29.800.349)	(35.291.147)	(20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah	12.899.839	11.527.703	51.711.774	48.101.754	45.738.215
Pendapatan Kompensasi	-	2.112.604	22.253.517	23.173.464	-
Laba Usaha Setelah Subsidi	6.809.431	8.923.954	44.164.942	35.984.071	25.559.364
Laba Sebelum Pajak	(53.926.655)	6.251.257	26.119.210	19.900.838	8.544.072
Laba Tahun Berjalan	(38.880.906)	4.157.845	4.322.130	11.575.756	4.428.117
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	4.723.809	(706.865)	(4.295.591)	47.387.046	(10.697.667)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(34.157.097)	3.450.980	26.539	58.962.802	(6.269.550)
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	(337.526)	37.722	37.516	105.332	50.541

*tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan				
Aset	5,96%	6,20%	11,80%	4,93%
Liabilitas	22,11%	16,03%	21,38%	18,22%
Ekuitas	(3,91%)	0,21%	6,67%	(1,02%)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	3,68%	4,48%	14,33%	7,18%
Beban usaha	7,00%	2,35%	11,88%	8,26%
Laba usaha setelah subsidi	(23,69%)	22,73%	40,79%	(3,24%)
Laba (rugi) sebelum pajak	(962,65%)	31,25%	132,92%	(37,08%)
Laba tahun berjalan	(1035,12%)	(62,66%)	161,41%	(45,67%)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(1089,78%)	(99,95%)	(1040,46%)	(203,31%)

Rasio usaha dan keuangan (%), kecuali dinyatakan lain

Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah dan pendapatan kompensasi	(45,42)	1,20	3,36	1,47
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas	(4,35)	0,47	1,25	0,51
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset	(2,45)	0,27	0,78	0,33
Aset tetap terhadap Laba (Rugi) tahun berjalan	(3.565,12)	32.407,29	11.545,49	27.202,72
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	30,74	12,96	9,67	14,05
Perputaran material	0,07	0,41	0,40	0,50
Perputaran aset tetap	0,05x	0,20x	0,21x	0,25x
Perputaran piutang pelanggan	2,99	11,28	11,39	11,16
Umur piutang pelanggan	29,09 hari	32,35 hari	32,05 hari	32,70 hari
Solvabilitas	0,44x	0,41x	0,38x	0,35x
Likuiditas	0,86x	0,95x	0,72x	0,67x
Rasio ekuitas terhadap aset	56,29	58,63	62,14	65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	64,54	66,35	69,39	72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	258,13	282,18	328,23	368,97
Rasio lancar	86,24	95,02	71,83	67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	77,66	70,55	60,93	53,55
Rasio utang terhadap jumlah aset	43,71	41,37	37,86	34,87

*tidak diaudit



Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	31 Desember 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	28,2%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	3,32x
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	547%

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kontribusi terhadap			
						Total Aset ⁽¹⁾⁽³⁾	Total Liabilitas ⁽¹⁾⁽³⁾	Pendapatan ⁽²⁾⁽³⁾	Laba Sebelum Pajak ⁽²⁾⁽³⁾
1	PT Indonesia Power ("PT IP")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	11,97%	1,18%	14,91%	38,49%
2	PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PT PJB")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	10,93%	1,44%	13,92%	36,81%
3	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PT PLN Batam")	Penyedia tenaga listrik	99,99%	2000	Beroperasi	1,26%	1,86%	1,90%	4,40%
4	PT Indonesia Comnets Plus ("PT ICON+")	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi	99,99%	2000	Beroperasi	0,23%	0,16%	0,89%	2,70%
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PT PLNE")	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi	99,90%	2003	Beroperasi	0,07%	0,08%	0,35%	0,51%
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PT PLNT")	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi, pelayanan billman	99,97%	2004	Beroperasi	0,03%	0,05%	0,24%	0,17%
7	Majapahit Holding BV ("MH")	Lembaga keuangan	100,00%	2006	Beroperasi	0,68%	1,59%	0,002%	0,02%
8	PT PLN Batubara ("PT PLN Batubara")	Perdagangan batubara	99,99%	2009	Beroperasi	0,44%	0,81%	6,11%	2,40%
9	PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PT PLNGG")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	2010	Beroperasi	0,02%	0,04%	0,003%	0,01%
10	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("PT BA")	Pelayaran	99,99%	2011	Beroperasi	0,11%	0,17%	0,57%	0,49%
11	PT Haleyora Power ("PT HP")	Jasa ketenagalistrikan	99,99%	2013	Beroperasi	0,06%	0,04%	0,88%	0,94%

Catatan:

- (1) Pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.
- (3) Sebelum eliminasi
- (4) nm : menjadi nol karena pembulatan



8. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Pengendalian dilakukan secara langsung oleh Pemerintah terhadap Perseroan sebagaimana Tarif Listrik yang diatur langsung oleh Pemerintah sehingga dapat berdampak material atas kondisi keuangan Perseroan

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- 1) Apabila harga BBM, gas alam atau batubara naik, beban usaha Perseroan akan meningkat sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan
- 2) Ketidakmampuan pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit tenaga listrik lainnya Perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan dapat menghambat
- 3) Perseroan telah melakukan perubahan pencatatan Perhitungan PJBL IPP sehingga mengakibatkan informasi keuangan Perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk diperbandingkan
- 4) Risiko yang terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tambahan dan akuisisi aset pembangkit listrik lainnya, khususnya keberhasilan penyelesaian FTP dan implementasi Program 35.000 MW
- 5) Keterlambatan atau kendala dalam memproses hak atas tanah dapat mengganggu rencana ekspansi Perseroan
- 6) Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi di masa mendatang untuk menutup biaya-biaya yang timbul dari pembangkitan tenaga listrik atau subsidi akan diterima oleh Perseroan tepat pada waktunya
- 7) Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas yang boleh ditagihkan oleh Perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh Pemerintah
- 8) Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, gardu induk dan pembangkitan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan
- 9) Perseroan dapat menghadapi keterlambatan atau kendala lain dalam memperoleh persetujuan Pemerintah atau persetujuan terkait lainnya sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan
- 10) Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk proyek-proyek Perseroan, yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan
- 11) Sentimen publik yang negatif dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan
- 12) Berdasarkan UU No. 30/2009, prosedur untuk menetapkan tarif listrik telah berubah dan setiap daerah dapat memiliki tarif yang berbeda, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan
- 13) Kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan memiliki risiko pertanggungjawaban
- 14) Perseroan dapat menderita kerugian atas hal-hal yang tidak diasuransikan, atau nilai pertanggungjawaban dalam asuransi tidak cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan
- 15) Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batubara dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan
- 16) Hasil aktual Perseroan berbeda secara signifikan dari perkiraan- perkiraan dan estimasi yang telah ditetapkan
- 17) Depresiasi nilai rupiah dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan
- 18) Anggota dari manajemen, karyawan diselidiki, diinvestigasi dalam kasus-kasus tertentu yang dihukum karena penipuan dan korupsi, dan ketidakmampuan Perseroan untuk mendeteksi



- dan/atau mencegah insiden sebelum atau sesudahnya dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan
- 19) Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kendala operasional seperti susut jaringan dan pencurian listrik serta kejadian *force majeure*
 - 20) Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah
 - 21) Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendanai operasional dan kebutuhan belanja modal Perseroan di masa mendatang dan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain
 - 22) Perseroan mungkin tidak berhasil menegosiasikan harga BBM dengan Pertamina sebagai pemasok BBM utama Perseroan
3. Risiko Umum
- 1) Perekonomian domestik, regional atau global dapat berubah secara material dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan
 - 2) Interpretasi dan implementasi hukum dalam pemerintahan di Indonesia mengandung ketidakpastian dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan
 - 3) Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan
 - 4) Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan bagi Perseroan
4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Dan Sukuk Ijarah
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang;
 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Seluruh Faktor Risiko yang dihadapi perseroan telah diungkapkan dan penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dapat dilihat dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Obligasi Seri E.



Keterangan ringkas mengenai Obligasi yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2025;
- b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2027; dan
- c. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma Sembilan nol persen) per tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2030.
- d. Obligasi Seri D dalam jumlah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri D secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2035.
- e. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma delapan enam persen) per tahun dan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 8 September 2040.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.



Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020
2	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021
3	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021
4	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021
5	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021
6	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022
7	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022
8	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022
9	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022
10	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023
11	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023
12	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023
13	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023
14	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
15	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
16	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
17	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
18	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025
19	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025
20	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025
21		8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025
22		8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026
23		8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026
24		8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026
25		8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026
26		8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027
27		8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027
28		8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027
29			8 Desember 2027	8 Desember 2027	8 Desember 2027
30			8 Maret 2028	8 Maret 2028	8 Maret 2028
31			8 Juni 2028	8 Juni 2028	8 Juni 2028
32			8 September 2028	8 September 2028	8 September 2028
33			8 Desember 2028	8 Desember 2028	8 Desember 2028
34			8 Maret 2029	8 Maret 2029	8 Maret 2029
35			8 Juni 2029	8 Juni 2029	8 Juni 2029
36			8 September 2029	8 September 2029	8 September 2029
37			8 Desember 2029	8 Desember 2029	8 Desember 2029
38			8 Maret 2030	8 Maret 2030	8 Maret 2030
39			8 Juni 2030	8 Juni 2030	8 Juni 2030
40			8 September 2030	8 September 2030	8 September 2030
41				8 Desember 2030	8 Desember 2030
42				8 Maret 2031	8 Maret 2031
43				8 Juni 2031	8 Juni 2031
44				8 September 2031	8 September 2031
45				8 Desember 2031	8 Desember 2031
46				8 Maret 2032	8 Maret 2032



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
47				8 Juni 2032	8 Juni 2032
48				8 September 2032	8 September 2032
49				8 Desember 2032	8 Desember 2032
50				8 Maret 2033	8 Maret 2033
51				8 Juni 2033	8 Juni 2033
52				8 September 2033	8 September 2033
53				8 Desember 2033	8 Desember 2033
54				8 Maret 2034	8 Maret 2034
55				8 Juni 2034	8 Juni 2034
56				8 September 2034	8 September 2034
57				8 Desember 2034	8 Desember 2034
58				8 Maret 2035	8 Maret 2035
59				8 Juni 2035	8 Juni 2035
60				8 September 2035	8 September 2035
61					8 Desember 2035
62					8 Maret 2036
63					8 Juni 2036
64					8 September 2036
65					8 Desember 2036
66					8 Maret 2037
67					8 Juni 2037
68					8 September 2037
69					8 Desember 2037
70					8 Maret 2038
71					8 Juni 2038
72					8 September 2038
73					8 Desember 2038
74					8 Maret 2039
75					8 Juni 2039
76					8 September 2039
77					8 Desember 2039
78					8 Maret 2040
79					8 Juni 2040
80					8 September 2040

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;



- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

- i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- ii. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

1.9. Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

1.11. Pembelian Kembali Obligasi

- a) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
- n. pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
- q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.



- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO;
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- d) Pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- e) informasi tersebut meliputi antara lain :
 - a) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

1.12. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

1.13. Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Dengan demikian, Obligasi ini mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

1.14. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

- 1. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1.1. Memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali:
 - 1. penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2. penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin Perjanjian Perwaliamanatan tentang Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
 - 3. penanggungan/penjaminan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha termasuk sehubungan dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan praktek usaha Perseroan yang wajar. Dengan ketentuan bahwa total penanggungan atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam Poin 1 angka 1 butir 3 tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit. Yang dimaksud dengan total penanggungan atau penjaminan tidak termasuk total penanggungan atau penjaminan



yang timbul akibat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan Standar Akuntansi Keuangan di waktu mendatang.

- 1.2. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 1. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 2. pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim;
 3. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan program pemerintah;
 4. pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan;dengan ketentuan:
 - bahwa jumlah maksimum pinjaman pada angka (2) dan (3) setiap saat tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.
 - untuk pinjaman pada angka (1) dan (4) tidak dibatasi besarnya.
- 1.3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki Aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.Ketentuan ini juga tidak berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah terhadap Perseroan.
- 1.4. Menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Aset tetap Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
 1. menjual atau mengalihkan Aset Tetap sehubungan dengan penggantian; atau
 2. pembaruan Aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau
 3. pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar;
 4. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema Syariah, termasuk obligasi syariah, ijarah, ishtisna, murabahah;
 5. sehubungan dengan Program *Fast Track* dan program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu Mega Watt) serta penugasan pemerintah lainnya.dengan ketentuan:
 - bahwa total penjualan atau pengalihan Aset Tetap pada angka (1), (2) dan (3) untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang telah diaudit;



- bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan Poin 1.4.3 tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh Perseroan sehubungan Program *Fast Track* dan program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu Mega Watt) serta penugasan pemerintah lainnya atau terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan.
 - untuk kegiatan pada angka (4) dan (5) tidak dibatasi besarnya.
- 1.5. Memberikan ijin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang bersangkutan;
 - 1.6. Melakukan pengeluaran Obligasi atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Obligasi, kecuali utang Perseroan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
 - 1.7. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
 - 1.8. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian Perwaliamanatan persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:
 - a. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui; dan
 - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
 3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 - b. memelihara setiap laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan menjaga kinerja keuangan Perseroan sehingga kelangsungan usaha Perseroan berjalan dengan baik sesuai ketentuan, tidak secara material dapat mempengaruhi kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi direkening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email;
 - d. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Jumlah denda tersebut dihitung harian (berdasarkan Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.



- Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- e. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah single A- (atau yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat Emisi.
 - f. menjalankan usaha dengan sebaik baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
 - g. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
 - i. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya perubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan.
 - j. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
 - (ii) Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
 - (iii) Setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain dengan hak preferen yang memiliki kedudukan utang lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.
 - k. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 - l. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - (i) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - (ii) salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - (iii) Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir.
 - (iv) Laporan keuangan (konsolidasi) tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 1. Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir-bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau;
 2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau
 3. Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan



- keuangan tersebut kepada OJK atau selambat lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan.
- (v) Laporan keuangan (konsolidasi) triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 1. Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK, atau
 2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
 3. jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK.
 - (vi) Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan laporan tersebut diserahkan kepada OJK.
 - (vii) Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
 1. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan pembatasan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
 2. Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Obligasi.
 3. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi menjadi berlaku dan harus dilaksanakan.
 4. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 5. Pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.
 6. Pernyataan terkait pemenuhan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan kepada Wali Amanat bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf l angka (iii) Perjanjian Perwaliamanatan.
 - m. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
 - n. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan denganketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Emiten;
 - o. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
 - p. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - q. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- r. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal -yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- s. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali-Amanat;
- t. melakukan pemeringkatan Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan perubahannya (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit -dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum.
 - 4) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf t angka 1) butir i dan angka 2) butir i Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf t angka 4 butir i Perjanjian Perwaliamanatan berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.



- u. menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.

1.15. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 10.2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat ; atau;
 - b. Pasal 10.2 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat ;
 - c. Pasal 10.2 huruf c, d dan e Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

RUPO dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan keputusan RUPO Obligasi menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadiankejadian atau halhal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh satu atau lebih kreditur Perseroan (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt/interest bearing*) dalam jumlah -minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,(satu triliun rupiah) atau 1% (satu persen) dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlahyang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan) atau;
 - b. Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
 - c. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium).



- 3 Apabila :
- a. Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan -sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan atau Entitas Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - f. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit.

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan atas nama Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak



- termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut-terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a , huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengantembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; agenda RUPO; pihak yang mengajukan usulan RUPO; Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak-suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut.
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 7. Ketentuan teknis pelaksanaan RUPO:
 - a. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Pemegang Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang



- mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan menyerahkan kepada Wali Amanat disertai dengan daftar pemegang obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Suara abstain/blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPO.
8. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.6 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.



- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang-Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi -yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka(1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum



- dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5;
 9. Biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 10. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notaril oleh notaris. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO karena keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat dan setiap Pemegang Obligasi tidak dapat bertindak sendiri yang bertentangan dengan hasil RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan-dengan Obligasi.
 12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30(tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Yang Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian -disempurnakan atau diubah oleh Emiten dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.



2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP376.500.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Desember 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

2.1. Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020.

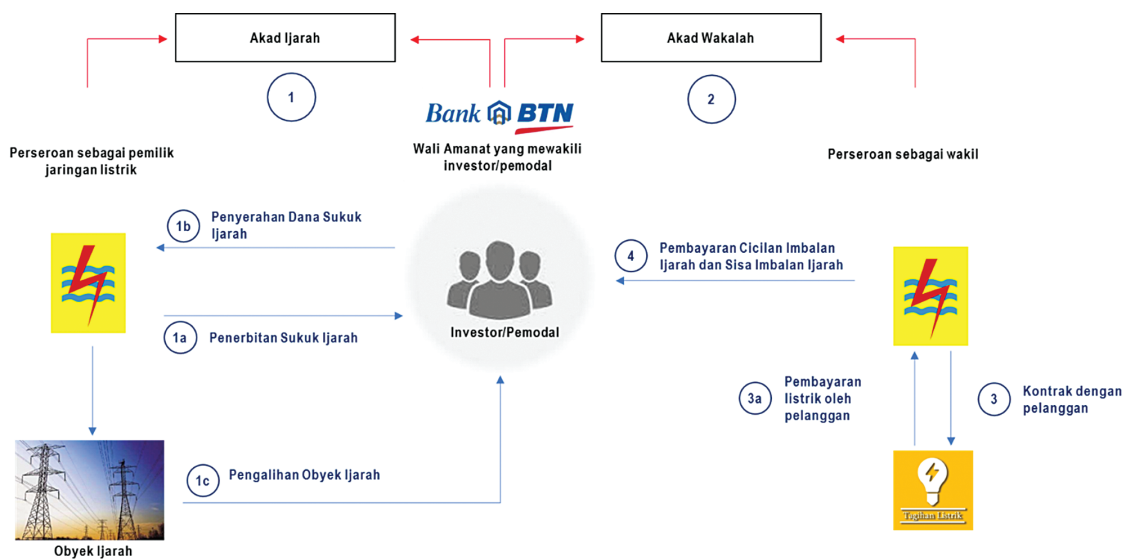
2.2. Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

2.3. Objek Ijarah

Objek Ijarah berupa jaringan listrik di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.

2.4. Skema Sukuk Ijarah



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
 - b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - c. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah. Berdasarkan Akad Ijarah, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah berupa Jaringan Listrik berupa peralatan distribusi terpasang di UP3 Menteng dengan nilai Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali



Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan. Jenis dan spesifikasi Objek Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	UP3 Menteng	Panjang saluran	Tiang	
		(kms)	Besi (buah)	Beton (buah)
1.	SALURAN TEGANGAN MENENGAH			
	KABEL TANAH 20 KV	1.577.618	-	60
	Jumlah	1.577.618	-	60
2.	SALURAN TEGANGAN RENDAH			
	SALURAN UDARA	1.834.327	21.865	6.190
	KABEL TANAH	210.817	-	-
	Jumlah	2.045.144	21.865	6.190

Pendapatan yang dihasilkan oleh Objek Ijarah per 31 Desember 2019 adalah Rp 552.722 juta untuk satu bulan atau Rp6.454.691 juta untuk satu tahun.

Objek Ijarah (Ma'jur) dalam Sukuk ini adalah Jaringan Listrik milik Perseroan beserta kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada pemegang Sukuk melalui akad Ijarah. Obyek Ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan kepada pihak ketiga/pelanggan; Objek ijarah secara spesifik adalah Jaringan Listrik berupa Peralatan Distribusi Terpasang UP3 Menteng. Objek Ijarah ini hanya digunakan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV PLN Tahun 2020 dan tidak dijaminan kepada pihak lainnya.

Masa Pengalihan Objek Ijarah akan berakhir selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada) telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah atau pada tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Pada saat berakhirnya Masa Pengalihan Objek Ijarah, Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk seketika mengalihkan kembali Objek Ijarah yang telah diterimanya berdasarkan Akad Ijarah ini kepada Perseroan tanpa adanya kondisi atau syarat apapun.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) termasuk kejadian, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, angin topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari, kerusakan mekanik, dan elektronik pada Objek Ijarah dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakannya Objek Ijarah, hal mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Perseroan akan mengganti Objek Ijarah dengan manfaat lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah ("Objek Ijarah Pengganti").

Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dengan memperhatikan prosedur penggantian atau penambahan Objek Ijarah sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.

2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk



- Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
- mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
 - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.
- Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan akan berakhir dengan berakhirnya Akad Ijarah.

3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.
 - Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2020 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk tahap-tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN (Jika ada).

2.5. Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

2.6. Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi.



- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020	8 Desember 2020
2	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021
3	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021
4	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021
5	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021
6	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022
7	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022
8	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022
9	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022
10	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023
11	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023



Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
12	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023
13	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023
14	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
15	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
16	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
17	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
18	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025	8 Maret 2025
19	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025	8 Juni 2025
20	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025	8 September 2025
21		8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025
22		8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026	8 Maret 2026
23		8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026	8 Juni 2026
24		8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026	8 September 2026
25		8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026	8 Desember 2026
26		8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027	8 Maret 2027
27		8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027	8 Juni 2027
28		8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027	8 September 2027
29			8 Desember 2027	8 Desember 2027	8 Desember 2027
30			8 Maret 2028	8 Maret 2028	8 Maret 2028
31			8 Juni 2028	8 Juni 2028	8 Juni 2028
32			8 September 2028	8 September 2028	8 September 2028
33			8 Desember 2028	8 Desember 2028	8 Desember 2028
34			8 Maret 2029	8 Maret 2029	8 Maret 2029
35			8 Juni 2029	8 Juni 2029	8 Juni 2029
36			8 September 2029	8 September 2029	8 September 2029
37			8 Desember 2029	8 Desember 2029	8 Desember 2029
38			8 Maret 2030	8 Maret 2030	8 Maret 2030
39			8 Juni 2030	8 Juni 2030	8 Juni 2030
40			8 September 2030	8 September 2030	8 September 2030
41				8 Desember 2030	8 Desember 2030
42				8 Maret 2031	8 Maret 2031
43				8 Juni 2031	8 Juni 2031
44				8 September 2031	8 September 2031
45				8 Desember 2031	8 Desember 2031
46				8 Maret 2032	8 Maret 2032
47				8 Juni 2032	8 Juni 2032
48				8 September 2032	8 September 2032
49				8 Desember 2032	8 Desember 2032
50				8 Maret 2033	8 Maret 2033
51				8 Juni 2033	8 Juni 2033
52				8 September 2033	8 September 2033
53				8 Desember 2033	8 Desember 2033
54				8 Maret 2034	8 Maret 2034
55				8 Juni 2034	8 Juni 2034
56				8 September 2034	8 September 2034
57				8 Desember 2034	8 Desember 2034
58				8 Maret 2035	8 Maret 2035
59				8 Juni 2035	8 Juni 2035
60				8 September 2035	8 September 2035
61					8 Desember 2035
62					8 Maret 2036
63					8 Juni 2036
64					8 September 2036
65					8 Desember 2036
66					8 Maret 2037
67					8 Juni 2037



Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
68					8 September 2037
69					8 Desember 2037
70					8 Maret 2038
71					8 Juni 2038
72					8 September 2038
73					8 Desember 2038
74					8 Maret 2039
75					8 Juni 2039
76					8 September 2039
77					8 Desember 2039
78					8 Maret 2040
79					8 Juni 2040
80					8 September 2040

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

2.7. Tata Cara Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

- i. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan;
- ii. Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
- iii. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
- v. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi tanggung jawab Perseroan;
- vi. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.



2.8. Tata Cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah

- i. Sisa Imbalan ijarah akan dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah;
- ii. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang bersangkutan;
- iv. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi tanggung jawab Perseroan;
- v. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- vi. Perseroan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada;.

2.9. Ringkasan Akad Syariah

Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah No. 0145.Pj/KEU.01.08/B01060100/2020 tanggal 26 Juni 2020. Perseroan berniat menerbitkan Sukuk Ijarah berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 56 tanggal 26 Juni 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah tersebut, Perseroan telah mengadakan akad-akad yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Objek Ijarah yang memenuhi kaidah syariah, antara lain berdasarkan Akad Ijarah antara Perseroan dengan Wali Amanat, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah kepada Wali Amanat dan Wali Amanat menyetujui pengalihan hak manfaat atas Objek Ijarah yang bersumber dari kegiatan Perseroan Emiten yang akan diserahkan oleh Emiten kepada Wali Amanat.

Berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian, Emiten bertindak selaku mu'jir dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat bertindak selaku mustajir. Kemudian berdasarkan Akad Wakalah No. 0144.Pj/KEU.01.08/B01060100/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara Wali Amanat dan Perseroan, Pemegang Sukuk Ijarah yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat sebagai muwakil memberikan kuasa kepada Perseroan yang bertindak selaku wakil untuk membuat dan melangsungkan perjanjian atau melakukan Akad Ijarah dengan para pemakai/penyewa sebagai pengguna Objek Ijarah dan atas perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani oleh wakil dari pihak ketiga sebagai pemakai/penyewa Objek Ijarah disepakati untuk tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang atas perjanjian tersebut. Dalam Akad Ijarah antara Perseroan dan Wali Amanat, disepakati bahwa Emiten mengalihkan nilai manfaat atas Objek Ijarah dengan jumlah Rp376.500.000.000,- (tiga ratus ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah.



2.10. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

2.11. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.12. Sumber Dana yang Digunakan untuk melakukan Pembayaran

Sumber dana pembayaran dan/atau pelunasan Imbalan Ijarah berasal dari dana yang diperoleh dari kegiatan usaha Emiten dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.13. Prosedur Penggantian atau Penambahan Objek Ijarah

1. Dalam hal terdapat rencana perubahan Objek Ijarah karena alasan apapun, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Objek Ijarah Pengganti dan meminta Pihak Kedua untuk menyelenggarakan RUPSI sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Dalam hal terdapat penambahan Objek Ijarah karena adanya penurunan nilai dari Objek Ijarah ("Objek Ijarah tambahan"), maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Objek Ijarah Tambahan.
3. Nilai Objek Ijarah Pengganti yang ditetapkan harus sama dengan jumlah nilai Objek ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau nilai Objek ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah, sehingga nilai Objek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah.
4. Setelah RUPSI menyetujui penetapan Objek ijarah Pengganti, dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, Para Pihak wajib menandatangani revisi Lampiran I yang menjelaskan tentang spesifikasi Objek ijarah Pengganti.
5. Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diperolehnya persetujuan dari Wali Amanat, Perseroan dan Wali Amanat wajib menandatangani perubahan Akad Ijarah.
6. Penggantian Objek Ijarah Pengganti atau Objek ijarah Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Objek ijarah Pengganti atau Objek ijarah Tambahan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 diatas.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Pasal 5.20 perihal syarat-syata Sukuk Ijarah, segala perubahan aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah memerlukan pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Emiten sebelum dilaksanakannya RUPSI. Pernyataan tersebut termasuk pendapat bahwa Objek Ijarah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal. Pernyataan pada Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Segala perubahan atas jenis Akad Ijarah dan isi dari Akad Ijarah sehubungan dengan Sukuk Ijarah, hanya dapat dilakukan jika Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Emiten telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Emiten telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Emiten sebelum dilaksanakannya RUPSI.
3. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Emiten, maka Emiten wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur didalam Perjanjian Perwaliamanatan.



2.14. Syarat dan Ketentuan dalam hal Perseroan Akan Mengubah Jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau Aset yang Menjadi Dasar Sukuk

Segala perubahan atas jenis Akad Ijarah dan isi dari Akad Ijarah sehubungan dengan Sukuk Ijarah, hanya dapat dilakukan jika Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Emiten telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Emiten telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Emiten sebelum dilaksanakannya RUPSI.
3. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Emiten, maka Emiten wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2.15. Keterbukaan Informasi Terkait Zakat

Pada Penerbitan Sukuk Ijarah ini Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa Sukuk.

2.16. Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

2.17. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- 3) pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 5) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 6) pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
- 7) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.
- 8) pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- 9) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang :
 1. periode penawaran pembelian kembali;



2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 8. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan;
 3. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
- dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
- 14) pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- 15) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
- 16) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
- 17) Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Sukuk Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSI;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.



- ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. informasi tersebut meliputi antara lain :
 - a) jumlah nominal Sukuk Ijarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

2.18. Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

2.19. Hak Senioritas Atas Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Dengan demikian, Sukuk Ijarah ini mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

2.20. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

1. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1.1 memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali:
 1. penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 2. penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Poin 1.3.
 3. penanggungan/penjaminan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan praktek usaha Perseroan yang wajar, kecuali untuk perjanjian pembelian tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*). Dengan ketentuan bahwa total penanggungan atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam Poin 1 angka 1 butir 3 tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Yang dimaksud dengan total penanggungan atau penjaminan tidak termasuk total penanggungan atau penjaminan yang timbul akibat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan Standar Akuntansi Keuangan di waktu mendatang.



- 1.2. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 1. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 2. pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim;
 3. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan program pemerintah;
 4. pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan;dengan ketentuan:
 - bahwa jumlah maksimum pinjaman pada angka (2) dan (3) setiap saat tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.
 - untuk pinjaman pada angka (1) dan (4) tidak dibatasi besarnya.
- 1.3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban berdasarkan Sukuk Ijarah dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki Aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk Ijarah dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
Ketentuan ini juga tidak berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah terhadap Perseroan.
- 1.4. Menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Aset tetap Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
 1. menjual atau mengalihkan Aset Tetap sehubungan dengan penggantian; atau
 2. pembaruan Aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau
 3. pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar;
 4. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema Syariah, termasuk Sukuk, ijarah, ishtisna, murabahah;
 5. sehubungan dengan Program *Fast Track* dan program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu Mega Watt) serta penugasan pemerintah lainnya.dengan ketentuan:
 - bahwa total penjualan atau pengalihan Aset Tetap pada angka (1), (2) dan (3) untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang telah diaudit;
 - bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan Pasal 11.1.4.3 tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh Perseroan sehubungan Program *Fast Track* dan program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu Mega Watt) serta penugasan pemerintah lainnya atau terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan.
 - untuk kegiatan pada angka (4) dan (5) tidak dibatasi besarnya.



- 1.5. Memberikan ijin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang bersangkutan;
- 1.6. Melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen hutang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Ijarah, kecuali hutang Perseroan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
- 1.7. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
- 1.8. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk diberikan dengan ketentuan:
 - a. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat Sukuk wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui; dan
 - c. jika Wali Amanat Sukuk meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 - b. memelihara setiap laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan menjaga kinerja keuangan Perseroan sehingga kelangsungan usaha Perseroan berjalan dengan baik sesuai ketentuan, tidak secara material dapat mempengaruhi kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - c. menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email;
 - d. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian (berdasarkan Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;



- e. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah tidak lebih rendah single A- (atau yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat Emisi.
- f. menjalankan usaha dengan sebaik baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;
- g. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
- i. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya perubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan.
- j. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
 - (ii) Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - (iii) Setiap melakukan pengeluaran sukuk ijarah atau instrumen pembiayaan lain dengan hak preferen yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Ijarah.
- k. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- l. menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk:
 - (i) Salinan dari laporan - laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - (ii) salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - (iii) Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir.
 - (iv) Laporan keuangan (konsolidasi) tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 - 1. Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau;
 - 2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya padaakhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan, atau
 - 3. Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya ada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan.



- (v) Laporan keuangan (konsolidasi) triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 - 1. Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK, atau
 - 2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
 - 3. jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK.
- (vi) Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada OJK.
- (vii) Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
 - 1. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
 - 2. Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau sesuai dengan persyaratan Sukuk Ijarah.
 - 3. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Sukuk Ijarah menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah menjadi berlaku dan harus dilaksanakan.
 - 4. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 - 5. Pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Sukuk Ijarah yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.
 - 6. Pernyataan terkait pemenuhan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah kepada Wali Amanat Sukuk bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3 huruf l angka (iii) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- m. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- n. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
- o. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Poin 2.21 perihal Kelalaian Perseroan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- p. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- q. memberi ijin kepada Wali Amanat Sukuk atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat Sukuk dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain



sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- r. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- s. menerbitkan dan menyerahkan Sertipikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah dan menyampaikan fotokopi Sertipikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat Sukuk;
- t. melakukan pemeringkatan Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan perubahannya (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum.
 - 4) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3 huruf t angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3 huruf t angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.



- u. menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.

2.21. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 12.2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk; atau
 - b. Pasal 12.2 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk;
 - c. Pasal 12.2 huruf c dan d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk;
 - Maka Wali Amanat Sukuk berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat Sukuk atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
 - RUPSI dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah. Jika RUPSI memutuskan agar Wali Amanat Sukuk melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan keputusan RUPSI Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat Sukuk dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
 - b. Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh satu atau lebih kreditur Perseroan (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt/interest bearing*) dalam jumlah minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau 1% (satu persen) dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan); atau
 - c. Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain huruf a di atas); atau
 - d. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, termasuk



pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Ijarah; atau

- e. adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*).
- 3 Apabila :
- a. Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - c. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - d. Perseroan atau Entitas Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - e. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - f. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit.

Maka Wali Amanat Sukuk berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat Sukuk berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

2.22. RUPSI

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, aset yang menjadi dasar sukuk, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat Sukuk dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan POJK No. 20/2020;



- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat Sukuk; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk wajib melakukan pemanggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI :
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPSI, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - d. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut



- h. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Ketentuan teknis pelaksanaan RUPSI:
- a. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13.3, maka Pemegang Sukuk Ijarah mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindah bukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan menyerahkan kepada Wali Amanat disertai dengan daftar pemegang sukuk ijarah dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Suara abstain/blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSI.
8. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13.6 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -bagian dari jumlah Sukuk Ijarah



- yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
2. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.



- ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - iii. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka(3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - v. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSI yang keempat.
 - vii. RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - viii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5;
9. Biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 10. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notaris oleh notaris.
 11. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI karena keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat dan setiap Pemegang Sukuk Ijarah tidak dapat bertindak sendiri yang bertentangan dengan hasil RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
 12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 13. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Imbalan Sukuk Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.



2.23. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat No. 11966/KEU.01.08/BN01000000/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Penunjukan kembali Tim Ahli Syariah, DSN-MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah dan memberikan opini syariah, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Dr. Hasanudin, Mag (Ketua)	Ketua
2.	Bapak Iggi H. Achsien, SE, MBA	Anggota

Tim Ahli Syariah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk tahap-tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN (Jika ada).

3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-788/PEF-DIR/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahun 2020-2022 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-789/PEF-DIR/VII/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahun 2020-2022 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan peringkat:

${}_{id}AAA$ (*Triple A*)

${}_{id}AAA_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 25 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2021

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah.

${}_{id}AAA$ atau ${}_{id}AAA_{sy}$: Efek bersifat utang dengan peringkat ${}_{id}AAA$ atau ${}_{id}AAA_{sy}$ merupakan Efek bersifat utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

${}_{id}AA$ atau ${}_{id}AA_{sy}$: Efek bersifat utang dengan peringkat ${}_{id}AA$ atau ${}_{id}AA_{sy}$ memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.



- ^{id}A atau ^{id}A_{sy} : Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id}A atau ^{id}A_{sy} memiliki kemampuan obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- ^{id}BBB atau ^{id}BBB_{sy} : Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id}BBB atau ^{id}BBB_{sy} didukung oleh kemampuan obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- ^{id}BB atau ^{id}BB_{sy} : Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id}BB atau ^{id}BB_{sy} menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- ^{id}B atau ^{id}B_{sy} : Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id}B atau ^{id}B_{sy} menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- ^{id}CCC atau ^{id}CCC_{sy} : Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id}CCC atau ^{id}CCC_{sy} menunjukkan Efek bersifat utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- ^{id}D atau ^{id}D_{sy} : Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id}D atau ^{id}D_{sy} menandakan Efek bersifat yang macet atau obligornya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Pertimbangan (Rationale)

Obligor dengan peringkat idAAA memiliki rating tertinggi PEFINDO. Kapasitasnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior. Peringkat perusahaan mencerminkan dukungan yang kuat dari pemerintah Indonesia dan telah terbukti, fleksibilitas keuangan yang kuat, posisi pasar yang superior dan permintaan listrik domestik yang terus meningkat. Peringkat masih dibatasi oleh struktur permodalan dan proteksi arus kas yang tetap agresif untuk mendukung rencana belanja modal (*capex*) yang signifikan, Peringkat dapat diturunkan jika PEFINDO menilai pengurangan dukungan dari pemerintah Perseroan adalah perusahaan milik negara yang menghasilkan, mentransmisikan dan mendistribusikan listrik di seluruh negeri.

4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Obligasi Berkelanjutan

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV;
- iii. Obligasi Berkelanjutan IV memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.



Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 29 Juni 2020 dan Laporan Akuntan Independen No. 2060620/DSN/1116 tanggal 26 Juni 2020.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Dalam hal Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV dilakukan tidak bersamaan dengan Penawaran Umum Efek bersifat utang, PUB Sukuk dapat dilakukan oleh pihak yang telah menjadi emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV ;
- iii. Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- iv. Dalam hal terdapat perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk pada tahapan penerbitan Sukuk selanjutnya dalam rangka PUB Sukuk, maka Perseroan harus menyampaikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk tersebut.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 29 Juni 2020 dan Laporan Akuntan Independen No. 2060620/DSN/1116 tanggal 26 Juni 2020.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah:

Nama Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Alamat : Institutional Banking Division
Menara BTN, lantai 18,
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130
Tel. : (021) 6336789 ext. 1847
Email : trustee.btn@gmail.com
Untuk Perhatian : Capital Market Department

Berdasarkan POJK No.20/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- ii. Penggantian Wali Amanat Obligasi dan Sukuk dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPO dan/atau RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - i. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - j. Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui RUPO/RUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan ; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau karena Perseroan tidak membayarkan imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
- a. Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan dan Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Sukuk Ijarah;
 - d. setelah diangkatnya Wali Amanat Obligasi dan Wali Amanat Sukuk baru.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

6. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana POJK No. 18/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 3/2018.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan/atau RUPSI dan memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO dan/atau RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan tembusan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Penempatan dana wajib dilakukan atas nama Perseroan;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan, sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020.



Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV dan Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV dan Tahap V Tahun 2019 yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah habis dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. 0180/KEU.05.03/010501/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III PLN Obligasi Berkelanjutan PLN Tahap IV & Tahap V serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap IV & Tahap V.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait penerbitan Obligasi adalah sekitar 0,367% (nol koma tiga enam tujuh persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,055%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (management fee) sekitar 0,033%; biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,011% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,011%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,178%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,127%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,046% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,005%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,048%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,004%; dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,044%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,086% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait penerbitan Sukuk Ijarah adalah sekitar 0,417% (nol koma empat satu tujuh) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sekitar 0,055%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (management fee) sekitar 0,033%; biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,011% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,011%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,178%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,127%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,046% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,005%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,069%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,004%; dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,044%, Biaya Ahli Syariah sekitar 0,021%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,115% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran.



III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp655.674.600 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	28.121.540
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	
Penerusan pinjaman	35.251.741
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	4.359.569
Utang sewa pembiayaan	11.569.377
Utang bank	184.023.820
Utang obligasi dan sukuk ijarah	174.292.298
Utang listrik swasta	6.431.448
Utang KIK-EBA	1.354.642
Utang pihak berelasi	92
Liabilitas imbalan kerja	50.838.258
Utang lain-lain	133.662
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	496.376.447
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	11.814.735
Pihak berelasi	40.188.048
Pihak ketiga	2.383.288
Utang pajak	16.754.640
Biaya masih harus dibayar	14.235.879
Uang jaminan langganan	150.664
Utang biaya proyek	1.049.231
Pendapatan ditangguhkan	
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	
Penerusan pinjaman	2.725.805
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.998.476
Utang sewa pembiayaan	2.540.107
Utang bank	21.693.338
Utang obligasi dan sukuk ijarah	6.946.478
Utang listrik swasta	399.458
Utang KIK-EBA	586.620
Liabilitas imbalan kerja	5.232.467
Utang lain-lain	30.598.919
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	159.298.153
Jumlah Liabilitas	655.674.600

3.1. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp28.121.540 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2019
Akumulasi rugi fiskal	3.331.340
Liabilitas imbalan kerja	12.415.845
Pendapatan ditangguhkan	241.836
Sewa pembiayaan	(3.091.408)
Aset tetap	(40.920.088)



<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2019
Penyisihan piutang usaha	1.334
Laba dari entitas asosiasi	(100.101)
Lainnya	(298)
Liabilitas Pajak Tangguhan Akhir Tahun	(28.121.540)

3.2. Penerusan Pinjaman

Saldo Penerusan pinjaman Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 35.251.741 juta. Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perseroan untuk membiayai proyek-proyek Perseroan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
Keterangan	31 Desember 2019	Periode¹
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)		
USD		
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	408.209	2004 – 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	254.560	2010 – 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	2.470.985	2011 – 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	497.410	2012 – 2035
IBRD 8280 ID – 1256	1.266.994	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)		
USD		
ADB - 1982 INO – 1170	1.416.119	2004 – 2027
ADB - 1983 INO – 1171	961.857	2004 – 2027
ADB - 2619 INO - 1236	494.253	2010 – 2035
ADB 3015 INO - 1255	594.569	2014 – 2033
ADB 3083 INO - 1257	230.949	2014 – 2033
ADB 8276 INO - 1258	25.569	2014 – 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KfW)		
EUR		
KfW - 95.65.136 - 934a	16.866	1996 – 2020
KfW F 26180 - 1262	200.462	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)		
Yen		
JBIC IP 512 – 1163	4.732.311	2004 - 2033
JBIC IP 513 – 1164	1.444.286	2004 – 2033
JBIC IP 515 – 1177	5.122.730	2004 – 2034
JBIC IP 516 - 1196	57.393	2004 – 2044
JBIC IP 517 – 1178	496.933	2004 – 2044
JBIC IP 525 – 1197	1.719.157	2005 - 2045
JBIC IP 526 – 1198	72.474	2005 – 2045
JBIC IP 527 – 1211	1.117.196	2007 – 2037
JBIC IP 532 - 1214	548.793	2006 – 2048
JBIC IP 537 - 1220	7.439	2009 – 2037
JBIC IP 538 - 1221	2.622.438	2009 – 2047
JBIC IP 539 - 1222	1.097.519	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	177.020	2013 – 2039
JICAIP 556 - 1249	218.392	2013 – 2040
JICA - IP 560- 1253	462.882	2013 – 2053
JBIC IP - 1243	123.684	2012 – 2022
JBIC LA No 1 – 1216	39.508	2008 – 2020
JBIC LA No 3 – 1233	336	2010 – 2020



(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	Periode ¹
JBIC LA No 5 – 1218	88.996	2008 – 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	61.877	2013 – 2025
JICA - IP 561- 1252	89.579	2013 - 2053
JICA - IP 572- 1265	28.800	2016 - 2055
Midland Bank Public Limited Company		
Midland Bank - 798	14.936	1995 – 2020
Midland Bank - 818	686	1995 - 2020
Banque Paribas		
Banque Paribas 1063- GBP EUR	55.413	1998 – 2022
Banque Paribas – 1158	26.753	2002 - 2020
Calyon and BNP Paribas		
EUR BNP Paribas & Calyon 1206	40.085	2006 - 2020
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR		
Kerajaan Belgia - 1185	24.652	2005 – 2033
Efic Australia - AUD 1071	35.123	1997 – 2022
China Exim Bank 1248 – USD	1.202.774	2013 – 2027
China Exim Bank 1260 –USD	3.201.404	2015 – 2029
China Exim Bank 1261-USD	3.623.453	2015 – 2029
AG Francaise 101901F – 1237	126.803	2010 – 2035
AFD – 1254	435.560	2013 – 2028
AFD CID 1039 01H – 1259	112.029	2014 - 2026
Jumlah	38.068.216	
Biaya transaksi belum diamortisasi	(90.670)	
Jumlah bersih	37.977.546	
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun		
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)		
USD		
IBRD - 4712 & 7758 IND – 1165	134.964	2004 – 2023
IBRD - 7905 IND – 1235	11.709	2010 – 2034
IBRD - 7940 IND – 1238	116.756	2011 – 2034
IBRD - 8057 IND – 1244	10.794	2012 - 2035
Asian Development Bank (ADB)		
USD		
ADB - 1982 INO – 1170	122.663	2004 – 2027
ADB - 1983 INO – 1171	83.315	2004 – 2027
ADB - 2619 INO - 1236	14.319	2010 – 2035
ADB 3015 INO - 1255	45.024	2014 – 2033
ADB 3083 INO - 1257	12.644	2014 – 2033
ADB 8276 INO - 1258	1.400	2014 – 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KfW)		
EUR		
KfW - 95.65.136 - 934a	16.866	1996 – 2020
KfW F 26180 - 1262	30.069	2017 – 2027



(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	Periode ¹
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)		
Yen		
JBIC IP 512 – 1163	338.022	2004 - 2033
JBIC IP 513 – 1164	103.163	2004 – 2033
JBIC IP 515 – 1177	353.292	2004 – 2034
JBIC IP 516 - 1196	2.343	2004 – 2044
JBIC IP 517 – 1178	20.283	2004 – 2044
JBIC IP 525 – 1197	67.418	2005 - 2045
JBIC IP 526 – 1198	2.842	2005 – 2045
JBIC IP 527 – 1211	60.389	2007 – 2037
JBIC IP 532 – 1214	171	2006 – 2048
JBIC IP 537 – 1220	425	2009 – 2037
JBIC IP 538 – 1221	109.153	2009 – 2047
JBIC IP 539 – 1222	62.715	2009 - 2037
JBIC IP 555 – 1231	24.257	2013 – 2039
JICAIP 556 – 1249	118.040	2013 – 2040
JBIC IP - 1243	49.481	2012 – 2022
JBIC LA No 1 – 1216	39.508	2008 – 2020
JBIC LA No 3 – 1233	336	2010 – 2020
JBIC LA No 5 – 1218	88.996	2008 – 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	26.422	2013 - 2025
Midland Bank Public Limited Company		
Midland Bank - 798	14.936	1995 – 2020
Midland Bank - 818	686	1995 - 2020
Banque Paribas		
Banque Paribas 1063- GBP	18.471	1998 – 2022
EUR		
Banque Paribas – 1158	26.753	2002 - 2020
Calyon and BNP Paribas		
EUR		
BNP Paribas & Calyon 1206	40.085	2006 - 2020
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR		
Kerajaan Belgia - 1185	1.761	2005 – 2033
Efic Australia - AUD 1071	14.049	1997 – 2022
China Exim Bank 1248 – USD	141.503	2013 – 2027
China Exim Bank 1260 –USD	159.780	2015 – 2029
China Exim Bank 1261-USD	152.525	2015 – 2029
AG Francaise 101901F – 1237	23.055	2010 – 2035
AFD – 1254	51.242	2013 – 2028
AFD CID 1039 01H – 1259	13.180	2014 - 2026
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2.725.805	
Bagian jangka panjang	35.251.741	

1) Termasuk masa tenggang pembayaran

**Tingkat suku bunga per tahun**

Keterangan	2019
Rupiah	8,37%
US\$	2,7305% - 5,92%
JPY	0,012% - 4,82%
EUR	0,35% - 5,67%
AUD	3,85%
GBP	3,693%

Perseroan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam mata uang asing ¹⁾	Ekuivalen Dalam Jutaan Rupiah
US\$	1.240.170.346	17.239.608
JPY	158.867.568.117	20.329.743
EUR	19.375.532	302.037
Lain-lain ²⁾	6.512.892	90.536
Saldo akhir tahun		37.961.924

1) Dalam jumlah penuh

2) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$, menggunakan kurs tanggal pelaporan.

Beberapa perjanjian penerusan pinjaman mensyaratkan bahwa Perseroan wajib memenuhi beberapa pembatasan rasio keuangan tertentu.

3.3. Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank

Saldo utang kepada Pemerintah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.359.569 juta. Rincian utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2019
PT Sarana Multi Infrastruktur	5.115.204
Pengembalian subsidi tahun anggaran 2019	954.683
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	288.158
Jumlah	6.358.045
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.998.476
Bagian jangka panjang	4.359.569

Tingkat suku bunga per tahun

Keterangan	2019
Rupiah	4,00% - 5,25%

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2019
Pokok pinjaman	293.793
Perbedaan nilai wajar	(5.635)
Jumlah	288.158



Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001, pada tanggal 20 Juni 2001 Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5.288.268 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 30 Juli 2021. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896.

PT Sarana Multi Infrastruktur

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2019
Pokok pinjaman	5.250.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(12.794)
Perbedaan nilai wajar	(122.002)
Jumlah	5.115.204

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggungjawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2019
Dibayarkan:	
Dalam satu tahun	1.998.476
Pada tahun kedua	750.000
Pada tahun ketiga	750.000
Pada tahun keempat	750.000
Setelah lima tahun	2.250.000
Jumlah	6.498.476

3.4. Utang Sewa Pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.569.377 juta.

Akun ini terdiri dari utang Perseroan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan pembangunan kompresor gas di berbagai daerah.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan CJP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA"), Perseroan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan ini akan jatuh tempo antara tahun 2022 dan 2031.



Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jatuh tempo

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2019
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:	
Tidak lebih dari satu tahun	4.007.615
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	12.810.838
Lebih dari lima tahun	2.079.912
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	18.898.365
Dikurangi bunga	4.788.881
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	14.109.484
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2.540.107
Bagian jangka panjang	11.569.377

Berdasarkan pemberi sewa

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2019
PT Central Java Power – JPY	13.262.625
PT Batam Trans Gasindo – US\$	779.844
PT Enviromate Technology International - Rupiah	67.015
Jumlah	14.109.484
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2.540.107
Bagian jangka panjang	11.569.377
Tingkat suku bunga per tahun:	
Keterangan	2019
Rupiah	8,18% - 22,43%
US\$	14,01% - 18,75%
JPY	7,60% - 11,00%

Rincian utang sewa pembiayaan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam mata uang asing^{*)}	Ekuivalen
JPY	103.641.300.467	13.262.625
US\$	56.099.845	779.844
Saldo akhir tahun		14.042.469

*) Dalam jumlah penuh

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp4.903.022,-

3.5. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp205.717.158 juta. Rincian utang bank dan surat utang jangka menengah adalah sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2019
Pinjaman terkait program percepatan	
Pihak berelasi	
Bank Negara Indonesia	2.099.968
Bank DKI	1.827.679
Bank Rakyat Indonesia	149.547
Jumlah pihak berelasi	4.077.194



(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2019
Pihak ketiga	
The Export-Import Bank of China	8.884.062
Barclays Bank Plc and China Development Bank	5.098.127
Bank of China Limited	4.121.210
Bank Bukopin	608.270
Jumlah pihak ketiga	18.711.669
Subjumlah	22.788.863
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u>	
Pihak berelasi	
Bank Rakyat Indonesia	33.902.610
Bank Mandiri	23.650.000
Bank Negara Indonesia	16.214.286
Bank Tabungan Negara	1.500.000
Jumlah pihak berelasi	75.266.896
Pihak ketiga	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	25.511.253
Bank Central Asia	16.000.000
Asian Development Bank	14.114.874
Bank DBS Indonesia	9.730.700
Japan Bank for International Corporation	9.631.014
Bank CIMB Niaga	7.500.000
International Bank for Reconstruction and Development	6.427.389
Export Development Canada	4.952.231
Bank Maybank Indonesia	4.300.000
Credit Agricole CIB Paris	1.662.264
Standard Chartered Bank	1.616.977
Islamic Development Bank	1.464.828
Tokyo Mitsubishi Bank	1.390.100
Mizuho Bank	906.165
Korea Exim Bank	904.723
Kreditanstalt fur Wiederaufbau	626.464
BNP Paribas SA	579.271
Servizi Assicurativi del Commercio Estero	522.910
Agence Francaise De Development	456.272
Export Guarantee and Insurance Corporation	216.790
Bank Gospodarstwa Kratowego	33.130
Jumlah pihak ketiga	108.547.355
Subjumlah	183.814.251
Jumlah	206.603.114
Biaya transaksi belum diamortisasi	(885.956)
Jumlah bersih	205.717.158
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	
<u>Pinjaman terkait program percepatan</u>	
Pihak berelasi	
Bank Negara Indonesia	349.995
Bank DKI	317.857
Bank Rakyat Indonesia	149.547
Jumlah pihak berelasi	817.399
Pihak ketiga	
Bank of China Limited	1.853.274
The Export-Import Bank of China	1.809.453
Barclays Bank Plc and China Development Bank	1.325.381
Bank Bukopin	309.253
Jumlah pihak ketiga	5.297.361
Subjumlah	6.114.760



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Pinjaman tidak terkait program percepatan	
Pihak berelasi	
Bank Rakyat Indonesia	3.214.286
Bank Negara Indonesia	2.642.858
Bank Mandiri	2.589.286
Jumlah pihak berelasi	8.446.430
Pihak ketiga	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4.170.300
Bank Central Asia	1.000.000
Export Development Canada	521.287
Japan Bank for International Corporation	835.038
Standard Chartered Bank	202.122
Kreditanstalt für Wiederaufbau	128.916
Korean Exim Bank	82.248
Servizi Assicurativi del Commercio Estero	47.537
Export Guarantee and Insurance Corporation	19.708
Agence Française De Development	9.196
Mizuho Bank	115.796
Jumlah pihak ketiga	7.132.148
Subjumlah	15.578.578
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	21.693.338
Bagian jangka panjang	184.023.820
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	
	2019
Rupiah	6.3654% - 10.17%
US\$	2.41255% - 6.7209%
JPY	1.58% - 1.74%
EUR	0.00% - 2.20%

Pada tanggal 31 Desember 2019, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam mata uang asing ^{*)}	Ekuivalen
US\$	6.292.235.622	87.468.367
EUR	304.144.617	4.741.188
JPY	51.897.893.380	6.641.197
Saldo akhir tahun		98.850.752

*) Dalam jumlah penuh

Pinjaman terkait program percepatan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* ("EPC") untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perseroan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.



Pada tanggal 31 Desember 2019, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Pembayaran Kembali		Premi Asuransi US\$ ²⁾	Tanggal jatuh tempo
		US\$ ¹⁾	Rp ²⁾	2019 Rp ²⁾	2018 Rp ²⁾		
1.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	592	-	779.169	785.255	55	27 Mei 2021
2.	The Export/Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	331	-	344.331	335.422	32	30 Januari 2023
3.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	2.741.298	-	195.807	-	23 Juli 2018
4.	The Export Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	335.965	327.272	27	30 Januari 2023
5.	Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	262	-	370.944	374.767	-	3 Desember 2021
6.	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah PLTU Maluku Utara	-	4.732.000	37.024	295.737	-	24 April 2019
7.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Rakyat Indonesia PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	2.074.739	-	193.903	-	30 Januari 2019
8.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Mandiri PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	-	1.911.480	-	68.267	-	18 April 2018
9.	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	-	1.874.315	-	257.663	-	29 Juli 2018
10.	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	-	1.606.612	178.512	178.512	-	29 Juli 2021
11.	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep. Riau, Tanjung Balai, Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	-	1.498.513	-	195.418	-	29 Juli 2018
12.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/	-	1.272.913	-	41.106	-	23 Februari 2018
13.	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Sumatera Utara, Medan	-	1.240.661	-	115.154	-	29 Juli 2018
14.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	1.077.578	-	75.543	-	18 April 2018
15.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/ PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	1.151.005	41.107	164.429	-	30 Januari 2019



No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Pembayaran Kembali		Premi Asuransi US\$ ²⁾	Tanggal jatuh tempo
		US\$ ¹⁾	Rp ²⁾	2019 Rp ²⁾	2018 Rp ²⁾		
16.	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/	-	1.045.924	130.741	130.741	-	29 Juli 2021
17.	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	-	735.387	-	61.151	-	18 April 2018
18.	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	-	600.635	-	42.800	-	18 April 2018
19.	The Export Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	482	-	665.997	648.766	46	21 Januari 2025
	PLTU NAD	124	-	153.434	149.464	12	21 Juli 2024
20.	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	455	-	607.678	628.421	46	4 Mei 2022
21.	Pinjaman sindikasi dikoordinasikan/ Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	-	1.155.352	41.263	165.050	-	30 Januari 2019
22.	The Export Import Bank of China/ PLTU Pacitan	293	-	359.255	349.960	29	2 Juli 2025
23.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung	-	3.941.772	346.543	346.543	-	14 Oktober 2019
	PLTU Sumatera Utara						
24.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Mandiri/ Transmisi	-	2.613.012	373.287	373.287	-	14 Desember 2019
25.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Central Asia/ Transmisi	-	327.195	46.742	46.742	-	14 Desember 2019
26.	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	625	-	805.295	827.926	-	14 Oktober 2022
27.	China Development Bank/ PLTU Sumbang	138	-	174.192	173.739	-	14 Oktober 2022
28.	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar-Awar	372	-	505.422	504.516	34	14 Desember 2022
29.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Negara Indonesia/ Transmisi	-	1.930.063	275.723	275.723	-	14 Desember 2019
30.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Central Asia/ PLTU Riau dan PLTU Kalbar	-	1.080.598	99.793	99.793	-	14 Desember 2019
31.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/	-	1.067.684	149.547	149.547	-	27 Desember 2020
32.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	-	2.225.000	317.857	79.464	-	12 November 2025
33.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Bank Negara Indonesia/ PLTU Kalimantan Timur	-	2.449.963	349.995	-	-	17 Desember 2025
Jumlah		3.958	40.353.700	7.489.816	8.657.888	281	

1) dalam jutaan

2) dalam jutaan Rupiah.

Tingkat Suku Bunga Per Tahun	2019
Rupiah	6,36540%% - 9,2119%
US\$	2,69925% - 6,7209%

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pinjaman Perseroan 2011

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000 juta dengan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp875.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp1.750.000 juta.



Pinjaman Perseroan 2016

Pada tanggal 19 Desember 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 juta yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp12.000.000 juta.

Pinjaman Perseroan 2018

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp9.900.000 juta yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp9.900.000 juta.

Bank Rakyat Indonesia (“BRI”)

Kredit Modal Kerja 2011

Pada bulan Juni 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp15.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit ini diubah menjadi Rp9.000.000 juta dengan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2016. Perubahan di tahun 2016 terjadi pada tanggal 21 Juni 2016 yaitu perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp15.000.000 juta dengan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2017. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 9 September 2016, yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp20.000.000 juta. Perubahan terakhir di tahun 2016 pada tanggal 17 November 2016 yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp28.000.000 juta. Pada 23 Juli 2018 fasilitas ini diperpanjang jatuh temponya menjadi 21 Juni 2019. Pada tanggal 19 Juli 2019, tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp23.735.602 juta.

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2019
Penarikan	19.722.711
Pembayaran	(23.735.602)
Bersih	(4.012.891)

Pinjaman Perseroan 2012

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp8.500.000 juta. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 November 2022. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.214.286 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp3.642.857 juta.

Pinjaman Perseroan 2014

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp2.000.000 juta dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp285.714 juta. Jumlah pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.428.572 juta.

Pinjaman Perseroan 2015

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp12.000.000 juta. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp1.714.286 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp10.285.714 juta.



Pinjaman Perseroan 2016

Pada tanggal 23 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dikoordinasi oleh BRI melalui skema tripartit dengan PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp4.402.500 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 fasilitas pinjaman tersebut dialihkan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke Perusahaan seiring dengan terpenuhinya syarat pengalihan utang yang salah satunya adalah telah berakhirnya periode penarikan, sehingga debitur pinjaman berubah dari semula PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.977.388 juta dan nihil.

Pinjaman Sindikasi 2018

Pada tanggal 14 November 2018, Perseroan memperoleh pinjaman sindikasi dari BRI sebesar Rp4.506.787 juta dengan tanggal jatuh tempo 14 November 2028. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar sebesar Rp1.318.079 juta.

Pinjaman Perseroan 2019

Pada tanggal 23 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp13.250.000 juta dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 23 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp13.250.000 juta.

Bank Negara Indonesia (“BNI”)

Pinjaman Perseroan 2014

Pada tanggal 18 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp6.500.000 juta yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp928.571 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp4.642.857 juta.

Pinjaman Perseroan 2016

Pada tanggal 9 September 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 juta yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp428.571 juta dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp11.571.429 juta dan Rp12.000.000 juta.

Bank DKI

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank DKI sebesar Rp1.000.000 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019. Pada tanggal 31 Mei 2019, tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 8 Juni 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.000.000 juta dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil dan Rp1.000.000 juta.

Bank Tabungan Negara (“BTN”)

Pada tanggal 24 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral dari BTN sebesar Rp1.500.000 juta, dengan jatuh tempo pada 24 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp1.500.000 juta.

Bank Central Asia (“BCA”)

Pinjaman Perseroan 2013

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp7.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember



2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp1.000.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp4.000.000 juta.

Pinjaman Perseroan 2017

Pada tanggal 2 November 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp12.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.000.000 juta.

Bank Maybank Indonesia

Pada tanggal 2 November 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar Rp4.300.000 juta, dengan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.300.000 juta.

Bank CIMB Niaga

Pada tanggal 6 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.000.000 juta dan Rp2.000.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil dan Rp4.000.000.

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000 juta. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp4.000.000 juta.

Pada tanggal 23 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.500.000 juta. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp3.500.000 juta.

Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 26 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum perusahaan sebesar Rp1.400.000 juta dari Bank HSBC Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.400.000 juta dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Citibank

Pada tanggal 20 Maret 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Citibank sebesar Rp500.000 juta, dengan jatuh tempo pada 20 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp500.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 17 Juli 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum perusahaan sebesar Rp2.000.000 juta dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing adalah nihil.



Pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit revolving onshore dan offshore sebesar US\$150.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$125.000.000 (setara Rp1.758.625 juta), US\$25.000.000 (setara Rp351.725 juta); dan nihil.. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing adalah nihil.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *revolving onshore* dan *offshore* sebesar US\$1.000.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar US\$502.600.000 (setara Rp6.986.643 juta) dan US\$197.400.000 (setara Rp2.744.057 juta).

Tokyo Mitsubishi Bank

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk pendanaan investasi dan tujuan umum perusahaan sebesar US\$100.000.000 dari Tokyo Mitsubishi Bank. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar US\$100.000.000 (setara Rp1.390.100 juta).

Standard Chartered Bank (“SCB”)

Fasilitas Arun

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (“PLTMG”) Arun sebesar EUR90.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR7.061.853 (setara Rp111.828 juta) dan EUR7.061.853 (setara Rp121.703). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR56.494.826 (setara Rp880.675) dan EUR63.556.679 (setara Rp1.052.486 juta).

Fasilitas Bangkanai

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR70.850.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR5.904.167 (setara Rp93.496 juta) dan EUR5.904.167 (setara Rp101.751 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR47.233.333 (setara Rp736.302 juta) dan EUR53.137.500 (setara Rp879.946 juta).

Agence Francaise De Development (“AFD”)

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar EUR100.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR28.679.640 (setara Rp447.076 juta).

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar EUR1.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR589.943 (setara Rp9.196 juta).

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”)

Pada tanggal 8 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Kamojang PP sebesar EUR60.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR1.011.956 (setara Rp15.775 juta) dan EUR840.564 (setara Rp13.920 juta).



Pada tanggal 8 Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk 1000 *Islands Renewable Energy for Electrification Program (Pilot Phase* in Nusa Tenggara Timur) sebesar EUR65.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal dan 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR326.270 (setara Rp5.086 juta).

Pada tanggal 15 September 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Bangkanai Peaker sebesar EUR82.699.200 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 Desember 2028. Pada 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR8.269.920 (setara Rp131.165 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR38.849.075 (setara Rp605.603 juta).

Asian Development Bank (“ADB”)

Pada tanggal 4 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk penguatan gardu induk regional Sumatera sebesar US\$575.000.000 dan US\$25.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 September 2035. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$556.439.836 (setara Rp7.735.070 juta), dan US\$24.215.666 (setara Rp336.622 juta).

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk akses energi berkelanjutan di kawasan Indonesia timur sebesar US\$600.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 Mei 2037. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$434.730.000 (setara Rp6.043.182 juta).

Export Development Canada (“EDC”) dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company (“HEXIM”)

Pada tanggal 1 Mei 2017 Perseroan memperoleh pendanaan untuk Batam *mobile power plant* US\$14.111.753 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$1.175.979 (setara Rp16.518 juta) dan US\$1.175.979 (setara Rp16.293 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$11.171.804 (setara Rp155.299 juta) dan US\$12.347.784 (setara Rp178.809 juta).

Pada tanggal 2 Desember 2016 Perseroan memperoleh pendanaan untuk Batam *mobile power plant* sebesar US\$435.888.247 dengan jatuh tempo 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$36.324.021 (setara Rp511.461 juta) dan US\$36.324.021 (setara Rp503.269 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$345.078.196 (setara Rp4.796.932 juta) dan US\$381.402.216 (setara Rp5.523.085 juta).

Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)

Pada tanggal 14 Maret 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) Lontar sebesar US\$107.595.235, US\$71.730.158, dan JPY16.429.527.239. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$77.504.709 (setara Rp1.077.393 juta), US\$51.669.807 (setara Rp718.262 juta), JPY12.906.010.017 (setara Rp1.651.538 juta); dan US\$35.594.440 (setara Rp515.442 juta), US\$23.729.627 (setara Rp343.629 juta), JPY8.459.647.869 (setara Rp1.109.188 juta).

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan PLTU Jawa 2 Priok sebesar US\$27.224.192, US\$18.149.462, dan JPY31.762.594.907. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 April 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$1.890.569 (setara Rp26,765 juta), JPY1.323.442.000 (setara Rp174.183 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$27.224.192 (setara Rp378.444 juta), US\$16.258.893 (setara Rp226.015 juta), JPY29.503.437.209 (setara Rp3.775.455 juta).



Pada tanggal 10 Maret 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Fasilitas Muara Karang sebesar US\$22.338.000, US\$14.892.000, dan JPY15.449.450.242. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Maret 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$1.551.250 (setara Rp21.780 juta), JPY643.728.000 (setara Rp82.860 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$11.323.380 (setara Rp157.406 juta), US\$5.997.670 (setara Rp83.374 juta), JPY4.950.355.212 (setara Rp633.480 juta).

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Fasilitas PLTU Kalimantan Selatan sebesar US\$53.474.026, US\$35.649.351, dan JPY16.939.168.268. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$15.060.366 (setara Rp209.354 juta), US\$10.040.244 (setara Rp139.569 juta), JPY4.538.090.942 (setara Rp580.724 juta); dan nihil.

International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”)

Pada tanggal 20 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai *Power Distribution Development Program* sebesar US\$500.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2036. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$462.368.828 (setara Rp6.427.389 juta) dan US\$337.573.154 (setara Rp4.888.397 juta).

Korea Exim Bank (“KEXIM”), Servizi Assicurativi del Commercio Estero (“SACE”), dan Exportni Garancni a Pojistovaci Spolecnost (“EGAP”)

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Grati sebesar US\$36.000.000, US\$35.000.000, US\$17.013.000, dan EUR40.376.160. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$3.000.000 (setara Rp42.329 juta), US\$2.916.667 (setara Rp41.153 juta), EUR1.417.750 (setara Rp20.029 juta), US\$3.049.488 (setara Rp48.256 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini dari KEXIM, SACE, EGAP masing-masing sebesar US\$33.000.000 (setara Rp458.733 juta), US\$32.083.333 (setara Rp445.990 juta), EUR33.544.367 (setara Rp522.910 juta), US\$15.595.250 (setara Rp216.790 juta).

Islamic Development Bank (“IDB”) Islamic Development Bank (“IDB”)

Pada tanggal 10 Januari 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai *Power Grid Enhancement Program* sebesar US\$330.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2033. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$105.375.701 (setara Rp1.464.828 juta) dan US\$19.987.032 (setara Rp288.129 juta).

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Pembangkit Listrik Tenaga Air (“PLTA”) Jatigede sebesar US\$73.324.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$40.209.935 (setara Rp558.958 juta).

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berjangka *offshore* sebesar US\$938.285.680 dan *onshore* sebesar US\$261.714.320. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2023. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi sebesar US\$1.022.071.430 untuk porsi *offshore* dan US\$297.928.570 untuk porsi *onshore*. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$1.012.071.430 (setara Rp14.068.805 juta), US\$307.928.570 (setara Rp4.280.515 juta).



Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *revolving* bergulir *offshore* sebesar US\$209.571.420 dan *onshore* sebesar US\$90.428.580. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2021. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi sebesar US\$205.500.000 untuk porsi *offshore* dan US\$94.500.000 untuk porsi *onshore*. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$205.500.000 (setara Rp2.856.655 juta), US\$94.500.000 (setara Rp1.313.645 juta).

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral *offshore* sebesar US\$50.000.000 dan *onshore* sebesar US\$125.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$50.000.000 (setara Rp695.050 juta), US\$125.000.000 (setara Rp1.737.625 juta).

Mizuho Bank

Pada tanggal 24 Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Lombok Peaker sebesar EUR74.282.743. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR3.714.137 (setara Rp58.162 juta). Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR58.129.979 (setara Rp906.165 juta).

Credit Agricole CIB Paris

Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Muara Tawar sebesar US\$280.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$119.578.745 (setara Rp1.662.264 juta).

BNP Paribas SA

Pada tanggal 19 Februari 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Sumbagut 2 Peaker - CESCE *Covered Facility* EUR41.069.311 dan SACE *Covered Facility* EUR66.478.750. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar EUR14.388.126 (setara Rp224.291 juta), EUR22.771.799 (setara Rp354.980 juta) dan nihil.

Bank Gospodarstwa Krajowego (“BGK”)

Pada tanggal 21 Februari 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTU Lombok FTP-2 EUR80.816.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2033. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR2.125.302 (setara Rp33.130 juta) dan nihil.

Perseroan melakukan pembayaran pokok dan bunga bank sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman bank.



3.6. Utang Obligasi, Sukuk Ijarah dan KIK-EBA

a. Obligasi dan Sukuk Ijarah

Saldo utang obligasi dan sukuk ijarah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp181.238.776 juta. Rincian utang obligasi dan sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	Jumlah
Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	1.912.900
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	797.500
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	2.953.620
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	1.250.000
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	2.393.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	863.000
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	832.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	224.000
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	1.278.500
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	750.000
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	2.535.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	698.500
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	2.545.500
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	694.500
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	1.600.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	400.000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	651.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	108.000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	879.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1.855.000
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340.000
Obligasi PLN XI Tahun 2010	1.783.000
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	167.000
Obligasi PLN IX Tahun 2007	1.200.000
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	865.000
Surat Utang Jangka Menengah Global – US\$	
Penerbitan tahun 2019	33.362.400
Penerbitan tahun 2018	41.703.000
Penerbitan tahun 2017	27.802.000
Penerbitan tahun 2012	13.901.000
Penerbitan tahun 2011	13.901.000
Surat Utang Jangka Menengah Global – EUR	
Penerbitan tahun 2019	7.794.300
Penerbitan tahun 2018	7.794.300
Obligasi – JPY	
Penerbitan tahun 2019	2.968.825
Obligasi Terjamin - US\$	
Penerbitan tahun 2009	4.693.478
Penerbitan tahun 2007	4.007.828
Sub jumlah	187.625.151
Biaya emisi belum diamortisasi	(6.386.375)
Jumlah	181.238.776
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:	
Liabilitas jangka pendek	6.946.478
Liabilitas jangka panjang	174.292.298
Jumlah	181.238.776



Obligasi Rupiah

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/ imbalan ijarah per tahun
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019			
Seri A	795.700	1 Oktober 2024	7,90%
Seri B	445.000	1 Oktober 2026	8,40%
Seri C	6.200	1 Oktober 2029	8,60%
Seri D	166.000	1 Oktober 2034	9,40%
Seri E	500.000	1 Oktober 2039	9,90%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019			
Seri A	6.500	1 Oktober 2024	Rp513
Seri B	10.000	1 Oktober 2026	Rp 840
Seri C	92.000	1 Oktober 2029	Rp 7.912
Seri D	135.000	1 Oktober 2034	Rp 12.690
Seri E	554.000	1 Oktober 2039	Rp 54.846
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019			
Seri A	637.000	1 Agustus 2024	8,00%
Seri B	315.250	1 Agustus 2026	8,50%
Seri C	549.000	1 Agustus 2029	8,70%
Seri D	395.000	1 Agustus 2034	9,50%
Seri E	1.057.370	1 Agustus 2039	9,98%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019			
Seri A	274.000	1 Agustus 2024	Rp 21.920
Seri B	368.000	1 Agustus 2026	Rp 31.280
Seri C	20.000	1 Agustus 2029	Rp 1.740
Seri D	49.000	1 Agustus 2034	Rp 4.655
Seri E	539.000	1 Agustus 2039	Rp 53.765
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019			
Seri A	369.000	19 Februari 2022	8,50%
Seri B	1.212.000	19 Februari 2024	9,10%
Seri C	183.000	19 Februari 2026	9,35%
Seri D	211.000	19 Februari 2029	9,60%
Seri E	263.000	19 Februari 2034	9,80%
Seri F	155.000	19 Februari 2039	9,95%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019			
Seri A	263.000	19 Februari 2022	Rp 22.355
Seri B	263.000	19 Februari 2024	Rp 23.933
Seri C	204.000	19 Februari 2026	Rp 19.074
Seri D	45.000	19 Februari 2029	Rp 4.320
Seri E	60.000	19 Februari 2034	Rp 5.880
Seri F	28.000	19 Februari 2039	Rp 2.786
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018			
Seri A	210.000	10 Oktober 2023	8,65%
Seri B	483.000	10 Oktober 2025	9,00%
Seri C	78.000	10 Oktober 2028	9,10%
Seri D	15.000	10 Oktober 2033	9,30%
Seri E	46.000	10 Oktober 2038	9,65%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018			
Seri A	114.000	10 Oktober 2023	Rp 9.861
Seri B	45.000	10 Oktober 2025	Rp 4.050
Seri C	15.000	10 Oktober 2028	Rp 1.365
Seri D	50.000	10 Oktober 2038	Rp 4.825



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/ imbalan ijarah per tahun
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018			
Seri A	78.500	10 Juli 2023	7,80%
Seri B	442.000	10 Juli 2025	8,35%
Seri C	138.000	10 Juli 2028	8,40%
Seri D	281.000	10 Juli 2033	8,90%
Seri E	339.000	10 Juli 2038	9,00%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018			
Seri A	127.000	10 Juli 2023	Rp 9.906
Seri B	150.000	10 Juli 2025	Rp 12.525
Seri C	258.000	10 Juli 2028	Rp 21.672
Seri D	105.000	10 Juli 2033	Rp 9.345
Seri E	110.000	10 Juli 2038	Rp 9.900
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018			
Seri A	457.000	22 Februari 2023	6,50%
Seri B	10.000	22 Februari 2025	6,80%
Seri C	341.000	22 Februari 2028	7,25%
Seri D	362.000	22 Februari 2033	8,20%
Seri E	1.365.000	22 Februari 2038	8,75%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018			
Seri A	104.000	22 Februari 2023	Rp 6.760
Seri B	88.000	22 Februari 2028	Rp 6.380
Seri C	57.500	22 Februari 2033	Rp 4.715
Seri D	449.000	22 Februari 2038	Rp 39.287
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017			
Seri A	451.500	3 November 2022	7,20%
Seri B	201.000	3 November 2024	7,50%
Seri C	800.000	3 November 2027	8,20%
Seri D	1.093.000	3 November 2032	8,70%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017			
Seri A	83.500	3 November 2022	Rp6.012
Seri B	121.000	3 November 2027	Rp9.922
Seri C	490.000	3 November 2032	Rp42.630
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017			
Seri A	214.000	11 Juli 2022	7,70%
Seri B	169.000	11 Juli 2024	8,10%
Seri C	1.217.000	11 Juli 2027	8,50%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017			
Seri A	186.000	11 Juli 2022	Rp14.322
Seri B	214.000	11 Juli 2027	Rp18.190
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013			
Seri B	651.000	10 Desember 2023	9,60%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013			
Seri B	108.000	10 Desember 2023	Rp10.368
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013			
Seri B	697.000	5 Juli 2023	8,25%
Obligasi PLN XII Tahun 2010			
Seri B	1.855.000	8 Juli 2022	10,40%
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010			
Seri B	340.000	8 Juli 2022	Rp35.360
Obligasi PLN IX Tahun 2007			
Seri B	1.200.000	10 Juli 2022	10,90%
Obligasi PLN VIII Tahun 2006			
Seri B	865.000	21 Juni 2021	13,75%
Jumlah	27.444.020		



Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap V Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.912.900 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap V tahun 2019, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap V tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp797.500 juta, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp513 juta per tahun untuk Seri A, Rp840 juta per tahun untuk Seri B, Rp7.912 juta per tahun untuk Seri C, Rp12.690 juta per tahun untuk Seri D, dan Rp54.846 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.953.620 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, Obligasi dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap IV tahun 2019, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap IV tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp1.250.000 juta, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp21.920 juta per tahun untuk Seri A, Rp31.280 juta per tahun untuk Seri B, Rp1.740 juta per tahun untuk Seri C, Rp4.655 juta per tahun untuk Seri D, dan Rp53.765 juta per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 19 Februari 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.393.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, Obligasi Seri E, dan Obligasi Seri F dengan Bank Tabungan Negara bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap III tahun 2019, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap III tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp863.000 juta, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Seri E, dan Seri F dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp22.355 per tahun untuk Seri A, Rp23.933 juta per tahun untuk Seri B, Rp19.074 juta per tahun untuk Seri C, Rp4.320 juta per tahun untuk Seri D, Rp5.880 juta untuk Seri E dan Rp2.786 juta per tahun untuk Seri F dibayarkan setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap II Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp832.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.



Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap II tahun 2018, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap II tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp224.000 juta, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.861 juta per tahun untuk seri A, Rp4.050 juta per tahun untuk seri B, Rp1.365 juta per tahun untuk seri C, dan Rp4.825 juta per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap I Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.278.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap I tahun 2018, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap I tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000 juta, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.906 juta per tahun untuk seri A, Rp12.525 juta per tahun untuk seri B, Rp21.672 juta per tahun untuk seri C, Rp9.345 juta untuk Seri D, dan Rp9.900 juta per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018

Pada tanggal 23 Februari 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.535.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp698.500 juta, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.760 juta per tahun untuk seri A, Rp6.380 juta per tahun untuk seri B, Rp4.715 juta per tahun untuk seri C, dan Rp39.287 juta per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 3 November 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap II Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.545.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp694.500 juta, terdiri dari Seri A, Seri B dan Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.012 juta per tahun untuk Seri A, Rp9.922 juta per tahun untuk Seri B, dan Rp42.630 juta per tahun untuk Seri C dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.



Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.600.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp400.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp14.322 juta per tahun untuk Seri A dan Rp18.190 juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp593.000 telah dibayar keseluruhannya di 2018

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp429.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp28.890 juta per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp10.368 juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk ijarah Seri A senilai Rp321.000 juta telah dibayar keseluruhannya di 2018.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp879.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp121.000 juta dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.680 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi PLN XII Tahun 2010

Pada tanggal 8 Juli 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp645.000 juta telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN XII Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 19 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.



Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.520 per tahun untuk Seri A dan Rp35.360 per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijarah Seri A senilai Rp160.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 28 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 20 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN XI Tahun 2010

Pada tanggal 12 Januari 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.703.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp920.000 juta telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 17 April 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN XI Tahun 2007 yang tertuang dalam Akta No. 7 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp297.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.535 juta per tahun untuk Seri A dan Rp20.958 juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijarah Seri A senilai Rp130.000 juta telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta No. 18 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN IX Tahun 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.500.000 juta telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN IX Tahun 2007 yang tertuang dalam Akta No. 16 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp2.200.100 juta dengan PT Bank Mega Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi seri A senilai Rp1.335.100 juta telah dibayar keseluruhannya di tahun 2016.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.



Sehubungan dengan penerbitan seluruh obligasi dan sukuk ijarah Rupiah di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi;
- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus namun dijamin dengan seluruh aset Perseroan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain;
- Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain: (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) mengubah bidang usaha, mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.
Selain itu Perseroan juga diwajibkan memenuhi: batasan rasio keuangan antara lain rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga.
- Perseroan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018, Obligasi berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018, Obligasi berkelanjutan II PLN Tahap III tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan II PLN Tahap III tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 digunakan untuk mendanai proyek pembangkit, transmisi dan distribusi. Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk mendanai proyek transmisi dan distribusi.

Perseroan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah. Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan sukuk ijarah yang masing *outstanding* dan dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Peringkat	Lembaga Pemeringkat
Obligasi		
PLN VIII Tahun 2006	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN IX Tahun 2007	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XI Tahun 2010	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XII Tahun 2010	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	^{id} AAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah		
PLN IV Tahun 2010	^{id} AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN V Tahun 2010	^{id} AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	^{id} AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	^{id} AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	^{id} AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	^{id} AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia



Keterangan	Peringkat	Lembaga Pemeringkat
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	AAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US\$

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pokok (dalam US\$)	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Surat utang jangka menengah				
<u>Penerbitan tahun 2019</u>				
Jatuh tempo 2030	500.000.000	99,775%	5 Februari 2030	3,88%
Jatuh tempo 2050	500.000.000	99,567%	5 Februari 2050	4,375%
Jatuh tempo 2029	700.000.000	99,385%	17 Juli 2029	3,88%
Jatuh tempo 2049	700.000.000	98,834%	17 Juli 2049	4,88%
Sub jumlah	<u>2.400.000.000</u>			
<u>Penerbitan tahun 2018</u>				
Jatuh tempo 2028	1.000.000.000	99,62%	21 Mei 2028	5,45%
Jatuh tempo 2029	500.000.000	99,00%	25 Oktober 2029	5,375%
Jatuh tempo 2048	1.000.000.000	99,32%	21 Mei 2048	6,15%
Jatuh tempo 2049	500.000.000	99,29%	25 Oktober 2049	6,25%
Sub jumlah	<u>3.000.000.000</u>			
<u>Penerbitan tahun 2017</u>				
Jatuh tempo 2027	1.500.000.000	98,99%	15 Mei 2027	4,13%
Jatuh tempo 2047	500.000.000	98,51%	15 Mei 2047	5,25%
Sub jumlah	<u>2.000.000.000</u>			
<u>Penerbitan tahun 2012</u>				
Jatuh tempo 2042	1.000.000.000	98,51%	24 Oktober 2042	5,25%
<u>Penerbitan tahun 2011</u>				
Jatuh tempo 2021	1.000.000.000	99,05%	22 November 2021	5,50%
Obligasi terjamin				
<u>Penerbitan tahun 2007</u>				
Jatuh tempo 2037	288.312.000	98,59%	29 Juni 2037	7,87%
Jumlah	9.688.312.000			

Keterangan	Pokok EUR	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Surat utang jangka menengah global				
<u>Penerbitan tahun 2019</u>				
Jatuh tempo 2031	500.000.000	99,42%	5 November 2031	1,88%
<u>Penerbitan tahun 2018</u>				
Jatuh tempo 2025	500.000.000	99,22%	25 Oktober 2025	2,88%
Jumlah	1.000.000.000			



Keterangan	Pokok JPY	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Obligasi				
<u>Penerbitan tahun 2019</u>				
Jatuh tempo 2022	3.700.000.000	100%	20 September 2022	0,430%
Jatuh tempo 2024	18.500.000.000	100%	20 September 2024	0,870%
Jatuh tempo 2029	1.000.000.000	100%	20 September 2029	1,050%
Jumlah	23.200.000.000			

Obligasi

Pada tanggal 20 September 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Japanese Yen sejumlah JPY23.200.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Fiskal. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Surat Utang Jangka Menengah Global

Penerbitan tahun 2019

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.400.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 5 November 2019, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan jumlah nilai nominal sebesar US\$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 5 Februari 2020 untuk mata uang USD dan 5 November 2020 untuk mata uang EUR sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2018

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 25 April 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 21 Mei 2018, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 21 November 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Dengan penerbitan Surat Utang tanggal 21 Mei 2018 tersebut, Perseroan melakukan pembelian kembali dengan skema pelunasan dipercepat terhadap sebagian Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan 2007. Jumlah pokok pelunasan dipercepat sebesar US\$1.727.611.000 yang terdiri atas Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 yang jatuh tempo pada tahun 2020 dan 2019 serta Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2007 yang jatuh tempo pada tahun 2037 dengan nilai pelunasan dipercepat sebagian masing-masing sebesar US\$912.364.000, US\$603.559.000 dan US\$211.688.000. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 jumlah pokok utang Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan penerbitan tahun 2007 adalah sebesar US\$772.389.000 yang terdiri atas nilai sisa Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 sebesar US\$337.636.000 dan US\$146.441.000 dan Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2007 yang sebesar US\$288.312.000.

Manajemen berpendapat bahwa pelunasan dipercepat Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan penerbitan tahun 2007 tersebut merupakan suatu transaksi modifikasi substansial sehingga mengakui penerbitan Surat Utang sebagai utang baru dan mengakui keuntungan atas penerbitan baru tersebut sebesar US\$194.087.599 ditahun yang berjalan.



Penerbitan tahun 2017

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 15 November 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2012

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 April 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2011

Pada tanggal 22 November 2011, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah Global sejumlah US\$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009

Pada tanggal 6 November 2009, MH, entitas anak, yang berdomisili di Belanda menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$1.250.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perseroan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US\$912.364.000. Sehingga sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US\$337.636.000.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$750.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perseroan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US\$603.559.000. Sehingga, sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US\$146.441.000. Obligasi tersebut telah dibayar keseluruhan ditahun 2019.

Penerbitan tahun 2007

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$1.000.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai 28 Juni 2017. Pada Juni 2017, Obligasi Terjamin tranche A telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perseroan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US\$211.688.000. Sehingga, sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US\$288.312.000.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa :

1. Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perseroan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.
2. Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian"; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Perseroan dan Entitas Anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian perwaliamanatan.



Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

Keterangan	Moody's Investor Service, Inc.,	Standard and Poor's	Fitch	Japan Credit Rating
Surat utang jangka menengah global				
Penerbitan tahun 2019	Baa2	BBB	BBB	
Penerbitan tahun 2018	Baa2	-	BBB	
Penerbitan tahun 2017	Baa2	-	BBB	
Penerbitan tahun 2012	Baa2	BBB	BBB	
Penerbitan tahun 2011	Baa2	BBB	BBB	
Obligasi terjamin				
Penerbitan tahun 2009	Baa2	BBB	-	
Penerbitan tahun 2007	Baa2	BBB	-	
Japanese Yen Bond				
Penerbitan tahun 2019	Baa2	BBB	-	BBB

b. Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (“KIK-EBA”)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:	
Tidak lebih dari satu tahun	748.050
Lebih dari satu tahun	1.473.118
Jumlah pembayaran minimum	2.221.168
Biaya keuangan	(279.906)
Jumlah	1.941.262
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:	
Liabilitas jangka pendek	586.620
Liabilitas jangka panjang	1.354.642
Jumlah	1.941.262

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management (“DIM”) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN I – Piutang Usaha (“KIK-DIPP1”). Perjanjian tersebut terakhir kali diubah dengan amandemen pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

Pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang komponen A dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (“PJBTL”), Perseroan menyetujui IP, Entitas Anak, untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A Suralaya (“SLA”) unit 1,2,3 dan 4 atas PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diamandemen pada tanggal 22 Agustus 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Piutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

Pada tanggal 14 September 2017, IP menandatangani perjanjian pengikatan transaksi sekuritisasi piutang usaha Indonesia Power – PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan DIM dan BRI. Di dalam perjanjian tersebut, IP setuju dan mengikat diri untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga Rp4.000.000.

Sejak penandatanganan akta perjanjian (“Cessie”) tersebut semua pembayaran atas piutang usaha yang dialihkan tetap dilakukan oleh Perseroan kepada IP yang dalam hal ini akan menerima Dana hasil koleksi pelunasan Piutang Usaha, namun tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai kapasitas yang bertindak untuk dan atas nama KIK-DIPP1.



Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1 sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian pokok dan hasil Investasi dilakukan dengan *fixed installment* (“anuitas”) berdasarkan dari nilai investasi dan *yield* 8,25%. Tanggal akhir pelunasan investasi adalah 19 September 2022. KIK-DIPP1 merupakan investasi dengan peringkat idAAA berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Pada laporan keuangan konsolidasian, penerimaan kas dari transaksi sekuritisasi tersebut dicatat sebagai utang Kredit Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Berdasarkan KIK-DIPP1, EBA diterbitkan oleh Bank Kustodian dalam 2 (dua) kelas yaitu:

1. EBA Kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp3.688.000 juta mewakili 92,20% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA Kelas A memiliki hak untuk menerima arus kas tetap setiap 3 (tiga) bulan sekali yang terdiri dari pelunasan bertahap pokok investasi dan pembagian hasil investasi EBA Kelas A.
2. EBA Kelas B dengan total nominal sebesar maksimum 7,80% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA kelas B memiliki hak untuk menerima arus kas tidak tetap pada setiap tanggal pelunasan bertahap dan tanggal pembagian hasil investasi EBA Kelas B.

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari Perseroan atas piutang usaha milik IP yang disekuritisasi. Pemegang EBA kelas A mempunyai hak untuk dibayar mendahului pemegang EBA kelas B. Pemegang EBA kelas B akan menerima pembayaran pelunasan bertahap dan hasil investasi EBA kelas B setelah dilakukan pembayaran penuh atas semua EBA kelas A menurut tata urutan pembayaran (*payment waterfall*).

3.7. Utang Listrik Swasta

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan IPP.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pemasok

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Paiton Energy (US\$439.164.341)	6.104.823
PT Jawa Power (US\$52.232.386)	726.083
Jumlah	6.830.906
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(399.458)
Bagian jangka panjang	6.431.448

- b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok, pada nilai nominal

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dibayarkan	
Dalam satu tahun	399.458
Pada tahun kedua	421.784
Pada tahun ketiga	445.745
Pada tahun keempat	471.530
Setelah lima tahun	5.092.389
Jumlah Pembayaran	6.830.906

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.



3.8. Utang Pihak Berelasi

Utang kepada PT Riau Power, MEB dan DEB pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing – masing sebesar Rp92, Rp1.000, dan Rp794 merupakan utang oleh PLN Batam, entitas anak, atas utang setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam dan untuk pembelian switchyard.

3.9. Utang Usaha

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	9.021.121
Pembelian tenaga listrik	2.793.614
Sub jumlah	11.814.735
Pihak ketiga	
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	28.877.826
Pembelian tenaga listrik	11.310.222
Sub jumlah	40.188.048
Jumlah	52.002.783

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam mata uang asing ¹⁾	Ekuivalen
US\$	898.507.498	12.490.157
EUR	326.270	5.086
Lain-lain ²⁾	30.385.801	422.393
Saldo akhir tahun		12.917.636

1) Dalam jumlah penuh

2) Utang usaha dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$. menggunakan kurs tanggal pelaporan.

3.10. Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:	
Imbalan pascakerja	
Program pensiun	276.443
Imbalan pascakerja lainnya	12.946.513
Imbalan pemeliharaan kesehatan	41.796.191
Imbalan jangka panjang lainnya	1.051.578
Jumlah	56.070.725
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:	
Liabilitas jangka pendek	5.232.467
Liabilitas jangka panjang	50.838.258
Jumlah	56.070.725
Beban diakui di laba rugi:	
Imbalan pascakerja	
Program pensiun	136.640
Imbalan pascakerja lainnya	1.702.376
Imbalan pemeliharaan kesehatan	3.790.974
Imbalan jangka panjang lainnya	305.877
Jumlah	5.935.867

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:	
Program pensiun	(796.603)
Imbalan pascakerja lainnya	2.367.276
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2.205.286
Jumlah	3.775.959

Program pensiun imbalan pasti

Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perseroan dan Entitas Anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 15,45% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas dan penghargaan kesetiaan kerja.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

Keterangan	31 Desember 2019
Tabel mortalita	CSO-58
Tingkat pengunduran diri	
Usia 18 s.d. 49 tahun	0,27%
Usia 50 s.d. 55 tahun	0,01%
Usia pensiun normal	56 tahun

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Perseroan dan entitas anak. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penilaian aktuarial atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.



Pada tahun 2015, Perseroan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perseroan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perseroan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasi, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perseroan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perseroan dan entitas anak adalah CSO-58. Perseroan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

1) Program Pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Nilai kini kewajiban yang didanai	9.420.639
Nilai wajar aset program	(9.144.196)
Defisit program yang didanai	276.443
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	-
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	276.443

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pada awal tahun	9.178.377
Dibebankan ke laba rugi:	
Biaya jasa kini	111.904
Biaya bunga	744.946
	856.850
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:	
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:	
Perubahan asumsi keuangan	123.091
Penyesuaian atas pengalaman	118.419
	10.276.737
Pembayaran manfaat	(856.098)
Pada akhir tahun	9.420.639

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pada awal tahun	8.111.306
Imbal hasil atas aset program	670.510
Iuran pemberi kerja	130.665
Iuran pekerja	49.700
Pembayaran manfaat	(856.098)
Kerugian aktuarial pada aset program	1.038.113
Pada akhir tahun	9.144.196

Aset program terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>					
Keterangan	Memiliki kuotasi harga	Tidak memiliki kuotasi harga	Jumlah	%	
Surat berharga negara	1.246.382	-	1.246.382	13,63%	
Tabungan	-	103.680	103.680	1,13%	
Deposito <i>on call</i>	-	53.330	53.330	0,58%	
Deposito berjangka	-	630.000	630.000	6,89%	
Saham	924.464	-	924.464	10,11%	



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Memiliki kuotasi harga	Tidak memiliki kuotasi harga	Jumlah	%
Obligasi	2.492.698	-	2.492.698	27,26%
Sukuk	9.959	-	9.959	0,11%
Unit penyertaan reksadana	1.052.795	-	1.052.795	11,51%
Efek beragun aset	30.262	-	30.262	0,33%
Penempatan langsung	-	919.933	919.933	10,06%
Tanah	-	117.095	117.095	1,28%
Bangunan	-	412.089	412.089	4,51%
Tanah dan bangunan	-	417.094	417.094	4,56%
Lain-lain	-	734.415	734.415	8,03%
Jumlah	5.756.560	3.387.636	9.144.196	100,00%

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,78%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah Rp260.397

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar 1,51%	Kenaikan sebesar 1,72%
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar 1,77%	Penurunan sebesar 1,58%
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar 0,00%	Kenaikan sebesar 0,01%

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2) Imbalan Pascakerja Lainnya

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pada awal tahun	10.550.746
Dibebankan ke laba rugi:	
Biaya jasa kini	865.426
Biaya bunga	841.996
Harapan dari hasil investasi	(5.046)
	1.702.376
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:	
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari:	
Perubahan asumsi keuangan	837.046
Penyesuaian atas pengalaman	1.530.230
	14.620.398
Pembayaran manfaat	(1.673.885)
Pada akhir tahun	12.946.513



Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,78%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,30%

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar 7,60%	Kenaikan sebesar 9,11%
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar 9,03%	Penurunan sebesar 7,67%
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar 0,00%	Penurunan sebesar 0,00%

3) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
Pada awal tahun	37.056.587
Dibebankan ke laba rugi:	
Biaya jasa kini	650.579
Biaya bunga	3.140.395
	3.790.974
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:	
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari:	
Perubahan asumsi keuangan	4.278.197
Penyesuaian atas pengalaman	(2.072.911)
	43.052.847
Pembayaran manfaat	(1.256.656)
Pada akhir tahun	41.796.191

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,78%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	7,00%

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar 11,42%	Kenaikan sebesar 14,13%
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar 11,14%	Penurunan sebesar 9,23%
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar 0,49%	Kenaikan sebesar 0,61%



4) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pada awal tahun	959.380
Dibebankan ke laba rugi:	
Biaya jasa kini	232.388
Biaya bunga	73.489
	305.877
Pengukuran kembali program imbalan pasti dibebankan ke laba rugi:	
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari:	
Perubahan asumsi keuangan	25.676
Penyesuaian atas pengalaman	(25.676)
	1.265.257
Pembayaran manfaat	(213.679)
Pada akhir tahun	1.051.578

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	8,62%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,20%

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar 2,90%	Kenaikan sebesar 3,09%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	1%	Kenaikan sebesar 2,98%	Penurunan sebesar 2,85%
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar 0,01%	Penurunan sebesar 0,01%

Perseroan dan Entitas Anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrument utang, meskipun Perseroan dan Entitas Anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Perseroan dan Entitas Anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 21,19 tahun.



Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kurang dari 1 tahun	2 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
Imbalan pascakerja				
Program pensiun	731.724	1.550.938	8.627.681	10.910.343
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1.488.765	3.858.633	115.716.132	121.063.530
Imbalan pascakerja lainnya	2.795.736	4.232.690	138.125.408	145.153.834
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	216.242	1.577.981	1.400.663	3.194.886
Jumlah	5.232.467	11.220.242	263.869.884	280.322.593

3.11. Utang Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan	
Rupiah	16.976.626
US\$	7.033.198
EUR	1.856.748
JPY	1.726.827
CHF	99.993
CNY	4.133
Pemerintah daerah	2.193.064
Uang muka penjualan tenaga listrik	203.386
Karyawan	63.721
Lain-lain	574.885
Jumlah	30.732.581
Dikurangi bagian jangka panjang	133.662
Bagian jangka pendek	30.598.919

Pemerintah Daerah

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perseroan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik Prabayar.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

3.12. Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak kini	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	60.416
Pasal 22	93.169
Pasal 23	37.858
Pasal 15, dan 4(2)	29.147
Pajak pertambahan nilai	854.600
Sub jumlah	1.075.190



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Entitas Anak	
Pajak kini	377.252
Pajak penghasilan	
Pasal 21	154.715
Pasal 22	139.000
Pasal 23	50.974
Pasal 15, dan 4(2)	89.260
Pajak pertambahan nilai	496.889
Pajak bumi dan bangunan	8
Sub jumlah	1.308.098
Jumlah	2.383.288

3.13. Biaya Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga dan beban keuangan	
Pihak berelasi	
Utang bank	451.137
Utang penerusan pinjaman	331.275
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	74.699
Jumlah pihak berelasi	857.111
Pihak ketiga	
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2.862.048
Utang bank	1.470.335
Utang sewa pembiayaan	997.880
Utang listrik swasta	45.527
Jumlah pihak ketiga	5.375.790
Sub jumlah	6.232.901
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	
Bonus dan insentif prestasi kerja	5.711.171
Biaya operasional	4.810.568
Jumlah	16.754.640

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam mata uang asing ¹⁾	Ekuivalen
US\$	244.021.636	3.392.147
JPY	8.882.526.820	1.136.667
EUR	5.459.709	85.109
Lain-lain ²⁾	64.218	893
Saldo akhir tahun		4.614.816

1) Dalam jumlah penuh

2) Biaya yang masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$. menggunakan kurs tanggal pelaporan.

3.14. Uang Jaminan Langgan

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

3.15. Utang Biaya Proyek

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.



3.16. Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi dapat dilihat pada Bab VIII subbab Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0645) yang dalam laporannya tanggal 21 Juli 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan atas hal-hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, dan juga menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Laporan Keuangan Interim 31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang telah direviu oleh Akuntan Publik yang terbit pada tanggal 19 Juni 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap	1.386.149.060	1.400.685.118	1.336.478.233	1.204.568.429
Aset hak-guna	32.530.425	-	-	-
Properti Investasi	5.290.410	5.283.708	5.125.448	4.723.070
Investasi pada entitas asosiasi	2.810.045	3.868.060	3.002.665	2.432.830
Investasi pada ventura bersama	6.519.902	6.432.705	5.723.674	4.445.668
Aset pajak tangguhan	680.274	2.215.963	7.578.386	9.566.473
Piutang pihak berelasi	1.123.214	951.643	1.031.237	237.181
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	9.630.140	5.980.703	5.688.712	7.487.709
Piutang lain-lain	853.064	824.545	961.377	634.949
Aset tidak lancar lain	7.817.890	7.445.895	13.482.762	7.064.097
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.453.404.424	1.433.688.340	1.379.072.494	1.241.160.406



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	26.315.986	46.598.783	33.294.560	42.291.959
Investasi jangka pendek	338.902	334.153	1.216.886	286.697
Piutang usaha				
Pihak berelasi	855.272	819.836	593.646	580.993
Pihak ketiga	21.918.628	24.310.702	23.209.017	21.885.850
Piutang subsidi listrik	5.213.660	-	-	7.588.977
Piutang kompensasi	-	-	23.173.464	-
Piutang lain-lain	47.879.755	47.451.084	9.507.768	1.672.237
Persediaan - bersih	13.509.646	12.934.233	15.506.567	12.828.118
Pajak dibayar dimuka	18.139.616	17.634.137	5.894.120	4.997.393
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.885.680	1.206.785	1.007.572	1.629.609
Piutang pihak berelasi	5.043	4.719	5.954	5.294
Aset lancar lainnya	20.287	72.241	5.697	30.124
Jumlah Aset Lancar	136.082.475	151.366.673	113.415.251	93.797.251
JUMLAH ASET	1.589.486.899	1.585.055.013	1.492.487.745	1.334.957.657
LIABILITAS DAN EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 1 per saham				
Modal dasar – masing-masing 439.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 115.181.002 saham per 31 Maret 2020, 115.181.002 saham, 109.826.526 saham, dan 109.826.526 saham per 31 Desember 2019, 2018, dan 2017	115.181.002	115.181.002	109.826.526	109.826.526
Tambahan modal disetor	9.919.958	9.919.958	20.179.333	20.871.265
Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham	10.528.230	10.528.230	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	60.334.896	60.334.896	52.766.610	48.665.115
Tidak ditentukan penggunaannya	31.585.811	70.997.731	78.251.316	71.093.240
Penghasilan komprehensif lain	666.233.761	661.509.952	665.849.322	618.462.276
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	893.783.658	928.471.769	926.873.107	868.918.422
Kepentingan non-pengendali	904.298	908.644	540.750	498.182
Jumlah Ekuitas	894.687.956	929.380.413	927.413.857	869.416.604
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan	12.741.980	28.121.540	13.420.136	2.066.364
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				
Penerusan pinjaman	40.302.310	35.251.741	36.105.279	31.485.476
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	4.371.333	4.359.569	5.343.629	6.309.173
Utang sewa pembiayaan	19.181.302	11.569.377	14.468.336	15.713.269
Utang bank	199.767.728	184.023.820	152.965.997	116.017.364
Utang obligasi dan sukuk ijarah	205.110.678	174.292.298	131.681.821	100.440.360
Utang listrik swasta	7.450.753	6.431.448	7.115.916	7.026.434
Utang KIK - EBA	1.187.594	1.354.642	2.221.167	2.907.986
Utang pihak berelasi	92	92	1.000	794
Liabilitas imbalan kerja	46.752.956	50.838.258	43.760.226	43.559.022
Utang lain-lain	140.118	133.662	94.427	940.153
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	537.006.844	496.376.447	407.177.934	326.466.395



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	11.275.038	11.814.735	9.044.530	11.215.239
Pihak ketiga	36.683.563	40.188.048	39.563.144	32.496.186
Utang pajak	1.795.602	2.383.288	2.560.128	2.387.864
Biaya yang masih harus dibayar	19.104.403	16.754.640	14.809.018	11.477.437
Uang jaminan langganan	14.423.941	14.235.879	13.465.735	12.642.333
Utang biaya proyek	112.995	150.664	315.828	723.992
Pendapatan ditangguhkan	1.016.299	1.049.231	929.947	1.218.400
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				
Penerusan pinjaman	3.599.933	2.725.805	2.530.273	2.735.992
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.851.580	1.998.476	1.860.649	1.043.793
Utang sewa pembiayaan	3.689.209	2.540.107	2.624.629	4.871.908
Utang bank	29.502.243	21.693.338	28.145.737	26.548.747
Utang obligasi dan sukuk ijarah	303.000	6.946.478	2.120.612	914.000
Utang listrik swasta	476.723	399.458	394.403	349.968
Utang KIK - EBA	618.904	586.620	686.819	630.600
Liabilitas imbalan kerja	3.798.885	5.232.467	5.873.558	8.562.927
Utang lain-lain	29.539.781	30.598.919	32.970.944	21.255.272
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	157.792.099	159.298.153	157.895.954	139.074.658
Jumlah Liabilitas	694.798.943	655.674.600	565.073.888	465.541.053
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.589.486.899	1.585.055.013	1.492.487.745	1.334.957.657

*tidak diaudit

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PENDAPATAN USAHA					
Penjualan tenaga listrik	70.247.095	66.848.035	276.061.925	263.477.551	246.586.856
Penyambungan pelanggan	1.830.657	1.607.600	6.934.597	7.309.172	7.113.454
Lain-lain	622.619	463.328	2.644.067	2.111.019	1.594.933
Jumlah Pendapatan Usaha	72.700.371	68.918.963	285.640.589	272.897.742	255.295.243
BEBAN USAHA					
Bahan bakar dan pelumas	30.720.508	32.957.348	136.084.482	137.266.678	116.947.824
Pembelian tenaga listrik	25.831.735	19.951.844	83.563.991	84.267.611	72.426.641
Sewa	1.001.061	935.029	3.617.376	4.272.082	6.592.161
Pemeliharaan	4.356.876	4.220.437	22.328.178	20.737.601	19.515.606
Kepegawaian	5.607.716	5.616.236	25.908.771	22.950.087	23.124.511
Penyusutan aset tetap	8.801.236	8.198.059	35.318.071	30.744.712	29.160.597
Penyusutan aset hak-guna	698.686				
Lain-lain	1.772.961	1.756.363	8.620.069	7.950.118	7.706.754
Jumlah beban usaha	78.790.779	73.635.316	315.440.938	308.188.889	275.474.094
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(6.090.408)	(4.716.353)	(29.800.349)	(35.291.147)	(20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah	12.899.839	11.527.703	51.711.774	48.101.754	45.738.215
Pendapatan kompensasi	-	2.112.604	22.253.517	23.173.464	-
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	6.809.431	8.923.954	44.164.942	35.984.071	25.559.364
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(1.739.842)	(137.395)	(3.667.666)	15.663.363	3.409.941



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(51.974.821)	4.006.986	9.486.326	(10.926.741)	(2.935.144)
Penghasilan keuangan	333.141	184.594	755.103	804.321	1.066.842
Beban keuangan	(7.354.564)	(6.726.882)	(24.619.495)	(21.624.176)	(18.556.931)
LABA SEBELUM PAJAK	(53.926.655)	6.251.257	26.119.210	19.900.838	8.544.072
BEBAN PAJAK	15.045.749	(2.093.412)	(21.797.080)	(8.325.082)	(4.115.955)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(38.880.906)	4.157.845	4.322.130	11.575.756	4.428.117
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	13.757	16.145	(286.917)	255.493	461.901
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	(79.713)	-	(1.183.109)	48.336.627	(6.933.307)
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti	6.140.725	(964.013)	(3.775.959)	4.319.690	(5.635.015)
Manfaat (beban) pajak terkait	(1.350.960)	241.003	950.394	(5.524.764)	1.408.754
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	4.723.809	(706.865)	(4.295.591)	47.387.046	(10.697.667)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(34.157.097)	3.450.980	26.539	58.962.802	(6.269.550)
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	(38.876.560)	4.142.894	4.270.922	11.568.286	4.410.210
Kepentingan non-pengendali	(4.346)	14.951	51.208	7.470	17.907
Jumlah	(38.880.906)	4.157.845	4.322.130	11.575.756	4.428.117
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	(34.152.751)	3.436.029	(24.669)	58.955.332	(6.287.457)
Kepentingan non-pengendali	(4.346)	14.951	51.208	7.470	17.907
Jumlah	(34.157.097)	3.450.980	26.539	58.962.802	(6.269.550)
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	(337.526)	37.722	37.516	105.332	50.541

*tidak diaudit

**Rasio Keuangan Penting**

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan				
Aset	5,96%	6,20%	11,80%	4,93%
Liabilitas	22,11%	16,03%	21,38%	18,22%
Ekuitas	(3,91%)	0,21%	6,67%	(1,02%)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	3,68%	4,48%	14,33%	7,18%
Beban usaha	7,00%	2,35%	11,88%	8,26%
Laba usaha setelah subsidi	(23,69%)	22,73%	40,79%	(3,24%)
Laba (rugi) sebelum pajak	(962,65%)	31,25%	132,92%	(37,08%)
Laba tahun berjalan	(1035,12%)	(62,66%)	161,41%	(45,67%)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(1089,78%)	(99,95%)	(1040,46%)	(203,31%)

Rasio usaha dan keuangan (% , kecuali dinyatakan lain)

Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah dan pendapatan kompensasi	(45,42)	1,20	3,36	1,47
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas	(4,35)	0,47	1,25	0,51
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset	(2,45)	0,27	0,78	0,33
Aset tetap terhadap Laba (Rugi) tahun berjalan	(3.565,12)	32.407,29	11.545,49	27.202,72
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	30,74	12,96	9,67	14,05
Perputaran material	0,07	0,41	0,40	0,50
Perputaran aset tetap	0,05x	0,20x	0,21x	0,25x
Perputaran piutang pelanggan	2,99	11,28	11,39	11,16
Umur piutang pelanggan	29,09 hari	32,35 hari	32,05 hari	32,70 hari
Solvabilitas	0,44x	0,41x	0,38x	0,35x
Likuiditas	0,86x	0,95x	0,72x	0,67x
Rasio ekuitas terhadap aset	56,29	58,63	62,14	65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	64,54	66,35	69,39	72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	258,13	282,18	328,23	368,97
Rasio lancar	86,24	95,02	71,83	67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	77,66	70,55	60,93	53,55
Rasio utang terhadap jumlah asset	43,71	41,37	37,86	34,87

*tidak diaudit

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	31 Desember 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	28,2%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	3,32x
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	547%

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0645) yang dalam laporannya tanggal 21 Juli 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan atas hal-hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, dan juga menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perseroan dan Entitas Anak serta.

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 41.640 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan IPP yang menandatangani PJBL dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 83,97% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 45.591 MW dan melayani sekitar 75,7 juta pelanggan. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 5.987 pembangkit tenaga listrik yang meliputi 6.723 unit pembangkitan listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menandatangani 75 PJBL material dengan IPP yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 13.195 MW.

Dalam 2 tahun terakhir (2017-2019) sekitar 7 juta rumah tangga baru telah menikmati listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,35% pada tahun 2017 menjadi 98,89% pada akhir tahun 2019 dimana PLN berkontribusi sebesar 95,75%. Peningkatan rasio tersebut ditopang oleh program listrik perdesaan dan megaproyek 35.000 MW termasuk listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah telah menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% pada tahun 2020. Bagi PLN, tugas ini adalah tugas mulia untuk menerangi desadesa di daerah terdepan, terluar dan tertinggal, di antaranya bahkan ada yang belum pernah menikmati listrik sejak Indonesia merdeka.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN

Tarif Listrik

Untuk pelanggan selain kelompok rumah tangga kecil dengan daya 450 VA sampai dengan 900 VA (yang tunduk pada pengaturan tarif yang berbeda untuk biaya tetap dan memperbolehkan Perseroan untuk menerima subsidi Pemerintah), Pemerintah menaikkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar:

- a. 10,0%, efektif dari 1 Juli 2010 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8/2011;
- b. 15%, efektif dari 1 Januari 2013 sesuai dengan Permen ESDM No. 30 Tahun 2012; dan
- c. 22%, efektif dari 1 Mei 2014 sesuai dengan Permen ESDM No. 9 Tahun 2014.



Selanjutnya, Permen ESDM No. 31 Tahun 2014, efektif dari 1 Januari 2015, dan Permen ESDM No. 9 Tahun 2015, efektif dari 1 Mei 2015, meningkatkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar 0,63% untuk 8 kelompok pelanggan, termasuk:

- pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya antara 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA;
- pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA;
- pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya antara 6.600 VA sampai dengan 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya di atas 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 30.000 kVA;
- pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya antara 6.600 VA sampai dengan 200 kVA; dan
- pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya di atas 200 kVA.

Tabel di bawah ini menyajikan harga jual rata-rata Perseroan untuk setiap kelompok pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam Rp/kWH)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Rumah tangga	1.097,95	1.105,23
Usaha/bisnis	1.258,79	1.250,12
Industri	1.097,95	1.089,93
Umum	1.092,95	1.100,39
Total harga jual rata-rata	1.128,32	1.127,04

Tren yang berlaku untuk setiap kelompok pelanggan dapat berbeda dari tren harga jual rata-rata secara keseluruhan, dikarenakan adanya perbedaan harga jual tenaga listrik dalam setiap kelompok pelanggan tergantung pada tingkat pemakaian tenaga listrik.

Subsidi

Subsidi yang diterima dari Perseroan digunakan untuk menutup biaya-biaya meliputi: pembelian tenaga listrik, beban bahan bakar dan pelumas (seperti BBM, gas alam, batubara dan minyak pelumas), beban pemeliharaan (seperti material), beban kepegawaian, beban administrasi, penyusutan atas aset tetap operasional dan beban keuangan. Perseroan tidak mendapatkan subsidi Pemerintah untuk beban-beban yang tidak terkait dengan pembangkitan tenaga listrik, seperti beban usaha Entitas Anak Perseroan di bidang telekomunikasi atau layanan engineering.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi terkait subsidi yang diterima Perseroan dari Pemerintah pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Anggaran subsidi yang disetujui Pemerintah	Hasil audit subsidi Pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	56.507	48.101
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	59.323	51.771

Jumlah subsidi dari Pemerintah dapat disesuaikan dan berdasarkan formula yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai berikut:

- jumlah subsidi yang akhirnya diterima Perseroan untuk tahun tertentu dapat disesuaikan menjadi lebih tinggi berdasarkan biaya aktual Perseroan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK");
- biaya pokok penyediaan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- perhitungan susut jaringan transmisi dan distribusi yang diperhitungkan dalam penetapan biaya pokok penyusutan disesuaikan oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi setiap akhir triwulanan berdasarkan besaran realisasi susut jaringan;



- Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menetapkan realisasi besaran susut jaringan transmisi dan distribusi setiap akhir triwulanan dan secara tahunan paling lambat 15 hari setelah data diterima lengkap dari Perseroan;
- permintaan untuk pembayaran subsidi listrik akan disampaikan oleh Perseroan dalam bentuk tertulis ke Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan salinan tersedia untuk Bendahara Umum Negara setiap bulan. Permintaan pembayaran subsidi listrik disertai data pendukung meliputi data biaya pokok penyediaan interim. Data biaya pokok penyediaan interim (Rp/kWh) merupakan:
 - data yang digunakan dalam penetapan jumlah subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") atau APBN Perubahan; atau
 - data berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perseroan menerima 95,0% dari hasil perhitungan verifikasi (termasuk marjin PSO) setiap bulan dengan sisanya dibayar setiap triwulan berdasarkan laporan realisasi biaya pokok penyediaan yang tidak diaudit;
- subsidi untuk bulan November dibayar pada bulan Desember dan subsidi untuk bulan Desember ditempatkan di rekening penampungan sementara untuk kepentingan Perseroan dan dibayarkan di bulan Januari, berdasarkan anggaran biaya pokok penyediaan dan realisasi biaya pokok penyediaan untuk setiap perhitungan subsidi, sehingga subsidi lebih mendekati biaya aktual dan penjualan dalam 2 bulan terakhir.

Formula yang digunakan untuk menghitung subsidi listrik adalah sebagai berikut:

$$S = -(TTL - BPP (1 + m)) \times V$$

S = subsidi listrik

TTL = tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif

BPP= biaya pokok penyediaan pada tegangan di masing-masing golongan tarif

M = marjin PSO

V = volume penjualan

Dalam menghitung subsidi listrik pada tahun fiskal, Menteri ESDM dapat menggunakan besaran marjin PSO yang diusulkan oleh Menteri BUMN dimana marjin PSO ditambahkan untuk memberikan nilai positif (laba kotor) ketika menghitung total subsidi listrik dan menghasilkan nilai subsidi listrik yang akan ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Nilai subsidi listrik akhir pada setiap tahun fiskal ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Tidak ada batasan atas untuk subsidi listrik. Dalam hal terdapat terdapat selisih lebih pembayaran subsidi listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada Perseroan dengan hasil penelitian dan verifikasi, selisih lebih pembayaran subsidi listrik tersebut dapat dikompensasikan dengan tagihan subsidi listrik Perseroan periode berikutnya (dengan persetujuan dari Menteri Keuangan). Namun demikian, dalam hal tidak terdapat tagihan subsidi listrik periode berikutnya, selisih lebih pembayaran harus segera disetor ke kas negara oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bahan bakar dan beban non bahan bakar

Sebagian beban bahan bakar dan non bahan bakar berdenominasi dalam, atau terkait dengan, Dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2019, 35,15% dari beban bahan bakar dan non bahan bakar dalam mata uang, atau terkait dengan, Dolar Amerika Serikat, dan 43,14% dari beban bahan bakar dan non bahan bakar dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi beban usaha Perseroan dalam Rupiah (mata uang pelaporan). Sebagai contoh, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada umumnya akan mengakibatkan beban usaha dalam Rupiah mengalami kenaikan.



Tabel di bawah ini menyajikan beban bahan bakar dan non bahan bakar Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah sebagai persentase terhadap total beban bahan bakar dan non bahan bakar pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam Rp/kWH)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Beban bahan bakar dan pelumas (dalam US\$)	35,15%	36,44%
Beban bahan bakar dan pelumas (dalam Rupiah)	43,14%	44,54%

Tabel di bawah ini menyajikan beban bahan bakar dan pelumas untuk jenis bahan bakar yang berbeda sebagai persentase terhadap total beban bahan bakar dan pelumas pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam %)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
BBM	18,2%	23,1%
Gas alam	42,7%	40,4%
Batubara	36,3%	33,7%
Panas bumi	2,5%	2,4%
Air	0,2%	0,2%
Pelumas	0,2%	0,2%
Total	100%	100%

Perseroan terus menjajaki kemungkinan mengganti pembangkit listrik berbahan bakar BBM dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas alam, terutama pembangkit di bawah Program *Fast Track* dan Program 35.000 MW. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mendapatkan sumber batubara atau gas alam yang stabil pada harga yang wajar atau tidak sama sekali.

Beban pemeliharaan

Perseroan telah, dan akan terus, mencatatkan beban pemeliharaan yang signifikan untuk pembangkit tenaga listrik miliknya. Beban pemeliharaan dalam porsi yang substansial berdenominasi mata uang asing dikarenakan ketergantungan Perseroan pada material dan jasa ahli yang tidak tersedia di Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah dan ketidakmampuan Perseroan untuk membatasi kenaikan beban pemeliharaan dapat berdampak pada beban usaha dan hasil usaha Perseroan.

Pertumbuhan perekonomian dan permintaan listrik oleh pelanggan

Kenaikan permintaan tenaga listrik sebagian bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transformasi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang berjalan dalam hal memperluas basis pelanggan industri dan bisnis telah berperan penting dalam pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Perseroan berkeyakinan bahwa pelanggan industri, bisnis dan rumah tangga akan terus menjadi pelanggan utama Perseroan di pasar konsumsi tenaga listrik dan hasil usaha Perseroan akan bergantung terutama pada pertumbuhan permintaan tenaga listrik dari sektor-sektor ini.

Tabel di bawah ini menyajikan persentase pelanggan Perseroan pada setiap golongan tarif dan persentase kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam %)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	%	% kenaikan/ (penurunan)	%	% kenaikan/ (penurunan)
Rumah tangga	92%	6%	92%	5%
Usaha/bisnis	0%	27%	0%	8%
Industri	5%	-2%	5%	9%
Umum	3%	8%	3%	7%
Total	100%	6%	100%	7%



Tabel di bawah ini menyajikan persentase konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada setiap golongan tarif dan persentase kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018:

(dalam %)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	%	% kenaikan/ (penurunan)	%	% kenaikan/ (penurunan)
Rumah tangga	42%	6%	42%	4%
Usaha/bisnis	32%	1%	33%	7%
Industri	19%	7%	19%	6%
Umum	7%	8%	7%	7%
Total	100%	5%	100%	5%

Penyelesaian dan dimulainya kegiatan produksi secara komersial dari proyek-proyek Perseroan

Perseroan memperkirakan penjualan dan hasil usaha akan berfluktuasi tergantung pada proyek-proyek Perseroan yang dalam tahapan pengembangan maupun penyelesaian, khususnya proyek-proyek dengan IPP. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani sejumlah *joint venture* dalam rangka menerapkan strategi bisnis Perseroan dan meningkatkan kapasitas pembangkitan tenaga listrik, terutama sehubungan dengan Program *Fast Track* dan Program 35.000 MW. Kenaikan belanja modal yang tidak terduga terkait dengan proyek-proyek dalam program tersebut mungkin memerlukan tambahan kontribusi modal dari Entitas Anak Perseroan dimana hal tersebut dapat meningkatkan beban keuangan dalam hal pendanaan dari pihak ketiga diperlukan; ketidakmampuan Perseroan untuk membiayai belanja modal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis dan hasil usaha Perseroan.

Hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan akan bergantung pada penyelesaian proyek-proyek ini dengan sukses dan tepat waktu dan kemampuan Perseroan untuk menemukan mitra *joint venture* yang dapat diandalkan. Penyelesaian dan dimulainya produksi komersial proyek pembangkit tenaga listrik baru pada umumnya akan langsung meningkatkan penjualan listrik dengan asumsi terdapat permintaan yang cukup. Lebih lanjut, di bawah PJBL dengan IPP, Perseroan tunduk pada kewajiban *take or pay* dan menjamin bahwa stasiun tenaga listrik baru terhubung pada saluran transmisi dengan baik dan tepat waktu. Ketidakmampuan Perseroan untuk menyelesaikan sambungan tersebut akan mengakibatkan tidak adanya penjualan atau penjualan di bawah ekspektasi sehubungan dengan tambahan kapasitas pembangkitan dan beban yang timbul dari PJBL akan menjadi tidak sejalan dengan ekpektasi tingkat penjualan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Akses terhadap pendanaan dan beban pendanaan

Perseroan terutama bergantung pada pinjaman (seperti *two-step loan*), pendapatan dari pelanggan dan subsidi dari Pemerintah (yang diperkirakan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat) untuk kebutuhan pendanaan Perseroan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek Perseroan beserta belanja modalnya. Selain itu, Perseroan telah, dari waktu ke waktu, menerbitkan Efek bersifat utang. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, serta biaya yang timbul dari fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Akses Perseroan terhadap pendanaan dan beban pendanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah utang yang belum jatuh tempo dan pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit, persyaratan pada perjanjian Efek bersifat utang, atau dokumen pinjaman lainnya, sehubungan dengan pinjaman tambahan yang diperbolehkan bagi Perseroan.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Perubahan nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lain, terutama Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan Euro telah mempengaruhi dan akan terus mempengaruhi arus kas, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Beban usaha dan pinjaman Perseroan dalam porsi tertentu berdenominasi mata uang asing. Mata uang Rupiah cenderung melemah terhadap Dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang asing pada tahun 2017.



Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan beban usaha Perseroan dalam mata uang asing maupun beban usaha yang dipatok pada mata uang asing dan akan meningkatkan biaya dalam Rupiah untuk belanja modal dalam mata uang asing, yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin dan banyak dari biaya tersebut sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000 MW. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan beban keuangan Perseroan dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing, serta meningkatkan biaya untuk pembayaran kembali dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2019, sekitar 68,45% dari total utang Perseroan yang belum jatuh tempo (termasuk penerusan pinjaman, pinjaman Pemerintah, pinjaman bank dan utang pembelian listrik) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Oleh karena itu, pelemahan Rupiah dapat meningkatkan beban keuangan secara substansial serta meningkatkan jumlah utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang belum jatuh tempo yang dilaporkan dalam Rupiah pada laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan melakukan lindung nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 yang mengharuskan rasio lindung nilai sebesar 20% dari selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan kedepan selama dua periode berturut-turut. Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio likuiditas (didefinisikan sebagai rasio aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) tahun kedepan) sebesar 50%. Mulai tanggal 1 Januari 2016, rasio lindung nilai minimum meningkat menjadi 25% sedangkan rasio likuiditas minimum naik menjadi 70%. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rasio lindung nilai dan rasio likuiditas minimum tetap sama. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi biaya untuk membayar utang, beban bahan bakar dan beban usaha, kewajiban kepada IPP dan belanja modal. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dalam Rupiah dan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang yang digunakan dalam penyajian 2 (dua) laporan keuangan Entitas Anak Perseroan (MH dan Majapahit Finance B.V.) tidak dalam Rupiah. Oleh karena itu, variasi dalam nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat berdampak material pada saat laporan keuangan Entitas Anak tersebut ditranslasi ke dalam Rupiah dan hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Modifikasi pada kebijakan nilai tukar mengambang saat ini juga dapat mengakibatkan suku bunga domestik, kekurangan likuiditas, pengendalian modal atau pembatasan kapital atau pengawasan devisa atau pemotongan dari bantuan pembiayaan tambahan oleh peminjam multinasional menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami perlambatan, resesi, gagal bayar pinjaman dan kenaikan harga barang-barang impor, dimana seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan.

Musiman

Permintaan tenaga listrik dipengaruhi oleh faktor musiman dan pada umumnya mengalami penurunan pada musim kemarau dari bulan April sampai dengan bulan September, sebagai contoh. Permintaan mengalami penurunan pada hari raya tertentu seperti di akhir Ramadan. Perseroan juga mengalami kenaikan permintaan untuk tenaga listrik dari pelanggan industri di semester kedua, dimana hal ini merupakan siklus produksi mereka secara umum. Sebagai akibat dari pola musiman ini, penjualan dan hasil usaha Perseroan menjadi lebih rendah dalam periode triwulanan tertentu yang dapat bervariasi dari tahun ke tahun tergantung, antara lain, penetapan tanggal Ramadan.

Covid-19

Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan Perseroan pada tahun 2020. Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan mitigasi risiko covid-19 sembari terus berupaya agar tetap mempertahankan pendapatan dan profitabilitas walaupun dengan ada nya diskon tarif listrik.

Kegiatan operasional PLN masih dapat beroperasi seperti biasa baik dari pembangkit, transmisi, distribusi dan aktivitas penjualan. Kebijakan PSBB pada beberapa daerah di Indonesia yang bertujuan untuk memutus rantai COVID-19 menyebabkan adanya kebijakan kegiatan bekerja di rumah atau work from home (WFH) yang diberlakukan mulai pada bulan Maret 2020. Kegiatan tersebut berpengaruh



pada penggunaan listrik dengan tariff industri dan bisnis terutama pada sektor pusat perbelanjaan, hotel, dan lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada pendapatan PLN bulan Maret 2020 dimana pendapatan Perseroan turun sebesar 0,5% dibandingkan dengan bulan Maret 2019.

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, PLN mengambil langkah untuk menurunkan capex (capital expenditure) pada saat ini dan yang akan datang. Alasan utama hal tersebut dilakukan karena pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga terdapat kemungkinan akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan usaha Perseroan. Namun, hal tersebut masih dalam proses diskusi dengan pemegang saham untuk mendapatkan asumsi yang akurat di tahun 2020 ini.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan

4. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan tenaga listrik	70.247.095	66.848.035	276.061.925	263.477.551
Penyambungan pelanggan	1.830.657	1.607.600	6.934.597	7.309.172
Lain-lain	622.619	463.328	2.644.067	2.111.019
Jumlah Pendapatan Usaha	72.700.371	68.918.963	285.640.589	272.897.742
BEBAN USAHA				
Bahan bakar dan pelumas	30.720.508	32.957.348	136.084.482	137.266.678
Pembelian tenaga listrik	25.831.735	19.951.844	83.563.991	84.267.611
Sewa	1.001.061	935.029	3.617.376	4.272.082
Pemeliharaan	4.356.876	4.220.437	22.328.178	20.737.601
Kepegawaian	5.607.716	5.616.236	25.908.771	22.950.087
Penyusutan aset tetap	8.801.236	8.198.059	35.318.071	30.744.712
Penyusutan aset hak-guna	698.686			
Lain-lain	1.772.961	1.756.363	8.620.069	7.950.118
Jumlah beban usaha	78.790.779	73.635.316	315.440.938	308.188.889
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(6.090.408)	(4.716.353)	(29.800.349)	(35.291.147)
Subsidi listrik Pemerintah	12.899.839	11.527.703	51.711.774	48.101.754
Pendapatan kompensasi	-	2.112.604	22.253.517	23.173.464
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	6.809.431	8.923.954	44.164.942	35.984.071
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(1.739.842)	(137.395)	(3.667.666)	15.663.363
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(51.974.821)	4.006.986	9.486.326	(10.926.741)
Penghasilan keuangan	333.141	184.594	755.103	804.321
Beban keuangan	(7.354.564)	(6.726.882)	(24.619.495)	(21.624.176)
LABA SEBELUM PAJAK	(53.926.655)	6.251.257	26.119.210	19.900.838
BEBAN PAJAK	15.045.749	(2.093.412)	(21.797.080)	(8.325.082)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(38.880.906)	4.157.845	4.322.130	11.575.756



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Penghasilan komprehensif lain				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	13.757	16.145	(286.917)	255.493
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	(79.713)	-	(1.183.109)	48.336.627
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	6.140.725	(964.013)	(3.775.959)	4.319.690
Manfaat (beban) pajak terkait	(1.350.960)	241.003	950.394	(5.524.764)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	4.723.809	(706.865)	(4.295.591)	47.387.046
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(34.157.097)	3.450.980	26.539	58.962.802
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(38.876.560)	4.142.894	4.270.922	11.568.286
Kepentingan non-pengendali	(4.346)	14.951	51.208	7.470
Jumlah	(38.880.906)	4.157.845	4.322.130	11.575.756
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(34.152.751)	3.436.029	(24.669)	58.955.332
Kepentingan non-pengendali	(4.346)	14.951	51.208	7.470
Jumlah	(34.157.097)	3.450.980	26.539	58.962.802
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	(337.526)	37.722	37.516	105.332

Pendapatan Usaha**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp285.640.589 juta, meningkat sebesar Rp12.742.847 juta atau sekitar 4,67% dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp272.897.742 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan pendapatan usaha tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan tenaga listrik seiring meningkatnya jumlah pelanggan sebesar 5,3% menjadi 75,7 Juta Pelanggan untuk tahun 2019 dari 71,9 Juta Pelanggan di tahun 2018 dengan daya jual naik 4,6% menjadi 245,518 GWh di tahun 2019 dari 234,618 GWh di tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp72.700.371 juta, meningkat sebesar Rp3.781.408 juta atau sekitar 5,49% dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp68,918,963 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. Pertumbuhan penjualan ini berasal dari kenaikan volume penjualan menjadi sebesar 61,785 GWh atau naik 4,62% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 59,059 GWh. Peningkatan konsumsi kWh ini juga didukung dari adanya kenaikan jumlah pelanggan dimana sampai dengan akhir Maret 2020 telah mencapai 76,52 juta atau bertambah sebanyak 3,75 juta pelanggan dari akhir Maret 2019 sebesar 72,77 juta pelanggan.



Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp315.440.938 juta, meningkat sebesar Rp7.252.049 juta atau 2,35% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp308.188.889 juta. Peningkatan beban usaha tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan dan kepegawaian, beban Penyusutan meningkat Rp4,573 Miliar dari Rp.30,745 Miliar di 2018 menjadi Rp.35,318 Miliar di 2019 terutama karena penambahan Aset Tetap di 2019. Beban kepegawaian meningkat Rp2,959 Miliar atau 12,9% dari Rp22,950 di 2018 menjadi Rp25,909 di tahun 2019 karena adanya peningkatan remunerasi, bonus, pembayaran insentif, tunjangan, pelatihan dan pendidikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 78.790.779 juta, meningkat sebesar Rp5.155.463 juta atau 7,00% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp73.635.316 juta. Utamanya dari peningkatan biaya pembelian tenaga listrik seiring dengan bertambahnya kontrak-kontrak baru IPP bila dibandingkan dengan Maret 2019 dan kenaikan produksi IPP sebesar 22,24% dari 20,049 GWh di Maret 2019 menjadi 24,508 GWh di Maret 2020. Selain itu, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing turut membuat nilai pembelian tenaga listrik ikut meningkat. Mulai 1 Januari 2020, Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK 73: Sewa, sehingga pada Laporan Keuangan Maret 2020 Perseroan mengakui adanya penyusutan aset sewa sebesar Rp699 milyar.

Subsidi listrik Pemerintah

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Subsidi listrik Pemerintah Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.711.774 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.610.020 juta atau sekitar 7,50% dibandingkan dengan subsidi listrik Pemerintah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp48.101.754 juta. Peningkatan subsidi listrik Pemerintah tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pokok produksi listrik sepanjang tahun 2019 dan pengalihan golongan R1/900 VA-RTM yang pada 2018 masuk dalam pelanggan yang masuk dalam pelanggan yang mendapatkan kompensasi, namun di tahun 2019 mejadi pelanggan subsidi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Subsidi listrik Pemerintah Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp12.899.839 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.372.136 juta atau sekitar 11,90% dibandingkan dengan subsidi listrik Pemerintah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, yaitu sebesar Rp11.527.703 juta. Peningkatan subsidi listrik Pemerintah tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pokok produksi listrik sampai dengan Maret 2020.

Pendapatan Kompensasi

Piutang kompensasi merupakan piutang atas kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi yang diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Pendapatan kompensasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.253.517 juta, mengalami penurunan sebesar Rp919.947 juta atau sekitar 3,97% dibandingkan dengan pendapatan kompensasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp23.173.464 juta. Penurunan pendapatan kompensasi tersebut terutama disebabkan oleh Perubahan pemberian kompensasi dan subsidi golongan R1/900 VA-RTM di tahun 2019 diberi kompensasi, sedangkan di 2019 golongan tersebut dialihkan dan diberikan subsidi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Pendapatan kompensasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar Rp2.112.604 juta atau sekitar 100% dibandingkan dengan pendapatan kompensasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, yaitu sebesar Rp2.112.604 juta. Penurunan pendapatan kompensasi tersebut terutama disebabkan oleh karena untuk periode Maret 2020, seusai dengan arahan manajemen, Perseroan tidak mengakui Pendapatan Kompensasi.

Laba Usaha Setelah Subsidi***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba usaha setelah subsidi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.164.942 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.180.871 juta atau sekitar 22,73% dibandingkan dengan laba usaha setelah subsidi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp35.984.071 juta. Peningkatan laba usaha setelah subsidi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan subsidi yang diterima dan peningkatan penjualan tenaga listrik di tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Laba usaha setelah subsidi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp6.809.431 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.114.523 juta atau sekitar 23,69% dibandingkan dengan laba usaha setelah subsidi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, yaitu sebesar Rp8.923.954 juta. Penurunan laba usaha setelah subsidi tersebut terutama disebabkan oleh dikarenakan tidak diterimanya kompensasi sampai dengan 31 Maret 2020..

Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan beban lain-lain – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.667.666 juta, mengalami penurunan sebesar Rp19.331.029 juta atau sekitar 123,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang mencatatkan penghasilan lain-lain – bersih sebesar Rp15.663.363 juta. Penurunan penghasilan lain-lain – bersih tersebut terutama disebabkan oleh adanya aturan dari kementerian ESDM tentang Pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit sehingga perseroan menyesuaikan biaya dibayar dimuka pembelian gasnya. Selain itu, pada tahun 2018, Perseroan juga menerima Rp7.456 miliar dari Pemerintah sebagai pembayaran pendapatan kompensasi untuk 2017 yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada tahun 2018 dan tidak ada transaksi seperti ini di tahun 2019.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019***

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan beban lain-lain – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp1.739.842 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.602.447 juta atau sekitar 1166.31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang mencatatkan beban penghasilan lain-lain – bersih sebesar Rp137.395 juta. Kenaikan beban penghasilan lain-lain – bersih tersebut adanya penyesuaian ekuitas dalam laba bersih Perseroan asosiasi dan ventura bersama.

Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing – Bersih***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Keuntungan kurs mata uang asing – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.486.326 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp20.413.067 juta atau sekitar 186,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang mencatatkan kerugian kurs mata uang asing – bersih, yaitu sebesar Rp10.926.741 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing di akhir tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Kerugian kurs mata uang asing – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp51.974.821 juta, mengalami penurunan sebesar Rp55.981.807 juta atau sekitar 1397.11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang mencatatkan keuntungan kurs mata uang asing – bersih, yaitu sebesar Rp4.006.986 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Kurs Tengah BI pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp16.367/USD dibandingkan Kurs Tengah BI pada 31 Maret 2019 Rp14.244/USD yang mengakibatkan realisasi Kerugian Selisih Kurs pada Triwulan I tahun 2020 menjadi sangat tinggi.

Penghasilan Keuangan***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penghasilan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp755.103 juta, mengalami penurunan sebesar Rp49.218 juta atau sekitar 6,12% dibandingkan dengan penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp804.321 juta. Penurunan penghasilan keuangan tersebut terutama disebabkan oleh saldo investasi jangka pendek yang lebih rendah dikombinasikan dengan suku bunga deposito yang lebih rendah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Penghasilan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp333.141 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp148.547 juta atau sekitar 80,47% dibandingkan dengan penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, yaitu sebesar Rp184.594 juta. Kenaikan penghasilan keuangan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya saldo kas dan meningkatnya penempatan rekening bank dan deposito berjangka Maret 2020 dibandingkan Maret 2019..



Beban Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.619.495 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.995.319 juta atau sekitar 13,85% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp21.624.176 juta. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh seiring dengan peningkatan pinjaman pemerintah, pinjaman bank dan hutang obligasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp7.354.564 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp627.682 juta atau sekitar 9.33% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp6.726.882 juta. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah pinjaman berbunga jangka panjang (interest bearing debt) antara lain: hutang bank, obligasi dan penerusan pinjaman..

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.119.210 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.218.372 juta atau sekitar 31,25% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp19.900.838 juta. Peningkatan laba sebelum pajak tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya keuntungan kurs mata uang asing karena menguatnya nilai tukar rupiah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Rugi sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp53.926.655 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp60.177.912 juta atau sekitar 962,65% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang sebesar Rp6.251.257 juta. Peningkatan rugi sebelum pajak tersebut terutama disebabkan oleh tingginya kerugian selisih kurs pada periode triwulan 1 tahun 2020 akibat terdepresiasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing khususnya USD.

Beban Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.797.080 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.471.998 juta atau sekitar 161,82% dibandingkan dengan beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp8.325.082 juta. Peningkatan beban pajak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan perseroan sebesar 12,7T atau 4,7% bila dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan biaya naik hanya sebesar Rp. 7,2T atau 2,4%. Sebagai konsekuensi dari peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan yang masih disubsidi pemerintah, pendapatan subsidi dan kompensasi pun naik



Rp. 2,6T atau 3,8% bila dibandingkan dengan tahun 2018. Kombinasi dari kenaikan pendapatan dan peningkatan beban mengakibatkan laba setelah subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp 8,2T atau 22,7 % bila dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan pajak perseroan tidak hanya diakibatkan oleh peningkatan laba operasi akan tetapi manajemen juga melakukan asesment terhadap aset pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Dari hasil asesment yang dilakukan majemen memandang bahwa sebagai akibat dari kondisi pandemi covid 19 yang mengakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah akan mengakibatkan kenaikan biaya operasional Perseroan pada masa mendatang, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak memungkinkan untuk memanfaatkan rugi fiskal masa lalu sehingga perseroan mengakui beban pajak Penghasilan tangguhan Rp. 21,01T dan pajak kini Rp.0,78T.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 15.045.749 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp17.139.161 juta atau sekitar 818,72% dibandingkan dengan beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang sebesar Rp2.093.412 juta. Peningkatan beban pajak tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif pajak menjadi 22% sehingga menyebabkan penurunan saldo Liabilitas Pajak Tangguhan, di samping adanya rugi fiskal pada periode triwulan 1 tahun 2020 ini yang dapat dimanfaatkan sebagai *Tax benefit* selama 5 tahun kedepan yang dimulai pada periode tahun berjalan.

Laba (Rugi) Periode Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.322.130 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.253.626 juta atau sekitar 62,66% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp11.575.756 juta. Penurunan laba tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pajak yg diakui selama tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019

Rugi tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp38.880.906 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.038.751 juta atau sekitar 1.035,12% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang sebesar Rp4.157.845juta. Kenaikan rugi tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kerugian selisih kurs dan belum diakuinya pendapatan kompensasi pada periode triwulan 1 tahun 2020.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kerugian komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp26.539 juta, mengalami penurunan sebesar Rp58.936.263 juta atau sekitar 99,95% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp58.962.802 juta. Penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya laba bersih tahun berjalan dan menurunnya perubahan surplus revaluasi asset tetap.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019**

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kerugian komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp34.157.097 juta, mengalami penurunan sebesar Rp37.608.077 juta atau sekitar 1.089,78% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp3.450.980 juta. Penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kemampuan Perseroan yaitu adanya rugi bersih untuk periode triwulan 1 tahun berjalan sebesar Rp38,88 Triliun.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020*	2019	2018
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	1.386.149.060	1.400.685.118	1.336.478.233
Aset hak-guna	32.530.425		
Properti Investasi	5.290.410	5.283.708	5.125.448
Investasi pada entitas asosiasi	2.810.045	3.868.060	3.002.665
Investasi pada ventura bersama	6.519.902	6.432.705	5.723.674
Aset pajak tangguhan	680.274	2.215.963	7.578.386
Piutang pihak berelasi	1.123.214	951.643	1.031.237
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	9.630.140	5.980.703	5.688.712
Piutang lain-lain	853.064	824.545	961.377
Aset tidak lancar lain	7.817.890	7.445.895	13.482.762
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.453.404.424	1.433.688.340	1.379.072.494
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	26.315.986	46.598.783	33.294.560
Investasi jangka pendek	338.902	334.153	1.216.886
Piutang usaha			
Pihak berelasi	855.272	819.836	593.646
Pihak ketiga	21.918.628	24.310.702	23.209.017
Piutang subsidi listrik	5.213.660	-	-
Piutang kompensasi	-	-	23.173.464
Piutang lain-lain	47.879.755	47.451.084	9.507.768
Persediaan - bersih	13.509.646	12.934.233	15.506.567
Pajak dibayar dimuka	18.139.616	17.634.137	5.894.120
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.885.680	1.206.785	1.007.572
Piutang pihak berelasi	5.043	4.719	5.954
Aset lancar lainnya	20.287	72.241	5.697
Jumlah Aset Lancar	136.082.475	151.366.673	113.415.251
JUMLAH ASET	1.589.486.899	1.585.055.013	1.492.487.745

LIABILITAS DAN EKUITAS**EKUITAS**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham - nilai nominal Rp 1 per saham

Modal dasar – masing-masing 439.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 115.181.002 saham dan 109.826.526 saham per 31 Desember 2019 dan 2018

Tambahan modal disetor

Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham

Saldo laba

Ditentukan penggunaannya

Tidak ditentukan penggunaannya

Penghasilan komprehensif lain



Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020*	2019	2018
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	893.783.658	928.471.769	926.873.107
Kepentingan non-pengendali	904.298	908.644	540.750
Jumlah Ekuitas	894.687.956	929.380.413	927.413.857
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	12.741.980	28.121.540	13.420.136
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	40.302.310	35.251.741	36.105.279
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	4.371.333	4.359.569	5.343.629
Utang sewa	19.181.302	11.569.377	14.468.336
Utang bank	199.767.728	184.023.820	152.965.997
Utang obligasi dan sukuk ijarah	205.110.678	174.292.298	131.681.821
Utang listrik swasta	7.450.753	6.431.448	7.115.916
Utang KIK - EBA	1.187.594	1.354.642	2.221.167
Utang pihak berelasi	92	92	1.000
Liabilitas imbalan kerja	46.752.956	50.838.258	43.760.226
Utang lain-lain	140.118	133.662	94.427
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	537.006.844	496.376.447	407.177.934
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak berelasi	11.275.038	11.814.735	9.044.530
Pihak ketiga	36.683.563	40.188.048	39.563.144
Utang pajak	1.795.602	2.383.288	2.560.128
Biaya yang masih harus dibayar	19.104.403	16.754.640	14.809.018
Uang jaminan langganan	14.423.941	14.235.879	13.465.735
Utang biaya proyek	112.995	150.664	315.828
Pendapatan ditangguhkan	1.016.299	1.049.231	929.947
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	3.599.933	2.725.805	2.530.273
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non bank	1.851.580	1.998.476	1.860.649
Utang sewa pembiayaan	3.689.209	2.540.107	2.624.629
Utang bank	29.502.243	21.693.338	28.145.737
Utang obligasi dan sukuk ijarah	303.000	6.946.478	2.120.612
Utang listrik swasta	476.723	399.458	394.403
Utang KIK - EBA	618.904	586.620	686.819
Liabilitas imbalan kerja	3.798.885	5.232.467	5.873.558
Utang lain-lain	29.539.781	30.598.919	32.970.944
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	157.792.099	159.298.153	157.895.954
Jumlah Liabilitas	694.798.943	655.674.600	565.073.888
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.589.486.899	1.585.055.013	1.492.487.745

*tidak diaudit

Total Aset**Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.585.055.013 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp92.567.268 juta atau sekitar 6,20% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp1.492.487.745 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp54.615.846 juta.

***Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp1.589.486.899 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.431.886 juta atau sekitar 0,28% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.585.055.013 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh terdapat peningkatan pada saldo Aset Tetap dan PDP, serta dampak dari penerapan PSAK 73 Sewa yaitu adanya akun baru Aset Hak Guna pada periode berjalan sebesar Rp32,53 Triliun.

Aset Tidak Lancar***Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.433.688.340 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp54.615.846 juta atau sekitar 3,96% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp1.379.072.494 juta. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah Aset Tetap yang dimiliki perusahaan.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp1.453.404.424 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.716.084 juta atau sekitar 1,38% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.433.688.340 juta. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah Aset Tetap yang dimiliki perusahaan.

Aset Lancar***Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp151.366.673 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp37.951.422 juta atau sekitar 33,46% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp113.415.251 juta. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain dari Rp9.507.768 juta menjadi Rp47.451.084 juta terutama peningkatan pada piutang pemerintah dari Rp7.456.452 juta menjadi Rp45.426.981 juta.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp136.082.475 juta, mengalami penurunan sebesar Rp15.284.198 juta atau sekitar 10,10% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp151.366.673 juta. Hal tersebut dikarenakan penurunan signifikan pada kas dan setara kas dari Rp46.598.783 juta menjadi Rp26.315.986 juta.

Total Ekuitas***Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp929.380.413 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.966.556 juta atau sekitar 0,21% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp927.413.857 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (dalam proses penerbitan saham) Rp10,53 Triliun. Di sisi lain, Perseroan melakukan setoran dividen tunai kepada Negara Rp4 Triliun di 2019.

***Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp894.687.956 juta, mengalami penurunan sebesar Rp34.692.457 juta atau sekitar 3,73% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp929.380.413 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan mengalami kerugian bersih pada periode triwulan 1 tahun 2020 sehingga menyebabkan penurunan Saldo Laba pada Ekuitas.

Total Liabilitas***Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp655.674.600 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp90.600.712 juta atau sekitar 16,03% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp565.073.888 juta. Peningkatan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang tahun berjalan sebesar Rp89.198.513 juta.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp694.798.943 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp39.124.343 juta atau sekitar 5,97% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp655.674.600 juta. Peningkatan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada nilai liabilitas jangka panjang khususnya hutang bank dan penerbitan obligasi untuk pembiayaan investasi perusahaan, dan dampak pelemahan kurs rupiah terhadap USD pada periode Maret 2020 yang mengakibatkan naiknya saldo liabilitas dalam mata uang asing saat dikonversi ke mata uang rupiah.

Liabilitas Jangka Panjang***Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp496.376.447 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp89.198.513 juta atau sekitar 21,91% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp407.177.934 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh karena PLN lebih banyak menggunakan fasilitas kredit hutang bank dan penjualan obligasi untuk pembiayaan investasi.

Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 537.006.844 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp40.630.397 juta atau sekitar 8,19% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp496.376.447 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh PLN lebih banyak menggunakan fasilitas kredit hutang bank dan penjualan obligasi untuk pembiayaan investasi, dan dampak pelemahan kurs rupiah terhadap USD pada periode Maret 2020.

Liabilitas Jangka Pendek***Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp159.298.153 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.402.199 juta atau sekitar 0,89% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp157.895.954 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh biaya operasional PLN (pembelian listrik) yang berpengaruh pada hutang usaha PLN dan meningkatnya jumlah pinjaman yang telah jatuh tempo.

**Tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 157.792.099 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.506.054 juta atau sekitar 0,95% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp159.298.153 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh PLN lebih banyak menggunakan fasilitas kredit hutang bank dan penjualan obligasi untuk pembiayaan investasi, dan dampak pelemahan kurs rupiah terhadap USD pada periode Maret 2020.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	39.682.505	35.042.025
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(100.981.652)	(100.155.597)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	75.002.591	55.638.471

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp39.682.505 juta dan Rp35.042.025 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.682.505 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.640.480 juta atau sekitar 13,24% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp35.042.025 juta. Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp287.895.794 juta, penerimaan subsidi listrik sebesar Rp51.288.854 juta, penerimaan bunga sebesar Rp755.105 juta dan penerimaan restitusi pajak penghasilan sebesar Rp279.394 juta. Perolehan kas juga diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp248.764.095 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp23.989.254 juta, pembayaran utang kepada pemerintah sebesar Rp816.849 juta, pembayaran bunga sebesar Rp23.419.701 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp3.546.743 juta.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp100.981.652 juta dan Rp100.155.597 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp100.981.652 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp826.055 juta atau 0,82% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp100.155.597 juta. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari akuisisi entitas anak sebesar Rp332.462 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp100.431.833 juta, perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp1.118.251 juta dan penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya sebesar Rp436.079 juta. Penggunaan kas juga diimbangi dengan hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp185.527 juta, perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp224.314 juta, pembayaran kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi – bersih sebesar Rp47.596 dan penarikan investasi jangka pendek sebesar Rp879.536 juta.



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp75.002.591 juta dan Rp55.638.471 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp75.002.591 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.364.120 juta atau sekitar 34,80% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp55.638.471 juta. Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari perolehan penyertaan modal Pemerintah dalam proses penerbitan saham sebesar Rp6.500.000 juta, perolehan utang bank – jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp24.736.661 juta, perolehan utang bank – jangka panjang sebesar Rp52.410.478 juta, dan perolehan utang obligasi sebesar Rp54.597.702 juta. Perolehan kas juga diimbangi dengan pembayaran dividen sebesar Rp4.000.000 juta, pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar Rp2.738 juta, pembayaran penerusan pinjaman sebesar Rp2.566.661 juta, pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank sebesar Rp1.043.793 juta, pembayaran utang bank – jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp33.745.952 juta, pembayaran utang bank – jangka panjang sebesar Rp15.617.536 juta, pembayaran utang obligasi sebesar Rp2.279.812 juta, pembayaran utang KIK-EBA sebesar Rp966.724 juta, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp2.624.629 juta, dan pembayaran utang listrik swasta sebesar Rp394.405 juta.

KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMENT OPERASI PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak membagi segmen operasi berdasarkan wilayah geografis yang terdiri atas Sumatera, Jawa-Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Operasi Geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perseroan dan entitas anak.

Profitabilitas

Profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi dan presentase peningkatan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	29.337.252	17,06%	25.062.219	(9,21%)
Jawa-Bali & Nusa Tenggara	241.099.027	3,21%	233.606.498	7,08%
Kalimantan	7.268.463	(5,93%)	7.726.914	83,25%
Sulawesi	6.706.592	23,62%	5.425.117	29,44%
Maluku & Papua	1.229.255	14,14%	1.076.994	(4,15%)
Total	285.640.589	4,67%	272.897.742	6,89%

Pendapatan usaha secara total mengalami kenaikan sebesar 4,67% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan hamper terjadi di seluruh segmen operasi, yaitu Sumatera naik sebesar 17,06%, Jawa-Bali & Nusa Tenggara naik sebesar 3,21%, Sulawesi naik sebesar 23,63%, dan Maluku Papua naik sebesar 14,14% di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk segmen operasi Kalimantan pada tahun 2019 mengalami penurunan pendapatan usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan usaha di segmen operasi di Kalimantan disebabkan jumlah rupiah penyambungan pelanggan di tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018.



Produksi dan peningkatan/penurunan kapasitas produksi

Produksi Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi serta presentase kenaikan/penurunan pada segmen operasi pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam GWh)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	GWh	%	GWh	%
Sumatera	45.597	16%	43.309	16%
Jawa-Bali & Nusa Tenggara	12.461	4%	11.386	4%
Kalimantan	205.564	74%	198.087	74%
Sulawesi	12.314	4%	11.419	4%
Maluku & Papua	3.005	1%	2.884	1%
Total	278.941	100%	267.085	100%

Sebagai hasil dari pembangunan di Indonesia dan untuk memenuhi peningkatan permintaan atas energi listrik hasil dari pembangunan, produksi Perseroan di seluruh segmen operasi meningkat dengan total kenaikan sebesar 4,4% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini terutama disebabkan pertumbuhan pelanggan di masing-masing segmen operasi, serta disebabkan meningkatnya permintaan di pelanggan *existing*.

Pada regional Sumatera mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yaitu sebesar 93,64% dengan peningkatan kapasitas dari 550 MW menjadi 1.065 MW. Untuk regional Kalimantan mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik tenaga Air yaitu sebesar 64,52% dengan peningkatan kapasitas dari 124 MW menjadi 204 MW. Regional Sulawesi mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya yaitu sebesar 400% dengan peningkatan kapasitas dari 4 MW menjadi 20 MW. Regional Jawa Bali Nusra mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya yaitu sebesar 260% dengan peningkatan kapasitas dari 10 MW menjadi 36 MW. Regional Maluku Papua mengalami peningkatan signifikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap yaitu sebesar 56,76% dengan peningkatan kapasitas dari 222 MW menjadi 348 MW.

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi dan persentase peningkatan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	29.337.252	17,06	25.062.219	-9,21
Jawa-Bali & Nusa Tenggara	241.099.027	3,21	233.606.498	7,08
Kalimantan	7.268.463	-5,93	7.726.914	83,25
Sulawesi	6.706.592	23,62	5.425.117	29,44
Maluku & Papua	1.229.255	14,14	1.076.994	-4,15
Total	285.640.589	4,67	272.897.742	6,89

Pendapatan usaha secara total mengalami kenaikan sebesar 4,67% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi hampir diseluruh segmen operasi, yaitu Sumatera naik sebesar 17,06%, Jawa-Bali & Nusa Tenggara naik sebesar 3,21%, Sulawesi naik sebesar 23,62%, dan Maluku & Papua naik sebesar 14,14% di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk segmen operasi Kalimantan pada tahun 2019 mengalami penurunan pendapatan usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan usaha di segmen operasi di Kalimantan disebabkan oleh jumlah rupiah penyambungan pelanggan ditahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018.



Kontribusi Terhadap Penjualan atau pendapatan dan laba usaha emiten

Kontribusi terhadap pendapatan di masing-masing segmen operasi terhadap Perseroan dan Entitas Anak dalam persentase adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	29.337.252	10,27	25.062.219	9,18
Jawa-Bali & Nusa Tenggara	241.099.027	84,41	233.606.498	85,60
Kalimantan	7.268.463	2,54	7.726.914	2,83
Sulawesi	6.706.592	2,35	5.425.117	1,99
Maluku & Papua	1.229.255	0,43	1.076.994	0,39
Total	285.640.589	100	272.897.742	100

Kontribusi terhadap laba usaha emiten per segmen operasi terhadap Perseroan dan Entitas Anak dalam prosentase rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	(7.703.799)	35,15	(15.008.395)	29,77
Jawa-Bali & Nusa Tenggara	(3.758.437)	17,15	(26.978.705)	53,51
Kalimantan	(4.302.413)	19,63	(1.953.277)	3,87
Sulawesi	(3.293.859)	15,03	(3.605.740)	7,15
Maluku & Papua	(2.856.839)	13,04	(2.875.809)	5,70
Hasil Segmen	(21.915.347)	100,00	(50.421.926)	100,00
Pendapatan tidak dapat dialokasikan - bersih	(7.885.002)		15.130.779	
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan	55.919.559		55.191.985	
Manfaat (Beban) pajak	(21.797.080)		(8.325.082)	
Laba Tahun Berjalan	4.322.130		11.575.756	

Dari kedua tabel di atas, kontribusi pendapatan usaha dan kontribusi laba pada masing-masing segmen operasi terhadap pendapatan usaha dan laba Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan yang paling besar adalah di segmen operasi Jawa-Bali yang mencapai 85% di tahun 2018 dan 84% di tahun 2019.

RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Likuiditas	0,95x	0,72x
Solvabilitas	0,41x	0,38x
EBITDA/Beban keuangan	3,32	3,50
Imbal hasil ekuitas	0,47%	1,25%
Imbal hasil aset	0,27%	0,78%

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yaitu rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.



Peningkatan rasio likuiditas Perseroan pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya peningkatan aset lancar sebesar 33,46% yang terutama terkait dengan peningkatan piutang lain-lain dan pajak dibayar di muka, namun di sisi lain terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek yang hanya sebesar 0,89% atas peningkatan utang obligasi dan sukuk ijarah.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil penjualan tenaga listrik dan jasa Perseroan lainnya, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang jangka pendek dan jangka panjang.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan, antara lain fasilitas kredit investasi dari bank yang belum seluruhnya ditarik oleh Perseroan, serta fasilitas kredit modal kerja yang tersedia.

Perseroan tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan.

Hingga saat ini, kebutuhan modal kerja Perseroan masih mencukupi. Dalam hal kebutuhan modal kerja nantinya tidak mencukupi, maka Perseroan dapat menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang telah tersedia.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Peningkatan rasio solvabilitas Perseroan pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas Perseroan yang terutama terkait dengan peningkatan utang obligasi dan sukuk ijarah serta utang bank.

EBITDA/Beban Keuangan

EBITDA/Beban keuangan menunjukkan rasio EBITDA, yaitu laba (rugi) usaha ditambah biaya penyusutan, biaya amortisasi dan biaya aktuarial imbalan kerja dikurangi pembayaran manfaat dibandingkan dengan beban keuangan.

Penurunan EBITDA/Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2019 disebabkan oleh Beban Keuangan meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan EBITDA. Dimana presentase peningkatan EBITDA adalah sebesar 8% dan Beban Keuangan sebesar 14%.

Imbal Hasil Ekuitas ("ROE")

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas.

Rasio ROE Perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar 62,66% akibat dari peningkatan beban pajak pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Imbal Hasil Aset ("ROA")

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset.

Rasio ROA Perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar 62,66% akibat dari peningkatan beban pajak pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.



5. PEMBATASAN TERHADAP ENTITAS ANAK UNTUK PENGALIHAN DANA KEPADA PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki pembatasan terhadap Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, belanja modal Perseroan berjumlah masing masing sebesar Rp104.786.000 juta dan Rp115.764.000 juta . Berikut ini rincian belanja modal yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk proyek pembangkitan, transmisi, dan distribusi:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pembangkit	36,782	42,609
Transmisi	38,967	44,056
Distribusi	29,036	29,099
Jumlah	104,786	115,764

Rincian belanja modal yang dilakukan Perseroan tersebut termasuk dan tidak terbatas pada belanja modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi maupun isu lingkungan hidup pada proyek pembangkitan, transmisi dan distribusi.

Tabel di bawah ini merupakan belanja modal yang telah ditetapkan Perseroan untuk tahun 2020, sesuai dengan program investasi modal Perseroan. Jumlah yang dianggarkan dapat bervariasi dari jumlah aktual belanja modal dikarenakan berbagai alasan, termasuk pelaksanaan *Fast Track Program I*, *Fast Track Program II*, Program 35.000 MW untuk Indonesia, perubahan dalam jumlah fasilitas yang akan dibangun dan periode pelaksanaan konstruksi fasilitas tersebut, perubahan nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga, serta faktor lainnya.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Pembangkit	40,342
Transmisi	23,955
Distribusi	24,884
Jumlah	89,181

Pada tahun 2020 Perseroan telah merencanakan belanja modal sebesar Rp17,9 miliar yang dimaksudkan untuk pembangunan proyek 35.000 MW. Adapun bauran geografis rencana belanja modal tersebut sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Sumatera	4.897.929
Jawa	6.868.739
Kalimantan	1.506.496
Sulawesi & Nusa Tenggara	3.772.346
Maluku & Papua	947.028
Jumlah	17.992.538

Belanja modal tersebut didanai dari dana internal dan eksternal Perseroan yang terdiri dari Pinjaman Perbankan, Obligasi, dan Penyertaan Modal Negara. Selain Penyertaan Modal Negara, dana eksternal yang didapatkan Perseroan tersebut terdiri dari mata uang asing dan rupiah. Maka dari itu dalam memitigasi risiko fluktuasi kurs mata uang asing Perseroan telah melakukan Lindung Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014.



Adapun Program investasi yang dijalankan pada tahun 2020 bertujuan untuk:

- i. Memenuhi kebutuhan kapasitas dan energi listrik dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara *least cost*.
- ii. Mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik yang terjadi pada beberapa daerah
- iii. Menurunkan harga pasokan energi primer baik gas alam dan batubara
- iv. Memperbaiki bauran bahan bakar minyak (*fuel mix*) untuk menurunkan BPP yang dicerminkan oleh pengurangan penggunaan BBM sejalan dengan target pemerintah tahun 2020 Perseroan merencanakan penggunaan bahan bakar minyak dengan target *fuel mix* 3,76%
- v. Meningkatkan rasio energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi, air dan surya
- vi. Mencapai target rasio elektrifikasi sesuai RKAP 2020 sebesar 99,9%
- vii. Mencapai target susut jaringan sesuai RKAP 2020 sebesar 9,15%
Mewujudkan keandalan dan kualitas listrik yang makin membaik sehingga tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- viii. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi asset.

Dari Belanja Modal tersebut Perseroan memiliki target fisik sebagai berikut:

1. Program investasi distribusi menargetkan sambungan baru/penambahan pelanggan sebanyak 3,94 juta pelanggan atau setara 8.655 MVA daya tersambung yang dilayani dengan penambahan kapasitas trafo distribusi sebesar 3.889 MVA, penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 19,6 ribu kms dan penambahan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 18,9 ribu kms.
2. Target fisik tersebut sudah termasuk program Listrik Pedesaan untuk peningkatan rasio elektrifikasi pada daerah yang belum memiliki akses listrik.
3. Program investasi transmisi dan gardu induk yang direncanakan beroperasi dalam tahun 2020 adalah 5.068 kms dengan penambahan kapasitas trafo pada gardu induk sebesar 7.742 MVA.
4. Menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik 35 GW dengan target tambahan pembangkit di tahun 2020 sebesar Rp4.638 MW, termasuk pembangkit yang dibangun IPP sebesar 3.324 MW.
5. Rencana untuk evakuasi daya pembangkit program 35 GW, Perseroan akan melaksanakan program pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk. Selain melaksanakan pembangunan pembangkit dan jaringan evakuasinya, Perseroan juga merencanakan untuk berinvestasi dalam infrastruktur pasokan energi primer, batubara dan gas alam seperti akuisisi/joint venture dengan perusahaan tambang batubara, pengadaan FSRU dan terminal LNG.
6. Pemulihan dan peningkatan kapasitas asset pembangkit, transmisi, gardu induk dan jaringan distribusi yang meliputi kegiatan major overhaul rehabilitasi, uprating dan penguatan jaringan.

Pelaksanaan rencana belanja modal tersebut melibatkan berbagai pihak ketiga yang ditetapkan berdasarkan tender pekerjaan yang dilakukan Perseroan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diikat dalam sebuah perjanjian yang mengatur setiap sanksi yang diperjanjikan dalam setiap perjanjian tersebut. Pekerjaan tersebut merupakan belanja modal Perseroan yang didanai menggunakan pendanaan internal perusahaan, penerusan pinjaman dari pemerintah maupun pinjaman langsung dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah melakukan manajemen risiko atas fluktuasi valuta asing dengan melakukan transaksi *hedging* sesuai dengan PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Hutang Luar Negeri Korporasi Non-Bank.



7. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019			
	JPY ¹⁾	US\$ ¹⁾	EUR ¹⁾	Lain-lain ²⁾
Aset moneter				
Piutang pihak berelasi	-	68.458.611	-	-
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	39.796.118.675	49.001.061	-	-
Kas dan setara kas	14.334.466.962	816.951.292	244.679.781	148.335
Investasi jangka pendek	-	1.000.000	-	-
Jumlah aset moneter	54.130.585.637	935.410.964	244.679.781	148.335
Liabilitas moneter				
Penerusan pinjaman	158.867.568.117	1.240.170.346	19.375.532	6.512.892
Utang sewa pembiayaan	103.641.300.467	56.099.845	-	-
Utang bank	51.897.893.380	6.292.235.622	304.144.617	-
Utang obligasi dan sukuk ijarah	23.200.000.000	10.025.948.000	1.000.000.000	-
Utang listrik swasta	-	491.396.727	-	-
Utang lain-lain	134.943.554	505.948.920	119.109.383	7.490.571
Utang biaya proyek	34.466.374	1.046.916	238.610	-
Utang usaha	-	898.507.498	326.270	30.385.801
Biaya masih harus dibayar	8.882.526.820	244.021.636	5.459.709	64.218
Jumlah liabilitas moneter	346.658.698.712	19.755.375.510	1.448.654.121	44.453.482
Liabilitas moneter bersih	(292.528.113.075)	(18.819.964.546)	(1.203.974.340)	(44.305.147)
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(37.433.828)	(261.616.421)	(18.768.268)	(615.886)

1) dalam jumlah penuh

2) aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp9.486.326 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan rugi kurs sebesar Rp10.926.741 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi neto valuta asing Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar setara Rp318.434.403 juta. Perseroan telah melakukan lindung nilai atas transaksi-transaksi valuta asing Perseroan pada tahun 2018.

Perseroan melakukan manajemen risiko atas fluktuasi valuta asing dengan melakukan transaksi *hedging* sesuai dengan PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Hutang Luar Negeri Korporasi Non-Bank, dimana untuk tahun 2016 kewajiban pemenuhan rasio lindung nilai minimum sebesar 25% dari net eksposur valas, dan rasio likuiditas minimum sebesar atau lebih dari sama dengan 70%. Total transaksi lindung nilai yang telah dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2019 sebesar Rp38.835.924 juta.

Sejak tahun 2015, risiko ini diatasi dengan menerapkan tarif tenaga listrik berkala yaitu mekanisme penyesuaian tarif berdasarkan fluktuasi nilai tukar, inflasi dan harga bahan bakar, setelah Pemerintah menetapkan tarif dasar listrik yang mencapai tingkat keekonomiannya. Disamping itu Perseroan juga mengurangi pertumbuhan kewajiban dalam valuta asing dengan membeli listrik dari pengembang swasta dalam mata uang Rupiah, kondisi ini dapat diwujudkan jika pendanaan proyek dibiayai dengan pinjaman Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pembayaran-pembayaran yang dilakukan terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibayar dengan mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi tersebut antara lain adalah untuk pembelian tenaga listrik swasta, impor material, pemeliharaan, pembayaran bahan bakar minyak, gas dan uap panas bumi kepada Pertamina, pembayaran premi asuransi dalam mata uang asing serta pembayaran kembali pinjaman tertentu berikut bunga pinjamannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.



Untuk membayar transaksi-transaksi tersebut di atas, Perseroan memiliki rekening bank dalam mata uang asing yang jumlahnya sangat terbatas pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank DKI Jakarta, PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank International Indonesia Tbk., dan Deutsche Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kurs konversi yang digunakan Perseroan dan Entitas Anak serta kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Keterangan	Kurs Tengah 31 Desember 2019
Mata uang	
JPY	128
US\$	13.901
EUR	15.589
AUD	9.739
CHF	14.366
GBP	18.250
NZD	9.360

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak mencatat keuntungan kurs mata uang asing bersih sebesar Rp9.486.326 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

8. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang memiliki eksposur terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap memberikan eksposur dengan risiko suku bunga nilai wajar. Manajemen risiko yang dilakukan Perseroan adalah dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Perseroan memiliki eksposur terhadap perubahan tingkat suku bunga terutama terkait dengan utang tingkat bunga mengambang jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah utang Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp453.218 juta, dimana sebesar Rp260.101 juta atau 57,39% dari saldo utang Perseroan memiliki tingkat suku bunga tetap, sedangkan sisanya sebesar Rp193.116 juta atau 42,61% dari saldo utang Perseroan memiliki tingkat suku bunga mengambang.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan mempengaruhi liabilitas Perseroan karena Perseroan memiliki utang dalam mata uang asing, serta utang dalam negeri Perseroan dengan tingkat bunga floating.
- a. Kebijakan fiskal seperti perubahan tariff pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
- b. Kebijakan infrastruktur pemerintah, khususnya program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung program 35.000 MW.
- c. Tarif dan subsidi listrik yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak pada pendapatan Perseroan.

10. BAHASAN MENGENAI JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tahun 2019 Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar USD18.105 juta, Rp247 triliun, JPY337 miliar, dan EUR1.323 juta. Dengan demikian total pinjaman Perseroan yang masih terutang sebesar ekuivalen Rp453.218 miliar.



Adapun sumber pinjaman Perseroan tersebut terdiri dari penerusan pinjaman (two-step loans) Rp37.978 miliar, utang kepada Pemerintah Rp955 miliar, utang kepada lembaga keuangan Pemerintah non-bank Rp5.403 miliar, pinjaman bank yang dijamin – terkait dengan program percepatan Rp22.789 miliar, pinjaman bank yang dijamin – tidak terkait dengan program percepatan Rp183.814 miliar, utang bank yang tidak dijamin Rp159.800 miliar, KIK-EBA Rp1.941 miliar, utang obligasi – global bond Rp157.928 miliar dan obligasi dan sukuk ijarah Rp29.967 miliar, utang sewa pembiayaan Rp14.109 miliar dan utang listrik swasta sebesar Rp6.831 miliar. Berdasarkan jenis bunga pinjaman, pinjaman Perseroan didominasi oleh pinjaman dengan suku bunga tetap sebesar 57,39% dari total pinjaman, sedangkan sisanya sebesar 42,61% merupakan pinjaman dengan suku bunga mengambang. Selain itu berdasarkan jenis mata uangnya, bahwa pinjaman Perseroan didominasi oleh pinjaman dalam mata uang asing dengan persentase sebesar 68,45%, sedangkan untuk mata uang Rupiah sebesar 31,55% dari total pinjaman.

Atas pinjaman perseroan yang masih terhutang tersebut, terdapat beberapa pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 secara berturut turut sebesar setara Rp34,3 triliun, Rp50,2 triliun, Rp53.6 triliun dan Rp64 triliun. Dengan demikian sisanya sebesar Rp235,7 akan jatuh tempo diatas tahun 2024.

Perseroan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan profil pinjaman Perseroan berdasarkan waktu jatuh tempo, jenis bunga pinjaman dan jenis mata uang untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perseroan. Selain itu dalam mengurangi risiko fluktuasi mata uang asing perseroan telah melakukan lindung nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.16/21/PBI/2014.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Harga pasar atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Pengendalian dilakukan secara langsung oleh Pemerintah terhadap Perseroan sebagaimana Tarif Listrik yang diatur langsung oleh Pemerintah sehingga dapat berdampak material atas kondisi keuangan Perseroan

Pemerintah adalah satu-satunya pemegang saham Perseroan, dan melalui perwakilannya, Pemerintah akan terus memiliki pengendalian atas Perseroan yang bertujuan utama untuk memberikan pasokan listrik ke seluruh wilayah di Indonesia. Secara historis, Perseroan beroperasi sebagai penyedia jasa untuk Pemerintah, dan, oleh karena itu, Pemerintah telah mempengaruhi, dan akan terus mempengaruhi, strategi dan kegiatan usaha Perseroan. Pemerintah juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan BUMN lainnya yang melakukan bisnis dengan Perseroan, termasuk PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") yang merupakan pemasok bahan bakar utama Perseroan. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas kemungkinan akan mempertahankan kontrol atas Perseroan, termasuk kemampuan untuk menyetujui hal-hal seperti pengangkatan dan penggantian Komisaris dan Direktur Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan struktur permodalan dan merger dan akuisisi, konsolidasi atau likuidasi.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan mendahulukan kepentingan Perseroan dibandingkan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Apabila Perseroan diminta untuk bertindak demi kepentingan Pemerintah dan kepentingan tersebut berbeda dari kepentingan Perseroan atau apabila Pemerintah memihak kepentingan rakyat atau pihak lain, tindakan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan seperti tarif listrik yang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1) ***Apabila harga BBM, gas alam atau batubara naik, beban usaha Perseroan akan meningkat sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan***

Profitabilitas Perseroan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh harga BBM, gas alam dan batubara. Sebagai contoh, sebesar 6,8%, dan 5,0% dari tenaga listrik yang diproduksi dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar BBM masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, sedangkan beban BBM tercatat sebesar 23,1% dan 18,2% dari total beban bahan bakar dan pelumas dalam periode yang sama. Apabila harga BBM, gas alam dan/atau batubara meningkat, hal tersebut akan meningkatkan beban usaha Perseroan yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.



Sejak Pemerintah mencabut subsidi BBM di bulan Oktober 2005, harga BBM yang dibayar oleh Perseroan berfluktuasi setiap bulan berdasarkan harga pasar, yaitu rata-rata harga harian (harga rata-rata di Singapura) dari produk minyak tertentu di bulan sebelumnya (Mid-Oil Platts Singapore atau MOPS). Hal ini telah mengakibatkan Perseroan membayar harga BBM lebih tinggi. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2005, ketika harga BBM disubsidi oleh Pemerintah, harga BBM untuk Perseroan dipatok pada Rp1.650 per liter untuk BBM jenis solar yang memiliki angka proforma cetane number 45 (*high-speed diesel oil* atau "HSD"), yang merupakan jenis bahan bakar paling mahal yang digunakan oleh Perseroan dan mewakili sekitar 84,1% dari total beban bahan bakar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Pada bulan Oktober 2005, ketika Pemerintah mencabut subsidi BBM, harga HSD naik menjadi Rp6.000 per liter, mencerminkan harga pasar untuk BBM. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, harga pembelian HSD rata-rata Perseroan di wilayah yang dilayani oleh Perseroan berkisar antara Rp7.153 per liter untuk harga terendah dan Rp8.493 per liter untuk harga tertinggi yang mewakili sekitar 32,25% dari beban bahan bakar Perseroan. Harga BBM per liter telah mengalami fluktuasi sesuai dengan harga minyak dunia dan dipengaruhi oleh nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah. Harga minyak dunia dapat berubah dikarenakan faktor-faktor di luar kendali Perseroan. Faktor-faktor ini meliputi antara lain:

- kejadian dan kondisi internasional, serta perkembangan dan ketidakstabilan politik di wilayah penghasil minyak bumi;
- kebijakan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi dan negara-negara penghasil minyak bumi lainnya yang berusaha untuk menetapkan dan mempertahankan tingkat harga minyak di pasar dan pengaruhnya terhadap harga pasar;
- peraturan Pemerintah dan pemerintah asing sehubungan dengan industri minyak dan energi secara umum;
- tingkat dan jangkauan aktivitas spekulasi minyak;
- kondisi cuaca dan musiman; dan
- kondisi perekonomian nasional dan regional secara keseluruhan.

Dikarenakan peraturan-peraturan Pemerintah mengenai tarif tenaga listrik, dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan harga minyak bumi kepada pelanggan dalam bentuk kenaikan tarif. Perseroan juga memperoleh sebagian dari batubara yang diperlukan oleh Perseroan di pasar spot atau pasar jangka menengah pada harga pasar yang berlaku, sehingga meningkatkan risiko Perseroan melakukan pembelian pada harga yang tinggi.

2) *Ketidakmampuan pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit tenaga listrik lainnya Perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan dapat menghambat*

Berdasarkan FTP I, Perseroan awalnya ditugaskan untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, termasuk 10 pembangkit berkapasitas total 7.490 MW di Jawa-Bali dan 32 pembangkit dengan kapasitas total 2.769 MW di luar Jawa-Bali. Dua dari 42 lokasi tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan dan kontraktor EPC yang bermasalah, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menandatangani 37 kontrak EPC untuk membangun 37 pembangkit listrik berbahan bakar batubara di 10 lokasi di Jawa-Bali dan 27 lokasi di luar Jawa-Bali.

Berdasarkan syarat dan ketentuan dari 37 kontrak EPC di bawah FTP I, Perseroan diwajibkan untuk langsung membayar kontraktor sekitar 15,0% dari nilai kontrak dan mendanai sisa 85,0% dari nilai kontrak melalui kredit ekspor atau fasilitas pembiayaan bank dari satu atau lebih bank, umumnya dalam waktu 90 atau 120 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pendanaan dalam bentuk kredit ekspor atau fasilitas pembiayaan bank untuk membangun pembangkit listrik di 33 dari 34 lokasi yang direncanakan dan Perseroan telah menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik di 29 lokasi dengan kapasitas sebesar 9.697 MW atau setara 97,7% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 9.927 MW telah beroperasi. Perseroan berharap dapat memperoleh pendanaan untuk lokasi yang tersisa pada tahun 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp173.251 miliar



terkait FTP I untuk konstruksi dan renovasi proyek pembangkit listrik, proyek pembangunan transmisi dan biaya pinjaman.

Sesuai dengan FTP II, Perseroan telah ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.134 MW (termasuk pembangkit tenaga listrik milik IPP) dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah di Indonesia di luar FTP I. Lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun dalam FTP II diharapkan dapat dilaksanakan oleh IPP dan sisanya akan dilaksanakan oleh Perseroan. Pendanaan untuk pembangunan di lokasi-lokasi ini diharapkan akan dilakukan melalui kombinasi anggaran belanja negara, *two-step loan*, pinjaman bank, pasar modal dan sumber kas internal.

Untuk menjawab kebutuhan listrik yang terus bertambah dan untuk mencapai target rasio elektrifikasi, Pemerintah mengumumkan Program 35.000 MW pada tahun 2015. Program ini akan membutuhkan investasi dalam jumlah signifikan yang diperkirakan lebih dari Rp1.127 triliun. Dalam rangka mengurangi beban pendanaan, Perseroan berencana membangun pembangkit tenaga listrik yang akan menghasilkan total tenaga listrik sekitar 8.649 MW sedangkan sisanya sebesar 26.620 MW akan dibangun oleh IPP.

Perseroan memperkirakan total investasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dan IPP untuk menyelesaikan FTP II dan Program 35.000 MW akan mencapai total sekitar US\$89.893 juta untuk proyek pembangkit tenaga listrik dan sekitar US\$24.570 juta untuk proyek pembangunan transmisi. Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan telah menarik sekitar Rp106.187 miliar dari fasilitas pinjaman untuk FTP II dan Program 35.000 MW, di luar IPP. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah mengeluarkan sebesar US\$6.985 juta untuk belanja modal dan Perseroan memperkirakan akan mengeluarkan belanja modal tambahan untuk melaksanakan proyek baru, termasuk proyek-proyek dalam FTP dan Program 35.000 MW, serta untuk mengganti aset dan infrastruktur operasional. Belanja modal ini rencananya akan didanai menggunakan kombinasi kas internal dan pendanaan eksternal.

Pelaksanaan dan penyelesaian program-program ini akan membutuhkan pendanaan dalam jumlah signifikan yang perlu didapatkan oleh Perseroan dan IPP. Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal, ketersediaan pinjaman dari bank atau kreditur lain, peringkat kredit dan kinerja keuangan, perolehan persetujuan Pemerintah, pembatasan penanaman modal asing di Indonesia dan ketentuan pajak, UUPT dan UUPM yang berlaku di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan IPP akan dapat memperoleh pendanaan tambahan tepat pada waktunya atau pada syarat dan ketentuan komersial yang dapat disetujui sehingga hal ini dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis, kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi Perseroan atau menyelesaikan program-program ini sesuai jadwal atau sama sekali.

3) Perseroan telah melakukan perubahan pencatatan Perhitungan PJBL IPP sehingga mengakibatkan informasi keuangan Perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk diperbandingkan

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak dapat langsung diperbandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi. Pada tahun 2016, Perseroan tidak lagi menerapkan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, untuk PJBL dengan IPP sesuai dengan POJK No. 6/2017 dimana Perseroan menerapkan ketentuan ini untuk PJBL dengan IPP pada tahun 2015. Dengan tidak lagi diterapkannya ISAK 8 pada tahun 2016, hal ini mengakibatkan porsi PJBL dengan IPP dalam jumlah yang signifikan tidak lagi diperlakukan sebagai sewa pembiayaan. Sebagai akibatnya, porsi beban Perseroan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dicatat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang memiliki dampak signifikan dan langsung terhadap komparabilitas laporan keuangan Perseroan selama periode 2016-2019. Manajemen Perseroan terus menerus mengevaluasi kesesuaian berbagai kebijakan akuntansi sebagaimana diwajibkan atau dihimbau oleh berbagai peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah, termasuk badan pengawas seperti OJK. Manajemen Perseroan sebelumnya telah mengambil posisi yang berbeda terkait kesesuaian perlakuan PJBL dengan IPP sebagai sewa pembiayaan atas dasar faktor-faktor yang



diyakini beralasan dalam situasinya. Dengan diberlakukannya POJK No. 6/2017, Perseroan berharap untuk terus tidak menerapkan ISAK 8 ke Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perseroan di masa yang akan datang, setidaknya sampai tugas Perseroan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia telah selesai atau dihentikan. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa Pemerintah atau OJK tidak akan mengeluarkan peraturan atau panduan yang berbeda atau baru di masa depan yang mengarahkan Perseroan untuk kembali menerapkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagai sewa pembiayaan. Oleh karena itu, setiap perubahan penerapan terhadap kebijakan akuntansi tersebut dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, termasuk penyajian kembali atas informasi keuangan tahun sebelumnya akibat perubahan tersebut, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak dari tahun ke tahun dan kemampuan investor untuk memahami hasil dan kondisi usaha Perseroan

4) *Risiko yang terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tambahan dan akuisisi aset pembangkit listrik lainnya, khususnya keberhasilan penyelesaian FTP dan implementasi Program 35.000 MW*

Penyelesaian Program *fast track* dan pelaksanaan Program 35.000 MW dapat menempatkan beban pada manajemen, operasional dan sumber daya keuangan Perseroan. Kemungkinan Perseroan menghadapi kesulitan dengan perluasan ini dalam integrasi operasi, teknologi, dan personel. Kemampuan Perseroan untuk menerapkan dan memperoleh pendanaan untuk program-program ini akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk secara efektif memantau operasi, mengendalikan biaya, mempertahankan kontrol kualitas yang efektif dan memperkuat sistem manajemen, teknis dan akuntansi internal Perseroan. Kemampuan untuk mengamankan pendanaan yang diperlukan untuk program Perseroan mungkin sulit karena pembatasan perjanjian pinjaman dengan Pemerintah, keterlambatan dalam persetujuan anggaran Pemerintah, persyaratan investasi tunai dan arus kas bersih yang jatuh di bawah target.

Keberhasilan program-program ini akan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk sumber pasokan batubara yang cukup di dalam negeri dengan harga lebih rendah daripada yang akan tersedia jika Perseroan harus mengimpor batu bara dari luar negeri. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh batu bara yang diperlukan untuk pabrik dengan harga yang wajar atau tidak sama sekali, Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi perkiraan dan target sehubungan dengan Program *fast track*.

Selanjutnya, keberhasilan program-program ini juga tergantung pada kemampuan Perseroan untuk memilih kontraktor, sumber tenaga kerja, bekerja sama dengan perusahaan milik negara lainnya, masuk ke dalam PPA baru dan pengadaan dan kontrak konstruksi, memperoleh tanah, pembangunan fasilitas transmisi dan distribusi untuk mendukung listrik baru, menghasilkan tanaman. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat membangun fasilitas yang diperlukan sesuai jadwal.

5) *Keterlambatan atau kendala dalam memproses hak atas tanah dapat mengganggu rencana ekspansi Perseroan*

Kontrak pengadaan dan konstruksi yang ditandatangani Perseroan sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan, seperti Program 35.000 MW, mewajibkan Perseroan untuk mendapatkan hak atas tanah yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi di lokasi-lokasi yang telah disetujui.

Peraturan Pemerintah dapat menghambat atau membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh hak atas tanah yang diperlukan sebelum Perseroan dapat memulai konstruksi fasilitas pembangkit tenaga listrik, saluran transmisi dan jaringan distribusi baru atau melakukan ekspansi terhadap fasilitasnya saat ini. Proses untuk memperoleh hak atas tanah adalah proses bertahap yang memakan waktu dimana setiap tahapan memiliki kemungkinan mengalami penundaan dan hal ini dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai jadwal atau sama sekali. Kegagalan untuk memperoleh hak atas tanah dapat mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat digunakan dan mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan biaya-biaya yang timbul dari akuisisi tanah tersebut atau bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli tanah pengganti. Selain itu, tidak ada kepastian mengenai pembagian wewenang antara



pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan tata acara permohonan hak atas tanah, perpanjangan izin dan persetujuan serta pengawasan terhadap ketaatan pada peraturan lingkungan hidup.

Apabila Perseroan gagal memperoleh, atau menghadapi keterlambatan yang signifikan dalam memperoleh hak atas tanah untuk proyek-proyek Perseroan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan Perseroan.

6) *Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi di masa mendatang untuk menutup biaya-biaya yang timbul dari pembangkitan tenaga listrik atau subsidi akan diterima oleh Perseroan tepat pada waktunya*

Tarif jual tenaga listrik Perseroan diatur oleh Pemerintah. Tarif listrik yang dapat ditagihkan kepada beberapa golongan pelanggan secara historis lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik sehingga Perseroan bergantung pada subsidi Pemerintah untuk memberikan kompensasi secara penuh atas selisih antara biaya pokok penyediaan dengan pendapatan yang diperoleh untuk penyediaan tenaga listrik kepada kelompok pelanggan tersebut. Cara perhitungan dan pembayaran subsidi Pemerintah telah berubah dari waktu ke waktu. Di masa lalu, anggaran subsidi tahunan untuk Perseroan yang sebelumnya telah disetujui selalu mengalami penyesuaian ke nilai yang lebih rendah berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK. Revisi ini telah mengakibatkan penerimaan subsidi lebih rendah secara signifikan dari biaya aktual. Revisi ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Berdasarkan PMK No. 44/PMK.02/2017 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 174 / PMK.02 /2019, Perseroan dapat melakukan koreksi dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran subsidi listrik antara yang telah dibayar kepada Perseroan dengan hasil penelitian dan verifikasi dan memohon pencairan subsidi listrik yang lebih cepat. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa pembayaran subsidi di masa depan akan dilakukan tepat waktu atau sama sekali. Lebih lanjut, metode perhitungan atau pembayaran subsidi dapat diubah dari waktu ke waktu sehingga menjadi tidak menguntungkan bagi Perseroan. Perubahan ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Adapun pembayaran subsidi dan/atau kompensasi oleh Pemerintah pada dasarnya kompensasi dibayarkan oleh pemerintah setelah dikeluarkan DIPA oleh pemerintah menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Sedangkan untuk subsidi bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik diatur bahwa subsidi akan dibayarkan setiap bulan sebesar 95% dari hasil perhitungan yang telah diverifikasi, selain itu PLN juga mempunyai fasilitas kredit dari lembaga bank/non bank baik *onshore* atau *offshore* sehingga risiko yang timbul dapat diminimalisir.

7) *Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas yang boleh ditagihkan oleh Perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh Pemerintah*

Pemerintah menetapkan batasan tarif listrik yang boleh dijual oleh Perseroan. Tarif tenaga listrik diusulkan oleh Kementerian ESDM dan ditetapkan oleh Presiden. Sesuai dengan Permen ESDM No. 28/2016, sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 3/2020, Pemerintah menetapkan mekanisme penyesuaian tarif tenaga listrik untuk 13 golongan pelanggan. Namun demikian, penyesuaian tarif hanya diterapkan untuk 12 jenis pelanggan yang mewakili keseluruhan 65,0% dari total pendapatan sebagaimana yang direncanakan dalam APBN 2017. Sebagai hasilnya, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU BUMN, Pemerintah wajib membayarkan subsidi listrik untuk mengkompensasi selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang ditetapkan di bawah biaya pokok penyediaan dan margin PSO sebesar 7,0% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai belanja modal.



Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan merubah tingkat margin PSO saat ini atau Pemerintah akan menyetujui kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di masa mendatang, terutama dalam masa resesi ekonomi. Di masa lalu, sentimen publik yang negatif telah mempengaruhi kesediaan Pemerintah untuk mempertahankan tarif tenaga listrik yang rendah. Apabila tarif tenaga listrik tetap pada harga saat ini, mengalami penurunan atau kenaikan yang terbatas, terutama apabila beban usaha tidak berubah atau terus meningkat, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

8) Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, gardu induk dan pembangkitan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Pembangunan pembangkit listrik melibatkan banyak risiko, termasuk:

- kekurangan peralatan dan material;
- penghentian pekerjaan;
- gangguan cuaca;
- masalah engineering, desain, lingkungan dan geologi yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- keterlambatan perizinan;
- mogok atau kerusakan tenaga kerja, kecelakaan kerja; dan
- kenaikan biaya yang tidak diantisipasi.

Salah satu risiko tersebut dapat mengakibatkan pembangunan tenaga listrik mengalami penundaan atau bertambahnya biaya pekerjaan (*cost overrun*). Keterlambatan penyelesaian konstruksi dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kehilangan pendapatan. Tidak ada jaminan bahwa pembangunan pembangkit tenaga listrik atau konstruksi proyek lainnya akan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan anggaran. Setiap keterlambatan dalam waktu yang lama dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

9) Perseroan dapat menghadapi keterlambatan atau kendala lain dalam memperoleh persetujuan Pemerintah atau persetujuan terkait lainnya sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan dari Pemerintah untuk membangun pembangkit tenaga listrik tambahan dan proses untuk memperoleh persetujuan tersebut merupakan proses yang kompleks dan panjang. Pembangunan pembangkit tenaga listrik baik yang baru maupun yang sudah ada pada prinsipnya mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak berwenang yang relevan sebagai berikut:

- persetujuan atas proposal proyek;
- persetujuan atas hasil studi kelayakan (rancangan awal dan anggaran proyek dalam hal proyek utama); dan
- persetujuan atas laporan dimulainya pembangunan.

Dalam mengembangkan pembangkit tenaga listrik, terdapat banyak izin dan persetujuan yang wajib diperoleh dari pemerintah daerah, propinsi maupun pusat sesuai kewenangannya masing-masing untuk hal-hal terkait lokasi, konstruksi, lingkungan hidup, izin usaha dan lainnya. Selain itu, persetujuan Pemerintah diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelengkap untuk mendukung proyek pembangkit listrik. Perseroan juga harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan sebelum menandatangani kontrak apapun yang memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih lama atau kontrak dengan nilai melebihi batasan tertentu. Tidak ada jaminan bahwa pembangkit tenaga listrik tambahan atau ekspansi atas pembangkit tenaga listrik yang ada saat ini akan mendapatkan setiap persetujuan yang diperlukan tepat pada waktunya atau sama sekali. Keterlambatan dalam waktu yang lama atau kegagalan memperoleh persetujuan yang diperlukan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.



10) Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk proyek-proyek Perseroan, yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan

Setiap pembangkit listrik yang ingin Perseroan kembangkan, serta yang akan dikembangkan di masa depan, akan membutuhkan investasi modal yang besar. Karena Perseroan dimiliki oleh Pemerintah, sebelumnya Perseroan dapat memperoleh pinjaman jangka panjang baik dari Pemerintah itu sendiri atau dari lembaga-lembaga semi-pemerintah asing, seperti Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (“IBRD” atau “Bank Dunia”), Bank Pembangunan Asia (“ADB”), Badan Kerjasama Internasional Jepang (“JICA”), Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (“JBIC”) atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (“KfW”), dengan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada yang seharusnya tersedia secara komersial. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan dapat memperoleh pendanaan lebih lanjut baik dari Pemerintah atau lembaga-lembaga semi-pemerintah asing dengan persyaratan yang sama. Selain itu, kebijakan Pemerintah adalah untuk perusahaan milik negara untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan mereka pada pinjaman tersebut.

Perseroan telah memperoleh beberapa pinjaman jangka panjang langsung yang tidak dijamin sejak 2013 dari Standard Chartered Bank, Agence Française de Développement, sindikasi JBIC, Bank Ekspor-Impor sindikasi Korea, Pengembangan Ekspor Kanada (“EDC”) dan Bank Ekspor-Impor Hungaria Swasta Perusahaan Terbatas (“HEXIM”), KfW-IPEX, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Korporasi Asuransi Perdagangan Korea - Credit Agricole, Seras Asuransi Risiko Ekspor Swiss, Bank Gospodarstwa Krajowego - KUKE, juga jaminan pinjaman jangka panjang langsung dari ADB, IBRD dan IDB. Hingga saat ini Perseroan juga telah berhasil memperoleh beberapa pinjaman bank lokal yang tidak dijamin sejak 2011 untuk membiayai belanja modal Perseroan sebesar total Rp.115 triliun.

11) Sentimen publik yang negatif dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Perseroan telah terkena, dan akan terus terkena, sentimen negatif dari publik dan menghadapi pertentangan terkait pengembangan atau pengoperasian pembangkit tenaga listrik beserta fasilitas lainnya. Sebagai contoh, kelompok masyarakat tertentu telah mengkritik rencana Perseroan untuk mengembangkan saluran transmisi tegangan ekstra tinggi (500 kV) atau tegangan tinggi (150 kV) dikarenakan kepedulian kesehatan. Pertentangan dengan masyarakat dapat berdampak merugikan terhadap rencana Perseroan untuk membangun maupun mengembangkan pembangkit tenaga listrik atau infrastruktur transmisi sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

12) Berdasarkan UU No. 30/2009, prosedur untuk menetapkan tarif listrik telah berubah dan setiap daerah dapat memiliki tarif yang berbeda, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (“UU No. 15/1985”), tarif tenaga listrik untuk konsumen Perseroan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan ESDM. Namun, di bawah UU No. 30/2009, Perseroan sebagai pemegang IUPTL, harga jual tenaga listrik Perseroan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyedia tenaga listrik. Perubahan proses penetapan tarif tersebut dapat menunda keputusan merubah tarif sehingga dapat mempengaruhi Perseroan mungkin tidak dapat memanfaatkan kenaikan tarif secara penuh. Selain itu, UU No. 30/2009 memperbolehkan Pemerintah untuk menetapkan tarif tenaga listrik secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

Dengan mempertimbangkan bahwa tarif tenaga listrik saat ini tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan, penurunan atau perubahan tarif lebih lanjut dapat meningkatkan selisih antara biaya pokok penyediaan dengan harga jual tenaga listrik Perseroan dimana selisih ini tidak dikompensasi oleh subsidi Pemerintah. Hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.



13) Kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan memiliki risiko pertanggungjawaban

Perseroan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari kontrak-kontrak yang telah ditandatanganinya maupun yang akan ditandatangani di masa mendatang. Pada tanggal 31 Desember 2019, Pemerintah telah menyelesaikan reviu atas 43 PJBL sebagai bagian dari penyesuaian Pemerintah terhadap FTP II dan Program 35.000 MW. Sebagai akibat dari reviu ini, Perseroan telah mengubah 35 PJBL yang mewakili kapasitas pembangkitan sebesar 4.572 MW, dimana hal ini mengakibatkan harga pembelian Perseroan mengalami kenaikan. Setelah reviu, Perseroan telah mengakhiri 2 (dua) PJBL dengan total kapasitas sebesar 31 MW dan menunda 4 (empat) PJBL dengan total kapasitas 299 MW dikarenakan kendala internal IPP yang bersangkutan.

Selain itu, sesuai nasihat dari konsultan hukum Perseroan, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi dalam kontrak EPC yang saat ini telah ditandatangani oleh Perseroan (terkait Program Fast Track), beberapa kontrak EPC telah berlaku efektif dan mengikat Perseroan pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut. Sementara itu, beberapa kontrak akan menjadi efektif setelah Perseroan memenuhi kondisi-kondisi pendahuluan tertentu seperti keberhasilan Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor yang diperlukan. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut sesuai jadwal yang ditentukan atau sama sekali, dan pihak lain dalam kontrak menggugat Perseroan, hal tersebut dapat mengakibatkan syarat dan ketentuan dalam kontrak menjadi tidak dapat dilaksanakan, termasuk klausa hukum yang berlaku, sehingga Perseroan dapat menjadi bertanggung jawab atas penggantian biaya dan pembayaran ganti rugi dan/atau tunduk pada hukum yang tidak familiar. Tidak ada jaminan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Perseroan atas kontrak-kontrak yang telah ditandatangani saat ini maupun di masa depan, termasuk PJBL dan kontrak EPC, tidak akan mengakibatkan kerugian material atau kontrak Perseroan di masa mendatang akan memberikan perlindungan yang cukup pada syarat dan ketentuan komersial yang dapat diterima atau sama sekali. Apabila Perseroan menderita kerugian material, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

14) Perseroan dapat menderita kerugian atas hal-hal yang tidak diasuransikan, atau nilai pertanggungungan dalam asuransi tidak cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kerugian akibat kondisi cuaca, kerusakan lingkungan hidup, kebakaran, kegagalan mekanik, perang, terorisme, bencana alam dan kejadian atau kondisi lainnya. Setiap kejadian tersebut dapat berakibat hilangnya properti, pendapatan dan/atau meningkatkan biaya yang mungkin tidak dikompensasi secara penuh oleh dana ganti rugi dari asuransi. Selain itu, beberapa jenis risiko (seperti risiko perang dan aksi terorisme dan bencana tertentu) mungkin tidak dapat diasuransikan atau biaya asuransi mungkin tidak sebanding dengan pertanggungjawabannya. Apabila kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian lebih besar dari batasan pertanggungungan terjadi atau apabila Perseroan tidak menerima dana ganti rugi dalam waktu cepat atau sama sekali, Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar kompensasi dan/atau kehilangan investasinya atas properti yang rusak tersebut serta kehilangan pendapatan.

Selain itu, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam kontrak EPC, kontraktor wajib memiliki polis asuransi yang disetujui oleh Perseroan untuk kepentingan Perseroan, meliputi asuransi pembangunan, asuransi tanggung jawab pihak ketiga, dan asuransi pengangkutan kargo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima beberapa polis asuransi yang telah berlaku sedangkan sisa polis belum berlaku dikarenakan belum terpenuhinya kondisi terkait asuransi dalam kontrak EPC oleh kontraktor EPC. Apabila kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian lebih besar dari batasan pertanggungungan terjadi, kontraktor dapat mengalami kerugian yang cukup besar sehingga akan mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan proyek, dan, sebagai akibatnya, Perseroan dapat kehilangan investasinya untuk proyek tersebut.

Tidak ada jaminan bahwa kehilangan material yang melebihi nilai pertanggungungan tidak akan terjadi atau nilai pertanggungungan yang cukup akan tersedia di masa mendatang untuk kegiatan usaha atau aset Perseroan pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar atau sama sekali. Apabila Perseroan mengalami kerugian material, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.



15) Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batubara dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan

Sebagian pembangkit tenaga listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas alam. Di masa lalu, Perseroan telah menghadapi hambatan untuk memperoleh pasokan gas alam dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan Perseroan dikarenakan pemasok tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Sejak tahun 2003, Perseroan telah menghadapi kekurangan pasokan gas alam yang mengakibatkan Perseroan menghentikan operasional beberapa pembangkit tenaga listrik atau menggunakan BBM untuk pembangkit tenaga listrik tertentu yang dapat menggunakan bahan bakar gas alam atau BBM. Selain itu, pemasok gas Perseroan telah menginformasikan bahwa cadangan gas alam di sejumlah lapangan gas milik mereka telah menyusut. Untuk mengatasi kekurangan pasokan tersebut, Perseroan telah melakukan berbagai tindakan untuk mengamankan sumber gas alam untuk pembangkit tenaga listrik Perseroan. Sejak terminal regasifikasi LNG di Arun yang dioperasikan oleh Perta Arun Gas mulai beroperasi di bulan Maret 2015, Perseroan telah menerima LNG dari fasilitas ini rata-rata sekitar 105 BBTUD yang disalurkan ke PLTMG Arun berkapasitas 184 MW dan PLTGU Belawan berkapasitas 750 MW. Di bulan Februari 2015, PLTGU Tambak Lorok berkapasitas 1.034 juga mulai menerima gas dari Petronas Carigali Muriah Ltd. rata-rata 116 BBTUD. Pemerintah telah menyediakan pasokan tambahan sebesar 40 BBTUD pada tahun 2016 melalui saluran pipa Badak Export Manifold yang terletak 55 km dari PLTG Tanjung Batu. Perseroan saat ini sedang dalam proses meminta akses khusus ke saluran pipa utama Badak Export Manifold untuk mengatasi kekurangan pasokan. Perseroan pada saat ini sedang dalam proses membangun saluran pipa utama tersebut, progress per 31 Desember 2018 sebesar 80,7%. Sejak saat itu, kekurangan pasokan gas telah menjadi minimum dan terjadi hanya di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, pasokan gas alam juga tunduk pada fluktuasi harga dikarenakan perjanjian pembelian gas alam dilakukan dalam mata uang Dolar AS. Meskipun Perseroan telah terus menerus melakukan negosiasi dengan pemasok-pemasok baru dan memperluas jaringan pembangkitan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gas alam, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat membangun atau mempertahankan infrastruktur dan kontrak pemasok yang dibutuhkan untuk mengamankan pasokan gas alam tambahan bagi pembangkit tenaga listrik yang sudah ada atau melaksanakan strategi pertumbuhan dengan lancar.

Sebagian pembangkit tenaga listrik Perseroan bergantung pada pasokan batubara. Agar dapat dengan sukses melaksanakan rencana pengoperasian 25 pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara dalam FTP I dan membangun 21 pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara dalam Program Fast Track dan Program 35.000 MW, Perseroan harus menjamin adanya pasokan batubara yang stabil pada harga yang wajar. Program Fast Track diperkenalkan dengan asumsi dasar bahwa cadangan batubara yang berlimpah di Indonesia akan memungkinkan Perseroan untuk memperoleh batubara dari pasar domestik pada harga yang lebih murah dibandingkan apabila Perseroan harus mengimpor batubara dari negara lain. Namun demikian, jumlah batubara yang dibutuhkan Perseroan dari pasar domestik perlu bertambah lebih dari dua kali lipat dari tingkat produksi saat ini selama masa pelaksanaan Program Fast Track. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh jumlah batubara yang diperlukan untuk pembangkit-pembangkit tenaga listrik ini pada harga yang wajar atau sama sekali, Perseroan mungkin tidak dapat mencapai proyeksi dan target yang ditetapkan dalam Program Fast Track.

Setiap kegagalan untuk mengamankan pasokan gas alam atau batubara yang cukup dengan syarat dan ketentuan komersial yang dapat diterima dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

16) Hasil aktual Perseroan berbeda secara signifikan dari perkiraan- perkiraan dan estimasi yang telah ditetapkan

Prospektus ini mencakup perkiraan perkiraan tertentu dan informasi ke depan lainnya. Informasi ini didasarkan pada asumsi dan estimasi yang dibuat oleh Dewan Direksi dan manajemen Perseroan serta industri dan data lainnya yang tersedia untuk umum. Lebih jauh lagi, ini mencerminkan penilaian Dewan Direksi dan manajemen saat ini mengenai kondisi yang diharapkan dan tindakan yang diharapkan, yang bisa saja berubah.



Prakiraan dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang secara inheren tunduk pada ketidakpastian. Banyak dari faktor-faktor ini tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan keputusan bisnis di masa depan, strategi dan pertumbuhan industri dapat berubah. Jika satu atau lebih dari ini atau ketidakpastian atau risiko lainnya terwujud, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan atau diantisipasi dan perbedaan tersebut mungkin material. Khususnya, tetapi tanpa batasan, biaya modal dapat meningkat, proyek dapat tertunda dan perbaikan yang diantisipasi dalam produksi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Meskipun harapan manajemen Perseroan sebagaimana tercermin dalam pandangan ke depan tersebut adalah wajar berdasarkan informasi yang saat ini tersedia bagi Perseroan, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa harapan tersebut akan terbukti benar. Tidak ada jaminan bahwa hasil aktual Perseroan tidak akan berbeda secara signifikan dari perkiraan dan perkiraan yang telah ditetapkan.

17) Depresiasi nilai rupiah dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

Depresiasi nilai Rupiah di masa lalu telah, dan akan, berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan. Salah satu dampak langsung yang paling signifikan dari krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Meskipun Rupiah telah berangsur-angsur menguat dari nilai terendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar AS di bulan Januari 1998 menjadi Rp13.886 per Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2019, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan.

Seluruh pendapatan Perseroan dalam Rupiah. Namun demikian, beban usaha Perseroan seperti pembelian tenaga listrik dari IPP, gas alam, BBM dan energi panas bumi serta beban pemeliharaan berdenominasi Dolar AS atau memiliki komponen Dolar AS atau mata uang asing lainnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, sekitar 42,8% dan 45,2% dari beban bahan bakar Perseroan dalam mata uang asing dan sekitar 51,2% dan 68,5% dari total liabilitas Perseroan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya, apabila nilai Rupiah melemah dibandingkan mata uang asing lainnya, hal tersebut dapat meningkatkan beban keuangan Perseroan. Melemahnya nilai Rupiah juga dapat meningkatkan beban keuangan Perseroan terkait kewajiban Perseroan dalam mata uang asing, khususnya pinjaman dalam Dolar AS. Sebagai contoh, pada tahun 2017 dan 2018, Perseroan mengakui kerugian kurs mata uang asing masing-masing sebesar Rp2.935 miliar dan Rp10.927 miliar dibandingkan keuntungan mata uang asing sebesar Rp9.486 miliar pada tahun 2019, terutama dikarenakan depresiasi nilai Rupiah terhadap Dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Modifikasi terhadap kebijakan nilai tukar mengambang saat ini dapat mengakibatkan kenaikan suku bunga, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau valuta asing atau bantuan asing dari kreditur multinasional tidak dapat dicairkan. Perubahan ini dapat mengakibatkan aktivitas ekonomi menurun, resesi ekonomi, kegagalan pembayaran uang dan kenaikan harga barang impor. Salah satu hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

18) Anggota dari manajemen, karyawan diselidiki, diinvestigasi dalam kasus-kasus tertentu yang dihukum karena penipuan dan korupsi, dan ketidakmampuan Perseroan untuk mendeteksi dan/atau mencegah insiden sebelum atau sesudahnya dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan

Perseroan telah memiliki contoh di masa lalu anggota manajemen atau karyawan yang sedang diselidiki dan dihukum karena korupsi dan penipuan, sehingga dalam beberapa kasus individu tersebut di penjara dan didenda. Meskipun kasus-kasus sebelumnya tidak mengakibatkan sanksi atau hukuman bagi Perseroan dan tidak terkait langsung dengan bisnis Perseroan, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada investigasi atau litigasi tambahan terkait dengan insiden ini. Jika investigasi atau litigasi semacam itu terjadi, itu dapat memiliki dampak buruk terhadap bisnis, kredibilitas, dan reputasi Perseroan.

Mungkin sulit untuk mendeteksi atau mencegah kesalahan dari masa lalu atau di masa depan oleh manajemen atau karyawan Perseroan, atau pihak ketiga yang berbisnis dengan Perseroan, seperti pemasok atau perantara, yang meliputi tindakan seperti penipuan, korupsi, penyuapan, transaksi bisnis yang tidak sah, pelanggaran kebijakan dan prosedur internal Perseroan dan pelanggaran hukum



lainnya. Perseroan telah menerapkan kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah, mendeteksi dan menghukum pelanggaran seperti itu, termasuk penyuapan, korupsi, dan transaksi bisnis tidak resmi lainnya yang serupa. Untuk uraian kebijakan dan prosedur pengendalian internal Perseroan. Terlepas dari upaya Perseroan, Perseroan mungkin tidak sepenuhnya berhasil mencegah, mengidentifikasi, atau mengatasi ketidakpatuhan dan / atau aktivitas atau transaksi mencurigakan secara tepat waktu atau tidak sama sekali. Contoh-contoh korupsi, penyuapan, transaksi yang tidak sah atau pelanggaran kebijakan dan prosedur internal Perseroan dan undang-undang yang berlaku dapat menyebabkan Perseroan kehilangan uang dan sanksi yang dikenakan oleh otoritas pemerintah. Oleh karena itu, Perseroan dapat terus menghadapi risiko bahwa penipuan, korupsi, dan pelanggaran lain dapat terjadi di masa depan, yang dapat berdampak buruk pada reputasi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

19) Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kendala operasional seperti susut jaringan dan pencurian listrik serta kejadian force majeure

Pengoperasian pembangkit tenaga listrik rumit dan memiliki banyak kendala, termasuk kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkitan tenaga listrik, saluran transmisi atau peralatan lainnya, atau proses dan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan atau efisiensi, dikarenakan pemakaian, keausan, penyalahgunaan, penurunan kinerja di luar perkiraan atau pemadaman listrik yang tidak direncanakan, bencana alam dan perubahan kebijakan Pemerintah. Lebih lanjut, Perseroan telah menandatangani suatu pengaturan dengan IPP yang akan memproduksi tenaga listrik untuk Perseroan dan IPP ini terpapar risiko yang sama. Meskipun kontrak Perseroan dengan IPP mengantisipasi kegagalan atau kinerja di bawah tingkat output atau efisiensi yang disepakati oleh IPP dan memberikan kompensasi, kompensasi tersebut mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian atau kerusakan yang dialami oleh Perseroan. Salah satu kejadian tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan Perseroan atau meningkatkan beban usaha, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit tenaga listrik Perseroan atau pembangkit tenaga listrik lainnya dimana Perseroan saat ini memiliki kepentingan atau di masa mendatang, sehingga mengurangi laba bersih dan dana yang tersedia bagi Perseroan.

Selanjutnya, sejumlah tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik Perseroan tidak dapat dijual karena hilang, baik melalui susut jaringan atau pencurian. Susut jaringan merupakan gejala gangguan teknis yang dapat diperbaiki dengan merehabilitasi jaringan distribusi. Pencurian tenaga listrik oleh pelanggan Perseroan maupun non-pelanggan juga turut menurunkan pendapatan Perseroan. Nilai kerugian energi listrik per 31 Desember 2019 adalah 9,32% dari total produksi kotor, dikurangi penggunaan Perseroan sendiri di tahun 2017. Perseroan tidak dapat membedakan secara spesifik penyusutan jaringan akibat gangguan teknis dan pencurian, namun demikian, berdasarkan pengalaman Perseroan di industri dan perhitungan internal, Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar susut jaringan dikarenakan faktor teknis. Kenaikan jumlah tenaga listrik yang diproduksi oleh Perseroan namun tidak dapat dijual karena susut jaringan atau pencurian dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

20) Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada sejumlah undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang memberikan sanksi denda untuk pembuangan berbagai limbah dan daftar denda untuk pembuangan limbah di atas baku mutu lingkungan. Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar denda untuk pelanggaran undang-undang, peraturan atau keputusan dan kegiatan pembangkit tenaga listrik dapat dihentikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah apabila pembangkit tersebut tidak dapat mematuhi perintah untuk menghentikan atau memperbaiki kegiatan-kegiatan tertentu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan lingkungan hidup dan menyampaikan dokumen-dokumen seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") mengenai dampak kegiatan-kegiatan Perseroan terhadap lingkungan hidup dan melaporkan penerapan RKL dan RPL. Selain itu, Perseroan diwajibkan menerapkan sistem yang didesain untuk memantau dan mengendalikan polusi yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga



listrik Perseroan. Di samping memenuhi ketentuan pada AMDAL, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009"), Perseroan wajib memiliki Izin Lingkungan.

Perseroan berkeyakinan telah memenuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dalam segala hal yang material. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan memberlakukan undang-undang dan peraturan baru yang lebih ketat dimana hal ini dapat mengakibatkan timbulnya biaya tambahan untuk perlindungan lingkungan hidup bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tunduk pada kewajiban yang timbul dari dampak kegiatan usaha Perseroan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup, pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, saluran transmisi dan sistem distribusi juga dapat mengalami penundaan. Apabila biaya yang perlu dikeluarkan untuk perlindungan lingkungan hidup meningkat, atau Perseroan memiliki tambahan kewajiban, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil keuangan Perseroan.

21) Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendanai operasional dan kebutuhan belanja modal Perseroan di masa mendatang dan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain

Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani, Perseroan, saat ini maupun di masa mendatang, dibatasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- memperoleh atau menjamin tambahan utang;
- menggadaikan;
- membagi dividen kepada pemegang saham Perseroan;
- melakukan pembayaran dipercepat atau pelunasan utang subordinasi atau efek bersifat ekuitas;
- membuat pembebanan atau pembatasan terhadap pembayaran dividen, pinjaman atau uang muka serta pengalihan aset kepada Perseroan dari Entitas Anak yang dibatasi;
- menjual, menyewakan atau mengalihkan aset-aset tertentu, termasuk saham Entitas Anak yang dibatasi;
- melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak terafiliasi;
- melakukan kegiatan usaha yang tidak berhubungan dengan Perseroan atau melakukan kegiatan usaha yang dilarang; atau
- melakukan konsolidasi atau merger dengan entitas lain.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu sesuai syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman saat ini, termasuk memelihara perbandingan antara kewajiban keuangan dengan total aset tidak lebih dari 80 : 100, rasio perbandingan EBITDA dengan beban bunga tidak kurang 2 : 1 atau 1,5 : 1 dan, untuk obligasi tertentu, rasio perbandingan fasilitas pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi dengan kewajiban yang menimbulkan bunga minimum senilai 150% atau 125%.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendanai kegiatan usaha dan belanja modal Perseroan di masa mendatang, serta kemampuan Perseroan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain.

22) Perseroan mungkin tidak berhasil menegosiasikan harga BBM dengan Pertamina sebagai pemasok BBM utama Perseroan

Pertamina merupakan satu-satunya pemasok BBM Perseroan dari sejak tahun 1945 sampai dengan 2008. Sejak tahun 2008, Perseroan telah mengurangi ketergantungannya pada Pertamina, namun Pertamina tetap merupakan pemasok BBM Utama Perseroan. Perseroan mengkonsumsi BBM sekitar 4.667 juta liter dan 3.598 juta liter pada tahun 2016 dan 2017.

Pada tanggal 16 Mei 2007, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Pertamina dimana Pertamina akan menjual dan menyerahkan HSD, minyak solar, dan *Marine Fuel Oil* ("MFO") untuk pembangkit tenaga listrik Perseroan beserta fasilitas pendukungnya. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam



perjanjian dengan Pertamina, Perseroan wajib untuk melakukan negosiasi dan menyepakati harga BBM dengan Pertamina paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal tahun berikutnya. Apabila Perseroan dan Pertamina tidak mencapai kesepakatan, harga BBM akan tetap sama dengan harga tahun sebelumnya dan penyesuaian akan dilakukan saat harga baru disepakati. Dikarenakan Perseroan akan selalu melakukan negosiasi harga BBM setiap tahun dengan Pertamina, tidak ada jaminan bahwa Pertamina akan terus memasok BBM kepada Perseroan pada harga yang menguntungkan atau sama sekali.

Sebagai contoh, Perseroan menandatangani kesepakatan harga jual HSD dan MFO dengan Pertamina pada tahun 2015 berdasarkan rekomendasi dari Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Perseroan juga telah setuju menggunakan harga sementara untuk pembelian di tahun 2018 - 2020 dan sampai dengan 31 Maret 2018, harga final untuk tahun-tahun tersebut masih dalam proses negosiasi.

Perseroan tetap bergantung pada Pertamina untuk penyediaan BBM. Apabila Perseroan tidak berhasil mencapai kesepakatan harga dengan Pertamina atau apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan BBM-nya atau harga BBM meningkat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

3. RISIKO UMUM

Perekonomian domestik, regional atau global dapat berubah secara material dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan

Perekonomian Indonesia terkena dampak dari krisis keuangan pada tahun 1997, dan krisis tersebut mengakibatkan antara lain depresiasi Rupiah, penurunan Produk Domestik Bruto yang signifikan, kenaikan suku bunga, ketidakstabilan sosial dan politik. Kondisi-kondisi ini berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha milik pemodal nasional, termasuk kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah antara tahun 1999-2000. Krisis keuangan paling akhir adalah krisis yang terjadi di akhir tahun 2007 yang terlihat dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,1% pada tahun 2008 dan 4,6% pada tahun 2009. Pemerintah bergantung pada bantuan lembaga internasional dan pemerintah asing agar dapat mencegah kegagalan pembayaran utang. Laju pertumbuhan ekonomi akhir-akhir ini mulai stabil. PDB Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 5,17% dan 5,02%.

Di luar Indonesia, kesulitan yang dihadapi sektor keuangan global akhir-akhir ini, kondisi yang merugikan dan volatilitas di Amerika Serikat dan pasar kredit dan keuangan global, fluktuasi harga minyak dan komoditas, dan pelemahan perekonomian global secara umum telah meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek perekonomian global secara umum. Pasar keuangan global telah mengalami, dan mungkin akan terus mengalami, gejolak yang signifikan dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan kredit pemilikan rumah subprime sejak tahun 2008 sehingga telah mengakibatkan masalah likuiditas yang berujung pada kepailitan banyak institusi, dan dikeluarkannya paket bailout dalam jumlah besar untuk bank dan institusi lain. Selain itu, pada tahun 2010, krisis keuangan muncul di Eropa, dipicu oleh defisit anggaran dan kenaikan utang pemerintah dalam jumlah besar di Mesir, Irlandia, Italia, Portugal dan Spanyol, dimana hal ini menimbulkan kekhawatiran kemampuan negara Uni Eropa akan terus membayar kewajiban utang pemerintah. Pemulihan perekonomian global saat ini berlangsung pada laju yang berbeda-beda di seluruh wilayah dan berisiko mengalami penurunan akibat faktor-faktor seperti kerentanan fiskal di perekonomian negara maju, penurunan laju pertumbuhan di negara berkembang, tingkat utang pemerintah yang tinggi, kebijakan makroekonomi yang cenderung akomodatif dan kesulitan memperoleh pendanaan kredit yang terus berlangsung.

Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN telah dipengaruhi secara negatif, bersama dengan pasar-pasar negara berkembang, oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar negara maju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Pemerintah telah mengambil sejumlah tindakan untuk menanggapi kondisi ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi-kondisi ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek-aspek lain di perekonomian Indonesia.



Pemerintah terus mencatatkan defisit fiskal yang besar dan tingkat utang pemerintah yang tinggi, cadangan valuta asing yang moderat, nilai Rupiah terus berfluktuasi dengan likuiditas yang rendah, serta sektor perbankan yang melemah dan menderita dari tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Kebutuhan pendanaan Pemerintah untuk wilayah-wilayah yang rusak akibat tsunami pada bulan Desember 2004 dan bencana alam lainnya, serta kenaikan harga minyak, dapat meningkatkan defisit fiskal Perseroan. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama masa krisis ekonomi Asia di tahun 1997 telah mengakibatkan, antara lain, fluktuasi suku bunga, dimana hal ini berdampak merugikan terhadap kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk membayar kewajiban utangnya. Meskipun suku bunga 1 (satu) bulan telah turun dari tingkat tertinggi sebesar 70,8% di bulan Agustus 1998 menjadi 5,8% pada tanggal 31 Maret 2017, tidak ada jaminan bahwa kondisi perekonomian saat ini yang telah membaik akan berlanjut atau kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sebelumnya di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik tidak akan terjadi di masa mendatang. Secara khusus, kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara-negara berkembang atau negara lain, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan di Indonesia meningkat dan perekonomian Indonesia terhambat atau bahkan mundur. Volatilitas yang meningkat, pertumbuhan perekonomian yang melambat atau negatif dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, perekonomian global di tahun 2020 dibayangi oleh *downside risk* akibat masih tingginya ketidakpastian. Terutama terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Prediksi dari IMF menyatakan dalam kondisi ekonomi dimana tingkat suku bunga yang rendah dan tingginya tingkat hutang pertumbuhan ekonomi dunia berkontraksi tajam sebesar -3% di tahun 2020 dari sebelumnya di level 2,9% di tahun 2019. Pada skenario terbaik dimana pandemi akan membaik secara perlahan pada paruh kedua tahun 2020 seiring dengan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan sudah mulai dilonggarkan perekonomian dunia di proyeksikan akan bertumbuh sebesar 5,8% pada tahun 2021 dimana kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan normal dan stabil yang juga dibantu oleh kebijakan-kebijakan pendukung. Meskipun ketidakpastian masih berlanjut, namun ekonomi dunia diperkirakan akan terus bergerak membaik diparuh kedua tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 tercatat 5,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,17% (yoy). Berdasarkan prediksi IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dapat bertumbuh sebesar 0,5% angka ini relative baik untuk negara-negara di Asia terutama Negara berkembang. Berdasarkan skenario terbaik, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 di prediksi akan meningkat sebesar 8,2% dimana angka ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian dunia. Berbagai stimulus telah dikeluarkan oleh Kemenkeu untuk menopang perekonomian Indonesia seperti stimulus fiskal berupa relaksasi perpajakan senilai Rp1,97 triliun, stimulus nonfiskal baik berupa penyederhanaan, pengurangan dan percepatan terkait bahan baku dasar pangan dan stimulus sektor keuangan berupa Penilaian dan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM.

Intepretasi dan implementasi hukum dalam pemerintahan di Indonesia mengandung ketidakpastian dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan

Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan hampir seluruh aspek administrasi nasional dan daerah. Setelah berakhirnya masa pemerintahan beliau di tahun 1998, Pemerintah menetapkan sejumlah undang-undang untuk meningkatkan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan aset nasional dalam rangka menciptakan hubungan keuangan yang adil dan seimbang dengan pemerintah pusat. Setiap peraturan baru beserta peraturan pelaksanaannya dapat berbeda secara material dari kerangka legislatif dan peraturan perundangan yang saat ini berlaku berikut peraturan pelaksanaannya. Perseroan juga dapat menghadapi gugatan yang bertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai, antara lain, yurisdiksi atas wilayah usaha Perseroan dan pajak setempat yang baru atau lebih tinggi. Pemerintah daerah dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha dapat mengadopsi peraturan-peraturan, atau membuat intepretasi atau mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah dengan cara yang dapat merugikan kegiatan usaha dan prospek Perseroan. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan 2 (dua) Instruksi Menteri



masing-masing pada tanggal 6 Februari 2016 dan 4 April 2016 dimana seluruh Gubernur dan Walikota/Bupati di Indonesia diinstruksikan untuk mencabut/mengubah setiap peraturan dan keputusan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan Walikota/Bupati yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi. Bisnis dan kegiatan usaha Perseroan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga pembatasan tambahan atau pembatasan yang bertentangan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis dan kegiatan usaha Perseroan.

Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan

Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 13/2003 (“UU Ketenagakerjaan”) dan selanjutnya telah menerbitkan peraturan pelaksanaannya. UU Ketenagakerjaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk serikat tanpa intervensi dari pemberi kerja. UU Ketenagakerjaan mewajibkan, antara lain, forum bipartite dengan partisipasi karyawan lebih dari 50,0% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dan menetapkan prosedur pelaksanaan mogok kerja yang lebih permisif. Liberalisasi peraturan yang memperbolehkan pembentukan serikat, digabung dengan kondisi perekonomian yang masih lemah, telah mengakibatkan, dan cenderung akan terus mendorong, aksi pemogokan buruh di Indonesia.

Pada tanggal 11 Oktober 2013, Perseroan menandatangani addendum Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) antara Perseroan dan Serikat Pekerja – PLN (“SP-PLN”) untuk memperpanjang masa berlaku PKB yang telah berakhir pada tahun 2012 sampai dengan PKB yang baru disepakati dan ditandatangani. Setelah itu, Perseroan telah sepakat dan menandatangani addendum kedua dengan mengubah beberapa ketentuan terkait implementasi perawatan kesehatan, pengakhiran hubungan kerja, perkawinan antar pegawai, sertifikasi kompetensi dan sistem penilaian kinerja karyawan pada tahun 2014. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, negosiasi PKB dengan SP-PLN belum dimulai. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi di masa mendatang dengan SP-PLN akan menghasilkan suatu PKB dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima kedua pihak atau sama sekali. Penundaan dalam waktu lama atau kegagalan mencapai kesepakatan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Aksi pemogokan oleh buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan, pemasok Perseroan atau kontraktor Perseroan dan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga saham-saham yang diperdagangkan di BEI atau bursa saham lain dan nilai Rupiah terhadap mata uang lain. Terjadinya kejadian tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di propinsi, kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, pada tahun 2020 pemerintah Propinsi DKI Jakarta, mengalami kenaikan sebesar 8,51% atau sebesar Rp335.377 dari sebelumnya Rp3.940.972,- pada tahun 2019 menjadi Rp4.276.349,-, dengan demikian DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi pada tahun 2020.

Secara khusus, beban Perseroan untuk tenaga keamanan, kebersihan, kurir dan buruh dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum dan melakukan hal ini sejak awal tahun. Dalam periode 10 tahun, upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, upah minimum di Jakarta telah meningkat sebesar 14,8% pada tahun 2016 dan 8,3% pada tahun 2017 dan Upah Minimum Regional telah meningkat sebesar 8,03% pada tahun 2019 dan 8,51% pada tahun 2020. Setiap kenaikan upah baik nasional maupun wilayah akan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan beban usaha Perseroan dan, dengan demikian, menurunkan margin keuntungan Perseroan.



Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan bagi Perseroan

Beberapa perusahaan pemeringkat, termasuk Moody's dan Standard & Poor's, pernah menurunkan peringkat kredit negara Indonesia dan peringkat berbagai instrumen kredit milik Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan di Indonesia. Saat ini, utang pemerintah jangka panjang dalam mata uang asing memperoleh peringkat "Baa2 (stabil)" dari Moody's, "BBB-" dari Standard & Poor's, dan "BBB (stabil)" dari Fitch. Peringkat ini menggambarkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajibannya dan kemampuannya atau kesediaan untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Meskipun peringkat kredit Indonesia memiliki tren positif dengan Moody's menaikkan peringkat kredit Indonesia ke "investment grade" pada tahun 2012 yang ditegaskan kembali pada bulan April 2018, dan Fitch menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi BBB (stabil) dari sebelumnya BBB- (positif) pada Desember 2016 yang lalu, tidak ada jaminan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau perusahaan pemeringkat efek lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia secara umum di masa mendatang. Setiap penurunan dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan di Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk Perseroan, untuk menghimpun pendanaan tambahan dan suku bunga dan syarat dan ketentuan komersial lainnya yang tersedia untuk pendanaan tersebut, dan hal tersebut dapat berdampak material terhadap Perseroan.

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 21 Juli 2020 atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0645) yang dalam laporannya menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan atas hal-hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, dan juga menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Kejadian penting yang dimaksud adalah bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial menghadapi Covid-19, pada tanggal 29 Juli 2020, Pemerintah melalui surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1458/23/DJL.3.2020, memberikan stimulus tarif tenaga listrik sebagai berikut (i) pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan yang pemakaian energi dibawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyala), diberlakukan bagi pelanggan golongan sosial Daya 1300VA keatas, pelanggan golongan bisnis daya 1300VA keatas, dan pelanggan golongan Industri 1300VA ke atas (ii) pembebasan penerapan rekening minimum bagi pelanggan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) (iii) Pembebasan biaya atau abodemen, diberlakukan bagi golongan sosial dengan daya 220VA sampai dengan 900 VA, pelanggan golongan bisnis dengan daya 900VA dan pelanggan golongan industri dengan daya 900VA. Stimulus tersebut diberlakukan untuk rekening bulan Juli sampai dengan Desember 2020.

Pada tanggal 30 Juli 2020, Perseroan telah menerima pembayaran piutang kompensasi atas kekurangan penerimaan pendapatan untuk golongan tarif non-subsidi sebagai akibat kebijakan penetapan tarif tenaga listrik sebesar Rp7.170.268 juta dari jumlah yang tercatat sebesar Rp45.426.981 juta di laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Perseroan selanjutnya telah menerbitkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan 31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang telah direviu oleh Akuntan Publik yang terbit pada tanggal 19 Juni 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2020 dan 2019, yaitu bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial menghadapi Covid-19, Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia dan di tindaklanjuti dengan surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat No.707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 Maret 2020 memberikan diskon atas tarif tenaga listrik sebagai berikut (i) pelanggan rumah tangga reguler (pasca bayar) daya 450 VA diberikan rekening listrik gratis selama tiga bulan untuk pemakaian listrik di bulan Maret, April dan Mei 2020 (ii) pelanggan rumah tangga pra bayar daya 450 VA diberikan gratis token untuk pembelian token bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir (iii) pelanggan rumah tangga reguler (pasca bayar) daya 900 VA diberikan rekening listrik gratis 50% atas pemakaian listrik bulan Maret, April dan Mei 2020 (iv) pelanggan rumah tangga prabayar daya 900 VA diberikan token gratis sebesar 50% untuk pembelian token bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar pemakaian bulanan



tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir. Selanjutnya piutang dari golongan pelanggan tersebut akan dibayar Pemerintah kepada Perusahaan. Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon atas tarif tenaga listrik tersebut masing-masing sejumlah 24 Juta pelanggan untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan 7 Juta pelanggan untuk pelanggan dengan daya 900 VA. Diskon atas tarif tenaga listrik tersebut diperluas menjadi mencakup pelanggan bisnis dengan daya 450VA dan Industri dengan daya 450 VA dan juga diperbarui masa berlaku pelaksanaan diskon tarif terakhir dengan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Daya Mineral tanggal 3 Agustus 2020 menjadi berlaku sampai dengan rekening listrik Desember 2020 dan pembelian token bulan Desember 2020.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371.

Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. 2, tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0264142 tanggal 20 Mei 2019, serta didaftarkan di Daftar Perseroan No.AHU-0081603.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 (**Akta No. 02/2019**).

Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha Perseroan sejak pendirian hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- (i) Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan: Pembangkitan, Penyaluran, dan Distribusi, serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (ii) Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
 - konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
 - pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
 - pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
 - pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
- (iii) Selain melakukan usaha-usaha tersebut di atas, Perseroan dapat:
 - ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan antara lain: energi tidak terbarukan (antara lain batu bara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomas, bahan bakar nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada bidang pembangkitan penyaluran, distribusi dan tenaga listrik;
 - menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik;



- melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha Perseroan, baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan dan pelatihan, manajemen jasa engineering, penelitian dan pengembangan teknik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain di wilayah Republik Indonesia.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian (Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan No. 169, tanggal 30 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11-519HT01.01TH'94, tanggal 1 Agustus 1994), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 63.000.000.000.000
 Modal ditempatkan/disetor : Rp 13.000.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 13.000.000 lembar saham prioritas dan 50.000.000 lembar saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	Negara Republik Indonesia	12.999.999.000.000	12.999.999 saham prioritas	99,99
2.	Bapa Lego Noormandiri	1.000.000	1 saham prioritas	0,01
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		13.000.000.000.000	13.000.000 saham prioritas	100
Saham dalam Portepel		50.000.000.000.000	50.000.000 saham biasa	-

Struktur Permodalan 2 Tahun Terakhir

Tahun 2018

Pada tahun 2018, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 39 tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0011908.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 dan telah diberitahukan ke Menkumham dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0141667, tanggal 2 Juni 2017, sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070409.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 sebagai berikut.

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	109.826.527	109.826.527.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	109.826.527	109.826.527.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	329.173.473	329.173.473.000.000	-

**Tahun 2019**

Berdasarkan Akta No. 02/2019, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp109.826.527.000.000 menjadi Rp115.181.002.000.000 dengan cara pengeluaran/penempatan saham portepel sebanyak 5.354.475 saham yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Terkait dengan jenis usaha Perseroan yaitu usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, izin usaha Perseroan adalah berdasarkan:

- (i) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- (ii) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, khususnya pasal berikut:
 - a. Pasal 8 yang menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik disusun dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang mempunyai kontribusi 10% telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak tersebut, sebagai berikut:

No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
Perseroan			
1.	IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 25/1/IUPTL-T/PMDN/2016 tanggal 27 September 2016	Berlaku sampai 30 September 2046	Penyediaan tenaga listrik dengan jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik.
PT IP			
2.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum No. 5192/40/MEM.L/2000, tanggal 22 Desember 2000	Berlaku untuk jangka waktu selama PT IP dapat melakukan usahanya	Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan oleh unit bisnis pembangkitan yang dimiliki oleh IP.

Catatan:

Permohonan terhadap pembaruannya telah dikirimkan oleh PT IP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Surat Permohonan Pembaharuan IUKU No. 1416/07/IP/2011 tanggal 7 November 2011 serta Surat Permohonan Perubahan IUKU No. 1169/07/IP/2014, tanggal 26 Juni 2014. Pembaruan atas IUKU tersebut dilakukan karena terdapat perubahan spesifikasi pada beberapa pembangkit PT IP dan PT IP telah mengoperasikan beberapa pembangkit baru. Berdasarkan keterangan PT IP pada tanggal 17 Juli 2020, permohonan pembaharuan IUKU masih dalam proses pembahasan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT PJB, dan Perseroan berdasarkan Notula Rapat Pembahasan



No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
	<i>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT IP dan PT PJB, tanggal 18 Juni 2020. Adapun pada akhir bulan Juli 2020, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan mengundang kembali Perseroan, PT PJB, dan PT IP untuk melanjutkan pembahasan terkait.</i>		
3.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), tanggal 29 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku untuk jangka waktu selama PT IP dapat melakukan usahanya	Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan oleh unit bisnis pembangkitan yang dimiliki oleh IP.
4.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus No. BX-225/PP008, tanggal 23 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Adipala di Desa Buntan, Kecamatan Adipala, Cilacap Jawa Tengah.
	Catatan: <i>Telah diperoleh juga Izin Lokasi Perairan No. KP.349 TAHUN 2012, tanggal 19 Maret 2012, Izin Pembangunan No. BX-352/PP008, tanggal 2 Juli 2012, serta Izin Sarana Bantu Navigasi Pelayaran No. NV.001/4/10/DJPL-14, tanggal 10 Juli 2014.</i>		
5.	Izin Operasi Pelabuhan Khusus No. KP. 133 TAHUN 2004, tanggal 19 April 2004, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.	Berlaku untuk jangka waktu selama PT IP dapat melakukan usahanya.	Pengoperasian dermaga Unit PLTG Gilimanuk di Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali.
	Catatan: <i>Sedang dalam proses penyesuaian menjadi Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus (OSS) berdasarkan Permohonan Penyusunan Izin Terminal Khusus PLTG Gilimanuk No. 0047/150/BLIPGU/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang diterbitkan PT IP untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.</i>		
6.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus No. BX-52/PP008, tanggal 3 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Barru di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Barru, Sulawesi Selatan.
	Catatan: <i>Telah diperoleh juga Izin Lokasi Perairan No. 550/250/DISHUB, tanggal 24 Juli 2010, serta Izin Pembangunan No. BX-52/PP008, tanggal 3 Februari 2015.</i>		
7.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus No. BX-108/PP008, tanggal 29 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Jeranjang di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
	Catatan: <i>Telah diperoleh juga Izin Lokasi Perairan No. KP 221 TAHUN 2011, tanggal 24 Maret 2011, Izin Pembangunan No. BX. 253/PP008, tanggal 15 Mei 2012, serta Izin Sarana Bantu Navigasi Pelayaran No. NV.001/3/2/DJPL-11, tanggal 29 Desember 2011.</i>		
8.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus No. BX-489/PP008, tanggal 20 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Pelabuhan Ratu di Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.
9.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus No. BX-384/PP088, tanggal 5 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Banten 2 Labuhan Omu di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten.
	Catatan: <i>Telah diperoleh juga Izin Lokasi Perairan No. HK.107/01/10/UPP.LBN-15 dan 079.PJ.061/BLB/19, tanggal 29 Juli 2019 serta Izin Pembangunan No. BX-384/PP088, tanggal 5 Agustus 2015.</i>		



No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
10.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus No. BX-382/PP008, tanggal 8 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Catatan: <i>Telah diperoleh juga Izin Lokasi Perairan No. No. KP.935 TAHUN 2011, tanggal 28 November 2011, Izin Pembangunan No. BXXXIV.475/PU60, tanggal 17 September 2008, serta Izin Sarana Bantu Navigasi Pelayaran No. NA.70/1/14/DJPL-10, tanggal 12 April 2010.</i>	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Lontar di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten.
11.	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. BX-365/PP008, tanggal 28 November 2018, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	5 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Pangkalan Susu Unit 1-2 di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara.
12.	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. BX-55/PP008, tanggal 2 April 2018, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit UPJP Priok di Pademangan, Jakarta Utara.
13.	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. B X-309/PP 008, tanggal 19 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	10 tahun	Pengoperasian dermaga Unit PLTU Suralaya Unit 1-7 di Desa Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, Cilegon, Banten.
14.	SIUP Besar No. 4394/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 23 November 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.	Berlaku untuk jangka waktu selama PT IP dapat melakukan usahanya.	
PT PJB			
15.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum No. 580-12/20/600.3/2010, tanggal 20 Desember 2010 Catatan: <i>Berdasarkan keterangan PT PJB pada tanggal 17 Juli 2020, IUKU milik PT PJB sedang dalam proses perubahan menjadi IUJPTL. Permohonan pembaharuan IUKU masih dalam proses pembahasan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PJB, dan Perseroan berdasarkan Notula Rapat Pembahasan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT IP dan PT PJB, tanggal 18 Juni 2020. Adapun pada akhir bulan Juli 2020, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan mengundang kembali Perseroan, PT PJB, dan PTIP untuk melanjutkan pembahasan terkait.</i>	Berlaku untuk jangka waktu selama PT PJB dapat melakukan usahanya	Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan oleh UBP yang dimiliki oleh PT PJB.
16.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik No. 7/1/ IUPTL-T/PMDN/2018 tanggal 1 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ub. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	31 Desember 2022	- Izin untuk PLTGU Muara Tawar Add On Blok 2, 3, dan 4. - Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan setiap 6 bulan kepada Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
17.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) tanggal 18 April 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan operasional sesuai peraturan perundang-undangan.	Izin ini telah berlaku efektif. Lokasi Usaha: PLTGU Muara Tawar
18.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) tanggal 24 April 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan operasional sesuai peraturan perundang-undangan.	Izin ini telah berlaku efektif. Lokasi Usaha: Lingkungan Karaballo, Tellumpanua, Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan.
19.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) tanggal 24 April 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan operasional sesuai peraturan perundang-undangan.	Izin ini telah berlaku efektif. Lokasi Usaha: Jl. Pedoman No. 10, Sungaiteluk, Sangkapura, Kab. Gresik, Jawa Timur



No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
20.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) No. P2T/9/15.16/01/V/2016 tanggal 9 Mei 2016	8 Mei 2021	Pengoperasian instalasi tenaga listrik, untuk PLTU (Besar), PLTG (Besar), PLTGU (Besar), dan PLTA (Besar).
21.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) No. P2T/10/15.16/01/V/2016 tanggal 9 Mei 2016	8 Mei 2021	Pengoperasian instalasi tenaga listrik, untuk PLTU (Besar), PLTG (Besar), PLTGU (Besar), dan PLTA (Besar).
22.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP718 Tahun 2013 untuk Persetujuan Pengelolaan 9 untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik, Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum PJB, tanggal 18 Juli 2013	Berlaku selama terminal untuk kepentingan sendiri dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok PJB.	Izin pengelolaan dermaga tipe open untuk fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 30.000 DWT.
23.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 143 Tahun 2014 untuk Pemberian Izin Operasi kepada PJB untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum PLTGU Muara Tawar di Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2014	Berlaku selama 5 tahun atau sampai tanggal 12 Februari 2019.	<p>Izin pengelolaan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dermaga I tipe Multi Bouy Mooring (MBM) untuk fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang maksimal 20.000 DWT untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang ketenagalistrikan untuk kepentingan umum PLTGU Muara Tawar. - Dermaga II tipe marginal untuk fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang maksimal 6500 DWT untuk kepenitngan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang ketenagalistrikan PLTGU Muara Tawar. <p>Berdasarkan Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran No. AL.202/1/3/KSOP.Mrd/2020, tanggal 3 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Marunda, izin ini sedang dalam proses perpanjangan.</p>
24.	Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. B X - 538/44008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PLTU di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Oktober 2015	Berlaku selama 10 tahun	<p>Izin pengelolaan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dermaga I tipe jetty untuk sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 8.000 DWT - Dermaga II tipe jetty untuk sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 40.000 DWT - Dermaga II tipe jetty untuk sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 12.000 DWT.
25.	Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Lokasi Terminal Khusus (Tersus) Milik PJB No. NV.006/1/14/DJPL-19 tanggal 24 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Direktur Kenavigasian an. Direktur Jendral Perhubungan Laut.	-	<p>Pembangunan dan Pemasangan SBNP sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambu suar pelabuhan PJB PLTMG; - Rambu suar special mark No. 1; dan - Rambu suar special mark No. 2.
26.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 354.1.8.209.B.5E.3578.B20, tanggal 26 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi badan Usaha Mandiri	26 Februari 2025	N/A
27.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 353.1.8.209.B.5E.3578.B20, tanggal 26 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi badan Usaha Mandiri	26 Februari 2025	N/A
28.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3578-09-131-1-13-091511, tanggal 5 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Lemabaga Pengemabangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur	4 Maret 2023	N/A



No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
29.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3578-08-131-1-13-091511, tanggal 5 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Lemabaga Pengemabangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur	4 Maret 2023	N/A
30.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0-3578-06-131-1-13-091511, tanggal 5 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Lemabaga Pengemabangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur	4 Maret 2023	N/A
31.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 188.4/218/436.7.5/2020, tanggal 12 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya	Sesuai dengan SBU.	N/A
32.	SIUP (Besar) No. 503/1232.A/436.7.17/2020, tanggal 14 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya a.n. Walikota Surabaya	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Untuk kegiatan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.
33.	API-P No. 133701508-P, tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur	Berlaku selama PJB masih menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban registrasi ulang pada tanggal 17 April 2022.	N/A

Seluruh Perizinan yang bersifat material bagi Perseroan, PT IP, dan PT PJB telah diungkapkan

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

4.1. Perjanjian pengadaan bahan bakar

Untuk menjaga kesinambungan kegiatannya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian pengadaan bahan bakar sebagai berikut:

a. Gas

No	Sektor	Pemasok	Periode	Tanggal Jatuh Tempo	Satuan	Kuantitas (c)
1.	Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	9.954
2.	Cilegon	PT Pertamina Hulu Energi OSES	2019 (1)	30 April 2020 (i)	bbtu	11.979
3.	Muara Karang - Priok	(a)	2004-2018 (1)	31 Desember 2022 (i)	bbtu	679.954
4.	Priok	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	29.200
5.	Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	13.688
6.	Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	16.425
7.	Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri Keramasan, Inderalaya	(b)	2011-2019(1)	9 Mei 2020 (i)	bbtu	197.185
8.	Keramasan, Inderalaya, Borang	Medco E&P Lematang	2017-2027	4 Desember 2027	bbtu	50.933
9.	Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd (e)	2012-2028	30 Desember 2028	bbtu	368.700
10.	Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2018 (1)	26 Maret 2020 (i)	bbtu	483.490



No	Sektor	Pemasok	Periode	Tanggal Jatuh Tempo	Satuan	Kuantitas (c)
11.	Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd	2006-2026	31 Desember 2026	bbtu	440.000
12.	Pekanbaru	EMP Bentu Ltd. (f)	2007-2021	19 Mei 2021	bbtu	128.619
13.	Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	20 November 2020	bbtu	27.375
14.	Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2023	31 Desember 2023	bbtu	123.658
15.	Tanjung Batu	PT Pertamina EP	2005-2019 (1)	30 Juni 2019 (j)	bbtu	81.636
16.	Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2017 (1)	31 Desember 2020 (i)	bbtu	3.359
17.	Bontang	Mubadala Petroleum	2019-2020	31 Desember 2020	bbtu	4.380
18.	Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	29.200
19.	Grati	Lapangan Oyong (d)	2009-2020	31 Desember 2020	bbtu	116.070
20.	Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	2.482
21.	Bangkanai	Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd (g)	2013-2033	29 Desember 2033	bbtu	130.000
22.	Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	2012-2022	24 Oktober 2022	bbtu	51.945
23.	Muara Tawar	PT Pertamina EP	2018 - 2024	31 Desember 2024	bbtu	29.244
24.	Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2011-2026	1 Juni 2026	bbtu	219.000
25.	Grati	Lapangan Wortel (d)	2012-2020	31 Desember 2020	bbtu	55.827
26.	Tarakan	Medco E&P Indonesia	2010 - 2021	31 Desember 2021	bbtu	10.134
27.	Nunukan	Pertamina EP	2012-2020	31 Desember 2020	bbtu	4.200
28.	Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	31 Desember 2022	kargo	191
29.	Bunyu Kaltim	Pertamina EP	2012-2017 (1)	31 Desember 2020 (i)	bbtu	609
30.	Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	2013-2019 (1)	31 Desember 2020 (i)	bbtu	49.400
31.	Purwodadi	PT Energasindo Heksa Karya	2019-2021	31 Desember 2021	bbtu	60
32.	Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2020	31 Desember 2020	bbtu	39.898
33.	Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2017-2033	30 Desember 2033	kargo	696
34.	Belawan	Pertagas Niaga	2018-2020	30 April 2020 (i)	kargo	13.010
35.	KKA	PHE NSO dan PHE NSB	2019-2020	31 Desember 2020	bbtu	7.647
36.	Tana Tidung	E&P Simenggaris PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco	2015-2020	31 Desember 2020	bbtu	805
37.	New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	1.168
38.	Multidestinas	Pertamina (hilir)	2018-2022	31 Desember 2022	kargo	(h)
39.	Multidestinas	Pertamina (hulu)	2018-2022	31 Desember 2022	kargo	(h)
40.	Sutami	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	1.314
41.	Sumatera	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2023	25 November 2023	bbtu	6.600



No	Sektor	Pemasok	Periode	Tanggal Jatuh Tempo	Satuan	Kuantitas (c)
42.	MPP 100 MW Lampung	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2019-2030	1 November 2030	bbtu	6.439
43.	Mahakam	Pertagas Niaga	2017-2023	31 Oktober 2023	bbtu	14.256
44.	Batam	Petrochina	2016-2023	19 Desember 2023	bbtu	41.556
(1)	<i>Sedang dalam proses perpanjangan</i>					
(a)	<i>PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java; EMP ONWJ Ltd.; KUFPEC Indonesia (ONWJ) B.V.</i>					
(b)	<i>PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd. dan Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.</i>					
(c)	<i>dalam jumlah penuh</i>					
(d)	<i>Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) and Cue Sampang Pty Ltd.</i>					
(e)	<i>berganti nama dari PT EMP Kangean Ltd.</i>					
(f)	<i>berganti nama dari Kalila Bentu Ltd.</i>					
(g)	<i>berganti nama dari Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.</i>					
(h)	<i>Penentuan volume LNG dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan</i>					
(i)	<i>Dasar pengaliran gas sampai dengan ditandatangani Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Gas adalah dengan Kesepakatan Bersama. Kesepakatan Bersama yang telah berakhir jangka waktunya sedang dalam proses perpanjangan, namun demikian pengaliran gas tetap berjalan.</i>					
(j)	<i>Sedang dalam proses perpanjangan dan pengaliran gas tetap berjalan.</i>					

Per 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai fasilitas *Stand-by Letter of Credit* (SBLC) untuk pengadaan bahan bakar gas dengan rincian sebagai berikut:

Bank Penerbit	Penerima Manfaat	Periode Jatuh Tempo	Mata Uang	Jumlah*
BRI	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	30 April 2021	US\$	19.151.100
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	31 Juli 2020	US\$	20.700
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	10 Mei 2021	US\$	3.360.000
	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	24 Januari 2021	US\$	14.137.200
	Petrochina Int. Jabung	10 Mei 2021	US\$	5.673.801
	Petrogas Kaltim	-	IDR	82.916.609.243
	SESCO	-	US\$	10.000.000
	SESCO	-	MYR	79.000.000
	Ophir	30 Agustus 2020	US\$	8.679.673
Mandiri	PT Transportasi Gas Indonesia	22 Mei 2021	US\$	953.120
	PT Pertamina (Persero)	31 Desember 2020	IDR	537.969.489.451
	PT Pertamina (Persero)	**	US\$	11.451.021
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	7 Februari 2020**	US\$	1.852.200
	PEARLOIL (SSEBUKU) Ltd	11 April 2020**	US\$	2.177.665
BNI	BP Berau LTD. (on behalf of Tangguh)	31 Desember 2020	US\$	80.476.029
	Conoco Phillips	14 Februari 2021	US\$	9.300.000

* dalam jumlah penuh/in full amount

** sudah tidak aktif

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US\$2,74 sampai dengan US\$11,51 per MMBTU dan LNG antara US\$7,71 sampai dengan US\$12,21 per MMBTU.

b. Batubara

Pemasok	Kuantitas Metrik Ton per Tahun*	Periode Jatuh Tempo
Rutin		
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	6.880.000	2004-2031
PT Adaro Indonesia	1.500.000	2014-2023
PT Artha Daya Coalindo	1.200.000	2019-2022
PT Berau Coal	3.500.000	2009-2023
PT Indominco Mandiri	500.000	2017-2022



Pemasok	Kuantitas Metrik Ton per Tahun*	Periode Jatuh Tempo
Rutin		
PT Oktasan Baruna Persada	1.680.000	2018-2026
CV Tahiti Coal	120.000	2017-2020
CV Air Mata Emas	36.000	2018-2021
PT Kaltim Prima Coal	7.460.000	2016-2022
PT Allied Indo Coal	120.000	2017-2020
PT Arutmin Indonesia	2.400.000	2019-2021
PT Jembayan Muara Bara	500.000	2017-2022
CV Bara Mitra Kencana	90.000	2019-2022
PT Cahaya Bumi Perdana	48.000	2019-2022
CV Putri Surya Pratama Natural	48.000	2019-2022
PT Dasrat Sarana Arang Sejati	48.000	2019-2022
PT Miyor Pratama Coal	30.000	2019-2022
PT Allied Indo Coal Jaya	136.000	2019-2022
Kerjasama konsorsium/Consortium PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	2.005.000	2007-2027
Program Percepatan/Fast Track Program		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	9.800.000	2012-2030
PT Indexim Coalindo	300.000	2018-2023
PT Titan Infra Energy ⁽¹⁾	2.920.000	2007-2027
PT Hanson Energy	2.128.000	2011-2034
PT Lanna Harita Indonesia	300.000	2015-2020
PT Rizki Anugrah Pertama	1.186.000	2015-2021
PT Tunas Inti Abadi	600.000	2016-2021
PT Dizamatra Powerindo	500.000	2016-2021
PT Samantaka Batubara	500.000	2016-2021
PT Bara Energi Lestari ⁽²⁾	500.000	-
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	6.099.000	2007-2027
PT Dwi Guna Laksana & PT Borneo Indo Bara	1.890.000	2009-2023
PT Kasih Industri Indonesia dengan CV Akbar dan PT Sarolangun Prima Coal	1.865.000	2009-2029
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Eltra	576.000	2011-2031
PT Eksploitasi Energi Indonesia, CV Multi Bara Persada & PT Borneo Indo Bara	1.179.104	2011-2031
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Rizki Armia	1.241.000	2009-2032
PT Energi Batubara Lestari dan PT Batara Batari Sinergy Nusantara	221.000	2014-2034

(1) *berganti nama dari PT Titan Mining Energi*

(2) *sampai dengan jumlah kuantitas terpenuhi*

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp278.295 dan Rp1.040.914 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature (AFT)* dan *Hardgrove Grindability Index (HGI)*.

4.2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan kontrak penjualan energi

(i) Sudah beroperasi

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode Jatuh Tempo	Tanggal Operasi Komersial
1.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulsel	Gas	315,0	85	1998-2027	12 September 1998
2.	PT Cikarang Listrindo Tbk.	Cikarang, Jabar	Gas	300,0	72	1998-2031	1 Desember 1998
3.	Pertamina, Cevron Drajat Ltd.	Drajat, Jabar	Panas bumi	220,0	95	2000-2030 2007- 2053	1 Februari 2000 1 Agustus 2007
4.	Star Energy Geothermal Ltd.	Wayang Windu, Jabar	Panas bumi	227,0	95	2000-2030 2009-2039	1 Juni 2000 1 Maret 2009
5.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jatim	Batubara	1.230,0	85	2000-2040	1 Juli 2000



No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode Jatuh Tempo	Tanggal Operasi Komersial
6.	PT Jawa Power	Paiton II, Jatim	Batubara	1.220,0	83	2000-2030	1 November 2000
7.	Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jabar	Panas bumi	165,0	90	2000-2030	1 Desember 2000
8.	PT Geo Dipa Energy	Dieng Unit 1, Jateng	Panas bumi	55,0	85	2002-2044	1 Oktober 2002
9.	PT Asrigita Prasarana	Palembang Timur, Sumsel	Gas	150,0	85	2004-2024	1 September 2004
10.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jabar	Tenaga air	180,0	-	2017-2022	1 Agustus 2006
11.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jateng	Batubara	562,0	80	2007-2037	1 Februari 2007
12.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulut	Tenaga air	3,0	80	2007-2027	31 Juli 2007
13.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulteng	Batubara	27,0	80	2007-2032	1 November 2007
14.	PT Meppo Gen	Gunung Megang, Sumsel	Gas	110,0	80	2007-2027	10 November 2007
15.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 4, Jabar	Panas bumi	60,0	90	2008-2038	26 Januari 2008
16.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumut	Panas bumi	12	80	2008-2038	1 Agustus 2008
17.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kaltim	Batubara	45,0	83	2008-2040	20 Desember 2008
18.	PT Fajar Futura Energi Luwu	Ranteballa, Luwu, Sulsel	Tenaga air	2,4	-	2010-2035	1 Mei 2010
19.	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumut	Tenaga air	180,0	1.175 GWh/th	2010-2040	18 Januari 2011
20.	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Tangka, Sinjai, Sulsel	Tenaga air	10,0	-	2011-2036	1 Februari 2011
21.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalsel	Batubara	11,0	80	2011-2036	14 Oktober 2011
22.	PT Paiton Energy	Paiton III, Jatim	Batubara	815,0	85	2012-2042	18 Maret 2012
23.	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jabar	Batubara	660,0	80	2012-2042	27 Juli 2012
24.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulsel	Batubara	200,0	80	2012-2042	1 November 2012
25.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulsel	Batubara	250,0	80	2018-2048	1 April 2018
26.	PT Poso Energy	Poso, Sulteng	Tenaga air	195,0	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember 2012
27.	PT Bekasi Power	Bekasi, Jabar	Gas	119	80	2013-2033	5 Januari 2013
28.	PT GH EMM Indonesia	Simpang Belimbing, Muara Enim, Sumsel	Batubara	227,0	80	2011-2041	27 Februari 2013
29.	PT Sepoetih Daya Prima	Lampung Tengah, Lampung	Batubara	12,0	80	2014-2024	2 Mei 2014
30.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Unit 3, Kaltim	Batubara	50,0	87	2014-2039	14 Agustus 2014
31.	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara	21,0	80	2014-2039	13 September 2014
32.	PT Geo Dipa Energi	Patuha Unit 1, Jabar	Panas bumi	55,0	95	2014-2056	27 September 2014
33.	PT Kerta Negara Energi Perkasa	Senipah, Kaltim	Gas	82,0	85	2015-2040	17 Desember 2015
34.	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjar Sari, Lahat, Sumsel	Batubara	220,0	80	2015-2045	29 Mei 2015
35.	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara	380,0	85	2015-2045	18 Juni 2015 27 Juni 2015 31 Juli 2015
36.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 5, Jabar	Panas bumi	30,0	90	2015-2045	29 Juni 2015



No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode Jatuh Tempo	Tanggal Operasi Komersial
37.	PT Harmoni Energy Indonesia	Buton, Sulawesi Tenggara	Batubara	14,0	80	2015-2040	29 Oktober 2015
38.	PT Priamanaya Energi	Kebang Agung, Lahat, Sumsel	Batubara	240,0	80	2016-2046	1 Mei 2016
39.	PT Wampu Electric Power	Wampu, Sumut	Tenaga air	45,0	315,36 GWh/th	2016-2046	1 Mei 2016
40.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi, Jateng	Batubara	614,0	80	2016-2046	9 Juni 2016
41.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu 3, Sumatra	Panas bumi	55,0	90	2016-2046	26 Juli 2016
42.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Tawaeli Ekspansi (Unit 4 & 5), Palu	Batubara	30,0	80	2016-2041	7 September 2016
43.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 5, Sulut	Panas bumi	20,0	90	2016-2046	15 September 2016
44.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 6, Sulut	Panas bumi	20,0	90	2016-2046	9 Desember 2016
45.	PT DSPP Power Sumsel	Sumsel 5, Sumatra	Batubara	300,0	80	2016-2041	20 Desember 2016
46.	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali, Sumatera Utara	Panas bumi	110,0	90	2017-2047	18 Maret 2017
47.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu Unit 4, Sumatera	Panas bumi	55,0	90	2016-2046	25 Maret 2017
48.	PT Lestari Banten Energi	Banten, Jawa Barat	Batubara	625,0	80	2017-2042	28 Maret 2017
49.	PT Lombok Energy Dynamics	Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Batubara	50,0	80	2017-2042	10 April 2017
50.	Sarulla Operation Ltd.	Sibual Buali Unit 2, Sumatera Utara	Panas Bumi	110,0	90	2017-2047	2 Oktober 2017
51.	Sarulla Operation Ltd.	Sibual Buali Unit 3, Sumatera Utara	Panas Bumi	110,0	90	2017-2047	3 April 2018
52.	PT Pertamina Geothermal Energy	Garut, Jawa Barat	Panas Bumi	30,0	90	2018-2048	6 April 2018
53.	PT UPC Sidrap Bayu Energi	Sulawesi Selatan	Angin	70,0	100	2018-2048	5 April 2018
54.	PT Tanggamus Electric Power	PLTA Semangka	Tenaga air	56,0	57	2018-2048	7 Juli 2018
55.	PT Renkind Daya Energi	Mamuju, Sulawesi Barat	Batubara	50,0	80	2017-2042	18 September 2018
56.	PT Indo Ridlatama Power	Muara Jawa, Kalimantan Timur	Batubara	50,0	80	2018-2048	30 November 2018
57.	PT Rajamandala Electric Power	Cianjur, Jawa Barat	Tenaga Air	47	44	2019-2049	12 Mei 2019
58.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Batam	Gas	17,4	80	2006-2020	11 September 2005
59.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	85,5	90	2005-2025	1 Desember 2005
60.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	55,0	84	2005-2034	29 Oktober 2004
61.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	22,2	-	2014-2034	1 September 2014
62.	Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam	Batubara	99,0	85	2012-2042	25 Oktober 2012
63.	PT Energi Listrik Batam	Tanjung Uncang, Pulau Batam	Gas	70,0	85	2016-2038	1 Mei 2016
64.	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaraja, Sumut	Tenaga air	5,0	65	2012-2037	10 Mei 2012
65.	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumsel	Batubara	20,0	80	2014-2039	18 Januari 2014



No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode Jatuh Tempo	Tanggal Operasi Komersial
66.	Konsorsium PT Modaco Energy PT Elektrindo Perkasa Utama Pratt & Whitney Ps. Inc. Renewable Energy Power International	Payo Selincah, Jambi	Gas	94,0	60	2012-2019 (1)	8 Juni 2012
67.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumsel Unit I	Panas bumi	55	90	2017-2047	1 September 2019
68.	PT Energi Bayu Jenepono	PLTB Tolo Jenepono, Sulawesi Selatan	Angin	60	30	2019-2049	14 Mei 2019
69.	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumut	Panas bumi	45	90	2019-2049	1 Oktober 2019
70.	PT DSS Power Kendari	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	Batubara	100	80	2019-2044	28 Oktober 2019
71.	PT Tanjung Power Indonesia	Kaltim	Batubara	200	80	2019-2044	14 Desember 2019
72.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah	Batubara	945	86	2018-2048	9 November 2019
73.	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh, Sumbar	Panas bumi	220	90	2017-2047	16 Desember 2019
74.	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah	Tenaga air	120		2021-2051	5 Februari 2020
Jumlah				13.314,5			

(1) *AF atau Availability Factor adalah faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perseroan.*

(2) *sedang dalam proses perpanjangan*

(ii) *Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan)*

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode ⁽²⁾
1.	PT Bhumi Jati Power	Jepara, Jateng	Batubara	2.000	86	2021-2046
2.	PT Indo Raya Tenaga	Surabaya, Jateng	Batubara	2.000	86	2024-2049
3.	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Serang, Banten	Batubara	2.000	86	2020-2045
4.	PT Bhimasena Power Indonesia	Batang, Jateng	Batubara	1.900	86,21	2020-2045
5.	PT Jawa Satu Power	Karawang, Jabar	Gas	1.760	60	2023-2048
6.	PT Tanjung Jati Power Company	Cirebon, Jabar	Batubara	1.320	86	2025-2055
7.	PT Huadian Bukit Asam Power	Sumatra Selatan	Batubara	1.200	80	2023-2048
8.	PT Cirebon Energi Prasarana	Cirebon, Jabar	Batubara	1.000	86	2022-2047
9.	Konsorsium PT Putra Indotenaga1 – PLN Batubara	Jambi	Batubara	600	80	2022-2049
10.	PT Pembangkitan Perkasa Daya	Jambi	Batubara	600	80	2022-2047
11.	Konsorsium PT Gama Energi Negeri – PT PJB Investasi	Sumut	Batubara	600	Th 1-20 (85%), selanjutnya take or pay	2024-2049
12.	PT Senhua Guohua Lion Power Indonesia	Sumsel	Batubara	600	80	2021-2051
13.	PT North Sumatra Hydro Energy	Batang Toru	Tenaga air	510	-	2016-2046
14.	PT Meulaboh Power Generation	Aceh	Batubara	400	80	2021-2046
15.	PT Kerinci Merangin Hidro	Merangin	Tenaga air	350	-	2025 - 2055
16.	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	Sumbagsel	Batubara	300	80	2023-2048
17.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PLN Batubara	Sumsel	Batubara	300	80	2021-2046
18.	PT Medco Ratch Power Riau	Pekanbaru, Riau	Gas	250	60	2021-2041



No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode ⁽²⁾
19.	PT Poso Energy	PLTA Poso	Tenaga air	515	37	2021-2051
20.	PT Banyuasin Power Energi	Sumatera Selatan	Batubara	250	80	2020-2050
21.	PT Supreme Energy Rajabasa	PLTP Rajabasa, Lampung	Panas bumi	220	90	2023-2053
22.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dadap, Sumsel	Panas bumi	220	90	2019-2049
23.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu)	Wayang Windu 3,4, Jawa Barat/ West Java	Panas Bumi/ Geothermal	220	85	2020-2050
24.	PT Sejahtera Alam Energi	PLTP Baturaden, Jateng	Panas bumi	220	90	2024-2054
25.	PT Putra Indotenaga – PT PP Energi – China Gezhouba Group	Kalbar	Batubara	200	80	2023-2048
26.	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kaltim	Batubara	200	80	2022-2047
27.	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kaltim	Batubara	200	80	2022-2047
28.	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kalbar	Batubara	200	80	2021-2046
29.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalsel dan Kalteng	Batubara	200	80	2022-2047
30.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalsel dan Kalteng	Batubara	200	80	2022-2047
31.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalsel dan Kalteng	Batubara	200	80	2022-2047
32.	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Bengkulu	Batubara	200	80	2019-2044
33.	PT GCL Indo Tenaga	Kalbar	Batubara	200	80	2019-2044
34.	PT SKS Listrik Kalimantan	Gunung Mas, Kalteng	Batubara	200	80	2019-2044
35.	PT Graha Power Kaltim	Kaltim	Batubara	200	80	2019-2044
36.	PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	Kaltim	Batubara	200	80	2020-2045
37.	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumut	Panas bumi	240	90	2020-2050
38.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumsel	Panas bumi	165	90	2017-2047
39.	PT Bakrie Darmakarya Energi	PLTP Telaga Ngebel, Jatim	Panas bumi	165	90	2023-2053
40.	PT Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar dan/ PT PJBI	PLTS Cirata	Surya	145	-	2021-2041
41.	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh	Panas bumi	140	90	2019-2049
42.	PT Geo Dipa Energi	Dieng Unit 2 & 3, Jateng	Panas bumi	115	85	2021-2051
43.	PT Medco Cahaya Geothermal	PLTP Ijen, Jawa Timur	Panas bumi	110	85	2021-2051
44.	PT Sintesa Banten Geothermal	PLTP Rawa Dano, Banten/ Banten	Panas Bumi	110	90	2022-2052
45.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi	110	85	2019-2049
46.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi	110	85	2024-2055
47.	PT Gorontalo Listrik Perdana	Gorontalo	Batubara	100	80	2020-2045
48.	PT Minahasa Cahaya Lestari	Sulut	Batubara	100	80	2021-2046
49.	PT Malea Energy	PLTA Malea	Tenaga Air	90	60	30
50.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi	80	90	2024-2054
51.	PT Spring Energy Sentosa	PLTP Guci, Jawa Tengah/ Central Java	Panas Bumi	55	90	2024-2054



No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode ⁽²⁾
52.	PT Jabar Rekind Geothermal	PLTP Cisolok Cisukarame, Jawa Bara	Panas Bumi	45	90	2025-2055
53.	Lainnya (3)					
JUMLAH				23.615		

(1) AF= Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.

(2) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.

(3) Meliputi kontrak dengan 152 IPP, terdiri dari 37 IPP dalam tahap pembangunan dan 43 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 72 Power Purchase Agreement berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

4.3. Perjanjian perolehan barang modal

a. Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 ("Perpres No. 71/2006") yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Perpres No. 59/2009"), Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Kontrak Pembangkitan

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perseroan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah membayar uang muka sebesar US\$876.217.780 dan Rp4.790.016 juta untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

b. Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.



Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan dan jaringan transmisi dalam rangka program percepatan dan kontrak konstruksi rutin tercatat masing-masing sebesar Rp10.482.479 juta dan Rp2.384.497 juta.

4.4. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perseroan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

Pembangkitan	Kontraktor	Nilai kontrak setara	Periode
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	1.942.479	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium Fortum Service OY & PT Medco Energy	398.255	2005-2030
Jumlah		2.340.734	

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

4.5. Perjanjian pinjaman terkait program percepatan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction (EPC)* untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perseroan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

Pada tanggal 31 Desember 2019, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

No	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Fasilitas pinjaman belum digunakan Rp ⁽²⁾	Premi	Tanggal
		US\$ ⁽¹⁾	Rp ⁽²⁾		Asuransi	jatuh tempo
					US\$ ⁽¹⁾	
1.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank of China Ltd./ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	592	-	-	55	27 Mei 2021
2.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	331	-	-	32	30 Januari 2023
3.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	2.741.298	-	-	23 Juli 2018
4.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	-	27	30 Januari 2023
5.	Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	262	-	-	-	3 Desember 2021



No	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Fasilitas pinjaman belum digunakan Rp ⁽²⁾	Premi	Tanggal jatuh tempo
		US\$ ⁽¹⁾	Rp ⁽²⁾		Asuransi US\$ ⁽¹⁾	
6.	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatra Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah PLTU Maluku Utara	-	4.732.000	594.182	-	24 April 2019
7.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	2.074.739	-	-	30 Januari 2019
8.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	-	1.911.480	-	-	18 April 2018
9.	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	-	1.874.315	-	-	29 Juli 2018
10.	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	-	1.606.612	-	-	29 Juli 2021
11.	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Manado. Sulawesi Utara PLTU Tanjung Balai Karimun. Kepulauan Riau PLTU 1 Ende. Nusa Tenggara Timur PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	-	1.498.513	-	-	29 Juli 2018
12.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	-	1.272.913	-	-	23 Februari 2018
13.	Bank Mega/ PLTU Lampung PLTU Sumatra Utara, Medan	-	1.240.661	-	-	29 Juli 2018
14.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	1.077.578	-	-	18 April 2018
15.	Pinjaman sindikasi dikordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	1.151.005	-	-	30 Januari 2019
16.	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur	-	1.045.924	-	-	29 Juli 2021
17.	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	-	735.387	-	-	18 April 2018
18.	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	-	600.635	-	-	18 April 2018
19.	The Export-Import Bank of China/	-	-	-	-	-



No	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Fasilitas pinjaman belum digunakan Rp ⁽²⁾	Premi Asuransi US\$ ⁽¹⁾	Tanggal jatuh tempo
		US\$ ⁽¹⁾	Rp ⁽²⁾			
	PLTU Pelabuhan Ratu	482	-	-	46	21 Januari 2025
	PLTU NAD	124	-	-	12	21 Juli 2024
20.	Bank of China Ltd./ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	455	-	-	46	4 Mei 2022
21.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	-	1.155.352	-	-	30 Januari 2019
22.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur	293	-	-	29	2 Juli 2025
23.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatra Utara	-	3.941.772	-	-	14 Oktober 2019
24.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Mandiri/ Transmisi	-	2.613.012	-	-	14 Desember 2019
25.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia/ Transmisi	-	327.195	-	-	14 Desember 2019
26.	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah	625	-	-	-	14 Oktober 2022
27.	China Development Bank/ PLTU Sumatra Barat	138	-	-	-	14 Oktober 2022
28.	Bank of China Ltd./ PLTU Tanjung Awar-Awar	372	-	-	34	14 Desember 2022
29.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ Transmisi	-	1.930.063	-	-	14 Desember 2019
30.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia PLTU Riau PLTU Kalimantan Barat	-	1.080.598	-	-	14 Desember 2019
31.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi	-	1.067.684	-	-	27 Desember 2020
32.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	-	2.225.000	145.497	-	12 November 2025
33.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU Teluk Balikpapan Kalimantan Timur	-	2.449.963	313.154	-	17 Desember 2025
	Jumlah	3.958	40.353.700	1.052.833	281	

(1) Dalam jumlah penuh.

(2) Dalam jutaan Rupiah.

Tingkat suku bunga per tahun

Keterangan	2019
Rupiah	6,36540%% - 9,2119%
US\$	2,69925% - 6,7209%



4.6. Perjanjian Pinjaman Tidak Terkait Program Percepatan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, rincian pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum ¹⁾	Fasilitas pinjaman belum digunakan ¹⁾	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Fasilitas pinjaman dalam US\$					
1.	Asian Development Bank Gardu Induk/ <i>Grid</i>	575	19	4 Desember 2015	15 September 2035
2.	Asian Development Bank Gardu Induk/ <i>Grid</i>	25	1	4 Desember 2015	15 September 2035
3.	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension	108	30	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
4.	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension	72	20	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
5.	International Bank for Reconstruction and Development <i>Power distribution development program</i>	500	38	20 Mei 2016	15 Maret 2036
6.	Islamic Development Bank Power Grid Enhancement Project	330	225	10 Januari 2017	10 Maret 2032
7.	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	22	11	10 Maret 2017	10 Maret 2032
8.	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	15	7	10 Maret 2017	10 Maret 2032
9.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation PLTA Jatigede	73	33	30 Maret 2017	30 Maret 2031
10.	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr.A	53	38	20 Juni 2017	20 Juni 2032
11.	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr.B	36	26	20 Juni 2017	20 Juni 2032
12.	Asian Development Bank Gardu Induk/ <i>Grid</i>	600	165	10 Oktober 2017	10 Oktober 2037
13.	Credit Agricole CIB Paris PLTGU Muara Tawar	280	160	8 November 2017	8 November 2032
14.	HSBC PLTGU Tambak Lorok III	214	214	8 November 2017	8 November 2032
15.	PT Bank DBS Indonesia Term Loan Facilities - DBS 2019 - Onshore	275,00	78	25 Juni 2019	25 Juni 2024
	Term Loan Facilities - DBS 2019 - Offshore	725,00	222	25 Juni 2019	25 Juni 2024
16.	PT Bank DBS Indonesia (Agen) Revolving Credit Facilities - DBS 2018 - Onshore	25	25	28 Desember 2018	28 November 2020
	Revolving Credit Facilities - DBS 2018 - Offshore	125	125	28 Desember 2018	28 November 2020
Jumlah dalam USD		4.053	1.437		
Fasilitas pinjaman dalam EUR					
1.	Agence Francaise De Development Trans GIS	100	72	7 Mei 2015	7 Mei 2030
2.	Agence Francaise De Development <i>Trans Grid</i>	1	-	7 Mei 2015	7 Mei 2020
3.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau <i>Suralaya Rehabilitation</i>	175	175	8 Mei 2015	30 Juni 2027
4.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau <i>Kamojang Rehabilitation</i>	65	65	8 Mei 2015	30 Juni 2030
5.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau <i>Kamojang Rehabilitation</i>	60	59	8 Mei 2015	30 Juni 2030
6.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Transmisi	45	45	23 Mei 2016	30 Juni 2028



No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum ¹⁾	Fasilitas pinjaman belum digunakan ¹⁾	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
7.	ING Bank, cabang of ING- DiBa AG dan Societe General PLTGU Grati	40	4	24 Juni 2016	23 Desember 2030
8.	Mizuho Lombok Peaker	74	12	24 Mei 2017	24 Mei 2029
9.	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Bangkanai Peaker	83	36	15 September 2017	15 November 2028
10.	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Power Plant Kumbih	85	85	15 Desember 2017	15 Desember 2032
11.	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker – CESCE Covered Facility	41	27	9 Februari 2018	9 Februari 2030
12.	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker – SACE Covered Facility	66	44	9 Februari 2018	9 Februari 2030
13.	BGK PLTU Lombok FTP-2	81	79	21 Februari 2018	21 Februari 2031
14.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Geothermal Energy Program	150	150	11 Oktober 2018	11 Oktober 2033
15.	Kreditanstalt fur WiederaufbauBakaru I + II Hydro Power Project	225	225	5 September 2019	5 November 2033
16.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau1000 Islands Renewable Energy for electrification Program	70	70	5 September 2019	5 November 2033
Jumlah		1.361	1.148		

Fasilitas pinjaman dalam JPY

1.	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar	16.430	3.524	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
2.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Muara Karang	15.449	9.855	10 Maret 2017	10 Maret 2032
3.	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2	16.939	12.401	20 Juni 2017	20 Juni 2032
Jumlah		48.818	25.780		

Fasilitas pinjaman dalam Rupiah

1.	PT Bank Rakyat Indonesia	4.506.787	3.188.708	14 November 2018	14 November 2028
2.	PT Bank Negara Indonesia	5.071.000	5.071.000	18 Desember 2019	18 Desember 2022
3.	PT Bank Mandiri Syariah	2.846.000	2.846.000	18 Desember 2019	18 Desember 2022
4.	PT Bank Rakyat Indonesia <i>Revolving credit facilities</i>	28.000.000	28.000.000	21 Juni 2019	21 Juli 2020
5.	PT Bank DKI <i>Revolving credit facilities</i>	1.000.000	1.000.000	8 Juni 2019	21 Juni 2020*
6.	PT Bank HSBC Indonesia <i>Revolving credit facilities</i>	1.400.000	1.400.000	26 Juni 2019	8 Juni 2020*
7.	Citibank <i>Revolving credit facilities</i>	500.000	500.000	20 Maret 2019	26 Juni 2020*
8.	PT BCA Tbk. <i>Revolving credit facilities</i>	1.500.000	1.500.000-	6 September 2019	5 September 2020
9.	PT Bank QNB Indonesia Tbk. <i>Revolving credit facilities</i>	300.000	300.000	8 November 2019	8 November 2020
10.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk <i>Revolving credit facilities</i>	1.000.000	1.000.000	12 Desember 2019	12 Desember 2020
Jumlah		46.123.787	44.805.708		

1) dalam jutaan Rupiah

* perjanjian telah berakhir dan tidak ada perpanjangan

**Tingkat suku bunga per tahun**

Keterangan	2019
Rupiah	7,80385%
US\$	2,41255% - 4,41%
JPY	1,58% - 1,74%
EUR	0,97% - 2,20%

5. ASURANSI

Perseroan telah menutup asuransi atas seluruh aset material Perseroan terutama yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan sebagai berikut:

No	Asuradur (Perusahaan Asuransi)	Jenis Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Objek Asuransi
1	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Seluruh risiko termasuk kerusakan mesin, terorisme & sabotase dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga	153.204.110. 19.00026	30 Desember 2019 – 30 Desember 2020	USD14.272.472.841,32 Total premi: USD12.126.394,85	- Kerusakan Materil dan Kerusakan Mesin Semua harta benda nyata dan pribadi milik Perseroan, termasuk konstruksi, instalasi, renovasi, perubahan, penambahan, pembongkaran dan/atau perakitan dan/atau harta benda nyata dan pribadi lain yang perawatannya menjadi tanggung jawab Perseroan, dan seluruh mesin dan peralatan termasuk bangunan, switchyard dan jaringan transmisi hingga 1000 meter dari gardu yang ditempati yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik. - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Untuk mengganti kerugian Perseroan atas semua jumlah yang telah dikeluarkan yang menjadi kewajiban untuk membayar kompensasi, termasuk semua biaya pembelaan yang berkaitan dengannya, yang timbul dari cedera badan atau kerusakan harta benda, yang dialami oleh pihak ketiga sehubungan dengan bisnis. - Terorisme dan Sabotase Memberikan ganti rugi kepada Perseroan terhadap kerugian fisik langsung atau kerusakan pada kepentingan yang dipertanggungkan yang timbul dari terorisme dan sabotase.



Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan, tanggal 29 Juni 2020, seluruh aset Perseroan yang bernilai material telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan kecuali untuk asuransi beberapa aset Perseroan yang sedang dalam proses pengurusan sebagai berikut:

Pembangkit

Regional	Nama Pembangkit	Kapasitas Unit	Total Kapasitas
Regional Sumatera dan Kalimantan	PLTG Sambera	2 x 20	40
	PLTGU Tanjung Batu	2 x 20 GT, 1 x 20 ST	60
	PLTMG Bontang	2 x 7	14
	PLTU Parit Baru Site Bengkayang	2 x 50	100
	PLTU Sintang	3 x 7	21
	PLTU Sanggau	2 x 7	14
	PLTG Pulang Pisau #2	1 x 60	60
Regional Jawa Madura dan Bali	PLTU 1 Jabar (Indramayu) Unit 1, 2 & 3	3 x 330	990
	PLTGU 1 Jateng (Remabng) Unit 1 & 2	2 x 315	630
	PLTGU Muara Tawar Blok 5	1 x 234	234
	PLTU 2 Jabar (Palabuhan Ratu) Unit 1, 2 & 3	3 x 350	1050
	PLTU 2 Jateng (Adipala) Unit 1	1 x 660	660
	PLTA Jatigede Unit 1 & 2	2 x 55	110

6. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak memiliki bidang-bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak. Jumlah keseluruhan kepemilikan tanah Perseroan dan Entitas Anak yang bersifat material bagi kegiatan usaha yaitu sebanyak 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) bidang tanah, yang terdiri dari:

- 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna bangunan ("SHGB");
- 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat Hak Pengelolaan ("SHGB di atas SHPL");
- 90 (sembilan puluh) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai ("SHP"); dan
- 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan ("SHPL").

No.	Perusahaan	SHGB		SHGB di atas SHPL		SHP		SHPL		Total Luas (m ²)	Masa Berlaku ^(*)
		Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)		
1.	Perseroan	96	21.730.795	1	57.563	63	8.392.218	1	164.400	30.344.976 ¹⁾	1985 – 2049, dengan beberapa tanah berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
2.	PT IP	423	91.508.698	-	-	7	426.409	-	-	91.935.107 ^(*)	2018 - 2048, dengan beberapa tanah berlaku selama PT IP menjalankan kegiatan usahanya.
3.	PT PLNT	1	1.957	-	-	3	17.432	-	-	19.389	2039, dengan beberapa tanah berlaku selama PT PLNT menjalankan kegiatan usahanya.
4.	PT PLN Batam	98	288.378	-	-	-	-	-	-	288.378	2015 - 2046



No.	Perusahaan	SHGB	SHGB di atas SHPL	SHP	SHPL	Total Luas (m ²)	Masa Berlaku ^{***}				
5.	PT PJB	137	9.507.077	-	-	17 2.073.948	-	-	11.581.025 ¹⁾	2010-2040, dengan beberapa tanah berlaku selama PT PJB menjalankan usahanya.	
6.	PT BAg	10	24.945	-	-	-	-	-	24.945 ¹⁾	2012 - 2048	
7.	PT ICON+	2	7.184	-	-	-	-	-	7.184	2032	
Total		767	123.069.034	1	57.563	90	10.910.007	1	164.400	134.201.004	

Keterangan:

- *) Total luas tanah yang tercantum termasuk dengan tanah yang masih dalam pengurusan perpanjangan sertifikat.
 **) Total luas tanah yang tercantum termasuk dengan tanah yang masih dalam pengurusan sertifikat dan pengurusan perpanjangan sertifikat.
 ***) Masa berlaku yang tertera adalah rentang masa berlaku tercepat hingga terlama dari sertifikat tanah milik Perseroan dan Entitas Anak.

7. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2009, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca ("GRK") sebesar 26% dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020. Selanjutnya, Pemerintah telah merumuskan instrumen hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk rencana aksi nasional dalam rangka menurunkan emisi GRK yang telah dituangkan pada Perpres No. 61/2011 dan inventarisasi GRK melalui Perpres No. 71/2011.

Pada tahun 2015, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menetapkan sasaran pengurangan emisi yang lebih ambisius pasca tahun 2020. Berdasarkan pengukuran tingkat emisi paling akhir, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. Pengembangan sumber energi bersih juga merupakan kebijakan nasional.

Untuk mencapai sasaran pengurangan emisi di sektor energi, Indonesia telah memberlakukan kebijakan bauran energi dengan obyektif untuk mencapai penggunaan energi primer dari energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2025 sebagaimana diatur pada RUPTL 2018-2027. Sehubungan dengan sektor ketenagalistrikan, Indonesia berusaha menekan porsi energi yang dihasilkan dari batubara sampai dengan 54,4%, gas sampai dengan 22,2% dan BBM sampai dengan 0,4% dari total bauran energi pada tahun 2025, sebagaimana diatur pada RUPTL 2018-2027.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai undang-undang lingkungan hidup terkait dengan polusi air, udara dan suara, serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Meskipun Perseroan berkeyakinan telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam segala aspek yang material terkait undang-undang lingkungan hidup, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak akan selalu memiliki risiko dan kewajiban terkait lingkungan hidup dan tidak ada jaminan bahwa biaya dan kewajiban yang material tidak akan timbul di masa mendatang. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dapat mengakibatkan perluasan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik dan sistem distribusi dan transmisi mengalami penundaan.

Sesuai dengan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang berlaku, terutama UU No. 32/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("PP No. 5/2012"), setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 32/2009, Perseroan dan Entitas Anak juga diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012"), perusahaan yang diwajibkan memiliki AMDAL (sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2012) wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan apabila Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha akan dibatalkan. Tata



cara penyusunan, permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan diatur dalam PP No. 27/2012. UU No. 32/2009 mewajibkan setiap izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU No. 32/2009 ditetapkan.

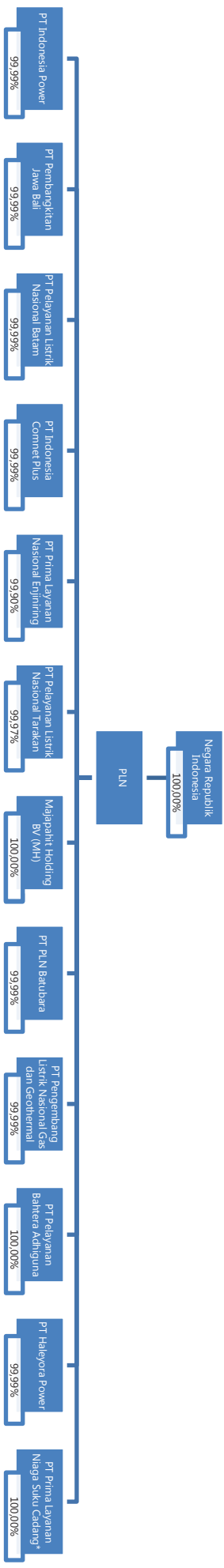
Berdasarkan ketentuan pengalihan dalam PP No. 27/2012, dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP No. 27/2012 tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi UU No. 32/2009 dan melakukan pelaporan AMDAL, UPL dan UKL, apabila tidak diperlukan Izin Lingkungan. Namun demikian, PP No. 27/2012 mewajibkan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, seperti apabila Perseroan dan Entitas Anak memutuskan untuk meningkatkan kapasitas atau membangun pembangkit tenaga listrik tambahan.

Peraturan lingkungan hidup yang berlaku saat ini di Indonesia melarang usaha atau kegiatan yang akan mengancam kualitas lingkungan hidup. Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada beberapa peraturan Pemerintah, peraturan menteri serta peraturan propinsi dan daerah terkait pemeliharaan mutu kualitas. Limbah yang dikeluarkan oleh sektor pembangkitan tenaga listrik meliputi polusi air, udara, dan udara serta limbah berbahaya dan beracun. Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada kewajiban untuk melakukan pemantauan, pencegahan, pemeliharaan dan pelaporan sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Apabila Perseroan dan Entitas Anak melanggar salah satu kewajiban ini, Perseroan dan Entitas Anak dapat diwajibkan membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan, memulihkan kondisi area yang terganggu dan/atau dapat dikenakan sanksi kriminal.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 4.527 kegiatan usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi dijalankan oleh unit-unit bisnis Perseroan di seluruh Indonesia dan 4.048 diantaranya telah memperoleh Izin Lingkungan.



8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 100,00%.

*Pemilikan tidak langsung



9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Perseroan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Para anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Sedangkan masa jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 37, tanggal 27 Januari 2020, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056739 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020054. AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020, susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama & Komisaris Independen	: Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama	: Suahasil Nazara
Komisaris Independen	: Murtaqi Syamsuddin
Komisaris Independen	: Deden Juhara
Komisaris	: Ilya Avianti
Komisaris	: Rida Mulyana
Komisaris	: Mohamad Ikhsan
Komisaris	: Dudy Purwagandhi

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 08 tanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0264306 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101963.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Juni 2020, susunan Direksi Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Zulkifli Zaini
Wakil Direktur Utama	: Darmawan Prasodjo
Direktur Keuangan	: Sinthya Roesly
Direktur Perencanaan Korporat	: Muhammad Ikbal Nur
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan	: Bob Saril
Direktur Energy Primer	: Rudy Hendra Prastowo
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	: Syamsul Huda
Direktur Mega Project	: M. Ikhsan Asaad
Direktur Human Capital dan Management	: Syofvi Felienty Roekman
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	: Haryanto Wigny Suparto
Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan	: Wiluyo Kusdiharto

Berikut adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Amien Sunaryadi
Komisaris Utama & Komsaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1992	: Master of Professional Accountancy, the School of Accountancy, Georgia State University, Atlanta
Tahun 1986	: Accountant, State Accounting Institute (STAN)
Tahun 1982	: Adjunct Accountant, State Accounting Institute (STAN)
Tahun 1979	: SLA di Semarang
Tahun 1976	: SLP di Semarang
Tahun 1972	: SD di Semarang

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 - Sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
Tahun 2019 - Sekarang	: Partner of Assegaf Hamzah and Partners.
Tahun 2019 - Sekarang	: Senior Advisor of PT Integra Solusi Optima (ISO)
Tahun 2014 - 2018	: Kepala SKK Migas
Tahun 2012 - 2014	: Partner, Fraud Investigations and Disputes Service, PT EY-Indonesia
Tahun 2008 – 2012	: Senior Governance and Anti-Corruption Officer di Word Bank.
Tahun 2008	: Expert Staff, The Indonesian Financial Intelligence Unit (PPATK)
Tahun 2003 – 2007	: Wakil Ketua KPK periode 2003-2007
Tahun 2003	: Executive Director of the Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Tahun 2000 - 2003	: Senior Manager, Disputes Analysis and Investigation, PT PWC-Indonesia
Tahun 1999 - 2003	: Program Director, Lembaga Pengkajian Good Governance (LPGG)
Tahun 1982 - 2000	: Berbagai posisi dan fungsi di BPKP

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Suahasil Nazara
Wakil Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2003 : Doctor of Philosophy (PhD) dari universitas of Illinois at Urban-Champaign USA
 Tahun 1997 : Master of Science dari Cornell University USA
 Tahun 1994 : Sarjana Ekonomi UI
 Tahun 1988 : SMA Pangudi Luhur Jakarta
 Tahun 1985 : SMP Tarakanita III Jakarta
 Tahun 1982 : SD YPK Wijaya Jakarta

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 - Sekarang : Wakil Komisaris Utama Perseroan
 Tahun 2019 - Sekarang : Wakil Menteri Keuangan
 Tahun 2013 - 2019 : Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN)
 Tahun 2016 : Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 Tahun 2015 : Plt. Badan Kebijakan Fiskal
 Tahun 2010 - 2015 : Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
 Tahun 2009 – 2015 : Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
 Tahun 2009 – 2013 : Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
 Tahun 2009 – 2011 : Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal
 Tahun 2005 – 2008 : Kepala Lembaga Demografi
 Tahun 2004 - 2005 : Kepala Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi
 Tahun 2009 : Guru Besar Di Bidang Ilmu Ekonomi Eniversitas Indonesia
 Tahun 1999 : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FIB Universitas Indonesia

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Murtaqi Syamsuddin
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2003 : MBA Program, Univeristy of Oregon, Eugene, Oregon USA
 Tahun 1981 : Fakultas Teknik Universitas Indonesia - Jakarta

**II. DATA PEKERJAAN**

Tahun 2020 – Sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Tahun 2015 – 2017	: Direktur Baguan Regional Jawa Bagian barat Perseroan.
Tahun 2011 – 2015	: Direktur Perencanaan Perseroan
Tahun 2009 – 2011	: Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko Perseroan
Tahun 2008 - 2009	: Direktur Operasional Jawa Bali Perseroan
Tahun 2003 - 2008	: General Manaer Unit Distribusi Jawa Barat & Banten
Tahun 2001 – 2003	: Tuga Belajar di University of Oregon
Tahun 2000 – 2001	: Sekretaris Perusahaan Perseroan
Tahun 1981 – 2000	: Berbagai penugasan di Unit dan Kantor Pusat Perseroan

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

**Ilya Avianti
Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk masa jabatan sampai dengan 28 Juli 2022.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2000	: S3 Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung
Tahun 1994	: S2 Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung
Tahun 1984	: Ekonomi & Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 – Sekarang	: Komisaris Perseroan
Tahun 2007 – Sekarang	: Guru Besar FE UNPAD
Tahun 2018 – 2019	: Plt. Komisaris Utama Perseroan
Tahun 2017 – 2018	: Komisaris Perseroan
Tahun 2012 – 2017	: Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK
Tahun 2010 - 2012	: Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI
Tahun 2009 - 2010	: Plt. Auditor Utama Keuangan Negara VII
Tahun 2008 – 2010	: Staff Ahli bidang BUMN/BUMD BPK RI
Tahun 2007 – 2008	: Tenaga Ahli badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2006 – 2009	: Komisaris PT Tuban Petro Industry
Tahun 2005 – 2006	: Staf Khusus Menteri Keuangan RI
Tahun 2002 – 2009	: Sekretaris Bidang Akademik Magister Akuntansi UNPAD
Tahun 2002 – 2007	: Anggota Komite Audit PT Bio Farma
Tahun 2001 – 2005	: Kepala Satuan Pengawas Intern UNPAD
Tahun 2001 – 2004	: Sekretaris Program Doktor bidang Ekonomi Pascasarjana UNPAD dan Staf Ahli Pembantu Rektor I UNPAD
Tahun 1996 – 2005	: Managing Partner Kantor Akuntan Publik Ilya Avianti & Rekan
Tahun 1985 – Sekarang	: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNPAD

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Rida Mulyana
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 untuk masa jabatan sampai 28 Februari 2024

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1992 : Univ of London Jurusan Petroleum Engineering Inggris S2
 Tahun 1988 : Institut Teknologi Bandung jurusan Perminyakan Bandung S1
 Tahun 1988 : SLTA IPA Sumedang
 Tahun 1988 : SLTP Sumedang
 Tahun 1988 : SD Sumedang

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 - Sekarang : Komisaris Perseroan
 Tahun 2019 - Sekarang : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Tahun 2013 - 2019 : Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,
 Tahun 2010 - 2013 : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 Tahun 2009 - 2010 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"
 Tahun 2009 - 2009 : Sekretaris Direktorat Jenderal Migas – Sekretariat Ditjen Migas
 Tahun 2008 - 2009 : Kabid Program, Puslitbangtek Migas "Lemigas"
 Tahun 2002 - 2008 : Kabag Tata Usaha Puslitbangtek Migas "Lemigas"
 Tahun 2001 - 2002 : Perekayasa Muda Puslitbangtek "Lemigas"
 Tahun 2001 - 2002 : Kasi Cadangan dan Pengurusan PPPTMGB "Lemigas"

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Mohamad Ikhsan
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1999 : Phd in Economic University of Illinois at Urbana Champaign Illinois, USA
 Tahun 1991 : MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville Tenn USA
 Tahun 1988 : Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia
 Tahun 1983 : SMA Negeri 3 IPA - Bandung
 Tahun 1980 : SMP Negeri 1 – Banda Aceh
 Tahun 1976 : SD Negeri 16 – Banda Aceh

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 - Sekarang : Komisaris Perseroan
 Tahun 2019 - Sekarang : Member of Advisory Board Mandiri Institute
 Tahun 2019 - Sekarang : Staf Khusus Meneg BUMN
 Tahun 2015 - Sekarang : Member of Policy Advisory, Asian Development Bank Intitute Tokyo Jepang



Tahun 2010 - Sekarang	: Guru Besar FEB UI
Tahun 2007 - Sekarang	: Anggota Masyarakat Ekonomi Statistik BPS Bappenas
Tahun 2018 – 2019	: Head of Advisory Panel Asean Plus 3 Macroeconomic Research Office Singapore
Tahun 2017 – 2019	: Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian
Tahun 2015 – 2019	: Komisaris PT PGN Tbk
Tahun 2015 – 2019	: Member of Policy Advisory AMRO Singapore
Tahun 2014 – 2019	: Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI
Tahun 2014 – 2017	: Ketua Tim Asistensi Menko Perekonomian
Tahun 2011 – 2017	: Komisaris PT JICT
Tahun 2009 – 2014	: Board of Trustee International Food Policy Research Institute
Tahun 2009 – 2014	: Staf Khusus Wakil Presiden RI
Tahun 2008 – 2015	: Komisaris Independen PT Danaraksa
Tahun 2006 – 2015	: Komisaris Independen PT Bakrie Brothers
Tahun 2006 – 2009	: Anggota Riset Nasional Kemenristek
Tahun 2004 – 2009	: Staf Khusus Menko Perekonomian
Tahun 2003 – 2004	: Komisaris Independen PT Indosat
Tahun 2001 – 2005	: Kepala LPEM FE UI
Tahun 2001 – 2003	: Komisaris Perseroan
Tahun 2000 – 2005	: Wakil Ketua Pokja Ekonomi Lemhanas
Tahun 1999 – 2007	: Anggota Dewan Maritim RI
Tahun 1999 – 2005	: Anggota LP3E Kadin Indonesia
Tahun 1999 – 2001	: Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Dudy Purwagandhi
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1995	: Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta
Tahun 1989	: SMA Negeri 2 Padang, Sumatera Barat
Tahun 1986	: SMP Negeri 1 Kuningan, Jakarta Barat
Tahun 1983	: SD Negeri 2 Dawuan Situbondo, Jawa Timur

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2020 – Sekarang	: Komisaris Perseroan
Tahun 2011 – 2020	: Direktur Seacon Trading Limited, Singapore.
Tahun 2019	: Deputy Treasurer II of Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja
Tahun 2018 – 2019	: Special Staff Kementerian PANRB
Tahun 2015 - 2019	: Komisaris PT Satui Terminal Utama
Tahun 2009 - 2011	: Direktur PT Dua Samudera Perkasa
Tahun 2008 – 2009	: Direktur PT Jhonlin Marine Trans
Tahun 2008 – 2009	: Direktur PT Jhonlin Air Transport
Tahun 2007 – 2008	: Internal Audit PT Dua Samudera Perkasa.
Tahun 2004 – 2007	: GA Dept. Head PT Tri Usaha Bhakti
Tahun 1997 – 2004	: Asisten Staff Direksi PT Tri Usaha Bhakti Truba (Holding)



Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Deden Juhara
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 untuk masa jabatan sampai 28 Februari 2024

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2010	: Sespati
Tahun 2000	: Sespim
Tahun 1992	: PTIK
Tahun 1985	: Akademi Kepolisian/AKPOL
Tahun 1980	: SMAN 1 Cimahi, Bandung
Tahun 1977	: SMPN 1 Padalarang, Bandung
Tahun 1974	: SD Negeri 3 Tagog, Padalarang, Bandung

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2018	: Asisten Operasi Kapolri
Tahun 2017	: Kapolda Maluku
Tahun 2013	: Widyaiswara Utama Sespim Polri
Tahun 2011	: Karo Binkar SDM Polri
Tahun 2011	: Kalemkonpropol Binkermadianmas STIK Lemdikpol
Tahun 2010	: Analis Kebijakan Madya SSDM Polri
Tahun 2010	: Pamen SDE SDM Polri
Tahun 2009	: Karo Pers Polda Jabar
Tahun 2008	: Karo Pers Polda Aceh
Tahun 2005	: Karo Pers Polda Banten
Tahun 2003	: Kasubag SIsbinkar Rojianstra SDM Polri
Tahun 2003	: Kapolres Kediri Polda Jatim
Tahun 2001	: Kapolres Bojonegoro Polda Jatim
Tahun 2000	: Kabag Sere Umum Ditserse Polda Maluku
Tahun 1999	: Pamen Polda Bali
Tahun 1997	: Wakapolres Buleleng Polda Bali dan Kabag Dalkar Ditpres Polda Bali
Tahun 1996	: Wakapolres Buleleng Polda Nusra
Tahun 1994	: Kapolsek Kuta Polres Badung Polda Nusra
Tahun 1993	: Kapolsek KP3 Ngurah Rai Polda Nusra
Tahun 1989	: Kasat Serse Polres Jayapura
Tahun 1987	: Kapolsek Jayapura Utara Polda Irian Jaya
Tahun 1986	: Pamapta II Polres Jayapura Polda Irian Jaya

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Zulkifli Zaini
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024.

III. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1992 - 1994 : S2 Finance & International Business, Washington University
Tahun 1975 - 1980 : S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (ITB)

IV. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 – Sekarang : Direktur Utama Perseroan
Tahun 2013 - Sekarang : Anggota Badan Pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Tahun 2017 – 2019 : Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk.
Tahun 2016 – 2017 : Komisaris Independen di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Tahun 2015 – 2016 : Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Tahun 2013 - 2019 : Komisaris Independen PT Triputra Agro Persada
Tahun 2013 – 2015 : Komisaris Perseroan
Tahun 2011 – 2019 : Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Tahun 2010 – 2013 : Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tahun 2003 – 2010 : Direktur Distribution Network, Direktur Commercial & Business Banking dan Direktur Technology & Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Darmawan Prasodjo
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2009 - 2012 : Postdoctoral, Natural Resources dan Energy Policy, Duke University
Tahun 2004 - 2011 : PhD, Applied Economics, Natural Resources Economics, Texas A&M University
Tahun 1998 - 1999 : MCS, Computer Science, Texas A&M University
Tahun 1990 – 1994 : B.S Computer Science, Texas A&M University
Tahun 1986 – 1989 : SMA Negeri 1 Magelang
Tahun 1983 – 1886 : SMP Negeri 2 Magelang
Tahun 1977 – 1983 : SD Panca Arga Magelang

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 - Sekarang : Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero)
Tahun 2018 – 2019 : Komisaris PT PLN (Persero)
Tahun 2015 – 2019 : Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas – Kantor Staf Presiden



Tahun 2014 - 2019	: Lead Consultant dalam perancangan Rencana Strategis (Renstra) SKK Migas sebagai strategi pengelolaan migas
Tahun 2013 – 2015	: Presiden Komisaris, -Ametis Energi Nusantara- Power to the People
Tahun 2013 – 2014	: Chief Economist - Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I)
Tahun 2013 – 2013	: Convener untuk bidang akademis dan Think fonk untuk post -2015 - Gugus Tugas Khusus Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Tahun 2012 – 2013	: Direktur, Indonesia Center fo Green Economy, Surya University
Tahun 2012 - 2013	: Kepala Departemen, Departemen Green Economy, Surya University
Tahun 2011 – 2012	: Research Economist - Nicholas Institut for Environmental Policy Solution, Duke University
Tahun 2011 - Sekarang	: Chief Editor, Energy Economist and Founder - petronomist.com
Tahun 2009 – 2011	: GIS/GAMS Associate in Research - Nicholas Institut for Environmental Policy Solution, Duke University
Tahun 2008 – 2009	: Graduate Research Assistant - Hazard Reduction & Recovery Center, College of Architecture - Texas A& M University
Tahun 2004 – 2007	: Graduate Research Assistant - Department of Agricultural Economics, Texas A&M University
Tahun 2001 – 2002	: Software Development Consultant - Westcar Consulting Group (www.westcar.com)
Tahun 1995 – 1997	: Peneliti- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi {BPPT)

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Sinthya Roesly
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2003 - 2004	: S2 Manajemen, IPMI International Business School
Tahun 2002 - 2003	: S2 Manajemen Bisnis Internasional, Monash University
Tahun 1995 - 1996	: S2 Kelistrikan, University of New South Wales
Tahun 1988 - 1993	: S1 Listrik, Universitas Indonesia
Tahun 1989 – 1993	: D3 Sastra Inggris, Universitas Indonesia
Tahun 1986 - 1988	: SMAN 1 Jakarta
Tahun 1983 - 1985	: SMPN Dumai
Tahun 1977 - 1982	: SDN 007 Pekanbaru

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 – Sekarang	: Direktur Keuangan Perseroan
Tahun 2017 - 2019	: Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank



Tahun 2009 - 2017	: Direktur Utama pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Tahun 2008 - 2009	: Deputi Direktur Perencanaan Strategis Korporat pada Direktorat Perencanaan dan Teknologi Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2006 – 2008	: Manajer Perencanaan Korporat pada Divisi Keuangan Direktorat Keuangan Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2004 – 2006	: Manager Analisis dan Evaluasi Operasi Sistem pada Unit Bidding dan Operasi Sistem Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2001 – 2004	: Ahli Madya Pengembangan Mekanisme Niaga & Operasi pada Unit Bidding dan Operasi Sistem Perseroan UBS P3B
Tahun 2000 – 2001	: Ahli Madya III Mekanisme Transaksi pada Divisi Keuangan & Niaga Perseroan P3B
Tahun 1997 – 2000	: Ahli Muda I Ekonomi Kelistrikan pada Perseroan P3B
Tahun 1996 - 1997	: Ahli Muda II Ekonomi Kelistrikan pada Perseroan P3B
Tahun 1995 – 1996	: Ahli Muda II Mekanisme Transaksi Divisi Keuangan & Niaga pada Perseroan P3B
Tahun 1994 – 1995	: Pegawai Job Training pada Perseroan P2B
Tahun 1993 – 1994	: Job Training pada PLTGU Tanjung Priok pada PLN PIKITTERM JABAR JAYA

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Syofvi Felienty Roekman
Direktur Human Capital dan Management

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Diangkat sebagai Direktur Human Capital dan Management berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 24 Juli 2022.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2003 - 2004	: S2 Bidang Kelistrikan, Staffordshire University, England
Tahun 1988 - 1994	: S1 Listrik, Universitas Indonesia
Tahun 1986 - 1988	: SMAN 8, Jakarta
Tahun 1983 - 1985	: SMPN 3, Pontianak
Tahun 1977 - 1982	: SD Muhammadiyah 2, Pontianak

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2020 – Sekarang	: Direktur Human Capital dan Management Perseroan
Tahun 2017 - 2020	: Direktur Perencanaan Korporat Perseroan
Tahun 2016 - 2017	: General Manager Perseroan Distribusi Banten
Tahun 2015 - 2015	: Kepala Divisi Perencanaan Korporat pada Direktorat Perencanaan Korporat Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2013 - 2015	: Kepala Divisi Perencanaan Strategis Korporat pada Direktorat Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2010 - 2013	: Tugas Karya ke PT UNINDO (JV Perseroan dan ALSTOM) sebagai Vice President Director



Tahun 2010 - 2010	: Manajer Senior Kinerja Transmisi pada Divisi Transmisi Jawa Bali, Direktorat Operasi Jawa Bali, Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2009 - 2010	: Deputi Manajer Enjiniring Proteksi, Scada dan Telekomunikasi pada Bidang Teknik Penyaluran Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2008 - 2009	: Deputi Manajer Enjiniring Proteksi, Kontrol dan Scadatel pada Bidang Sistem Transmisi Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2008 - 2008	: Senior Engineer II Pengembangan Proteksi Jaringan pada Sub Bidang Enjiniring Proteksi, Kontrol Dan Scadatel Bidang Sistem Transmisi Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2007 - 2007	: Ahli Madya Pengembangan Proteksi Jaringan pada Sub Bidang Enjiniring Proteksi, Kontrol dan Scadatel Bidang Sistem Transmisi Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2005 - 2007	: Ahli Madya Enjiniring Proteksi pada Sub Bidang Enjiniring Proteksi / Scada Bidang Teknik Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2003 - 2005	: Ahli Madya Proteksi pada Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2003 - 2003	: Ahli Muda Listrik & Sipil pada Perseroan Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali
Tahun 2001 - 2002	: Ahli Muda Listrik & Sipil Pada Perseroan UBS P3B
Tahun 2000 - 2001	: Ahli Madya III Pengembangan Sistem Proteksi pada Perseroan P3B
Tahun 1997 - 2000	: Ahli Muda I Analisa Sistem Proteksi pada Perseroan P3B
Tahun 1996 - 1997	: Ahli Muda II Analisa Sistem Proteksi Pada Perseroan P3B
Tahun 1995 - 1996	: Ahli Muda II Perencanaan Rele. Meter dan Telekomunikasi pada Perseroan Pembangkitan & Penyaluran Jawa Bagian Barat
Tahun 1994 - 1995	: Ahli Madya II Perencanaan Jaringan pada Perseroan Pembangkitan & Penyaluran Jawa Bagian Barat

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Muhammad Ikbal Nur
Direktur Perencanaan Korporat

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perencanaan Korporat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 24 Mei 2025.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2006 – 2007 : S2 Master Engineering Mangement, University Curtin Technology Western Australia
Tahun 1996 - 1996 : Diploma Major Energy Planning and Policy, University Technology Sydney Australia
Tahun 1985 - 1991 : S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia
Tahun 1982 - 1985 : SMAN IV Jakarta

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2020 – Sekarang : Direktur Perencanaan Korporat Perseroan
Tahun 2016 – 2020 : Direktur Keuangan PT Geo Dipa Energi
Tahun 2015 – 2016 : Kepala Divisi Perencanaan Direktorat Perencanaan Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2014 – 2015 : Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Direktorat Perencanaan Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2011 – 2013 : Kepala Divisi Perencanaan Keuangan Direktorat Keuangan Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2007 – 2011 : Senior Manager Perencanaan Keuangan Korporat Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2000 – 2007 : Senior Engineer Perencanaan Pembangkitan di Perseroan Kantor Pusat
Tahun 1993 – 2000 : Junior Engineer Perencanaan System Kelistrikan Divisi Perencanaan Perseroan Kantor Pusat

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Bob Sari
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Diangkat sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 14 Mei 2025.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2000 – 2002 : S2 Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia
Tahun 1989 - 1993 : S1 Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2020 – Sekarang : Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Perseroan
Tahun 2019 – 2020 : General Manager Perseroan UID Jawa Timur
Tahun 2017 – 2019 : General Manager Perseroan UIW Sulawesi Selatan, Tenggara & Barat
Tahun 2015 – 2017 : General Manager Perseroan UIW Aceh

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Rudy Hendra Prastowo
Direktur Energy Primer

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai Direktur Energy Primer berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 14 Mei 2025.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2004 – 2006 : S2 Management Bisnis Administration , Universiti Tenaga Nasional, Malaysia
 Tahun 2002 - 2004 : S2 Manajemen Bisnis Engineering, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
 Tahun 1983 – 1992 : S1 Listrik, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
 Tahun 1983 – 1982 : S1 Mesin, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
 Tahun 1980 – 1983 : SMA jurusan IPA, SMAN III Bandung
 Tahun 1976 – 1980 : SMP Yaspendar II
 Tahun 1970 – 1976 : SD II Yayasan Pendidikan Harapan

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2020 – Sekarang : Direktur Energy Primer Perseroan
 Tahun 2018 – 2020 : Direktur Utama PT PLN Batubara
 Tahun 2018 – 2018 : Principal Engineer Perencanaan (Tugas Karya ke PT PLN Batubara) Perseroan Kantor Pusat
 Tahun 2017 – 2018 : Kepala Divisi Operasi Regional Kalimantan pada Direktorat Bisnis Regional Kalimantan Perseroan Kantor Pusat
 Tahun 2016 - 2017 : General Manager Perseroan Pusat Sertifikasi

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Muhammad Ikhsan Asaad
Direktur Mega Project

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Diangkat sebagai Direktur Mega Project berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 14 Mei 2025.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2000 – 2002 : S2 Marketing Management, Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta, Indonesia
 Tahun 1985 - 1990 : S1 Teknik Elektro, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
 Tahun 1982 – 1985 : SMA Jurusan Fisika, SMAN Malili
 Tahun 1979 – 1982 : SMPN Malili
 Tahun 1973 – 1979 : SDN No. 203 Malili

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2020 – Sekarang : Direktur Mega Project Perseroan
 Tahun 2017 – 2020 : General Manager Perseroan UID Jakarta Raya
 Tahun 2015 – 2017 : Kepala Divisi Pengembangan Perseroan Regional Sumatera
 Tahun 2013 – 2015 : General Manager Perseroan Wilayah Maluku & Maluku Utara
 Tahun 2010 – 2013 : Manager Operasi Sistem Perseroan P3B Sumatera
 Tahun 2009 – 2010 : Manager Perseroan Area Pengatur Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
 Tahun 2008 – 2009 : Manager Perseroan Area Pengatur Distribusi Jawa



Tahun 2004 – 2008	: Barat : Manager Perseroan Area Penyaluran & Pengatur Beban Sulawesi Selatan
Tahun 2003 – 2004	: Manager Perseroan Area Pengatur Distribusi Makassar

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Wiluyo Kusdwiarto
Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 24 Juli 2022.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2003 - 2005	: S2 Bidang Manajemen Bisnis, Universitas Tenaga Nasional
Tahun 1989 - 1994	: S1 Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Tahun 1986 - 1989	: SMAN 6, Surabaya
Tahun 1983 - 1986	: SMP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP
Tahun 1977 - 1983	: SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2020 – Sekarang	: Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan Perseroan
Tahun 2017 - 2020	: Direktur Bisnis Regional Sumatera Pada Perseroan
Tahun 2015 - 2017	: Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera Pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2013 - 2015	: General Manager Perseroan Unit Induk Pembangunan VIII
Tahun 2012 - 2013	: General Manager Perseroan Pembangkitan Lontar
Tahun 2011 - 2012	: Manajer Bidang Enjiniring (PLT. General Manager) Perseroan Pembangkitan Lontar
Tahun 2011 - 2011	: Manajer Bidang Enjiniring pada Bidang Enjiniring Perseroan Pembangkitan Lontar
Tahun 2010 - 2011	: Manajer Enjiniring pada Bidang Enjiniring Perseroan Pembangkitan Indramayu
Tahun 2009 - 2010	: Manajer PLTU Paiton Baru Pada Perseroan Pembangkitan Indramayu
Tahun 2008 - 2009	: Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua
Tahun 2007 - 2007	: Manajer Prokitring Sulawesi Bagian Selatan dan Papua Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua
Tahun 2006 - 2007	: Deputi Manajer Administrasi Teknik pada Bagian Administrasi Teknik Bidang Operasi Kantor Induk Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung



Tahun 2006 - 2006	: Kepala Bagian Administrasi Teknik pada Bagian Administrasi Teknik Staf Operasi Kantor Induk Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung
Tahun 2005 - 2006	: Ahli Muda Perencanaan Mesin dan Listrik pada Bagian Perencanaan Mesin dan Listrik Staf Perencanaan Kantor Induk Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung
Tahun 2004 - 2005	: Ahli Muda Perencanaan Elektro Mekanik pada Bagian Perencanaan Elektro Mekanik Staf Perencanaan Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung
Tahun 2004 - 2004	: Kepala Seksi Pengendalian Kontrak pada Bagian Pengendalian Kontrak Proyek PLTA Musi Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung
Tahun 2002 - 2004	: Ahli Muda Pengendalian pada Bagian Pengendalian Staf Operasi Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung
Tahun 1999 - 2002	: Kepala Seksi Pengendalian Kontrak pada Bagian Pengendalian Kontrak Proyek PLTA Musi Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung
Tahun 1997 - 1999	: Pegawai tetap Perseroan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Bagian Selatan
Tahun 1995 - 1997	: Pegawai / Staf

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Syamsul Huda

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 24 Juli 2022.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2004 - 2006	: S2 Bisnis dan Manajemen, ITB
Tahun 1987 - 1993	: S1 Elektro, ITS
Tahun 1984 - 1987	: SMAN 2 Kediri
Tahun 1981 - 1984	: SMPN Prambon, Nganjuk
Tahun 1975 - 1981	: SDN Kelutan I Ngronggot, Nganjuk

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 – 2020	: Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
Tahun 2019 – 2019	: Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan pada Perseroan



Tahun 2019 – 2019	: Direktur Bisnis Regional Sulawesi merangkap PLT Direktur Bisnis Regional Kalimantan pada Perseroan
Tahun 2017 - 2019	: Direktur Bisnis Regional Sulawesi pada Perseroan
Tahun 2015 - 2017	: General Manager Perseroan Distribusi Jakarta Raya
Tahun 2014 - 2015	: General Manager Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2014 - 2014	: Senior Specialist I Kinerja (PLT General Manager) Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2012 - 2014	: Manajer Senior Strategi Pemasaran pada Divisi Niaga Direktorat Bisnis & Manajemen Risiko Perseroan Kantor Pusat
Tahun 2010 - 2011	: Manajer Bidang Niaga pada Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2009 - 2010	: Manajer Bidang Niaga pada Perseroan Wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo
Tahun 2008 - 2008	: Manajer Area Pelayanan dan Jaringan Pasuruan pada Perseroan Distribusi Jawa Timur
Tahun 2008 - 2008	: Senior Officer II Administrasi Perusahaan pada Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2006 - 2007	: Ahli Madya Administrasi Korporat pada Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2004 - 2006	: Ahli Madya Distribusi pada Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2004 - 2004	: Manajer Area Jaringan Bali Selatan pada Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2003 - 2004	: Manajer Area Jaringan Bali Utara pada Perseroan Distribusi Bali
Tahun 2001 - 2003	: Manajer Unit Pelayanan Jaringan Bali Barat pada Perseroan Unit Bisnis Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Tahun 2001 - 2001	: Manajer Unit Pengelolaan Jaringan Bali Barat pada Perseroan Unit Bisnis Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Tahun 2001 - 2001	: Kepala Cabang Singaraja pada Perseroan Wilayah XI
Tahun 1998 - 2001	: Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan Cabang Purwokerto pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
Tahun 1996 - 1998	: Kepala Ranting Bantul pada Perseroan Distribusi Jawa Tengah
Tahun 1995 - 1996	: Ahli Muda II Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Distribusi pada Bagian Teknik Distribusi Bidang Pengusahaan Perseroan Distribusi Jawa Tengah
Tahun 1993 - 1995	: Calon Pegawai pada Perseroan Distribusi Jawa Tengah

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Haryanto Wignyo Suparto
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, & Bali

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura & Bali berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk masa jabatan sampai dengan 30 Oktober 2020.

I. DATA PENDIDIKAN

Tahun 1978 - 1983 : Institut Teknologi Bandung, S1 Listrik (Ir.)
 Tahun 2001 - 2003 : STIE IPWJA, Magister Manajemen

II. DATA PEKERJAAN

Tahun 2019 - Sekarang : Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali Perseroan
 Tahun 2017 - 2019 : Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Perseroan
 Tahun 2015 - 2017 : Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Perseroan
 Tahun 2014 - 2015 : General Manager Perseroan Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
 Tahun 2011 - 2014 : General Manager Perseroan Distribusi Jawa Timur
 Tahun 2010 - 2011 : Kepala Divisi Distribusi Jawa Bali Perseroan
 Tahun 2010 - 2010 : General Manager Perseroan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
 Tahun 2008 - 2009 : General Manager Perseroan Wilayah Kalimantan Barat

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

- Tidak ada Kepentingan lain yang bersifat material di luar Kapasitas untuk seluruh anggota Direksi terkait dengan Penawaran Umum Obligasi atau Pencatatan di Bursa efek Indonesia.
- Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Direksi demi kepentingan Perseroan
- Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG)

Tata Kelola Perusahaan/Good Governance (GCG) merupakan mekanisme atau prinsip-prinsip yang mengatur dan mendasari hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam suatu sistem pnegendalian perusahaan yang dapat diterima dan berdasarkan peraturan yang berlaku guna menciptakan nilai dan tujuan Perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan bertekad terus menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yakni tumbuh berkelanjutan dan memberi benefit optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dilandasi oleh keyakinan seluruh elemen perusahaan dari Top Manajemen hingga pelaksana, bahwa penerapan *best practices* GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG Yang Baik

PERSEROAN senantiasa memastikan bahwa seluruh prinsip-prinsip dasar GCG, yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilita, Independensi, Kesetaraan (*Fairness*) diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua tingkat/ struktur operasional perusahaan. Implementasi kelima prinsip dasar GCG dalam kegiatan operasional perusahaan dijelaskan dalam uraian berikut ini.



Transparansi

Implementasi asas transparansi tercermin dalam berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan dikelola secara profesional, sehingga para investor, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan secara merata.

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU PT serta UU KIP, Perseroan berkewajiban mengungkapkan informasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan menyediakan informasi terkait dengan Keterbukaan Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan fokus peningkatan fungsi dan peran setiap organ perusahaan dan manajemen, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas operasional. Perusahaan menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan regulator di pasar modal.

Responsibilitas

Responsibilitas atau asas pertanggungjawaban diterapkan melalui ketaatan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kaidah pengelolaan sesuai standar-standar korporasi yang berlaku universal serta melaksanakan tanggung jawab sosial

Independensi

Kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip kemandirian diterapkan melalui penyusunan dan penerapan *code of conduct* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta menerapkan kebijakan larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan antara para Direktur dengan Dewan Komisaris.

Kesetaraan (*Fairness*)

Asas kesetaraan diterapkan dengan memperlakukan seluruh stakeholder secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan. Perseroan juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan. Kesetaraan diterapkan dalam proses pengelolaan sumber daya manusia dan pemilihan vendor barang maupun jasa.

Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan secara berkesinambungan melakukan penilaian atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sejak tahun 2002 dalam rangka mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG. Pada setiap periode penilaian menghasilkan rekomendasi yang Perusahaan gunakan untuk memperbaiki kualitas penerapan GCG secara menyeluruh di setiap unsur perusahaan

Perusahaan senantiasa berupaya melakukan perbaikan beberapa kebijakan, mekanisme kerja maupun memperbaiki infrastruktur tata kelola baru sesuai rekomendasi hasil *assessment* GCG pada periode sebelumnya.

Kriteria Yang Digunakan Dalam Penilaian

Penilaian penerapan GCG di Perseroan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Proses penilaian GCG menggunakan standar alat uji yang diatur di dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.



Aspek GCG yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dengan 153 parameter. Metode penilaian terdiri dari kegiatan revidi dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi. Penilaian mencakup tingkat kesesuaian penerapan GCG berdasarkan pemenuhan parameter/*scorecard* pada 6 aspek, yaitu:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi;
6. Aspek lainnya.

Skor Penilaian Masing-Masing Kriteria

Perusahaan melakukan *assessment* GCG untuk menilai implementasi penerapan GCG untuk periode tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai *assessor* independen. Hasil *assessment* terhadap penerapan GCG di Perseroan untuk periode tahun 2019 mencapai total skor sebesar 88,10. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Perseroan untuk periode tahun 2019 mencapai kualifikasi “**Sangat Baik**”

Penilaian GCG oleh Lembaga Penilai Lainnya

Selain melaksanakan self-assessment berdasarkan PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012, PLN juga mengikuti penilaian penerapan GCG berdasarkan kriteria Corporate Governance Perception Index (CGPI). Penilaian dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Hasil penilaian CGPI tahun 2019, PLN meraih predikat Perusahaan “TERPERCAYA” dengan skor 84,85. Pencapaian ini lebih tinggi dari skor tahun 2018 sebesar 84,52. Pada tahun 2019, CGPI mengusung tema “Penguatan Platform Bisnis dengan Kerangka GCG”.

1.1 Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penasehatan tersebut, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dimaksud, selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengadakan 20 kali Rapat Dewan Komisaris.

Nama	Rapat Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Amien Sunaryadi*	20	0	0,00%
Suahasil Nazara*	20	0	0,00%
Murtaqi Syamsuddin*	20	0	0,00%
Mohamad Ikhsan *	20	0	0,00%
Dudy Purwagandhi*	20	0	0,00%
Rida Mulyana**	20	11	55,00%
Deden Juhara**	20	14	70,00%
Ilya Avianti	20	20	100,00%
Darmono***	20	18	90,00%
Oegroseno***	20	5	25,00%
Andy Noorsaman Someng***	20	4	20,00%
Budiman***	20	19	95,00%
Aloysius Kiik Ro***	20	14	70,00%
Rionald Silaba***	20	10	50,00%
Darmawan Prasodjo***	20	13	65,00%
Sumiyati***	20	0	10,00%

* Diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019

** Diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.

*** Pemberhentian dari jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-221/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019; No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019; No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020; No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019; No. SK-189/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019; dan No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019.



Perseroan berpendapat bahwa seluruh komite tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik, efisien dan efektif. Namun demikian, dengan kondisi terkini, dimana Perseroan tengah merealisasikan program pembangunan ketenagalistrikan yang harus dituntaskan di tengah fluktuatifnya kondisi perekonomian global yang berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian Nasional, dan tentunya terhadap realisasi permintaan tenaga listrik dimasa mendatang, yang menunjukkan akan semakin beratnya tugas yang harus dijalankan dan tantangan yang dihadapi, Dewan Komisaris mengamanatkan peningkatan kompetensi dan kualitas dukungan dari seluruh unsur Komite Komisaris. Oleh karenanya Perseroan mengamanatkan anggota Komite Komisaris, selain Anggota Komisaris, untuk mengikuti program pelatihan kompetensi yang tersedia, sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris mengacu pada UUPT, Anggaran Dasar, dan Board Manual, antara lain adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
5. Mengambil alih tugas dan tanggung jawab operasional selayaknya Direksi pada kondisi Perusahaan tidak memiliki satu pun Direktur;
6. Mewakili Perusahaan dalam hal seluruh Direksi memiliki benturan kepentingan;
7. Melakukan proses penunjukan auditor eksternal Perusahaan untuk ditetapkan oleh RUPS

Uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas fungsi pengawasan dan penasihat dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat atas pengendalian internal Perusahaan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat di dalam Perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka tugas pengawasan dalam 1 (satu) tahun terakhir.

7. Pengawasan atas Efektivitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi terdiri atas:
 - a. Pengawasan atas efektivitas pengelolaan organisasi dan SDM Pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektivitas organisasi dan tata kerja, antara lain: efektivitas implementasi struktur organisasi dan pengelolaan jabatan strategis serta manajemen SDM. Pengawasan dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat/ persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi terkait struktur organisasi, pengisian jabatan satu tingkat di bawah Direksi, Direksi anak perusahaan, dan Kepala SPI.
 - b. Pengawasan atas usulan RKAP Tahun 2019 yang diajukan oleh Direksi
 - Memastikan bahwa rencana kerja yang tertuang dalam RKAP telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan serta penugasan dari pemerintah;
 - Sasaran yang ditetapkan dalam usulan RKAP dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
 - c. Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP dan KPI 2019 Pengawasan atas pelaksanaan RKAP dan KPI Tahun 2019 dilakukan melalui penelaahan dan pembahasan laporan pelaksanaan RKAP, hambatan dalam pelaksanaan RKAP serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelaahan dan pembahasan dilakukan berdasarkan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan serta Laporan Pencapaian



- Key Performance Indicators (KPI). Selain itu juga dilakukan pembahasan tersendiri untuk permasalahan tertentu. d. Pengawasan atas pengelolaan risiko
- Melakukan telaahan atas analisis risiko yang dilakukan Direksi terutama yang terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi tertentu (aksi korporasi) dengan mengkaji apakah analisis risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan;
 - Melakukan telaahan atas risiko dengan level tinggi dan ekstrem serta mengingatkan proses monitoring terhadap mitigasi yang dilakukan serta memberikan saran-asaran atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi.
8. Pengawasan atas keandalan informasi/ pelaporan keuangan Pengawasan atas keandalan sistem informasi dilakukan dengan menelaah, membahas dan memberikan nasihat atas:
 - a. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan sistem informasi yang telah berjalan serta memastikan bahwa program pengembangan teknologi informasi berjalan sesuai rencana;
 - b. Temuan audit oleh KAP atas Laporan Keuangan Perusahaan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan tersebut.
 9. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP melalui Laporan Manajemen dan realisasi Key Performance Indicators (KPI) Korporat Melakukan penelaahan atas Laporan Manajemen dan Realisasi KPI triwulanan dan tahunan guna memastikan akurasi dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Manajemen tersebut. Selain itu juga dilakukan pengawasan atas pelaksanaan audit PT PLN (Persero) Tahun 2019 oleh KAP yang meliputi: Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Keuangan PKBL Perusahaan, kinerja dan kepatuhan Perusahaan, dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja.
 10. Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - a. Pengawasan atas efektivitas audit internal
 - Pengawasan dilakukan dengan pertemuan secara regular dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
 - Penelaahan laporan hasil audit internal untuk ditindaklanjuti oleh manajemen.
 - Penelaahan atas pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Audit Tahunan (PKPT) SPI.
 - b. Pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal Pengawasan dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan audit oleh KAP dan BPK telah ditindak lanjuti oleh Direksi.
 - c. Pengawasan atas penerapan unsur GCG Pengawasan atas penerapan unsur GCG (misalnya: transaksi tidak terdapat benturan kepentingan, obyektivitas transaksi, prinsip kehati-hatian) dilakukan dengan memastikan bahwa semua usulan yang diajukan Direksi kepada Dewan Komisaris yang meminta persetujuan maupun rekomendasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 11. Pengawasan atas pengelolaan PKBL Pembahasan dan penelaahan dilakukan atas langkah-langkah yang telah dilakukan Perusahaan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PKBL.
 12. Nasihat dan teguran Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan peringatan kepada Direksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang dilakukan serta dari penyampaian surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
 13. Kinerja Direksi Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat atas Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang juga mencantumkan realisasi KPI Triwulanan dan Tahunan.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunersai Dewan Komisaris Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 62.420 juta dan Rp 54.267 juta. Prosedur penetapan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya yang terakhir Nomor: 01/MBU/05/2019, Tunjangan dan fasilitas lain disesuaikan dengan berpedoman pada Permen BUMN Nomor Per-04/MBU/2014 beserta perubahannya. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran remunerasi Dewan Komisaris adalah: honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar



90% dari honorarium Komisaris Utama. Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan Dewan Komisaris berakhir.

1.2 Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan Perseroan, Direksi wajib berpegang pada ketentuan anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*). Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal. Ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

(k) Direktur Utama

- memastikan bahwa arah pengelolaan Perseroan berjalan dengan benar menuju terwujudnya visi, misi dan tujuan Perseroan;
- memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola yang baik;
- memastikan bahwa Perseroan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*; dan
- melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota Perseroan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perseroan melangkah mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan.

(l) Wakil Direktur Utama

Tanggung jawab Wakil Direktur Utama adalah memimpin dan membina Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) meliputi fungsi perencanaan dan pengembangan listrik perdesaan, serta memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

- Menetapkan dan memastikan adanya perencanaan dan kebijakan yang efektif, efisien, tepat sasaran yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
- Menetapkan dan memastikan tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan dan kebijakan yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengendalian dan pengawasan yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan.

(ii) Direktur Keuangan

- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam penyediaan dan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan, pengelolaan pinjaman dan pemenuhan terhadap kewajiban serta *covenant* Perseroan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;



- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perbendaharaan (*treasury*), kepemilikan saham, pengelolaan kas dan likuiditas, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan aset liabilitas, pengelolaan piutang, pengelolaan akuntansi, serta pengelolaan pajak dan asuransi;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan niaga tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus, pengelolaan dan pelaksanaan PS) dan Performance Base Regulation (PBR).

(iii) Direktur Bisnis Regional

- menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional, termasuk di dalamnya perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan regional (*capital expenditure* dan *operation expenditure*) sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP, pemasaran tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan, serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Bisnis Regional.

(iv) Direktur Perencanaan Korporat

- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai visi melalui perencanaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, termasuk didalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perseroan dan merancang pendanaannya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan ("EBT");
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, standarisasi enjiniring dan tersedianya perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis termasuk di dalamnya hasil *feasibility study*, *engineering design*, rencana kerja dan spesifikasi untuk proses pengadaan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan model bisnis IPP, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan, serta pengembangan Entitas Anak dan *joint venture*;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Perencanaan Korporat, melakukan pembinaan dan pengembangan Entitas Anak dan *joint venture*, pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Perencanaan Korporat serta pembinaan Regional dan Unit Pusat Pengatur Beban.

(v) Direktur Niaga Dan Manajemen Pelanggan

Tanggung jawab Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Niaga dan Manajemen Pelanggan meliputi fungsi Bisnis dan Pelayanan Pelanggan dengan mengembangkan produk (diversifikasi bisnis/produk baru), pemasaran dan



penjualan, quality assurance produk dan layanan, tarif dan pelayanan publik serta mengelola manajemen pelanggan untuk memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

- Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan dalam pengembangan produk eksisting, produk baru atau diversifikasi bisnis;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan pemasaran, penjualan tenaga listrik dan manajemen pelanggan termasuk didalamnya melakukan pembinaan terhadap Regional dan Unit;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan monitoring dan analisa termasuk didalamnya evaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan pemasaran, penjualan dan manajemen pelanggan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan quality assurance termasuk didalamnya evaluasi pengelolaan mutu produk dan layanan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya penerapan Tarif Tenaga Listrik dan Public Service Obligation (PSO) sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Niaga dan Manajemen Pelanggan.

(vi) Direktur Mega Project

Tanggung jawab Direktur Mega Project adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Mega Project meliputi perencanaan pengadaan strategis, pengadaan strategis, supply chain management, project management office, energi baru dan terbarukan, serta mengelola dan membina fungsi manajemen proyek, enjiniring ketenagalistrikan, dan sertifikasi untuk memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi perencanaan dan pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa dan kontrak korporat;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan supply chain management dan pengelolaan sistem korporat;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan administrasi proyek, pengelolaan Project Management Information System (PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT);
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Mega Project serta pembinaan dan pengembangan Unit dibawah Direktorat Mega Project.

(vii) Direktur Energy Primer

Tanggung jawab Direktur Energy Primer adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Energy Primer meliputi pengadaan batu bara, pengadaan gas dan bahan bakar minyak, independent power producer, serta perizinan dan pertanahan, untuk memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

- Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan IPP dan Energi Primer untuk kebutuhan Korporat, terlaksananya pengadaan IPP dan energi primer strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan energi primer kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan IPP dan energi primer dan kontrak korporat;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi integrasi dalam pembangunan IPP dan transmisi swasta dengan sistem kelistrikan PLN;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan penyediaan batubara termasuk perencanaan pengadaan batubara, pengelolaan aplikasi dan logistik batubara untuk kebutuhan batubara jangka pendek dan panjang;



- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan penyediaan gas dan BBM termasuk perencanaan pengadaan gas dan BBM, pengelolaan aplikasi dan logistik gas dan BBM untuk kebutuhan korporat jangka pendek dan panjang;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan energi primer (batubara, gas dan BBM) secara online serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perijinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan Perusahaan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Energy Primer serta pembinaan dan pengembangan Unit dan Anak Perusahaan terkait pengelolaan fungsi pengadaan IPP dan energi primer.

(viii) Direktur Human Capital Dan Management

Tanggung jawab Direktur Human Capital dan Management adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Human Capital dan Management meliputi fungsi organization development, human capital management system, talent development, general affairs, health, safety, security and environment, corporate communication and corporate social responsibility, dan hukum korporat serta mengelola dan membina fungsi pendidikan dan pelatihan, untuk memastikan

Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan, dengan tugas pokok:

- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia meliputi antara lain poses bisnis, perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sistem knowledge management, pengembangan sistem Human Capital Management, sistem manajemen kinerja pegawai, sistem remunerasi dan pemberian penghargaan, sistem administrasi SDM, administrasi disiplin pegawai serta pengembangan sistem informasi SDM;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan hubungan industrial dan pengelolaan tenaga kerja alih daya;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pelayanan umum di Kantor Pusat;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam fungsi komunikasi korporat meliputi fungsi komunikasi Perusahaan, public relation, hubungan dengan media, hubungan komunikasi pihak internal dan eksternal, Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam fungsi hukum korporat;
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Human Capital dan Management, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Unit dibawah Direktorat Human Capital dan Management.

Sepanjang tahun 2019, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, Perseroan memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun lokakarya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Beberapa program sejenis yang sempat diikuti oleh anggota Direksi, antara lain dengan mengikuti seminar, workshop, benchmarking, pelatihan/diklat, dan kunjungan kerja seperti Refresher Program PSAK 71, Indosterling Forum ke 7, Renewable energy technology workshop Australia, Kuliah Umum BOD oleh Wakil Menteri ESDM, Roadshow GMTN 2019 – Inggris dan Eropa dan lainnya.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2019, Direksi melakukan rapat sebanyak 29 kali.



Nama	Rapat Dewan Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Zulkifli Zaini*	29	0	0,00%
Darmawan Prasodjo*	29	0	0,00%
Sinthya Roesly*	29	0	0,00%
Syofvi Felienty Roekman	29	25	86,21%
Sripeni Inten Cahyani**	29	20	68,97%
Djoko R. Abumanan	29	22	75,86%
Muhamad Ali	29	23	79,31%
Wiluyo Kusdwiarto	29	28	96,55%
Haryanto WS	29	28	96,55%
Syamsul Huda	29	24	82,76%
Ahmad Rofik	29	24	82,76%

* Zulkifli Zaini, Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly diangkat berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019

** Sripeni Inten Cahyani diangkat berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK-1095/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Penetapan besaran remunerasi, yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem Direksi didasarkan pada Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan Direksi juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perseroan. Jumlah kompensasi Direksi Perseroan untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp250.532 juta dan Rp 224.594 juta. Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan Direksi berakhir.

1.3 Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Direksi No. 0913.K/SDM.00.03/DIR/2019, Perseroan telah menunjuk Adi Setiawan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Kontak Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Telepon : (021) 7251234, 7250550, 7261122,

Faksimili: (021) 7221330

Email : investor@pln.co.id

Adi Setiawan, Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan pada Perseroan diantaranya Kepala Satuan Kinerja dan Pengembangan Sistem Manajemen PT PJB (2018-2019), Direktur SDM & Administrasi PT PJBS (2012-2018), Senior Manager Perencanaan SDM & Fasilitas PJB (2011), Sub Direktorat O&M PT PJBS (2010) dan Sub Direktorat Marketing PT PJBS (2007-2010). Beliau memperoleh gelar Magister Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2009).

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut: antara lain meliputi:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta hubungan dengan investor, menyediakan informasi pasar modal dan memastikan Perseroan memenuhi ketentuan pasar modal.
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan Tata Kelola Perseroan yang baik (GCG), memastikan Perseroan memiliki perangkat dan pedoman GCG serta melakukan pemantauan dan implementasi GCG.
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan kesekretariatan Perseroan termasuk didalamnya protokoler dan integrasi kegiatan Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan stakeholder lainnya.



4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta strategi Pengelolaan hubungan kelembagaan termasuk didalamnya hubungan dengan lembaga-lembaga Negara dan hubungan dengan pembuat kebijakan ketenagalistrikan.
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi Perseroan yang dapat diakses oleh stakeholder melalui tetapi tidak terbatas pada media elektronik, media cetak dan media audio visual.
6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi dan laporan manajemen, laporan tahunan, laporan statistic Perseroan serta laporan Perseroan lainnya.

Perseroan mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan baik melalui program internal maupun eksternal Perseroan, berikut table rincian program pelatihan Sekretaris Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir:

No	Keterangan	Penyelenggara/Tempat	Waktu Pelaksanaan
1	Legal Risk Management	PLN Udiklat Jakarta	12-13 Februari 2019
2	Japan Non-deal Roadshow	PLN, Jepang	24-28 Juli 2019
3	Seminar Nasional GCG PLN Grup	PLN, Batam	28-30 Agustus 2019
4	Qualified Risk Governance Professional	LSP MKS, Jakarta	24-25 September 2019
5	Workshop Asesor KPKU	PLN Udiklat Jakarta	9-10 Oktober 2019
6	Workshop Nasional Good Corporate Governance	Pusat Institusi Manajemen Nasional, Jakarta	6-7 Februari 2020

1.4 Komite di bawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Perseroan membentuk Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat perubahan anggota Komite Audit Perseroan dan anggota Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Amien Sunaryadi
 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
 Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Ketua Komite Audit Meraih gelar master of Professional Accountancy dari The school of Accountancy Georgia State University, Atlanta.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Partner of Assegaf Hamzah and Partners (2019 – sekarang), Senior Advisor of PT Integra Solusi Optima (2019 – sekarang), Vice President Commissioner PT Freeport Indonesia (2018 – sekarang), Kepala SKK Migas (2014-2018, Partner, Fraud Investigation and Disputes Services PT EY Indonesia (2012-2014), Senior Governance and Anti Corruption Officer di World Banki Indonesia (2018-2012), Expert Staff The Indonesian Financial Intelligence Unit (PPATK) (2008), Wakil Ketua KPK (2003-2007), Executive Director of the Masyarakat Transparansi Indonesia (2003), Senior Manager PT PWC Indonesia (2000-2003), Program Director LPGG (1999-2003), dan berbagai posisi dan fungsi di BPKP (1982-2000)



- Anggota : Ilya Avianti
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Komite Audit Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran tahun 1984, Magister Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1994), dan Doktor Akuntansi dari Universitas Padjajaran tahun 2000.
- Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama Perseroan (6 Agustus 2018- 23 Desember 2019), Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017), Auditor Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (2012-2017), Plt. Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI (2009-2010), Staf Ahli bidang BUMN/BUMD BPK RI (2008-2010), Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (2007-2008), Komisaris PT Tuban Petro Industry (2006-2009), dan Staf Ahli Menteri Keuangan (2005-2006). Sebagai Komite Audit Ilya Avianti telah memenuhi pedoman sesuai dengan POJK nomor 55/POJK.04/2015
- Anggota : Murtaqi Syamsudin
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia 64 tahun, Diangkat sebagai Komite Audit Perseroan meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia tahun 1981, MBA Program dari University of Oregon, Eugene, Oregon, USA (2003).
- Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) (2015 – 2017), Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) (2011 – 2015), Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PT PLN (Persero) (2009 – 2011), Direktur Operasional Jawa Bali PT PLN (Persero) (2008 – 2009).
- Anggota : Achmad Wahjudi
Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Diangkat sebagai Komite Audit Perseroan menurut SK Dewan Komisaris No. 03/SK/DK-PLN/2016. Merupakan anggota Komite Audit (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Airlangga, bidang Ekonomi, pada tahun 1986, dan Sertifikasi CPA
- Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016), Konsultan mandiri di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan (2014-sekarang), Direktur Keuangan Susi Air (2011-2013), Akuntan publik, sekaligus konsultan manajemen dan perpajakan(1992-2010), dan Konsultan di Hadori & Co, auditor internal di Mercedes Benz Grup dan staf akuntansi dan keuangan perusahaan pertambangan Australia, New Hope (1986-1992)
- Anggota : Krisna Simbaputra
Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat sebagai Komite Audit Perseroan pada RUPS sejak tanggal 1 September 2017. Merupakan anggota Komite Audit (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang Teknik Elektro, pada tahun 1985, dan gelar Master dari Sheffield University, Inggris, bidang Information Management, pada tahun 1995.
- Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN (Persero) (2013-2017), Staff Ahli Satuan Pengendalian Kinerja Korporat (2013), General Manager PLN Wilayah Sumatera Utara (2011-2013) dan General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat (2001-2011). Mulai berkarir di Perseroan pada tahun 1992. Sebagai anggota, Komite Audit, Krisna Simbaputra telah memenuhi ketentuan POJK nomor 55/POJK.04/2015.



Anggota : Nizam Burhanudin
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Diangkat sebagai Komite Audit Perseroan berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 6/SK/DK-PLN/2019 tanggal 27 Maret 2019. Merupakan anggota Komite Audit (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah, bidang Ilmu Hukum, pada tahun 1986, S2 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan S3 Ilmu Hukum dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2011.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara BPK (2000). Sebagai anggota Komite Audit, Nizam Burhanudin telah memenuhi ketentuan POJK nomor 55/POJK.04/2015.

Komite Audit Perseroan belum memenuhi ketentuan POJK 55/2015. Saat ini Perseroan sedang mengupayakan pemenuhan keanggotaan Komite Audit berdasarkan ketentuan POJK 55/2015. Merujuk pada Surat No. 17747/KEU.01.08/B01060000/2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan Perseroan, Direksi telah menginformasikan perihal belum terpenuhinya ketentuan POJK 55/2015 tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan melakukan upaya terbaik untuk segera melakukan pemenuhan POJK 55/2015, yaitu menyesuaikan komposisi anggota Komite Audit Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah diperolehnya pernyataan Efektif dari OJK. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan pemenuhan POJK 55/2015 tersebut.

Sepanjang tahun 2019 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Audit				
		Total Rapat 1 Tahun	Jumlah Rapat yang ditugaskan	Kehadiran	Presentase terhadap Jumlah Rapat yang ditugaskan (%)	Presentase terhadap rapat 1 tahun (%)
1	Darmono 1 Januari 2019 sd 17 Oktober 2019	64	30	20	67%	31%
2	Ilya Avianti Rionald Silaban	64	40	25	63%	39%
3	1 Januari 2019 sd 30 Agustus 2019	64	20	11	55%	17%
4	Achmad Wahjudi	64	53	53	100%	83%
5	Krisna Simbaputra	64	53	53	100%	83%
6	Nizam Burhanudin 27 Maret 2019 sd 31 Desember 2019	64	42	42	100%	66%
7	Sumiati 30 Agustus 2019 sd 23 Desember 2019	64	8	8	100%	13%
8	Amien Suneryadi 20 Desembere 2019 sd 31 Desember 2019	64	1	1	100%	2%

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko ("Komite MR") adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan sistem dan kebijakan, evaluasi manajemen risiko dan pemantauan kesesuaian potensi risiko di Perusahaan.



Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan per Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Suahasil Nazara
Wakil Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Meraih gelar Sarjana Ekonomi, dari Universitas Indonesia pada tahun 1994, Master of Science dari Cornell University, USA pada tahun 1997, dan Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pada tahun 2003.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013-2019), Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2016), Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/ TNP2K (2010-2015), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD (2009-2015), Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB Universitas Indonesia (2009-2013), Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB, Universitas Indonesia (2005-2008).

Anggota : Deden Juhara
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 28 Februari 2019. Beliau lulus pendidikan Akademi Kepolisian ("AKPOL") pada tahun 1985, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1992, SESPIM pada tahun 2000, dan SESPATI pada tahun 2010. Sebelumnya beliau berkarir di Kepolisian dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis, meliputi: Asisten Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia ("KAPOLRI") (2018), Kepala Kepolisian Daerah Maluku (2017), Widyaiswara Utama SESPIM POLRI (2013), Karo Binkar Sumber Daya Manusia POLRI (2011), Kalemkonprokol Binkermadianmas STIK Lemdikpol (2011). Beliau tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali

Anggota : Rida Mulyana
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 28 Februari 2019. Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Perminyakan pada tahun 1988 dan meraih gelar Master pada University of London, jurusan Petroleum Engineering pada tahun 1992. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (2013-2019), Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama (2010 – 2013), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" (2009 – 2010), Sekretariat Direktorat Jenderal Migas (2009). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Beliau tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Anggota : Mohamad Ikhsan
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Diangkat sebagai Komite Manajemen Risiko Meraih gelar Sarjana Ekonomi, dari Universitas Indonesia pada tahun 1988, MA in Economics dari Vanderbilt University, Nashville Tenn USA pada tahun 1991, dan Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pada tahun 1999.



Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Anggota Tim Asistensi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2019, Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI (2014-2019), Komisaris PT PGN Tbk (2015-2019), Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019), Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015- 2019), Komisaris PT JICT (2011-2017), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), Komisaris PT Danareksa (2008-2015).

Anggota : Firman Dini
Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan sejak 1 Oktober 2016. Beliau merupakan anggota Komite Manajemen Risiko yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Beliau saat ini menjabat sebagai Aksesori Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada PT ELESKA IATKI (2015-sekarang) dan Project Advisor pada PT Multi Daya Lestari (2014-sekarang). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo (2012-2014), Komisaris PT Rekadaya ElektriKA (2012-2014), Anggota Badan Pengawas Harian STT-PLN (2012-2014), Anggota Badan Pengawas Harian Dana Pensiun PLN (2010-2013), dan Direktur SDM PT IP (2009-2013). Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang elektro, pada tahun 1983.

Anggota : Bambang Purwo
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan sejak 31 Agustus 2015. Beliau merupakan anggota Komite Manajemen Risiko yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai instruktur pada PT PLN (Persero) Udiklat Cibogo (2012-2015), Konsultan pada PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2013-2015), VP Hukum pada PT IP (2002-2012), Ahli Kinerja merangkap DM Kepegawaian PT PLN (Persero) Disjaya & Tangerang (2000-2002), Kepala Staf Administrasi & Keuangan PT PLN (Persero) Piktring Jateng di Semarang (1996-2000), Kepala Bagian Sekretariat PT PLN (Persero) Proyek Induk Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi (1988-1992), dan Kepala Seksi Pengurusan Tanah PY PLN (Persero) Proyek Induk Transtekstib Koreksi (1984-1988). Meraih gelar Sarjana dari Universitas Negeri Jember, bidang hukum, pada tahun 1980, gelar Notariat dari Universitas Negeri Diponegoro Semarang pada tahun 2000, dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Anggota : Widhyawan Prawiraatmadja
Warga Negara Indonesia 60 tahun, Diangkat sebagai Komite Manajemen Risiko Perseroan sejak 20 Mei 2020. Beliau merupakan anggota Komite Manajemen Risiko yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Dalam perjalanan karirnya, beliau berkarir di PT Pertamina (Persero) dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Vice President for Corporate Planning, Business Development and Transformation* (2005 – 2009), *Director for Turbomachinery* pada *General Electric* (2010 – 2011), berkarir di SKK Migas dengan jabatan terakhir *Deputy Chairman for Commercial* (2011 – 2014), dan menjadi *Governor of Indonesia* untuk OPEC (2016).

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Tugas dan kewajiban Komite Manajemen Risiko, sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut, adalah

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komite;
2. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perseroan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian internal Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;



3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi Perseroan;
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perseroan;
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam Perseroan;
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di Perseroan;
8. Mengevaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap Perseroan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut;
9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional Perseroan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten;
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
13. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan Komite kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019 Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 79 kali, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. Di samping itu, Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris

Rapat Komite Manajemen Risiko					
Nama	Total Rapat dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Rapat yang ditugaskan	Kehadiran	Persentase Kehadiran terhadap Total Rapat dalam 1 (satu) Tahun (%)	Persentase Kehadiran terhadap Jumlah Rapat yang Ditugaskan
Andy N. Sommeng 1 Jan sd 28 Feb 2019	79	9	5	6,33%	55,56%
Oegroseno 1 Jan sd 28 Feb 2019	79	9	7	8,86%	77,78%
Deden Juhara 1 Mar sd 31 Des 2019	79	33	25	31,65%	75,76%
Rida Mulyana 1 Mar sd 31 Des 2019	79	33	22	27,85%	66,67%
Darmawan Prasodjo 1 Jan sd 23 Des 2019	79	32	19	24,05%	59,38%
Marlius Alrobin Bachtiar 1 Jan sd 20 Mei 2020	79	79	77	97,47%	97,47%
Bambang Purwo Handoko	79	79	71	89,87%	89,87%
Firman Dini	79	79	78	98,73%	98,73%

Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite NR"), adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Nominasi) dan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris



Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan per Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Amien Sunaryadi
 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
 Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan SK No 07/SK/DK-PLN/2020 tanggal 16 April 2020. Beliau meraih gelar master of Professional Accountancy dari The school of Accountancy Georgia State University, Atlanta.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Partner of Assegaf Hamzah and Partners (2019 – sekarang), Senior Advisor of PT Integra Solusi Optima (2019 – sekarang), Vice President Commissioner PT Freeport Indonesia (2018 – sekarang), Kepala SKK Migas (2014-2018, Partner, Fraud Investigation and Disputes Services PT EY Indonesia (2012-2014), Senior Governance and Anti Corruption Officer di World Bank Indonesia (2018-2012), Expert Staff The Indonesian Financial Intelligence Unit (PPATK) (2008), Wakil Ketua KPK (2003-2007), Executive Director of the Masyarakat Transparansi Indonesia (2003), Senior Manager PT PWC Indonesia (2000-2003), Program Director LPGG (1999-2003), dan berbagai posisi dan fungsi di BPKP (1982-2000)

Sekretaris merangkap Anggota : Deden Juhara
 Komisaris Independen
 Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi pada tanggal 16 April 2020 dengan SK No. 06/SK/DK-PLN/2020. Beliau lulus pendidikan Akademi Kepolisian (“AKPOL”) pada tahun 1985, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1992, SESPIM pada tahun 2000, dan SESPATI pada tahun 2010. Sebelumnya beliau berkarir di Kepolisian dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis, meliputi: Asisten Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (“KAPOLRI”) (2018), Kepala Kepolisian Daerah Maluku (2017), Widyaiswara Utama SESPIM POLRI (2013), Karo Binkar Sumber Daya Manusia POLRI (2011), Kalemkonpropol Binkermadianmas STIK Lemdikpol (2011). Beliau tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali

Anggota : Dudy Purwagandhi
 Komisaris
 Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Nominasi & Remunerasi pada tanggal 16 April 2020 dengan SK No. 08/SK/DK-PLN/2020 . Beliau lulus Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta (1995). Sebelumnya beliau berkarir sebagai Director Seacons Trading Limited, Singapore (2011 – 2020), Deputy Treasurer II of the National Campaign Team of the Working Indonesia Coalition (2019), Special Staff to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (2018 – 2019).

Anggota : Karyawan Aji
 Beliau ditunjuk sebagai sebagai anggota Komite Nominasi & Remunerasi pada tanggal 28 Februari 2018 dengan SK No. 03/SK/DK-PLN/2018 . Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 dan gelar Master di bidang Teknik Elektro dari Curtin University of Technology pada tahun 2009. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Organisasi di Kantor Pusat PLN (2017-2018), Manajer Umum PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017), dan Manajer Eksekutif di Direktorat Wilayah Bisnis Jawa Tengah di Kantor Pusat PLN (2015-2016).



Anggota : Roikhan
 Beliau ditunjuk sebagai anggota Komite Nominasi & Remunerasi pada tanggal 4 September 2019 dengan SK No . 13/SK/DK-PLN/2019 . Beliau memperoleh gelar Master Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung (1998) dan Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1986). Sebelumnya, beliau adalah Direktur SDM PT Indonesia Power (2013-2018) dan Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum Kantor Pusat (2013).

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap proses penetapan nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Nominasi & Remunerasi sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

- Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem nominasi dan remunerasi Perseroan secara benar;
- Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karir, nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang ditetapkan;
- Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas komite;
- Membuat laporan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2019 Komite Nominasi & Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 15 kali dengan agenda membahas organisasi staf Sekretariat Dewan Komisaris, Pembahasan BOD, dan Pembahasan calon Direksi PLN.

Nama	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Budiman*	15	15	100,00%
Aloysius Kiik Ro**	15	13	86,87%
Roikhan	15	15	100,00%
Karyawan Aji	15	12	80,00%
Amien Sunaryadi***	15	0	0,00%
Deden Juhara***	15	0	0,00%
Dudy Purwagandhi***	15	0	0,00%

*telah selesai masa jabatan berdasarkan SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020

**telah selesai masa jabatan berdasarkan SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019

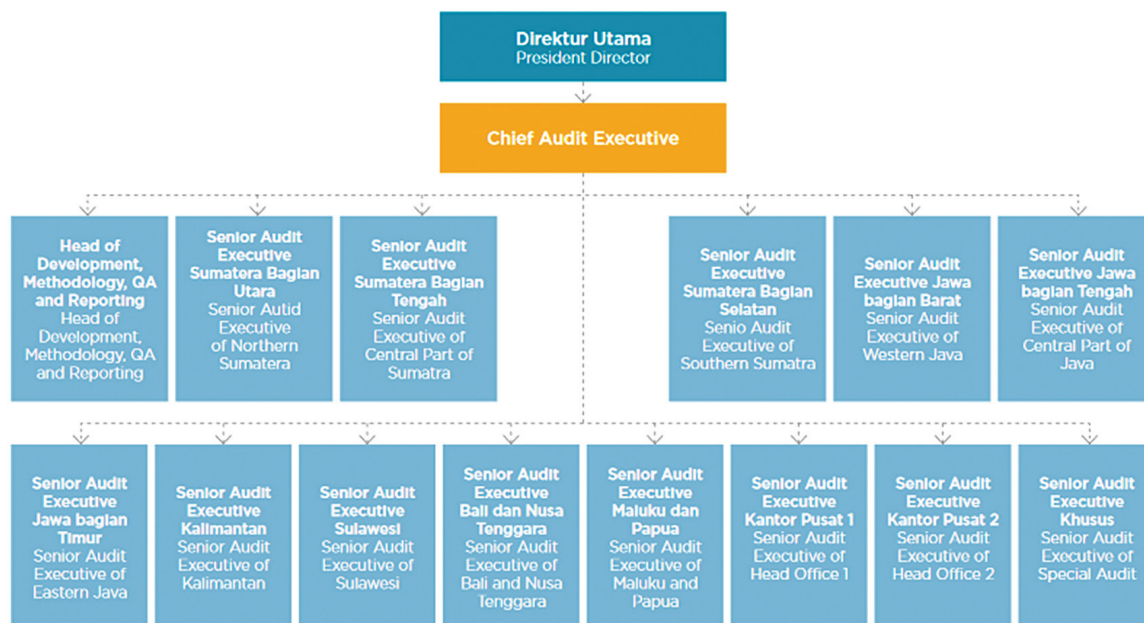
***baru menjabat pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan SK yang diterbitkan masing-masing oleh Perseroan

1.5 Sistem Pengendalian Internal

Fungsi Audit Internal di Perseroan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi SPI yang tidak terbatas hanya pada fungsi audit internal, audit khusus dan kegiatan konsultasi, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan GCG berbasis risiko. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2018, tanggal 6 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, nomenklatur jabatan Kepala SPI adalah Chief Audit Executive (“CAE”). CAE diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian CAE diberitahukan kepada OJK.



Struktur Organisasi SPI



Tugas Dan Tanggung Jawab

SPI bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya program audit internal dengan tugas pokok:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan audit internal, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas audit Perusahaan;
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit internal yang berbasis risiko di seluruh regional dan unit Perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit internal, dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit khusus (investigasi/fraud) di seluruh regional dan unit Perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit khusus dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
4. Memastikan perencanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan audit Perusahaan pada fungsi korporat, bisnis regional dan unit, dalam rangka meminimalkan Risiko dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan dan regional dan unit;
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hubungan kerja dengan auditor eksternal termasuk di dalamnya Badan Pemeriksa Keuangan dan kantor akuntan publik;
6. Memastikan terlaksananya evaluasi dan melakukan koordinasi audit pada anak perusahaan dan usaha patungan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Upaya Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan manajemen risiko berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2003. Pelaksanaan operasional pengelolaan manajemen risiko, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 159.K/010/DIR/2004 tanggal 2 November 2004, mewajibkan manajemen Perseroan termasuk antara lain Deputi Direktur, Sekretaris Perusahaan, SPI, *general manager* dan seluruh jajarannya untuk melengkapi kajian risiko bagi Perseroan dari setiap usul/saran/perubahan yang terkait dengan pengelolaan Perseroan. meliputi: (i) identifikasi risiko; (ii) penilaian/analisa dampak risiko; (iii) kuantifikasi dampak risiko; dan (iv) metode pengelolaan risiko. Pedoman Proses Sasaran melalui Penerapan *Enterprise Risk Management* di Perseroan ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi No. 004.E/DIR/2006 tanggal 6 Februari 2006. Program *Enterprise Risk Awareness* telah dilaksanakan di seluruh unit bisnis Perseroan.



Upaya-upaya pengelolaan risiko per masing-masing factor risiko meliputi antara lain:

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Pengendalian dilakukan secara langsung oleh Pemerintah terhadap Perseroan sebagaimana Tarif Listrik yang diatur langsung oleh Pemerintah sehingga berdampak material atas kondisi keuangan Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa:

- Membangun *Regulatory Impact Analysis (RIA)* sebelum dan sesudah diterbitkannya regulasi
- Melakukan pendekatan dengan regulator terkait kebijakan energy primer
- Secara aktif mendorong terbitnya regulasi yang berpihak pada Perseroan dalam menjalankan industry ketenagalistrikan di Indonesia
- Mengurangi ketergantungan dengan pihak eksternal dengan melakukan strategi *vertical integration*, khususnya terkait dengan Energi Primer

Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- 1) Apabila harga BBM, gas alam atau batubara naik, beban usaha Perseroan akan meningkat sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Capping Harga Gas melalui regulasi pemerintah. Saat ini telah diterbitkan regulasi pemerintah terkait harga gas untuk kelistrikan PLN yaitu PERMEN ESDM No. 10/2020 dan KEPMEN ESDM No. 91/2020, yang mengatur harga gas rata-rata di plant gate PLN sebesar USD 6/ mmbtu.
- Terkait batubara, regulasi yang menjadi acuan masih berdasarkan Kepmen ESDM No. 261.K/30/MEM/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Tahun 2020, yang memberlakukan ceiling price harga batu bara pembangkit pada US\$70.
- Meningkatkan peran Anak Perusahaan seperti PLN BB dan BAg dalam membantu menurunkan biaya energi primer.
- Akuisisi Tambang Batu bara untuk Non PLTU Mulut Tambang, Coal Processing Plant dan Joint Operation oleh PLN BB.
- Efisiensi biaya transportasi dalam KJS PLN Batubara.
Penurunan nilai kalori batu bara.

- 2) Ketidakmampuan pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit tenaga listrik lainnya Perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan dapat menghambat

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Memastikan penambahan kapasitas IPP yang optimal dan efisien
- Meningkatkan *stakeholder management*
- Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas *Supply Chain Management (SCM)*

- 3) Perseroan telah melakukan perubahan pencatatan Perhitungan PJBL IPP sehingga mengakibatkan informasi keuangan Perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk diperbandingkan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Perseroan mengungkapkan dampak atas diterapkannya ISAK 8 sehingga stakeholder mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari tahun ke tahun



- 4) Risiko yang terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tambahan dan akuisisi aset pembangkit listrik lainnya, khususnya keberhasilan penyelesaian FTP dan implementasi Program 35.000 MW

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Monitoring dan evaluasi realisasi pertumbuhan beban dan melakukan penyesuaian terhadap RUPTL
- Evaluasi kelayakan proyek baik secara operasional maupun finansial dengan menggunakan parameter yang realistis
- Peningkatan koordinasi dan pengawasan yang lebih ketat pada proses konstruksi yang saling terkait.

- 5) Keterlambatan atau kendala dalam memproses hak atas tanah dapat mengganggu rencana ekspansi Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa pembuatan kebijakan inisiasi proyek lebih awal untuk memastikan permasalahan pembebasan lahan dan perizinan telah selesai terlebih dahulu sebelum dilakukan konstruksi proyek.

- 6) Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi di masa mendatang untuk menutup biaya-biaya yang timbul dari pembangkitan tenaga listrik atau subsidi akan diterima oleh Perseroan tepat pada waktunya

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Melakukan efisiensi (cost cutting) dengan tetap menjaga kebutuhan anggaran minimal terpenuhi (Program Penurunan BPP)
- Mempersiapkan strategi bersama stakeholder untuk perbaikan tarif dan margin bagi PLN

- 7) Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas yang boleh ditagihkan oleh Perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh Pemerintah

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Melakukan efisiensi (cost cutting) dengan tetap menjaga kebutuhan anggaran minimal terpenuhi (Program Penurunan BPP)
- Mempersiapkan strategi bersama stakeholder untuk perbaikan tarif dan margin bagi PLN

- 8) Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, gardu induk dan pembangkitan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan strategi percepatan penyelesaian proyek sesuai urgensi.
- Melakukan review prioritas proyek transmisi dan Gardu induk (skala Nasional dan masing-masing UIP) untuk memastikan proyek-proyek yang akan dikerjakan adalah proyek yang paling strategis dan berdampak besar bagi perusahaan.

- 9) Perseroan dapat menghadapi keterlambatan atau kendala lain dalam memperoleh persetujuan Pemerintah atau persetujuan terkait lainnya sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Membangun dan mengimplementasikan *stakeholder management* yang lebih efektif dengan membentuk organisasi khusus menangani *stakeholder management*
- Melakukan pendekatan dengan regulator terkait kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kelistrikan



- 10) Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk proyek-proyek Perseroan, yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Meningkatkan pengelolaan pembiayaan untuk optimalisasi BPP
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas *Supply Chain Management (SCM)*
- Meningkatkan pendapatan dan kesehatan keuangan

- 11) Sentimen publik yang negatif dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Melakukan stakeholder management.
- Mengupayakan peningkatan layanan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi dengan platform digital dalam rangka meningkatkan kemudahan memperoleh informasi, layanan, melakukan transaksi dan complain handling

- 12) Berdasarkan UU No. 30/2009, prosedur untuk menetapkan tarif listrik telah berubah dan setiap daerah dapat memiliki tarif yang berbeda, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa:

- Meningkatkan *stakeholder management*
- Mempersiapkan strategi bersama stakeholder untuk perbaikan tarif dan margin bagi PLN
- Melakukan pendekatan dengan regulator

- 13) Kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan memiliki risiko pertanggungjawaban

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa:

- Untuk kepastian pembiayaan, PLN melakukan diversifikasi financing.
- PLN melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait sebelum penerbitan peraturan untuk memastikan tidak ada dampak merugikan kepada PLN.

- 14) Perseroan dapat menderita kerugian atas hal-hal yang tidak diasuransikan, atau nilai pertanggungan dalam asuransi tidak cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa program asset valuation survey setiap tahun yang dilakukan oleh KJPP, penilaian didasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) untuk kepentingan asuransi. Adapun aset operasional yang diasuransikan berdasarkan hasil kajian risiko yang direkomendasikan adalah meliputi Pembangkit Tenaga Listrik ≥ 25 MW, Gardu Induk Ekstra Tinggi 500 kV di Jawa Bali, Kabel Laut Jawa Bali dan Kabel Tegangan Tinggi Suramadu.

- 15) Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batubara dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Akuisisi Tambang Batu bara untuk Non PLTU Mulut Tambang, Coal Processing Plant dan Joint Operation oleh PLN BB.
- Efisiensi biaya transportasi dalam KJS PLN Batubara.
- Clustering pasokan gas, Pengembangan infrastruktur gas, Merencanakan alternatif pasokan

- 16) Hasil aktual Perseroan berbeda secara signifikan dari perkiraan- perkiraan dan estimasi yang telah ditetapkan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Peningkatan keandalan dan efisiensi operasi pembangkitan, penyaluran, distribusi dan K3L
- Memastikan peningkatan kompetensi karyawan PLN sesuai kebutuhan strategi pengembangan ketenagalistrikan



- 17) Depresiasi nilai rupiah dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa optimalisasi hedging, mengupayakan kontrak/perjanjian dengan pembayaran dalam mata uang rupiah

- 18) Anggota dari manajemen, karyawan diselidiki, diinvestigasi dalam kasus-kasus tertentu yang dihukum karena penipuan dan korupsi, dan ketidakmampuan Perseroan untuk mendeteksi dan/atau mencegah insiden sebelum atau sesudahnya dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Perseroan mempunyai SPI yang ketat, independen dan melekat untuk meminimalisir potensi yang terjadi
- Perseroan melakukan penguatan internal, *compliance*.
- Perseroan memiliki Divisi Compliance yang menilai potensi-potensi fraud di PLN
- Perseroan mempunyai program WBS

- 19) Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kendala operasional seperti susut jaringan dan pencurian listrik serta kejadian force majeure

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa mengupayakan keamanan dan keandalan fungsi asset vital kelistrikan (kwh meter, jaringan, trafo, dst), menyiapkan BCP dalam penanganan force majeure.

- 20) Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Mematuhi UU dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah
- Koordinasi dengan pihak *stakeholder* dan pembuat regulasi khususnya terkait kebijakan, perizinan dan pembebasan lahan proyek
- Peningkatan pengelolaan K3L
- Penerapan *business continuity management*

- 21) Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendanai operasional dan kebutuhan belanja modal Perseroan di masa mendatang dan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Memanfaatkan likuiditas perusahaan agar tidak terjadi *covenant breach*
- Evaluasi kelayakan proyek baik secara operasional maupun finansial dengan menggunakan parameter yang realistis

- 22) Perseroan mungkin tidak berhasil menegosiasikan harga BBM dengan Pertamina sebagai pemasok BBM utama Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa

- Melakukan review dan analisis, serta usulan kepada *stakeholder* terhadap regulasi yang berlaku terkait alokasi dan harga energy primer yang berpengaruh terhadap PLN.

Risiko Umum

- 1) Perekonomian domestik, regional atau global dapat berubah secara material dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa:

Perseroan dapat melakukan upaya dengan cara mengembangkan model bisnis baru di ketengalistrikan dan meningkatkan manajemen regulasi untuk mengurangi atau menghilangkan dampak yang merugikan bagi Perseroan



- 2) Interpretasi dan implementasi hukum dalam pemerintahan di Indonesia mengandung ketidakpastian dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa:

Perseroan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait interpretasi dan implementasi hukum tersebut serta untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait sebelum penerbitan peraturan sehingga tidak ada dampak yang merugikan bagi Perseroan.

- 3) Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa:

Perseroan memiliki standar bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia di unit-unit harus melakukan "Pembinaan Hubungan Industri" dimana standari tersebut dijadikan KPI dengan target pemahaman ≥ 70 (lebih besar sama dengan tujuh puluh).

- 4) Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan bagi Perseroan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko ini berupa:

Perseroan melakukan upaya dengan mengelola penjualan tenaga listrik yang merupakan *core business* Perseroan dari sisi pendapatan dan meningkatkan pengelolaan pembiayaan untuk Optimalisasi BPP dari sisi pengeluaran sehingga credit rating Perseroan tidak menurun.

1.7 Program Kemitraan & Bina Lingkungan dan Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau *CSR*)

Sebagai BUMN, Perseroan berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL"). Dalam pelaksanaannya, kegiatan PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-9/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu, Perseroan juga berkewajiban melaksanakan Program CSR sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 74 UUP dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Perseroan berkomitmen untuk ikut berperan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja melalui program-program tanggung jawab sosial di bidang sosial dan kemasyarakatan. Program-program yang tepat guna, tepat sasaran dan memenuhi harapan pemangku kepentingan akan menumbuhkan interaksi positif antara PLN dengan masyarakat. Perusahaan berharap masyarakat mempunyai rasa memiliki dan ikut menjaga keberadaan instalasi PLN yang berada atau berdekatan di wilayah permukiman masyarakat. Kegiatan di bidang sosial dan kemasyarakatan diimplementasikan ke dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L/TJSL).

Program Kemitraan

Program Kemitraan (PK) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana Program Kemitraan yang sudah dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL setiap tahunnya. PK menyalurkan dana dalam bentuk:

1. Pinjaman modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan,
2. Pinjaman tambahan untuk menambah modal kerja jangka pendek untuk memenuhi pesanan yang diterima oleh mitra binaan,



3. Beban Pembinaan, yang hanya dapat digunakan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan:
 - a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan PK.
 - b. Untuk dana hibah yang besarnya maksimal 20% dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan.

Realisasi program bina lingkungan pada tahun 2019 adalah Rp35.689juta yang dilaksanakan di Unit Distribusi dan Wilayah Perseroan.

Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, yang meliputi 7 (tujuh) jenis bantuan bina lingkungan yaitu :

- (i) bantuan korban bencana alam;
- (ii) bantuan pendidikan / pelatihan;
- (iii) bantuan peningkatan kesehatan;
- (iv) bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- (v) bantuan sarana ibadah;
- (vi) bantuan pelestarian alam;
- (vii) bantuan pengentasan kemiskinan, termasuk untuk: elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik; penyediaan sarana air bersih; penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus; bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain mitra binaan program kemitraan; perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau bantuan peralatan usaha.

Realisasi program bina lingkungan pada tahun 2019 adalah Rp60.575juta yang dilaksanakan di Unit Distribusi dan Wilayah Perseroan.

Program Corporate Social Responsibility atau CSR

Program CSR merupakan bagian dari kepedulian PLN untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* Perseroan, komunitas karyawan Perseroan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dengan pemanfaatan dana dari anggaran operasi lain. Realisasi kegiatan CSR pada tahun 2019 adalah sebesar Rp179.654juta.

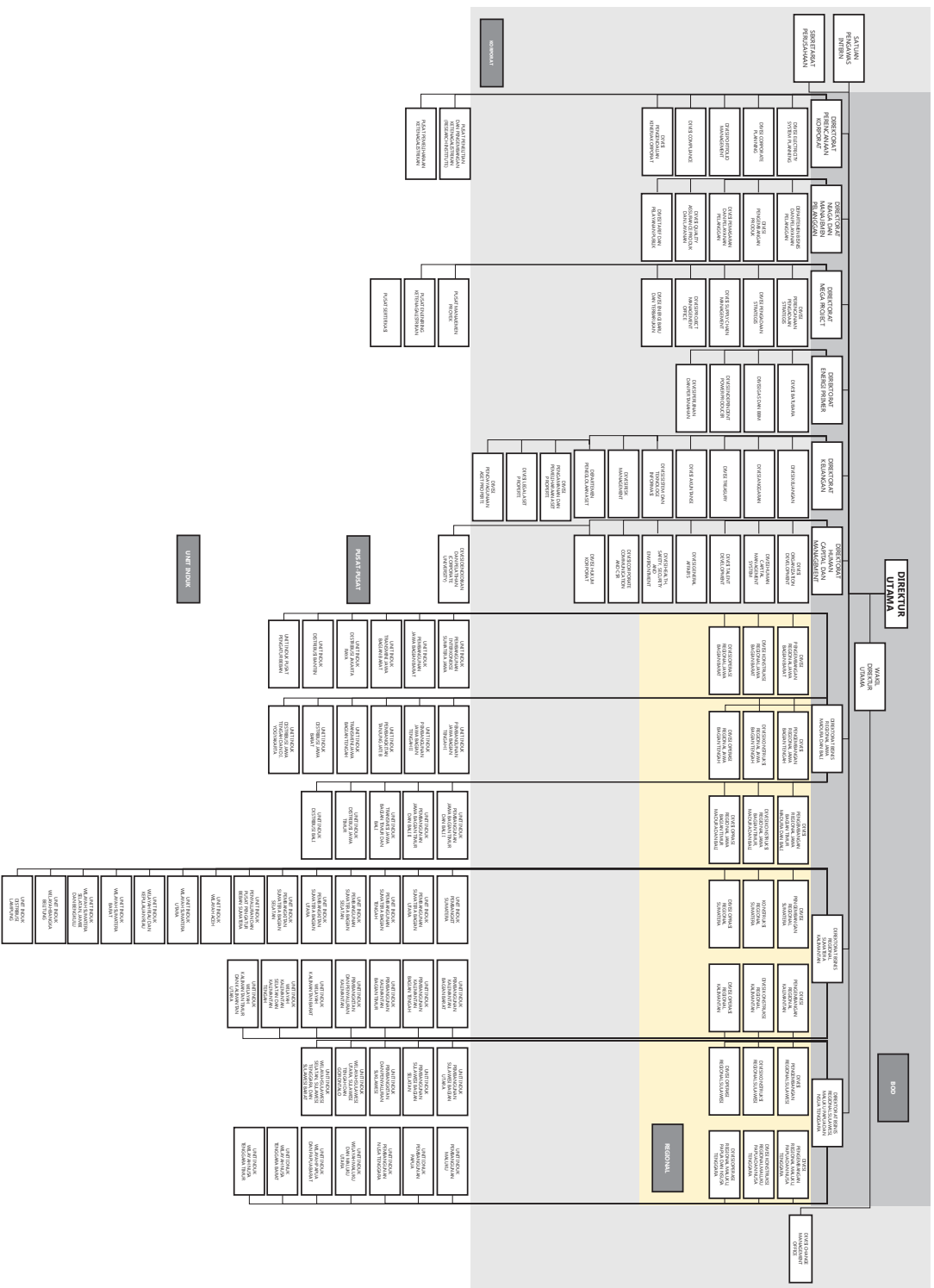
Pada tahun 2019, kegiatan CSR yang dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Program pelestarian terumbu karang Dusun Sebalang dan pelatihan Desa Mandiri Energi di Yayasan RE, serta bantuan pelestarian alam lainnya.
2. Program sosial dan pengentasan kemiskinan berupa pengadaan barang atau jasa program mudik PLN 2019, Sembako PLN, Yayasan BUMN Hadir untuk negeri 2019 dan BUMN Peduli, serta kegiatan lainnya.
3. Program bantuan bencana alam berupa perumahan tahan gempa di NTB dan bantuan bencana tsunami di Selat Sunda Banten serta kegiatan lainnya.
4. Program pendidikan/pelatihan berupa beasiswa pendidikan D3 untuk warga asli Papua, pengembangan inkubator bisnis Universitas Pattimura, pembangunan SMK Yay Mahisa Agni Yogyakarta, pendidikan vokasi, magang bersertifikat serta kegiatan lainnya.
5. Program peningkatan kesehatan berupa bantuan mobil ambulans sebanyak 6 unit, pembuatan gedung Posyandu di desa Sumur Adem dan mengadakan cek kesehatan gratis serta kegiatan lainnya.
6. Program pengembangan sarana umum berupa pembuatan fasilitas Universitas Muhammadiyah, pembangunan Masjid Mariliyyah Islamic Center di UGM, pembuatan Masjid Sriwedari di Surakarta serta kegiatan lainnya.



1.8 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:





11. SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai usaha untuk mengembangkan dan membangun komitmen, kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (“SDM”) serta mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen SDM yang efisien dan responsif, maka telah dilakukan langkah-langkah:

- Meningkatkan efektifitas dan adaptabilitas organisasi untuk mengantisipasi perkembangan perusahaan dan tuntutan bisnis
- Mendorong outsourcing sebagai strategi kemitraan dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM melalui implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK)
- Membentuk budaya pembelajaran berbasis manajemen pengetahuan (*knowledge management*)
- Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan

11.1 Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah 54.129 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Perseroan	45.061	45.497
Entitas Anak	9.068	8.627
Jumlah	54.129	54.124

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Manajemen atas	130	42	111	44
Manajemen menengah	515	257	455	253
Manajemen dasar	1.808	439	1.592	407
Supervisor atas	3.984	1.023	3.795	1.009
Supervisor dasar	9.250	690	8.635	653
Fungsional	29.374	6.617	30.909	6.555
Jumlah	45.061	9.068	45.497	8.921

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
≤D2	18.977	2.018	21.012	2.137
D3	9.567	2.346	9.224	2.271
S1	15.258	4.258	14.100	4.129
S2	1.248	443	1.153	381
S3	11	3	8	3
Jumlah	45.061	9.068	45.497	8.921

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang usia

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
<25 tahun	11.132	1.362	12.739	1.523
26 - 30 tahun	12.826	2.648	11.258	2.556
31 - 35 tahun	7.268	1.680	6.210	1.539
36 - 40 tahun	2.912	1.012	2.392	832
41 - 45 tahun	1.188	482	1.546	649
46 - 50 tahun	4.042	1.159	4.411	1.066
>50 tahun	5.693	725	6.941	756
Jumlah	45.061	9.068	45.497	8,921



Komposisi karyawan berdasarkan fungsi

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Fungsi pembangkitan	8.567	5.080	8.098	5.066
Fungsi transmisi	3.892	204	3.879	180
Fungsi distribusi	24.785	157	26.516	133
Fungsi pendukung	7.817	3.627	7.004	3.542
Jumlah	45.061	9.068	45.497	8.921

Komposisi karyawan berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Sumatera	11.576	740	11.863	678
Jawa, NTB, Lombok	13.434	8.048	13.516	7.963
Kalimantan	8.910	170	9.028	153
Sulawesi	8.734	93	8.586	108
Maluku dan Papua	2.407	17	2.504	19
Jumlah	45.061	9.068	45.497	8.921

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh karyawan Perseroan merupakan karyawan tetap.

Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Ahli

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing dan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

11.2 Sarana dan Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Sistem pembayaran gaji/upah bagi pegawai Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Rata-rata (UMR) yang tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, Perseroan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi karyawannya, antara lain dengan:

- Menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan sendiri oleh Perseroan dan mengikutsertakan pegawai pada program jaminan sosial tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah;
- Melaksanakan program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
- Memberikan jaminan kesehatan yang dikelola secara mandiri dan mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan nasional yang diwajibkan Pemerintah;
- Menerbitkan seperangkat peraturan dan ketentuan mengenai pedoman dan petunjuk keselamatan kerja serta pengamanan fisik sejak tahun 1971;
- Mendorong perkembangan koperasi karyawan;
- Memberikan fasilitas pinjaman uang muka kepemilikan rumah;
- Mengadakan penyesuaian imbal jasa (pendapatan) karyawannya berdasarkan sistem merit dengan mempertimbangkan pula tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat daya beli yang memadai;
- Memberlakukan sistem remunerasi 3P yaitu *pay for position*, *pay for people*, dan *pay for performance* yang mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai;
- Memberikan fasilitas olahraga, kesenian dan keagamaan.

Dana Pensiun Perseroan

Perseroan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"),



pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perseroan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 15,45% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Imbalan Pasca-Kerja Lain dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan dan Entitas Anak. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja pegawai.

Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang ini dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris adalah sebagai berikut:

- Tingkat kemungkinan meninggal (mortality rate) : CSO-58
- Tingkat bunga teknis aktuaria (interest rate) : 8,62%
- Tingkat kenaikan penghasilan (salary increase) : 7,20%
- Tingkat pengunduran diri
 - usia 18 s/d 49 tahun : 0,27%
 - usia 50 s/d 55 tahun : 0,01%
- Tingkat kecacatan : 0,02%
- Tingkat kecelakaan dinas : 0,15%
- Tingkat pajak : sesuai PPh 21 final
- Usia pensiun normal : 56 tahun

Program Pemeliharaan Kesehatan

Perseroan dan Entitas Anak juga menyediakan program kesehatan bagi pensiunan dan keluarganya yang memenuhi syarat. Tidak terdapat dana yang disisihkan sehubungan dengan manfaat tersebut.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung beban program pemeliharaan kesehatan tahun 2019, berdasarkan laporan aktuaris oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen adalah sebagai berikut:

- Tingkat bunga diskonto : 7,78%
- Tingkat kenaikan biaya kesehatan (*medical inflation*) : 7,00%
- Tingkat perubahan perilaku penggunaan jaminan kesehatan : berdasarkan faktor usia "age factor"
- Tabel mortalita pegawai aktif dan pensiunan : CSO-1958
- Tingkat kecacatan : 0,02%
- Tingkat pengunduran diri
 - usia 18 s/d 49 tahun : 0,27%
 - usia 50 s/d 55 tahun : 0,03%
- Perbedaan usia suami istri : 5 tahun
- Besar santunan istri : 100% dari santunan kesehatan suami



Koperasi Karyawan Perseroan

Koperasi Pegawai PT PLN (Persero) Kantor Pusat ("KP3") didirikan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Koperasi Konsumsi dan Simpan Pinjam PLN Pusat tanggal 21 September 1963 yang telah terdaftar pada Jawatan Koperasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya pada tanggal 21 September 1963 di bawah No. 574/B.H/I. Selanjutnya anggaran dasar KP3 beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 24 Agustus 1995 yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada tanggal 26 Mei 1996 di bawah No. 166/BH/PAD/KWK.9/VI/1996.

Adapun jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan PLN antara lain berupa:

- menerima simpanan dari anggota;
- perdagangan barang dan jasa;
- usaha simpan pinjam;
- menyediakan barang-barang kebutuhan anggota;
- usaha jasa lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan;
- menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

11.3 Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan dan Latihan (diklat) merupakan program utama pendukung pengembangan eksekutif atau pegawai pada umumnya selain program pengembangan melalui pengalaman langsung. Untuk mengoptimalkan peran diklat, program intervensi diklat akan didasarkan pada analisa kebutuhan diklat (*Training Need Analysis*) yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung program kerja unit terutama program jangka pendek termasuk pembekalan pegawai untuk menghadapi persoalan-persoalan yang timbul, yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian tugas jabatan.

Fokus lain program pengembangan melalui diklat antara lain:

- Program diklat kaderisasi manajerial meliputi manajer cabang, manajer sektor, manajer dasar, manajer menengah, dan kursus calon *General Manager* (GM).
- Program pengembangan leadership untuk mendukung penerapan budaya perusahaan terutama untuk pembentukan iklim kerja yang kondusif.
- Program diklat dalam mendukung restrukturisasi perusahaan seperti pembentukan struktur JMK, organisasi SOTOMO dan pembentukan P2B Sumatra.
- Program pemberdayaan manajer lini dalam pengembangan SDM.
- Program diklat dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan sistem-sistem SDM.
- Untuk mempertajam analisa kebutuhan diklat oleh unit-unit, akan disusun panduan training need analysis yang akan disebarakan ke seluruh unit Perseroan.
- PLN *Corporate University* untuk mengintegrasikan semua sumberdaya pembelajaran, proses dan orang di perusahaan yang memungkinkan terwujudnya kinerja terbaik dengan terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku orang dalam lingkungan ekosistem bisnis.

Serikat Pekerja Perseroan

Pegawai Perseroan secara bersama-sama membentuk wadah organisasi serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) disingkat SP-PLN yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1999 di Jakarta. SP-PLN berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jl. Trunojoyo, Blok MII/135, Jakarta Selatan yang anggotanya adalah pegawai Perseroan di seluruh wilayah Republik Indonesia. SP-PLN telah terdaftar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP. 385/M/BW/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja PT PLN (Persero) tanggal 13 Oktober 1999, dan dicatat di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan Bukti Pencatatan No. 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001. Dengan telah terdaptarnya serikat pekerja, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain SP-PLN, Perseroan juga memiliki 2 (dua) serikat pekerja lainnya, yaitu Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara yang berdiri tanggal 13 Agustus 2015 dengan Bukti



Pencatatan No. 285/Disnaker/2015 dan LASKAR PLN yang berdiri pada tanggal 9 Februari 2016 dengan Bukti Pencatatan No. 762 /SP/JS/II/2016.

Pada tanggal 23 April 2010, Perseroan dan SP-PLN mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) dengan No. 140.1.PJ/040/DIR/2010 dan No. DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 untuk periode 2010-2012 (“PKB Periode Tahun 2010-2012”). PKB tersebut mengatur hal-hal yang pokok di bidang ketenagakerjaan dan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Setelah PKB Periode Tahun 2010-2012 habis masa berlakunya, pada tanggal 11 Oktober 2013, Perseroan dan SP-PLN bersepakat untuk melakukan addendum PKB untuk memperpanjang masa berlaku PKB Periode Tahun 2010-2012. Sebelum ditetapkannya PKB Baru sebagai pengganti PKB Periode Tahun 2010-2012, maka yang berlaku adalah ketentuan PKB Periode Tahun 2010-2012 berikut lampirannya.

Serikat Pekerja merupakan mitra manajemen untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui sarana-sarana hubungan industrial yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hubungan industrial sampai saat ini selalu terjalin dengan baik dan selalu diformulasikan dalam pertemuan rutin lembaga kerja sama bipartit.

12. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut adalah beberapa perkara material yang dihadapi Perseroan dengan tuntutan melebihi dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dimana dalam perkara-perkara yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan tersebut, Perseroan berstatus sebagai Tergugat. Daftar perkara tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 642/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel yang diajukan oleh PT Putera Daya Perkasa kepada Perseroan. Objek perkara adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan terkait aset perseroan berupa Gardu Induk 150 KV yang terletak di Kawasan Industri Pasar Kemis. Total nilai gugatan adalah sebesar Rp86.194 juta dan imateriil sebesar Rp18.000 juta. Pada tanggal 4 April 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PT Putera Daya Perkasa untuk sebagian dan menyatakan Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, PT Putera Daya Perkasa mengajukan banding, dimana dalam putusan perkara No. 636/PDT/2019/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding tersebut dan turut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
- Sengketa perdata di International Chamber of Commerce (ICC) dengan nomor perkara 23895/PTA, tanggal 29 Agustus 2018, yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas kepada Perseroan dan PC Muriah Ltd. Objek perkara terkait dengan kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok. Nilai gugatan adalah USD 8,853,849.22 dan USD 20,602,614.78. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di ICC.
- Pada tanggal 30 Oktober 2019, Perseroan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2019/PN.Bnr di Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana Perseroan menerima gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Adi Wijaya (Penggugat) atas somasi yang dilayangkan oleh Perseroan terhadap Penggugat. Pada pokoknya, somasi tersebut meminta Penggugat untuk segera mengosongkan tanah di jalur emergency spillway PLTA Mrica yang diduduki oleh Penggugat, sementara Penggugat telah memiliki izin untuk melakukan usaha pemecah batu pada lokasi tersebut. Dalam hal ini, Penggugat menuntut Perseroan membayar kerugian materiil sebesar Rp118.500.000.000, dan kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000.000. Perkara ini telah diputus pada tingkat pertama, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut.
- Sengketa perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor perkara 41055/V/ARB-BANI/2018 yang diajukan oleh Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT IP, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Perseroan, dan telah terdaftar pada tanggal 31 Mei 2018. Objek perkara ialah wanprestasi yang dilakukan PT IP atas Perjanjian Sewa, Fasilitas, dan Penyaluran Bahan



Bakar Gas untuk PLTGU Priok No. 56/PJ/061/IP/2009, tertanggal 21 April 2009, sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 25 Agustus 2009, Addendum II tanggal 3 Oktober 2012, dan Addendum III tanggal 31 Agustus 2015. Perkara ini telah memperoleh putusan akhir, yakni Putusan No. 41055/V/ARB-BANI/2018, tanggal 16 Juli 2019, dengan petitum mengabulkan permohonan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta untuk sebagian dan mengharuskan PT IP untuk membayar ganti rugi sebesar Rp172.237 juta kepada Konsorsium Kinarya Liman Margaseta. PT IP kemudian mengajukan permohonan pembatalan Putusan No. 41055/V/ARB-BANI/2018, yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 754/PDT.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL. Perkara dimaksud telah mendapat putusan akhir yakni Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Desember 2019, yang memenangkan PT IP sebagai Pemohon. Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kemudian mengajukan banding kepada Mahkamah Agung atas Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel. dan atas banding tersebut telah terbit Putusan No. 460B/Pdt.Sus-Arbt/2020 dengan petitum menerima permohonan banding Konsorsium Kinarya Liman Margaseta yakni membatalkan Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/ PN.Jkt.Sel dan menguatkan Putusan No. 41055/v/ARB-BANI/2018 yang pada pokoknya menghukum dan memerintahkan PT IP untuk membayar ganti rugi sebesar Rp172.237 juta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT IP masih menunggu salinan resmi Putusan No. 460B/Pdt.Sus-Arbt/2020 dan berencana untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu melakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Selain perkara material yang dihadapi oleh Perseroan di atas, Entitas Anak sedang menghadapi perkara sebagai berikut yang bersifat material bagi masing-masing Entitas Anak tersebut

- Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 385/PDT.G/2019/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT Ika Arta Sukses Sentosa sebagai Penggugat kepada Benetech Inc sebagai Tergugat, dengan PT IP sebagai Turut Tergugat II. Gugatan ini adalah terkait wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Subcontract Agreement dan Purchase Order No. 600-8992, tanggal 17 Januari 2018, yang diikat oleh Penggugat dan Tergugat, yang memiliki hubungan dengan Perjanjian terkait Revitalisation of Dust Suppression System Untuk UJP PLTU Banten 1 Suralaya, UJP PLTU Banten 2 Labuan, dan UJP PLTU Banten 3 Lontar No. 052.PJ/LOG-CDB/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang diikat oleh IP. Kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Rp640.898.436,50 dan kerugian immaterial sejumlah Rp 14.400.000.000. Adapun dalam gugatannya, Penggugat meminta agar PT IP sebagai Turut Tergugat II untuk memblokir dan/ atau tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Telah terbit Putusan Sela No. 385/PDT.G/2019/PN.JKT.PST yang pada intinya memenangkan PT IP dengan petitum mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Penggugat belum menyatakan akan mengajukan banding.
- Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 547/Pdt.G/2019/PN.Bdg yang diajukan oleh Mochammad Rasyid Ridlo sebagai Penggugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung dan PT IP. Gugatan ini adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang barang milik PLTP Kamojang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung yang pelaksanaannya dirasa merugikan Penggugat. Kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat adalah Rp300.000.000 dan kerugian immaterial sejumlah Rp 1.000.000.000. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara sedang dalam tahap pembacaan duplik.
- Perkara perdata di Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2020/PT.BDG yang diajukan IR. Ronald Manurung, Maudin Pangaribuan, dan Anno Widodo Damanik kepada Perseroan cq. PT PJB dan tergugat lainnya, dimana PT PJB bertindak sebagai Tergugat II. Perkara ini mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah seluas 11.918 m² yang telah dipergunakan oleh Perseroan dan PT PJB Unit Pembangkit Muara Tawar. Perkara tersebut telah diputuskan pada tanggal 23 Maret 2020, dengan putusan menolak banding Para Penggugat untuk seluruhnya. Adapun saat ini perkara tersebut masih dalam proses kasasi yang diajukan oleh para penggugat ke Mahkamah Agung.
- Perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus dengan nomor perkara 377/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel di mana HP berkedudukan sebagai Tergugat II bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Perseroan cq. Manager PLN UP Tiga Bulungan Jakarta Selatan sebagai Tergugat I (Para Tergugat) melawan Davit Airlanto, SH sebagai Penggugat. Objek Perkara adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat



dari peristiwa kenaikan tarif listrik yang ditujukan pada Penggugat. Kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.807.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp9.999.999.999. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

13. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 11 (sebelas) Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang pada masing-masing Anak Perseroan dan Perusahaan Asosiasi Perseroan memiliki Hak Suara yang sama dengan presentase kepemilikan :

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	% Kepemilikan*	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kontribusi terhadap			
						Total Aset ⁽¹⁾⁽³⁾	Total Liabilitas ⁽¹⁾⁽³⁾	Pendapatan ⁽²⁾⁽³⁾	Labanya Sebelum Pajak ⁽²⁾⁽³⁾
1	PT Indonesia Power ("PT IP")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	11,97%	1,18%	14,91%	38,49%
2	PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PT PJB")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	10,93%	1,44%	13,92%	36,81%
3	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PT PLN Batam")	Penyedia tenaga listrik	99,99%	2000	Beroperasi	1,26%	1,86%	1,90%	4,40%
4	PT Indonesia Comnets Plus ("PT ICON+")	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi	99,99%	2000	Beroperasi	0,23%	0,16%	0,89%	2,70%
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PT PLNE")	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi	99,90%	2003	Beroperasi	0,07%	0,08%	0,35%	0,51%
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PT PLNT")	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi, pelayanan <i>billman</i>	99,97%	2004	Beroperasi	0,03%	0,05%	0,24%	0,17%
7	Majapahit Holding BV ("MH")	Lembaga keuangan	100,00%	2006	Beroperasi	0,68%	1,59%	0,002%	0,02%
8	PT PLN Batubara ("PT PLN Batubara")	Perdagangan batubara	99,99%	2009	Beroperasi	0,44%	0,81%	6,11%	2,40%
9	PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PT PLNGG")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	2010	Beroperasi	0,02%	0,04%	0,003%	0,01%
10	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("PT BAa")	Pelayaran	99,99%	2011	Beroperasi	0,11%	0,17%	0,57%	0,49%
11	PT Haleyora Power ("PT HP")	Jasa ketenagalistrikan	99,99%	2013	Beroperasi	0,06%	0,04%	0,88%	0,94%

(1) Pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

(3) Sebelum eliminasi

nm : menjadi nol karena pembulatan



Berikut adalah keterangan mengenai Entitas Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019:

12.1 PT Indonesia Power (“PT IP”)

a. Pendirian

PT IP yang semula bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa - Bali I atau disingkat PT PLN PJB I berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT PLN PJB I No. 15 tanggal 3 Oktober 1995, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-12496.HT.01.01-TH.95 tanggal 3 Oktober 1995, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Oktober 1995 dibawah No. 1805/1995; serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9249 tanggal 7 November 1995, Tambahan No.89.

Pendirian PT PLN PJB I tersebut diatas telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat No. S-316/MK.16/1995 tanggal 11 Agustus 1995 dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia berdasarkan Surat No. 3206/80/SJ.K/95 tanggal 30 Agustus 1995 tentang Persetujuan Pendirian Entitas Anak Perseroan.

PT PLN PJB I berubah nama menjadi PT Indonesia Power berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Agustus 2000, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-19571.HT.01.04.TH.2000 tanggal 1 September 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1136/RUB 09.03/XI/2000 tanggal 17 November 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 2001, Tambahan No. 2428.

Anggaran dasar PT IP terakhir adalah sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT IP untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54, tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0005319.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020, dan telah didaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0012577.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 21 Januari 2020.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar PT IP, maksud dan tujuan PT IP adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT IP menjalankan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7, tanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-30271, tanggal 25 November 2010, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0085677.AH.01.09. Tahun 2010, tanggal 25 November 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT IP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Uraian	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri 1	1	500	≤0,01
Seri 2	19.999.999.999	9.999.999.999.500	≥99,99
Jumlah Modal Dasar	20.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri 1			
Perseroan	1	500	≤0,01
Seri 2			
Perseroan	5.215.647.598	2.607.823.799.000	≥99,99
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	500	≤0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.215.647.600	2.607.823.800.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri 1	-	-	≤0,01
Seri 2	14.784.352.400	7.392.176.200.000	≥99,99
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.784.352.400	7.392.176.200.000	100,00

d. Susunan pengurusan dan pengawasan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 07, tanggal 10 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341065, tanggal 11 Agustus 2020, dan didaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0131284.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, susunan Dewan Komisaris PT IP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Mohamad Oemar
Komisaris	: FX Sutijastoto
Komisaris	: Munir Ahmad
Plt. Komisaris	: Miftahul Jannah
Komisaris	: Ronaldus Mujur
Komisaris Independen	: Ulil Abshar Hadrawi

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 07, tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0273927, tanggal 3 Juli 2020, dan didaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0105929.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 3 Juli 2020, susunan Direksi PT IP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Plt. Direktur Utama	: Muhamad Ahsin Sidqi
Plt. Direktur Operasi -1	: M. Hanafi Nur Rifai
Plt. Direktur Operasi - 2	: Bambang Anggono
Plt. Direktur Pengembangan dan Niaga	: Bagus Setiawan*)
Plt. Direktur Keuangan	: Khusnul Mubien
Plt. Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	: Bagus Setiawan

Keterangan:

*) Bapak Fahmi El Amruzi D telah meninggal dunia. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tentang Penetapan Pelaksana Tugas Sementara Direktur Pengembangan dan Niaga IP No. 014.SK/DEKOM-IP/2020, tanggal 15 Agustus 2020, Dewan Komisaris sepakat dengan suara bulat menetapkan Bagus Setiawan sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Pengembangan dan Niaga IP mulai tanggal 18 Agustus 2020.



e. Ikhtisar keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT IP yang berasal dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan PT IP pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Network auditor independen berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dan laporan keuangan PT IP pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Network, akuntan publik independen.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah aset	189.705.596	196.133.125
Jumlah liabilitas	7.712.397	8.095.689
Jumlah ekuitas	181.993.199	188.037.436

Jumlah aset PT IP pada 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp189.705.596 juta atau menurun sebesar 3,28% dari Rp196.133.125 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan aset disebabkan oleh penurunan piutang usaha – pihak berelasi dari Rp29.109.066 juta menjadi Rp24.846.959 juta yaitu Rp4.262.107 juta.

Jumlah liabilitas PT IP pada 31 Desember 2019 adalah Rp7.712.397 juta atau menurun sebesar 4,73% dibandingkan dengan Rp8.095.689 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan liabilitas terutama disebabkan penurunan utang usaha – pihak ketiga dari Rp2.617.956 menjadi Rp1.995.435 yaitu Rp622.521 juta.

Jumlah Ekuitas PT IP pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp181.993.199 juta atau turun sebesar 3,21% dari Rp188.037.436 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada saldo laba tidak ditentukan oleh penggunaannya dari Rp37.604.756 juta menjadi Rp32.231.693 juta yaitu Rp5.373.063 juta.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan usaha	42.583.849	43.038.300
Beban Usaha	33.183.189	37.776.434
Laba tahun berjalan	7.370.309	3.501.624
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	6.695.271	(17.871.452)

Pendapatan usaha PT IP menurun sebesar Rp454.451 juta atau sebesar 1,06% menjadi sebesar Rp42.583.849 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp43.038.300 juta pada tahun 2018. Penurunan tersebut terutama karena penurunan pendapatan dari konsesi jasa dari Rp15.292.014 juta menjadi Rp14.860.732 juta yaitu Rp431.282 juta.

Beban usaha PT IP menurun sebesar Rp4.593.245 juta atau sebesar 12,16% menjadi sebesar Rp33.183.189 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp37.776.434 juta pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh bahan bakar dan pelumas dari Rp16.232.067 juta menjadi Rp12.614.914 juta yaitu Rp3.617.153 juta.



Laba tahun berjalan PT IP naik sebesar Rp3.868.685 juta atau sebesar 110,48% menjadi sebesar Rp7.370.309 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp3.501.624 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan pemakaian bahan bakar dan pelumas dari Rp16.232.067 juta menjadi Rp12.614.914 juta yaitu Rp3.617.153 juta.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PT IP meningkat sebesar Rp 24.566.723 juta atau sebesar 137,46% menjadi sebesar Rp6.695.271 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp(17.871.452) juta pada tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari (Rp17.873.613 juta) menjadi Rp6.690.251 juta atau meningkat sebesar Rp24.563.864 juta.

f. Penyertaan pada perusahaan lain

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial
PT Cogindo Daya Bersama	Jakarta	<i>Cogeneration</i> , pemasok energy, jasa pelayanan energy dan manajemen	99,99%	1999
PT Artha Daya Coalindo	Jakarta	Perdagangan dan jasa pengangkutan batubara	80,00%	1998
PT Indo Ridlatama Power	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Pembangkitan tenaga listrik	90,00%	2018
PT Putra Indotenaga	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi	99,99%	2016
PT Indo Pusaka Berau	Berau, Kalimantan Timur	Pembangkit tenaga listrik	46,53%	2005
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring <i>supply chain</i> dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan	49,00%	2018
PT Perta Daya Gas	Jakarta	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi LNG	35,00%	2015

12.2 PT Pembangkitan Jawa-Bali (“PT PJB”)

a. Pendirian

PT PJB yang semula bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa – Bali II atau disingkat PT PLN PJB II berkedudukan di Surabaya dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PT PLN PJB II) No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-12495. HT.01.01-TH.95, tanggal 3 Oktober 1995, didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Oktober 1995, di bawah No. 1616/1995 dan No. 1617/1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9299.

Pendirian PT PLN PJB II tersebut diatas telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham PT PLN (Persero) berdasarkan Surat No. S-316/MK.16/1995, tanggal 11 Agustus 1995, dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia berdasarkan Surat No. 3206/80/SJ.K/95, tanggal 30 Agustus 1995, tentang Persetujuan Pendirian Entitas Anak PT PLN (Persero).

Selanjutnya PT PLN PJB II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9, tanggal 3 Agustus 2000, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan keputusan No. C-21100.HT.01.04. TH.2000, tanggal 22 September 2000, dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kota Surabaya di bawah No. 628/BH.13.01/PEB/2005 pada tanggal 25 Februari 2005.



Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar PT PJB tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar PT PJB terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 6 September 2010, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10-27843, tanggal 2 November 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079219.AH.01.09, tanggal 2 November 2010, serta diumumkan dalam BNRI No. 58, tanggal 20 Juli 2012, Tambahan No. 1764/L.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar PT PJB, maksud dan tujuan PT PJB ialah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip Indonesia dan niaga yang sehat dengan menetapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT PJB menjalankan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 58, tanggal 26 April 1999, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris No. C-UM.02.01.7485, tanggal 28 Juni 2004, dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kota Surabaya di bawah No. 785/R.13.IX/PER/2005 tanggal 25 Desember 2005, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PJB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri 1	1	500	≤0,01
Seri 2	23.999.999.999	11.999.999.999.500	≥99,99
Jumlah Modal Dasar	24.000.000.000	12.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri 1			
Perseroan	1	500	≤0,01
Seri 2			
Perseroan	5.999.999.998	2.999.999.999.000	≥99,99
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	500	≤0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000.000	3.000.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri 1	-	-	≤0,01
Seri 2	18.000.000.000	9.000.000.000.000	≥99,99
Jumlah Saham Dalam Portepel	18.000.000.000	9.000.000.000.000	100,00

d. Susunan pengurusan dan pengawasan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 03 tanggal 5 April 2019, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0193836 tanggal 9 April 2019 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058233.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 April 2019, susunan Dewan Komisaris terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Komisaris Utama	: Sriyono Dwidjo Siswoyo
Komisaris	: Defy Indiyanto Budiarto
Komisaris	: Sunarsip
Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris	: Jisman Prada Hutajulu
Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris	: Benny Maradong Mardongan Marbun
Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris	: Hendra Iswahyudi

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PJB No. 19, tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0366073, tanggal 26 Agustus 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0139617.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, susunan Direksi PT PJB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Iwan Agung Firstantara
PLT Direktur SDM dan Administrasi	: Karyawan Aji
PLT Direktur Keuangan	: R. Rawan Insani
PLT Direktur Pengembangan & Niaga	: Iwan Purwana
PLT Direktur Operasi – 1	: Sugiyanto
PLT Direktur Operasi – 2	: Rachmannoe Indarto

e. Ikhtisar keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT PJB yang berasal dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan PT PJB pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Network auditor independen berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dan laporan keuangan PT PJB pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Network, akuntan publik independen.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah aset	173.223.365	174.390.907
Jumlah liabilitas	9.450.270	7.382.220
Jumlah ekuitas	163.773.095	167.008.687

Jumlah aset PT PJB pada 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp173.223.365 juta atau turun sebesar 0,67% dari Rp174.390.907 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan aset terutama disebabkan oleh penurunan pada aset tetap sebesar Rp1.008.928 juta.

Jumlah liabilitas PT PJB pada 31 Desember 2019 adalah Rp9.450.270 juta atau naik sebesar 28,01% dibandingkan dengan Rp7.382.220 juta pada 31 Desember 2018. Kenaikan liabilitas terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas kepada pemegang saham dari Rp209.272 juta menjadi Rp1.668.986 juta yaitu Rp1.459.714 juta.



Jumlah ekuitas PT PJB pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp163.773.095 juta atau turun sebesar 1,94% dari Rp167.008.687 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya dari Rp33.515.140 juta menjadi Rp30.754.064 juta yaitu Rp2.761.076 juta.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan usaha	39.757.950	40.821.026
Beban Usaha	31.062.892	34.334.181
Laba tahun berjalan	6.663.322	5.917.432
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	6.172.474	(15.170.792)

Pendapatan usaha PT PJB menurun sebesar Rp1.063.076 juta atau sebesar 2,60% menjadi sebesar Rp39.757.950 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp40.821.026 juta pada tahun 2018. Penurunan pendapatan usaha disebabkan oleh menurunnya penjualan tenaga listrik dari Rp34.757.316 juta menjadi Rp33.681.317 juta yaitu Rp1.075.999 juta.

Beban Usaha PT PJB menurun sebesar Rp3.271.289 juta atau sebesar 9,53% menjadi sebesar Rp31.062.892 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp34.334.181 juta pada tahun 2018. Penurunan beban usaha disebabkan oleh menurunnya pembelian bahan bakar dan pelumas dari Rp22.323.942 juta menjadi Rp18.830.297 juta yaitu Rp3.493.645 juta.

Laba tahun berjalan PT PJB meningkat sebesar Rp745.890 juta atau sebesar 12,60% menjadi sebesar Rp6.663.322 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp5.917.432 juta pada tahun 2018. Peningkatan laba tahun berjalan disebabkan oleh karena penurunan yang signifikan pada pembelian bahan bakar dan pelumas.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan PT PJB meningkat sebesar Rp21.343.266 juta atau sebesar 140,69% menjadi sebesar Rp6.172.474 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp (15.170.792) juta pada tahun 2018. Peningkatan total penghasilan komprehensif tahun berjalan disebabkan oleh defisit revaluasi asset tetap yang mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp(29.212.914) menjadi Rp (74.511) atau mengalami peningkatan (surplus) revaluasi sebesar Rp29.138.403.

f. Penyertaan pada perusahaan lain

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)
PT PJB Services	Sidoarjo	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik, dan pembangunan atau pemasangan peralatan ketenagalistrikan	98,00%	2001	102.900.000	102.900.000.000
PT Rekadaya Elekrika	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sector ketenagalistrikan	98,90%	2000	710.709.100	710.709.100.000
PT Navigat Innovative Indonesia	Jakarta	Perdagangan, Konstruksi, Pertambangan, dan pertanian	72,97%	2002	99.774	99.774.000.000
PT PJB Investasi	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan	99,99%	2015	4.183.558	4.183.558.000.000



Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Jakarta	Perdagangan baran dan jasa, enjiniring, <i>supply chain</i> dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan	51,00%	2017	76.500	76.500.000.000
PT Sumber Segara Primadaya	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap	49,00%	2004	437.501	437.501.000.000
PT Bajradaya Sentranusa	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga air	36,61%	1995	388.516	388.516.000.000
PT Bukit Pembangkit Innovative	Lahat	Pembangkit listrik tenaga uap	29,15%	2006	332.127	332.127.000.000
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Jepara, Jawa Tengah	Operasi dan pemeliharaan	49,00%	2010	12.250	11.088.700.000

12.3 Entitas Asosiasi

Entitas Asosiasi	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Presentasi Penyertaan	
				2019 (%)	2018 (%)
PT Geo Dipa Energi (GDE)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik	2002	6,67	6,67
PT Mitra Energi Batam (MEB)	Batam	Pembangkit tenaga listrik	2004	30,00	30,00
PT Indo Pusaka Berau (IPB)	Berau	Perdagangan Batu Bara	2005	46,53	46,53
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik	2006	49,00	49,00
PT Dalle Energy Batam (DEB)	Batam	Pembangkit tenaga listrik	2013	20,00	20,00
PT Tanjung Kasam Power (TJK)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik	2012	10,00	10,00
PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik	2013	45,00	45,00
PT PBM Adhiguna Putera (PBM AP)	Jakarta	Pelayaran	1987	25,00	25,00
PT Musi Mitra Jaya (MMJ)	Palembang	Transportasi Batubara	2011	25,50	-
PT Sriwijaya Bara Logistic (SBL)	Musi Banyuasin	Transportasi Batubara	2014	25,50	-

B. KEGIATAN USAHA

Umum

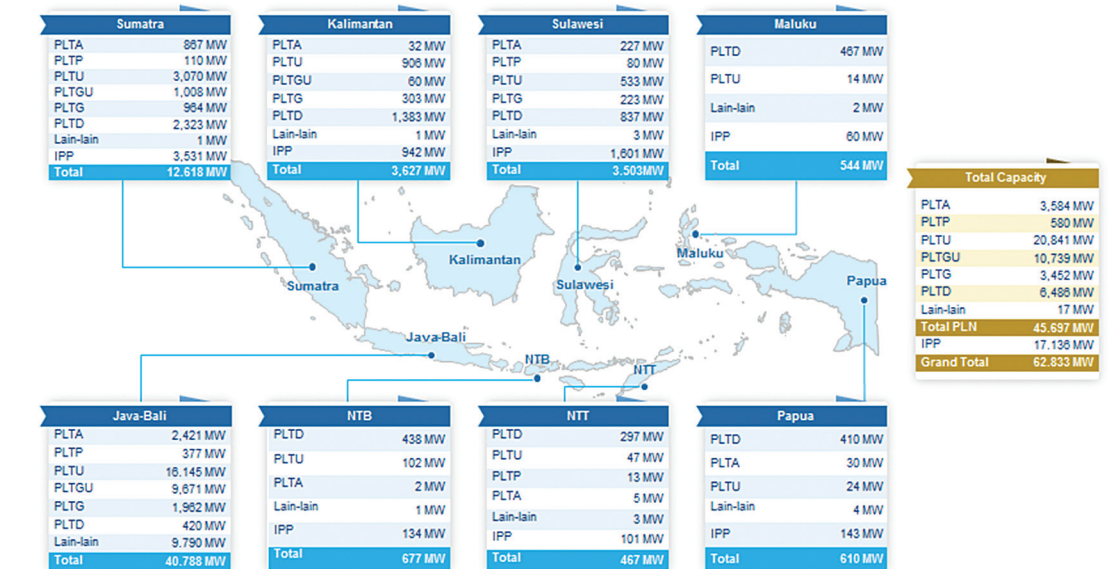
Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 41.640 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan IPP yang menandatangani PJBL dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 83,97% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 45.591 MW dan melayani sekitar 75,7 juta pelanggan.



Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 5.987 pembangkit tenaga listrik yang meliputi 6.723 unit pembangkitan listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menandatangani 75 PJBL material dengan IPP yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 13.195 MW.

Dalam 2 tahun terakhir (2017-2019) sekitar 7 juta rumah tangga baru telah menikmati listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,35% pada tahun 2017 menjadi 98,89% pada akhir tahun 2019 dimana PLN berkontribusi sebesar 95,75%. Peningkatan rasio tersebut ditopang oleh program listrik perdesaan dan megaprojek 35.000 MW termasuk listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah telah menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% pada tahun 2020. Bagi PLN, tugas ini adalah tugas mulia untuk menerangi desa-desa di daerah terdepan, terluar dan tertinggal, di antaranya bahkan ada yang belum pernah menikmati listrik sejak Indonesia merdeka.

Jaringan Pembangkitan



Sumber: Perseroan, 2019

Perseroan mengoperasikan 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sekitar 58% dari total penduduk di Indonesia (sekitar 152.4 juta orang) tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 62% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada tahun 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 58.959 km dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 979.855km.

Harga jual listrik Perseroan didasarkan pada tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif listrik diatur oleh Permen ESDM No. 28/2016 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 18/2017. Sesuai dengan Perpres No. 8/2011, Pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang berlaku surut dari tanggal 1 Juli 2010. Sebagai akibat dari unjuk rasa oleh beberapa pelanggan Perseroan, terutama pelanggan industri, Pemerintah memutuskan untuk membatasi kenaikan tarif maksimum pada 18,0%, efektif sampai dengan 31 Desember 2010. Sejak tanggal 1 Januari 2011, batas atas untuk kenaikan tarif tidak lagi berlaku dan Perseroan menagih pelanggan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Perpres No. 8/2011.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam beberapa waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dimana tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan



Perseroan menjalankan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation* atau PSO) di bawah UU BUMN, Pemerintah diwajibkan untuk mensubsidi Perseroan untuk selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual oleh Perseroan dengan harga jual listrik yang dapat dipungut sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Subsidi ini meliputi margin PSO sebesar 7% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai belanja modal. Mekanisme subsidi diatur dalam PMK No. 44/PMK.02/2017.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM, dan sesuai dengan Perpres No. 71/2016, Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP I dimana Pemerintah awalnya menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 dimana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Amandemen terakhir pada tahun 2014 merevisi kapasitas proyek Riau dan meminta menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah, dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan yang bermasalah dan kontraktor EPC, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 30 lokasi dari 34 lokasi yang direncanakan dengan kapasitas sebesar 9.697 MW atau setara 97,7% dari total kapasitas yang direncanakan telah beroperasi. Empat lokasi lainnya mewakili sekitar 2,3% dari total kapasitas (230 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2020 (180 MW), tahun 2021 (20 MW), dan tahun 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor

Sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014, Pemerintah kembali menugaskan Perseroan tahap kedua program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP II untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di Indonesia di luar penyelesaian FTP I. Sama dengan FTP I, Perpres No. 194/2014 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dimana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 11.629 MW. Pada tanggal 31 Desember 2019, dari total kapasitas 15.074 MW di bawah FTP II, delapan proyek Fast Track Program II (termasuk IPP) yang terdiri dari total kapasitas 2.057 MW, atau sekitar 12% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW, beroperasi; 5.006 MW (atau 38% dari total kapasitas yang direncanakan 15.074 MW) berada di tahap konstruksi; 2.695 MW (atau 21% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap penutupan keuangan; dan 5.316 MW (atau 29% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap perencanaan dan pengadaan. Semua proyek di bawah FTP II diharapkan beroperasi pada tahun 2028. Perseroan saat ini pada berbagai tahapan perencanaan dan negosiasi kontrak EPC terkait dengan sisa lokasi yang ditugaskan. Target penyelesaian FTP II telah secara formal diperpanjang oleh Pemerintah dari tahun 2014 menjadi tahun 2028. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM dan tanggungan subsidi Pemerintah serta memenuhi permintaan listrik di Indonesia yang terus bertumbuh.



Perseroan mencatatkan pendapatan dan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp285.640.589 juta dan Rp4.322.130 juta. Volume listrik yang disalurkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,7% menjadi 244.665 GWh dari 233.778 GWh. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 18,5 jam per pelanggan per tahun dan 11,51 pemadaman per pelanggan per tahun.

1. SEJARAH PERSEROAN

Industri ketenagalistrikan untuk kepentingan umum di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1800, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan penyedia tenaga listrik ini kemudian mendirikan perusahaan untuk kepentingan umum, N.V. NIGM. Setelah kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945, Perseroan mengambil kendali atas perusahaan-perusahaan listrik ini. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno mendirikan Jawatan Listrik dan Gas dengan total kapasitas pembangkitan sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara ("BPU-PLN"), yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas (jenis bahan bakar yang berasal dari batubara).

Pada tanggal 13 Mei 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 (dua) perusahaan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) ("PERUM PLN") yang mengelola tenaga listrik dan PGN yang mengelola gas. Pada saat itu, total kapasitas pembangkitan Perseroan hanya 300 MW.

Pada tahun 1972, Pemerintah telah mengubah status Perseroan dari Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Pada tahun 1985, berlakunya UU No. 15/1985, Perseroan memberikan Perseroan kuasa eksklusif untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Indonesia. Pada tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23/1994, Perseroan menunjuk PERUM PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("PKUK").

Pada tahun 1989, Pemerintah membuka usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk sektor swasta. Seiring dengan kebijakan ini, pada bulan Juli 1994, Perseroan mengubah statusnya dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pada tahun 1998, sebagai respon terhadap krisis keuangan di Asia, Perseroan terlibat dalam negosiasi dengan IPP untuk merestrukturisasi PJBL, dan menyelesaikan restrukturisasi pada tahun 2003 yang mengakibatkan penghapusbukuan, pembayaran kas secara parsial, dan konversi utang usaha menjadi utang jangka panjang. Sebagai bagian dari skema restrukturisasi, Perseroan menegosiasikan ulang syarat dan ketentuan utama dan periode PJBL. Perseroan menyelesaikan restrukturisasi beberapa pinjaman subordinasi dari Pemerintah pada tahun 2001.

Pada tahun 2003, Pemerintah memberlakukan UU BUMN dimana BUMN yang menerima penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dapat menerima kompensasi dari Pemerintah atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel.

Pada tahun 2006, Pemerintah memperkenalkan FTP I, sesuai dengan Perpres No. 71/2006, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014, yang memberikan penugasan kepada Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di 42 lokasi.

Pada tanggal 23 September 2009, Pemerintah menetapkan UU No. 30/2009. Sebelum diberlakukannya UU No. 30/2009, penyediaan tenaga listrik di Indonesia merupakan tanggung jawab negara dan dilaksanakan berdasarkan arahan dari Pemerintah. Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik terintegrasi berdasarkan PKUK yang diberikan oleh Pemerintah. Berdasarkan UU No. 30/2009, PKUK Perseroan menjadi tidak berlaku dan Perseroan dianggap telah memiliki IUPTL. Pada tanggal 30 September 2011, Perseroan memperoleh Izin Usaha Penyediaan



Tenaga Listrik dengan wilayah usaha meliputi seluruh wilayah di Indonesia yang berlaku sampai dengan 2046 sesuai dengan perpanjangan yang diberikan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM pada tanggal 27 September 2016.

Pada tahun 2010, Pemerintah memperkenalkan FTP II, sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014 dan ditegaskan dalam Permen ESDM No. 15/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 1/2012, Permen ESDM No. 21/2013, Permen ESDM No. 32/2014 dan Permen ESDM No. 40/2014, yang memberikan penugasan kepada Perseroan untuk membangun 5 (lima) PLTP, 4 (empat) PLTA, 6 (enam) PLTU berbahan bakar batubara dan 1 (satu) PLTG beserta saluran transmisi yang diperlukan.

Pada tahun 2015, Pemerintah meluncurkan program pembangunan strategis nasional, dikenal dengan Program 35.000 MW. Program ini menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Perpres No. 4/2016, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 14/2017 dan telah diterbitkan dalam rangka melaksanakan program ini. Perseroan telah diberikan tugas untuk melaksanakan Program 35.000 MW bersama-sama dengan sektor swasta melalui skema IPP. Pada awal tahun 2017, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“RUPTL”) 2017-2026, Pemerintah menyesuaikan target tanggal penyelesaian dan target kapasitas dalam program ini menjadi 29.000 MW di akhir tahun 2019 dan 35.000 MW di akhir tahun 2021. Perseroan telah menyelaraskan kembali rencananya dalam Program 35.000 MW berdasarkan target penyelesaian dan target kapasitas yang telah disesuaikan tersebut.

2. KEGIATAN USAHA DAN PENGORGANISASIAN

1. Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan beroperasi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Perseroan melaksanakan kegiatan usaha melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 3 Unit Pembangkitan, 3 Unit Transmisi, 1 Unit Pusat Penyaluran, 18 UIP dan 7 Unit Pusat/Jasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dibagi menjadi beberapa kategori:

Kegiatan Perencanaan

Kegiatan perencanaan pada dasarnya dilakukan oleh Perseroan yang mencakup antara lain perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi secara umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam kegiatan perencanaan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, Perseroan menetapkan pokok-pokok kebijakan makro, sedang rencana rincinya dilaksanakan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

Kegiatan Pembangunan

Kegiatan pembangunan yang meliputi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk dilaksanakan oleh satuan organisasi konstruksi Proyek Induk, yang dikenal dengan UIP. Adapun satuan organisasi Proyek Induk yang ada sampai saat ini sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi tanggal 3 Mei 2016 adalah 18 UIP, meliputi :

- UIP Pembangkit Sumatra
- UIP Sumatra Bagian Utara
- UIP Sumatra Bagian Tengah
- UIP Sumatra Bagian Selatan
- UIP Interkoneksi Sumatra Jawa
- UIP Jawa Bagian Barat
- UIP Jawa Bagian Tengah I
- UIP Jawa Bagian Tengah II
- UIP Jawa Bagian Timur dan Bali I
- UIP Jawa Bagian Timur dan Bali II
- UIP Kalimantan Bagian Barat

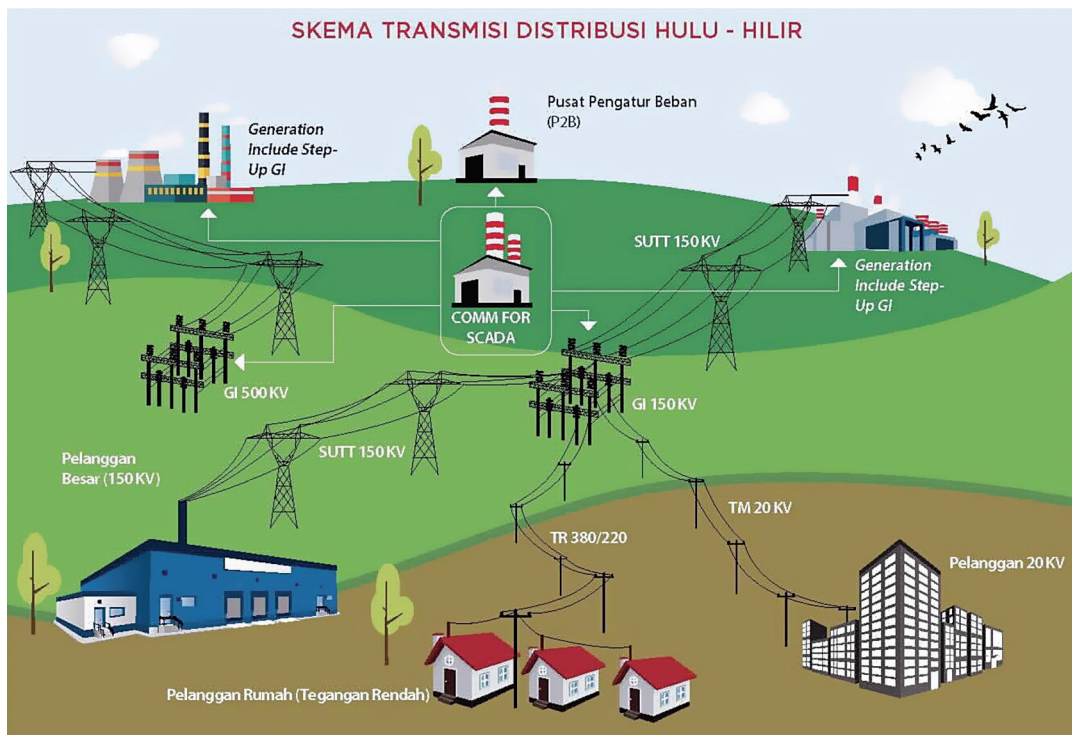
- UIP Kalimantan Bagian Tengah
- UIP Kalimantan Bagian Timur
- UIP Sulawesi Bagian Utara
- UIP Sulawesi Bagian Selatan
- UIP Nusa Tenggara
- UIP Maluku
- UIP Papua

Kegiatan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Sejak tahun 2003 pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN dilaksanakan oleh Pemerintah c.q Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Proyek pembangunan yang dilaksanakan saat ini meliputi *Fast Track Program* atau FTP1, *Fast Track Program* II atau FTP II, dan program penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW serta jaringan transmisi sepanjang 46.000 km.

Kegiatan Pengusahaan/Operasi

Proses kegiatan operasi untuk produksi dan penyaluran energi listrik digambarkan sebagai berikut:



- Energi listrik diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik Perseroan yang terdiri dari campuran (mixed) beberapa jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap ("PLTU") dengan bahan bakar batubara, gas alam atau bahan bakar minyak ("BBM"), Pusat Listrik Tenaga Gas Uap ("PLTGU - *Combined Cycle*") dengan bahan bakar gas alam atau BBM, Pusat Listrik Tenaga Air ("PLTA") yang menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin, Pusat Listrik Tenaga Gas ("PLTG - *gas turbine*") dengan bahan bakar gas alam atau BBM, Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") yang menggunakan tenaga uap panas bumi, Pusat Listrik Tenaga Diesel ("PLTD") dengan bahan bakar BBM dan pusat listrik tenaga EBT.
- Di samping itu, Perseroan membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu PLTU dengan bahan bakar batubara, PLTGU - *Combined Cycle* dengan bahan bakar gas alam atau BBM, PLTA yang menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin, PLTP yang menggunakan tenaga uap panas bumi dan PLTD dengan bahan bakar BBM.



- Energi listrik yang dihasilkan pusat pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui Jaringan Transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV) dan Tegangan Tinggi (150 kV dan 70 kV). Makin besar daya yang akan disalurkan dengan ukuran kawat transmisi yang sama, diperlukan tingkat tegangan yang lebih tinggi. Di gardu induk (500 kV atau 150 kV), tingkat tegangan diturunkan untuk dapat didistribusikan kepada pelanggan.
- Untuk pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi (150 kV dan 70 kV) maupun tegangan menengah (20 kV). Untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR).
- Selain itu, Perseroan bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan bahan bakar, operasi dan pemeliharaan pembangkit dengan aman, andal, efisien dan akrab lingkungan dalam perusahaan (setelah proyek selesai dibangun) untuk mengoptimalkan kontribusinya di dalam meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

Kegiatan Riset & Penunjang

Produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan riset dan penunjang meliputi jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik, jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan, jasa konsultasi ketenagalistrikan, jasa pembangunan, pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang), dan jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan. Kegiatan penunjang tersebut saat ini dilaksanakan oleh satuan organisasi penunjang, yaitu: PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Puslitbang) untuk pelaksanaan kegiatan penyelidikan masalah kelistrikan;

- PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk kegiatan pengembangan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan (Pusenlis) untuk studi rekayasa;
- PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan bergerak dalam bidang desain dan rekayasa balik (*reverse engineering*), produksi dan perbaikan peralatan ketenagalistrikan dalam mendukung keandalan peralatan ketenagalistrikan Perseroan;
- PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi untuk memberikan layanan jasa manajemen konstruksi baik secara keseluruhan atau sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi kepada pengguna jasa manajemen konstruksi setelah dilaksanakannya testing dan komisioning secara baik dan benar, terutama untuk konstruksi proyek-proyek besar;
- PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi untuk kegiatan sertifikasi atas hasil produk kelistrikan. Layanan sertifikasi yang diberikan meliputi sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, sertifikasi sistem pengawasan mutu produk peralatan listrik, sertifikasi laik operasi dan komisioning instalasi tenaga listrik, sertifikasi sistem manajemen OHSAS dan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan terkait riset dan pengembangan adalah sebesar Rp488.980 juta dan Rp161.770 juta.

2. PENGORGANISASIAN

Sejalan dengan tantangan bisnis yang semakin kompleks seperti penyelesaian Program 35.000 MW, pencapaian rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 97,4% pada tahun 2019, peningkatan pelayanan serta menyikapi implementasi regulasi UU No. 30/2009, maka Perseroan telah menyusun *roadmap* organisasi yang bersifat efektif, akuntabel dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Perseroan pada saat ini maupun di masa depan.



Dalam pengembangan organisasi Perseroan memperhatikan pembagian peran antara (i) fungsi strategis perusahaan yaitu fungsi yang dilakukan secara terpusat, dimodernisasi dan memberikan dampak efisiensi, serta (ii) fungsi bisnis yang bersifat operasional yang dapat dikelola terintegrasi regional untuk memberikan perbaikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan organisasi.

Roadmap organisasi Perseroan ke depan harus selaras (*aligned*) dan saling mendukung (*synergy*) antara fungsi korporat strategis dan fungsi bisnis regional, sebagai berikut:

- a. Fungsi korporat strategis, mengelola fungsi korporasi secara terpusat dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, standarisasi, investasi dan kendali korporasi menuju perusahaan yang sehat. Fungsi ini kedepan akan dilakukan secara terstandar dan terpusat (sentralisasi), dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tercipta proses kerja yang standar, best practices, dan efektif dan efisien. Adapun fungsi korporat strategis meliputi fungsi:
 - i. Perencanaan korporat: mengelola perencanaan dan pengembangan korporasi keseluruhan.
 - ii. Pengadaan korporat: mengelola investasi capital korporat strategis (capex), trading energi korporat (opex), dan IPP.
 - iii. Sumber Daya Manusia: mengelola pengembangan organisasi dan SDM korporat.
 - iv. Keuangan: mengelola keuangan korporat dan niaga.
 - v. Fungsi pendukung korporat meliputi: pengawasan internal, hukum, manajemen risiko dan kepatuhan, teknologi informasi, dan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE).
- b. Fungsi bisnis regional, mengelola perencanaan dan pengendalian konstruksi, operasi, pelayanan pelanggan dan keuangan regional mulai dari hulu sampai hilir dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan proyek 35.000 MW, meningkatkan kualitas operasi dan pelayanan pelanggan, meratakan beban organisasi, meningkatkan akuntabilitas konstruksi, operasi dan keuangan. Fungsi bisnis regional melakukan transaksi bisnis serta mengukur keberhasilan bisnis (konstruksi, operasi dan keuangan) di regionalnya, yang meliputi karakteristik:
 - i. Melaksanakan proses bisnis secara *end to end*, mulai dari fungsi perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasi dan pelayanan pelanggan di regionalnya.
 - ii. Mengelola Unit Perseroan langsung di bawah komando bisnis regional yang dapat meningkatkan tanggung jawab operasi unit serta mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.
 - iii. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan regional, serta mendorong terciptanya internal benchmarking dalam keberhasilan kinerja di antara bisnis regional. Untuk mendukung keberhasilan Program 35.000 MW, operasi dan pelayanan pelanggan, maka fungsi bisnis regional dibentuk dalam jumlah yang memadai dengan memperhatikan proses bisnis *end to end* dengan keluasan dan karakteristik wilayah, sehingga beban dapat terbagi merata dan dapat dikelola dengan baik.

Pada tanggal 18 Agustus 2015 telah ditetapkan perubahan Struktur Organisasi Perseroan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Tujuan penataan organisasi adalah untuk memperkuat kinerja organisasi dan mendukung kebutuhan bisnis masa mendatang, selaras dan sinergi antara fungsi korporat strategis dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end*, mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel dari hulu ke hilir.

Mulai September 2015, Perseroan melakukan perombakan struktur di tingkat Direktorat dengan membagi manajemen operasional Perseroan per daerah, sesuai pembagian wilayah regional. Masing-masing wilayah regional di Indonesia dipimpin oleh satu Direktur yang akan mengatur seluruh bisnis Perseroan dari hulu ke hilir, dari proses perencanaan, konstruksi, operasi & pemeliharaan sampai dengan pelayanan konsumen/retail. Direktur dari Direktorat dengan fungsi bisnis regional tersebut bertanggung jawab secara keseluruhan dalam suatu wilayah (*end to end*), sedangkan Direktur dari Direktorat penunjang, seperti: Direktur SDM, Direktur Keuangan, bertindak sebagai pendukung (*support*). Perubahan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan kekurangan dari pengelolaan Program FTP yang tidak selesai pada waktunya. Saat ini terdapat 7 (tujuh) wilayah regional yang terbagi menjadi regional Sumatra, regional Jawa bagian barat, regional Jawa bagian tengah, regional Jawa bagian timur & Bali, regional Kalimantan, regional Sulawesi & Nusa Tenggara, dan regional Maluku & Papua.



3. TARIF TENAGA LISTRIK

Tarif tenaga listrik yang dikenakan oleh Perseroan untuk konsumennya diatur berdasarkan Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan terakhir diubah berdasarkan Permen ESDM No. 41/2017. Peraturan tersebut di atas mengatur tarif tenaga listrik yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2018.

Tarif tenaga listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif berdasarkan peruntukan, yaitu :

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah dengan daya 220VA (“S-1/TR”); (ii) golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 200kVA (“S-2/TR”); dan golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200kVA (“S-3/TM”).

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler		Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abodemen per bulan (Rp) Rp14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	(1)	708	708
5.	S-2/TR	2.200 VA	(1)	760	760
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d 200 kVA	(1)	900	900
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	(2)	Blok WBP = $K \times P \times 735$ Blok LWBP = $P \times 735$ kVArh = $925^{(3)}$	-

(1) Diterapkan Rekening Minimum (“RM”) : $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{biaya pemakaian}$.

(2) Diterapkan RM : $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{biaya pemakaian Blok LWBP}$.

Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

(3) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perseroan

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.

- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni : $P = 1$

- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial : $P = 1,3$,

Kategori S-3 bersifat sosial murni dan sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 VA, 900 VA, 900 VA-RTM, 1.300 VA dan 2.200 VA (“R-1/TR”); (ii) golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (“R-2/TR”); dan (iii) golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (“R-3/TR”). Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA (R-1/TR) merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/



TR) merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.

berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2017

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 169 : 360 : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 275 : 445 : 495	605
		900 VA-RTM	26.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 360 : 582 : 692	791
3.	R-1/TR	1.300 VA	(1)		1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	(1)		1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	(1)		1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	(1)		1.352	1.352

(1) Diterapkan $RM : RM1=40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{daya tersambung (kVa)} \times \text{biaya pemakaian}$.

- berlaku mulai 1 Maret sampai dengan 30 April 2017

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 169 : 360 : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 275 : 445 : 495	605
		900 VA-RTM	34.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 470 : 761 : 1.041	1.034
3.	R-1/TR	1.300 VA	(1)		1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	(1)		1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	(1)		1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	(1)		1.352	1.352

(1) Diterapkan $RM : RM1=40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{daya tersambung (kVa)} \times \text{biaya pemakaian}$.



- berlaku mulai 1 Mei 2017

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495		415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495		605
		900 VA-RTM	(¹)		1.352	1.352
3.	R-1/TR	1.300 VA	(¹)		1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	(¹)		1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	(¹)		1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	(¹)		1.352	1.352

(1) Diterapkan $RM : RM1=40$ (Jam Nyala) x daya tersambung (kVa) x biaya pemakaian.

- berlaku Januari – Maret 2019

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495		415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495		605
		900 VA-RTM	(¹)		1.467,28	1.467,28
3.	R-1/TR	1.300 VA	(¹)		1.467,28	1.467,28
4.	R-1/TR	2.200 VA	(¹)		1.467,28	1.467,28
5.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	(¹)		1.467,28	1.467,28
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	(¹)		1.467,28	1.467,28

(1) Diterapkan $RM : RM1=40$ (Jam Nyala) x daya tersambung (kVa) x biaya pemakaian.



- Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA ("B-1/TR"); (ii) golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA ("B-2/TR"); dan golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA ("B-3/TM").

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh	: 254 : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d 108 kWh Blok II : di atas 108 kWh	: 420 : 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	(¹)		966	966
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	(¹)		1.100	1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	(¹)		1.467,28	1.467,28
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	(²)	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74(³)		-

(1) Diterapkan RM : $RM1 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{biaya pemakaian}$.

(2) Diterapkan RM : $RM2 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{biaya pemakaian LWBP}$.
Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

(3) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perseroan

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan industri, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVA ("I-1/TR"); (ii) golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA ("I-2/TR"); (iii) golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA ("I-3/TM"); dan (iv) golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas ("I-4/TT").

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh	: 160 : 395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d 72 kWh Blok II : di atas 72 kWh	: 315 : 405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	(¹)		930	930
4.	I-1/TR	2.200 VA	(¹)		960	960
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	(¹)		1.112	1.112



No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler		Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)	
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	(2)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057 ⁽⁴⁾	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	(2)	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ⁽⁴⁾	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	(3)	Blok WBP dan LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ⁽⁴⁾	-

(1) Diterapkan RM : $RM1 = 40$ (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian.

(2) Diterapkan RM : $RM2 = 40$ (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian LWBP.

(3) Diterapkan RM : $RM3 = 40$ (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian WBP dan LWBP.
Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

(4) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA ("P-1/TR"); (ii) golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA ("P-1/TR"); (iii) golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA ("P-2/TM"); dan (iv) golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah ("P-3/TR").

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler		Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	(1)	1.049	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	(1)	1.076	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	(1)	1.467,28	1.467,28
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	(2)	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ⁽³⁾	-
7.	P-3/TR	-	(1)	1.467,28	1.467,28

(1) Diterapkan RM : $RM1 = 40$ (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian.

(2) Diterapkan RM : $RM3 = 40$ (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian LWBP.

Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

(3) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.



- Tarif tenaga listrik untuk keperluan traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA ("T/TM") diperuntukkan bagi perusahaan kereta listrik.

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM	di atas 200 kVA	30.950 ⁽¹⁾	Blok WBP = $K \times 483$ Blok LWBP = 483 kVArh = 808 ⁽²⁾

(1) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:

- daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;
- daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

(2) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA ("C/TM") diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	⁽¹⁾	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 707$ kVArh = $Q \times 707$ ⁽²⁾

(1) Diterapkan $RM : RM = 40$ (Jam Nyala) \times daya tersambung (kVa) \times biaya pemakaian Blok WBP dan LWBP.

(2) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non komersial ($0,8 \leq Q \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Konsumen komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis dan kawasan perumahan. Konsumen non komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa dan rumah susun sederhana. Kategori konsumen komersial dan non komersial ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi ("L/TR, TM, TT") diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah dan penerangan jalanan umum, traksi, dan curah.

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.644 ⁽¹⁾

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuai hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana disampaikan di atas, yaitu:

- ekspor impor, dengan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik lainnya dan Pemegang Izin Operasi;
- bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- untuk stasiun pengisian listrik umum;
- untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan layanan khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perseroan.

(1) Di dalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai maksimum $N \leq 1,5$.



Penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment)

Penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan untuk golongan pelanggan tertentu. Penyesuaian tarif dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu nilai tukar uang Dolar AS terhadap mata uang Rupiah (kurs), Indonesian Crude Price ("ICP"); dan/atau inflasi. Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik menggunakan data realisasi rata-rata bulan keempat, bulan ketiga dan bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Penyesuaian tarif tenaga listrik berpedoman pada formula :

$$\%TA = \% (K_{\text{kurs}} \times \Delta \text{Kurs}) + \% (K_{\text{ICP}} \times \Delta \text{ICP}) + \% (K_{\text{inflasi}} \times \Delta \text{Inflasi})$$

dengan penjelasan:

TA : *Tarif Adjustment*, yang dihitung berdasarkan perubahan biaya pokok penyediaan tenaga listrik sesuai APBN 2013 terhadap nilai tukar mata uang Dolar AS terhadap Rupiah, ICP dan/atau inflasi.

K_{kurs} : Koefisien perubahan kurs.

ΔKurs : Selisih antara kurs yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.

K_{ICP} : Koefisien perubahan ICP.

ΔICP : Selisih antara ICP yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.

K_{inflasi} : Koefisien perubahan inflasi.

$\Delta \text{Inflasi}$: Selisih antara inflasi yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.

Penyesuaian tarif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 bagi:

- golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah (R-1/TR), dengan daya (a) 1.300 VA; dan (b) 2.200 VA;
- golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah (R-2/TR), dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA;
- golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah (R-3/TR), dengan daya 6.600 VA ke atas;
- golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah (B-2/TR), dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan rendah (B-3/TM), dengan daya di atas 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah (I-3/TM), dengan daya di atas 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi (I-4/TT), dengan daya 30.000 kVA ke atas;
- golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah (P-1/TR), dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200kVA;
- golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah (P-2/TM), dengan daya di atas 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT).

Sedangkan penyesuaian tarif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 bagi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah (R-1/TR), dengan daya 900 VA-RTM.



Tabel di bawah ini menyajikan harga jual listrik rata-rata berdasarkan kelompok pelanggan untuk masing-masing periode:

Kelompok Pelanggan	2018	2019
Rumah tangga	835	1.097
Industri	1.146	1.097
Usaha/bisnis	1.283	1.258
Umum	1.136	1.092
Total harga jual rata-rata	1.035	1.128

4. KOMPENSASI PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (“KP-PSO”)

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU BUMN, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Adapun salah satu BUMN yang diberikan tugas PSO adalah Perseroan

Sehubungan dengan belum tercapainya tingkat keekonomian tarif, maka untuk menjaga “To Keep the Lights On” perlu adanya proteksi berupa pemberian subsidi listrik melalui APBN. Perkembangan kebijakan subsidi listrik sejak terjadinya krisis moneter adalah sebagai berikut:

- Dalam APBN TA 2018 anggaran belanja subsidi listrik adalah sebesar Rp38.387 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2016 tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - subsidi tahun berjalan Rp26.107 miliar; dan
 - kekurangan pembayaran tahun 2014 sebesar Rp12.281 miliar.

Selanjutnya dalam APBN-P TA 2016, anggaran subsidi listrik direvisi terakhir dengan revisi keempat menjadi sebesar Rp63.098 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- subsidi tahun berjalan sebesar Rp50.817 miliar
- kekurangan pembayaran tahun 2014 sebesar Rp12.281 miliar

Realisasi penerimaan subsidi listrik tahun 2016 didasarkan pada PMK No. 170/PMK.02/2013 dengan rincian sebagai berikut :

- subsidi tahun berjalan sebesar Rp50.817 miliar
- kekurangan pembayaran tahun 2014 sebesar Rp12.281 miliar

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Subsidi Listrik yang dilakukan oleh BPK, besaran subsidi yang dapat dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp60.442 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembayaran subsidi sebesar Rp9.625 miliar.

- Dalam APBN TA 2019 anggaran belanja subsidi listrik adalah sebesar Rp44.983,7 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2017 tanggal 30 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :
 - subsidi tahun berjalan sebesar Rp44.983,7 miliar.
Selanjutnya dalam APBN-P TA 2017, anggaran subsidi listrik direvisi menjadi sebesar Rp45.375,2miliardantelahditindaklanjuti dengan terbitnya revisi DIPANO.999.07.1.979321/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - subsidi tahun berjalan sebesar Rp45.375,2 miliar.
Sampai dengan akhir 2017, anggaran subsidi listrik direvisi menjadi sebesar Rp50.595,3 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya revisi DIPA No. 999.07.1.979321/2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - subsidi tahun berjalan sebesar Rp45.375,2 miliar.
 - Kekurangan subsidi tahun 2015 sebesar Rp5.220,1 miliar



Realisasi penerimaan subsidi listrik tahun 2017 yang didasarkan pada PMK No. 44/PMK.02/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 162/PMK.02/2017 telah mencapai sebesar Rp50.595,3 miliar dengan rincian sebagai berikut :

- subsidi tahun berjalan sebesar Rp45.375,2 miliar.
- Kekurangan subsidi tahun 2015 sebesar Rp5.220,1 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Subsidi Listrik yang dilakukan oleh BPK, besaran subsidi yang dapat dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp45.738,2 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembayaran subsidi sebesar Rp363 miliar.

- Dalam APBN TA 2019 anggaran belanja subsidi listrik adalah sebesar Rp59.323.456 juta dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2019 dan telah dilakukan pembayaran subsidi oleh pemerintah sebesar Rp52.666.457 juta, namun berdasarkan audit BPK hak yang diterima PLN sebesar 51.711.774 juta, atas kelebihan pembayaran tersebut akan dilakukan *set off* dengan pembayaran subsidi pada bulan Juni 2020. Pagu tertinggi tersebut termasuk 7% margin di atas BPP tenaga listrik.

5. PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Fast Track Program Tahap I (“FTP I”)

Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada BBM dan sesuai dengan Perpres No. 71/2006, Pemerintah telah memperkenalkan tahap pertama Program Fast Track, yaitu FTP I, yang pada awalnya memberikan penugasan kepada Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 dimana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.769 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan dan kontraktor EPC yang bermasalah, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I. Pada 31 Desember 2019, dari 34 lokasi dengan kapasitas 9.927 MW, 27 lokasi mewakili sekitar 97% dari total kapasitas (9.640 MW) yang beroperasi, sementara tujuh lokasi lainnya mewakili sekitar 3% dari total kapasitas (287 MW) diharapkan mulai beroperasi masing-masing pada 2018 (177 MW) dan 2019 (110 MW). Pabrik pembangkit di bawah FTP I yang selesai pada tahun 2017 menjadi lima tahun lebih lambat operasionalnya dari yang direncanakan semula karena masalah terkait ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah mengeluarkan total Rp.164.611 miliar (US \$ 12.150 juta) yaitu biaya terkait dengan FTP I yang berkaitan dengan konstruksi dan renovasi proyek pengembangan pembangkit, proyek pengembangan transmisi dan biaya pinjaman terkait yang dikapitalisasi.

Proyek pembangkit tenaga listrik

Dengan mengganti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM berkapasitas total sekitar 3.500 MW dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara maupun pembangkit lainnya dalam FTP I dan dengan menambah kapasitas dari pembangkit tenaga listrik berbahan bakar non-BBM, Perseroan telah mengurangi penggunaan BBM dalam produksi listrik dari 35,3% pada tahun 2006 menjadi sekitar 4,18% pada tahun 2019. Perseroan berkeyakinan bahwa turunnya beban biaya bahan bakar akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap subsidi Pemerintah. Objektif lain dari FTP I adalah mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia dan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk memenuhi permintaan tenaga listrik domestik yang terus bertumbuh.



Perseroan mengundang kontraktor untuk menyampaikan penawaran sebagai bagian dari proses lelang bagi setiap proyek FTP I. Pada setiap akhir proses lelang, Perseroan menandatangani kontrak EPC dengan kontraktor yang memberikan penawaran terbaik. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menandatangani 37 kontrak EPC untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di 10 lokasi di wilayah Jawa-Bali dengan kapasitas agregat sebesar 7.490 MW dan di 27 lokasi di luar wilayah Jawa Bali dengan kapasitas agregat sebesar 2.489 MW. Pada umumnya, syarat dan ketentuan dari kontrak EPC mengatur bahwa Perseroan akan, bersama-sama dengan kontraktor, memperoleh kredit ekspor atau fasilitas perbankan lainnya dari satu atau lebih bank untuk sekitar 85,0% dari nilai kontrak dan Perseroan akan membayar kontraktor uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak. Dalam kontrak EPC tertentu, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh pembiayaan dalam waktu 90 atau 120 hari dari tanggal kontrak. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh pendanaan tersebut, Perseroan akan melakukan negosiasi dengan kontraktor tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan skema pembiayaan. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh pembiayaan dalam bentuk kredit ekspor dan fasilitas perbankan lainnya untuk 33 dari 34 lokasi pembangkit tenaga listrik dan Perseroan telah menyelesaikan konstruksi pembangkit tenaga listrik di 30 lokasi dengan 9.697 MW beroperasi, setara dengan sekitar 97,7% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 9.927 MW, sementara empat lokasi lainnya yang mewakili sekitar 2,3% dari kapasitas total, atau 230 MW, diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2020 (180 MW), tahun 2021 (20 MW), dan tahun 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor

Proyek pembangunan transmisi

Perseroan telah membangun gardu induk dan saluran transmisi di seluruh Indonesia sejak tahun 2008. Beberapa proyek-proyek pembangunan transmisi tersebut terkait dengan FTP I dan beberapa terkait dengan proyek penyambungan regular sebagaimana terdapat dalam rencana kerja Perseroan.

Di Pulau Jawa, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV dan 500 kV sepanjang sekitar 1.597 km dengan gardu induk berkapasitas 1.530 MVA. Di Pulau Sumatra, Perseroan sedang membangun saluran transmisi bertegangan 70 kV, 150 kV dan 275 kV sepanjang kurang lebih 409 km dengan gardu induk berkapasitas 150 MVA. Di Kalimantan, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV sepanjang kurang lebih 184 km dengan gardu induk berkapasitas 90 MVA. Di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV sepanjang kurang lebih 615 km dengan gardu induk berkapasitas 295 MVA. Di Maluku dan Papua, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV sepanjang 94 km dengan gardu induk berkapasitas 60 MVA.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saluran transmisi sepanjang 3.009 km sehubungan dengan FTP I telah terpasang dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp10.401 miliar. Perseroan mengestimasi sisa nilai investasi yang diperlukan oleh kontrak EPC untuk proyek pengembangan transmisi dalam FTP I sekitar Rp20 miliar dan US\$16 juta.

Beberapa proyek perbaikan juga telah dilaksanakan dikarenakan keterbatasan aliran daya pada saluran transmisi yang ada saat ini. Oleh karena itu, program upgrade meliputi penyambungan ke pembangkit tenaga listrik baru yang dibangun sehubungan dengan FTP I dan hal ini telah berperan dalam meningkatkan penjualan kepada pelanggan. Dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2017, Perseroan telah meng-upgrade saluran transmisi sepanjang kurang lebih 1.627 km di wilayah Jawa untuk mendistribusikan seluruh tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik baru dalam FTP I, IPP dan proyek Perseroan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, kontrak untuk meng-upgrade fasilitas yang telah ada, terdiri dari kontrak No. 102.PJ/611/P3B/2008, 199.PJ/611/P3B/2008 dan 098.PJ/611/P3B/2008, memiliki nilai sekitar Rp538 miliar.



Pendanaan untuk FTP I

Tabel di bawah ini menyajikan proyek pembangkit tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali dan kebutuhan pendanaan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat sesuai nilai kontrak EPC dalam FTP I pada tanggal 31 Desember 2019:

Lokasi	Propinsi	Total kapasitas sesuai mandat dari Pemerintah	Kapasitas sesuai kontrak	Total kapasitas sesuai kontrak	Kebutuhan pendanaan dalam Dolar Amerika Serikat	Kebutuhan pendanaan dalam Rupiah	Tanggal kontrak ⁽¹⁾	Penyelesaian kontrak ⁽²⁾
		(MW)	(MW)	(MW)	(jutaan US\$)	(miliar Rp)		(%)
Suralaya	Banten	600	1 x 625	625	284	735	Maret 2007	100
Labuan	Banten	600	2 x 300	600	289	1.077	Maret 2007	100
Indramayu	Jawa Barat	900	3 x 330	990	592	1.273	Maret 2007	100
Rembang	Jawa Tengah	600	2 x 315	630	262	1.911	Maret 2007	100
Paiton	Jawa Timur	600	1 x 660	660	331	601	Maret 2007	100
Pelabuhan Ratu	Jawa Barat	900	3 x 350	1.050	482	1.874	Agustus 2007	100
Pacitan	Jawa Timur	600	2 x 315	630	293	1.046	Agustus 2007	100
Teluk Naga	Banten	900	3 x 315	945	455	1.607	Agustus 2007	100
Adipala, Cilacap	Jawa Tengah	600	1 x 660	660	468	1.890	Desember 2008	100
Tanjung Awar-Awar	Jawa Timur	600	2 x 350	700	372	1.155	April 2008	100
Total		6.900		7.490	3.828	13.169		

Tabel di bawah ini menyajikan proyek pembangkit tenaga listrik di luar wilayah Jawa-Bali dan kebutuhan pendanaan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat sesuai nilai kontrak EPC dalam FTP I pada tanggal 31 Desember 2019:

Lokasi	Propinsi	Total kapasitas sesuai mandat dari Pemerintah	Kapasitas sesuai kontrak	Total kapasitas sesuai kontrak	Kebutuhan pendanaan dalam Dolar Amerika Serikat	Kebutuhan pendanaan dalam Rupiah	Tanggal kontrak ⁽¹⁾	Penyelesaian kontrak ⁽²⁾
		(MW)	(MW)	(MW)	(jutaan US\$)	(miliar Rp)		(%)
Meulaboh	NAD	2 x (100-150)	2 x 110	220	124	614	April 2008	100
Pangkalan Susu	Sumatra Utara	2 x (100-150) dan 2 x (100-150)	2 x 220	440	209	781	Oktober 2007	100
Teluk Sirih	Sumatra Barat	2 x (100-150)	2 x 112	224	138	521	May 2008	100
Tj. Balai Karimun Baru	Riau	2 x 7	2 x 7	14	7	71	Juni 2008	100
Bangka Baru	Bangka	2 x 25	2 x 30	60	23	317	Juli 2008	100
Belitung Baru	Bangka Belitung	2 x 15	2 x 16,5	33	24	142	Juni 2008	100
Tarahan Baru	Lampung	2 x (100-150)	2 x 100	200	119	460	Oktober 2007	100
Singkawang Baru	Kalimantan Barat	2 x 50	2 x 27,5	55	3	172	Juni 2008	86
Asam-Asam	Kalimantan Selatan	2 x 65	2 x 65	130	84	313	Juli 2008	100
Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	2 x 65	2 x 60	120	62	414	Januari 2008	100
Kendari	Sulawesi Tenggara	2 x 10	2 x 10	20	10	97	Januari 2008	100
Gorontalo Baru	Gorontalo	2 x 25	2 x 25	50	26	265	Juli 2012	100
Amurang Baru	Sulawesi Utara	2 x 25	2 x 25	50	27	305	Oktober 2007	100
Barru	Sulawesi Selatan	2 x 50	2 x 50	100	52	380	Juli 2008	100
Bima	NTB	2 x 7	2 x 10	20	8	120	Juni 2008	30,03
Lombok	NTB	2 x 25	2 x 25	50	24	274	Oktober 2007	93
Ende	NTT	2 x 7	2 x 7	14	8	73	Januari 2008	100
Kupang	NTT	2 x 15	2 x 16,5	33	23	135	Juni 2008	100



Lokasi	Propinsi	Total kapasitas sesuai mandat dari Pemerintah	Kapasitas sesuai kontrak	Total kapasitas sesuai kontrak	Kebutuhan pendanaan dalam Dolar Amerika Serikat	Kebutuhan pendanaan dalam Rupiah	Tanggal kontrak ⁽¹⁾	Penyelesaian kontrak ⁽²⁾
		(MW)	(MW)	(MW)	(jutaan US\$)	(miliar Rp)		
Tidore	Maluku Utara	2 x 7	2 x 7	14	10	100	Juni 2008	100
Jayapura Baru	Papua	2 x 7	2 x 10	20	14	141	Juli 2008	100
Parit Baru	Kalimantan Barat	2 x 50	2 x 50	100	62	392	Juni 2009	86
Kaltim	Kalimantan Timur	2 x 100	2 x 110	220	117	991	Desember 2010	100
Tanayan	Riau	2 x 100	2 x 110	220	116	1.019	Desember 2010	100
Ambon	Maluku	2 x 7	2 x 15	30	21	186	April 2010	67
Total				2.437	1.339	8.283		

(1) tanggal pada kontrak EPC di lokasi.

(2) pada tabel di atas, dimana rasio penyelesaian kontrak di bawah 100% untuk proyek yang sudah beroperasi, hal ini mengindikasikan adanya persyaratan-persyaratan dan barang-barang yang belum diserahkan oleh kontraktor EPC sehingga sertifikat belum diterbitkan, seperti penyampaian dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksaan pasca konstruksi, persyaratan garansi 1 tahun pasca konstruksi. Pada 31 Desember 2019, 2.070 MW dari 2.437 MW, kapasitas kontrak total, telah beroperasi sementara 180 MW, 20 MW, dan 30 MW diharapkan akan beroperasi pada tahun 2020, 2021 dan 2026, masing-masing.

Pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan telah mengeluarkan total Rp173.251 miliar (US \$ 12.463 juta) untuk biaya terkait dengan FTP I yang berkaitan dengan konstruksi dan renovasi proyek pengembangan pembangkit, proyek pengembangan transmisi dan biaya pinjaman terkait yang dikapitalisasi. Perseroan memperkirakan total investasi yang tersisa yang diperlukan oleh kontrak EPC untuk FTP I (termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10,0%) hingga mencapai sekitar Rp559 miliar ditambah US \$ 72 juta untuk proyek pengembangan generasi dan Rp.21 miliar ditambah US \$ 16 juta untuk proyek pengembangan transmisi.

Fast Track Program Tahap II (“FTP II”)

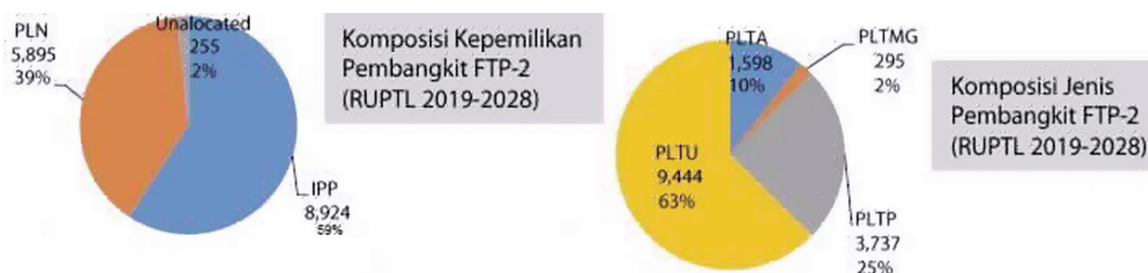
Dalam FTP II, sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014 dan ditegaskan dalam Permen ESDM No. 15/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 1/2012, Permen ESDM No. 21/2013, Permen ESDM No. 32/2014 dan Permen ESDM No. 40/2014, Perseroan telah menerima mandat untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW (termasuk pembangkit tenaga listrik milik IPP) dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah di Indonesia di luar FTP I. Kapasitas untuk FTP II berubah menjadi 15.074 MW berdasarkan RUPTL 2019 – 2028.

Fokus FTP II adalah penggunaan energi terbarukan sebagai upaya penanggulangan pemanasan global. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dimana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 8.924 MW dari total kapasitas yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Fokus FTP II akan menggunakan sumber terbarukan untuk mengatasi masalah pemanasan global. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pengembangan listrik di FTP II karena IPP bertanggung jawab untuk menyediakan 8.924 MW energi yang diamanatkan untuk diperoleh.



Bagan berikut menetapkan pembagian kewajiban antara Perusahaan dan IPP Perseroan di bawah FTP II dan proporsi jenis pembangkit listrik yang akan dibangun:



Pendanaan untuk penyelesaian pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menjadi kewajiban Perseroan dalam FTP II, yaitu sebesar 5.995 MW, akan dilakukan melalui kombinasi dari alokasi anggaran belanja negara, *two-step loan*, pinjaman bank, pasar modal dan sumber kas internal. Perseroan memperkirakan total investasi yang diperlukan oleh kontrak EPC untuk Perseroan dan IPP di FTP II dengan jumlah sekitar AS \$ 89.893 juta untuk proyek pengembangan pembangkit dan sekitar US \$ 24.750 juta untuk proyek pengembangan transmisi. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menarik pinjaman \$ AS 6.432 juta terkait dengan FTP II dan Program 35.000 MW (tidak termasuk IPP).

Tabel di bawah ini menyajikan program pembangunan pembangkit tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali dalam FTP II (tidak termasuk IPP) pada tanggal 31 Desember 2019:

Lokasi	Propinsi	Bahan bakar	Jenis turbin	Total kapasitas sesuai mandate dari Pemerintah (MW)
PLTU Indramayu	Jawa Barat	Batubara	Turbin uap	1 x 1.000
PLTU Jawa 6	Jawa Tengah	Batubara	Turbin uap	2 x 1.000
PLTA Jatigede	Jawa Barat	Air	Turbin air	2 x 55
PLTA Upper Cisokan	Jawa Barat	Air	Turbin air	4 x 260
PLTP Tangkuban Perahu II	Jawa Barat	Panas Bumi	Turbin geothermal	60
PLTP Ungaran	Jawa Tengah	Panas Bumi	Turbin geothermal	55
Total				4.265

Tabel di bawah ini menyajikan program pembangunan pembangkit tenaga listrik di luar wilayah Jawa-Bali dalam FTP II (tidak termasuk IPP) pada tanggal 31 Desember 2019:

Lokasi	Propinsi	Bahan bakar	Jenis turbin	Total kapasitas sesuai mandate dari Pemerintah (MW)
PLTP Sungai Penuh 1 & 2	Jambi	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 55
PLTP Hululais 1 & 2	Bengkulu	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 55
PLTP Kotamobagu 1 & 2	Sulawesi Utara	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 20
PLTP Kotamobagu 3 & 4	Sulawesi Utara	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 20
PLTP Sembalun	NTB	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 10
PLTP Tulehu	Maluku	Panas bumi	Turbin geothermal	7
PLTA Asahan III	Sumatra Utara	Air	Turbin air	2 x 87
PLTA Masang 2	Sumatra Barat	Air	Turbin air	44
PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 ⁽²⁾	Sumatra Utara	Batubara	Turbin uap	2 x 200
PLTU Parit Baru ⁽²⁾	Kalimantan Barat	Batubara	Turbin uap	2 x 50
PLTU Punagaya ⁽²⁾	Sulawesi Selatan	Batubara	Turbin uap	2 x 100
PLTU Lombok ⁽¹⁾	NTB	Batubara	Turbin uap	2 x 50
PLTMG Bangkanai 1 & 2 ⁽¹⁾⁽²⁾	Kalimantan Tengah	Gas	Turbin gas	295
PLTP Danau Ranau	Lampung	Panas Bumi	Turbin geothermal	40
PLTP Simbolon Samosir	Sumatera Utara	Panas Bumi	Turbin geothermal	50



Lokasi	Propinsi	Bahan bakar	Jenis turbin	Total kapasitas sesuai mandate dari Pemerintah (MW)
PLTP Suoh Sekincau	Lampung	Panas Bumi	Turbin geothermal	55
PLTP Atadei	NTT	Panas Bumi	Turbin geothermal	2x5
PLTP Mataloko	NTT	Panas Bumi	Turbin geothermal	2 x 10
PLTP Oka Ile	NTT	Panas Bumi	Turbin geothermal	1 x 10
PLTP Songa	Maluku	Panas Bumi	Turbin geothermal	2 x 5
Total				1.935

(1) kontrak EPC di lokasi ini telah ditandatangani dan dalam tahap konstruksi. Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan kreditur untuk membiayai kebutuhan pendanaan di lokasi ini.

(2) pada tanggal 31 Desember 2019, PLTU Pangkalan Susu 3 & 4, PLTU Parit Baru, PLTU Punagaya, PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW.

Beberapa proyek utama yang akan dilaksanakan sesuai mandat FTP II meliputi proyek PLTU Jawa 6 ("Jawa 6") (2 x 1.000 MW), proyek PLTA Upper Cisokan ("Upper Cisokan") (1.040 MW) dan PLTU Indramayu ("Indramayu") (1.000 MW). Jawa 6 diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2026 dengan estimasi kebutuhan belanja modal sekitar US\$3,0 miliar. Indramayu diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2026 dengan estimasi kebutuhan belanja modal sekitar US\$1,8 miliar yang akan didanai oleh JICA. Indramayu akan menggunakan teknologi pembakaran batubara terkini dan saat ini sedang dalam tahapan penyusunan dokumen lelang. Upper Cisokan adalah pembangkit listrik tenaga air bersistem *pump storage*. Konsultan enjiniring untuk Upper Cisokan telah dipilih dan Upper Cisokan diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2024 dengan estimasi kebutuhan belanja modal sebesar US\$800 juta yang akan didanai oleh World Bank. Pemerintah telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan World Bank pada bulan November 2011 dan perjanjian *two-step loan* dengan Perseroan pada bulan Februari 2012. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman untuk proyek PLTA Asahan III pembangkit listrik tenaga air, PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 pembangkit listrik tenaga batubara, PLTU Parit Baru proyek pembangkit listrik tenaga batu bara, PLTU Punagaya proyek pembangkit listrik tenaga batu bara dan PLTMG Bangkanai proyek dan PLTU Lombok.

Pada tanggal 31 Desember 2019, dari total kapasitas 15.074 MW di bawah FTP II, delapan proyek Fast Track Program II (termasuk IPP) yang terdiri dari total kapasitas 2.057 MW, atau sekitar 12% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW, beroperasi; 5.006 MW (atau 38% dari total kapasitas yang direncanakan 15.074 MW) berada di tahap konstruksi; 2.695 MW (atau 21% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap penutupan keuangan; dan 5.316 MW (atau 29% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 15.074 MW) berada pada tahap perencanaan dan pengadaan. Semua proyek di bawah FTP II diharapkan beroperasi pada tahun 2028.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek-proyek yang telah beroperasi terdiri dari 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berlokasi di Patuha, Kamojang, Ulubelu, Sarulla, Karaha Bodas, Lumut Balai, Sorik Marapi, Muara Laboh dan Lahendong, 1 (satu) pembangkit listrik tenaga gas di Bangkanai dan 4 (empat) pembangkit listrik tenaga air di Wampu, Hasang, Semangka, 7 (tujuh) PLTU di Punagaya, Parit Baru, Pangkalan Susu, Kalsel, dan Kaltim. PLTA Asahan 3 (174 MW), PLTA Hasang Unit 3 (13 MW), PLTP Rantau Dedap (220 MW), PLTP Sorik Merapi (195 MW, PLTA Upper Cisokan (520 MW), PLTU Jawa 1 (924 MW), PLTU Jawa 4 (2000 MW), PLTA Jatigede (110 MW), PLTU Bangkanai 2 (140 MW), PLTU Kaltim 2 unit 2 (100 MW), PLTA Malea (90 MW), PLTP Lombok (100 MW) dalam tahap konstruksi. PLTA Masang 2 (44), PLTP Hululais 1&2 (110 MW), PLTP Sungai Penuh 1&2 (110 MW), PLTA Peusangan 4 (83 MW), PLTP Bonjol (60 MW), PLTP danau Ranau (110 MW), PLTA Lumut Balai 2,3,4 (165 MW), PLTP Sarulla II (110 MW), PLTP Sarulla II (110 MW), PLTP Seulawah (55 MW), PLTP Simbolon Samosir (50 MW), PLTP Sipalohon (20 MW), PLTP Suoh (55 MW), PLTP Way Ratai (55 MW), PLTP Gunung Endut (40 MW), PLTU Indramayu (1.000 MW), PLTP Cibuni (10 MW), PLTP Gunung Ceremai (110 MW), PLTP Karaha 2, 3 (20 MW), PLTP Tangkuban Perahu I Jabar (45 MW), PLTP Tangkuban Perahu II (60 MW), PLTP Umbul Telomoyo (55 MW), PLTP Ungaran (55 MW), PLTP Wayang Windu 3, 4 (60 MW), PLTU Jawa 5 (1.000 MW), PLTU Jawa 6 (2.000 MW), PLTP Kotamobagu 1,2,3,4 (80 MW), PLTU Bonto Batu (110 MW), PLTP Bora Pulu (40 MW), PLTP Marana (20 MW), PLTP Iyang (55 MW), PLTP Sembalun (20 MW), PLTP Atadei (10 MW), PLTP Hu'u (20 MW), PLTP Mataloko



(20 MW), PLTP Oka Ile (10 MW), PLTP Tlehu 1,2 (20 MW), PLTP Jailolo (10 MW), PLTP Songa (10 MW) dalam tahap perencanaan. PLTP Jaboi Sabang (10 MW), PLTP Muara Laboh Sumbar #2 (140 MW), PLTP Rajabasa Unit 1&2 (220 MW), PLTP Rawa Dano Banten (110 MW), PLTP Baturaden (220 MW), PLTP Cisolok (50 MW), PLTP Dieng (55 MW), PLTP Dieng Unit 3 (55 MW), PLTP Guci (55 MW), PLTP Patuha 2,3 (110 MW), PLTP Tampomas (45 MW), PLTU Jawa 3 (1.320 MW), PLTP Wilis (165 MW), PLTP Ijen (110 MW), PLTP Sokoria (30 MW) dalam tahap PPA belum konstruksi.

Program 35.000 MW

Pada awal tahun 2015, Pemerintah memperkenalkan Program 35.000 MW dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan ESDM No. 5899.K/20/MEM/2016, Perseroan menerbitkan rencana kerja untuk Program 35.000 MW, menguraikan secara garis besar penugasan yang diterima Perseroan dari Pemerintah untuk mengembangkan Program 35.000 MW, berikut jaringan transmisi dan distribusi yang dibutuhkan, dengan target penyelesaian antara tahun 2015 dan tahun 2019, disamping proyek-proyek lain seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 7.000 MW di bawah FTP II. Pada bulan Februari 2019, sesuai dengan RUPTL 2019-2028, Pemerintah menyesuaikan target tanggal penyelesaian dan target kapasitas dalam program ini menjadi 5.500 MW di akhir tahun 2019 dan 35.000 MW di akhir tahun 2028. Perseroan telah menyelaraskan kembali rencananya dalam Program 35.000 MW berdasarkan target penyelesaian dan target kapasitas yang telah disesuaikan tersebut.

Perseroan memperkirakan bahwa pengembangan pembangkit tenaga listrik baru berikut infrastruktur transmisi dan distribusi (gardu induk) yang lengkap dalam Program 35.000 MW akan membutuhkan total pendanaan sekitar Rp1.127 triliun. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan yang signifikan, lebih dari 74,8% (sekitar 26.566 MW) dari pembangunan pembangkit tenaga listrik akan diberikan pada sektor swasta melalui mekanisme IPP. Sisanya 25,2% (sekitar 8.975 MW) dari target program akan dikembangkan sendiri oleh Perseroan, beserta infrastruktur transmisi dan distribusi yang dibutuhkan. Kebutuhan pendanaan untuk pengembangan ketenagalistrikan telah dan akan diperoleh dari pendanaan internal maupun sumber eksternal. Pendanaan internal meliputi laba usaha sedangkan pendanaan eksternal dapat dalam bentuk *two-step loan*, pinjaman Pemerintah melalui akun investasi, obligasi domestik dan internasional, serta pinjaman dari bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Program 35.000 MW telah mencapai hal-hal penting sebagai berikut:

- Aset pembangkit listrik sebesar 6.810,6 MW, yang terdiri dari 2.752,3 MW dari pembangkit listrik PLN dan 4.058,3 MW dari pembangkit listrik IPP, telah mulai beroperasi;
- Aset pembangkit listrik sebesar 4.547,1 MW berada dalam tahap konstruksi di bawah kepemilikan PLN dan aset pembangkit listrik sebesar 15.620,7 MW berada dalam tahap konstruksi di bawah kepemilikan IPP;
- Aset pembangkit listrik sebesar 6.877,6 MW berada di bawah PPA yang telah ditandatangani berdasarkan skema IPP;
- Aset pembangkit listrik sebesar 829 MW berada pada tahap pengadaan;
- Aset pembangkit listrik sebesar 734 MW masih dalam tahap perencanaan; dan
- rasio elektrifikasi meningkat dari 97,2% pada tahun 2016 menjadi 95,7% pada tahun 2019.

Sebagai hasilnya, mandat untuk kapasitas 7.044 MW dalam Program 35.000 MW telah menandatangani PJBL pada tanggal 31 Desember 2019. Selain itu, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk mendukung dan menjamin kesuksesan Program 35.000 MW, Perseroan telah mempekerjakan 1.932 karyawan baru. Perseroan juga telah menilai kinerja karyawan Perseroan dan mempromosikan karyawan Perseroan sebanyak 70 orang ke posisi manajer tingkat atas, 415 orang ke posisi manajer tingkat menengah dan 305 orang ke posisi manajer tingkat dasar berdasarkan kinerja mereka.



6. SARANA DAN FASILITAS

Perseroan memiliki dan mengelola sarana dan fasilitas penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Berikut ini adalah perkembangan sarana dan fasilitas penyediaan tenaga listrik dari tahun 2018 sampai 2019:

Tabel Presentase Kapasitas Pembangkit Listrik yang Dimiliki terhadap Kebutuhan Perseroan :

Sistem Kelistrikan	2019				2018			
	Daya Mampu Netto	Beban Puncak	Cadangan	%	Daya Mampu Netto	Beban Puncak	Cadangan	%
<i>Sumatera</i>								
Sumatera	6.293,5	5.647,2	646,3	111%	7.900,0	5.504,0	2.396,0	144%
Nias	70,5	35,1	35,4	201%	80,0	34,0	46,0	235%
Batam	445,7	378,2	67,5	118%	552,0	396,0	156,0	139%
Bintan	166,0	78,2	87,8	212%	135,0	76,0	59,0	178%
Bangka	203,0	152,1	50,8	133%	196,0	139,0	57,0	141%
Belitung	81,7	44,0	37,7	186%	79,0	42,0	37,0	188%
<i>Jawa Bali</i>								
Jawa Bali	36.933,0	27.861,9	9.071,1	133%	33.438,0	26.736,0	6.702,0	125%
<i>Kalimantan</i>								
Khatulistiwa	424,4	338,2	86,2	125%	376,0	326,0	50,0	115%
Barito-Mahakam	1.737,4	1.244,9	492,5	140%	1.598,0	1.106,0	492,0	144%
<i>Nusa Tenggara</i>								
Lombok	311,8	263,5	48,3	118%	349,0	236,0	113,0	148%
Timor/Kupang	131,8	105,2	26,6	125%	167,0	99,0	68,0	169%
<i>Sulawesi</i>								
Sulutgo	582,0	414,4	167,5	140%	468,0	386,0	82,0	121%
Sulbagsel	2.057,4	1.380,0	677,4	149%	1.913,0	1.256,0	657,0	152%
Ternate	53,4	36,2	17,2	148%	63,0	35,0	28,0	180%
<i>Maluku Papua</i>								
Sorong	60,0	48,5	11,5	124%	52,0	47,0	5,0	111%
Ambon	68,3	60,1	8,2	114%	76,0	61,0	15,0	125%
Jayapura	112,0	83,5	28,5	134%	117,0	82,0	35,0	143%

a. Kapasitas pembangkit

Kapasitas pembangkit Perseroan (termasuk sewa)

Per 31 Desember 2019, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit Perseroan mencapai 45.697 MW (tidak termasuk IPP) dan 6.369 unit, dengan 30.997 MW (67,83%) berada di wilayah Jawa-Bali. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan kapasitas pembangkitan Perseroan (termasuk sewa) untuk masing-masing periode:

(dalam MW)

Kapasitas Pembangkit	31 Desember	
	2019	2018
PLTA	3.584	3.583
PLTU	20.841	19.792
PLTG	3.452	3.759
PLTGU	10.739	10.332
PLTP	580	580
PLTD	6.486	4.696
Lainnya	15	1.446
Total	45.697	44.188



Kapasitas pembangkit pengembang listrik swasta

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik lebih lanjut, Perseroan memiliki sejumlah PJBL dan *Energy Sales Contract* (“ESC”) dengan IPP untuk menambah kapasitas pembangkitan Perseroan. Per 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 total kapasitas terpasang IPP yang memiliki PPA dan ESC dengan Perseroan berturut-turut mencapai 16.477 MW, 14.161 MW dan 13.270 MW.

b. Penyaluran

Sarana Transmisi	31 Desember	
	2019	2018
Panjang transmisi (kms)	58.959	53.278
Kapasitas Gardu Induk (MVA)	144.408	131.164

Seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan secara konsisten telah meningkatkan dan menambah sistem transmisi dan distribusi. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menyelesaikan saluran transmisi sepanjang 58.959 kms. Perseroan memperkirakan saluran transmisi akan terus bertambah untuk mendukung pembangunan pembangkit tenaga listrik dalam Program *Fast Track* maupun Program 35.000 MW.

c. Distribusi

Sarana Distribusi		
	2019	2018
Panjang Jaringan Tegangan Menengah (kms)	401.422	387.301
Panjang Jaringan Tegangan Rendah (kms)	578.433	561.654
Kapasitas Gardu Distribusi (MVA)	59.049	55.628

Arahan kebijakan

- Pembangkit

Pembangunan pembangkit diarahkan untuk mengatasi krisis pasokan di daerah kritis danantisipasi pertumbuhan permintaan secara terbatas dengan mengutamakan pembangunan pembangkit yang optimal dan biaya pokok produksi yang rendah.

Dalam rangka pengembangan EBT, Perseroan telah menyusun rencana pengembangan sebagai berikut:

- Pusat Listrik Tenaga Air (“PLTA”) : Perseroan akan mengembangkan sebagian besar dari potensi tenaga air yang ada di Indonesia sebagai proyek Perseroan.
- Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (“PLTP”) : Perseroan akan mengembangkan proyek PLTP, terutama di Maluku & Papua, Jawa dan beberapa di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.
- Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro (“PLTMH”) : Perseroan mendorong pengembangan PLTMH terutama oleh swasta atau masyarakat untuk melistriki kebutuhan setempat dan juga untuk disalurkan ke *grid* atau sistem kelistrikan Perseroan.
- Pusat Listrik Tenaga Bayu (“PLTB”) : karena potensi energi angin di Indonesia sangat terbatas, maka pengembangannya akan terbatas di daerah yang memiliki potensi.
- Biomassa : Perseroan bermaksud untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomassa dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten untuk merintis industri biomassa.
- Energi kelautan : teknologi dan keekonomiannya masih belum diketahui, Perseroan akan melakukan uji coba skala kecil sebagai proyek penelitian dan pengembangan.
- Biofuel : tergantung pada kesiapan pasar biofuel, Perseroan siap untuk memanfaatkan biofuel apabila tersedia.
- Pusat Tenaga Listrik Surya (“PLTS”) : Perseroan akan mengembangkan program PLTS di 1.000 lokasi/pulau terutama di wilayah yang terluar maupun yang terisolasi untuk mempercepat rasio elektrifikasi.



- **CBM (Coal Bed Methane)** : *Reserve* gas CBM diperkirakan lebih besar daripada *reserve* gas konvensional, terutama di Maluku Selatan dan Papua Basin (183 TCF) dan Kutai Basin. Perseroan berkeinginan untuk memanfaatkan gas nonkonvensional ini apabila telah tersedia dalam jumlah yang cukup.
- **Coal slurry** : merupakan batubara yang dicairkan melalui proses *upgrading* sehingga lebih ramah lingkungan serta lebih mudah ditransportasikan dan disimpan dalam tangki. *Coal slurry* digunakan sebagai pembangkit skala kecil pengganti PLTD untuk beban dasar. Perseroan sudah membangun pembangkit *pilot project* dengan kapasitas 500 kW di Karawang, Jawa Barat.
- **Nuklir** : Program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan Pemerintah, karena pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan profitabilitas, namun juga aspek politik, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.
- **Pembangkit Listrik Tenaga Sampah** : Perseroan akan mendukung implementasi Peraturan Presiden no 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di 12 kota.

- **Transmisi**

Pembangunan Jaringan Transmisi diarahkan untuk *debottlenecking* dan penyediaan akses dari pembangkit-pembangkit baru ke pusat-pusat beban, perbaikan mutu tegangan dan keandalan.

- **Distribusi**

Pembangunan Jaringan Distribusi diarahkan dan diutamakan untuk perbaikan pelayanan yang meliputi perbaikan mutu tegangan, peningkatan keandalan, penurunan susut jaringan, rehabilitasi jaringan yang mengalami penurunan kinerja, peningkatan sarana pelayanan serta perluasan area pelayanan.

7. PRODUKSI

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta.

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan produksi dan pembelian tenaga listrik untuk masing-masing periode:

(dalam GWh)

Jenis Pembangkit	31 Desember	
	2019	2018
Produksi sendiri	187.337	178.194
Sewa	7.086	10.505
Pembelian	84.519	78.387
Total	278.942	267.086



Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan komposisi produksi (Produksi Sendiri, Sewa, Pembelian) per sumber energi untuk masing-masing periode:

(dalam %)

Bauran Energi	31 Desember	
	2019	2018
BBM	3,85	5,57
Non BBM	96,15	94,43
- Batubara	63,30	59,91
- Gas alam	20,98	22,25
- Air	6,50	6,30
- Panas bumi	4,95	5,25
- Surya dan bayu dan lainnya	0,42	0,72
Total	100,00	100,00

nm : menjadi nol karena pembulatan.

Rincian pembelian listrik swasta selama 3 (tiga) tahun disajikan di bawah ini:

(dalam GWh)

No.	Nama Pembangkit	31 Desember	
		2019	2018
PLTU (Batubara)			
1.	PT Paiton Energy Company	8.136	8.729
2.	PT Jawa Power	8.028	8.748
3.	PT Paiton Energy Company	5.785	1.508
4.	PT Sumber Segara Prima Daya	3.563	3.689
5.	PT Pusaka Jaya Palu Power	-	76
6.	PT GH EMM Indonesia	1.397	1.388
7.	PT Cahaya Fajar Kaltim	346	784
8.	PT Cirebon Electric Power	4.593	4.613
9.	PT Bosowa Energi	2250	2.107
10.	PT Gorontalo Energi	51	57
11.	PT Cahaya Fajar Kaltim	396	873
12.	PT Bukit Pembangkit Innovative	1.098	2.761
13.	PT General Energy Bali	2.807	1.539
14.	PT Priamanaya Energi	1.516	1.321
15.	PT DSSP Power	1.714	4.168
16.	PT Sumber Segara Prima Daya	4.004	132
17.	PT Pusaka Jaya Palu Power	-	4.270
18.	PT Lestari Banten Energi	3.713	374
19.	PT Makmur Sejahtera Wisesa	243	68
20.	PT Kariangau Power	85	80
PLTP (Panas Bumi)			
21.	Star Energy (Salak)	1.584	-
22.	Star Energy (Darajat 2-3)	1.661	-
23.	Star Energy (Wayang Windu 1 - 2)	1.859	5.232
24.	Geo Dipa Energi	315	311
25.	Pertamina Geothermal Energy	492	491
26.	Geo Dipa Energi	439	433
27.	Pertamina Geothermal Energy	405	261
28.	Pertamina Geothermal Energy	411	179
29.	Pertamina Geothermal Energy	391	154
30.	Pertamina Geothermal Energy	357	161
31.	Pertamina Geothermal Energy	466	395
32.	Pertamina Geothermal Energy	256	325
33.	Sarulla Operation Ltd	1.973	2.225
PLTG/U (Gas)			
34.	PT Cikarang Listrindo	1.906	1.911
35.	PT Energi Sengkang	1.336	980
36.	PT Asrigita Prasarana	823	993
37.	PT MEPPU GEN	605	528



No.	Nama Pembangkit	31 Desember	
		2019	2018
38.	PT Bekasi Power	372	518
39.	PT Kartanegara Energi Perkasa	589	553
40.	PT Rekind Daya Mamuju	273	85
PLTA (Air)			
41.	Perum Jasa Tirta II	467	500
42.	PT Bajradaya Sentranusa	1.311	1.203
43.	PT Poso Energy	925	997
44.	PT Inalum	297	19
45.	PT Wampu Electric Power	287	234
46.	SESCO	1.682	1.496
47.	PT Tanggamus Elektrik Plant	227	94
PLTD (MFO)			
48.	KAR Powership Sulawesi	640	811
49.	KAR Powership Medan	1.582	1.284
50.	KAR Powership Indonesia (Ambon)	346	344
51.	KAR Powership Kupang	65	279
52.	Lain-lain	10.452	8.105
Jumlah		84.519	78.387

8. PEMASARAN

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar.

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan tingkat pertumbuhan dan komposisi penjualan tenaga listrik Perseroan untuk masing-masing periode:

Pertumbuhan penjualan tenaga listrik

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Penjualan (GWh)	244.665	234.618
Pertumbuhan (GWh)	10.047	11.484
Pertumbuhan (%)	4,28	5,15

Komposisi penjualan tenaga listrik

(dalam GWh)

Kelompok Pelanggan	31 Desember	
	2019	2018
Rumah tangga	103.489	97.832
Usaha/bisnis	46.731	44.027
Industri	77.497	76.947
Umum	16.947	15.812
Total	244.665	234.618



Pendapatan penjualan tenaga listrik

Tabel di bawah ini menyajikan pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik dan pangsa pendapatan berdasar kelompok tarif untuk masing-masing periode:

(dalam miliar Rupiah)

Kelompok Pelanggan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Rumah tangga	113.626	41,1	107.853	40,9
Usaha/bisnis	58.825	21,3	54.770	20,8
Industri	85.088	30,8	83.510	31,7
Umum	18.522	6,7	17.343	6,6
Total	276.061	100,0	263.477	100,0

Jumlah pelanggan

Jumlah pelanggan Perseroan dari tahun ke tahun terus meningkat dengan penambahan pelanggan terbesar terjadi pada kelompok pelanggan rumah tangga. Jumlah pelanggan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam ribuan pelanggan)

Kelompok Pelanggan	31 Desember	
	2019	2018
Rumah tangga	69.620	66.071
Usaha/bisnis	3.830	3.751
Industri	105	88
Umum	2.151	2.007
Total	75.706	71.917

Peningkatan jumlah pelanggan ditopang oleh hasil penerapan inovasi Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis penyambungan baru dan penyediaan layanan fasilitas antara lain melalui: Contact Center 123 untuk Penyambungan Baru, Penambahan Daya dan Penyambungan Sementara Online ("PB/PD/PS Online") melalui *website*; dan pemasaran listrik Prabayar. Penerapan inovasi di bidang layanan tersebut membuat pelanggan dapat langsung melakukan proses pemasangan listrik baru tanpa harus datang ke kantor unit layanan Perseroan.

Penambahan pelanggan didominasi oleh pelanggan Prabayar yang merupakan salah satu program prioritas perusahaan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, sekaligus meningkatkan kualitas arus kas. Pada periode Januari – Desember 2019 penambahan pelanggan Prabayar baik pelanggan baru maupun migrasi dari pelanggan pasca bayar ke Prabayar mencapai mencapai 3.661 ribu pelanggan.

Daya tersambung

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan daya tersambung Perseroan untuk tiap kelompok tarif untuk masing-masing periode:

(dalam MVA)

Kelompok Pelanggan	31 Desember	
	2019	2018
Rumah tangga	67.877	63.577
Industri	30.434	27.752
Usaha/bisnis	29.180	29.136
Umum	10.585	9.816
Total	138.077	130.281



Daya tersambung meningkat dari tahun ke tahun, namun demikian penambahan daya tersambung secara total telah mengalami penurunan terutama untuk kelompok pelanggan industri khususnya kelompok industri I-3 seiring dengan penjualan energi listrik yang mengalami penurunan.

Strategi pemasaran

Keterbatasan pasokan listrik mengharuskan Perseroan untuk mengendalikan pemasaran berupa:

- Pemasaran yang selektif untuk menaikkan pendapatan dan mengantisipasi timbulnya krisis listrik.
- Pengembangan pola kerja sama dengan pemilik *captive power* tegangan menengah dan tegangan rendah untuk menanggulangi krisis ketenagalistrikan.
- Pembatasan dan penggeseran beban keluar dari waktu beban puncak.

Jaringan pemasaran Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, dan distribusinya mencakup perkotaan sampai ke pelosok / pedesaan.

Pemasaran dilakukan secara aktif dan selektif dengan tetap mempertahankan mutu, keandalan dan efisiensi melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program penekanan *Peak Load*, yang dilakukan dengan cara:
 - Untuk daerah-daerah yang daya mampu pembangkitnya masih kritis, maka permintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri (I3 dan I4 di Jawa-Madura-Bali dan 12,13,14 di luar Jawa-Madura-Bali) dapat diberikan dengan catatan tidak menggunakan listrik pada WBP.
 - Melakukan kampanye pengurangan penggunaan listrik / lampu pada WBP.
 - Promosi yang lebih intensif guna lebih menyukseskan pemotongan/penggeseran beban WBP pada pelanggan industri melalui pemberian kompensasi.
 - Mengupayakan pemberian insentif kepada konsumen industri untuk pemakaian pada periode waktu pukul 04.00 sampai dengan 08.00.
- b. Dalam rangka pengamanan penjualan listrik kepada konsumen TT/TM, maka seluruh pelanggan TM/TT diupayakan menggunakan *Automatic Meter Reading (AMR)*.
- c. Jika dalam hal teknis memungkinkan, unit-unit akan melaksanakan peningkatan produksi pemasaran (menjual kualitas dan keandalan) dengan harga di atas harga yang berlaku. Untuk mengurangi jumlah sambungan liar, unit-unit akan membuat program penertiban sambungan listrik.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kecenderungan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain faktor-faktor makroekonomi yang di luar kendali Perseroan. Setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus.

9. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENINGKATAN MUTU DAN KEANDALAN

a. Program Peningkatan Efisiensi

Program peningkatan efisiensi yang dilakukan meliputi:

1. Penurunan Susut Jaringan
Susut jaringan menunjukkan besarnya tingkat kehilangan daya listrik dalam proses transmisi dari pembangkit ke pelanggan. Semakin besar susut jaringan, maka semakin besar kehilangan kWh yang pada akhirnya meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.



Susut jaringan secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	31 Desember	
	2019	2018
Susut Transmisi (%)	2,3	2,3
Susut Distribusi (%)	7,2	7,4
Susut Jaringan (%)	9,3	9,5

Upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan susut jaringan yaitu:

- Melakukan penambahan penyulang/jurusan baik untuk JTM maupun JTR pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat;
- Melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi;
- Melakukan penggantian konduktor/pemberatan jaringan;
- Penyeimbangan beban trafo;
- Penggantian kWh meter macet;
- Melaksanakan dan mengintensifkan program *Revenue Assurance*;
- Melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan program penertiban penerangan jalan umum liar dan penertiban pemakaian tenaga listrik;
- Melakukan perbaikan proses pengadaan Material Distribusi Utama (MDU);
- Melakukan penyempurnaan sistem *Billing Management*; dan
- Penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.

2. *Efficiency Drive Program* (EDP)

Efficiency Drive Program (EDP) mempunyai sasaran penghematan biaya operasi, peningkatan pendapatan dan keandalan sistem melalui program peningkatan efisiensi pembangkitan, penyaluran, distribusi dan ritel tenaga listrik serta peningkatan efisiensi dalam fungsi penunjang seperti sumber daya manusia, finansial dan sistem informasi manajemen antara lain melalui program peningkatan efisiensi investasi dalam hal belanja modal dan biaya operasional.

3. Penyempurnaan Sistem Operasi dan Pemeliharaan.

4. Peningkatan efisiensi produksi pembangkit dengan menekan konsumsi bahan bakar/*Specific Fuel Consumption* (SFC) pembangkit.

Rasio produksi pembangkit Non-BBM (MWh) terhadap total produksi (MWh) pembangkit Perseroan, Sewa, dan Pembelian Tenaga Listrik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	31 Desember	
	2019	2018
Rasio (%)	95,8	94,4

5. Penurunan Periode Penagihan.

Penagihan (*collection*) dilakukan melalui loket Perseroan, perbankan dan KUD. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan periode penagihan untuk masing-masing periode:

Indikator	31 Desember	
	2019	2018
Periode Penagihan (hari)	30,8	30,5

b. Program Peningkatan Mutu dan Keandalan

Dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 2000. Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan mutu dan keandalan tenaga listrik yang dihasilkan. Mutu tenaga listrik diukur dengan suatu standar mutu yaitu batasan teknis yang akan ditetapkan di setiap daerah sesuai dengan keadaan setempat. Tingkat keandalan diukur dari jumlah dan lama gangguan yang dinyatakan dengan indikator *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) untuk menunjukkan jumlah gangguan



per pelanggan per tahun dan *System Average Interruption Duration Index (SAIDI)* untuk menunjukkan lama gangguan per pelanggan per tahun.

Tabel di bawah ini menunjukkan pencapaian SAIDI dan SAIFI untuk seluruh Indonesia untuk masing-masing periode:

Indikator	31 Desember	
	2019	2018
SAIFI (kali/pelanggan/tahun)	11,5	9,9
SAIDI (jam/pelanggan/tahun)	18,9	16,0

Langkah yang dilakukan Perseroan dalam upaya meningkatkan mutu dan keandalan pasokan tenaga listrik dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- Membangun *Supervisory, Control and Data Acquisition (SCADA)* Distribusi untuk ibukota propinsi dan kota-kota lain yang minimal dipasok oleh 2 Gardu Induk dan 15 feeder;
- Mengoptimalkan pemanfaatan recloser atau *Automatic Vacuum Switch ("AVS")* yang terpasang di SUTM, dikoordinasikan dengan *reclosing relay* penyulang di Gardu Induk;
- Memonitor pengoperasian recloser atau AVS, dan menyempurnakan metode pemeliharaan periodiknya; dan
- Dimungkinkan menggunakan DAS (*Distribution Automation System*) pada daerah yang sangat padat beban dan potensi pendapatan tinggi.

Hal lain yang sangat mempengaruhi mutu dan keandalan adalah kecukupan pasokan listrik. Kekurangan pasokan di beberapa sistim kelistrikan secara jangka pendek diatasi dengan sistem sewa sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang diatasi dengan melakukan investasi baru baik oleh Perseroan sendiri ataupun oleh swasta.

10. TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan terus mengembangkan sistem teknologi informasi (*Information Technology/"IT"*) untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien, mampu memberikan nilai tambah serta mendukung proses pengambilan keputusan manajemen dalam waktu yang relatif singkat. Agar pengembangan dan pemanfaatan IT dapat dilakukan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Perusahaan menyusun tata kelola teknologi informasi (Tata Kelola IT/IT Governance) dan rencana induk pengembangan teknologi informasi (IT Master Plan) sebagai panduan dalam setiap rencana pengembangan IT di Perusahaan.

- *ERP (Enterprise Resources Planning)*. Dengan ERP, Perseroan akan memperoleh manfaat seperti proses bisnis yang terintegrasi dan standar; akuntabilitas menjadi lebih baik; proses bisnis lebih terkontrol, akses informasi lebih cepat dan akurat; dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. ERP sudah terimplementasi di seluruh unit Perseroan : Distribusi, Wilayah, Pembangunan, PLN P3B, Unit Jasa Penunjang dan Proyek.
- *P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat)*. Dengan adanya program ini, Perseroan mengurangi risiko pengelolaan kas pendapatan menjadi minimum, penyederhanaan proses bisnis, sentralisasi pengelolaan penagihan, efisiensi biaya dan pembayaran rekening listrik dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Layanan ini menjadi tumpuan semua proses pembayaran rekening listrik dan pembelian voucher Prabayar.
- *AP2T (Aplikasi Pengelolaan Pelanggan Terpusat)*. AP2T ini memadukan seluruh proses bisnis tata usaha langganan Perseroan dengan sistem P2APST, ERP, sistem listrik Prabayar, sistem non-tagihan listrik, *Contact Center 123* serta fitur lain dalam rangka membantu pelaksanaan bisnis proses untuk mengelola transaksi pelanggan mulai dari permintaan menjadi pelanggan, pengelolaan pemakaian listrik, perhitungan pemakaian listrik, penagihan dan pengelolaan perubahan lainnya. Dengan aplikasi ini, Perseroan memperoleh manfaat yang meliputi proses bisnis pelayanan pelanggan



menjadi standar dan terpusat, efisiensi biaya operasional, mendukung *revenue protection*, mempercepat proses pembuatan laporan tata usaha langganan, dan memperoleh akses informasi dari Unit Bisnis terkait secara *real time*. Aplikasi ini dibangun secara terpusat, terpadu dan dapat dikembangkan dengan mudah.

- *E-Proc (Electronic Procurement)*. Aplikasi E-Proc adalah aplikasi berbasis web yang mengubah proses pengadaan dari sistem konvensional menjadi elektronik berdasarkan bisnis proses pengadaan yang ditetapkan oleh Perseroan. Aplikasi ini dibangun sebagai pemenuhan terhadap prinsip GCG, yaitu adil, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini meliputi penghematan biaya, efisiensi dan standarisasi proses, meningkatkan kontrol dan akses global.
- *PMO (Program Management Office)*. PMO adalah prasana yang digunakan untuk memonitor pembangunan Program 35.000 MW dengan mengkoordinasikan proyek-proyek yang saling terkait secara terpusat. Dengan PMO, Perseroan akan dapat memperoleh data yang terkonsolidasi terhadap seluruh proyek ketenagalistrikan, meningkatkan kinerja proyek, melakukan administrasi investasi proyek dengan lebih mudah, mengelola utilisasi sumber daya proyek terutama anggaran secara optimal, dan melakukan pelaporan secara konsisten.
- *Enterprise Asset Management (“EAM”) Distribusi dan EAM Transmisi*. EAM adalah penerapan konsep manajemen yang menyeluruh dalam rangka memaksimalkan nilai dan mengoptimalkan siklus hidup fisik aset distribusi perusahaan yang meliputi aktivitas: (i) perencanaan; (ii) pembangunan/konstruksi; (iii) operasi/pemeliharaan; dan sampai ke (iv) penarikan/penghapusan. Manfaat dari implementasi EAM meliputi standarisasi proses bisnis pemeliharaan dan integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien, mengoptimalkan pemanfaatan *software* SAP (*System Application and Product*) yang dimiliki Perseroan, tersedianya sumber informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang akurat dan cepat, tersedianya mekanisme kontrol dan monitoring sistem operasi dan pemeliharaan yang lebih baik dan terukur, dan hasil implementasi dapat di-*roll out* di Unit PLN di Indonesia. Implementasi EAM saat ini merupakan tahap pertama.
- *Data Center*. Dengan pemusatan aplikasi korporat di *Data Center* maka Perseroan akan memperoleh manfaat seperti standarisasi bisnis proses, efisiensi operasional, optimalisasi aset, keamanan data dan sebagainya. *Data Center* Perseroan sudah beroperasi dengan baik dan telah di-*upgrade* dengan implementasi HW ERP pada awal tahun 2013.
- *PLN Net*. Jaringan komunikasi data/*Wide Area Network* (“WAN”) Perseroan ini menjadi media untuk komunikasi data bagi aplikasi korporat seperti *Enterprise Resources Planning* (“ERP”), EPROC, P2APST, Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (“AP2T”), Sistem Manajemen untuk Kerja (SMUK) dan Sistem Informasi Kinerja Pegawai Nasional (SIMKP), serta untuk komunikasi email dan pertukaran data antar unit. Pengelolaan administrasi serta kebijakan koneksi yang menyangkut WAN dan internet diatur secara terpusat melalui kerjasama terpusat. Perseroan secara bertahap melakukan standarisasi koneksi dan kapasitas dari unit level 1, 3 dan 3 berdasarkan kebutuhan unit. *Roll out* AP2T dan ERP sudah berjalan dan tidak mengalami hambatan masalah jaringan komunikasi.
- *i-SMS-8123*. Layanan melalui pesan *Short Message Service* ke 8123 yang berbasis Sistem Manajemen Pelayanan Pelanggan (SMPP) ini bersifat nasional yang diharapkan dapat meningkatkan komunikasi pelanggan ke PLN sehingga proses lebih transparan dan juga mengurangi beban *call center* dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa fitur utama dalam layanan ini antara lain adalah info rekening, info persyaratan balik nama, info pendaftaran, pendaftaran member, perubahan daya, permintaan multiguna, pemutusan sementara, perubahan nama, pasang baru, jatuh tempo, lapor koreksi rekening, stand meter, keluhan pelanggan teknis dan non teknis, laporan pencurian listrik Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan berbagai produk Perseroan. Saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi sistem yang terintegrasi dengan Sistem *Contact Center* Terpusat (CCTR) maupun AP2T, dengan koordinasi melalui DIVAGA dan DIVSIM.



- *Service Desk PLN Pusat.* Dengan adanya *Service Desk* maka PLN Pusat dapat memberikan dukungan operasional layanan IT korporat meliputi ERP, eProc, email, *desktop support*, AP2T dan P2APST.

11. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan memiliki strategi-strategi usaha sebagai berikut:

Menyelesaikan Program 35.000 MW dengan sukses

Program 35.000 MW adalah program pembangunan pembangkit listrik, transmisi dan saluran distribusi di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh PLN bersama-sama dengan berbagai IPP swasta, untuk membangun pembangkit, transmisi dan gardu di lebih dari 291 lokasi di seluruh Indonesia (terdiri dari 76 lokasi di Sumatera, 49 lokasi di Jawa dan Bali, 83 lokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, 40 lokasi di Kalimantan dan 43 lokasi di bagian timur Indonesia) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 4/2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14/2017.

Untuk pembangunan pembangkit listrik, Perseroan bermaksud menggunakan skema EPC untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan. Melalui skema EPC, Perseroan akan bertanggung jawab untuk biaya dan kegiatan terkait perencanaan, pendanaan, penyediaan tanah dan pengoperasian pembangkit listrik dan berpotensi menjadi skema kontrak *turnkey* penuh dimana kontraktor EPC akan dibayar berdasarkan tahapan penyelesaian yang dihitung atas dasar barang yang dikirim ke Perseroan di lokasi pembangunan, atau menggunakan konsultan manajemen proyek dan berbagai prosedur untuk mengalokasikan risiko akan ditempatkan yang tergantung pada prioritas dan sifat dari proyek. Pembangunan saluran distribusi dan transmisi akan dilaksanakan dengan menunjuk kontraktor melalui skema EPC. Skema bangun guna serah (*build operate transfer*) dimana kontraktor swasta melakukan konstruksi, pembiayaan dan pengoperasian transmisi dan biaya pembangunan akan dikembalikan oleh Perseroan dalam jangka waktu tertentu untuk meminimalisir risiko.

Pada tanggal 31 Desember 2019, sekitar 19,2% dari pembangunan Program 35.000 MW selesai (terutama di JTBN dan wilayah Sulawesi), 56,94% sedang dalam pembangunan (terutama di Jawa, Bali dan Sumatera), 19,4% belum dibangun (Sumatera dan Kalimantan), 2,34% masih dalam proses tender (terutama di Kalimantan, Sulawesi, Maluku - Papua) dan 2,07% masih dalam perencanaan (terutama di Maluku & Papua). Dari 8.862,4 MW yang menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya, 31% selesai, 51% sedang dibangun, 10% masih dalam proses tender dan 8% masih dalam perencanaan. Pada awal 2018, Pemerintah menyesuaikan tanggal penyelesaian Program 35.000 MW hingga 2024, lima tahun lebih lambat dari yang direncanakan semula, untuk memperhitungkan permintaan listrik yang kurang dari perkiraan. Dengan mempertimbangkan investasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Program 35.000 MW, Perseroan juga mencari pendanaan dari pasar modal atau institusi keuangan disamping terus memperkuat struktur permodalan agar rasio keuangan tetap sehat.

Menyelesaikan Program Fast Track dengan sukses

Pemerintah memberikan mandate kepada Perseroan untuk mempercepat pengembangan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Indonesia melalui FTP I. Selain itu, Pemerintah telah memberi mandat kepada Perseroan untuk pengadaan 15.074 MW (termasuk kapasitas pembangkit listrik IPP) dari energi terbarukan, gas dan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memenuhi peningkatan permintaan listrik di Indonesia melalui FTP II. Program Fast Track diharapkan menghasilkan pengembangan 108 pabrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan beban subsidi Pemerintah dan memenuhi permintaan listrik yang meningkat di Indonesia.

Meneruskan upaya untuk menaikkan tarif listrik untuk pelanggan Perseroan agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi listrik Pemerintah

Perseroan telah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang efektif sejak bulan Juli 2010. Namun demikian, selisih antara harga jual tenaga listrik dengan biaya operasional Perseroan tetap substansial. Selain itu, seluruh pelanggan saat ini disediakan listrik pada harga bersubsidi.



Perseroan bermaksud berangsur-angsur menaikkan harga jual tenaga listrik agar bisnis Perseroan dapat memberikan keuntungan dan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap subsidi listrik Pemerintah melalui inisiatif penjualan listrik ke perusahaan pada harga pasar dan pemberlakuan tarif listrik regional. Perseroan akan terus membutuhkan subsidi dari Pemerintah selama harga jual listrik rata-rata berada di bawah biaya pokok penyediaan listrik dan menghimpun pendanaan untuk mendukung program investasi Perseroan.

Berfokus pada menurunkan biaya operasional

Perseroan bermaksud menurunkan biaya operasional dengan :

- mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap pembangkitan listrik yang menggunakan bahan bakar minyak dan meningkatkan pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara sebagai bagian dari Program Fast Track. Dibandingkan jenis bahan bakar lainnya, Indonesia memiliki pasokan batubara dalam jumlah berlimpah yang merupakan pilihan sumber bahan bakar lebih murah. Strategi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh dari pelanggan Perseroan saat ini maupun pelanggan baru dengan mengembangkan pembangkit listrik dan transmisi serta saluran distribusi baru pada biaya yang lebih murah sebagai bagian dari Program Fast Track; dan
- mengurangi biaya pembangkitan melalui manajemen sisi pasokan, yang melibatkan pembelian kelebihan tenaga listrik dari pembangkit pemegang izin operasi berbahan bakar non-BBM (*captive*) pada waktu beban puncak, penghentian unit pembangkitan tertentu dalam periode di luar waktu beban puncak dan mematikan unit pembangkitan berbahan bakar BBM tertentu selama akhir pekan.
- mengurangi biaya pengiriman batubara melalui pengaturan tiga zona pengiriman di Sumatra, Indonesia tengah dan Indonesia bagian timur untuk mengangkut batubara ke pembangkit listrik, berdasarkan lokasi tambang yang relevan. Batubara untuk pembangkit listrik di Sumatera akan dipasok dari tambang di pulau Sumatra; Indonesia tengah akan dipasok oleh tambang Sumatera dan Kalimantan Selatan; dan Indonesia bagian timur akan dipasok dari tambang Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah; dan
- mengurangi biaya produksi untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas melalui pengaturan sistem zona pasokan gas yang mempertimbangkan jarak dari sumber gas ke pembangkit listrik. Perseroan sedang fokus mempersiapkan penyediaan gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLN dan menjaga keekonomian listrik agar tetap menarik. Dalam rangka mempercepat konversi BBM yang berbasis impor ke bahan bakar gas yang tersedia mencukupi di dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No.13 K/13/MEM/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang pada dasarnya menugaskan PLN untuk gasifikasi pembangkit dan menugaskan kepada Pertamina untuk menyiapkan pasokan dan infrastruktur LNG. Penugasan tersebut meliputi 52 lokasi pembangkit tersebar di Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dalam waktu dekat akan segera beroperasi FSRU Sulawesi yang dilaksanakan oleh PT PLN Gas dan Geothermal yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) untuk mensuplai gas ke LMVPP Amurang dan dilanjutkan ke pembangkit di Minahasa. Dalam hal pembangkit Minahasa masih belum operasi sementara kontrak LMVPP Amurang berakhir, secara temporer FSRU Sulawesi tersebut akan digunakan untuk gasifikasi pembangkit di Gorontalo. Untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit di Tanjung Batu, Kalimantan Timur sekaligus untuk memastikan pasokan gas jangka panjang pembangkit tersebut, saat ini sedang dilakukan penyelesaian pembangunan pipa gas ruas KM 52 Bontang ke pembangkit Tanjung Batu sepanjang 52 KM yang ditargetkan selesai pada September 2020.

Memperkenalkan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis Perseroan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, bermaksud untuk mengurangi kehilangan daya listrik, meningkatkan sistem pemeliharaan Perseroan, meningkatkan efisiensi produksi pembangkit, memperbaiki perputaran/siklus persediaan dan memperpendek periode penagihan serta menerapkan



program untuk meningkatkan kinerja operasional dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini. Perseroan juga berusaha untuk meningkatkan beberapa keandalan operasional lainnya seperti *forced outage rate*, faktor kapasitas dan jumlah pelanggan per karyawan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi keuangan lebih lanjut melalui pengelolaan arus kas terpusat (*cash pooling*) dengan menerapkan pembayaran tagihan listrik tersentralisasi secara online dengan menggunakan sistem P2APST.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, bermaksud untuk mengurangi kehilangan daya listrik, meningkatkan sistem pemeliharaan Perseroan, meningkatkan efisiensi produksi pembangkit, memperbaiki perputaran/siklus persediaan dan memperpendek periode penagihan serta menerapkan program untuk meningkatkan kinerja operasional dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini. Perseroan juga berusaha untuk meningkatkan beberapa keandalan operasional lainnya seperti *forced outage rate*, faktor kapasitas dan jumlah pelanggan per karyawan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi keuangan lebih lanjut melalui pengelolaan arus kas terpusat (*cash pooling*) dengan menerapkan pembayaran tagihan listrik tersentralisasi secara online dengan menggunakan sistem P2APST.

PLN sudah memiliki skema bisnis dalam penyediaan layanan listrik tenaga surya dalam skala besar (PLTS Komunal dan PLTS terapung) maupun skala kecil untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri. PLN bekerja sama dengan para pemain di semua rantai nilai bisnis penyediaan listrik tenaga surya, terutama dengan BUMN lain yang juga melibatkan Kementerian BUMN, upaya-upaya yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. PLN sudah menyiapkan pengembangan bisnis PVR untuk B2B Customers dengan pendekatan strategi yg regional-based
2. Pendekatan konsultatif dipilih dalam customer management untuk memastikan Customers mendapatkan solusi PVR yang sesuai dengan kebutuhan
3. Di Jawa – Bali, PVR business yang masif akan membawa konsekuensi naiknya cost di Grid PLN dengan berbagai parameter yang di analisis, namun memberikan impact positif di luar Jawa Bali
4. PLN sudah mempersiapkan go to market strategy yang sesuai dengan landscape market masing-masing regional dengan objective memperoleh value paling optimal bagi sustainability PLN
5. Partnership strategy menjadi salah satu enabler yang kritical dalam kesuksesan deployment bisnis PVR di PLN

12. PROSPEK USAHA

Akhir tahun 2019, berkat kerja keras seluruh jajaran Perseroan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Rasio Elektrifikasi Indonesia telah mencapai 98,89% (termasuk pelanggan non-Perseroan). Sekalipun sudah melampaui target RPJMN eriode 2015-2019 sebesar 96%, tingkat RE ini masih tertinggal di peringkat 95 dibandingkan dengan negara-negara di Asia, seperti: Malaysia di peringkat 87, Vietnams di peringkat 84 dan Singapura Thailand, Tiongkok, Korea Selatan berada pada peringkat kedua. Pemerintah telah menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% pada tahun 2020. Bagi PLN, tugas ini adalah tugas mulia untuk menerangi desadesa di daerah terdepan, terluar dan tertinggal, di antaranya bahkan ada yang belum pernah menikmati listrik sejak Indonesia merdeka.

Sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, Indonesia diprediksi akan terus berkembang menjadi salah satu negara dengan nilai ekonomi terbesar di dunia. Setelah termasuk sebagai salah satu negara dengan nilai GDP diatas US\$1 triliun pada akhir tahun 2018 lalu, dalam kurun waktu 13 tahun mendatang, Indonesia diprediksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi no-5 terbesar di seluruh dunia (PWC).

Dengan berbagai gambaran tersebut, dan mempertimbangkan laju pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi serta kestabilan sosial-politik selama beberapa tahun terakhir, maka kebutuhan tenaga listrik Indonesia akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, setiap pertumbuhan ekonomi 1%, membutuhkan dukungan tambahan daya listrik sebesar 1,5x proyeksi tingkat pertumbuhan. Sehingga dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Pemerintah dalam APBN, dapat diperkirakan besaran tambahan kebutuhan daya listrik yang harus dipenuhi oleh Perseroan, seperti uraian berikut.



Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, patokannya sebesar Rp15.500 per dolar, lebih tinggi dibandingkan tahun APBN 2020 yang Rp14.642 per dolar. Harga minyak mentah dipatok US\$38 per barel, lebih tinggi dibandingkan APBN 2020 yang US\$38 per barel. Sedangkan lifting minyak dan gas bumi tahun 2019 diperkirakan masing-masing mencapai 45.746 barel per hari dan 1.197 MMBTU per hari, inflasi 2,19% dan suku bunga SPN adalah 5,79%. Memperhatikan proyeksi dan sasaran makro dalam APBN tersebut Perseroan telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2019. Beberapa sasaran pokok dimaksud diantaranya adalah:

Keterangan	Satuan	Realisasi	Target 2019	Perubahan
Volume Penjualan Tenaga Listrik	TWh	245,5	251,0	-2,1%
Penambahan Pelanggan	Juta Pelanggan	3,78	3,84	-1,5%
Penambahan Daya Tersambung	MVA	7.796,0	8.921,7	-12,6
Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik	Rp Miliar	276.062	282.722	-2,2%
Laba Usaha Setelah Subsidi	Rp Miliar	44.165	13.183	282,3%
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp Miliar	4.322	8.020	83,6%

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perseroan memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah:

- 1) Menyelesaikan program 35.000 MW termasuk jaringan transmisi dan gardu induk.
- 2) Menurunkan BPP melalui upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi operasi aset
- 3) Mengembangkan Strategic partnership yang meleverage nama besar dan pengalaman Perseroan dalam membangun tambahan kapasitas.
- 4) Mengantisipasi kebijakan *power wheeling* (sewa jaringan transmisi dan distribusi).
- 5) Mengembangkan Mobile Power Plant untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik jangka pendek.
- 6) Mengembangkan EBT dan konservasi energi termasuk melalui partisipasi pelanggan.
- 7) Melaksanakan program *Demand Side Management* yang terintegrasi dengan struktur tarif (insentif disinsentif).
- 8) Mengupayakan struktur tarif listrik yang dapat memenuhi *revenue requirement* untuk kegiatan operasi dan investasi.
- 9) Melanjutkan upaya pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan
- 10) Melanjutkan perbaikan kemampuan meminjam (*Debt Capacity*) dan mendapatkan pinjaman dengan biaya yang paling efisien bagi Perseroan.
- 11) Mengupayakan agar pelaksanaan *Performance Based Regulatory* (PBR) sesuai dengan best practice.
- 12) Menurunkan angka SAIDI SAIFI.
- 13) Menurunkan non fuel cost.
- 14) Menurunkan susut jaringan.
- 15) Menciptakan sistem *Supply Chain Management* yang terintegrasi.
- 16) Melayani dan mencukupi kebutuhan permintaan listrik yang tinggi termasuk melayani daftar tunggu, dan meningkatkan rasio elektrifikasi di propinsi tertinggal sesuai dengan pertumbuhan permintaan (demand), ketersediaan pembangkit, dan kemampuan pendanaan.
- 17) Melanjutkan program listrik Prabayar/listrik pintar.
- 18) Melanjutkan inisiatif pengembangan *smart grid* dan infrastruktur kendaraan listrik (*charging station*).
- 19) Mempersiapkan regenerasi pimpinan Perusahaan.
- 20) Menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang menjadi pilihan utama pasar tenaga kerja.

13. PERSAINGAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia tenaga listrik, bukan lagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1985, sehingga dimungkinkan adanya perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang mirip dengan Perseroan, tetapi Perseroan masih merupakan perusahaan yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk



mendukung hal tersebut Perseroan telah melakukan restrukturisasi organisasi pada tanggal 18 Agustus 2015 sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) dan terakhir diubah dengan Peraturan Direksi No. 0021.P/DIR/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kinerja organisasi dan mendukung kebutuhan bisnis masa mendatang, menyelaraskan dan mensinergikan antara fungsi korporat strategis dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end*, mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel dari hulu ke hilir.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh world bank dalam *Ease of Doing Business Report by World Bank*, dalam industri ketenagalistrikan Indonesia, PLN adalah *market leader* dalam hampir seluruh aspek, di antaranya: skala aset, jangkauan layanan, dan jumlah pelanggan. PLN memiliki potensi untuk menangkap value yang signifikan dari aset dan basis pelanggannya melalui optimasi aset dan pengembangan bisnis baru. PLN mampu memperbaiki persepsi kemudahan akses terhadap listrik dengan menyederhanakan proses penyambungan baru atau penambahan daya. Selain itu, secara nominal, tarif listrik Indonesia termasuk yang terendah di kawasan Asia Tenggara.

14. KECENDERUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Tarif Listrik

Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh tarif listrik untuk konsumen. Di Indonesia, tarif listrik diusulkan oleh Kementerian ESDM dan ditetapkan oleh Presiden.

Untuk pelanggan selain kelompok rumah tangga kecil dengan daya 450 VA sampai dengan 900 VA (yang tunduk pada pengaturan tarif yang berbeda untuk biaya tetap dan memperbolehkan Perseroan untuk menerima subsidi Pemerintah), Pemerintah menaikkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar:

- 10,0%, efektif dari 1 Juli 2010 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8/2011;
- 15%, efektif dari 1 Januari 2013 sesuai dengan Permen ESDM No. 30 Tahun 2012; dan
- 22%, efektif dari 1 Mei 2014 sesuai dengan Permen ESDM No. 9 Tahun 2014.

Selanjutnya, Permen ESDM No. 31 Tahun 2014, efektif dari 1 Januari 2015, dan Permen ESDM No. 9 Tahun 2015, efektif dari 1 Mei 2015, meningkatkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar 0,63% untuk 8 kelompok pelanggan, termasuk:

- pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya antara 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA;
- pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA;
- pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya antara 6.600 VA sampai dengan 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya di atas 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 30.000 kVA;
- pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya antara 6.600 VA sampai dengan 200 kVA; dan
- pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya di atas 200 kVA.

Tren tarif listrik yang berlaku untuk setiap kelompok pelanggan dapat berbeda dari tren harga jual rata-rata secara keseluruhan, dikarenakan adanya perbedaan harga jual tenaga listrik dalam setiap kelompok pelanggan tergantung pada tingkat pemakaian tenaga listrik.

Subsidi

Subsidi yang diterima dari Perseroan digunakan untuk menutup biaya-biaya meliputi: pembelian tenaga listrik, beban bahan bakar dan pelumas (seperti BBM, gas alam, batubara dan minyak pelumas), beban pemeliharaan (seperti material), beban kepegawaian, beban administrasi, penyusutan atas aset tetap operasional dan beban keuangan. Perseroan tidak mendapatkan subsidi Pemerintah untuk beban-beban yang tidak terkait dengan pembangkitan tenaga listrik, seperti beban usaha Entitas Anak Perseroan di bidang telekomunikasi atau layanan engineering.



Nilai subsidi listrik akhir pada setiap tahun fiskal ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Tidak ada batasan atas untuk subsidi listrik. Dalam hal terdapat terdapat selisih lebih pembayaran subsidi listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada Perseroan dengan hasil penelitian dan verifikasi, selisih lebih pembayaran subsidi listrik tersebut dapat dikompensasikan dengan tagihan subsidi listrik Perseroan periode berikutnya (dengan persetujuan dari Menteri Keuangan). Namun demikian, dalam hal tidak terdapat tagihan subsidi listrik periode berikutnya, selisih lebih pembayaran harus segera disetor ke kas negara oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bahan bakar dan beban non bahan bakar

Sebagian beban bahan bakar dan non bahan bakar berdenominasi dalam, atau terkait dengan, Dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2019, 35,15% dari beban bahan bakar dan non bahan bakar dalam mata uang, atau terkait dengan, Dolar Amerika Serikat, dan 64,84% dari beban bahan bakar dan non bahan bakar dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi beban usaha Perseroan dalam Rupiah (mata uang pelaporan). Sebagai contoh, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada umumnya akan mengakibatkan beban usaha dalam Rupiah mengalami kenaikan.

Perseroan terus menjajaki kemungkinan mengganti pembangkit listrik berbahan bakar BBM dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas alam, terutama pembangkit di bawah Program Fast Track dan Program 35.000 MW. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mendapatkan sumber batubara atau gas alam yang stabil pada harga yang wajar atau tidak sama sekali.

Beban pemeliharaan

Perseroan telah, dan akan terus, mencatatkan beban pemeliharaan yang signifikan untuk pembangkit tenaga listrik miliknya. Beban pemeliharaan dalam porsi yang substansial berdenominasi mata uang asing dikarenakan ketergantungan Perseroan pada material dan jasa ahli yang tidak tersedia di Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah dan ketidakmampuan Perseroan untuk membatasi kenaikan beban pemeliharaan dapat berdampak pada beban usaha dan hasil usaha Perseroan.

Pertumbuhan perekonomian dan permintaan listrik oleh pelanggan

Kenaikan permintaan tenaga listrik sebagian bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transformasi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang berjalan dalam hal memperluas basis pelanggan industri dan bisnis telah berperan penting dalam pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Perseroan berkeyakinan bahwa pelanggan industri, bisnis dan rumah tangga akan terus menjadi pelanggan utama Perseroan di pasar konsumsi tenaga listrik dan hasil usaha Perseroan akan bergantung terutama pada pertumbuhan permintaan tenaga listrik dari sektor-sektor ini.

Penyelesaian dan dimulainya kegiatan produksi secara komersial dari proyek-proyek Perseroan

Perseroan memperkirakan penjualan dan hasil usaha akan berfluktuasi tergantung pada proyek-proyek Perseroan yang dalam tahapan pengembangan maupun penyelesaian, khususnya proyek-proyek dengan IPP. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani sejumlah *joint venture* dalam rangka menerapkan strategi bisnis Perseroan dan meningkatkan kapasitas pembangkitan tenaga listrik, terutama sehubungan dengan Program *Fast Track* dan Program 35.000 MW. Kenaikan belanja modal yang tidak terduga terkait dengan proyek-proyek dalam program tersebut mungkin memerlukan tambahan kontribusi modal dari Entitas Anak Perseroan dimana hal tersebut dapat meningkatkan beban keuangan dalam hal pendanaan dari pihak ketiga diperlukan; ketidakmampuan Perseroan untuk membiayai belanja modal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis dan hasil usaha Perseroan.



Hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan akan bergantung pada penyelesaian proyek-proyek ini dengan sukses dan tepat waktu dan kemampuan Perseroan untuk menemukan mitra joint venture yang dapat diandalkan. Penyelesaian dan dimulainya produksi komersial proyek pembangkit tenaga listrik baru pada umumnya akan langsung meningkatkan penjualan listrik dengan asumsi terdapat permintaan yang cukup. Lebih lanjut, di bawah PJBL dengan IPP, Perseroan tunduk pada kewajiban take or pay dan menjamin bahwa stasiun tenaga listrik baru terhubung pada saluran transmisi dengan baik dan tepat waktu. Ketidakmampuan Perseroan untuk menyelesaikan sambungan tersebut akan mengakibatkan tidak adanya penjualan atau penjualan di bawah ekspektasi sehubungan dengan tambahan kapasitas pembangkitan dan beban yang timbul dari PJBL akan menjadi tidak sejalan dengan ekspektasi tingkat penjualan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Akses terhadap pendanaan dan beban pendanaan

Perseroan terutama bergantung pada pinjaman (seperti two-step loan), pendapatan dari pelanggan dan subsidi dari Pemerintah (yang diperkirakan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat) untuk kebutuhan pendanaan Perseroan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek Perseroan beserta belanja modalnya. Selain itu, Perseroan telah, dari waktu ke waktu, menerbitkan Efek bersifat utang. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, serta biaya yang timbul dari fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Akses Perseroan terhadap pendanaan dan beban pendanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah utang yang belum jatuh tempo dan pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit, persyaratan pada perjanjian Efek bersifat utang, atau dokumen pinjaman lainnya, sehubungan dengan pinjaman tambahan yang diperbolehkan bagi Perseroan.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Perubahan nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lain, terutama Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan Euro telah mempengaruhi dan akan terus mempengaruhi arus kas, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Beban usaha dan pinjaman Perseroan dalam porsi tertentu berdenominasi mata uang asing. Mata uang Rupiah cenderung melemah terhadap Dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang asing pada tahun 2017.

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan beban usaha Perseroan dalam mata uang asing maupun beban usaha yang dipatok pada mata uang asing dan akan meningkatkan biaya dalam Rupiah untuk belanja modal dalam mata uang asing, yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin dan banyak dari biaya tersebut sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000 MW. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan beban keuangan Perseroan dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing, serta meningkatkan biaya untuk pembayaran kembali dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2019, sekitar 68,45% dari total utang Perseroan yang belum jatuh tempo (termasuk penerusan pinjaman, pinjaman Pemerintah, pinjaman bank dan utang pembelian listrik) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Oleh karena itu, pelemahan Rupiah dapat meningkatkan beban keuangan secara substansial serta meningkatkan jumlah utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang belum jatuh tempo yang dilaporkan dalam Rupiah pada laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan melakukan lindung nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 yang mengharuskan rasio lindung nilai sebesar 20% dari selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan kedepan selama dua periode berturut-turut. Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio likuiditas (didefinisikan sebagai rasio aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) tahun kedepan) sebesar 50%. Mulai tanggal 1 Januari 2016, rasio lindung nilai minimum meningkat menjadi 25% sedangkan rasio likuiditas minimum naik menjadi 70%. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rasio lindung nilai dan rasio likuiditas minimum tetap sama. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi biaya untuk membayar utang, beban bahan bakar dan beban usaha, kewajiban kepada IPP dan belanja modal. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dalam Rupiah dan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan konsolidasian.



Musiman

Permintaan tenaga listrik dipengaruhi oleh faktor musiman dan pada umumnya mengalami penurunan pada musim kemarau dari bulan April sampai dengan bulan September, sebagai contoh. Permintaan mengalami penurunan pada hari raya tertentu seperti di akhir Ramadan. Perseroan juga mengalami kenaikan permintaan untuk tenaga listrik dari pelanggan industri di semester kedua, dimana hal ini merupakan siklus produksi mereka secara umum. Sebagai akibat dari pola musiman ini, penjualan dan hasil usaha Perseroan menjadi lebih rendah dalam periode triwulanan tertentu yang dapat bervariasi dari tahun ke tahun tergantung, antara lain, penetapan tanggal Ramadan.

15. HAK CIPTA, PATEN & MEREK PERSEROAN

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak atas kekayaan intelektual yang masih berlaku berupa hak cipta, paten dan merek, terdiri dari:

No.	Perusahaan	Hak Cipta	Merek	Paten
1.	Perseroan	3	1	58*
2.	PT IP	21	1	2
3.	PT PLN Batam	1	-	-
4.	PT PJB	-	-	8*
5.	PT ICON+	-	13**	-
Total		25	15	68

*) 6 paten Perseroan dan 8 paten PJB sedang dalam proses pendaftaran

**) 3 merek ICON+ sedang dalam proses pengurusan

Jangka waktu dari Hak Cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah 50 tahun, saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki Hak Cipta dengan jangka waktu 2055 sampai dengan 2066. Untuk jangka waktu dari Merek berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah 10 tahun, saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki Merek dengan masa berlaku bervariasi dari September 2020 sampai dengan tahun 2028. Sedangkan jangka waktu dari Paten berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah 20 tahun untuk dan 10 tahun untuk Paten Sederhana, saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki Paten dengan masa berlaku bervariasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2039.

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
1.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) No.066.PJ/063/IP/2018 dan No.0307.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTU milik IP yang terdiri atas Entitas PLTU Tambak Lorok Unit 3. Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
2.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap - 1 (PLTGU-1) No. 067.PJ/063/IP/2018 dan No.0308.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTGU-1 milik IP yang terdiri atas Entitas PLTGU Priok Blok I dan II. Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.	N/A
3.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap - 2 (PLTGU-2) No.068.PJ/063/IP/2018 dan No.0309.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTGU-2 milik IP yang terdiri dari Entitas PLTGU Tambak Lorok Blok I dan II serta Entitas PLTGU Tambak Lorok Blok III. Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.	N/A
4.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap - 3 (PLTGU-3) No.069.PJ/063/IP/2018 dan No.0310.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTGU-3 milik IP yang terdiri dari Entitas PLTGU Grati Blok I serta Entitas PLTGU Grati Blok II. Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.	N/A
5.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) No.070.PJ/063/IP/2018 dan No.0311.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTG milik IP yang terdiri dari: a. Entitas PLTG Gilimanuk; b. Entitas PLTG Pesanggaran Unit 1-4; c. Entitas PLTG Pamaron Unit 1-2. Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
6.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) No.071.PJ/063/IP/2018 dan No.0312.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	<p>Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTD milik IP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entitas PLTD Pesanggaran; Entitas PLTD Nusa Penida; Entitas PLTD Karimunjawa; Entitas PLTD Senayan. <p>Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.</p>	N/A
7.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) No.072.PJ/063/IP/2018 dan No.0313.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	<p>Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTP milik IP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entitas PLTP Kamojang; Entitas PLTP Gunung Salak; Entitas PLTP Darajat. <p>Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.</p>	N/A
8.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) No.073.PJ/063/IP/2018 dan No.0314.PJ/REN.05.02/DITREN/2018 antara Perseroan dengan IP.	<p>Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTA milik IP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entitas PLTP Saguling; Entitas PLTA Area 1; Entitas PLTA Area 2; Entitas PLTA PB Soedirman; Entitas PLTA Area 3; Entitas PLTA Embedded. <p>Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 – 1 Januari 2023.</p>	N/A
9.	Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 No. 54.PJ/061/IP/2017 dan No. 0091.PJ/REN.05.02/DITREN/2017 antara Perseroan dengan IP.	<p>Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak berkaitan dengan penjualan tenaga listrik oleh IP dan pembelian tenaga listrik oleh Perseroan berupa DMN, Keluaran Energi Netto yang dihasilkan oleh PLTU milik IP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entitas PLTU Suralaya Unit 1, 2, 3, dan 4; Entitas PLTU Suralaya Unit 5, 6, dan 7. <p>Nilai perjanjian terikat pada ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2046.</p>	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
10.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (<i>Shareholder Loan</i>) dalam Bentuk Penerusan Pinjaman Atas Dana Pinjaman dari Kreditur Terkait Pendanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tambak Lorok Blok III, No. 1449.PJ/KEU05.03/DIRUT/2018 dan No. 423. PJ/061/IP/2018, tanggal 12 November 2018, antara IP dan Perseroan (Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham).	Sebelumnya, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas senilai USD201.745.495,46, tanggal 19 Februari 2018, dan Amandemen Perjanjian Fasilitas, tanggal 12 Juni 2018, mengenai perubahan loan commitment menjadi USD213.901.481,32, dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai Mandated Lead Arrangers dan Original Lenders (Kreditur), serta the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai Agen (Perjanjian Fasilitas). Perseroan sepakat untuk meneruskan pinjaman Kreditur kepada IP berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham untuk Proyek Tambak Lorok Combined Cycle Power Plant Blok 3. Adapun jumlah pinjaman yang diteruskan adalah sebesar USD 213.901.481,32. Jatuh tempo starting point of credit, sebagai awal untuk pembayaran bunga (interest) berdasarkan Perjanjian Fasilitas adalah 6 bulan setelah take-over date (sebagaimana tercantum dalam kontrak EPC), atau 30 bulan setelah tanggal penandatanganan (19 Agustus 2020), mana yang terjadi lebih dahulu. Sedangkan untuk Perjanjian Pemegang Saham berlaku sampai dengan selesainya pembayaran pinjaman yakni pada tanggal 19 Agustus 2032.	N/A
11.	Akta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha No. 78, tanggal 25 April 2017, antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha No. 31, tanggal 14 September 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (KIK EBA).	Berdasarkan KIK EBA, PT Danareksa Investment Management, selaku Manajer Investasi, mengeluarkan instrumen efek beragun aset Kelas A dan Kelas B dengan IP sebagai Kreditur Awal dan Penyedia Jasa (<i>Servicer</i>) yang menyediakan jasa atas aset keuangan IP. EBA Kelas A adalah EBA arus kas tetap dan EBA Kelas B adalah arus kas tidak tetap. EBA Kelas A akan ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000.000 dengan nominal Rp1, sedang EBA Kelas B akan ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000 dengan nominal Rp1. Pelunasan EBA akan dilakukan bertahap per tiga bulan. EBA Kelas A akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2022.	N/A
12.	Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Pasokan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari Pelabuhan Tarakan ke PLTU Suralaya Tahun 2013-2022 No. 41.PJ/061/IP/2013 dan No. A.781/SP.902/DIRUT-2013, tanggal 19 Maret 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III, tanggal 30 Maret 2017, antara Bag dan IP.	Tujuan perjanjian ini adalah pelaksanaan pekerjaan jasa pengangkutan batubara pasokan PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk periode tahun 2013-2022 dengan nilai berdasarkan rumusan tertentu. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tahun 2022.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
13.	Perjanjian Pengadaan Jasa Pengangkutan Batubara Pasokan PT Adaro Indonesia dari Transshipment Taboneo ke PLTU Suralaya Tahun 2014-2016 No. IP: 119.PJ/061/IP/2014 dan No. BAg A.3407/SP.901/DIRUT-2014 tanggal 18 September 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III, tanggal 24 Januari 2018, antara BAg dan IP.	Tujuan perjanjian ini adalah penyediaan jasa pengangkutan batubara pasokan PT Adaro Indonesia dari transshipment Taboneo ke PLTU Suralaya tahun 2014-2020 dengan nilai berdasarkan rumusan tertentu. Perjanjian ini masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023.	N/A
14.	Perjanjian Jasa Konsultasi Supervisi Desain, Supervisi Konstruksi dan Quality Assurance & Quality Control (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plan Block 2, 3 & 4 Add-On Project No. 0028.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2017 tanggal 6 Maret 2017 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian tengah I) dan PLNE.	Perseroan menunjuk PLNE untuk memberikan jasa konsultasi supervise desain, supervise konstruksi dan quality assurance dan quality control (QA/QC) pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plan Block 2, 3, dan 4 add-on project, sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Biaya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp120.239.538.375. Perjanjian ini masih berlaku sampai tanggal 12 November 2020.	N/A
15.	Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pekerjaan Konstruksi PLTU Lontar EXT No. 0034.PJ/DAN.02.06/UIP V/2016 tanggal 15 April 2016 antara Perseroan dengan PLNE.	Perseroan menunjuk PLNE untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pekerjaan Konstruksi PLTU Lontar sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.38.727.065.520. Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian masih berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2020.	N/A
16.	Perjanjian Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4 x 260 MW) No. 0126.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2018, tanggal 16 November 2018, antara Perseroan dengan PLNE.	Lingkup pekerjaan adalah jasa konsultansi update desain, supervise desain dan supervise konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW). Total nilai pekerjaan adalah Rp334.985.483.326. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hingga 16 Februari 2028.	N/A
17.	Perjanjian Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan No. 0018.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2018, tanggal 26 Februari 2018, antara Perseroan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I dengan PLNE.	Lingkup pekerjaan adalah jasa konsultansi project management team PLTA Upper Cisokan. Total nilai pekerjaan adalah Rp123.784.137.280. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 82 bulan atau hingga tanggal 26 Desember 2024.	N/A
18.	Perjanjian Pekerjaan Supervisi Konstruksi T/L 500 KV PRANAP-PERAWANG No. 002. PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 21 Januari 2016 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) dan PLNE sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen VI tanggal 1 Juni 2020.	Ruang lingkup perjanjian adalah pekerjaan supervise konstruksi T/L 500 KV PRANAP-PERAWANG. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 30 Juni 2020. Nilai perjanjian adalah Rp24.699.440.920.	Berdasarkan keterangan PLNE perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan (proses penyusunan amandemen VII) yang akan berlaku hingga Januari 2021.
19.	Perjanjian Pekerjaan Supervisi Enjiniring Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150/20KV – 30 MVA Tobelo, Gardu Induk 150/20 KV-30 MVA Sofifi dan Gardu Induk 70/20 KV – 30 MVA Namrole No. 0017.PJ/REN.00.02/UIPMALUKU/APLN/2019, tanggal 10 Oktober 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah pelaksanaan pekerjaan supervise enjiniring pembangunan gardu induk 150/20KV – 30 MVA Tobelo, gardu induk 150/20 KV-30 MVA Sofifi dan gardu induk 70/20 KV – 30 MVA Namrole. Nilai perjanjian adalah Rp4.002.932.010. Jangka waktu perjanjian adalah 540 hari kalender efektif atau hingga tanggal 10 April 2021.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
20.	Perjanjian Jasa Design Review Modifikasi Sea Water Intake ke PLTU Sebalang Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang PT (PLN) Persero Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan No. No. 7000006805.PJ/DAN.02.06/UIKSBS/2019 dan No. 29.002.PJ/PLNE/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah pekerjaan jasa design review modifikasi sea water intake ke PLTU Sebalang Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang PT (PLN) Persero Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Nilai perjanjian adalah Rp1.257.517.800. Jangka waktu perjanjian adalah 750 hari kalender atau hingga tanggal 20 November 2021.	N/A
21.	Perjanjian Jasa Design Review Pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Line Transportasi Batubara PLTU Sebalang Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang PT (PLN) Persero Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan No. No. 7000006808.PJ/DAN.02.06/UIKSBS/2019 dan No. 30.001.PJ/PLNE/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah penambahan line transportasi batubara PLTU Sebalang Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang PT (PLN) Persero Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Nilai perjanjian adalah Rp1.214.955.500. Jangka waktu perjanjian adalah 690 hari kalender atau hingga tanggal 30 September 2021.	N/A
22.	Perjanjian Pekerjaan Review Desain Enjiniring E/M Gitet 500 KV Muara Enim (Paket Denim E/M) No. 0016.PJ/DAN.02.06/UIP SUMBAGSEL/2019, tanggal 11 Juli 2019, antara Perseroan dan PLNE, sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum No. 01, tanggal 4 Februari 2020.	Lingkup pekerjaan adalah review desain enjiniring E/M Gitet 500 KV Muara Enim (Paket Denim E/M). Total nilai pekerjaan adalah Rp1.424.372.400. Addendum No. 01 ini mengubah jangka waktu perjanjian menjadi hingga tanggal 31 Juli 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu No. 17.015/E12/PLNE/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang dikirimkan oleh PLNE untuk Perseroan.
23.	Perjanjian Tentang Kesepakatan Harga Satuan Untuk Pekerjaan Enjiniring Inhouse Consultant Energi Hidro No. 0644.PJ/DAN.02.06/EVPEBT/2019 dan No. 18.001.PJ/PLNE/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah melakukan kajian dari sisi kontraktual, teknis, finansial, dan lingkungan terkait risiko kontraktual yang akan dihadapi beserta melakukan review terhadap dokumen pra studi kelayakan, rencana pengadaan dan lain sebagainya. Nilai perjanjian adalah Rp4.258.958.000. Jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan atau hingga tanggal 18 Desember 2020.	N/A
24.	Perjanjian No. 0203.PJ.HKM.00.01/260000/2020, tanggal 9 Maret 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan, , sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen I No. 0431.AMD/HKM.02.01/260000/2020, tanggal 12 Juni 2020.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa konsultasi studi pembangunan saluran kabel laut tegangan menengah (SKLTM) 20 KV Pulau Tegal Mas. Nilai perjanjian adalah Rp1.121.272.570. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 1 November 2020.	N/A
25.	Perjanjian No. 0114.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2019, tanggal 30 Agustus 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa konsultasi enjiniring pekerjaan pembangunan transmisi dan gardu induk di lingkungan Perseroan UIP JBT I Tersebar 2019-2020. Nilai perjanjian adalah Rp15.012.624.495. Jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian atau hingga tanggal 30 Agustus 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan (proses drafting amandemen).



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
26.	Perjanjian No. 043.PJ/HKM.00.01/290000/2019 dan No. 20.002.PJ/PLNE/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah membantu Perseroan dalam melaksanakan pemeriksaan dan persetujuan desain terhadap dokumen mechanical, electrical, civil, dan administrator yang disampaikan oleh kontraktor sehingga kualitas dan performa peralatan dapat terpenuhi sesuai dengan dokumen EPC PLTU Timor-1 (2x50 MW). Nilai perjanjian adalah Rp1.155.330.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 20 Mei 2021.	N/A
27.	Perjanjian No. 042.PJ.HKM.00.01/290000/2019 dan No. 001.PJ/PLNE/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah membantu Perseroan dalam melaksanakan pemeriksaan dan persetujuan desain terhadap dokumen mechanical, electrical, civil, dan administrator yang disampaikan oleh kontraktor sehingga kualitas dan performa peralatan dapat terpenuhi sesuai dengan dokumen EPC PLTU Sulut-1 (2x50 MW). Nilai perjanjian adalah Rp1.594.010.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 20 Mei 2021.	N/A
28.	Perjanjian No. 039.PJ/061/IP/2020 dan No. 04.001.PJ/PLNE/II/2020, tanggal 4 Februari 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa konsultasi desain review BMPP 150 MW terkait pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Nilai perjanjian adalah Rp3.332.872.400. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 28 Februari 2023.	N/A
29.	Perjanjian No. 0012.PJ/DAN.01.02/120000/2020 dan No. 25.001.PJ/PLNE/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa konsultasi proses pelelangan pengadaan IPP PLTM Mandai 9 MW di erseroan Wilayah Kalimantan Barat. Nilai perjanjian adalah Rp577.842.100 Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 22 Agustus 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan (proses drafting amandemen).
30.	Perjanjian No. 0002.PJ/REN.00.02/UIPMALUKU/APLN/2019 dan No. 20.004.PJ/PLNE/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah supervisi enjiniring pekerjaan pembangunan T/L 70 kV Namrole – GI Namlea. Nilai perjanjian adalah Rp1.098.640.620. Jangka waktu perjanjian adalah 540 hari kalender atau hingga tanggal 20 Juni 2021.	N/A
31.	Perjanjian No. 001.PJ/REN.05.02/270000/2020 dan No. 09.001.PJ/PLNE/I/2020, tanggal 9 Januari 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen I No. 0026.Amd/STH.01.02/B27000000/2020, tanggal 6 Juli 2020.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa penyusunan studi kelayakan PLTM Walesi Cascade. Nilai perjanjian adalah Rp2.003.141.800. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 7 Oktober 2020.	N/A
32.	Perjanjian No. 0111.PJ/EPI.01.02/A010402/2020, tanggal 18 Mei 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa penyusunan kajian kelayakan proyek dan dokumen rencana kerja dan syarat-syarat penyediaan pasokan dan infrastruktur gas terkait rencana kerjasama dengan Pertamina Group. Nilai perjanjian adalah Rp6.281.484.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 18 Juli 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan (proses drafting amandemen).



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
33.	Perjanjian No. 008.PJ/HKM.00.01/290000/2020 dan No. 04.001.PJ/PLNE/IV/2020, tanggal 4 Mei 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa penyusunan kajian infrastruktur gas untuk PLTMGU Lombok Peaker 130-150 MW dan PLTG MPP Jeranjang 2x25 MW. Nilai perjanjian adalah Rp2.317.370.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 3 Februari 2021.	N/A
34.	Perjanjian No.0010.PJ/DAN.01.06/060000/2020, tanggal 7 April 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa konsultasi pengawasan konstruksi, supervise, dan design review pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 400 kWp Pulau Sebira Kep. Seribu. Nilai perjanjian adalah Rp589.765.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 7 Agustus 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan (proses drafting amandemen).
35.	Perjanjian Penyusunan Pra-FS PLTA Tabang No. 006.PJ/HKM.00.01/290000/2020 dan No. 22.001.PJ/PLNE/IV/2020, tanggal 22 April 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah penyusunan Pra-FS PLTA Tabang. Nilai perjanjian adalah Rp1.275.703.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga 23 Oktober 2020.	N/A
36.	Perjanjian No. 0089.PJ/TRS.01.04/A010301/2020 dan No. 29.001.PJ/PLNE/IV/2020, tanggal 29 April 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah konsultasi pembuatan dokumen lelang dan HPE untuk pembangunan GI 500 KV Watudodol/Kalipuro. Nilai perjanjian adalah Rp1.299.868.592. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 29 Juli 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu No. 10.009/E10/PLNE/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dikirimkan oleh PLNE untuk Perseroan.
37.	Perjanjian No. 0088.PJ/TRS.01.04/A010301/2020 dan No. 27.004.PJ/PLNE/IV/2020, tanggal 27 April 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah konsultasi pembuatan dokumen lelang dan HPE untuk Transmisi 500 KV PLTU Cilacap-Kesugihan/Rawalo. Nilai perjanjian adalah Rp720.410.900. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 27 Juli 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu No. 10.008/E10/PLNE/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dikirimkan oleh PLNE untuk Perseroan.
38.	Perjanjian No. 0068.PJ/KIT.04.01/A010301/2020 dan No. 24.002.PJ/PLNE/IV/2020, tanggal 24 April 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah pembuatan studi kelayakan, engineering design, dokumen lelang, dan HPE PLTMG Gunung Belah Tahap II 18 MW. Nilai perjanjian adalah Rp2.108.844.760. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 24 November 2020.	N/A
39.	Perjanjian No. 0014.PJ/DAN.01.02/B190000000/2020 dan No. 20.002.PJ/PLNE/IV/2020, tanggal 20 Mei 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah penyusunan dokumen pengadaan PLT Hybrid di Isolated Medang, Isolated Sebotok, dan Isolated Labuhan Aji. Nilai perjanjian adalah Rp1.242.028.370. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 17 September 2020.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
40.	Perjanjian No. 0005.PJ/DAN.02.06/460000/APLN/2020 dan No. 17.002.PJ/PLNE/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah penyusunan engineering design, HPE, dan BIDDOC serta pendampingan lelang pembangkit PLTBN Sarmi 5 MW. Nilai perjanjian adalah Rp2.232.310.768. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 17 Agustus 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap awal perpanjangan (proses drafting amandemen).
41.	Perjanjian No. 01.05.PJ/KIT.04.01/A010301/2020 dan No. 14.001.PJ/PLNE/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah jasa konsultasi pembuatan studi kelayakan, engineering design, dokumen lelang dan HPE PLTU Toli-Toli 2x25 MW. Nilai perjanjian adalah Rp947.462.450. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 14 Agustus 2020.	Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam tahap awal perpanjangan (proses drafting amandemen).
42.	Pemberian Pinjaman Dana dari pemegang Saham (<i>Shareholder Loan</i>) oleh Perseroan kepada PLNE untuk Pembangunan CNG (Compressed Natural Gas) Plant No. 1872.PJ/KEU.05.03/DIR/2015 dan No. 28.001/PJ/PLNE/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, antara Perseroan dan PLNE.	Perseroan memberikan pinjaman kepada PLNE dengan jumlah pokok pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000.000 yang diberikan secara bertahap dimana masa pinjaman adalah sejak tanggal penarikan pertama kali pinjaman, sampai dengan 7 tahun sejak berakhirnya masa tenggang. Masa tenggang untuk perjanjian ini adalah maksimum 12 bulan sejak penarikan pertama kali oleh PLNE. Berdasarkan keterangan PLNE, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.	N/A
43.	Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pemborongan Pekerjaan <i>Billing Management</i> Daya 450 VA S.D. 33 KVA di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Area Balikpapan antara Perseroan dengan PLNT No. 012.PJ/DAN.02.07/WKTKU/2018 dan No. 0016.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 31 Mei 2018.	Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA dan PLNT menyatakan bersedia untuk melakukan pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA di Area Balikpapan. Lingkup pekerjaan utama <i>billing management</i> daya 450 VA s.d kVA meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter Pasca Bayar, pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar, dan pengendalian piutang, Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp 41.508.443.000.	N/A
44.	Perjanjian Pelaksanaan antara Perseroan dengan PLNT tentang Penugasan Penyedia Jasa <i>Ground Patrol</i> /Mandor Line Transmisi di PT PLN (Persero) Sektor NTT No. 0008.PJ/HKM.00.01/W.NTT/2018 dan No. 0018.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pelaksanaan pekerjaan mandor line/ <i>ground patrol</i> di PT PLN (Persero) Sektor NTT meliputi: a. Transmisi dan Gardu Induk (TRAGI) Kupang; b. Transmisi dan Gardu Induk (TRAGI) Flores. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp 32.249.582.000.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
45.	Perjanjian Pelaksanaan antara Perseroan dengan PLNT tentang Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Area Kupang No. 0007.PJ/HKM.00.01/W.NTT/2018 dan No. 0017.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 29 Juni 2018.	<p>Perseroan menugaskan kepada PLNT layanan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik yang mengacu pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat atau sesuai Rencana Anggaran Biaya, yang secara garis besar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penanganan gangguan distribusi;Inspeksi gardu distribusi;Pemeliharaan preventif ROW (<i>Right of Way</i>); <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dihitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp 191.391.125.000.</p>	N/A
46.	Perjanjian Pelaksanaan No. 032.PJ/DAN.02.07/UIW KALTIMRA/2018 dan No. 0047.PJ/DAN.02.07/DIR-TRK/2018, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management Daya 450 VAS.D 33 KVA di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Berau, antara PLNT dan Perseroan.	<p>Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA dan PLNT menyatakan bersedia untuk melakukan pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Berau kecuali Talisayan, Merancang, Biduk-Biduk, Tanjung Batu, Gunung Sari Segah, Batu Putih, Derawan, Tubaan, Merasa, Bunyu, Salimbatu, Sekatak, Long Beluah, Long Peso, Tanah Merah, Mara, Tideng Pale, Pulau Sapi, Mansalong, Kayan Hulim, Lumbis Ogong, Sebatik, Sebuku, Tulin Onsoi, Krayan, Atap, Sei Menggaris.</p> <p>Lingkup pekerjaan utama <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter Pasca Bayar, pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar, dan pengendalian piutang.</p> <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp10.243.024.000.</p>	N/A
47.	Perjanjian Pelaksanaan No. 033.PJ/DAN.02.07/UIW KALTIMRA/2018 dan No. 0046.PJ/DAN.02.07/DIR-TRK/2018, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management Daya 450 VAS.D 33 KVA di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bontang, antara PLNT dan Perseroan.	<p>Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA dan PLNT menyatakan bersedia untuk melakukan pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bontang kecuali Sebuntal, Perangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Senyur, Batu Ampar, Long Segar, Gemar Baru, Muara Wahau, Sepaso, Sangkulirang, Pengadan, Karang Dalam, Rantau Pulung.</p> <p>Lingkup pekerjaan utama <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter Pasca Bayar, pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar, dan pengendalian piutang.</p>	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
		<p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.</p> <p>Nilai Perjanjian ini adalah Rp10.111.909.000.</p>	
48.	<p>Perjanjian Pelaksanaan No. 034.PJ/DAN.02.07/UIW KALTIMRA/2018 dan No. 0045.PJ/DAN.02.07/DIR-TRK/2018, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management Daya 450 VAS.D 33 KVA di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Samarinda, antara PLNT dan Perseroan.</p>	<p>Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA dan PLNT menyatakan bersedia untuk melakukan pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Samarinda kecuali Dondang, Muara Pantuan, Handil Terusan, Muara Siran, Semayang, Tabang, Tanjung Issuy, Muara Kedang, Jantur Muara Aloh, Penyinggahan, Sedulang, Perdana, Muara Pahu, Long Iram, Datah Bilang, Ujoh Bilang, Dilang Puti, Kelumpang, Sang Sang, Long Pangahai, dan Long Apari.</p> <p>Lingkup pekerjaan utama <i>billing management</i> daya 450 VA s.d 33 kVA meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter Pasca Bayar, pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar, dan pengendalian piutang.</p> <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.</p> <p>Nilai Perjanjian ini adalah Rp61.771.222.000.</p>	N/A
49.	<p>Perjanjian No. 027.PJ/DAN.02.01/WKTKU/2018, tanggal 1 Agustus 2018, tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Pembangkit Containerized Kapasitas 1000 KW PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018-2023, antara PLNT dan Perseroan.</p>	<p>Perseroan memberikan pekerjaan kepada PLNT dan PLNT bersedia menerima pekerjaan dari Perseroan untuk melaksanakan jasa pemborongan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan mesin pembangkit containerized kapasitas 1000 KW Perseroan Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018-2023 dengan lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan tenaga operator, tenaga pemeliharaan, dan coordinator/supervisor pada setiap lokasi pekerjaan; Menyediakan sarana dan peralatan pelindung diri bagi setiap personil di lokasi pekerjaan; Mengelola tenaga operator dan pemeliharaan serta sarana dan peralatan pelindung diri sesuai arahan Direksi Pekerjaan atau pejabat yang ditunjuk; Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan mesin pembangkit sesuai SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) yang berlaku; 	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none">e. Melaporkan kondisi teknis mesin pembangkit beserta hasil kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan kepada Direksi Pekerjaan atau pejabat yang ditunjuk;f. Mengelola bahan bakar minyak (penerimaan, pemakaian, opname stock fisik), dan melaporkan kepada Direksi Pekerjaan atau pejabat yang ditunjuk;g. Mengelola limbah cair dan limbah padat serta membuat laporan neraca limbah;h. Menjaga keamanan dan keselamatan Instalasi dan Aset Perseroan yang berada di lokasi pekerjaan;i. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan kerja;j. Melaksanakan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) di lingkungan kerja. <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp71.833.338.000.</p>	
50.	Perjanjian No. 039.PJ/DAN/02.01/UIW KALTIMRA/2018, tanggal 27 November 2018, tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Pembangkit dan Jaringan ULD Tersebar UP3 Samarinda PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 antara Perseroan dengan PLNT.	<p>Perseroan memberikan pekerjaan kepada PLNT dan PLNT bersedia menerima pekerjaan dari Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan mesin pembangkit dan jaringan ULD Tersebar UP3 Samarinda PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018-2023 dengan lingkup sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">k. Menyediakan tenaga operator, tenaga pemeliharaan, dan coordinator/supervisor pada setiap lokasi pekerjaan;l. Menyediakan sarana dan peralatan pelindung diri bagi setiap personil di lokasi pekerjaan;m. Mengelola tenaga operator dan pemeliharaan serta sarana dan peralatan pelindung diri sesuai arahan Direksi Pekerjaan atau pejabat yang ditunjuk;n. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan mesin pembangkit sesuai SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) yang berlaku;o. Melaporkan kondisi teknis mesin pembangkit beserta hasil kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan kepada Direksi Pekerjaan atau pejabat yang ditunjuk;p. Mengelola bahan bakar minyak (penerimaan, pemakaian, opname stock fisik), dan melaporkan kepada Direksi Pekerjaan atau pejabat yang ditunjuk;	



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> q. Melakukan pemeliharaan dan penanganan gangguan jaringan MV Panel, Gardu Distribusi, SUTM, trafo distribusi, TR, SR, APP; r. Menempatkan limbah cair dan limbah padat pada TPS yang telah tersedia serta membuat laporan neraca limbah; s. Menjaga keamanan dan keselamatan Instalasi dan Aset Perseroan yang berada di lokasi pekerjaan; t. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan kerja; u. Melaksanakan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) di lingkungan kerja. 	N/A
		<p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp82.025.725.000.</p>	
51.	<p>Perjanjian Pelaksanaan No. 0054.PJ/DAN.00.01/WKB/2018 dan No. 0037.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 31 Agustus 2018, tentang Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Area Ketapang, antara PLNT dan Perseroan.</p>	<p>Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> dan PLNT menyatakan bersedia untuk melakukan pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> di Area Ketapang. Lingkup pekerjaan utama <i>billing management</i> meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter Pasca Bayar, pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar, Penataan Data Induk Langganan (PDIL), pengendalian piutang (pemutusan/penyegelan) (bersifat temporer). Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp18.570.156.455.</p>	N/A
52.	<p>Perjanjian Pelaksanaan No. 0053.PJ/DAN.00.01/WKB/2018 dan No. 0036.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 31 Agustus 2018, tentang Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Area Sanggau, antara PLNT dan Perseroan.</p>	<p>Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> dan PLNT menyatakan bersedia untuk melakukan pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> di Area Sanggau. Lingkup pekerjaan utama <i>billing management</i> meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter Pasca Bayar, pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar, Penataan Data Induk Langganan (PDIL), pengendalian piutang (pemutusan/penyegelan) (bersifat temporer). Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Nilai Perjanjian ini adalah Rp41.462.200.220.</p>	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
53.	Perjanjian Pelaksanaan No. 0053.PJ/DAN.02.07/WSUTG/2018 dan No. 0049.PJ/DAN.02.07/DIR-TRK/2018, tanggal 23 November 2018, tentang Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Gorontalo antara PLNT dan Perseroan.	<p>Perseroan menyerahkan pekerjaan kepada PLNT berupa pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> dan PLNT menyatakan bersedia untuk melakukan pemborongan pekerjaan <i>billing management</i> di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan.</p> <p>Lingkup pekerjaan utama <i>billing management</i> meliputi pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter Pasca Bayar, pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar, pengendalian piutang pelanggan yang bersifat preventif maupun korektif (pemutusan sementara & penyambungan kembali (TUSBUNG) dan pembongkaran rampung).</p> <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dihitung sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.</p> <p>Nilai Perjanjian ini adalah Rp40.005.932.000.</p>	N/A
54.	Perjanjian Penugasan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi PT PLN (Persero) Unit Layanan Khusus Tarakan No. 005.PJ/DAN.02.03/WKTKU/2018 dan No. 006.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 29 Maret 2018, antara PLNT dan Perseroan Unit Layanan Khusus Tarakan, sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum No. 010.ADD/DAN.02.03/WUTKU/VIII/2018 dan No. 0018.ADD/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 13 Agustus 2018.	<p>Ruang lingkup perjanjian ini adalah penugasan pemborongan pekerjaan pelayanan teknik dan pemeliharaan distribusi PT PLN (Persero) Unit Layanan Khusus Tarakan oleh Perseroan kepada PLNT.</p> <p>Nilai perjanjian adalah Rp31.450.302.000.</p> <p>Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun hingga tahun 2023.</p>	N/A
55.	Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pemborongan Jasa Operator APKT Saidi Saifi TM & Operator DMS di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Area Pengatur Distribusi Kaltimra No. 024.PJ/DAN.02.03/WKTKU/2018 dan No. 027.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 31 Juli 2018, antara PLNT dan Perseroan.	<p>Ruang lingkup perjanjian ini adalah layanan operasi distribusi tenaga listrik sebagai berikut:</p> <p>v. Operator APKT SAIDI SAIFI TM; a. Operator DMS.</p> <p>Nilai perjanjian adalah Rp3.737.511.531 untuk jangka waktu 5 tahun.</p> <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.</p>	N/A
56.	Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Area Pontianak No. 0073.PJ/HKM.00.01/WKB/2017 dan No. 015.PJ/613/DIR-TRK/2017, tanggal 30 November 2017, antara Perseroan dengan PLNT.	<p>Ruang lingkup perjanjian ini adalah layanan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik sebagai berikut:</p> <p>a. Penanganan gangguan distribusi; b. Inspeksi SUTM, SUTR, dan gardu distribusi; c. Pemeliharaan preventif (konstruksi dan ROW); d. Menggunakan mobile APKT (M-APKT) sebagai sarana penyelesaian pekerjaan di lapangan.</p> <p>Nilai perjanjian adalah Rp200.313.480.030 untuk jangka waktu 5 tahun.</p> <p>Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.</p>	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
57.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan P0-P5 (OM) Mesin PLTD Tersebar Area Sanggau dan Area Ketapang PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat No. 0004.PJ/DAN.02.01/WKB/2018 dan No. 0005.PJ/HKM.00.01/DIR-TRK/2018, tanggal 24 Januari 2018, antara Perseroan dengan PLNT.	Ruang lingkup perjanjian adalah pemborongan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan P0-P5 (OM) mesin PLTD tersebar area Sanggau dan area Ketapang Perseroan wilayah Kalimantan Barat. Nilai perjanjian adalah Rp46.381.315.025 untuk jangka waktu 5 tahun. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023.	N/A
58.	Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTD Tersebar PLN Wilayah Sulselrabar No. 0125.PJ/KIT.01.03/WSSTB/2017, tanggal 2 Oktober 2017, antara Perseroan dengan PLNT.	Ruang lingkup perjanjian adalah pekerjaan jasa operasi dan maintenance PLTD Tersebar. Nilai perjanjian adalah Rp99.309.980.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 tahun atau 1.095 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak, atau hingga tanggal 2 Oktober 2020.	N/A
59.	Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan Coal Ash Handling PLTU Punagaya 2x100 MW No. 002.PJ/KIT.01.03/WSSTB/2018, tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan PLNT.	Ruang lingkup perjanjian adalah pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan coal ash handling system PLTU Punagaya 2x100 MW. Nilai perjanjian adalah Rp75.340.109.200. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 tahun atau 1.092 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak, atau hingga tanggal 2 Januari 2021.	N/A
60.	Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Gorontalo No. 0053.PJ/DAN.02.07/WSUTG/2018 dan No. 0049.PJ/DAN.02.07/DIR-TRK/2018, tanggal 23 November 2018, antara Perseroan dengan PLNT.	Ruang lingkup perjanjian adalah: a. Billing management; b. Pembacaan dan pencatatan angka kWh Meter; c. Pemeriksaan kWh Meter Pra Bayar; d. Pengendalian piutang pelanggan yang bersifat preventif maupun korektif (pemutusan sementara & penyambungan kembali (TUSBUNG) dan pembongkaran rampung). Nilai perjanjian adalah Rp40.005.932.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 5 tahun berlaku efektif sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.	N/A
61.	Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang No. 0012.PJ/HKM.00.01/UIWKB/2019 dan No. 0010.PJ/DAN.02.07/DIR-TRK/2019, tanggal 29 Maret 2019, antara Perseroan dan PLNT.	Ruang lingkup perjanjian adalah: a. Penanganan gangguan distribusi; b. Inspeksi jaringan distribusi; c. Pemeliharaan preventif dan korektif ROW; d. Pemeliharaan jaringan distribusi (variable cost); e. Menggunakan Mobile APKT (M-APKT) sebagai sarana penyelesaian pekerjaan di lapangan; f. Menggunakan aplikasi ASIIK sebagai sarana pendukung penyelesaian pekerjaan.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
		Nilai perjanjian adalah Rp145.085.556.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 5 tahun berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024.	
62.	Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Singkawang No. 0011.PJ/HKM.00.01/UIWKB/2019 dan No. 009.PJ/DAN.02.07/DIR0TRK/2019, tanggal 29 Maret 2019, antara Perseroan dan PLNT.	Ruang lingkup perjanjian adalah: a. Penanganan gangguan distribusi; b. Inspeksi jaringan distribusi; c. Pemeliharaan preventif dan korektif ROW; d. Pemeliharaan jaringan distribusi (variable cost); e. Menggunakan Mobile APKT (M-APKT) sebagai sarana penyelesaian pekerjaan di lapangan; f. Menggunakan aplikasi ASIIK sebagai sarana pendukung penyelesaian pekerjaan. Nilai perjanjian adalah Rp184.783.286.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 5 tahun berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024.	N/A
63.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Transmisi dan Gardu Induk No. 048.PJ/HKM.00.01/560000/2019 dan No. 0109/DAN.02.03/DIR-TRK/2019, tanggal 26 Agustus 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNT sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan transmisi dan gradu induk di lingkungan kantor Perseroan Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Nilai perjanjian adalah Rp10.434.067.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 30 Oktober 2024.	N/A
64.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Transmisi (Ground Patrol) No. 049.PJ/HKM.00.01/560000/2019 dan No. 0110/DAN.02.03/DIR-TRK/2019, tanggal 26 Agustus 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNT sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan transmisi (<i>ground patrol</i>) sesuai dengan Standard Operational Procedure yang berlaku di Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Nilai perjanjian adalah Rp33.992.554.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 30 September 2024.	N/A
65.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian Gardu Induk No. 050.PJ/HKM.00.01/560000/2019 dan No. 0110/DAN.02.03/DIR-TRK/2019, tanggal 26 Agustus 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNT sebagai Penerima Pekerjaan.	Ruang lingkup perjanjian adalah pelaksanaan pekerjaan pengoperasian gardu induk sesuai dengan <i>Standard Operational Procedure</i> yang berlaku di Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Nilai perjanjian adalah Rp18.156.296.000. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 31 Agustus 2024.	N/A
66.	Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pemborongan Pekerjaan Billing Management di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima No. 03.PJ/DAN.02/190000/2020 dan No. 0002.PJ/DAN.02.07/DIR-TRK/2020, tanggal 2 Januari 2020, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PLNT sebagai Penerima Pekerjaan.	Lingkup perjanjian adalah pemborongan pekerjaan billing management di wilayah kerja UP3 Bima (ULP Sape, ULP Dompu, ULP Woha, ULP Bima Kota). Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 31 Desember 2024. Nilai perjanjian adalah Rp34.364.213.000.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
67.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Desain Review BMPP 150 MW No. 445.PJ/061/IP/2018, tanggal 3 Desember 2018, antara IP dengan PLNE.	Lingkup perjanjian adalah pengadaan pekerjaan jasa konsultan desain review BMPP 150 MW. Nilai perjanjian adalah Rp11.179.788.400. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 2 Desember 2020.	N/A
68.	Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas Berjangka Waktu 5 Tahun No. HK.05.03/228/RJTH-2020, tanggal 29 Juni 2020, antara IP sebagai Penyewa dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah sebagai Pemberi Sewa.	Sewa menyewa sebidang tanah yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 31 Desember 2024. Harga sewa tanah adalah Rp24.995.391.258 untuk jangka waktu 1 tahun hingga 31 Desember 2020 dan untuk periode setelahnya (hingga tahun 2024) akan disesuaikan oleh Para Pihak.	N/A
69.	Perjanjian Penyelesaian Hak dan Kewajiban Dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok di Jalan Ketel Uap Kalijapat Seluas 238.118,50 M2 No. KS.02/31/5/1/D2.2/GM/C.Tpk-19 dan No. 003/060/UPJPTGP/2019, tanggal 31 Mei 2019, antara IP dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok (Pelindo II), sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum No. KS.02/27/3/2/D2.2/GM/C.Tpk-20 dan No. 002.Pj060/PROPOMU/2020, tanggal 28 Februari 2020.	Perjanjian ini merupakan pembaharuan dari Perjanjian No. HK.5561/II/12/GTPK-10, tanggal 26 April 2010, antara IP dengan Pelindo II. Perjanjian ini mencakup penyediaan tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pelindo II seluas 238.118,50 M2 untuk pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi PLTGU/PLTU. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.	Berdasarkan keterangan IP, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam proses perpanjangan (drafting amandemen).
70.	Perjanjian Jasa Konsultansi Enjiniring dan Manajemen Proyek No. 00170.Pj/DAN.02.06/DIRUT/2019 dan No. 02.001.Pj/PLNE/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, antara PLNE sebagai Penerima Pekerjaan dengan PLN Batam sebagai Pemberi Pekerjaan.	Lingkup pekerjaan adalah kerja sama dalam rangka penugasan pembangunan dan pengembangan bisnis dan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, distribusi, maupun SCADA dari Perseroan. Total nilai pekerjaan tidak diketahui karena akan ditentukan kemudian oleh PLNE dan PLN Batam saat terdapat pemesanan jasa dari PLN Batam kepada PLNE. Perjanjian berlaku efektif sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.	N/A
71.	Perjanjian Pengamanan Pasokan Batubara PLTU Suralaya Unit 1-7 No. 159.PJ/061/IP/2017, tanggal 17 Juli 2017, antara IP dengan PT Artha Daya Coalindo, sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum Ketujuh, tidak bernomor, tanggal 31 Oktober 2019.	Lingkup perjanjian adalah terkait pasokan batubara untuk PLTU Suralaya Unit 1-7 oleh PT Artha Daya Coalindo. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 30 April 2022. Nilai perjanjian tidak diungkapkan.	N/A
72.	Perjanjian Pengadaan Batubara Jangka Panjang Untuk PLTU Suralaya Tahun 2013 - 2022 No. 12.PJ/061/IP/2013, tanggal 28 Januari 2013, antara IP dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).	Suplai batubara oleh PTBA kepada IP sebagai bahan bakar PLTU Suralaya. Nilai perjanjian adalah Rp3.156.205.000.000. Masa berlaku perjanjian adalah sejak 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.	N/A
73.	Perjanjian Jasa Konsultansi Pendampingan Pengadaan CNG Plant Bangkanai Tahap II No. 2001.PJ/DAN.02.06/PLNGG/IV/2020 dan No. 20.001.PJ/PLNE/IV/2020, tanggal 20 April 2020, antara PLNE dengan PLNGG.	PLNGG memberikan pekerjaan kepada PLNE yakni jasa konsultansi pendampingan pengadaan CNG Plant Bangkanai Tahap II. Nilai perjanjian adalah Rp499.962.595. Jangka waktu perjanjian adalah hingga tanggal 20 Oktober 2020.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
74.	Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) No. 186.MOU/HKM.00.01/DIRHP/2018, tanggal 2 November 2018, antara HP dan Perseroan.	Landasan HP dan Perseroan (Para Pihak) dalam penyediaan dan pemanfaatan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) Perseroan yang akan dimanfaatkan oleh HP sebagai Akademi Yantek yang akan digunakan untuk pelatihan petugas pelayanan teknik HP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah selama 2 tahun, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, yang dituangkan dalam suatu Amandemen dan/atau Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini.	N/A
75.	Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) No. 1045.MOU/HKM.00.01/2018 dan No.187.MOU/HKM.00.01/DIRHP/2018, tanggal 2 November 2018, antara HP dan Perseroan.	Landasan HP dan Perseroan dalam penyediaan dan pemanfaatan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) Perseroan yang akan dimanfaatkan oleh HP sebagai Akademi Yantek yang akan digunakan untuk pelatihan petugas pelayanan teknik HP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah selama 2 tahun, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, yang dituangkan dalam suatu Amandemen dan/atau Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini.	N/A
76.	Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) No. 189.MOU/HKM.00.01/DIR-HP/2018, tanggal 2 November 2018, antara HP dan Perseroan.	Landasan HP dan Perseroan dalam penyediaan dan pemanfaatan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) Perseroan yang akan dimanfaatkan oleh HP sebagai Akademi Yantek yang akan digunakan untuk pelatihan petugas pelayanan teknik HP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah selama 2 tahun, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, yang dituangkan dalam suatu Amandemen dan/atau Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini.	N/A
77.	Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) No. 200.MOU/HKM.00.01/DIR-HP/2018, tanggal 15 November 2018, antara HP dan Perseroan.	Landasan HP dan Perseroan dalam penyediaan dan pemanfaatan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi (Akademi Yantek) Perseroan yang akan dimanfaatkan oleh HP sebagai Akademi Yantek yang akan digunakan untuk pelatihan petugas pelayanan teknik HP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Para Pihak.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
		Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah selama 2 tahun, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, yang dituangkan dalam suatu Amandemen dan/atau Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini.	
78.	Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Layanan <i>Assessment</i> Kabel SKTM 20 kV (Alat Kerja dari HP) Area Bulungan, Area Bintaro, dan Area Ciputat, No. 0115.PJ/DAN.02.03/DISJAYA/2015 dan No. 349.PJ/611/HP/2015, tanggal 1 September 2015, antara HP dan Perseroan Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.	Ruang lingkup perjanjian adalah HP sepakat untuk melaksanakan layanan <i>assessment</i> kabel SKTM 20 kV dengan lampiran perjanjian pelaksana yang mengacu pada kerangka acuan kerja. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga tanggal 31 Agustus 2020. Nilai perjanjian ini adalah Rp8.902.186.524.	Berdasarkan keterangan HP, perjanjian ini sedang dalam proses pengurusan perpanjangan
79.	Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik PLN Area Semarang (Rayon Semarang Tengah, Rayon Semarang Barat, Rayon Kendal, Rayon Weleri, dan Rayon Boja) No. 0117.PJ/HKM.00.01/DJTY/2016 dan No. 045.PJ/613/DIR-HP/2016, tanggal 15 Februari 2016, antara Perseroan dan HP, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VI No. 0101.Amd/HKM.00.01/030000/2020 dan No. 015.ADD/HKM.00.01/DIR-HP/2020, tanggal 6 Februari 2020	Ruang lingkup perjanjian ini adalah HP sepakat melaksanakan pelayanan Teknik dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik yang mengacu kepada kerangka acuan kerja, SE Direksi No. 0018.E/DIR/2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Metode Pemeliharaan Trafo Distribusi Berbasis Kaidah Manajemen Aset dan SE Direksi No. 0018.E/DIR/2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Metode Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah Berbasis Kaidah Manajemen Aset. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga tanggal 31 Maret 2021. Nilai perjanjian ini adalah Rp236.825.372.986 termasuk PPN 10% selama 5 tahun.	N/A
80.	Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik PLN Area Sidoarjo Rayon Sidoarjo Kota No. 0039.PJ/HKM.00.01/DISJATIM/2016 dan No. 184.PJ/041/DIR-HP/2016, tanggal 24 Juni 2016, antara PLN dan HP, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen VII No. 0034.Amd/DIS.01-01/B0400000/2020 dan No. 090.ADD/HKM.00.01/DIR-HP/2020, tanggal 30 April 2020	Lingkup perjanjian adalah HP sepakat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik yang mengacu kepada kerangka acuan kerja, SE Direksi No. 0017.E/DIR/2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Metode Pemeliharaan Trafo Distribusi Berbasis Kaidah Manajemen Aset, dan SE Direksi No. 0018.E/DIR/2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Metode Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah Berbasis Kaidah Manajemen Aset. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga tanggal 31 Juli 2021. Nilai perjanjian ini adalah Rp1.644.694.010 sudah termasuk PPN 10%.	N/A
81.	Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Layanan <i>Assessment</i> Kabel SKTM 20 kV (Alat Kerja dari PLN) Area Bandengan dan Area Cikokol No. 0014.PJ/DAN.02.06/DISJAYA/2015 dan No. 016.PJ/611/HP/2015, tanggal 2 Februari 2015, antara HP dan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.	Lingkup perjanjian ini adalah HP sepakat untuk melaksanakan layanan <i>assessment</i> kabel SKTM 20 kV sesuai dengan lampiran perjanjian pelaksana yang mengacu kepada kerangka acuan kerja. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga tanggal 30 Agustus 2020. Nilai perjanjian ini adalah Rp4.571.604.576.	Berdasarkan keterangan HP, perjanjian ini masih berlaku dan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
82.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Pelayanan Teknik Operator Gardu Induk Wilayah Banten (Zona B) No. 135.SPK/DIS.00.03/330000/2019, tanggal 20 Desember 2019, antara Perseroan Unit Induk Distribusi Banten dan HP.	Lingkup perjanjian adalah penyediaan pemborongan pekerjaan pelayanan teknik operator gardu induk oleh HP kepada Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga tanggal 31 Desember 2024. Nilai perjanjian ini adalah Rp41.866.672.311.	N/A
83.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Pelayanan Teknik (Deteksi) UP2D Banten No. 136.SPK/DIS.00.03/330000/2019, tanggal 20 Desember 2019, antara Perseroan Unit Induk Distribusi Banten dan HP.	Lingkup perjanjian ini adalah penyediaan pemborongan pekerjaan jasa pelayanan teknik (deteksi) UP2D oleh HP kepada Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga tanggal 31 Desember 2024. Nilai perjanjian ini adalah Rp14.412.988.457.	N/A
84.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Pelayanan Teknik Operator Gardu Induk (GI) Wilayah Tangerang (Zona A) No. 134.SPK/DIS.00.03/330000/2019, tanggal 20 Desember 2019, antara Perseroan Unit Induk Distribusi Banten dan HP.	Lingkup perjanjian adalah penyediaan pemborongan pekerjaan jasa pelayanan teknik operator gardu induk (GI) wilayah Tangerang (Zona A) oleh HP kepada Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga tanggal 31 Desember 2024. Nilai perjanjian ini adalah Rp94.116.920.357.	N/A
85.	Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi dan Pendayagunaan Bidang Usaha Antar Anak Perusahaan PT PLN (Persero) No. 2005/MOU/06/PST/2018 dan No. 173.MOU/HKM.00.01/DIR-HP/2018, tanggal 17 Oktober 2018, antara HP dan ICON+.	Landasan HP dan ICON+ (Para Pihak) untuk melakukan pembahasan dan merencanakan dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan bidang usaha dalam kerangka kerja sama strategis Para Pihak yang dilandasi dengan itikad baik, saling memberi manfaat bagi Para Pihak. Nota kesepahaman ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 3 tahun atau berakhir apabila telah ditandatangani suatu perjanjian kerjasama, mana yang lebih dahulu terjadi.	N/A
86.	Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Pasokan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari Pelabuhan Tarakan ke PLTU Suralaya Tahun 2013-2022 No. 41.PJ/061/IP/2013 dan No. A.781/SP.902/DIRUT-2013, tanggal 19 Maret 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Surat Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Pasokan PT Bukit Asam dari Pelabuhan Tarakan ke PLTU Suralaya Tahun 2013-2022 No. 41.PJ/061/IP/2013 dan No. A.781/SP.902/DIRUT-2013, tanggal 10 Mei 2016/30 Maret 2017.	Tujuan perjanjian ini adalah pelaksanaan pekerjaan jasa pengangkutan batubara pasokan PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk periode tahun 2013-2022 dengan nilai berdasarkan rumusan tertentu. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tahun 2022.	N/A
87.	Perjanjian Ekspansi Pengiriman Batubara No. 008.Pj/613/KIT.TJB/2011, tanggal 27 Januari 2011, antara Perseroan dan BAG	Tujuan perjanjian ini adalah memfasilitasi dengan pengumpulan, pengiriman batu bara dengan jumlah yang cukup untuk mempertahankan persediaan batu bara yang strategis untuk dikonsumsi pada ekspansi dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara Tanjung Jati B, berlokasi di Jawa Tengah. Perjanjian ini berlaku sampai selama 20 tahun setelah Kontrak Tahun A (yaitu periode sejak tanggal pengiriman pertama sampai dengan tanggal 31 Desember per tahun di mana Unit C COD diperkirakan terjadi).	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
88.	Perjanjian Pengadaan Jasa Transportasi Laut Pengangkutan Batubara Jangka Panjang Selama 10 Tahun No. PT PLN (Persero): 204. PJ/041/DIR/2012 dan No. PT Bag A: 1817/SP.904/DIRUT-2012 tanggal 29 Agustus 2012, antara Perseroan dan PT BAg	Tujuan perjanjian ini adalah penyediaan jasa transportasi laut pengangkutan batu bara untuk jangka waktu 10 tahun kepada Perseroan dengan nilai berdasarkan rumusan tertentu.	N/A
89.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana PLN Selaku Pemegang Saham Mayoritas kepada BAg (SHL) No. 093-1.PJ/530/DIR/2012 dan No. A.1241/Sp.904/Dirut-2012, tanggal 8 Juni 2012, antara PLN dan BAg	Para pihak sepakat untuk melakukan pemberian pinjaman dari Perseroan dalam bentuk <i>shareholder loan</i> senilai Rp800.000.000.000 kepada BAg dalam rangka pendanaan pembelian kapal. Perjanjian ini berakhir setelah dilakukannya pembayaran seluruh pokok pinjaman beserta bunganya (10 tahun sejak tanggal penarikan pertama, yaitu tanggal 31 Desember 2023).	N/A
90.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana PLN Selaku Pemegang Saham Mayoritas kepada BAg (SHL) No. 0453.PJ/530/DIR/2014 dan No. A.4429/Sp.904/Dirut-2014, tanggal 8 Juni 2012, antara PLN dan BAg	Para pihak sepakat untuk melakukan pemberian pinjaman dari Perseroan dalam bentuk <i>shareholder loan</i> senilai Rp594.000.000.000 kepada BAg dalam rangka pendanaan pembelian kapal. Perjanjian ini berakhir setelah 10 tahun dihitung sejak selesainya masa <i>grace period</i> (30 bulan sejak 31 Desember 2016, yaitu tanggal 31 Juni 2018) pinjaman kapal SUV/SUB, yaitu tanggal 31 Juni 2028.	N/A
91.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana PLN Selaku Pemegang Saham Mayoritas kepada BAg (SHL) No. 351.PJ/530/DIR/2011 dan No. A.1804/Sp.904/Dirut-2011, tanggal 28 September 2011, antara PLN dan BAg	Para pihak sepakat untuk melakukan pemberian pinjaman dari Perseroan dalam bentuk <i>shareholder loan</i> senilai Rp310.736.250.000 kepada BAg dalam rangka pendanaan pembelian kapal. Perjanjian ini berakhir setelah dilakukannya pembayaran seluruh pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan pembayaran angsuran terakhir yaitu tanggal 5 Maret 2022.	N/A
92.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Dari Pemegang Saham (<i>Shareholder Loan</i>) untuk Pendanaan Pembelian Kapal Supramax Vessel No. 0622.PJ/KEU.05.03/010000/2019 dan No. A.6044/SP.904/Dirut-2019, tanggal 10 Desember 2019, antara BAg dan PLN	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada BAg dengan pagu maksimal sebesar Rp166.500.000.000. Suku bunga pinjaman adalah sebesar 8,63% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah selama 10 tahun dihitung sejak berakhirnya masa tenggang (3 bulan sejak tanggal pencairan pertama pinjaman).	N/A
93.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana dari Pemegang Saham (<i>Shareholder Loan</i>) No. 0170.PJ/KEU.05.03/DIRUT/2019 dan No. A.2191/SP.904/Dirut-2019 tanggal 20 Mei 2019, antara PLN dan BAg.	Perseroan memberikan pinjaman kepada BAg dengan pagu maksimal sebesar Rp150.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman sebesar 9,84% dan tujuan penggunaan pinjaman untuk pembelian kapal. Masa pengembalian adalah 10 tahun sejak berakhirnya masa tenggang. Masa tenggang adalah maksimal 6 bulan dihitung sejak tanggal pencairan pertama pinjaman.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
94.	Perjanjian Pekerjaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTA Ampel Gading Daya 2 x 5 MW Lokasi Ampel Gading – Malang No. 183. Pj/613/DIST-JATIM/2010 dan No. 070.PJ/060/PJB-PLN/2010 tanggal 23 Desember 2010, antara Perseroan dan PJB, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen IV No. 0069.ADD/DAN.02.01/DIST-JATIM/2017 dan No. 141.PJ/061/PJB-PLN/VII/2017, tanggal 6 April 2020.	Perseroan memberikan tugas kepada PJB untuk melaksanakan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan PLTA Ampel Gading daya 2 x 5 MW lokasi Ampel Gading – Malang, yang meliputi power house dan area saluran air menuju pembangkit. Harga kontrak terakhir untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.259.991.767 per tahunnya. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.	N/A
95.	Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Pulang Pisau (2 x 60 MW) Tahap Supporting No. 0029.Pj/DAN/02.01/WKSKT/2016 dan No. 154.PJ/061/PJB-PLN/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, antara Perseroan dan PJB, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen VII No. 0072.AMD/HKM.02.01/ B57000000/2020 dan No. 015.PJ/061/PJB-PLN/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020	Perseroan memberikan tugas kepada PJB untuk melaksanakan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan PLTU Pulang Pisau (2 x 60 MW), dengan estimasi harga jasa operasi dan pemeliharaan tahap supporting sebesar Rp366.200.770.241. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan tanggal 30 September 2020.	N/A
96.	Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Tidore (2 x 7 MW) Tahap Supporting No. 0002.Pj/DAN/02.01/MMU/2015 dan No. 012. PJ/061/PJB-PLN/II/2015 tanggal 12 Januari 2015, antara Perseroan dan PJB, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen I No. 0001.AMD/KIT.02.01/A170000/2020 dan No. 012.PJ/061/PJB-PLN/II/2015 tanggal 28 April 2020	Perseroan memberikan tugas kepada PJB untuk melaksanakan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan PLTU PLTU Tidore (2 x 7 MW), dengan total nilai pekerjaan setiap tahapnya sebagai berikut: a. Tahap COD: Rp3.787.670.665 b. Tahap Mobilisasi SDM: Rp5.131.920.700 c. Tahap Penyiapan Tata Kelola: Rp3.536.977.100 d. Tahap O&M COD Tahap I & II: Rp3.675.496.850 e. Tahap O&M COD-FAC Tahap II: Rp3.787.670.665 Perkiraan nilai proyeksi pekerjaan reimburse PLTU tahun 2020 adalah Rp133.012.342.000. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.	N/A
97.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTA Wonorejo Daya 6.020 KW Lokasi Wonorejo – Tulungagung No. 162. PJ/613/DIST-JATIM/2010 dan No. 053.PJ/060/PJB-PLN/VIII/2010, tanggal 1 November 2010, antara PJB dan Perseroan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima tanggal 23 Mei 2019	Perseroan memberikan tugas kepada PJB untuk melaksanakan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan PLTA Wonorejo Daya 6.020 KW Lokasi Wonorejo, Tulungagung, dengan estimasi harga jasa operasi dan pemeliharaan tahap supporting sebesar Rp10.087.465.161. Jangka waktu pekerjaan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.	N/A
98.	Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU NII Tanasa Kendari (2x10) MW Tahap Supporting No. 336.PJ/611/WSSTB/2013 dan No. 230.PJ/061/PJB-PLN/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, antara PJB dan Perseroan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen XI tanggal 31 Desember 2019	Perseroan memberikan tugas kepada PJB untuk melaksanakan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan PLTU NII Tanasa Kendari (2x10) MW, dengan perkiraan nilai jasa O&M sebesar Rp393.915.447.601. Jangka waktu pekerjaan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
99.	Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit PLTU dan PLTGU di Jawa No. 0109.PJ/DAN.02.01/DIR/2016 dan No. 046.J/061/PJB-PLN/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, antara PJB dan Perseroan	<p>Perseroan menugaskan PJB untuk melaksanakan fungsi sebagai asset owner, asset manager, dan asset operator dari pembangkit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> PLTU Pacitan; PLTU Paiton 9; PLTU Rembang; PLTU Indramayu; PLTU Tj. Awar-awar; PLTGU Muara Tawar Blok V; dan PLTGU Muara Karang Blok II. <p>Yang akan diatur lebih lanjut pada masing-masing Perjanjian Pengelolaan Aset.</p> <p>Biaya pelaksanaan pekerjaan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada PJB akan sesuai dengan pencapaian service level agreement (SLA) yang ditetapkan.</p> <p>Perjanjian akan terus berlaku sampai dengan mana yang terjadi terlebih dahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas PJB; Perjanjian pengelolaan Aset berakhir; Berakhir atas kesepakatan para pihak; atau Perseroan dengan pertimbangannya sendiri mengakhiri penugasan kepada PJB. <p>Berdasarkan konfirmasi PJB pada tanggal 20 Juli 2020, belum terdapat pengakhiran atas perjanjian ini, dan berdasarkan pemeriksaan kami Perseroan masih menjadi pemegang saham mayoritas atas PJB, sehingga perjanjian ini masih berlaku.</p>	N/A
100.	Perjanjian Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang No. 0161.PJ/DNA.02.01.DIVORJBB/2016 dan No. 049.PJ/061/PJB-PLN/III/2016, tanggal 8 Januari 2016, antara PJB dan Perseroan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen IV tanggal 19 Februari 2019	<p>Perseroan memberikan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan aset pembangkit milik Perseroan, yaitu PLTGU Blok II Muara Karang, dengan harga pekerjaan yang dibayarkan bulanan selama jangka waktu perjanjian berdasarkan perhitungan pembayaran yang diatur dalam perjanjian.</p> <p>Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan PJB ditetapkan menjadi asset owner dan PJBTL berlaku efektif.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi PJB pada tanggal 20 Juli 2020, PJB belum menjadi asset owner atas pembangkit terkait, sehingga perjanjian ini masih berlaku.</p>	N/A
101.	Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar No. 0163.PJ/DNA.02.01.DIVORJBB/2016 dan No. 051.PJ/061/PJB-PLN/III/2016, tanggal 8 Maret 2016, antara PJB dan Perseroan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen V tanggal 10 Februari 2020	<p>Perseroan memberikan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan aset pembangkit milik Perseroan, yaitu PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar, dengan harga pekerjaan yang dibayarkan bulanan selama jangka waktu perjanjian berdasarkan perhitungan pembayaran yang diatur dalam perjanjian.</p>	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
		Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan PJB ditetapkan menjadi asset owner dan PJBTL berlaku efektif. Berdasarkan konfirmasi PJB pada tanggal 20 Juli 2020, PJB belum menjadi asset owner atas pembangkit terkait, sehingga perjanjian ini masih berlaku.	
102.	Perjanjian Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTGU Blok V Muara Tawar No. 0162.PJ/DNA.02.01.DIVORJBB/2016 dan No. 050.PJ/061/PJB-PLN/III/2016, tanggal 8 Januari 2016, antara PJB dan Perseroan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen V tanggal 10 Februari 2020	Perseroan memberikan pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan aset pembangkit milik Perseroan, yaitu PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTGU Blok V Muara Tawar, dengan harga pekerjaan yang dibayarkan bulanan selama jangka waktu perjanjian berdasarkan perhitungan pembayaran yang diatur dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan PJB ditetapkan menjadi asset owner dan PJBTL berlaku efektif. Berdasarkan konfirmasi PJB pada tanggal 20 Juli 2020, PJB belum menjadi asset owner atas pembangkit terkait, sehingga perjanjian ini masih berlaku.	N/A
103.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham No. 168.PJ-SHL/061/PJB-RE/X/2019 dan No. 124.PJ/RE/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, antara PJB dan PT Rekadaya Elekrika.	PJB memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Rekadaya Elekrika dengan pagu maksimal sebesar Rp250.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman sebesar 7,00% per tahun dan tujuan penggunaan pinjaman untuk modal kerja PT Rekadaya Elekrika. Jangka waktu pembayaran pinjaman adalah sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020.	N/A
104.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) Untuk Pendanaan Proyek Pipa Gas Tanjung Batu No. 0385.PJ/KEU.05.03/010000/2019 dan 0385.PJ/KEU.05.03/DIRGG/2019, tanggal 6 September 2019, antara Perseroan dan PLNGG, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 0643.PJ/KEU.05.02/010501/2019 dan No. 0483.Amd/KEU.05.02/DIRGG /2019, tanggal 18 Desember 2019	Perseroan memberikan pinjaman pemegang saham kepada PLNGG untuk pendanaan proyek pipa gas Tanjung Batu dengan jumlah sebesar Rp165.375.553.698 dengan bunga pinjaman sebesar 8,76%. Adapun masa pencairan (availability period) dari pinjaman ini adalah hingga 30 Juni 2020 dengan masa tenggang (grace period) maksimal 2 tahun terhitung sejak tanggal 25 Juli 2019. Masa pengembalian dari pinjaman ini adalah selama 8 tahun terhitung sejak berakhirnya masa tenggang atau sampai dengan tanggal 25 Juli 2027.	N/A
105.	Perjanjian Proyek Pembangunan Pipa Gas untuk PLTGU Tanjung Batu Kaltimra No. 0546. Pj/EPI.01.02/DITREG-KAL/2017 tanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ke-Tujuh tanggal 14 April 2020, antara PLNGG dengan Konsorsium PT Utama Karya (Persero)—PT Moeladi	Perjanjian ini awalnya merupakan perjanjian antara Perseroan dengan Konsorsium PT Utama Karya (Persero)—PT Moeladi, yang kemudian Perseroan mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PLNGG berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 19 April 2018. Berdasarkan perjanjian ini PLNGG memberikan pekerjaan pembangunan pipa gas untuk PLTGU Tanjung Batu Kaltimra kepada Konsorsium PT Utama Karya (Persero)—PT Moeladi, dengan total nilai kontrak sebesar Rp345.311.395.573. Jangka waktu penyelesaian pre-commissioning adalah sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020.	Berdasarkan konfirmasi PLNGG perjanjian ini masih berlaku, adapun perjanjian ini sedang dalam proses untuk dilakukan amandemen kembali (amandemen ke-8) untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian.



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
106.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) No. 047.PJ/KEU.05.03/DIRUT/2019 dan No. 068. PJ/KEU.05.02/DIRPLNBB/2019 tanggal 22 Februari 2019, antara Perseroan dan PLNBB.	Perseroan memberikan pinjaman kepada PLNBB dengan pagu maksimal sebesar Rp192.133.971.000. Masa pengembalian adalah 7 tahun sejak tanggal 28 Agustus 2021, atau sampai dengan tanggal 28 Agustus 2028.	N/A
107.	Perjanjian Jasa Pengukuran, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Fasilitas Custody Flow Meter Station di PK 52 Kalimra No. 1801.Pj/EPI.01.02/PLNGG/2019 dan No. 12.005.Pj/EPI.00.02/PEB/2019 tanggal 18 Desember 2019 antara PLNGG dan PT Pelayanan Energi Batam	PT Pelayanan Energi Batam selaku penyedia akan menyediakan, melakukan pengukuran, mengoperasikan dan memelihara Fasilitas Custody Flow Meter, dengan tarif sebesar Rp1.897.500.119 yang akan dibayarkan oleh PLNGG sebagai pengguna. Perjanjian ini berlaku untuk 10 tahun sejak tanggal COD dari Fasilitas Custody Flow Meter.	N/A
108.	Perjanjian Pengadaan Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Gas Tanjung Batu No. 2001. Pj/EPI.01.02/PLNGG/2019 dan No. 12.006. Pj/EPI.00.02/PEB/2019 tanggal 20 Desember 2019 antara PLNGG dan PT Pelayanan Energi Batam	PLNGG menunjuk PT Pelayanan Energi Batam selaku operator O&M untuk mengelola, mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap Fasilitas Pipa Gas Tanjung Batu, dengan tarif sebesar Rp1.243.000.000 termasuk PPN 10% yang akan dibayarkan oleh PLNGG. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah 36 bulan kalender terhitung sejak tanggal dimulainya pekerjaan.	N/A
109.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 001. PJ-SHL/061/PJB-PLNSC/II/2020 dan No. 001. PJ-SHL/061/PLNSC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020, antara PJB dan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Berdasarkan perjanjian ini, PJB memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang dengan pagu maksimal sebesar Rp150.000.000.000. Suku bunga pinjaman adalah sebesar 6,5% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.	N/A
110.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) No. 0083.PJ/KEU.05.03/DIR/2017 dan No. 0022.PJ/KEU.05.03/DIRUT/2017 tanggal 1 Maret 2017, antara Perseroan dan PLN Batam	Perseroan memberikan pinjaman kepada PLN Batam sebesar Rp657.796.005.347 yang akan digunakan untuk keperluan pembayaran pembiayaan tambahan biaya investasi proyek MPP 500 MW. Bunga atas pinjaman ini adalah sebesar 9,38% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 12 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Maret 2029.	N/A
111.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) No. 0208.PJ/KEU.05.03/DIR/2017 dan No. 0127. PJ/KEU.05.02/PRES DIR/2017, tanggal 24 Mei 2017, antara Perseroan dan PLN Batam	Perseroan mennerus-pinjamkan pinjaman kepada PLN Batam dengan jumlah tidak lebih dari USD14.111.753 yang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan proyek MPP 500 MW. Jangka waktu pinjaman adalah sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Fasilitas (Facility Agreement) tanggal 1 Mei 2017, antara Perseroan dengan Export Development Canada, yang mana berlaku selama 12 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2029.	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
112.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) No. 1548.PJ/KEU.05.03/DIR/2016 dan No. 0289. PJ/530/PRES DIR/2016 tanggal 2 Desember 2016, antara Perseroan dan PLN Batam	Perseroan mennerus-pinjamkan pinjaman kepada PLN Batam dengan jumlah tidak lebih dari USD435.888.247 yang akan digunakan untuk pendaan 20 paket new TM2500+ mobile gas turbine generator. Jangka waktu pinjaman adalah sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Fasilitas (Facility Agreement) tanggal 2 Desember 2016, antara Perseroan dengan Export Development Canada, yang mana berlaku selama 12 tahun dari tahun 2017 (dihitung berdasarkan pencairan terakhir) sampai dengan tahun 2029.	N/A
113.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) No. 1549.PJ/KEU.05.03/DIR/2016 dan No. 0290. PJ/530/PRES DIR/2016 tanggal 2 Desember 2016, antara Perseroan dan PLN Batam	Perseroan memberikan pinjaman kepada PLN Batam sebesar USD30.735.000 atau setara dengan Rp408.775.500.000 yang akan digunakan untuk keperluan pembayaran biaya pendanaan atas dana pinjaman dari perjanjian fasilitas terkait pendanaan 20 paket new TM2500+ mobile gas turbine generator. Bunga atas pinjaman ini adalah sebesar 4,22% per tahun. Pelunasan pinjaman ini adalah 11 tahun atau sampai dengan tanggal 2 Desember 2027 dengan pembayaran setiap 6 bulan sekali.	N/A
114.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) No. 0012.PJ/530/DIR/2013 dan No. 0089.PJ/534/DIRUT/2013, tanggal 10 Juni 2013, antara Perseroan dan PLN Batam, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen tanggal 29 Juni 2016.	Perseroan memberikan pinjaman kepada PLN Batam sebesar Rp1.200.000.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan pendanaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Gas dan Uap Tanjung Uncang (100-120MW). Bunga atas pinjaman ini adalah sebesar 9,86% per tahun. Pinjaman ini akan dibayar dalam 38 kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 30 Januari 2017, yang akan dibayarkan setiap 3 bulanan, atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.	N/A
115.	Perjanjian Jual Beli Gas Multi Destinasi No. 005705.PK/HK.02/COD/2019 dan No. 00062/PJ.EPI/01.02/PRES DIR/2019 tanggal 17 Mei 2019, antara PLN Batam dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 008800.AMD/HK.02/COD/2019 dan No. 00157.PJ/EPI.01.02. PRES DIR/2019, tanggal 1 Agustus 2019	Berdasarkan perjanjian ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyerahkan gas kepada PLN Batam yang akan digunakan untuk bahan bakar perlatan gas, dengan harga gas berdasarkan rumus tertentu yang diatur dalam perjanjian. Jangka waktu dari perjanjian adalah sampai dengan tanggal 19 Desember 2023.	N/A
116.	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Pemegang Saham (Shareholder Loan) No. 0336.PJ/KEU.05.03/DIR/2018 dan No. 107. PJ/061/PJB-PLN/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, antara Perseroan dan PJB	Perseroan menerus-pinjamkan pinjaman kepada PJB sebesar USD280.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan pendanaan proyek Add-on pusat listrik tenaga gas uap Muara Tawa Blok 2, 3, dan 4. Bunga pinjaman ini adalah LIBOR USD 6 bulan dan margin 0,98% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Fasilitas (Facility Agreement) tanggal 8 November 2017, antara PLN dan Credit Agricole Corporate and Investment Ban, yaitu 30 bulan sejak tanggal penandatanganan (8 November 2022).	N/A



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Keterangan
117.	Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 20 Oktober 2015, antara Petrochina International Jabung LTD, Petronas Carigali (Jabung) LTD, PP Oil & Gas (Indonesia-Jabung) LTD, PT Pertamina Hulu Energi Jabung (Penjual), dan PLN Batam	Penjualan gas dari oleh Penjual kepada PLN Batam untuk memenuhi kebutuhan base load pembangkit di Tanjung Uncang, Batam. Nilai kontrak adalah USD6.100/mmBtu di tahun pertama dan USD7.284 mmBtu di tahun ketujuh dengan eskalasi sebesar 3% per tahun. Jangka waktu perjanjian adalah 7 tahun 3 bulan sejak ditandatangani Perjanjian (berakhir pada 20 Januari 2022).	N/A

Nilai transaksi Perseroan dengan pihak terafiliasi Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40.341.107 juta.

17. KETERGANTUNGAN PERSEROAN

Perseroan telah menandatangani berbagai perjanjian dengan Pemerintah dan entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan diperkirakan akan terus melakukan transaksi sejenis di masa mendatang. Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan memberikan dukungan kepada Perseroan dalam bentuk subsidi untuk menutup selisih biaya, perpanjangan jangka waktu pinjaman dari pemerintah, konversi denda atas bunga yang terlambat dibayarkan, jaminan dan penalti menjadi setoran modal, pembebasan bunga untuk kewajiban pajak tanggungan tertentu, dan dengan memberikan tambahan waktu untuk membayar bahan bakar yang dibeli Perseroan dari Pertamina.

Lebih lanjut, dalam kegiatan usaha sehari-hari, Perseroan telah dan akan terus melakukan transaksi dari waktu ke waktu dengan badan usaha lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, termasuk Pertamina yang merupakan pemasok bahan bakar utama Perseroan. Pertamina merupakan satu-satunya pemasok BBM Perseroan dari sejak tahun 1945 sampai dengan 2008. Sejak tahun 2008, Perseroan telah mengurangi ketergantungannya pada Pertamina, namun Pertamina tetap merupakan pemasok BBM Utama Perseroan. Perseroan mengkonsumsi BBM sekitar 4.056 juta liter dan 3.119 juta liter pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019 untuk saldo transaksi bahan bakar dan minyak pelumas mempunyai keterangan sebagai berikut:

Perusahaan	(Rp Juta)	%
PT Pertamina (Persero)	29.234.689	53
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	10.678.506	19
PT Nusantara Regas	8.494.335	15
PT tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	6.955.163	13
TOTAL	55.362.693	100

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pengendali dan/ atau Pemegang Saham Utama Perseroan baik itu afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendai dan/ atau Pemegang Saham Utama Perseroan tidak memiliki kepentingan dalam Perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan

Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha sehubungan dengan Modal kerja yang menimbulkan Risiko Khusus



IX. PERPAJAKAN

FASILITAS KHUSUS PADA PERPAJAKAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN

Pada tanggal 17 Juli 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh 22 Nomor: KET-00014/POTPUT/WPJ.19/KP.03/2020, dan PPh 23 Nomor: KET-00015/POTPUT/WPJ.19/KP.03/2020 yang berlaku sampai 31 Desember 2020 serta Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor: KET-00005/IMPOR/WPJ.19/KP.03/2020 yang berlaku sampai 15 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011.

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK IJARAH

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- a. atas bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.



CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI.

2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2019.



X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp miliar)					Total	Persentase (%)
	A	B	C	D	E		
PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	-	26,0	80,0	100,0	3,0	209,0	13,93
PT BCA Sekuritas	73,0	2,0	6,0	15,0	-	96,0	6,40
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	96,0	-	25,0	110,0	95,0	326,0	21,73
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	63,0	-	47,0	200,0	20,0	330,0	22,00
PT Indo Premier Sekuritas	-	-	-	90,0	9,0	99,0	6,60
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	-	-	-	151,0	34,0	185,0	12,33
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	80,0	-	-	175,0	-	255,0	17,00
Total	312,0	28,0	158,0	841,0	161,0	1.500,0	100,00

2. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp376.500.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Sisa Imbalan Ijarah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.



Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp miliar)					Total	Persentase (%)
	A	B	C	D	E		
PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	2,0	-	25,0	-	3,0	30,0	7,97
PT BCA Sekuritas	-	30,0	-	-	1,0	31,0	8,23
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	-	-	30,0	-	6,5,0	36,5	9,69
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	-	-	30,0	-	5,0	35,0	9,30
PT Indo Premier Sekuritas	12,0	5,0	35,0	13,0	5,0	70,0	18,59
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	25,0	-	30,0	43,0	-	98,0	26,03
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	-	50,0	-	26,0	76,0	20,19
Total	39,0	35,0	200,0	56,0	46,5	376,5	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini yaitu PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dan UUPM kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab Definisi dan Singkatan.

3. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI SERTA JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah).



XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menara Bank BTN, lantai 18
Institutional Banking Division
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130

STTD	:	No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
Pedoman kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Surat penunjukan	:	Surat No. 11491/HKM/05.02/B01070700/2020, tanggal 23 Juni 2020 perihal Penugasan Konsultan Hukum untuk Rencana Penrebitan PUB IV Periode 2020-2022

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.19/POJK.04/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat menyatakan tidak akan

- Memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diwaliamanati. Rincian pengungkapan hutang Perseroan kepada Wali Amanat adalah sebagai berikut:
- Tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhinya kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020.

KONSULTAN HUKUM

UMBRA PARTNERSHIP

Telkom Landmark Tower, Tower 2, Lantai 49
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia

STTD	:	No. STTD.KH-240/PM.2/2018, tanggal 1 November 2018, atas nama Ahmad Zakaria
No. Anggota HKHPM	:	201817 atas nama Ahmad Zakaria
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018
Surat penunjukan	:	Surat No. 11491/HKM/05.02/B01070700/2020, tanggal 23 Juni 2020 perihal Penugasan Konsultan Hukum untuk Rencana Penrebitan PUB IV Periode 2020-2022.



Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara Objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network)

Plaza ABDA, lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

STTD : STTD.AP-233/PM.22/2018 tanggal 6 Februari 2018 atas nama Dedy Sukrisnadi
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. XX atas nama Dedy Sukrisnadi
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : 11093/KEU.02.04/B01060400/2020

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Akuntan Publik ini mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini.

NOTARIS

Aulia Taufani Aulia Taufani, S.H., M.Kn.

Menara Sudirman, lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190, Indonesia

STTD : STTD-N-5/PM.22/2018 atas nama Aulia Taufani, S.H., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 11/STTD-N/PM/1996 atas nama Aulia Taufani, S.H., M.Kn.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan : 11223/KEU.01.08/B01060100/2020

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.



2. Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dan Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

3. Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Panin Tower Senayan Ciity, Lantai 17
Jalan Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270

Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebagai Pemeringkat Efek berdasarkan Surat Nomor 11216/KEU.01.08/B01060100/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Mandat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan IV Tahun 2020-2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahun 2020-2022 dan Perjanjian Pemeringkatan antara Perseroan dan Pefindo nomor 087/PPJP/PEF-DIR/VI/2020 dan nomor 0142.Pj/DAN.01.02/B01060100/2020 tanggal 24 Juni 2020.

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini, selain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang merupakan pihak terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia, menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPM.

Informasi terkait hubungan kredit PT BTN (Persero) Tbk

Perseroan menyatakan bahwa Perseroan memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB IV Tahap I ini, namun bukan merupakan hubungan kredit sebagaimana diatur dalam POJK 19 dan POJK 20, yakni berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Korporasi – Kredit Investasi No. 34, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, tanggal 24 April 2019, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Fasilitas kredit adalah sebesar Rp1.500.000.000.000 yang bersifat *non revolving*, dengan jatuh tempo tanggal 24 April 2029. Tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi pelaksanaan PUB IV Tahap I berdasarkan Perjanjian ini. Detail dari Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Kreditur	: PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Fasilitas	: Kredit Investasi Berdasarkan Akta No. 34 Tanggal 24 April 2019
Nilai Fasilitas	: Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Nilai per 31 Desember 2019	: Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	: JIBOR 6 Bulan + Marjin (1,43%)



- Penggunaan Dana : Pembiayaan Kebutuhan Investasi
- Tanggal Perolehan Fasilitas : 24 April 2019
- Jatuh Tempo Fasilitas : 24 April 2029
- Prosedur Pembayaran : Pokok dan bunga dibayarkan setiap tanggal 23 per 6 bulanan
- Persyaratan Pembayaran : Pada pasal 6 Pembayaran dan Pembayaran dipercepat, ayat 6.2.3. terkait Pelunasan Lebih Awal Secara Sukarela, disebutkan sebagai berikut:
- a. Debitur dapat melunasi lebih awal sebagian atau seluruh Kredit dengan ketentuan :
 - i. Pelunasan tersebut dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga dengan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja Bank sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih pendek yang diperbolehkan oleh Kreditur);
 - ii. Pelunasan lebih awal yang dilakukan Debitur pada Tanggal Pembayaran Bunga tidak akan dikenakan penalti.
 - b. Pelunasan lebih awal ini akan dipakai untuk mengurangi jumlah cicilan Debitur secara pro rata. Jika diperlukan perubahan terhadap Jadwal Pembayaran Cicilan Kredit).
- Nilai Pinjaman yang Masih *Outstanding* : Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)



XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini. Dengan demikian, Bank BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPM.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 345/IBD/CM/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat:
 1. Mempunyai hubungan afiliasi dengan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 2. Tidak mempunyai hubungan kredit dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diwaliamentati;
 3. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
 4. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Surat pernyataan No. 344 /IBD/CM/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020, sebagaimana diatur sesuai dengan POJK No. 20/2020.
- Surat pernyataan No. 346 /IBD/CM/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 Wali Amanat menyatakan sebagai Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggung jawab yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamentan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.



Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka yang kemudian dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018. Adapun anggaran dasar Bank BTN terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VI/2020-3678 Tanggal 2 Juni 2020 perihal Laporan Bulanan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp juta)	Persentase kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	-	0%
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00%
	20.478.432.000	10.239.216	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	0,00%
Saham Seri B			
Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00%
Masyarakat (<5%)	4.236.000.000	2.118.000	40,00%
Total	10.590.000.000	5.295.000	100,00%



Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen	: Chandra Hamzah
Komisaris	: Heru Budi Hartono
Komisaris	: Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris	: Andin Hadiyanto
Komisaris Independen	: Armand B Arief
Komisaris Independen	: Ahdi Jumhari Luddin

Direksi:

Direktur Utama	: Pahala Nugraha Mansury
Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	: Hirwandi Gafar*)**)
Direktur <i>Human Capital, Legal and Compliance</i>	: Yossi Istanto
Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>	: Elisabeth Novie Riswanti
Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	: Jasmin
Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	: Andi Nirwoto
Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics</i>	: Setiyo Wibowo

*) *Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test*

**) *Penanggung jawab kegiatan dibidang keuangan syariah*

Wali Amanat Sukuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

3. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga", dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital .

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat.Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).



Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori *The Best Good Corporate Governance* dalam ajang Anugerah BUMN 2018. Bank BTN menjalankan *one stop Solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN telah menapaki fase transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar-pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-PlayerShip* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Grup Perbankan Syariah Bank BTN menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di Pasar Modal, Bank BTN berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam penerbitan :

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;



- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Telkom Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah Posindo 01 Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Medium Term Notes I Kimia Farma Tahun 2019;
- Medium Term Notes Syariah Mudharabah I Kimia Farma Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Medium Term Notes 2 Posindo Tahun 2019;
- Medium Term Notes II Danareksa Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020; dan
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020.



4. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No.19/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No.20/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan pada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yaitu pada Tanggal Emisi;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada OJK.

5. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO dan/atau RUPSI untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO dan/atau RUPSI untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- j. Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui RUPO/RUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- k. Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau karena Perseroan tidak membayarkan imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan.



6. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan Bank BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Prospektus ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019*	2018
ASET		
Kas	1.369.167	1.243.615
Giro pada Bank Indonesia	15.512.329	15.417.862
Giro pada bank lain – neto	747.869	1.587.051
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	11.097.193	26.464.760
Efek-efek- neto	8.084.671	5.848.485
Obligasi Pemerintah	11.053.601	9.393.138
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.875.221	-
Kredit yang diberikan – neto	226.786.631	213.478.460
Pembiayaan/piutang syariah – neto	22.922.362	21.521.140
Tagihan <i>spot</i> suku bunga	-	167
Tagihan akseptasi	487.052	528.148
Aset pajak tangguhan – neto	629.105	260.251
Aset tetap – neto	5.400.658	5.017.694
Bunga yang masih akan diterima	3.210.772	2.959.502
Aset lain-lain	2.600.197	2.715.921
Total Aset	311.776.828	306.436.194
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	1.999.183	2.301.930
Simpanan dari nasabah	206.905.692	211.034.488
Simpanan dari Bank Lain	4.509.238	2.992.579
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	935.000
Liabilitas akseptasi	487.052	528.148
Liabilitas <i>spot</i> suku bunga	-	152
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	19.783.552	20.644.760
Pinjaman yang diterima	22.465.657	15.499.493
Bunga yang masih harus dibayar	630.002	630.134
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	5.736.637	6.217.814
Pinjaman subordinasi	5.999.669	2.999.519
Total Liabilitas	269.451.682	263.784.017
Simpanan Nasabah	18.477.539	18.794.497
Simpanan dari Bank Lain	11.421	17.232
Total Dana Syirkah Temporer	18.488.951	18.811.729
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	11.460	
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan		
Surplus Revaluasi Aset Tetap	(197.707)	(82.886)
	3.307.991	2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	12.995.995	10.749.657



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019*	2018
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	366.002	2.964.662
Total Ekuitas	23.836.195	23.840.448
Total Liabilitas, Dana Shirkah Temporer dan Ekuitas	311.776.828	306.436.194

*implementasi PSAK 71

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018
Pendapatan bunga dan bagi hasil	25.719.874	22.851.758
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(16.758.073)	(12.762.581)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	8.961.801	10.089.177
Pendapatan operasional lainnya	2.109.852	2.071.594
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.486.665)	(1.714.427)
Beban operasional lainnya	(7.063.215)	(6.852.544)
Laba Operasional	521.773	3.593.800
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(110.711)	16.475
Laba sebelum beban pajak	411.062	3.610.275
Beban pajak	(201.799)	(802.352)
Laba tahun berjalan	209.263	2.807.923
Pendapatan (beban) komprehensif lain	348.069	(25.416)
Laba komprehensif selama tahun berjalan	557.332	2.782.507
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	20	265

*implementasi PSAK 71

7. Informasi

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Menara BTN Lantai 18
 Institutional Banking Division
 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia
 Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
 Website : www.btn.co.id
 e-mail : trustee.btn@gmail.com
 Untuk Perhatian : Capital Market Department



XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*physical distancing*) melalui peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Setelah FPPO dan/atau FPPSI dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO dan/atau FPPSI tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO dan/atau FPPSI asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 2 September 2020 sampai 3 September 2020, dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB pada setiap harinya.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;



- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki Obligasi dan Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPO dan RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh.



7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 September 2020.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesanan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 1 hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 7 September 2020, ditujukan pada rekening dibawah ini:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Bahana Sekuritas	Nama: PT Bank Permata Cabang: WTC Sudirman Jakarta No Rekening: 007 0231 8785 Atas Nama: PT. Bahana Sekuritas	Nama: PT Bank Permata Syariah Cabang: WTC Sudirman Jakarta No Rekening: 007 0257 1480 Atas Nama: PT. Bahana Sekuritas
PT BCA Sekuritas	Nama: PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Korporasi Menara BCA No Rekening: 205 008 6448 Atas Nama: PT. BCA Sekuritas	Nama: PT BCA Syariah Cabang: Jatinegara No Rekening: 0016789992 Atas Nama: PT. BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Nama: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No Rekening: 7888 8997 87 Atas Nama: PT. BNI Sekuritas	Nama: PT Bank BNI Syariah Cabang: JPU No Rekening: 4493 1742 9 Atas Nama: PT. BNI Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas	Nama: PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas	Nama: PT Bank BRI Syariah Cabang: Tanah Abang No Rekening: 1031.829.597 Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Nama: PT Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT. Mandiri Sekuritas	Nama: PT Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT. Mandiri Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Nama: PT Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No Rekening: 0701 5283 28 Atas Nama: PT. Indo Premier Sekuritas	Nama: PT Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No Rekening: 0701 5758 30 Atas Nama: PT. Indo Premier Sekuritas



	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Nama: PT Bank Permata Cabang: Sudirman No Rekening: 04001763984 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Nama: PT Bank Permata Syariah Cabang: BEI No Rekening: 00970613161 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Selanjutnya, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada tanggal 7 September 2020 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB ditujukan pada rekening diatas. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk kemudian wajib menyetor kepada Perseroan (in good funds) pada tanggal pembayaran yaitu pada tanggal 8 September 2020. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran pada tanggal 8 September 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan



2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
- (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 2) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 2) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah / Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah / Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar:



Obligasi

Denda 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Ijarah

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk kerugian per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp213.889,- (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per hari;
- a. Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp229.167,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) per hari;
- b. Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp247.222,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) per hari;
- c. Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp268.056,- (dua ratus enam puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) per hari;
- d. Sukuk Ijarah Seri E sebesar Rp273.889,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau cicilan imbalan ijarah dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui kantor, *email*, atau *website* para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada tanggal 2-3 September 2020 dengan keterangan sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)

Graha Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 250 5081
Fax.: (021) 250 5071
Email : bs_ibcm@bahana.co.id
Website: www.bahana.co.id

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. : (021) 235 87222
Fax.: (021) 2358 7250
Email : cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas (terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Faks.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
www.bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 3501 817
Email : ib-group1@danareksa.com
Website: www.danareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5088 7220
Email : corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lt. 24 dan 25,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
RT/RW 05/03, Senayan, Jakarta 12190
Telp. (021) 526 3445
Faks.(021) 527 5701
Email : Divisi-IB@mandirisek.co.id
Website : www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 29249088
Fax: (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Umbra Partnership.

Halaman ini sengaja dikosongkan

31 Agustus 2020

No. Ref.: 16810-v128

Kepada

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Jl. Trunojoyo Blok M 1/135

Kebayoran Baru

Jakarta 12160

U.p.: **Direksi**

Dengan hormat,

Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum UMBRA PARTNERSHIP, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Zakaria, S.H. yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-240/PM.2/2018, tanggal 1 November 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 201817 selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (**Perseroan**) berdasarkan Surat Penunjukkan No. 11491/HHKM.05.02/B01070700/2020, tanggal 23 Juni 2020, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas (**LUT**) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan (**Pendapat Hukum**) (**Surat Penunjukan**), sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN dengan target dana yang akan dihimpun keseluruhan sebesar Rp24.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp6.000.000.000.000 (**PUB IV**) yang dilaksanakan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB IV.

Pendapat Hukum ini diterbitkan dalam rangka PUB IV Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Prospektus dan Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah) atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami lakukan selama Periode Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya, sebagaimana dimuat dalam surat kami No. 16810-v17, tanggal 29 Juni 2020, No. 16810-v49, tanggal 23 Juli 2020 dan No. 16810-v94, tanggal 10 Agustus 2020.

p

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB IV, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap (**Obligasi**) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp376.500.000.000 (**Sukuk Ijarah**) (**PUB IV Tahap I**).

Obligasi terdiri dari 5 seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 6,70% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 7,25% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 7,90% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 8,65% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 8,86% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah pokok masing-masing seri Obligasi tersebut dapat berkurang karena pelunasan pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan masing-masing seri Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Sukuk Ijarah terdiri dari 5 seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B, Sukuk Ijarah Seri C, Sukuk Ijarah Seri D dan Sukuk Ijarah Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp39.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.613.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun

dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp35.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.537.500.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp200.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.800.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp56.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.844.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp86.500.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E sebesar Rp46.500.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.119.900.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp88.600.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali sisa imbalan ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

PUB IV Tahap I ini dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Para Penjamin Emisi Obligasi (**Para Penjamin Emisi**).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka PUB IV Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

- (a) Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN No. 53 tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN No. 131, tanggal 21 Juli 2020, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN No. 48, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PLN dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN No. 119,

tanggal 28 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan (**Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi**);

- (b) Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 54, tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 132, tanggal 21 Juli 2020, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 49, tanggal 10 Agustus 2020, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 120, tanggal 28 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**Perjanjian Perwaliananatan Obligasi**);
- (c) Akta Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 56, tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 134, tanggal 21 Juli 2020, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 51, tanggal 10 Agustus 2020, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 123, tanggal 28 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah**);
- (d) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 55, tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 133, tanggal 21 Juli 2020, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 50, tanggal 10 Agustus 2020, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 121, tanggal 28 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi (**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**);
- (e) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 57, tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 135, tanggal 21 Juli 2020, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 52, tanggal 10 Agustus 2020, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 124,

tanggal 28 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarbisa ta Selatan, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi (**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**);

- (f) Akad Wakalah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 0144.Pj/KEU.01.08/B01060100/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**Akad Wakalah**);
- (g) Akad Ijarah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 0145.Pj/KEU.01.08/B01060100/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**Akad Ijarah**);
- (h) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-077/OBL/KSEI/0620, tanggal 3 Juli 2020, antara Perseroan dan KSEI (**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang**);
- (i) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-016/SKK/KSEI/0620, tanggal 3 Juli 2020, antara Perseroan dan KSEI (**Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah**);
- (j) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi No. 7, tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI (**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**); dan
- (k) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah No. 8, tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI (**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah**);
- (l) Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 122, tanggal 28 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan (**Akta Pengakuan Utang**); dan
- (m) Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 No. 125, tanggal 28 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan (**Akta Pengakuan Kewajiban**).

Untuk pelaksanaan PUB IV, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-04261/BEI.PP2/07-2020, tanggal 28 Juli 2020.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB IV, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 132/DK-PLN/07/2020, tanggal 2 Juli 2020, perihal Persetujuan Tertulis Pendanaan

Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Periode 2020-2022 dengan nilai maksimal Rp30 triliun (**Persetujuan Dewan Komisaris**).

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUB IV Tahap I Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Sementara itu, dana hasil PUB IV Tahap I Sukuk Ijarah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB IV Tahap I kepada OJK dan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB IV Tahap I tersebut telah terpakai seluruhnya sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015, tanggal 19 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Dalam hal terdapat dana hasil PUB IV Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- (a) menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Penempatan dana wajib dilakukan atas nama Perseroan;
- (b) mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- (c) mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- (d) mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUB IV Tahap I, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan dari RUPO dan/atau RUPSI.

Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan, Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa, selama aset yang

menjadi dasar Sukuk Ijarah masih ada.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, Perseroan dan Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi, yaitu sama-sama dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia. Perseroan memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat, namun demikian bukan merupakan hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, tanggal 23 April 2020 (**POJK 19**) dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, tanggal 23 April 2020 (**POJK 20**).

Berdasarkan pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, Perseroan dan Para Penjamin Emisi (kecuali PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk) memiliki hubungan afiliasi dengan Para Penjamin Emisi, yaitu sama-sama dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan PUB IV Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan peringkat idAAA (Triple A) berdasarkan surat No. RC-787/PEF-DIR/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) berdasarkan surat No. RC-789/PEF-DIR/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020.

Sehubungan dengan PUB IV Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh opini yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2020, yang menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Ijarah PUB IV Tahap I tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah, dan oleh karenanya Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 18 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Prospektus:

“**Anggaran Dasar**” berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

“**Anak Perusahaan**” berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan

laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi PT Indonesia Power (**IP**), PT Pembangunan Jawa Bali (**PJB**), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (**PLN Batam**), PT Indonesia Comnets Plus (**ICON+**), PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (**PLNE**), PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (**PLNT**), PT PLN Batubara (**PLN Batubara**), PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (**PLN Geothermal**), PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (**BAG**), dan PT Haleyora Power (**HP**).

“**BANI**” berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

“**BPJS**” berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“**Dewan Komisaris**” berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

“**Direksi**” berarti Direksi dari suatu PT.

“**HKHPM**” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

“**Hukum Indonesia**” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

“**KSEI**” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“**Limbah B3**” berarti limbah bahan berbahaya dan beracun.

“**LUT**” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

“**Menkumham**” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“**Perjanjian Kredit**” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.

“**Perjanjian Material**” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.

“**Perizinan Material**” berarti perizinan operasional dan perizinan lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“**Periode Uji Tuntas**” berarti periode terhitung sejak tanggal diterbitkannya Pendapat dari

Segi Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020 oleh kantor konsultan hukum UMBRA PARTNERSHIP berdasarkan surat No. Ref. 14751-v10, tanggal 20 April 2020 sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

“**Perpres 13/2018**” berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“**PLTA**” berarti pembangkit listrik tenaga air.

“**PLTD**” berarti pembangkit listrik tenaga diesel.

“**PLTU**” berarti pembangkit listrik tenaga uap.

“**PLTGU**” berarti pembangkit listrik tenaga gas uap.

“**PLTMG**” berarti pembangkit listrik tenaga mesin gas.

“**POJK 18**” berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2014 tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

“**POJK 33**” berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“**POJK 34**” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“**POJK 36**” berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“**POJK 55**” berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“**Prospektus**” berarti Prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUB IV Tahap I.

“**PT**” berarti Perseroan Terbatas.

“**RUPO**” berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.

“**RUPS**” berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“**SHGB**” berarti Sertipikat Hak Guna Bangunan.

“**SHP**” berarti Sertipikat Hak Pakai.

“**Standar HKHPM**” berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8

Agustus 2018.

“**Tanggal Pendapat Hukum**” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini yaitu tanggal 31 Agustus 2020.

“**Uji Tuntas**” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUB IV Tahap I oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi sebagaimana dalam Pendapat Hukum ini.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATAAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT (**Dokumen LUT**), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan Standar HKHPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
4. Seluruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum selain dari Hukum Indonesia disusun berdasarkan pendapat dari segi hukum dari masing-masing konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi dari masing-masing perusahaan tersebut dan data-data yang diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaannya yang terkait;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Standar HKHPM, pelaksanaan uji tuntas adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum (**KH**) terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

Dalam melaksanakan uji tuntas, kami harus menyajikan informasi atau fakta material serta wajib menerapkan prinsip materialitas dalam melaksanakan uji tuntas tersebut, di mana kami wajib mengkaji secara seksama informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 angka 9 Lampiran III Standar HKHPM, KH dalam menjalankan profesinya menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai pertimbangan profesionalnya, yang mana termasuk dalam menilai materialitas dari materi uji tuntas, agar pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal dapat tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, aset berupa penyertaan saham Perseroan yang bersifat material hanyalah terbatas pada Anak Perusahaan, dengan memperhatikan besarnya kontribusi masing-masing Anak Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan.

Dapat dipahami pula bahwa dalam suatu penerbitan obligasi dan sukuk ijarah, hal paling utama yang harus dilindungi adalah kepastian bahwa pemegang obligasi dan pemegang sukuk ijarah mendapatkan pelunasan dan pembagian imbal hasil. Berdasarkan keterangan Perseroan, pelunasan untuk Obligasi dan pembagian imbal hasil untuk Sukuk Ijarah dapat dilakukan sepenuhnya oleh Perseroan tanpa perlu menggunakan aset-aset Perseroan ataupun aset milik anak perusahaan. Dalam PUB IV Tahap I juga Perseroan tidak menjaminkan suatu aset tertentu dari Perseroan maupun Anak Perusahaan baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya suatu kepentingan serta tidak terpenuhinya prinsip materialitas terhadap pengungkapan anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan

Dengan mempertimbangkan seluruh hal yang kami sampaikan di atas, kami hanya menyajikan LUT dan Pendapat Hukum dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan Standar HKHPM, serta ketentuan Hukum Indonesia; dan

6. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam Pendapat Hukum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. selain untuk Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi pihak, semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan

- bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum (**Informasi Uji Tuntas**) dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
 3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
 4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
 5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
 6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan selain Perseroan dan Anak Perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
 7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia (**Hukum Asing**), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
 8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan

kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;

9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan sebagai PT Perseroan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan No.169, tanggal 30 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 1 Agustus 1994 berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11-519HT01.01TH'04, tanggal 1 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.02 tanggal 6 Mei 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan (**Akta No. 02/2019**) sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut telah diberitahukan ke Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0264142, tanggal 20 Mei 2019, serta didaftarkan di Daftar Perseroan No.AHU-0081603.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019. Perubahan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 20 Mei 2019.

Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan pada saat pendirian beserta seluruh perubahannya telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali belum diperolehnya akta notaris atas revisi Akta Pendirian PLNGG, sehingga saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham PLNGG tidak berseri atau, dengan kata lain, merupakan saham biasa. Dengan demikian, hak khusus yang dimiliki oleh pemegang saham Seri 1, yaitu

mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat oleh RUPS, belum berlaku secara efektif sehingga Perseroan dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) masih memiliki hak yang sama selaku pemegang saham PLNGG.

2. Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pencadangan wajib sebagaimana diatur oleh Hukum Indonesia.
3. Dalam 2 tahun terakhir terdapat 1 kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, yakni pada bulan Mei 2019, di mana terjadi peningkatan modal ditempatkan/diseter Perseroan berdasarkan Akta No. 02/2019. Adapun pada tahun 2018, tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga berdasarkan Akta No. 02/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Diseter Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Diseter Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100
Modal Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

Pada tahun 2018, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta ketentuan Hukum Indonesia, kecuali belum diperolehnya akta notarial atas revisi Akta Pendirian PLNGG sebagaimana telah diungkapkan dalam angka 1 di atas.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 08 tanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0264306 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101963.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Juni 2020, susunan Direksi Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Zulkifli Zaini
Wakil Direktur Utama	:	Darmawan Prasodjo
Direktur Keuangan	:	Sinthya Roesly
Direktur Perencanaan Korporat	:	Muhammad Ikbal Nur
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan	:	Bob Sahril
Direktur Energy Primer	:	Rudy Hendra Prastowo
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	:	Syamsul Huda
Direktur Mega Project	:	M. Ikhsan Asaad
Direktur Human Capital dan Management	:	Syofvi Felienty Roekman
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	:	Haryanto Wignyo Suparto
Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan	:	Wiluyo Kusdwiarto

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 37, tanggal 27 Januari 2020, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056739 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020054.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 31 Januari 2020, susunan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama	:	Suahasil Nazara
Komisaris Independen	:	Deden Juhara
Komisaris Independen	:	Murtaqi Syamsuddin
Komisaris	:	Rida Mulyana Endang
Komisaris	:	Dudy Purwagandhi
Komisaris	:	Mohamad Ikhsan
Komisaris	:	Ilya Avianti

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 29 Juni 2020, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33. Perseroan telah mengangkat dan memiliki Komisaris Independen sebagai pemenuhan persyaratan POJK 33 dengan jumlah Komisaris Independen lebih dari 30% jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 33. Ketentuan anggaran dasar Perseroan terkait Direksi dan Dewan Komisaris tidak bertentangan dan telah sesuai serta memenuhi ketentuan POJK 33, kecuali ketentuan mengenai jumlah minimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Namun demikian, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33. Perseroan berkomitmen untuk segera menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 33.

Perseroan telah memiliki Unit Internal Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Perusahaan dan memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, POJK 34 dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memiliki Komite Audit namun susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan belum memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK 55, dimana terdapat anggota Komite Audit yang bukan berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Saat ini Perseroan telah mengupayakan pemenuhan keanggotaan Komite Audit berdasarkan ketentuan POJK 55. Merujuk pada Surat Komitmen Perseroan No. 17747/KEU.01.08/B01060000/2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan Perseroan, Direksi telah menginformasikan perihal belum terpenuhinya ketentuan POJK 55 tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan melakukan upaya terbaik untuk segera melakukan pemenuhan POJK 55, yaitu menyesuaikan komposisi anggota Komite Audit Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah diperolehnya pernyataan Efektif dari OJK. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan pemenuhan POJK 55 tersebut.

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan, jika terdapat anggota Komite Audit yang telah habis masa jabatannya, mengundurkan diri, atau diberhentikan, Ketua Komite Audit berhak untuk mengusulkan calon anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan melakukan pengangkatan serta

pemberhentian anggota Komite Audit sesuai POJK 55, dan melaporkan kepada RUPS terkait keputusan Dewan Komisaris tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta Hukum Indonesia.

5. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah menyelenggarakan pembangkitan tenaga listrik, termasuk distribusi, transmisi dan jasa terkait kelistrikan. Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

6. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB IV Tahap I tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan namun memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Direksi Perseroan telah memperoleh Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan PUB IV Tahap I.
7. Perseroan tidak melakukan kewajiban penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat sebagaimana dipersyaratkan oleh Perpres 13/2018. Atas tidak dilaksanakannya kewajiban ini, Perseroan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 24 Perpres 13/2018 dan Peraturan Menkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yaitu Menkumham dapat mengeluarkan rekomendasi perbaikan dan/atau penyempurnaan atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut. Perusahaan terkait harus melaksanakan rekomendasi dalam 14 hari. Jika perusahaan tersebut gagal melaksanakan rekomendasi tersebut dalam periode yang ditentukan, izin usaha dari perusahaan tersebut mungkin (i) tertunda, (ii) dicabut atau (iii) dibatalkan. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak pernah menerima sanksi atas belum dilakukannya pelaporan pemilik manfaat.
8. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT dan Prospektus, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali:

No.	Nama Perusahaan	Izin yang Belum Diperoleh
1.	Perseroan	- Dokumen Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan untuk 324 kegiatan.

No.	Nama Perusahaan	Izin yang Belum Diperoleh
		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk Limbah <i>Non Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA) untuk 111 kegiatan. - Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk Limbah Non FABA untuk 7 kegiatan. - Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk Limbah FABA untuk 2 unit. - Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk Limbah FABA untuk 2 kegiatan. - Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai untuk 49 kegiatan. - Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut untuk 1 kegiatan. - Izin Pemanfaatan Limbah B3 untuk Limbah FABA untuk 18 kegiatan. - Izin Penimbunan Limbah B3 untuk Limbah FABA untuk 2 kegiatan.
2.	PJB	<ul style="list-style-type: none"> - Pembaruan atas Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum No. 580-12/20/600.3/2010, tanggal 20 Desember 2010, yang masih dalam proses pembahasan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PJB, dan Perseroan berdasarkan Notula Rapat Pembahasan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik IP dan PJB, tanggal 18 Juni 2020. Adapun pada akhir Juli 2020, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan mengundang kembali Perseroan, PJB, dan IP untuk melanjutkan pembahasan terkait. - Perpanjangan dari Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 143 Tahun 2014 untuk Pemberian Izin Operasi kepada PJB untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum PLTGU Muara Tawar di Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2014. - Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk PLTA Giringan, PLTA Siman, PLTA Sutami, dan PLTA Wlingi; - Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut untuk PLTU Paiton, PLTU Muara Karang, dan PLTGU Gresik.
3.	IP	<ul style="list-style-type: none"> - Pembaruan atas Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) No. 5192/40/MEM.L/2000, tanggal 22 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berlaku selama IP menjalankan kegiatan usahanya, yang masih dalam proses pembahasan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PJB, dan Perseroan berdasarkan Notula Rapat Pembahasan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik IP dan PJB, tanggal 18 Juni 2020. Adapun pada akhir Juli 2020, Direktorat Jenderal

No.	Nama Perusahaan	Izin yang Belum Diperoleh
		<p>Ketenagalistrikan akan mengundang kembali Perseroan, PJB, dan IP untuk melanjutkan pembahasan terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian atas Izin Operasi Pelabuhan Khusus No. KP. 133 TAHUN 2004, tanggal 19 April 2004, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, yang berlaku selama IP menjalankan kegiatan usahanya, yang masih dalam proses sebagaimana dibuktikan dengan Permohonan Penyusunan Izin Terminal Khusus PLTG Gilimanuk No. 0047/150/BLIPGU/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang diterbitkan IP untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. - Perpanjangan atas Izin Pembuangan Limbah Cair untuk UJP Banten 3 (Lontar), UP Perak Grati, dan UJJP Priok, yang sedang dalam proses pembahasan teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Perpanjangan atas Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk PLTA Jelok dan Timo yang sedang dalam proses pembahasan teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4.	PLN Batam	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut untuk PLTD Batu Ampar, PLTD Baloi, PLTD Sekupang, dan PLTMG Panaran.
5.	ICON+	Pengurusan Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi No. 88/TEL.01.02/2019, tanggal 11 Oktober 2019, diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar dapat berlaku efektif.
6.	BAG	Pembaruan Sertifikat Klas dan/atau Sertifikat Keselamatan untuk Kapal Kartini Baruna, Kapal Srikandi Baruna 2002, dan Kapal Srikandi Baruna 2402.

Berkaitan dengan temuan hukum di atas, maka terdapat risiko hukum terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai berikut:

(a) Pengurusan Perizinan Lingkungan

Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan, Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan dikenakan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000.

Kemudian berkaitan dengan pemenuhan kewajiban oleh pemegang Izin Lingkungan, Pasal 76 UU 32/2009 menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan yang terdiri dari:

- (1) teguran tertulis;
- (2) paksaan pemerintah, dapat berupa:
 - penghentian sementara kegiatan produksi;
 - pemindahan sarana produksi;
 - penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - pembongkaran;
 - penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan;
- (3) pembekuan izin lingkungan; atau
- (4) pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Perseroan sehubungan dengan perizinan lingkungan yang masih dalam proses pengurusan tersebut.

(b) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 35 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (**Permen ESDM No. 35/2013**), Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan ini tetap berlaku sampai berakhir masa

berlakunya. Meskipun begitu berdasarkan Pasal 10 Permen ESDM No. 35/2013, IUKU/IUPTL harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, jenis usaha, nama badan usaha, atau wilayah usaha. Ketidapatuhan akan kewajiban ini berakibat pada dapat dikenakannya sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin usaha oleh Pemerintah.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada IP dan PJB sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pembaruan ini.

(c) Penyesuaian Izin Terminal Khusus

Mengingat berlakunya sistem OSS dewasa ini, berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.312/AL.308/DJPL tentang Penertiban Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Izin Tersus harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, perusahaan yang telah mendapatkan izin pengoperasian Tersus dari Kementerian Perhubungan sebelum atau setelah diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (**PM 89/2018**) namun belum didaftarkan ke sistem OSS, maka izin terkait masih tetap berlaku dan dapat diberikan pelayanan kepelabuhanan dengan tetap wajib didaftarkan pada sistem OSS. Adapun untuk perusahaan yang pengajuan permohonan perizinannya baru diterima Kementerian Perhubungan setelah berlakunya PM 89/2018, maka pelayanan jasa kepelabuhanan tidak diberikan hingga diterbitkannya penetapan pemenuhan komitmen dari Kementerian Perhubungan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada IP sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses penyesuaian ini.

(d) Pembaruan Terminal Khusus

Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**UU 17/2008**), setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri Perhubungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 333 UU 17/2008, tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau

untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 335 UU 17/2008, dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda yang ditentukan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada PJB sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pembaruan ini.

(e) Pengurusan Izin Pembuangan Limbah Cair

Berdasarkan Pasal 60 UU 32/2009, setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Kewajiban kepemilikan perizinan tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP No. 82/2001) yang mengatur bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.

Lebih lanjut, Pasal 104 UU No. 32/2009 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000. Kemudian mengacu pada Pasal 48 PP 82/2001, jika Perseroan tidak memiliki izin tersebut, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota berwenang, yang meliputi:

- (1) teguran tertulis;
- (2) penghentian sementara; dan
- (3) pencabutan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Perseroan sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pengurusan tersebut.

- (f) Pengurusan dan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (**PP 101/2014**), setiap penghasil Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. Lalu berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PP 101/2014, untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 ini, dibutuhkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) PP 101/2014 dijelaskan bahwa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Menteri LHK paling lama 60 hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Berdasarkan Pasal 243 PP 101/2014, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 21 ayat (2) PP 101/2014 dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif pada pemegang izin, yaitu berupa:

- (1) teguran tertulis;
- (2) paksaan pemerintah meliputi penghentian sementara kegiatan dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; atau
- (3) pembekuan Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Perseroan sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pengurusan dan perpanjangan tersebut.

- (g) Pengurusan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3

Berdasarkan Pasal 53 PP 101/2014, Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Lalu berdasarkan Pasal 56 ayat (1) PP 101/2014, untuk dapat melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3, dibutuhkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Berdasarkan Pasal 247 PP 101/2014, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 56 ayat (1) PP 101/2014 dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang izin, yaitu berupa:

- (1) teguran tertulis;

- (2) paksaan pemerintah yang meliputi penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, penutupan saluran drainase, pembongkaran, penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- (3) pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
- (4) pencabutan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Perseroan sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pengurusan tersebut.

- (h) Pengurusan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3

Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) PP 101/2014, setiap penghasil Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3. Lalu berdasarkan Pasal 146 ayat (1) PP 101/2014, untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3, dibutuhkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Berdasarkan Pasal 249 PP 101/2014, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) PP 101/2014 dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif pada pemegang izin, yaitu berupa:

- (1) teguran tertulis;
- (2) paksaan pemerintah yang meliputi penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, penutupan saluran drainase, pembongkaran, penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- (3) pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; atau
- (4) pencabutan Izin Pengolahan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Perseroan sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pengurusan tersebut.

(i) Pengurusan Izin Penyelenggaraan Elektronik

Berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (**PP 24/2018**), Lembaga OSS menerbitkan izin usaha atau izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 41 PP 24/2018, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional akan berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (**Perkominfo 7/2018**), pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud di atas melalui OSS paling lambat 1 tahun sejak Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi diterbitkan. Dalam hal pernyataan komitmen tidak dipenuhi sampai dengan waktu termaksud, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang juga disertai dengan pencabutan penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio, penomoran, dan/atau hak labuh. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 PP 24/2018 yang menyatakan bahwa Lembaga OSS membatalkan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang sudah diterbitkan dalam hal pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada ICON+ sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pengurusan tersebut.

(j) Pembaruan Sertifikat Klas

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**UU 17/2008**), apabila kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia tidak terpenuhi, maka kepada pemilik kapal dikenai sanksi 25 administrative berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 14 hari kerja atau apabila peringatan tertulis tidak

dipenuhi, maka dikenai sanksi berupa tidak diberikannya sertifikat kapal dan surat-surat kapal.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Bag sehubungan dengan pembaruan perizinan yang masih dalam proses pengurusan tersebut.

(k) Pembaruan Sertifikat Keselamatan

Kapal yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan Pasal 126 UU 17/2008 akan diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan. Meskipun tidak diatur sanksi yang tegas mengenai tidak diperbaruinya Sertifikat Keselamatan, setiap kapal yang memperoleh sertifikat keselamatan wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Pemeliharaan kapal dalam hal ini dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pelanggaran atas kewajiban pemeliharaan kapal untuk dapat tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 171 UU 17/2008 berupa:

- (a) peringatan;
- (b) denda administratif;
- (c) pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;
- (d) pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;
- (e) tidak diberikan sertifikat; atau
- (f) tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Bag sehubungan dengan pembaruan perizinan yang masih dalam proses pengurusan tersebut.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan perizinan yang masih dalam proses pengurusan tersebut. Berdasarkan hasil Uji Tuntas serta didukung dengan keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan, belum diperolehnya atau masih diprosesnya Perizinan Material di atas oleh Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perseroan, PJB, IP, ICON+, PLN Batam, dan BAg dengan upaya terbaik akan memenuhi Perizinan Material tersebut segera setelah dimungkinkan oleh ketentuan perundangan yang berlaku untuk melanjutkan proses pengurusan mengingat saat ini terdapat pembatasan-pembatasan berdasarkan Hukum Indonesia untuk melakukan proses pembaruan atau pengurusan Perizinan Material tersebut antara lain pembatasan jam operasional dari regulator terkait serta tertundanya pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan perizinan yang diajukan.

9. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material dalam bentuk aset tetap dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang dalam sengketa, kecuali:
 - (a) 7 SHGB atas nama Perseroan yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan, serta 2 SHGB atas nama Perseroan yang telah habis masa berlakunya dan belum dilakukan proses pengurusan;
 - (b) 1 SHP atas nama Perseroan yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan, serta 1 SHP atas nama Perseroan yang telah habis masa berlakunya dan belum dilakukan proses pengurusan;
 - (c) 9 sertipikat tanah atas nama IP yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan;
 - (d) 1 SHGB atas nama PJB yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan;
 - (e) 30 SHGB atas nama PLN Batam yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan; dan
 - (f) 1 SHGB atas nama Bag yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak-hak atas tanah di atas dibuktikan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan. Pemberian surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Sehubungan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) dan Sertifikat Hak Pakai (**SHP**), atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu pemberian SHGB dan SHP dapat diperpanjang. Untuk SHGB, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (**PP 40/1996**) mengatur bahwa SHGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Lalu untuk SHP, Pasal 45 ayat (1) PP 40/1996 mengatur bahwa SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun

dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Perpanjangan SHGB dan SHP dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) PP 40/1996, permohonan perpanjangan jangka waktu SHGB dan SHP atau pembaharunnya diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu atas SHGB atau perpanjangannya dan jangka waktu atas SHP tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan PP 40/1996, SHGB dan SHP sendiri hapus apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan telah berakhir. Akibat dari habisnya jangka waktu SHGB dan SHP adalah sebagai berikut:

- (a) Habisnya jangka waktu SHGB dan SHP atas tanah negara mengakibatkan tanahnya akan kembali statusnya menjadi tanah negara.
- (b) Habisnya jangka waktu SHGB dan SHP atas tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL) mengakibatkan tanahnya akan kembali statusnya menjadi dalam penguasaan pemegang SHPL.
- (c) Habisnya jangka waktu SHGB dan SHP atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) mengakibatkan tanahnya akan kembali statusnya menjadi dalam penguasaan pemegang SHM.

Aset-aset material berupa aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

10. Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Anak Perusahaan dan anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Anak Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	IP	5.215.647.599	2.607.823.799.500	99,99
2.	PJB	5.999.999.999	2.599.999.999.500	99,99
3.	PLN Batam	1.119.238.034	1.119.238.034.000	99,99
4.	ICON+	65.896.399	65.896.399.000	99,99
5.	PLNE	24.975.000	24.975.000.000	99,90
6.	PLNT	78.795.000	78.795.000.000	99,97
7.	PLN Batubara	24.999	24.999.000.000	99,996

No.	Nama Anak Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
8.	PLN Geothermal	24.999	24.999.000.000	99,996
9.	BAG	21.674	21.674.000.000	99,995
10.	HP	24.999	24.999.000.000	99,99
11.	Majapahit Holding B.V.	180	EUR 18.000	100

Seluruh penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saham Perseroan di Anak Perusahaan tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminakan kepada pihak lain.

Anak Perusahaan dan anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia memiliki penyertaan saham beberapa perusahaan yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Anak Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
IP				
1.	PT Cogindo Daya Bersama	514.867.769	514.867.769.000	99,99
2.	PT Artha Daya Coalindo	24.000.000	24.000.000.000	80
3.	PT Indo Pusaka Berau	61.950	61.950.000.000	46,53
4.	PT Indo Ridlatama Power	360.000	360.000.000.000	90
5.	PT Putra Indotenaga	2.622.228	2.622.228.000.000	99,99
6.	PT Perta Daya Gas	35.000	35.000.000.000	35
7.	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	73.500	73.500.000.000	49
PLNT				
1.	PT Paguntaka Cahaya Nusantara	2.499	2.499.000.000	99,96
PLNE				
1.	PT Prima Power Nusantara	59.994.000	59.994.000.000	99,99
PJB				
1.	PT PJB Services	102.900.000	102.900.000.000	98,00
2.	PT Rekadaya ElektriKa	710.709.100	710.709.100.000	98,90

No.	Nama Anak Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
3.	PT Navigat Innovative Indonesia	99.774	99.774.000.000	72,97
4.	PT PJB Investasi	4.183.558	4.183.558.000.000	99,99
5.	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	76.500	76.500.000.000	51,00
6.	PT Sumber Segara Primadaya	437.501	437.501.000.000	49,00
7.	PT Bajradaya Sentranusa	388.516	388.516.000.000	36,61
8.	PT Bukit Pembangkit Innovative	332.127	332.127.000.000	29,15
9.	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	12.250	11.088.700.000	49,00
PLNBB				
10.	PT Jambi Prima Coal	822.000	82.200.000.000	60
11.	PT PLN Batu Bara Investasi	2.499	2.499.000.000	99,99
12.	PT PLN Batu Bara Niaga	49.950	49.950.000.000	99
PLN Batam				
13.	PT Pelayanan Energy Batam	74.925	7.492.500.000	99,99
14.	PT Dalle Energy Batam	40.000	40.000.000.000	20
15.	PT Mitra Energy Batam	72.930	72.930.000.000	30
16.	PT Riau Power	92	92.000.000	0,25
17.	PT Tanjung Kasam Power	13.000.000	13.000.000.000	10
BAg				
18.	PT Perusahaan Bongkar Muat Adhiguna Putera	1.148	1.148.000.000	24,98
HP				
19.	PT Haleyora Powerindo	4.750	4.750.000.000	95
20.	PT Energi Pelabuhan Indonesia	6.750.000	67.500.000.000	45
MHBV				
21.	Majapahit Finance B.V.	18.000	180	100

Seluruh penyertaan saham Anak Perusahaan pada perusahaan-perusahaan tersebut telah dilakukan oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saham

Anak Perusahaan di perusahaan-perusahaan tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminakan kepada pihak lain.

11. Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini terikat dalam Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus dan LUT. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kredit tersebut yang membatasi Perseroan untuk melaksanakan PUB IV Tahap I dan yang dapat menghalangi rencana penggunaan dananya maupun ketentuan yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Seluruh Perjanjian Kredit yang diikat oleh Perseroan dan Anak Perusahaan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh keterangan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban keuangan (*financial covenant*) dari seluruh Perjanjian Kredit yang diikat oleh Perseroan.
12. Kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam LUT dan Prospektus, seluruh Perjanjian Material dari Perseroan dan Anak Perusahaan masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia dan tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Material tersebut yang dapat menghalangi PUB IV Tahap I dan rencana penggunaan dananya maupun ketentuan yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
13. Berdasarkan pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, Perseroan memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB IV Tahap I ini, namun bukan merupakan hubungan kredit sebagaimana diatur dalam POJK 19 dan POJK 20.
14. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam rangka PUB IV Tahap I, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUB IV Tahap I yaitu sebagai berikut:
 - (a) Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi;
 - (b) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi;
 - (c) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
 - (d) Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah;
 - (e) Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
 - (f) Akad Ijarah;
 - (g) Akad Wakalah;
 - (h) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang;

- (i) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah;
- (j) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- (k) Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah;
- (l) Akta Pengakuan Utang;
- (m) Akta Pengakuan Kewajiban.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB IV Tahap I tersebut di atas telah mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Perjanjian Perwaliananatan Obligasi telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK 20.

Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK 20 dan POJK 18. Sesuai ketentuan POJK 20, Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliananatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan No. 344/IBD/CM/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, dari Wali Amanat.

Akad Ijarah dan Akad Wakalah tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK 53.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah, tidak terdapat jaminan terhadap Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan PUB IV Tahap I ini.

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-04261/BEI.PP2/07-2020, tanggal 28 Juli 2020, untuk pelaksanaan PUB IV.

Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 36.

Sehubungan dengan PUB IV Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan peringkat idAAA (Triple A) berdasarkan surat No. RC-787/PEF-DIR/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) berdasarkan surat No. RC-789/PEF-DIR/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020. Seluruh surat tersebut telah memenuhi Pasal 5 POJK 36.

Sehubungan dengan PUB IV Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh opini yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan POJK 18.

15. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan, kecuali bahwa sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan belum melakukan pemenuhan:
- (a) bukti perpanjangan dari Perjanjian Kerja Bersama Perseroan;
 - (b) Perjanjian Kerja Bersama berikut bukti pendaftarannya dari ICON+;
 - (c) pembaruan Peraturan Perusahaan berikut pengesahannya dari HP;
 - (d) Perjanjian Kerja Bersama beserta bukti pendaftarannya dari PLN Batam;
 - (e) pelaksanaan kewajiban Wajib Laport Tenaga Kerja PLNGG;
 - (f) Peraturan Perusahaan PLNGG beserta pengesahannya;
 - (g) pengesahan atas Peraturan Perusahaan PLNE; dan
 - (h) dokumen Izin Tinggal Terbatas untuk tenaga kerja asing PLNE.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh pernyataan Perseroan, tidak terdapat dampak yang bersifat material dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan karena belum dipenuhinya aspek ketenagakerjaan tersebut.

16. Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali HP dan PLNBB) telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material, terutama yang dipergunakan untuk kegiatan operasionalnya, dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum. Berdasarkan pernyataan Anak Perusahaan (kecuali HP dan PLNBB), jumlah pertanggungan terhadap aset material Anak Perusahaan (kecuali HP dan PLNBB) telah memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Anak Perusahaan (kecuali HP dan PLNBB).

Berdasarkan pernyataan Perseroan, jumlah pertanggungan terhadap aset material Perseroan telah memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan, kecuali terhadap aset-aset material di bawah ini yang proses penutupan asuransinya belum selesai dilakukan:

Regional	Nama Pembangkit	Kapasitas Unit	Total Kapasitas
Regional Sumatera dan Kalimantan	PLTG Sambera	2 x 20	40
	PLTGU Tanjung Batu	2 x 20 GT, 1 x 20 ST	60
	PLTMG Bontang	2 x 7	14
	PLTU Parit Baru Site Bengkayang	2 x 50	100
	PLTU Sintang	3 x 7	21
	PLTU Sanggau	2 x 7	14
	PLTG Pulang Pisau #2	1 x 60	60
Regional Jawa Madura dan Bali	PLTU 1 Jabar (Indramayu) Unit 1, 2 & 3	3 x 330	990
	PLTGU 1 Jateng (Rembang) Unit 1 & 2	2 x 315	630
	PLTGU Muara Tawar Blok 5	1 x 234	234
	PLTU 2 Jabar (Palabuhan Ratu) Unit 1, 2 & 3	3 x 350	1050
	PLTU 2 Jateng (Adipala) Unit 1	1 x 660	660
	PLTA Jatigede Unit 1 & 2	2 x 55	110

Risiko kerugian yang mungkin timbul terhadap aset-aset di atas belum dipertanggungjawabkan oleh Asuradur dan menjadi risiko Perseroan sepenuhnya.

- Selain sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam LUT dan Prospektus sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan, saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, serta tidak sedang terlibat dalam perselisihan lain di luar pengadilan, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif. Keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di pengadilan tersebut, tidak menghalangi PUB IV Tahap I dan juga tidak berpotensi merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan, Anak Perusahaan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif.

18. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material dan instrumen utang, daftar aset tanah serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.
19. Berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami dipailitkan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

UMBRA PARTNERSHIP



Ahmad Zakaria, S.H.

No. STTD.KH-240/PM.2/2018

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

- | | |
|--|--|
| <p>1. Nama/<i>Name</i>
Alamat kantor/<i>Office address</i></p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas
lain/<i>Domicile as stated in ID Card</i></p> <p>Nomor telepon/<i>Phone number</i>
Jabatan/<i>Position</i></p> | <p>: ZULKIFLI ZAINI
: PT PLN (PERSERO)
: Jl. Trunojoyo Blok M I/135
: Jakarta Selatan
: Jl Aditiawarman No.11 RT 007 RW 001
: Selong, Kebayoran Baru
: Jakarta Selatan
: (021) 7261122
: DIREKTUR UTAMA / <i>PRESIDENT DIRECTOR</i></p> |
| <p>2. Nama/<i>Name</i>
Alamat kantor/<i>Office address</i></p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas
lain/<i>Domicile as stated in ID Card</i></p> <p>Nomor telepon/<i>Phone number</i>
Jabatan/<i>Position</i></p> | <p>: SINTHYA ROESLY
: PT PLN (PERSERO)
: Jl. Trunojoyo Blok M I/135
: Jakarta Selatan
: APT Taman Rasuna TWR 17-14 D
: RT 003 RW 010
: Menteng Atas, Setiabudi
: Jakarta Selatan
: (021) 7392038
: DIREKTUR KEUANGAN / <i>FINANCE DIRECTOR</i></p> |

menyatakan bahwa/*state that:*


- | | |
|---|--|
| <p>1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;</p> <p>2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan Entitas Anak.</p> | <p>1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;</i></p> <p>2. <i>The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles;</i></p> <p>3. a. <i>All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;</i>
b. <i>The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts;</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the Company and its Subsidiaries internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 21 Juli 2020 / July 21, 2020


ZULKIFLI ZAINI
Direktur Utama / *President Director*


SINTHYA ROESLY
Direktur Keuangan / *Finance Director*



Halaman ini sengaja dikosongkan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00797/2.1030/AU.1/02/0645-1/11/VIII/2020

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholder, Board of Commissioners and Directors

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2019, 2018 and 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

Penekanan atas hal-hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016. Dampak perubahan kebijakan akuntansi ini diungkapkan dalam Catatan 57 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as of December 31, 2019, 2018 and 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 2.a to the accompanying consolidated financial statements which explains that the Company changed its accounting policy for transactions based on power purchase agreements by applying the Financial Services Authority Regulation No.6 POJK.04/2017 prospectively for the annual period beginning on January 1, 2016. The effect of such change in accounting policy is disclosed in Note 57 to the accompanying consolidated financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Kami juga membawa perhatian pada Catatan 58.e atas laporan keuangan konsolidasian interim yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan dan entitas anak serta asesmen manajemen bahwa Perusahaan dan entitas anak belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah Covid-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas Perusahaan dan entitas anak.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal-hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.00637/2.1030/AU.1/02/0645-1/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum efek utang, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan tambahan pengungkapan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 59 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Laporan ini diterbitkan kembali dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum surat utang Perusahaan serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

We also draw attention to Note 58.e to the interim consolidated financial statements which describes impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations of the Company and its subsidiaries and the management assessment that the Company and its subsidiaries are yet to accurately predict and quantify how long or how far the Covid-19 pandemic will affect the operating results, financial position, and cash flows of the Company and its subsidiaries.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other matters

Prior to this report, we have issued our independent auditor's report No.00637/2.1030/AU.1/02/0645-1/1/VI/2020 dated June 19, 2020 on the consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2019 and for the year then ended with an unmodified opinion. With respect to the plan of the Company to conduct public offering of debt securities, the Company has reissued its consolidated financial statements with additional disclosure as described in Note 59 to the accompanying consolidated financial statements.

This report has been reissued solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company and is not intended nor permitted to be used for any other purposes.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 21 Juli/ July 21, 2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2019, 2018 and 2017

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
ASET					ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	6	1,400,685,118	1,336,478,233	1,204,568,429	<i>Property, plant and equipment</i>
Properti investasi	7	5,283,708	5,125,448	4,723,070	<i>Investment properties</i>
Investasi pada entitas asosiasi	8	3,868,060	3,002,665	2,432,830	<i>Investments in associates</i>
Investasi pada ventura bersama	8	6,432,705	5,723,674	4,445,668	<i>Investments in joint ventures</i>
Aset pajak tangguhan	48	2,215,963	7,578,386	9,566,473	<i>Deferred tax assets</i>
Piutang pihak berelasi	9	951,643	1,031,237	237,181	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	5,980,703	5,688,712	7,487,709	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	17	824,545	961,377	634,949	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lain	11	7,445,895	13,482,762	7,064,097	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,433,688,340	1,379,072,494	1,241,160,406	Total Non-current Assets
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	12	46,598,783	33,294,560	42,291,959	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	13	334,153	1,216,886	286,697	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha					<i>Trade receivables</i>
Pihak berelasi	14	819,836	593,646	580,993	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	14	24,310,702	23,209,017	21,885,850	<i>Third parties</i>
Piutang subsidi listrik	15	--	--	7,588,977	<i>Receivables on electricity subsidy</i>
Piutang kompensasi	16	--	23,173,464	--	<i>Compensation receivables</i>
Piutang lain-lain	17	47,451,084	9,507,768	1,672,237	<i>Other receivables</i>
Persediaan	18	12,934,233	15,506,567	12,828,118	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar di muka	19	17,634,137	5,894,120	4,997,393	<i>Prepaid taxes</i>
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	1,206,785	1,007,572	1,629,609	<i>Prepaid expenses and advances</i>
Piutang pihak berelasi	9	4,719	5,954	5,294	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lain	56	72,241	5,697	30,124	<i>Other current assets</i>
Jumlah Aset Lancar		151,366,673	113,415,251	93,797,251	Total Current Assets
JUMLAH ASET		1,585,055,013	1,492,487,745	1,334,957,657	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham					Capital stock - par value of Rp1 per share
Modal dasar - masing-masing 439.000.000 saham					Authorized - 439,000,000 shares, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 115.181.002 saham, 109.826.526 saham, dan 109.826.526 saham per 31 Desember 2019, 2018 dan 2017					Subscribed and paid-up 115,181,002 shares, 109,826,526 shares, and 109,826,526 shares as of December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively
Tambahan modal disetor	21	115,181,002	109,826,526	109,826,526	Additional paid-in capital
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	22	9,919,958	20,179,333	20,871,265	Stock subscription from Government in issuance process
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	21	10,528,230	--	--	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	21	60,334,896	52,766,610	48,665,115	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		70,997,731	78,251,316	71,093,240	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		661,509,952	665,849,322	618,462,276	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		928,471,769	926,873,107	868,918,422	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		929,380,413	927,413,857	869,416,604	Total Equity
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	48	28,121,540	13,420,136	2,066,364	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current portion
Penerusan pinjaman	24	35,251,741	36,105,279	31,485,476	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan					Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	25	4,359,569	5,343,629	6,309,173	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	26	11,569,377	14,468,336	15,713,269	Bank loans
Utang bank	27	184,023,820	152,965,997	116,017,364	Bonds payable and sukuk ijara
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	174,292,298	131,681,821	100,440,360	Electricity purchase payable
Utang listrik swasta	29	6,431,448	7,115,916	7,026,434	KIK - EBA loans
Utang KIK - EBA	28	1,354,642	2,221,167	2,907,986	Payable to related parties
Utang pihak berelasi	30	92	1,000	794	Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja	50	50,838,258	43,760,226	43,559,022	Other payables
Utang lain-lain	32	133,662	94,427	940,153	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		496,376,447	407,177,934	326,466,395	Total Non-current Liabilities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

December 31, 2019, 2018 and 2017

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade payables
Pihak berelasi	31	11,814,735	9,044,530	11,215,239	Related parties
Pihak ketiga	31	40,188,048	39,563,144	32,496,186	Third parties
Utang pajak	33	2,383,288	2,560,128	2,387,864	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	34	16,754,640	14,809,018	11,477,437	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	35	14,235,879	13,465,735	12,642,333	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	36	150,664	315,828	723,992	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	23	1,049,231	929,947	1,218,400	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	24	2,725,805	2,530,273	2,735,992	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan					Government and non-bank financial institution loans
Pemerintah non-bank	25	1,998,476	1,860,649	1,043,793	
Utang sewa pembiayaan	26	2,540,107	2,624,629	4,871,908	Lease liabilities
Utang bank	27	21,693,338	28,145,737	26,548,747	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	6,946,478	2,120,612	914,000	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	29	399,458	394,403	349,968	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	28	586,620	686,819	630,600	KIK - EBA loans
Liabilitas imbalan kerja	50	5,232,467	5,873,558	8,562,927	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain	32	30,598,919	32,970,944	21,255,272	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		159,298,153	157,895,954	139,074,658	Total Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		655,674,600	565,073,888	465,541,053	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		1,585,055,013	1,492,487,745	1,334,957,657	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
PENDAPATAN USAHA					REVENUES
Penjualan tenaga listrik	37	276,061,925	263,477,551	246,586,856	Sale of electricity
Penyambungan pelanggan	23	6,934,597	7,309,172	7,113,454	Customer connection fees
Lain-lain	39	2,644,067	2,111,019	1,594,933	Others
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>285,640,589</u>	<u>272,897,742</u>	<u>255,295,243</u>	Total Revenues
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	40	136,084,482	137,266,678	116,947,824	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	41	83,563,991	84,267,611	72,426,641	Purchased electricity
Sewa	42	3,617,376	4,272,082	6,592,161	Lease
Pemeliharaan	43	22,328,178	20,737,601	19,515,606	Maintenance
Kepegawaian	44	25,908,771	22,950,087	23,124,511	Personnel
Penyusutan	6	35,318,071	30,744,712	29,160,597	Depreciation
Lain-lain	45	8,620,069	7,950,118	7,706,754	Others
Jumlah Beban Usaha		<u>315,440,938</u>	<u>308,188,889</u>	<u>275,474,094</u>	Total Operating Expenses
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI					OPERATING LOSS BEFORE SUBSIDY
		<u>(29,800,349)</u>	<u>(35,291,147)</u>	<u>(20,178,851)</u>	
Subsidi listrik Pemerintah	38	51,711,774	48,101,754	45,738,215	Government's electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	16	22,253,517	23,173,464	--	Compensation income
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI					OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY
		<u>44,164,942</u>	<u>35,984,071</u>	<u>25,559,364</u>	
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	47	(3,667,666)	15,663,363	3,409,941	Other income (expense) - net
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		9,486,326	(10,926,741)	(2,935,144)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan keuangan		755,103	804,321	1,066,842	Financial income
Beban keuangan	46	(24,619,495)	(21,624,176)	(18,556,931)	Financial cost
LABA SEBELUM PAJAK		<u>26,119,210</u>	<u>19,900,838</u>	<u>8,544,072</u>	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	48	<u>(21,797,080)</u>	<u>(8,325,082)</u>	<u>(4,115,955)</u>	TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		<u>4,322,130</u>	<u>11,575,756</u>	<u>4,428,117</u>	INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
LABA TAHUN BERJALAN		4,322,130	11,575,756	4,428,117	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan					Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	8	(286,917)	255,493	461,901	<i>Share of other comprehensive income (expenses) from associates and joint venture</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	6	(1,183,109)	48,336,627	(6,933,307)	<i>Changes in property, plant and equipment revaluation surplus</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	50	(3,775,959)	4,319,690	(5,635,015)	<i>Remeasurement on defined benefit plans</i>
Manfaat pajak terkait	48	950,394	(5,524,764)	1,408,754	<i>Related income tax benefits</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(4,295,591)	47,387,046	(10,697,667)	Other comprehensive income for the year after tax
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		26,539	58,962,802	(6,269,550)	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:					<i>Income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		4,270,922	11,568,286	4,410,210	<i>Owner of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		51,208	7,470	17,907	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah		4,322,130	11,575,756	4,428,117	Total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:					<i>Total comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		(24,669)	58,955,332	(6,287,457)	<i>Owner of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		51,208	7,470	17,907	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah		26,539	58,962,802	(6,269,550)	Total
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	49	37,516	105,332	50,541	BASIC EARNINGS PER SHARE (In Rupiah full amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-up capital stock Rp	Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ Stock subscription from Government in issuance process Rp	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital Rp	Saldo laba/ Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share of other comprehensive income from associates and joint ventures Rp	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owner of the parent Rp	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests Rp	Jumlah ekuitas/ Total equity Rp	
				Saldo laba/ Retained earnings		Surplus revaluasi aset tetap/ Property, plant and equipment revaluation surplus Rp	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement on defined benefit plans Rp					
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated Rp	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated Rp							
Saldo per 31 Desember 2016	55,666,007	54,160,519	21,797,016	40,304,040	77,194,942	638,107,673	(8,975,395)	27,665	878,282,467	116,990	878,399,457	Balance as of December 31, 2016
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	21	54,160,519	(54,160,519)	--	--	--	--	--	--	--	--	Reclassification from additional paid-in capital
Penambahan tahun berjalan	22	--	--	(972,738)	--	--	--	--	(972,738)	--	(972,738)	Additions during the year
Cadangan umum tahun berjalan	21	--	--	--	8,361,075	(8,361,075)	--	--	--	--	--	Appropriation during the year
Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak	22	--	--	46,987	--	--	--	--	46,987	--	46,987	Differences between asset and liabilities of tax amnesty
Penambahan modal dan kenaikan nilai wajar porsi kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	365,666	365,666	Capital addition and fair value increment from non-controlling interest
Dividen	--	--	--	--	(2,150,837)	--	--	--	(2,150,837)	(2,381)	(2,153,218)	Dividends
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	--	--	4,410,210	(6,933,307)	(4,226,261)	461,901	(6,287,457)	17,907	(6,269,550)	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2017	109,826,526	--	20,871,265	48,665,115	71,093,240	631,174,366	(13,201,656)	489,566	868,918,422	498,182	869,416,604	Balance as of December 31, 2017
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	22	--	--	(691,932)	--	--	--	--	(691,932)	--	(691,932)	Additions (deduction) during the year
Cadangan umum tahun berjalan	21	--	--	--	4,101,495	(4,101,495)	--	--	--	--	--	Appropriation during the year
Penambahan modal dan kenaikan nilai wajar porsi kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,200	36,200	Capital addition and fair value increment from non-controlling interest
Dividen	21	--	--	--	--	(308,715)	--	--	(308,715)	(1,102)	(309,817)	Dividends
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	--	--	11,568,286	43,907,005	3,239,767	240,274	58,955,332	7,470	58,962,802	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2018	109,826,526	--	20,179,333	52,766,610	78,251,316	675,081,371	(9,961,889)	729,840	926,873,107	540,750	927,413,857	Balance as of December 31, 2018
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	21	5,354,476	4,028,230	(9,382,706)	--	--	--	--	--	--	--	Reclassification from additional paid-in capital
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	22	--	6,500,000	(876,669)	--	--	--	--	5,623,331	319,424	5,942,755	Additions (deduction) during the year
Cadangan umum tahun berjalan	21	--	--	--	7,568,286	(7,568,286)	--	--	--	--	--	Appropriation during the year
Dividen	21	--	--	--	--	(4,000,000)	--	--	(4,000,000)	(2,738)	(4,002,738)	Dividends
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	--	--	--	--	--	43,779	(43,779)	--	--	--	--	Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus to retained earnings
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	--	--	4,270,922	(1,183,109)	(2,831,969)	(280,513)	(24,669)	51,208	26,539	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2019	115,181,002	10,528,230	9,919,958	60,334,896	70,997,731	673,854,483	(12,793,858)	449,327	928,471,769	908,644	929,380,413	Balance as of December 31, 2019

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	287,895,794	275,178,934	257,336,702	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(248,764,095)	(255,587,400)	(207,558,346)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(23,989,254)	(20,897,306)	(21,206,851)	Cash paid to employees
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	15,142,445	(1,305,772)	28,571,505	Cash provided by (used in) operations
Penerimaan subsidi listrik	51,288,854	56,507,588	50,595,348	Government subsidy received
Pembayaran utang kepada pemerintah	(816,849)	--	--	Government loan paid
Penerimaan bunga	755,105	804,321	1,066,842	Interest received
Pembayaran bunga	(23,419,701)	(19,730,285)	(17,894,129)	Interest expense paid
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	279,394	444,367	725,365	Income tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	(3,546,743)	(1,678,194)	(6,218,927)	Income tax paid
Pembayaran pengampunan pajak	--	--	(2,349)	Payment of tax amnesty
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	39,682,505	35,042,025	56,843,655	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	185,527	88,550	45,983	Proceeds from sale of assets not used in operations
Akuisisi entitas anak	(332,462)	(144,800)	(521,447)	Acquisition of subsidiary
Perolehan aset tetap	(100,431,833)	(100,273,650)	(85,210,519)	Addition of property, plant and equipment
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	224,314	220,734	241,505	Proceeds from dividend of associates and joint ventures
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(1,118,251)	(640,737)	(2,016,929)	Acquisition of investments in associates and joint ventures
Penerimaan kembali dari pinjaman kepada pihak berelasi	--	--	24,270	Receipt of payments from loans to related parties
Pembayaran (penerimaan) kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi - bersih	47,596	(719,276)	(1,507)	Repayments (reception) of loans from related parties - net
Penarikan (penempatan) rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(436,079)	2,244,558	245,332	Withdrawal (placement) of restricted cash in banks and time deposits
Penarikan (penempatan) investasi jangka pendek	879,536	(930,976)	85,077	Withdrawal (placement) of short-term investments
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(100,981,652)	(100,155,597)	(87,108,235)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Perolehan penyertaan modal Pemerintah dalam proses penerbitan saham	6,500,000	--	--	Proceeds from Government for stock subscription in issuance process
Perolehan penyertaan modal kepentingan non-pengendali	--	--	18,333	Proceeds from non-controlling interest for stock subscription
Pembayaran dividen	(4,000,000)	(308,715)	(2,150,837)	Payment of dividends
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(2,738)	(1,102)	(2,382)	Payment of dividends to non-controlling interest
Pembayaran penerusan pinjaman	(2,566,661)	(2,950,612)	(2,588,952)	Payment of two-step loans
Pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	(1,043,793)	(1,043,793)	(1,043,793)	Payment of Government and non-bank Government financial institution loans
Perolehan utang bank - jatuh tempo dalam satu tahun	24,736,661	44,210,450	37,257,322	Proceeds from bank loans - current maturities
Perolehan utang bank - jangka panjang	52,410,478	49,181,404	28,713,548	Proceeds from bank loans - long-term
Pembayaran utang bank - jatuh tempo dalam satu tahun	(33,745,952)	(43,881,381)	(37,800,000)	Payment of bank loans - current maturities
Pembayaran utang bank - jangka panjang	(15,617,536)	(13,704,479)	(12,901,106)	Payment of bank loans - long-term
Perolehan utang obligasi	54,597,702	31,236,379	31,836,000	Proceeds from bonds payable
Pembayaran utang obligasi	(2,279,812)	(914,000)	(9,509,500)	Payment of bonds payable
Perolehan utang KIK-EBA	--	--	3,688,000	Proceeds from KIK-EBA
Pembayaran utang KIK-EBA	(966,724)	(630,600)	(149,414)	Payment of KIK-EBA
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(2,624,629)	(5,186,938)	(4,429,331)	Payments of lease liabilities
Pembayaran utang listrik swasta	(394,405)	(368,142)	(328,199)	Payments of electricity purchase payable
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	75,002,591	55,638,471	30,609,689	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	13,703,444	(9,475,101)	345,109	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(399,221)	477,702	37,627	Effect of changes in foreign currency
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	33,294,560	42,291,959	41,909,223	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	46,598,783	33,294,560	42,291,959	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Tambahan informasi transaksi non kas
disajikan di catatan 51.

Additional information of non cash transaction of
presented in note 51.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No.6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta notaris No. 02 tanggal 6 Mei 2019 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 56 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

1. General

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or "the Company") was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government"). The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company's status was changed to a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on the notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to Limited Liability Company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No.6731.

The articles of association of the Company were recently amended by notarial deed No. 02 dated May 6, 2019 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta.

The Company is domiciled in Jakarta, with 56 business unit offices spread all over Indonesia. The Company's Head Office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")", Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk *margin* yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 38).

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 54.129 karyawan (tidak diaudit), 54.124 karyawan (tidak diaudit), dan 54.820 karyawan (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power, entitas anak Perusahaan.

b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Bursa pencatatan/ <i>Listed in*</i>	Tanggal pencatatan/ <i>Listed date</i>	Jumlah yang ditawarkan/ <i>Offered amount</i> Rp	
Obligasi Rupiah					Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	1 Oktober, 2019 <i>October 1, 2019</i>	1,912,900	Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	1 Oktober, 2019 <i>October 1, 2019</i>	797,500	Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	1 Agustus 2019/ <i>August 1, 2019</i>	2,953,620	Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	1 Agustus 2019/ <i>August 1, 2019</i>	1,250,000	Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run an electricity business for public use, which must be satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit and perform Government's assignment in electricity business in order to support the development with the application of the principles of Limited Liability Companies.

Based on Law No. 19 year 2003, regarding "State-Owned Enterprises ("BUMN")", the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing subsidized electricity to the public (Note 38).

As of December 31, 2019, 2018, and 2017 the Company and its subsidiaries had a total number of employees of 54,129 (unaudited), 54,124 (unaudited), and 54,820 (unaudited), respectively. The total employees do not include employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. PT Haleyora Powerindo is a subsidiary of PT Haleyora Power, the Company's subsidiary.

b. The Company's Public Offering of Bonds

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Bursa pencatatan/ <i>Listed in*)</i>	Tanggal pencatatan/ <i>Listed date</i>	Jumlah yang ditawarkan/ <i>Offered amount</i> Rp	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	19 Februari 2019/ <i>February 19, 2019</i>	2,393,000	<i>Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	19 Februari 2019/ <i>February 19, 2019</i>	863,000	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019</i>
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	10 Oktober 2018/ <i>October 10, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	10 Oktober 2018/ <i>October 10, 2018</i>	832,000	<i>Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	10 Oktober 2018/ <i>October 10, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	10 Oktober 2018/ <i>October 10, 2018</i>	224,000	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	10 Juli 2018/ <i>July 10, 2018</i>	1,278,500	<i>Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ <i>June 29, 2018</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	10 Juli 2018/ <i>July 10, 2018</i>	750,000	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	23 Februari 2018/ <i>February 23, 2018</i>	2,535,000	<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	23 Februari 2018/ <i>February 23, 2018</i>	698,500	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	2 November 2017/ <i>November 2, 2017</i>	2,545,500	<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	2 November 2017/ <i>November 2, 2017</i>	694,500	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	12 Juli 2017/ <i>July 12, 2017</i>	1,600,000	<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	12 Juli 2017/ <i>July 12, 2017</i>	400,000	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ <i>June 27, 2013</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	11 Desember 2013/ <i>December 11, 2013</i>	1,244,000	<i>Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ <i>June 27, 2013</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	11 Desember 2013/ <i>December 11, 2013</i>	429,000	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ <i>June 27, 2013</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	8 Juli 2013/ <i>July 8, 2013</i>	879,000	<i>Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ <i>June 27, 2013</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	8 Juli 2013/ <i>July 8, 2013</i>	121,000	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013</i>
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ <i>June 30, 2010</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	9 Juli 2010/ <i>July 9, 2010</i>	2,500,000	<i>PLN XII Bonds Year 2010</i>
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ <i>June 30, 2010</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	9 Juli 2010/ <i>July 9, 2010</i>	500,000	<i>Sukuk Ijara V PLN Year 2010</i>
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ <i>December 31, 2009</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	13 Januari 2010/ <i>January 13, 2010</i>	2,703,000	<i>PLN XI Bonds Year 2010</i>
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ <i>December 31, 2009</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	13 Januari 2010/ <i>January 13, 2010</i>	297,000	<i>Sukuk Ijara IV PLN Year 2010</i>
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ <i>December 31, 2008</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	12 Januari 2009/ <i>January 12, 2009</i>	1,440,000	<i>PLN X Bonds Year 2009</i>
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ <i>December 31, 2008</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia stock exchange</i>	12 Januari 2009/ <i>January 12, 2009</i>	760,000	<i>Sukuk Ijara III PLN Year 2009</i>
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ <i>June 29, 2007</i>	Bursa Efek Surabaya/ <i>Surabaya stock exchange</i>	11 Juli 2007/ <i>July 11, 2007</i>	2,700,000	<i>PLN IX Bonds Year 2007</i>
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ <i>June 29, 2007</i>	Bursa Efek Surabaya/ <i>Surabaya stock exchange</i>	11 Juli 2007/ <i>July 11, 2007</i>	300,000	<i>Sukuk Ijara II PLN Year 2007</i>
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ <i>June 12, 2006</i>	Bursa Efek Surabaya/ <i>Surabaya stock exchange</i>	22 Juni 2016/ <i>June 22, 2016</i>	2,200,100	<i>PLN VIII Bonds Year 2006</i>
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ <i>June 12, 2006</i>	Bursa Efek Surabaya/ <i>Surabaya stock exchange</i>	22 Juni 2016/ <i>June 22, 2016</i>	200,000	<i>Sukuk Ijara I PLN Year 2006</i>
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 November 2004/ <i>November 3, 2004</i>	Bursa Efek Surabaya/ <i>Surabaya stock exchange</i>	12 November 2004/ <i>November 12, 2004</i>	1,500,000	<i>PLN VII Bonds Year 2004</i>
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ <i>June 27, 1997</i>	Bursa Efek Surabaya/ <i>Surabaya stock exchange</i>	12 Agustus 1997/ <i>August 12, 1997</i>	600,000	<i>PLN VI Bonds Year 1997</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Bursa pencatatan/ <i>Listed in *)</i>	Tanggal pencatatan/ <i>Listed date</i>	Jumlah yang ditawarkan/ <i>Offered amount</i> Rp	
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ <i>June 28, 1996</i>	Bursa Efek Surabaya/ <i>Surabaya stock exchange</i>	28 Agustus 1996/ <i>August 28, 1996</i>	1,000,000	PLN V Bonds Year 1996
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ <i>June 30, 1995</i>	Bursa Paralel Indonesia/ <i>Indonesia Parallel exchange</i>	4 September 1995/ <i>September 4, 1995</i>	680,000	PLN IV Bonds Year 1995
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ <i>January 30, 1995</i>	Bursa Paralel Indonesia/ <i>Indonesia Parallel exchange</i>	18 April 1995/ <i>April 18, 1995</i>	318,430	PLN III Bonds Year 1995
Obligasi PLN II Tahun 1993	28 September 1993/ <i>September 28, 1993</i>	Bursa Paralel Indonesia/ <i>Indonesia Parallel exchange</i>	8 November 1993/ <i>November 8, 1993</i>	600,000	PLN II Bonds Year 1993
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ <i>September 25, 1992</i>	Bursa Paralel Indonesia/ <i>Indonesia Parallel exchange</i>	10 November 1992/ <i>November 10, 1992</i>	300,000	PLN I Bonds Year 1992
Jumlah				42,999,550	Total

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya.

*) On July 22, 1995 Indonesia Parallel Exchange was acquired by Surabaya Stock Exchange.

Pada tanggal 30 Oktober 2007 Bursa Efek Surabaya melakukan merger dengan melebur ke dalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

On October 30, 2007 Surabaya Stock Exchange was officially merged to Jakarta Stock Exchange, which then changed its name to Indonesia Stock Exchange.

	Tanggal Efektif/ <i>Effective Date</i>	Bursa Pencatatan/ <i>Listed In</i>	Tanggal Pencatatan/ <i>Listed date</i>	Jumlah Yang Ditawarkan/ <i>Offered Amount *)</i> US\$	
Surat Utang Jangka Menengah Global - US\$ Penerbitan tahun 2019	05 November 2019/ <i>November 05, 2019</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	7 November 2019/ <i>November 7, 2019</i>	1,000,000,000	Global Medium Term Notes - US\$ Issued in 2019
	17 Juli 2019/ <i>July 17, 2019</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	18 Juli 2019/ <i>July 18, 2019</i>	1,400,000,000	
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ <i>October 25, 2018</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	26 Oktober 2018/ <i>October 26, 2018</i>	1,000,000,000	Issued in 2018
	21 Mei 2018/ <i>May 21, 2018</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	16 Mei 2017/ <i>May 16, 2017</i>	2,000,000,000	
Penerbitan tahun 2017	15 Mei 2017/ <i>May 15, 2017</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	16 Mei 2017/ <i>May 16, 2017</i>	2,000,000,000	Issued in 2017
Penerbitan tahun 2012	24 Oktober 2012/ <i>October 24, 2012</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	25 Oktober 2012/ <i>October 25, 2012</i>	1,000,000,000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	22 November 2011/ <i>November 22, 2011</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	23 November 2011/ <i>November 23, 2011</i>	1,000,000,000	Issued in 2011
Jumlah				9,400,000,000	Total
Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ <i>November 5, 2019</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	7 November 2019/ <i>November 7, 2019</i>	500,000,000	Global Medium Term Notes - EUR Issued in 2019
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ <i>October 25, 2018</i>	Bursa Efek Singapura/ <i>Singapore Stock Exchange</i>	26 Oktober 2018/ <i>October 26, 2018</i>	500,000,000	Issued in 2018
Jumlah				1,000,000,000	Total
Surat Utang Jangka Menengah Global - JPY Penerbitan tahun 2019	20 September 2019/ <i>September 20, 2019</i>	Tidak tercatat/ <i>Not listed</i>	N/A	23,200,000,000	Global Medium Term Notes - JPY Issued in 2019
Jumlah				23,200,000,000	Total

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanggal Efektif/ Effective Date	Bursa Pencatatan/ Listed In	Tanggal Pencatatan/ Listed date	Amount *) US\$	
Obligasi Terjamin - US\$					Guaranteed Notes - US\$
Penerbitan 2009	6 November 2009/ November 6, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	9 November 2009/ November 9, 2009	1,250,000,000	Issued in 2009
Penerbitan 2009	7 Agustus 2009/ August 7, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	11 Agustus 2009/ August 11, 2009	750,000,000	Issued in 2009
Penerbitan 2007	28 Juni 2007/ June 28, 2007	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	29 Juni 2007/ June 29, 2007	1,000,000,000	Issued in 2007
Penerbitan 2006	16 Oktober 2006/ October 16, 2006	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	17 Oktober 2006/ October 17, 2006	1,000,000,000	Issued in 2006
Jumlah				4,000,000,000	Total

*) Dalam jumlah penuh/ In full amount

Sebagian obligasi terjamin yang diterbitkan pada tahun 2009 dan 2007 telah dilakukan pembayaran pokok dipercepat pada tanggal 21 Mei 2018 melalui penerbitan Surat Utang Menengah Global tahun 2018 (Catatan 28).

Partial portion of guaranteed notes issued in 2009 and 2007 have been accelerated repaid on May 21, 2018, through the issuance of 2018 Global Medium Term Notes (Note 28).

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain
Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Management and Other Information
As of December 31, 2019, 2018, and 2017 the Company's management consists of the following:

	2019	2018	2017	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	-	-	President Commissioner
Pelaksana Tugas Komisaris Utama	-	Ilya Avianti	Hasan Bisri	Acting as President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Suhasil Nazara	-	-	Vice President Commissioner
Komisaris	Rida Mulyana Ilya Avianti Mohamad Ikhsan	Ronald Silaban Ilya Avianti Andy Noorsaman Sommeng	Harry Susetyo Nugroho Budiman Aloysius Kiik Ro Ronald Silaban Andy Noorsaman Sommeng Ilya Avianti	Commissioners
Komisaris Independen	Amien Sunaryadi Deden Juhara	Oegroseno Darmono	Oegroseno Darmono	Independent Commissioners
Direksi				Board of Directors
Direktur Utama	Zulkifli Zaini	Sofyan Basir	Sofyan Basir	President Director
Wakil Direktur Utama	Darmawan Prasodjo	-	-	Vice President Director
Direktur Keuangan	Sinthya Roesly	Sarwono Sudarto	Sarwono Sudarto	Director of Finance
Direktur Perencanaan Korporat	Syofvi Felienty Roekman	Syofvi Felienty Roekman	Syofvi Felienty Roekman	Director of Corporate Planning
Direktur Human Capital Management	Muhamad Ali	Muhamad Ali	Muhamad Ali	Director of Human Capital Management
Direktur Pengadaan Strategis 1	Sripeni Inten Cahyani	-	-	Director of Strategic Procurement 1
Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1	-	Sofyan Basir	Sofyan Basir	Acting as Director of Strategic Procurement 1
Direktur Pengadaan Strategis 2	Djoko Rahardjo Abu Manan	Supangkat Iwan Santoso	Supangkat Iwan Santoso	Director of Strategic Procurement 2
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	Haryanto W.S	-	-	Director of Regional Business of Java, Madura and Bali
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat	-	Haryanto W.S	Haryanto W.S	Director of Regional Business of West Part of Java
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah	-	Amir Rosidin	Amir Rosidin	Director of Regional Business of Central Side of Java
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	-	Djoko Rahardjo Abu Manan	Djoko Rahardjo Abumanan	Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara
Direktur Bisnis Regional Sumatera	Wiluyo Kusdiharto	Wiluyo Kusdiharto	Wiluyo Kusdiharto	Director of Regional Business of Sumatera
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan	Syamsul Huda	-	-	Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan
Direktur Bisnis Regional Kalimantan	-	Machnizon	Machnizon	Director of Regional Business of Kalimantan
Direktur Bisnis Regional Sulawesi	-	Syamsul Huda	Syamsul Huda	Director of Regional Business of Sulawesi
Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	Ahmad Rofik	-	-	Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua	-	Ahmad Rofik	Ahmad Rofik	Director of Regional Business of Maluku and Papua
Komite Audit				Audit Committee
Ketua	Amien Sunaryadi	Darmono	Darmono	Chairman
Anggota	Achmad Wahyudi Nizam Burhanudin Ilya Avianti Krisna Simbaputra	Achmad Wahyudi Ronald Silaban Ilya Avianti Krisna Simbaputra	Achmad Wahyudi Ronald Silaban Ilya Avianti Krisna Simbaputra	Members
Sekretaris Perusahaan				Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan	Adi Setiawan	Bambang Dwiyanto	Bambang Dwiyanto	Corporate Secretary

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-211/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Oegroseno dan Darmono diangkat sebagai Komisaris Independen.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014, Oegroseno and Darmono were appointed as Independent Commissioners.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.KEP-273/MBU//12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Budiman diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.KEP-273/MBU//12/2014 dated December 23, 2014, Budiman were appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-183/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015, Aloysius Kiik Ro diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-183/MBU/09/2015 dated September 25, 2015, Aloysius Kiik Ro was appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-41/MBU/02/2017 tanggal 28 Februari 2017, Rionald Silaban diangkat sebagai Komisaris. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2017, Rionald Silaban diangkat sebagai Komite Audit berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No.01/SK/DK-PLN/2017.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-41/MBU/02/2017 dated February 28, 2017, Rionald Silaban was appointed as Commissioner. Later on March 7, 2017, Rionald Silaban was appointed as Audit Committee based on Decision Letter of Commissioner No.01/SK/DK-PLN/2017.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-128/MBU/07/2017 tanggal 12 Juli 2017, Andy Noorsaman Sommeng diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-128/MBU/07/2017 dated July 12, 2017, Andy Noorsaman Sommeng was appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017, Ilya Avianti diangkat sebagai Komisaris kemudian pada tanggal 8 Agustus 2017, Ilya Avianti diangkat sebagai Komite Audit berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No.8/SK/DK-PLN/2017.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-145/MBU/07/2017 dated July 28, 2017, Ilya Avianti was appointed as Commissioner later on August 8, 2017, Ilya Avianti was appointed as Audit Committee based on Decisison Letter of Commissioner No.8/SK/DK-PLN/2017.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-224/MBU/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018, Darmawan Prasodjo diangkat sebagai Komisaris, Ilya Avianti ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama, dan memberhentikan dengan hormat Hasan Bisri sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-224/MBU/08/2018 dated August 6, 2018, Darmawan Prasodjo was appointed as Commissioner, Ilya Avianti was assigned as Acting President Commissioner, and Hasan Bisri was honorably discharged as Commissioner.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Sofyan Basir diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan, dan Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso dan Amir Rosidin, diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Sofyan Basir was appointed as the Company's President Director, and Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso and Amir Rosidin, were appointed as the Company's Directors.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon dan Haryanto W.S diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon and Haryanto W.S were appointed as the Company's Directors.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, Syofvi Felienty Roekman, Syamsul Huda, Ahmad Rofik dan Wiluyo Kusdwiarto diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017, Syofvi Felienty Roekman, Syamsul Huda, Ahmad Rofik and Wiluyo Kusdwiarto were appointed as the Company's Director.

Berdasarkan Keputusan Direksi No.108/DIR/2017, Sofyan Basir ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1.

Based on Directors Decision No.108/DIR/2017, Sofyan Basir appointed as Acting Director of Strategic Procurement 1.

Berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No.198/SK/DK-PLN/2015 tanggal 16 Oktober 2015, Darmono diangkat sebagai Ketua Komite Audit. Kemudian berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No.19/SK/DK-PLN/2016 tanggal 28 Juli 2016 Achmad Wahyudi, diangkat sebagai anggota Komite Audit.

Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No.198/SK/DK-PLN/2015 dated October 16, 2015, Darmono was appointed as the Chairman. Later based on the Company's Board of Commissioners SK No.19/SK/DK-PLN/2016 dated July 28, 2016, Achmad Wahyudi, was appointed as member of the Audit Committee.

Berdasarkan SK Dewan Komisaris Perusahaan No.16/SK/DK-PLN/2017 tanggal 20 September 2017, Krisna Simbaputra diangkat sebagai anggota Komite Audit.

Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No.16/SK/DK-PLN/2017 dated September 20, 2017, Krisna Simbaputra was appointed as a member of the Audit Committee.

Berdasarkan Keputusan Direksi No.3210.K/SDM.00.03/DIR/2016 tanggal 30 Desember 2016, Bambang Dwiyanto diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.

Based on the Decree of the Board of Directors No.3210.K/SDM.00.03/DIR/2016 dated December 30, 2016, Bambang Dwiyanto was appointed as Corporate Secretary.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019, Deden Juhara diangkat sebagai Komisaris Independen, Rida Mulyana diangkat sebagai Komisaris, memberhentikan dengan hormat Oegroseno sebagai Komisaris Independen dan memberhentikan dengan hormat Andy Noorsaman Sommeng sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019, Deden Juhara was appointed as Independent Commissioner, Rida Mulyana was appointed as Commissioner, Oegroseno was honorably discharged as Independent Commissioner and Andy Noorsaman Sommeng was honorably discharged as Commissioner.

Berdasarkan Keputusan Direksi No.0913.K/SDM.00.03/DIR/2019 tanggal 4 Maret 2019, Adi Setiawan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.

Based on the Decree of the Board of Directors No.0913.K/SDM.00.03/DIR/2019 dated March 4, 2019, Adi Setiawan was appointed as Corporate Secretary.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.6/SK/DK-PLN/2019 tanggal 27 Maret 2019, Nizam Burhanudin diangkat sebagai Anggota Komite Audit.

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.6/SK/DK-PLN/2019 dated March 27, 2019, Nizam Burhanudin was appointed as a member of Audit Committee.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.7/SK/DK-PLN/2019 tanggal 24 April 2019, Sofyan Basir diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1 dan Muhamad Ali ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.

Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No.7/SK/DK-PLN/2019 dated April 24, 2019, Sofyan Basir was temporarily discharged as President Director and Acting Director of Strategic Procurement 1 and Muhamad Ali was appointed as Acting President Director.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, memberhentikan Sofyan Basir sebagai Direktur Utama, mengangkat Supangkat Iwan Santoso semula sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, dan mengangkat Djoko Rahardjo Abu Manan semula sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Pengadaan Strategis 2 dan Pelaksana Tugas Direktur Utama, serta mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019, Sofyan Basir was discharged as President Director, Supangkat Iwan Santoso that previously as Director of Strategic Procurement 2 appointed as Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara, and Djoko Rahardjo Abu Manan that previously as Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara appointed as Director of Strategic Procurement 2 and Acting President Director, and Sripeni Inten Cahyani was appointed as Director of Strategic Procurement 1.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-169/MBU/08/19 tanggal 2 Agustus 2019, memberhentikan dengan hormat Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan Syamsul Huda ditunjuk sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan Sripeni Inten Cahyani diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic Indonesia No.SK-169/MBU/08/19 dated August 2, 2019, Machnizon was honorably discharged as Director of Regional Business of Kalimantan and Syamsul Huda was appointed as Director of Regional Business of Kalimantan and Sripeni Inten Cahyani was appointed as Acting President Director.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-189/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 memberhentikan dengan hormat Rionald Silaban sebagai Komisaris Perusahaan dan Sumiyati diangkat sebagai Komisaris Perusahaan.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN Republic Indonesia No.SK-189/MBU/08/2019 dated August 30, 2019, Rionald Silaban was honorably discharged as Commissioner of the Company and Sumiyati was appointed as Commissioner of the Company.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-221/MBU/10/19 tanggal 17 Oktober 2019, memberhentikan dengan hormat Darmono sebagai Komisaris Independen Perusahaan.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic Indonesia No.SK-221/MBU/10/19 dated October 17, 2019, Darmono was honorably discharged as Independent Commissioners of the Company.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, dinyatakan sebagai berikut:

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN Republic Indonesia No.SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019, stated as follows:

- Memberhentikan dengan hormat Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan, Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara.
- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
Menambahkan jabatan Wakil Direktur Utama; Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara dihapuskan; Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;

- *Honorably discharged Sarwono Sudarto as Finance Director, Amir Rosidin as Director of Regional Business of Central Part of Java, Supangkat Iwan Santoso as Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara.*
- *Changed the nomenclature position of the members of the Company's Directors as follows:
Added position of Vice President Director; Director of Regional Business of West Part of Java became Director of Regional Business of Java, Madura and Bali; Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara abolished; Director of Regional Business of Sulawesi became Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan; Director of Regional Business of Maluku and Papua became Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Mengangkat Haryanto W.S sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali, Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan, Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dan mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama, Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, memberhentikan dengan hormat Aloysius Kiik Ro dan Sumiyati sebagai Komisaris Perusahaan dan mengangkat Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, serta Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, memberhentikan dengan hormat Darmawan Prasodjo sebagai Komisaris Perusahaan dan mengangkat Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan SK Dewan Komisaris Perusahaan No.19/SK/D-PLN/2019 tanggal 30 Desember 2019, Amien Sunaryadi ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Budiman dihentikan dengan hormat sebagai komisaris efektif pada tanggal 23 Desember 2019.

- Appointed Haryanto W.S as Director of Regional Business of Java, Madura and Bali, Syamsul Huda as Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan, Ahmad Rofik as Director of Regional Business of Maluku, Papua, and Nusa Tenggara, and appointed Zulkifli Zaini as President Director, Darmawan Prasodjo as Vice President Director and Sinthya Roesly as Finance Director.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic Indonesia No.SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019, Aloysius Kiik Ro and Sumiyati were honorably discharged as Independent Commissioners of the Company and appointed Amien Sunaryadi as President Commissioner and Independent Commissioner, and Suahasil Nazara as Vice President Commissioner.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN Republic Indonesia No.SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019, Darmawan Prasodjo was discharged as Commissioner of the Company and Mohamad Ikhsan was appointed as Commissioner of the Company.

Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No.19/SK/D-PLN/2019 dated December 30, 2019, Amien Sunaryadi was appointed as the Chairman of Audit Committee.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020, Budiman was honorably discharged as Commissioner of the Company effective at December 23, 2019.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU")

- a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6")
Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA")

2. Implementation of Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP")

- a. Implementation of Financial Services Authority Regulation No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No.6")
The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely Power Purchase Agreements ("PPA") and

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dan Kontrak Penjualan Energi (“ESC”), dengan Penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta (“IPP”). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa (“ISAK 8”) dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa (Catatan 3.1).

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan POJK No.6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No.6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli. POJK No.6 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengizinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No.6 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden.

Perusahaan memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (Catatan 3.1), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

Energy Sales Contracts (“ESC”), with Independent Power Producers (“IPPs”). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries applied ISFAS 8: Determining Whether an Arrangement Contain a Lease (“ISFAS 8”) in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease (Note 3.1).

On March 1, 2017, Financial Services Authority (“FSA”) issued POJK No.6 which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No.6, transactions based on a power purchase agreement are treated as sale and purchase transactions, even though the power purchase agreements contain substances other than of a sale and purchase. POJK No.6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017 and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No.6 is valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructures development in accordance with Presidential Regulation.

The Company decided to early implement POJK No.6 prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on power purchase agreement which contains a lease (Note 3.1), since January 1, 2016 are presented as purchased electricity in the statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Company and its subsidiaries have adjusted the related assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah bersih penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait sebesar Rp43.428.454 telah dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

The net adjustments on related assets and liabilities amounting to Rp43,428,454 are recorded as adjustment to retained earnings on January 1, 2016, the details of which are as follows:

	1 Januari sebelum penyesuaian/ January 1, Before adjustment 2016 Rp	Penyesuaian saldo awal/ Beginning balance adjustment Rp	1 Januari setelah penyesuaian/ January 1, After adjustment 2016 Rp	
Aset tetap	1,187,879,590	(72,227,600)	1,115,651,990	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	29,088,271	(14,787,769)	14,300,502	Deferred tax assets
	<u>1,216,967,861</u>	<u>(87,015,369)</u>	<u>1,129,952,492</u>	
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang listrik swasta	7,093,280	755,783	7,849,063	Electricity purchase payable
Utang sewa pembiayaan	149,621,763	(128,065,144)	21,556,619	Lease Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang sewa pembiayaan	6,759,138	(3,313,534)	3,445,604	Lease liabilities
Biaya masih harus dibayar	10,627,055	(2,216,084)	8,410,971	Accrued expenses
Utang listrik swasta	311,196	9,968	321,164	Electricity purchase payable
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	8,910,438	380,409	9,290,847	Related parties
Pihak ketiga	17,715,563	1,998,142	19,713,705	Third parties
Utang lain-lain	20,188,608	6,637	20,195,245	Other payables
	<u>221,227,041</u>	<u>(130,443,823)</u>	<u>90,783,218</u>	
Dampak penerapan POJK No.6 terhadap saldo laba awal		<u><u>43,428,454</u></u>		<i>The effect of POJK No.6 application on beginning retained earnings</i>

Entitas anak yang memiliki transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan PT Indonesia Power ("IP"), bukan merupakan emiten atau perusahaan publik sehingga POJK No.6 tidak diterapkan oleh entitas anak tersebut.

The subsidiaries that have transactions based on power purchase agreement, namely PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") and PT Indonesia Power ("IP"), who are not listed or public companies, therefore POJK No.6 is not applied for those subsidiaries.

Untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan PLN Batam dan IP disesuaikan agar kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik sesuai dengan POJK No.6.

For consolidation purposes, adjustments are made on the financial statements of PLN Batam and IP to bring their accounting policy for transactions based on power purchase agreement in accordance with POJK No.6.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
("PSAK") Baru dan Revisi, serta
Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2019**

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka; dan
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**c. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
("PSAK") Baru dan Revisi, serta
Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2020 dan
setelahnya**

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

**b. New and Revised Statements of Financial
Accounting Standard ("SFAS") and
Interpretations of Financial Accounting
Standard ("ISFAS") effective for the year
beginning on or after January 1, 2019**

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI"), effective for the year beginning on January 1, 2019, are as follows:

- SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination;
- SFAS 24 (Amendment 2018): Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement;
- SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost;
- SFAS 46 (Improvement 2018): Income Taxes;
- SFAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement;
- ISFAS 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration; and
- ISFAS 34: Uncertainty over Income Tax Treatments.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

**c. New and Revised Statements of Financial
Accounting Standard ("SFAS") and
Interpretations of Financial Accounting
Standard ("ISFAS") effective for the year
beginning on or after January 1, 2020 and
onwards**

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted are:

- SFAS 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- PSAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf; dan
- PSAK 22 (Amandemen 2019): Kombinasi bisnis tentang definisi bisnis.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

- *SFAS 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contracts;*
- *SFAS 71: Financial Instruments;*
- *SFAS 71 (Amendment 2018): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;*
- *SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers;*
- *SFAS 73: Lease;*
- *SFAS 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;*
- *SFAS 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;*
- *SFAS 1 (Improvement 2019): Presentation of Financial Statements;*
- *RSFAS 13: Revocation of SFAS 45: Nonprofit Entity Financial Reporting;*
- *SFAS 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;*
- *SFAS 102 (Amendment 2019): Accounting for Murabahah;*
- *SFAS 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;*
- *ISFAS 102: Impairment of Murabahah Receivable.*

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted are:

- *SFAS 112: Wakaf Accounting; and*
- *SFAS 22 (Amendment 2019): Business combinations regarding definition of business.*

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Penting

a. Pernyataan Kepatuhan

Sejak 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU"), yang mencakup:

- (a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK");
- (b) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAS-IAI");
- (c) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, terdiri dari Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No.6 POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Sebelum 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan tersebut mencakup:

- (a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI, yang meliputi PSAK dan ISAK;
- (b) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Significant Accounting Policies

a. Statement of Compliance

Since January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP"), which cover:

- (a) Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI"), which covers Indonesian Statements Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS");
- (b) Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Sharia Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant ("DSAS-IAI");
- (c) Applicable Capital Market Regulations as stated by FSA including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("CM-FISB") No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company, and FSA Regulation No.6 POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements.

Prior to January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Those financial accounting standards cover:

- (a) Financial Accounting Standards issued by DSAK-IAI, which covers SFAS and ISFAS;
- (b) Applicable Capital Market Regulations as stated by FSA including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of CM-FISB No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak masing-masing yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the Company's and its subsidiaries' interests in the respective subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

If the Company loses control over the subsidiary, the Company:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

- (a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;*
- (b) *Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;*
- (d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;*
- (e) *Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak akuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.

d. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incompleting by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleting. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Majapahit Holding B.V. ("MH") dan Majapahit Finance B.V. ("MF") diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. ("MH") and Majapahit Finance B.V. ("MF"), are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan Perusahaan.

The operating activities of MH and MF are an integral part of the Company's activities; hence the accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same accounting policy adopted by the Company.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	2019	2018	2017	
	Kurs tengah/ Middle rate Rp *)	Kurs tengah/ Middle rate Rp *)	Kurs tengah/ Middle rate Rp *)	Currency
Mata uang				
GBP	18,250	18,373	18,218	GBP
EUR	15,589	16,560	16,174	EUR
CHF	14,366	14,710	13,842	CHF
US\$	13,901	14,481	13,548	US\$
AUD	9,739	10,211	10,557	AUD
NZD	9,360	9,718	9,613	NZD
JPY	128	131	120	JPY

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

- (a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
- i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

- (b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:*

- i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- | | |
|--|---|
| <p>ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);</p> <p>iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;</p> <p>iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;</p> <p>v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;</p> <p>vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);</p> <p>vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) dan (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau</p> <p>viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.</p> | <p>ii. <i>One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint ventures of a member of a group of which the other entity is a member);</i></p> <p>iii. <i>Both entities are joint ventures of the same third party;</i></p> <p>iv. <i>One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;</i></p> <p>v. <i>The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;</i></p> <p>vi. <i>The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);</i></p> <p>vii. <i>A person identified in (a) and (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or</i></p> <p>viii. <i>The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.</i></p> |
|--|---|

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of BUMN as shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

g. Financial Assets

Initial Recognition and Measurement
All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:
- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
 - (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")
AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengisian komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- ii. Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:
- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
 - (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
 - (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

- iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Impairment of Financial Assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan;
- Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

- *Significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *Breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *It becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization;*
- *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian

loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Derecognition of Financial Assets

The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Reklasifikasi

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh

the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reclassification

The Company and its subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in the Company and its subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for-sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiaries use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Lindung nilai

Dalam bisnis normal, Perusahaan dan entitas anak terekspos risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan treasury tertulis dari manajemen, Perusahaan dan entitas anak menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektivitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

Lindung Nilai atas Arus Kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Hedging

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries are exposed to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Company and its subsidiaries use derivatives and other hedging instruments. SFAS 55 allows three types of hedging relationships:

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge;*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*

The Company and its subsidiaries use hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*
- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

Cash Flow Hedge

The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognized (net after tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.

No adjustment is made to the hedged item.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Perusahaan mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi (tidak termasuk sukuk ijarah), utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar,

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Company reclassify the associated gains and losses that were previously recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Two-step loans, Government and non-bank Government Financial Institution loans, bank loans and medium term notes, bonds payable (excluding sukuk ijarah), electricity purchase payable and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs and are

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- Saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- Berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Sukuk Ijara

Sukuk ijara are recognized when the entity becomes a parts bound by the provisions of the issuance of sukuk ijara. Sukuk ijara are recognized at the nominal value adjusted with premium or discount and transaction cost related to the issuance.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value caused by the premium or discount, then the difference is amortized on straight-line basis over the period of the sukuk ijara.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities, when and only when the Company and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- *Currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *Intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadangan utama.

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2015).

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang

j. Property, Plant and Equipment - Direct Acquisition

Fixed assets are initially recognize at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- *Land;*
- *Buildings, reservoir and infrastructure;*
- *Installations and power plant;*
- *Transmission equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

That change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25 (Revised 2015).

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land is not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the FSA. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value are mandatory to be re-evaluate at least every

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Initial costs incurred to obtain land are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful life as follows:

	2019, 2018 dan/ and 2017 (Tahun/ Years)	
Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10-50	<i>Buildings, reservoir, and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	12-40	<i>Installations and power plant</i>
Perlengkapan transmisi	40	<i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan distribusi	40	<i>Distribution equipment</i>
Perlengkapan umum	5	<i>General equipment</i>
Kendaraan bermotor	5	<i>Motor vehicle</i>
Material cadangan utama	10-50	<i>Major spare parts</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	10	<i>Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	10	<i>Other telecommunication and data processing equipment</i>
Kapal dan perlengkapan	10-47	<i>Vessel and equipment</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau jika lebih pendek, disusutkan selama periode masa sewa ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

I. Sewa

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2016

ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011): Sewa ("PSAK 30").

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

I. Leases

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

Accounting treatment before January 1, 2016

ISFAS 8: *Determining Whether an Arrangement Contains a Lease* ("ISFAS 8") provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011): Leases ("SFAS 30").

The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried out by the Company as a BUMN, which serves as the holder of an Electricity Business Proxy. The holder of an Electricity Business Proxy and each holder of an Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni PPA dan ESC, dengan IPP. IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK yang kemudian bergabung menjadi bagian dari OJK, No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, perjanjian penyediaan tenaga listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak yang termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta, dikecualikan dari penerapan ISAK 8 sampai DSAK-IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik mengatur transaksi tersebut.

Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa ("ISAK 16") (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi, yang berisi perlakuan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.

**Perlakuan akuntansi sejak
1 Januari 2016**

Pada tanggal 1 Maret 2017 OJK menerbitkan POJK No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6") yang diterapkan secara prospektif. Penerapan POJK tersebut mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely PPA and ESC, with IPPs. Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Based on letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of CM-FISB, which has subsequently been merged into the FSA, power supply arrangements by IPPs to the Company and its subsidiaries that are categorized as public-to-private concession arrangements, are exempted from the application of ISFAS 8, until DSAK-IAI has issued an accounting interpretation that can specifically address such transactions.

Management assessed the impact of ISFAS 16: Service Concession Arrangements ("ISFAS 16") (effective January 1, 2012) on the Company's and its subsidiaries' Power Supply Contracts with IPPs and determined that such transactions do not qualify under the scope of the Interpretation, which addresses the accounting of the operators of public-to-private concession arrangements. Subsequently, on its letter dated December 22, 2011 to the Chairman of CM-FISB, management decided to apply the provisions of ISFAS 8, in accordance with SFAS 30, on its Power Supply Contracts since January 1, 2012.

**Accounting treatment since
January 1, 2016**

On March 1, 2017, FSA issued POJK No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment on Transactions based on Power Purchase Agreement ("POJK No.6") which is applied prospectively. The application of the POJK resulted in all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase, therefore

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

beli, sehingga evaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung sewa tidak dilakukan (Catatan 2.a).

Klasifikasi Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari lessor) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Di tahun 2015 Perusahaan dan entitas anak menetapkan bahwa beberapa perjanjian pembelian tenaga listrik dan perjanjian pembelian energi dengan IPP memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar bahwa Perusahaan dan entitas anak dan IPP memiliki perjanjian *take or pay*, dimana Perusahaan dan entitas anak mengambil hampir seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa.

evaluation on whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease is not performed (Note 2.a).

Lease Classification

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards related to ownership of an asset to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

In 2015, the Company and its subsidiaries determined that certain power purchase agreements and energy sales contracts with IPPs qualify as leases on the basis that the Company and its subsidiaries and the IPPs have take or pay arrangements where the Company and its subsidiaries are taking substantially all electricity and energy output from the power plants. This type of arrangement is determined to be a finance lease where a significant portion of the risks and rewards of ownership of certain power plants have been transferred to the Company and its subsidiaries on the basis that the lease term is for the major part of the economic life of the assets and there is a bargain purchase option at the end of the lease term.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut.

m. Construction in Progress

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment that were used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, to be added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowings cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Borrowing costs are capitalized from foreign exchange losses to an extent by which the capitalized amount does not exceed the amount of borrowing costs which may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasi dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Investment income is earned from the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Company and its subsidiaries choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

p. Investments in Associates and Joint Ventures

Investments in Associates

Associates are all entities over which the Company and its subsidiaries have significant influence but not control. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and its subsidiaries investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari nilai investasi bersih Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas

losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiaries with associates, are eliminated to the extent of the Company and its subsidiaries interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiaries.

The Company and its subsidiaries determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized in those circumstances are not allocated to each asset that forms part of the carrying amount of the investment in associates. Any reversal of that

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) Jika investasi menjadi entitas anak;
- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
- (c) Ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama
Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas

impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an investment in associate as follows:

- (a) If the investment becomes a subsidiary;*
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiaries measure the retained interest at fair value; and*
- (c) When the Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Interest in joint ventures

Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and its subsidiaries have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

The result of operations, assets and liabilities of joint ventures are presented in these consolidated financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its joint ventures post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Company and its subsidiaries' share of the losses of a joint ventures equals or exceeds its interest in the joint ventures, including any other unsecured non-current receivables, the Company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint ventures.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint arrangements over the joint ventures.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and its subsidiaries.

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value after loss of control and joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any difference between the carrying amount of the joint ventures upon loss of control and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

q. Aset Takberwujud

i. Biaya Pengembangan Piranti Lunak

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset takberwujud.

ii. Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah

Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainnya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Biaya Pengembangan Piranti Lunak diamortisasi dengan tingkat amortisasi sebesar 20% dengan metode garis lurus.

Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara masa berlaku hukum hak atau umur ekonomi tanah.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

q. Intangible Assets

i. Software Development Cost

Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company and its subsidiaries are recognized as intangible assets.

ii. Legal Costs to Renew Land Rights

Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets.

After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Software Development Cost is amortized with amortization rate of 20% using straight-line method.

Legal costs to renew land rights are amortized over the validity period of the legal rights or the economic life of the land, whichever the shorter.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year end.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

r. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3.g.

t. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amortized. The useful life of an intangible asset that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

r. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

s. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash in hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three-months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivables. Refer to Note 3.g for the accounting policy on loans and receivables.

t. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and its subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and its subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**u. Pinjaman dan Utang Obligasi
(Termasuk Sukuk Ijarah)**

Pinjaman dan utang obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.h.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Tenaga Listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Subsidi Listrik Pemerintah

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.44/PMK.02/2017 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.174/PMK.02/2019 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ("ESDM") No.28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM No.19 Tahun 2019.

Pendapatan Kompensasi

Kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.

**u. Borrowings and Bonds Payable
(Including Sukuk Ijara)**

Borrowings and bonds payable are classified as financial liabilities. Refer to Note 3.h for the accounting policy on financial liabilities.

v. Revenue and Expense Recognition

Sale of Electricity

Revenue from the sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

The Government's Electricity Subsidy

The Government's electricity subsidy is recognized as revenue on an accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the prevailing Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.44/PMK.02/2017 which has been amended by Regulation of The Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.174/PMK.02/2019 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") No.28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero) with the latest amendment by Regulation of the Minister of ESDM No.19 Year 2019.

Compensation Income

Compensation from Government for reimbursement of Electricity Production Cost ("BPP") of several categories of customers whose tariffs for selling electricity are lower than BPP, and not yet calculated in subsidies is recognized as income on an accrual basis.

Customers Connection Fees

The Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection service.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan lainnya diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual, dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

w. Pembelian Tenaga Listrik

Dalam PPA dan ESC dengan IPP, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumber daya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8 dan mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa. Apabila terdapat unsur sewa, maka Perusahaan dan entitas anak melakukan kajian untuk menentukan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi (Catatan 3.l). Jika PPA dan ESC dengan IPP tidak mengandung sewa, maka biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Other Revenues

Other revenues consist of telecommunication network and services, transformer rental and other administrative services. Other revenue is recognized with reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date.

Interest Income

Interest income is recognized as incurred on an accrual basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

w. Purchase of Electricity

Under PPAs and ESCs with IPPs, the Company and its subsidiaries pay the IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries implemented ISFAS 8 and evaluated whether PPA and ESC with IPP contain a lease. When a lease is identified, the Company and its subsidiaries perform assessment on whether such lease is classified as finance lease or operating lease (Note 3.l). If PPA and ESC with IPP does not contain a lease, the cost of electricity purchases from IPP are recognized when incurred as purchased electricity expense and presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Perlakuan akuntansi sejak
1 Januari 2016**

Penerapan POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016, mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual beli. Biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 2.a).

**Accounting treatment since
January 1, 2016**

The prospective implementation of POJK No.6 since January 1, 2016 resulted in all transactions based on PPA and ESC with IPP are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase. The cost of electricity purchases from IPP are recognized when incurred as purchased electricity expense and presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (Note 2.a).

x. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

x. Employee Benefits

Post-employment Benefits

The Company and its subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit Method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Long-term Benefits

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the periode in which they occur.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

y. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party,

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

z. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

z. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) or the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

aa. Aset Donasi dari Pemerintah

Aset donasi dari Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan aset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

aa. Government Contributed Assets

Assets contributed by the Government, in their capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the Government contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional payment in capital by the shareholder.

bb. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

bb. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid-in Capital.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in TAAL.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

The compensation paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives TAAL.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant FAS according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan dan entitas anak telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company and its subsidiaries have disclosed the following in its financial statements:

- a. Tanggal SKPP;
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

- a. *The date of TAAL;*
- b. *Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with TAAL; and*
- c. *Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.*

cc. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

cc. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.

dd. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

dd. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Segmen yang dilaporkan adalah segmen operasi individual atau suatu grup segmen operasi yang informasi segmennya harus dilaporkan secara terpisah. Penggabungan satu atau lebih segmen operasi diperbolehkan ketika memenuhi kriteria tertentu, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah segmen operasi harus memiliki karakteristik ekonomis yang sejenis (contoh margin keuntungan, persebaran, tingkat pertumbuhan penjualan, dll). Pertimbangan signifikan diperlukan ketika menentukan penggabungan segmen operasi.

Wilayah Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Timur digabungkan sebagai satu segmen operasi dikarenakan memiliki karakteristik konsumen yang sejenis.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

Reportable segments are individual operating segments or a group of operating segments for which segment information must be separately reported. Aggregation of one or more operating segments into a single reportable segment is permitted (but not required) where certain conditions are met, the principal condition being that the operating segments should have similar economic characteristics (for example profit margin, spreads, sales growth rates, etc). Whether multiple operating segments can be aggregated into a single reportable segment is a matter of significant judgement.

West Part of Java Area, Central Part of Java Area and East Part of Java Area is aggregated as a single reportable segment due to similarity the consumer's characteristic.

Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location of where electricity sales are made.

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

4. Critical Accounting Judgments and Significant Accounting Estimates

In the application of the Company and its subsidiaries accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan
Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan dan entitas anak telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik Di Dalam Sewa
Pembiayaan

Sejumlah aset tetap dicatat berdasarkan sewa pembiayaan menurut PSAK 30. Pada saat dimulainya sewa, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar nilai wajar pembangkit listrik yang disewa atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditentukan pada awal masa sewa.

Perusahaan menetapkan nilai wajar dari pembangkit listrik yang disewa dengan menerapkan teknik penilaian yang sesuai dan asumsi-asumsi yang memadai, termasuk estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik terkait, suku bunga implisit dalam sewa dan nilai sisa aset pada masa akhir kontrak. Perubahan-perubahan selanjutnya atas asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar pada awal masa sewa tidak akan merubah nilai aset pembiayaan di masa mendatang.

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Perusahaan perlu menentukan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik (terlepas dari jumlah biaya penyambungan yang dibayarkan). Oleh karena itu, penerimaan biaya penyambungan tidak menimbulkan kewajiban

**Critical Judgments in Applying Accounting
Policies**

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company and its subsidiaries have identified the following matters under which significant judgments are made:

Fair Value of Power Plants Held Under Finance
Leases

A number of property, plant and equipment are recorded based on finance lease arrangement, in accordance with SFAS 30. At the commencement of the lease, the Company recognizes the finance leased asset and liability at an amount equal to the fair value of the power plant or, if lower, the present value of the minimum lease payments, determined at the inception of the lease.

The Company determined the fair value of the finance leased power plant by applying the appropriate valuation techniques and assumptions, including the expected cost to build the power plant, the implicit interest rate of the lease and the residual value of the asset at the end of the contract. Any subsequent changes to the assumptions used to measure fair value at inception do not affect the subsequent measurement amount of the leased asset.

Revenues from Customers' Connection Fees

The Company and its subsidiaries have considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Company needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees.

The Company and its subsidiaries considered the facts that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Company charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of connection fees paid by the customers). Therefore, the receipt of connection fees does not create a separate performance obligation for the Company and

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

terpisah bagi Perusahaan dan entitas anak untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan biaya penyambungan dari pelanggan. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value*) untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas anak mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi terkait.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

its subsidiaries to provide ongoing electricity supply to its customers.

The Company and its subsidiaries conclude that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the connection fees. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. Consequently, the Company and its subsidiaries recognize connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection services.

Interest in Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Company and its subsidiaries have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and its subsidiaries have determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and its subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and its subsidiaries also consider the rights and obligations arising from:*
 - *The legal form of the separate vehicle;*
 - *The terms of the contractual arrangement; and*
 - *Other facts and circumstances (when relevant).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indotenaga, PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali, PT North Sumatera Hydro Energy dan PT Indo Raya Tenaga. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 8).

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 14 dan 17.

This assessment often requires significant judgement and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

The Company and its subsidiaries have joint arrangements which are structured through joint ventures, namely PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indotenaga, PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali, PT North Sumatera Hydro Energy and PT Indo Raya Tenaga. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and its subsidiaries have rights to the net assets of the arrangements. The Company and its subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusions were that the arrangement was joint ventures (Note 8).

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 14 and 17.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap, Perusahaan dan entitas anak ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 6.

Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi yang Menggunakan Model Revaluasi

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Company and its subsidiaries properties, plant, and equipment, is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and update if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 6.

Fair Value of Property, Plant and Equipment and Investment Properties That Use Revaluation Model

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The property, plant and equipment revaluation was performed by an independent public valuer.

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the assets class. While it is believed that the Company and its subsidiaries' data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 7.

Detail of valuation approach and significant data input used in the revaluation property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Post-employment Benefits

The determination of the post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiaries' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 50.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit are disclosed in Note 50.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan dan entitas anak memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan dan entitas anak, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Company and its subsidiaries require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company and its subsidiaries, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. Entitas Anak

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. Subsidiaries

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership			Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **/ Total assets before elimination **)		
			2019 %	2018 %	2017 %		2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
PT Indonesia Power (IP) dan entitas anak/ and subsidiaries	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	99.99	1995	189,705	196,133	218,339
PT Cogindo DayaBersama (CDB) *)	Jakarta	Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ Cogeneration, energy distribution, energy service and management	99.99	99.99	99.99	1999	1,214	1,177	1,043
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	80.00	80.00	80.00	1998	454	157	378
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	90.00	90.00	90.00	2018	1,650	1,719	1,187
PT Putra Indotenaga (PIT) dan entitas anak/ and its subsidiaries *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	99.99	2016	1,533	870	711
PT Indo Tenaga Hijau (ITH) *) (d/h PT Tangkuban Parahu Geothermal Power)	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/ Development of new and renewable energy	95.21	95.21	95.21	***)	102	96	82
PT Suralaya Indo Tenaga (SIT) dan entitas anak/ and its subsidiary ***)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	--	--	**)	522	--	--
PT Putra Suralaya Indo Tenaga (PSI) ***)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	--	--	**)	522	--	--
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan entitas anak/ and subsidiaries	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	99.99	1995	173,223	174,391	193,321
PT PJB Services (PJBS) *) dan entitas anak/ and subsidiaries	Surabaya	Jasa/ Service	98.00	98.00	98.00	2001	1,185	1,277	998
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/ Service	92.00	92.00	92.00	2013	105	87	89
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik *)	Jakarta	Jasa/ Service	95.00	95.00	95.00	2015	8	5	4
PT Rekadaya Elektrika (RE) *) dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ Electricity and engineering	98.90	98.90	98.90	2004	2,135	1,513	1,130
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) *)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ Supervision and consultation	99.80	99.80	99.80	2011	156	172	147
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ Trading, construction, mining and agriculture	72.97	72.97	72.97	***)	304	307	287
PT PJB Investasi (PJBI) *)	Jakarta	Ketenagalistrikan/ Electricity	99.99	99.99	99.99	2016	4,651	4,444	3,036
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) dan entitas anak/ and subsidiary	Batam	Penyedia tenaga listrik/ Electricity supplier	99.99	99.99	99.99	2000	20,002	20,035	19,027

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership			Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ Total assets before elimination **)		
			2019 %	2018 %	2017 %		2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
PT Pelayanan Energi Batam (PEB)	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ Construction of gas pipeline and other energy sector	99.99	99.99	99.99	2016	635	881	845
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ Telecommunication provider	99.99	99.99	99.99	2000	3,674	3,098	2,606
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE) dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction	99.90	99.90	99.90	2003	1,185	1,245	1,030
PT Prima Power Nusantara (PPN)	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction	99.99	99.99	99.99	2017	279	260	117
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) dan entitas anak/ and subsidiary	Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.97	99.97	99.97	2004	471	355	304
PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) *)	Balikpapan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.96	99.96	99.96	2018	31	3	2
Majapahit Holding B.V. (MH) dan entitas anak/ and its subsidiary	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Finance	100.00	100.00	100.00	2006	9,678	13,173	35,524
Majapahit Finance B.V. (MF) *)	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Finance	100.00	100.00	100.00	2006	34,998	36,458	34,109
PT PLN Batubara (PLN Batubara) dan entitas anak/ and subsidiaries	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	99.99	99.99	99.99	2009	7,904	5,977	4,424
PT Jambi Prima Coal (JPC)	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	60.00	60.00	60.00	2010	242	175	869
PT PLN Batubara Investasi (BBI) dan entitas anak/ and subsidiaries	Jakarta	Investasi/ Investment	99.96	99.96	--	2018	1,890	240	--
PT Bangun Persada Jambi Energi (BPJE)*)	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	80.00	80.00	--	***)	54	50	--
PT Mahakarya Abadi Prima (MAP)*)	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	80.00	80.00	--	***)	5	5	--
PT Bayan Koalindo Lestari *)	Palembang	Pertambangan batu bara/ Coal mining	51.00	--	--	2018	489	--	--
PT Prima Bara Indonesia *)	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	Pertambangan batu bara/ Coal mining	51.00	--	--	***)	104	--	--
PT PLN Batubara Niaga (BSN)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	100.00	--	--	***)	50	--	--
PT Pengembang Listrik Nasional Gas Dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	99.99	2010	280	147	17
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Jakarta	Pelayaran/ Shipping	99.99	99.99	99.99	2011	1,773	1,431	1,472
PT Haleyora Power (HP) dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.99	99.99	99.99	2013	967	825	739
PT Haleyora Powerindo (HPI) *)	Jakarta	Jasa/ Service	95.00	90.00	90.00	2013	458	408	312
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) *)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa enjiniring supply chain dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan/ Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector	100.00	100.00	100.00	2018	287	197	151

*) Pemilikan tidak langsung/ Indirect ownership

***) Dalam miliaran Rupiah/ Stated in billions of Rupiah

****) Dalam tahap pengembangan/ Under development stage

Pada tahun 2017, berdasarkan akta No. 73 tanggal 31 Juli 2017 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal) berganti nama menjadi PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal) serta menambah lingkup usahanya di bidang usaha pengelolaan gas beserta infrastrukturnya khususnya yang berkaitan dengan *midstream* gas.

In 2017, by notarial deed No. 73 dated July 31, 2017 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal) changed its name to PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal) and expand the scope of its business in gas management along with its infrastructure especially related to *midstream* gas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 16 Juni 2017, PJB dan IP, entitas anak, mendirikan PLN SC dengan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp76.500 dan Rp73.500 yang merupakan 51% dan 49% kepemilikan saham di PLN SC.

In June 16, 2017, PJB and IP, subsidiaries, established PLN SC with share ownership amounted to Rp76,500 and Rp73,500, respectively which are 51% and 49% shares ownership in PLN SC.

Pada tahun 2017, PLN Batubara, entitas anak, melakukan akuisisi 60% saham JPC dari PT Indobagus Energy (pihak ketiga) dengan biaya perolehan sebesar Rp521.471.

In 2017, PLN Batubara, a subsidiary, acquired 60% equity ownership of JPC from PT Indobagus Energy (third party) at acquisition cost of Rp521,471.

Pada tahun 2017, jenis usaha PLN Tarakan, entitas anak, berubah menjadi perusahaan jasa pemeliharaan dan operasi.

In 2017, business nature of PLN Tarakan, a subsidiary, has changed to become a maintenance and operation company.

Pada tahun 2017, PLN Tarakan, entitas anak, melakukan penyertaan saham di PCN sebesar Rp2.499 atau setara 99,96% saham PCN.

In 2017, PLN Tarakan, a subsidiary, made a share investment to PCN amounted to Rp2,499 equivalent to 99.96% shares in PCN.

Pada tahun 2017, IP, entitas anak, dan PT Ridlatama Bangun Mandiri, pihak nonpengendali, melakukan penambahan penyertaan saham di IRP masing-masing sebesar Rp22.965 dan Rp18.333. Penambahan penyertaan saham ini mengubah kepemilikan IP di IRP menjadi 90%.

In 2017, IP, a subsidiary, and PT Ridlatama Bangun Mandiri, non-controlling party, increased their share ownership in IRP amounted to Rp22,965 and Rp18,333, respectively. This shares increase has shares of ownership changed IP's percentage of ownership in IRP to 90%.

Pada tahun 2017, berdasarkan akta No. 33 tanggal 7 November 2017 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), entitas anak IP, berganti nama menjadi PT Indo Tenaga Hijau (ITH) serta menambah lingkup usahanya di bidang perusahaan energi baru dan/ atau terbarukan.

In 2017, by notarial deed No. 33 dated November 7, 2017 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), subsidiary of IP, changed its name to PT Indo Tenaga Hijau (ITH) and expand the scope of it business in new and/or renewable energy.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BAG, entitas anak, kehilangan pengendalian atas PBM AP disebabkan penjualan 75% saham BAG di PBM AP kepada Dana Pensiun PLN ("DP PLN") dengan nilai pelepasan sebesar Rp54.250 sehingga PBM AP berubah status menjadi asosiasi.

On May 2, 2017, BAG, a subsidiary, lost its control over PBM AP due to sale of 75% of BAG's shares in PBM AP to Dana Pensiun PLN ("DP PLN") with proceed amounted to Rp54,250 which changed PBM AP status to associate.

Pada tanggal 19 Januari 2018, PLN Batubara, entitas anak, mendirikan BBI dengan penyertaan saham sebesar Rp2.499 yang merupakan 99,96% kepemilikan saham di BBI.

In January 19, 2018, PLN Batubara, a subsidiary, established BBI with share ownership amounted to Rp2,499 equivalent to 99.96% share ownership in BBI.

Pada tanggal 20 Desember 2018, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan akuisisi 80% saham BPJE dan MAP dari PT Indobagus Energy (pihak ketiga) dengan biaya perolehan sebesar Rp66.500 dan Rp78.300.

In December 20, 2018, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 80% equity ownership of BPJE and MAP from PT Indobagus Energy (third party) at acquisition cost of Rp66,500 and Rp78,300.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2019, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan akuisisi 51% saham PT Prima Bara Indonesia ("PBI") dari PT Prima Multhi Artha (pihak ketiga) dengan biaya perolehan sebesar Rp43.000.

In 2019, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 51% of the shares of PT Prima Bara Indonesia ("PBI") from PT Prima Multi Artha (third party) at acquisition cost Rp43,000.

Pada tanggal 8 Januari 2019, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan akuisisi atas 51% saham PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL") dari PT Optima Persada Energi dan PT Aquela Pratama Indonesia (pihak ketiga) dengan biaya perolehan sebesar Rp332.462.

On January 8, 2019, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 51% of the shares of PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL") from PT Optima Persada Energi and PT Aquela Pratama Indonesia (third parties) at acquisition cost amounting to Rp332,462.

Pada tanggal 2 Agustus 2019, PLN Batubara, entitas anak, mendirikan PT PLN Batubara Niaga ("BBN") dengan penyertaan saham sebesar Rp50.000 yang merupakan 100% kepemilikan saham di BBN.

On August 2, 2019, PLN Batubara, a subsidiary, established PT PLN Batubara Niaga ("BBN") with an equity participation of Rp50,000, representing 100% of the share ownership in BBN.

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017 IP, entitas anak, menambah penyertaan saham di PIT masing-masing sebesar Rp567.088, Rp119.562, dan Rp278.957 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

In 2019, 2018, and 2017 IP, a subsidiary, increased additional shares to PIT amounted to Rp567,088, Rp119,562, and Rp278,957 respectively, without changes in percentage of ownership.

Berdasarkan akta notaris No. 172 tanggal 17 Desember 2019 dari Jimmy Tanal. S.H., M.kn. notaris di Jakarta Selatan, IP, entitas anak, mengalihkan 6.950.000 lembar saham setara 95,2% kepemilikan ITH kepada PIT dengan nilai US\$3.398.550 (setara dengan Rp47.715).

Based on notarial deed No. 172 date December 17, 2019 from Jimmy Tanal. S.H., M.kn. notary in South Jakarta, IP, a subsidiary, transferred 6,950,000 shares equivalent to 95.2% of ITH ownership to PIT with a value of US\$3,398,550 (equivalent to Rp47,715).

Pada tanggal 15 November 2019, PIT, entitas anak IP, mendirikan PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") dengan penyertaan saham sebesar Rp499 yang merupakan 99,99% kepemilikan saham di SIT.

On November 15, 2019, PIT, a subsidiary of IP, established PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") with share ownership amounted to Rp499 equivalent to 99.99% share ownership in SIT.

Pada tanggal 15 November 2019, PIT, entitas anak IP, mendirikan PT Putra Suralaya Indotenaga ("PSI") dengan penyertaan saham sebesar Rp499 yang merupakan 99,99% kepemilikan saham di PSI.

On November 15, 2019, PIT, a subsidiary of IP, established PT Putra Suralaya Indotenaga ("PSI") with share ownership amounted to Rp499 equivalent to 99.99% share ownership in PSI.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PSI tanggal 6 Desember 2019, menyetujui pengalihan saham PIT di PSI ke SIT sebesar 51%.

Based on General Stockholders' Meeting ("RUPS") PSI dated December 6, 2019, approved the transfer of PIT shares in PSI to SIT amounted to 51%.

Pada tahun 2019, HP, entitas anak, menambah penyertaan saham di HPI sebesar Rp12.816. Penambahan penyertaan ini merubah kepemilikan HP di HPI menjadi 95%.

In 2019, HP, a subsidiary, increased its share ownership in HPI amounted to Rp12,816. This share increment has changed HP presented in HPI to 95%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. Aset Tetap

6. Property, Plant and Equipment

2019							
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Penurunan nilai/ Impairment Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan							At cost
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct acquisitions</u>
Tanah	151,573,418	21,032	--	--	1,939,392	153,533,842	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	64,230,060	594,723	--	--	9,299,233	74,124,016	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	557,483,539	1,927,471	--	--	26,883,369	586,294,379	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	124,821,717	102,758	--	--	41,323,198	166,247,673	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	195,642,535	125,635	--	--	25,654,407	221,422,577	Distribution equipment
Perlengkapan umum	13,862,471	342,853	--	--	2,420,169	16,625,493	General equipment
Kendaraan bermotor	1,775,137	79,828	--	--	392,658	2,247,623	Motor vehicles
Material cadangan utama	2,219,524	130,137	--	--	1,882,026	4,231,687	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4,544,728	28,441	--	--	1,656,156	6,229,325	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,433,494	3,891	--	--	591,472	3,028,857	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,228,083	172,360	--	--	--	1,400,443	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>1,119,814,706</u>	<u>3,529,129</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>112,042,080</u>	<u>1,235,385,915</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>							<u>Leased assets</u>
Tanah	276,355	--	--	--	--	276,355	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	41,384,497	--	--	--	(414,232)	40,970,265	Installation and power plant
Subjumlah	<u>41,660,852</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(414,232)</u>	<u>41,246,620</u>	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	199,179,007	97,849,952	--	--	(114,320,918)	182,708,041	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	9,766,775	--	(297,509)	--	2,939,556	12,408,822	Assets not used in operation
Jumlah	<u>1,370,421,340</u>	<u>101,379,081</u>	<u>(297,509)</u>	<u>--</u>	<u>246,486</u>	<u>1,471,749,398</u>	Total
Akumulasi penyusutan/akumulasi penurunan nilai							Accumulated depreciation/accumulated impairment
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct acquisitions</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	2,428,168	--	--	114,430	2,542,598	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	--	17,776,329	--	--	289,714	18,066,043	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	--	3,920,200	--	--	114,657	4,034,857	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	--	7,002,878	--	--	(12,169)	6,990,709	Distribution equipment
Perlengkapan umum	10,631,907	1,337,235	--	--	(6,478)	11,962,664	General equipment
Kendaraan bermotor	1,215,393	233,123	--	--	(5,310)	1,443,206	Motor vehicles
Material cadangan utama	--	110,194	--	--	28,113	138,307	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	--	794,917	--	--	21,008	815,925	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,639,503	239,894	--	--	(6,733)	1,872,664	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	457,798	97,812	--	--	--	555,610	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>13,944,601</u>	<u>33,940,750</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>537,232</u>	<u>48,422,583</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>							<u>Leased assets</u>
Instalasi dan mesin pembangkit	13,327,621	1,486,468	--	--	(66,099)	14,747,990	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	6,460,780	247,615	(297,509)	--	1,272,518	7,683,404	Assets not used in operation
Jumlah	<u>33,733,002</u>	<u>35,674,833</u>	<u>(297,509)</u>	<u>--</u>	<u>1,743,651</u>	<u>70,853,977</u>	Total
Penyisihan penurunan nilai	210,105	--	--	--	198	210,303	Provision for impairment
Jumlah Tercatat	<u>1,336,478,233</u>					<u>1,400,685,118</u>	Net Carrying Value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018							
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions/ Rp	Penurunan nilai/ Impairment Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp	Selisih penilaian kembali/ Increase arising on revaluation Rp		Saldo akhir/ Ending balance Rp
Biaya perolehan								At cost
<u>Pemilikan langsung</u>								<u>Direct acquisitions</u>
Tanah	118,995,469	18,468	--	--	756,210	31,803,271	151,573,418	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	61,859,190	167,940	--	--	2,993,049	(790,119)	64,230,060	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	607,283,907	1,105,497	--	--	15,232,064	(66,137,929)	557,483,539	Installation and power plant
Perengkapan transmisi	101,635,932	18,091	--	--	10,933,050	12,234,644	124,821,717	Transmission equipment
Perengkapan distribusi	175,139,301	272,388	--	--	25,004,621	(4,773,775)	195,642,535	Distribution equipment
Perengkapan umum	12,244,185	462,321	--	--	1,155,965	--	13,862,471	General equipment
Kendaraan bermotor	1,519,782	76,307	--	--	179,048	--	1,775,137	Motor vehicles
Material cadangan utama	1,240,090	423,148	--	--	683,789	(127,503)	2,219,524	Major spare parts
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4,350,037	102,735	--	--	1,139,992	(1,048,036)	4,544,728	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,091,899	2,051	--	--	339,544	--	2,433,494	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,166,918	61,165	--	--	--	--	1,228,083	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>1,087,526,710</u>	<u>2,710,111</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>58,417,332</u>	<u>(28,839,447)</u>	<u>1,119,814,706</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>								<u>Leased assets</u>
Tanah	276,355	--	--	--	--	--	276,355	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	41,325,730	--	--	--	58,767	--	41,384,497	Installation and power plant
Subjumlah	<u>41,602,085</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>58,767</u>	<u>--</u>	<u>41,660,852</u>	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	145,296,494	113,011,653	--	--	(59,129,140)	--	199,179,007	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	16,311,885	--	(1,111,469)	--	(5,433,641)	--	9,766,775	Assets not used in operation
Jumlah	<u>1,290,737,174</u>	<u>115,721,764</u>	<u>(1,111,469)</u>	<u>--</u>	<u>(6,086,682)</u>	<u>(28,839,447)</u>	<u>1,370,421,340</u>	Total
Akumulasi penyusutan/ akumulasi penurunan nilai								Accumulated depreciation/ accumulated impairment
<u>Pemilikan langsung</u>								<u>Direct acquisitions</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	3,696,613	1,753,538	--	--	(249,105)	(5,201,046)	--	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	31,971,794	17,391,337	--	--	(222,640)	(49,140,491)	--	Installation and power plant
Perengkapan transmisi	4,821,695	2,686,037	--	--	20,041	(7,527,773)	--	Transmission equipment
Perengkapan distribusi	9,143,419	5,616,206	--	--	(25,284)	(14,734,341)	--	Distribution equipment
Perengkapan umum	9,460,642	1,139,582	--	--	31,683	--	10,631,907	General equipment
Kendaraan bermotor	1,060,893	160,235	--	--	(5,735)	--	1,215,393	Motor vehicles
Material cadangan utama	166,841	59,581	--	--	5,932	(232,354)	--	Major spare parts
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	1,005,064	531,666	--	--	(11,529)	(1,525,201)	--	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,454,810	190,048	--	--	(5,355)	--	1,639,503	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	369,658	88,062	--	--	78	--	457,798	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>63,151,429</u>	<u>29,616,292</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(461,914)</u>	<u>(78,361,206)</u>	<u>13,944,601</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>								<u>Leased assets</u>
Instalasi dan mesin pembangkit	11,831,265	1,143,691	--	--	352,665	--	13,327,621	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	11,186,051	301,965	(1,111,189)	907,039	(4,823,086)	--	6,460,780	Assets not used in operation
Jumlah	<u>86,168,745</u>	<u>31,061,948</u>	<u>(1,111,189)</u>	<u>907,039</u>	<u>(4,932,335)</u>	<u>(78,361,206)</u>	<u>33,733,002</u>	Total
Penyisihan penurunan nilai	--	--	--	--	--	210,105	210,105	Provision for impairment
Jumlah Tercatat	<u><u>1,204,568,429</u></u>	<u><u>1,336,478,233</u></u>	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>	<u><u>1,336,478,233</u></u>	Net Carrying Value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2017							
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Penurunan nilai/ Impairment Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan							At cost
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct acquisitions</u>
Tanah	122,946,829	296,727	--	--	(4,248,087)	118,995,469	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	53,221,708	573,948	--	--	8,063,534	61,859,190	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	601,857,994	1,404,228	--	--	4,021,685	607,283,907	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	94,212,569	217,711	--	--	7,205,652	101,635,932	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	156,955,477	917,265	--	--	17,266,559	175,139,301	Distribution equipment
Perlengkapan umum	10,734,882	316,985	--	--	1,192,318	12,244,185	General equipment
Kendaraan bermotor	1,195,896	82,865	--	--	241,021	1,519,782	Motor vehicles
Material cadangan utama	1,017,197	49,161	--	--	173,732	1,240,090	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	3,248,184	79,566	--	--	1,022,287	4,350,037	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,886,524	275	--	--	205,100	2,091,899	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,146,053	20,865	--	--	--	1,166,918	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>1,048,423,313</u>	<u>3,959,596</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>35,143,801</u>	<u>1,087,526,710</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>							<u>Leased assets</u>
Tanah	47,400	228,955	--	--	--	276,355	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	37,921,931	3,403,799	--	--	--	41,325,730	Installation and power plant
Subjumlah	<u>37,969,331</u>	<u>3,632,754</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>41,602,085</u>	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan Aset tidak digunakan dalam operasi	102,994,657	89,059,011	--	--	(46,757,174)	145,296,494	Construction in progress Assets not used in operation
Jumlah	<u>1,197,947,106</u>	<u>96,651,361</u>	<u>(3,582,368)</u>	<u>(4,384,773)</u>	<u>15,719,221</u>	<u>1,631,188,5</u>	Total
Akumulasi penyusutan/ akumulasi penurunan nilai							Accumulated depreciation/ accumulated impairment
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct acquisitions</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,291,307	1,640,227	--	--	(234,921)	3,696,613	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	15,317,088	16,519,913	--	--	134,793	31,971,794	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	2,341,006	2,475,531	--	--	5,158	4,821,695	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	4,311,364	4,865,522	--	--	(33,467)	9,143,419	Distribution equipment
Perlengkapan umum	8,326,941	1,076,274	--	--	57,427	9,460,642	General equipment
Kendaraan bermotor	953,985	119,008	--	--	(12,100)	1,060,893	Motor vehicles
Material cadangan utama	155,689	40,634	--	--	(29,482)	166,841	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	543,804	443,054	--	--	18,206	1,005,064	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,259,180	194,094	--	--	1,536	1,454,810	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	291,820	77,838	--	--	--	369,658	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>35,792,184</u>	<u>27,452,095</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(92,850)</u>	<u>63,151,429</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>							<u>Leased assets</u>
Instalasi dan mesin pembangkit	10,106,163	1,725,102	--	--	--	11,831,265	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	6,519,232	964,343	(871,177)	4,223,731	349,922	11,186,051	Assets not used in operation
Jumlah	<u>52,417,579</u>	<u>30,141,540</u>	<u>(871,177)</u>	<u>4,223,731</u>	<u>257,072</u>	<u>86,168,745</u>	Total
Jumlah Tercatat	<u>1,145,529,527</u>					<u>1,204,568,429</u>	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Beban usaha	35,318,071	30,744,712	29,160,597	Operating expenses
Pekerjaan dalam pelaksanaan	109,147	15,271	16,600	Construction in progress
Beban lain-lain	247,615	301,965	964,343	Others
Jumlah	<u>35,674,833</u>	<u>31,061,948</u>	<u>30,141,540</u>	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2019 sampai dengan 2051, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2019 to 2051, but they are renewable by the Company. The Company and its subsidiaries also have several pieces of building use, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company and its subsidiaries.

Bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$25.573.250.637 (setara dengan Rp334.779.551) dan Rp1.592.587 pada tanggal 31 Desember 2019. Aset sewaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Tanjung Jati B 4x660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY440.301.219.075 (setara dengan Rp56.343.849) dan US\$4.320.000 (setara dengan Rp56.553) pada tanggal 31 Desember 2019.

Building, installation and power plant, transmission equipment, other telecommunication and data processing equipments and vessels were insured to several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead insurer, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, against fire and other possible risks with insurance coverage of US\$25,573,250,637 (equivalent to Rp334,779,551) and Rp1,592,587 as of December 31, 2019. Leased assets of Tanjung Jati B Steam Power Plant ("PLTU") 4x660 MW were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY440,301,219,075 (equivalent to Rp56,343,849) and US\$4,320,000 (equivalent to Rp56,553), respectively, as of December 31, 2019.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan. Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not insure property, plant and equipment other than building, installation and power plant, transmission equipment, other telecommunication and data processing equipments and vessels.

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp9.846.820, Rp9.872.249, dan Rp7.505.609.

The gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in use as of December 31, 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp9,846,820, Rp9,872,249, and Rp7.505.609, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2019, perubahan surplus revaluasi aset tetap adalah sebesar Rp1.183.109 yang terutama merupakan penyesuaian ke nilai terpulihkan aset tetap.

In 2019, changes in revaluation surplus of property, plant and equipment amounting to Rp1,183,109 was mainly consist of adjustment to recoverable amount of property, plant and equipment.

Manajemen mengkategorikan beberapa aset tetap menjadi aset tidak digunakan dalam operasi berdasarkan pertimbangan tingkat efisiensi dan keekonomisan aset tersebut. Nilai aset tersebut telah disesuaikan ke nilai terpulihkan. Penyesuaian ke nilai terpulihkan atas aset yang menggunakan model revaluasi dan tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi jumlah akumulasi surplus revaluasi dalam ekuitas.

Management categorizes several property, plant and equipment into assets not used in operations based on the consideration of the efficiency and the economy of the assets. The amount of the assets were adjusted to its recoverable amount. Adjustment for property, plant and equipment using revaluation model and does not exceed its surplus revaluation is recognized in other comprehensive income and reduces the amount of accumulated of surplus revaluation in the equity.

Reklasifikasi dalam mutasi aset tetap merupakan jumlah neto atas penambahan dan pengurangan di akun aset tetap dan akun lain terutama terdiri dari perpindahan pekerjaan dalam pelaksanaan ke aset tetap beroperasi, perpindahan aset tetap beroperasi ke aset tetap tidak beroperasi, dan reklasifikasi antar jenis aset tetap.

Reclassification in the property, plant and equipment movements is the net amount over addition and deduction in the property, plant and equipment accounts and other accounts consist mainly from the construction in progress to operational property, plant and equipment, reclassification from property, plant and equipment to assets not used in operation, and reclassification between types in the property, plant and equipment.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Saldo awal tahun	675,081,371	631,174,366	638,107,673	Balance at beginning of year
Penyesuaian ke nilai wajar aset tetap	--	49,521,759	--	Adjustment to fair value of property, plant, and equipment
Penyesuaian ke nilai terpulihkan/ penghapusan aset tetap	(1,183,109)	(1,185,132)	(6,933,307)	Adjustment to recoverable amount/ demolition of property, plant, and equipment
Subjumlah	(1,183,109)	48,336,627	(6,933,307)	Subtotal
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	(43,779)	--	--	Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus
Penyesuaian pajak tangguhan	--	(4,429,622)	--	Deferred tax adjustment
Jumlah mutasi tahun berjalan	(1,226,888)	43,907,005	(6,933,307)	Movement during the year
Saldo akhir tahun	673,854,483	675,081,371	631,174,366	Balance end of the year

Penyesuaian ke nilai terpulihkan atas aset yang menggunakan model biaya, dan penyesuaian ke nilai terpulihkan atas aset tetap yang menggunakan model revaluasi dan melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tetap tersebut dicatat sebagai beban lain-lain yang merupakan bagian dari penghasilan (beban) lain-lain - bersih.

Adjustment to recoverable amount of property, plant and equipment using cost model, and adjustment to recoverable amount of property, plant and equipment using revaluation model and excess revaluation surplus for property, plant and equipment are recorded as other expense classified in other income (expense) - net.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan entitas anak melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00073/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.09.0012 dan OJK.

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

1. Pendekatan Pasar

Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

Pendekatan pasar digunakan untuk kelas aset tanah.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode Arus Kas Terdiskonto, atau keduanya.

Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanah dengan peruntukan komersial atau tanah dengan skala pengembangan.

3. Pendekatan Biaya

Pendekatan ini berdasarkan prinsip bahwa harga dimana pembeli di pasar akan membayar atas aset yang sedang dinilai tidak akan lebih dari biaya untuk membeli atau mengkonstruksi aset modern yang

On December 31, 2018, the Company and its subsidiaries performs revaluation of the fair value of its property, plant, and equipment which is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") in the report No. 00073/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2019 dated March 4, 2019, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0012 and FSA.

The valuation standard used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, with following valuation approaches:

1. Market Approach

This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued (object being appraised) are compared to other similar properties that either have been transacted or offered for sale in a sale and purchase transaction.

The market approach is applied to the asset class of land rights.

2. Income Approach

This approach considers the income and costs related to the assets being valued and estimates value through a capitalization process. Capitalization connects income (generally net income) with certain definition of value through conversion of income into the estimated value. This process uses the direct capitalization method or the Discounted Cash Flow method or both.

The income approach is applied to the asset class of commercial land rights or land rights with development scale.

3. Cost Approach

This approach is based on a principle that the price that a buyer in the market would pay for the asset being valued would not be more than the cost to purchase or construct a modern equivalent asset, without taking

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

ekuivalen, tanpa mempertimbangkan biaya akibat penundaan waktu dan biaya keterlambatan. Untuk aset yang tidak baru, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset bangunan umum, waduk dan prasarana, jalan sepur samping, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, material cadangan utama, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 untuk Kelompok Aset yang Direvaluasi adalah sebagai berikut:

into consideration undertime and overtime charges. For assets which are not new, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

The cost approach is applied to asset classes of buildings, reservoir and infrastructure, installation and power plants, transmission equipments, distribution equipments, major spare parts and telecommunications and data processing equipments used for electricity supply.

Information on the revaluation of assets as at December 31, 2018 for Class of Revalued Assets is as follows:

	Jumlah tercatat sebelum revaluasi/ <i>Net carrying value before revaluation</i>	Surplus (rugi) revaluasi/ <i>Profit (loss) revaluation</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
	31 Desember/ <i>December 31,</i>		31 Desember/ <i>December 31,</i>	
	2018		2018	
Nilai revaluasi				<i>Revalued amount</i>
Pemilikan langsung				<i>Direct acquisition</i>
Tanah	119,770,147	31,803,271	151,573,418	<i>Land rights</i>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	65,020,179	(790,119)	64,230,060	<i>Buildings, reservoir and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	623,621,468	(66,137,929)	557,483,539	<i>Installation and power plant</i>
Perlengkapan transmisi	112,587,073	12,234,644	124,821,717	<i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan distribusi	200,416,310	(4,773,775)	195,642,535	<i>Distribution equipment</i>
Material cadang utama	2,347,027	(127,503)	2,219,524	<i>Major spare parts</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	5,592,764	(1,048,036)	4,544,728	<i>Telecommunication and data processing equipments used for electricity supply</i>
Sub jumlah	1,129,354,968	(28,839,447)	1,100,515,521	Sub total
Akumulasi penyusutan				<i>Accumulated depreciation</i>
Pemilikan langsung				<i>Direct acquisition</i>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	(5,201,046)	5,201,046	--	<i>Buildings, reservoir and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	(49,140,491)	49,140,491	--	<i>Installation and power plant</i>
Perlengkapan transmisi	(7,527,773)	7,527,773	--	<i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan distribusi	(14,734,341)	14,734,341	--	<i>Distribution equipment</i>
Material cadang utama	(232,354)	232,354	--	<i>Major spare parts</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	(1,525,201)	1,525,201	--	<i>Telecommunication and data processing equipments used for electricity supply</i>
Sub jumlah	(78,361,206)	78,361,206	--	Sub total
Jumlah Tercatat	1,050,993,762	49,521,759	1,100,515,521	Net Carrying Value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2018, total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi Kelompok Aset yang Direvaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" adalah sebesar Rp49.521.759.

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan terkait dan pajak final atas revaluasi aset tetap dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai Surplus Revaluasi Aset Tetap pada penghasilan komprehensif lain.

Analisa aset non-keuangan yang dicatat pada Nilai Wajar berdasarkan Hierarki Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perbedaan level Nilai Wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- Input selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Level 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 3).

In 2018, total increase in the carrying amounts of the class of Revalued Assets is recorded as "Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus" amounting to Rp49,521,759.

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes and final tax on property, plant and equipment revaluation, is credited to other comprehensive income and presented in property, plant and equipment Revaluation Surplus in other comprehensive income section.

Analysis non-financial assets recorded at fair value, based on Fair Value Hierarchy in SFAS 68: Fair Value Measurement. The different levels of Fair Value are defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data, neither directly or indirectly (Level 3).*

Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2018 menggunakan/
Level fair value measurement at December 31, 2018 using

	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Pengukuran nilai wajar berulang					<i>Recurring fair value measurement</i>
Tanah	--	21,912,134	129,661,284	151,573,418	<i>Land rights</i>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	1,967,422	62,262,638	64,230,060	<i>Buildings, reservoir and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	--	--	557,483,539	557,483,539	<i>Installation and power plant</i>
Perlengkapan transmisi	--	--	124,821,717	124,821,717	<i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan distribusi	--	--	195,642,535	195,642,535	<i>Distribution equipment</i>
Material cadang utama	--	--	2,219,524	2,219,524	<i>Major spare parts</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	--	--	4,544,728	4,544,728	<i>Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply</i>
	--	23,879,556	1,076,635,965	1,100,515,521	

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam Nilai Wajar level 1.

There were no property, plant and equipment which could be classified as the level 1 Fair Value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai Wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. *Input* yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

- a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
- b. Tingkat hunian;
- c. Tingkat pertumbuhan;
- d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
- e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
- f. Depresiasi, keusangan fungsional dan eksternal.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

The level 2 Fair Value of land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of among others:

- a. Sale or rental price per square meter;
- b. Occupancy rate;
- c. Growth rate;
- d. Discount and capitalization rate;
- e. Replacement cost new per square meter;
- f. Depreciation, functional and external obsolescence.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada 31 Desember 2018/ Fair value at December 31, 2018	Teknik penilaian/ Valuation technique	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable Input	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ Range of unobservable Input	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ Relationship of unobservable inputs to fair value	
Tanah	129,661,284					Land
Tapak tower	76,742,361	Pendekatan pasar dengan metode/Market approach with Across the Fence ("ATF") method	Kompensasi/Compensation Right of Way ("ROW")	15%	Semakin tinggi kompensasi ROW maka semakin tinggi nilai wajar/The higher the ROW compensation, the higher the fair value	Land for tower site
Tanah gardu dan kantor	23,316,948	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/Income approach with the land approach method	- Perubahan peruntukan/ Zoning changes - Penyesuaian parameter pengembangan/ Adjustment of parameter development	0.30% - 3.00%	Semakin tinggi Koefisien Luas Bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/The higher the KLB, the higher the fair value	Land for substation and office building
Tanah pembangkit	29,601,975	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/Income approach with the land approach method	- Perubahan peruntukan/ Zoning changes - Penyesuaian parameter pengembangan/ Adjustment of parameter development	0.30% - 3.00%	Semakin tinggi Koefisien Luas Bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/The higher the KLB, the higher the fair value	Land for power plant
		Pendekatan pasar dengan metode/Market approach with Across the Fence ("ATF") method	Biaya pembebasan lahan/ Soft cost	5.00% - 10.00%	Semakin tinggi biaya pembebasan lahan maka semakin tinggi nilai wajar/The higher the soft cost, the higher the fair value	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Nilai wajar pada 31 Desember 2018/ Fair value at December 31, 2018	Teknik penilaian/ Valuation technique	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable Input	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ Range of unobservable Input	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ Relationship of unobservable inputs to fair value	
Bangunan	62,262,638					Building
Bangunan umum	26,793,835	Pendekatan biaya/ Cost approach	Penyusutan fisik/ Physical depreciation	0.00% - 90.00%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/The higher the functional depreciation, the lower the fair value	Buildings
Waduk dan prasarana	35,468,803	Trending/Trending	Penyusutan fungsional/ Functional depreciation	0.00% - 6.00%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/The higher the functional depreciation, the lower the fair value	Reservoir and infrastructure
			Indeks/Index	1%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ The higher the index rate, The higher the fair value	
Instalasi dan mesin pembangkit	557,483,539	Pendekatan biaya/ Cost approach	Penyusutan fungsional/ Functional depreciation	1.00% - 10.00%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/The higher the functional depreciation rate, the lower the fair value	Installation and power plant
			Indeks/Index	1,005% - 3,866%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ The higher the index rate, The higher the fair value	
Perlengkapan transmisi	124,821,717	Pendekatan biaya/ Cost approach	Indeks/Index	1.00% - 10.00%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ The higher the index rate, The higher the fair value	Transmission equipment
			Indeks/Index	1.00% - 1.66%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ The higher the index rate, The higher the fair value	
Perlengkapan distribusi	195,642,535	Pendekatan biaya/ Cost approach	Indeks/Index	1.00% - 1.49%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ The higher the index rate, The higher the fair value	Distribution equipment
Material cadangan utama	2,219,524	Pendekatan biaya/ Cost approach	Indeks/Index	1.00% - 1.16%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ The higher the index rate, The higher the fair value	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4,544,728	Pendekatan biaya/ Cost approach	Indeks/Index	1.00% - 1.49%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ The higher the index rate, The higher the fair value	Telecommunication and data processing equipments used for electricity supply

Perusahaan dan entitas anak juga melakukan penilaian kembali atas aset tetap untuk tujuan perpajakan. Pada bulan Februari 2016, Perusahaan menerima surat No. KEP-331/WPJ.10/2016 dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi persetujuan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan per tanggal 1 Januari 2016.

Jika Perusahaan dan entitas anak tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing masing sebesar Rp551.093.554, Rp470.836.453, dan Rp455.676.297.

The Company and its subsidiaries also performed revaluation of property, plant and equipment for tax purposes. On February 2016, the Company received letter No. KEP-331/WPJ.10/2016 from Directorate General of Tax Regulation as approval for revaluation on its property, plant and equipment for taxation purpose effective on January 1, 2016.

If the Company and its subsidiaries does not apply revaluation model, net carrying value for property, plant and equipment as of December 31, 2019, 2018, and 2017 are amounted to Rp551,093,554, Rp470,836,453, and Rp455,676,297, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai wajar aset tetap tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya sehingga tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Proyek penugasan - program percepatan:				<i>Mandatory project - fast track program:</i>
Pembangkitan	11,261,116	11,372,601	9,116,037	<i>Power plants</i>
Transmisi	5,475,876	6,675,455	6,509,844	<i>Transmission</i>
Subjumlah	<u>16,736,992</u>	<u>18,048,056</u>	<u>15,625,881</u>	<i>Subtotal</i>
Konstruksi rutin:				<i>Regular constructions:</i>
Pembangkitan	61,905,927	67,707,162	44,849,557	<i>Power plants</i>
Transmisi	89,018,365	96,831,203	69,885,866	<i>Transmission</i>
Distribusi	14,665,891	14,763,414	13,136,053	<i>Distribution</i>
Perlengkapan	380,866	1,829,172	1,799,137	<i>Equipment</i>
Subjumlah	<u>165,971,049</u>	<u>181,130,951</u>	<u>129,670,613</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah	<u>182,708,041</u>	<u>199,179,007</u>	<u>145,296,494</u>	Total

(i) Program percepatan

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dikapitalisasi.

Pembangkitan

Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW dan PLTU 2 Kalimantan Barat – Bengkayang 2x27,5 MW.

Transmisi

Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama terdiri dari proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV New Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Paket 1.

(i) Fast track program

The *fast track program* represents projects which are mandated by the Government to the Company. Construction in progress under the *fast track program* includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalized expenditures.

Power plants

The *fast track program* of power plants under construction consists mainly of PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW and PLTU 2 Kalimantan Barat – Bengkayang 2x27.5 MW.

Transmission

The *fast track program* of transmission under construction mainly consists of project Extra High Voltage Substations 500 kV New Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Package 1.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan

Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW dan PLTA Peusangan 2x88 MW.

Transmisi

Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi 500 kV untuk Sumatera, Jawa - Bali, 150 kV untuk luar Sumatera, Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Distribusi

Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Perlengkapan

Perlengkapan pekerjaan dalam pelaksanaan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2020 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2019, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

<u>Nama proyek/ Project name</u>	<u>Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ Value of construction in progress Rp</u>	<u>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion %</u>
PLTU Lontar Extension 1x315 MW	7,927,284	95%
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	5,009,192	71%
PLTA Peusangan 2x88 MW	4,086,082	87%
PLTGU Muara Karang Peaker	3,455,274	92%
PLTA Jatigede 2x55 MW	2,416,267	75%
PLTMG Bangkanai 2 140 MW	2,069,357	76%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,921,916	86%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	923,510	86%
PLTU Gorontalo 2x25 MW	517,350	97%
PLTU 2 NTB - Lombok 2x25 MW	478,391	93%
Transmisi lainnya/ Various transmission lines	94,494,241	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ other power plants	44,362,420	2%-98%
Lainnya/ Others	15,046,757	2%-98%
Jumlah/ Total	182,708,041	

(ii) Regular constructions

Power plants

Power plants under construction consist mainly of PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW and PLTA Peusangan 2x88 MW.

Transmission

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of 500 kV in Sumatera, Java - Bali, 150 kV outside Sumatera, Java - Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribution

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Equipment

Equipment under construction consists of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

These Constructions in progress are expected to be completed between 2020 and 2022.

As of December 31, 2019, the estimated percentage of completion of the Company's construction in progress projects are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2018, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2018, the estimated percentages of completion of the Company's construction in progress projects were as follows:

Nama proyek/ Project name	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ Value of construction in progress Rp	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion %
PLTU Lontar Extension 1x315 MW	6,433,108	86%
PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan/ and 4 2x200 MW	5,420,982	93%
PLTGU Jawa 1x800 MW	4,544,438	99%
PLTA Peusangan 2x88 MW	3,849,246	84%
PLTGU Grati Peaker 1x450 MW	2,987,032	99%
PLTU 3 Kalimantan Barat Site Bangkayang 2x50 MW	2,671,217	94%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,861,916	86%
PLTA Jatigede 2x55 MW	1,668,565	51%
PLTGM Arun 2x185 MW	1,561,900	99%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	853,787	85%
Transmisi lainnya/ Various transmission lines	103,506,657	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ other power plants	47,227,574	2%-98%
Lainnya/ Others	16,592,585	2%-98%
Jumlah/ Total	199,179,007	

Pada tanggal 31 Desember 2017, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017, the estimated percentages of completion of the Company's construction in progress projects were as follows:

Nama proyek/ Project name	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ Value of construction in progress Rp	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion %
PLTGU Grati Peaker 1x450 MW	3,771,957	93%
PLTU Lontar Extension 1x315 MW	3,333,331	33%
PLTA Peusangan 2x88 MW	2,926,853	70%
PLTGU Jawa 1x800 MW	2,713,674	64%
PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan/ and 4 2x200 MW	2,418,034	69%
PLTU 3 Kalimantan Barat Site Bengkayang 2x50 MW	2,290,845	94%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,785,466	86%
PLTU Takalar 2x100 MW	1,388,703	93%
PLTA Jatigede 2x55 MW	1,377,883	26%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	780,583	81%
Transmisi lainnya/ Various transmission line	76,395,709	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ Other power plants	31,178,264	2%-98%
Lainnya/ Others	14,935,192	2%-98%
Jumlah/ Total	145,296,494	

Informasi mengenai persentase penyelesaian yang disajikan dalam tabel di atas menggambarkan estimasi kemajuan tahap engineering, procurement dan construction.

The information about the percentages of completion which presented in the table above indicate the estimated progress during the engineering, procurement and construction

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Selanjutnya, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima Sertifikat Laik Operasi.

There are still number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are Certified For Operations.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Program percepatan				<i>Fast track program</i>
Bunga pinjaman termasuk amortisasi biaya emisi obligasi	131,402	196,661	375,043	<i>Interest expense including amortization of bonds issuance</i>
Kerugian kurs mata uang asing	--	22,482	8,109	<i>Loss on foreign exchange</i>
Jumlah	<u>131,402</u>	<u>219,143</u>	<u>383,152</u>	<i>Total</i>
Konstruksi rutin				<i>Regular constructions</i>
Bunga pinjaman	6,316,296	5,879,130	4,329,063	<i>Interest expense</i>
Kerugian kurs mata uang asing	89,600	1,026,926	309,619	<i>Loss on foreign exchange</i>
Jumlah	<u>6,405,896</u>	<u>6,906,056</u>	<u>4,638,682</u>	<i>Total</i>
Jumlah	<u>6,537,298</u>	<u>7,125,199</u>	<u>5,021,834</u>	<i>Total</i>

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu masing-masing sebesar 8,20%, 4,42%, dan 7,10% pada tahun 2019, 2018, dan 2017.

Borrowing costs were capitalized at the weighted average rate of general borrowings of 8.20%, 4.42%, and 7.10% in 2019, 2018, and 2017, respectively.

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset akan diperbaiki.

Assets Not Used In Operations

Assets not used in operations comprised of those to be relocated, those temporarily not in use in operations, and assets to be repaired.

Kerugian penurunan nilai dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp247.615, Rp301.965, dan Rp327.986 dicatat sebagai beban lain-lain yang merupakan bagian dari penghasilan (beban) lain-lain – bersih (Catatan 47).

Loss on impairment of assets not used in operations for year ended December 31, 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp247,615, Rp301,965, and Rp327,986, respectively, and were recorded as other expense classified in other income (expense) - net (Note 47).

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp185.527 tahun 2019, Rp88.550 tahun 2018, dan Rp45.983 tahun 2017. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah nihil, sehingga hasil penjualan aset seluruhnya merupakan keuntungan penjualan aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi (Catatan 47).

Certain assets not used in operations were sold with a selling price of Rp185,527 in 2019, Rp88,550 in 2018, and Rp45,983 in 2017. The carrying value of such assets was nil, hence all the proceeds from the sale of certain assets represented a gain on the sale of assets not used in operations (Note 47).

Manajemen berpendapat bahwa percepatan penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Management believes that accelerated depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. Properti Investasi

7. Investment Properties

		2019					
<u>Pemilikan langsung</u>	<u>Tanah</u>	<u>Saldo awal/ Beginning balance Rp</u>	<u>Kenaikan nilai wajar/ Increase in fair value Rp</u>	<u>Pengurangan/ Deductions Rp</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications Rp</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance Rp</u>	<u>Direct acquisitions</u> <u>Land</u>
		5,125,448	165,453	--	(7,193)	5,283,708	
		2018					
<u>Pemilikan langsung</u>	<u>Tanah</u>	<u>Saldo awal/ Beginning balance Rp</u>	<u>Kenaikan nilai wajar/ Increase in fair value Rp</u>	<u>Pengurangan/ Deductions Rp</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications Rp</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance Rp</u>	<u>Direct acquisitions</u> <u>Land</u>
		4,723,070	421,760	--	(19,382)	5,125,448	
		2017					
<u>Pemilikan langsung</u>	<u>Tanah</u>	<u>Saldo awal/ Beginning balance Rp</u>	<u>Kenaikan nilai wajar/ Increase in fair value Rp</u>	<u>Pengurangan/ Deductions Rp</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications Rp</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance Rp</u>	<u>Direct acquisitions</u> <u>Land</u>
		1,325,297	1,051,363	--	2,346,410	4,723,070	

Akun ini merupakan tanah milik Perusahaan dan entitas anak, yaitu IP, PJB dan PLN Batam yang terletak di Pademangan - Jakarta Utara, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Asahan - Sumatera Utara dan Kramatwatu – Serang dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali dan beberapa tanah yang disewakan ke pihak ketiga.

Penghasilan sewa yang diperoleh dari properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp43.842, Rp49.705, dan Rp68.511 (Catatan 47).

Tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun dan mengembangkan properti investasi termasuk dalam rangka perbaikan, pemeliharaan ataupun peningkatan.

Tidak terdapat pembatasan atas realisasi properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

This account represents pieces of land owned by the Company and its subsidiaries composed of IP, PJB and PLN Batam, located in Pademangan – North Jakarta, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Asahan - North Sumatera and Kramatwatu – Serang with HGB for periods between 7 to 40 years until 2032, which are leased to PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali and several land that are leased to third parties.

Rent income earned from investment properties for the years ended December 31, 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp43,842, Rp49,705, and Rp68,511 (Note 47), respectively.

There is no contractual obligation to purchase, build and develop investment properties including for repair, maintenance or upgrading purpose.

There is no restriction in realization of investment properties as of December 31, 2019, 2018, and 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan dan entitas anak melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ("KJPP MBPRU") dalam laporan No.0155/MBPRU-JKT/E/MTQ/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No.2.09.0027 dan OJK.

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

1. Pendekatan Pasar
Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, properti yang dinilai (objek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik dari yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.
2. Pendekatan Pendapatan
Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode arus kas terdiskonto, atau keduanya.
3. Pendekatan Biaya
Pendekatan ini menetapkan nilai properti dengan mengestimasi biaya perolehan tanah dan biaya pengganti pengembangan baru (sesuatu yang dibangun) di atasnya dengan utilitas yang sebanding atau mengadaptasi properti lama dengan penggunaan yang sama, tanpa mempertimbangkan antara lain biaya akibat penundaan waktu pengembangan dan biaya lembur. Untuk properti yang lebih tua, pendekatan biaya memperhitungkan

As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries performs revaluation of the fair value of its property investment which is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ("KJPP MBPRU") in the report No.0155/MBPRU-JKT/E/MTQ/II/2020 dated February 24, 2020, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No.2.09.0027 and FSA.

The valuation standard used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, with following valuation approaches:

1. Market Approach
This approach considers the sales of similar or replacement properties and related market data, which provides value estimation by a comparison process. Generally, the properties being valued (object being appraised) are compared to similar properties transaction that either have been transacted or offered for sale in a sale and purchase transaction.
2. Income Approach
This approach considers the income and costs related to the properties being valued and estimates value through a capitalization process. Capitalization connects income (generally net income) with certain definition of value through conversion of income into the estimated value. This process uses the direct capitalization method or the discounted cash flow method or both.
3. Cost Approach
This approach establishes the value of the properties by estimating the acquisition of land and the cost of replacing the new development (something built) on it with comparable utility or adapting the old property with the same usage, without considering the costs due to development delays and overtime costs. For an older property, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi seharusnya ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktik penilaian.

(functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

Tidak terdapat properti investasi yang digolongkan ke dalam nilai wajar level 1 dan level 3.

There were no investment properties which could be classified as the level 1 and level 3 fair value.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hirarki nilai wajar.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

Nilai wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

The level 2 fair value of land is calculated using the market approach and income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:

- a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi
- b. Tingkat hunian
- c. Tingkat pertumbuhan
- d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi.

- a. Sale or rental price per square meter*
- b. Occupancy rate*
- c. Growth rate*
- d. Discount and capitalization rate.*

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

8. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

8. Investments in Associates and Joint Ventures

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/ Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Commercial operations	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership		
				2019 %	2018 %	2017 %
<i>Entitas asosiasi/ Associates</i>						
PT Geo Dipa Energi ("GDE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2002	6.67	6.67	6.67
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2004	30.00	30.00	30.00
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Perdagangan batu bara/ Coal trading	2005	46.53	46.53	46.53
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2006	49.00	49.00	49.00
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2013	20.00	20.00	20.00
PT Tanjung Kasam Power ("TJK")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2012	10.00	10.00	10.00
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2013	45.00	45.00	45.00
PT PBM Adhiguna Putera ("PBM AP")	Jakarta	Pelayaran/ Shipping	1987	25.00	25.00	25.00
PT Musi Mitra Jaya ("MMJ")	Palembang	Transportasi Batubara/ Coal Transportation	2011	25.50	--	--
PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL")	Musi Banyuasin	Transportasi Batubara/ Coal Transportation	2014	25.50	--	--

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas/ Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Commercial operations	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership		
				2019 %	2018 %	2017 %
Ventura bersama/ Joint ventures						
PT Unelec Indonesia ("Uhindo")	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ Electricity supports	1988	32.35	32.35	32.35
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2010	36.61	36.61	36.61
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ Operational and maintenance	2010	49.00	49.00	49.00
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ Electricity controller and distribution	2014	49.00	49.00	49.00
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2015	37.25	37.25	37.25
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ Transportation and storage of LNG	2015	35.00	35.00	35.00
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	51.00	51.00	51.00
PT Rekindi Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2018	10.00	10.00	10.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	30.00	30.00	30.00
PT GCL Indotena ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	35.00	35.00	35.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	30.00	30.00	30.00
PT North Sumatra Hydro Energy ("NSHE")	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	25.00	25.00	25.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2017	51.00	51.00	51.00
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	10.00	--	--

*) Tahap pengembangan/ Development stage

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Company and its subsidiaries using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its share.

Per 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As of December 31, 2019, 2018, and 2017, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas asosiasi	1 Januari 2019/ Carrying amount January 1, 2019 Rp			Bagian atas laba (rugi) bersih/ Share of other profit (loss) Rp	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income Rp	31 Desember 2019/ Carrying amount December 31, 2019 Rp		Associates
	Penambahan/ Additions Rp	Dividen/ Dividend Rp						
PT Geo Dipa Energi	104,009	--	--	10,765	(316)	114,458	PT Geo Dipa Energi	
PT Mitra Energi Batam	124,603	--	(7,500)	6,757	--	123,860	PT Mitra Energi Batam	
PT Sumber Segara Primadaya	2,388,686	--	(145,542)	388,865	--	2,632,009	PT Sumber Segara Primadaya	
PT Dalle Energy Batam	98,511	--	--	2,743	--	101,254	PT Dalle Energy Batam	
PT Indo Pusaka Berau	117,579	--	--	3,520	--	121,099	PT Indo Pusaka Berau	
PT Energi Pelabuhan Indonesia	46,912	--	--	6,813	--	53,725	PT Energi Pelabuhan Indonesia	
PT Tanjung Kasam Power	91,693	--	--	7,023	(7,337)	91,379	PT Tanjung Kasam Power	
PT PBM Adhiguna Putera	30,672	--	--	8,927	--	39,599	PT PBM Adhiguna Putera	
PT Musi Mitra Jaya	--	257,841	--	53	--	257,894	PT Musi Mitra Jaya	
PT Sriwijaya Bara Logistik	--	332,698	--	85	--	332,783	PT Sriwijaya Bara Logistik	
Subjumlah	3,002,665	590,539	(153,042)	435,551	(7,653)	3,868,060	Subtotal	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Jumlah tercatat 1 Januari 2017/ Carrying amount January 1, 2017 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Dividen/ Dividend Rp	Bagian atas laba (rugil) bersih/ Share of profit (loss) Rp	Bagian atas pendapatan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2017/ Carrying amount December 31, 2017 Rp	
Entitas asosiasi							Associates
PT Geo Dipa Energi	83,824	--	--	9,154	(317)	92,661	PT Geo Dipa Energi
PT Mitra Energi Batam	97,905	--	(3,450)	18,821	--	113,276	PT Mitra Energi Batam
PT Sumber Segara Primadaya	1,506,386	--	(111,992)	487,277	--	1,881,671	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam	83,802	--	--	6,688	--	90,490	PT Dalle Energy Batam
PT Indo Pusaka Berau	111,599	--	(1,163)	1,220	--	111,656	PT Indo Pusaka Berau
PT Energi Pelabuhan Indonesia	37,576	--	--	4,946	--	42,522	PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Tanjung Kasam Power	59,026	--	--	14,184	2,579	75,789	PT Tanjung Kasam Power
PT PBM Adhiguna Putera	--	2,855	--	22,207	(297)	24,765	PT PBM Adhiguna Putera
Subjumlah	1,980,118	2,855	(116,605)	564,497	1,965	2,432,830	Subtotal
Ventura bersama							Joint ventures
PT Unelec Indonesia	34,703	--	--	20,315	--	55,018	PT Unelec Indonesia
PT Bajradaya Sentranusa	402,571	--	(87,897)	87,578	285,604	687,856	PT Bajradaya Sentranusa
PT Bukit Pembangkit Innovative	823,514	--	--	117,707	154,314	1,095,535	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Komipo	--	--	--	--	--	--	PT Komipo
Pembangkitan Jawa Bali	51,940	--	(37,003)	26,376	--	41,313	Pembangkitan Jawa Bali
PT Rekind Daya Mamuju	24,404	21,046	--	9,154	--	54,604	PT Rekind Daya Mamuju
PT Indo Raya Tenaga	--	510	--	(190)	--	320	PT Indo Raya Tenaga
PT Serta Daya Gas	--	--	--	3,016	113	3,129	PT Serta Daya Gas
PT Rajamandala Electric Power	114,808	--	--	(21,126)	14,892	108,574	PT Rajamandala Electric Power
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	35,318	--	--	(7,779)	4,501	32,040	PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
PT Shenhua Guohua	--	--	--	--	--	--	PT Shenhua Guohua
Pembangkitan Jawa Bali	319,944	959,808	--	11,690	508	1,291,950	Pembangkitan Jawa Bali
PT GCL Indotenaga	40,642	286,626	--	(47)	--	327,221	PT GCL Indotenaga
PT Guohua Taidian	--	--	--	--	--	--	PT Guohua Taidian
Pembangkitan Jawa Bali	2,020	--	--	--	4	2,024	Pembangkitan Jawa Bali
PT North Sumatera Hydro Energy	--	746,084	--	--	--	746,084	PT North Sumatera Hydro Energy
Subjumlah	1,849,864	2,014,074	(124,900)	246,694	459,936	4,445,668	Subtotal
Jumlah	3,829,982	2,016,929	(241,505)	811,191	461,901	6,878,498	Total

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarized financial information for associates and joint ventures as of December 31, 2019, 2018, and 2017 which are accounted using the equity method.

Entitas asosiasi/ Associates

	2019				Jumlah/ Total Rp	
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ Others Rp		
Lancar						Current
Kas dan setara kas	29,559	685,351	112,075	523,260	1,350,245	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	126,733	2,765,852	153,548	1,126,340	4,172,473	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	156,292	3,451,203	265,623	1,649,600	5,522,718	Total of current assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	2,576	1,255,764	16,180	441,431	1,715,951	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	31,359	3,535,064	139,819	967,217	4,673,459	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	33,935	4,790,828	155,999	1,408,648	6,389,410	Total current liabilities
Tidak lancar						Non-current
Aset	564,096	23,121,443	2,483,609	4,815,943	30,985,091	Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas keuangan	225,320	7,179,540	1,039,795	494,489	8,939,144	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	48,037	11,691,649	639,651	348,096	12,727,433	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	273,357	18,871,189	1,679,446	842,585	21,666,577	Total of non-current liabilities
Aset bersih	413,096	2,910,629	913,787	4,214,310	8,451,822	Net assets
% kepemilikan efektif	30%	49%	10%	6,67% - 46,80%	--	% of effective ownership

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ Others Rp	Jumlah/ Total Rp	
Bagian atas aset bersih						Share of the net assets
asosiasi	123,929	1,426,208	91,379	559,232	2,200,748	of associates
Penyesuaian metode ekuitas	(69)	1,205,801	--	461,580	1,667,312	Adjustments of equity method
Jumlah tercatat	<u>123,860</u>	<u>2,632,009</u>	<u>91,379</u>	<u>1,020,812</u>	<u>3,868,060</u>	Total carrying value
Pendapatan	171,378	6,432,671	422,888	1,168,148	8,195,085	Revenue
Beban pokok penjualan	(63,509)	(3,685,950)	(99,998)	(685,194)	(4,534,651)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	--	--	(16,386)	(16,386)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	13,707	--	3,049	16,756	Interest income
Beban keuangan	(17)	(1,148,378)	(89,064)	(12,816)	(1,250,275)	Interest expense
Beban operasi	(57,823)	(753,594)	(141,172)	(291,940)	(1,244,529)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(19,006)	1,413	986	20,892	2,872	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	(8,501)	(66,266)	(23,410)	(61,360)	(159,537)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	<u>22,522</u>	<u>793,603</u>	<u>70,230</u>	<u>124,393</u>	<u>1,010,748</u>	Profit for the year
% kepemilikan efektif	30%	49%	10%	6,67% - 46,80%	--	% of effective ownership
Bagian laba asosiasi tahun berjalan	<u>6,757</u>	<u>388,865</u>	<u>7,023</u>	<u>32,906</u>	<u>435,551</u>	Share of the profit for the year of associates
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	(73,370)	(4,738)	(78,108)	Other comprehensive income (loss)
Bagian laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	(7,337)	(316)	(7,653)	Share of other comprehensive income (loss) of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	<u>(7,500)</u>	<u>(145,542)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(153,042)</u>	Dividend received from associates
	2018					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ Others Rp	Jumlah/ Total Rp	
Lancar						Current
Kas dan setara kas	117,277	778,313	83,532	476,405	1,455,527	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	134,501	1,825,590	181,597	540,672	2,682,360	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	<u>251,778</u>	<u>2,603,903</u>	<u>265,129</u>	<u>1,017,077</u>	<u>4,137,887</u>	Total of current assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	20,664	1,024,885	84,297	165,844	1,295,690	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	40,603	2,548,754	29,247	351,791	2,970,395	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	<u>61,267</u>	<u>3,573,639</u>	<u>113,544</u>	<u>517,635</u>	<u>4,266,085</u>	Total current liabilities
Tidak lancar						Non-current
Aset	545,678	19,773,962	2,665,885	3,979,314	26,964,839	Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas keuangan	286,320	7,866,475	1,426,538	727,289	10,306,622	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	35,833	8,068,457	473,998	206,398	8,784,686	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	<u>322,153</u>	<u>15,934,932</u>	<u>1,900,536</u>	<u>933,687</u>	<u>19,091,308</u>	Total of non-current liabilities
Aset bersih	<u>414,036</u>	<u>2,869,294</u>	<u>916,934</u>	<u>3,545,069</u>	<u>7,745,333</u>	Net assets
% kepemilikan efektif	30%	49%	10%	6,67% - 46,80%	--	% of effective ownership
Bagian atas aset bersih						Share of the net assets
asosiasi	124,211	1,405,954	91,693	424,115	2,045,973	of associates
Penyesuaian metode ekuitas	392	982,732	--	(26,432)	956,692	Adjustments of equity method
Jumlah tercatat	<u>124,603</u>	<u>2,388,686</u>	<u>91,693</u>	<u>397,683</u>	<u>3,002,665</u>	Total carrying value
Pendapatan	188,475	7,055,191	443,069	907,640	8,594,375	Revenue
Beban pokok penjualan	(30,683)	(4,590,602)	(100,181)	(557,784)	(5,279,250)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	(939,286)	--	10,520	(928,766)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	3,860	--	34,663	38,523	Interest income
Beban keuangan	(22,793)	(1,071,049)	(92,157)	(19,698)	(1,205,697)	Interest expense
Beban operasi	(72,406)	927,124	(40,926)	(89,854)	723,938	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	13,700	1,462	--	13,261	28,423	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	(18,536)	(75,173)	(50,765)	(21,014)	(165,488)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	<u>57,757</u>	<u>1,311,527</u>	<u>159,040</u>	<u>277,734</u>	<u>1,806,058</u>	Profit for the year
% kepemilikan efektif	30%	49%	10%	6,67% - 46,80%	--	% of effective ownership
Bagian laba asosiasi tahun berjalan	<u>17,327</u>	<u>642,648</u>	<u>15,904</u>	<u>42,393</u>	<u>718,272</u>	Share of the profit for the year of associates
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	--	40	40	Other comprehensive income (loss)
Bagian laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	--	4	4	Share of other comprehensive income (loss) of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	<u>(6,000)</u>	<u>(135,633)</u>	<u>--</u>	<u>(6,808)</u>	<u>(148,441)</u>	Dividend received from associates

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017				Jumlah/ Total Rp	
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ Others Rp		
Lancar						<i>Current</i>
Kas dan setara kas	99,471	1,283,427	60,970	372,132	1,816,000	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	130,399	1,224,788	134,113	630,903	2,120,203	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	229,870	2,508,215	195,083	1,003,035	3,936,203	Total of current assets
Liabilitas keuangan						<i>Financial liabilities</i>
Utang usaha	73	629,038	109,773	222,758	961,642	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	80,127	3,097,254	49,201	416,266	3,642,848	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	80,200	3,726,292	158,974	639,024	4,604,490	Total current liabilities
Tidak lancar						<i>Non-current</i>
Aset	559,559	12,598,918	2,563,318	4,118,842	19,840,637	Assets
Liabilitas						<i>Liabilities</i>
Liabilitas keuangan	299,189	7,492,044	1,338,542	797,437	9,927,212	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	32,454	1,105,648	502,995	214,768	1,855,865	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	331,643	8,597,692	1,841,537	1,012,205	11,783,077	Total of non-current liabilities
Aset bersih	377,586	2,783,149	757,890	3,470,648	7,389,273	Net assets
% kepemilikan efektif	30%	49%	10%	20% - 46.80%	--	% of effective ownership
Bagian atas aset bersih asosiasi	113,276	1,363,743	75,789	418,582	1,971,390	Share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	--	517,928	--	(56,488)	461,440	Adjustments of equity method
Jumlah tercatat	113,276	1,881,671	75,789	362,094	2,432,830	Total carrying value
Pendapatan	221,346	6,531,936	427,087	1,767,617	8,947,986	Revenue
Beban pokok penjualan	(33,736)	(3,265,831)	(90,821)	(1,155,582)	(4,545,970)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	(383,765)	--	(20,401)	(404,166)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	3,507	--	62	3,569	Interest income
Beban keuangan	(27,796)	(553,875)	(81,411)	(95,323)	(758,405)	Interest expense
Beban operasi	(77,326)	(1,006,981)	(93,801)	(215,069)	(1,393,177)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(19,139)	841	79,339	70,681	131,722	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	(22,446)	(331,388)	(40,263)	(68,965)	(463,062)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	40,903	994,444	200,130	283,020	1,518,497	Profit for the year
% kepemilikan efektif	30%	49%	10%	20% - 46.80%	--	% of effective ownership
Bagian laba asosiasi tahun berjalan	12,271	487,277	20,013	44,936	564,497	Share of the profit for the year of associates
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	25,790	(5,941)	19,849	Other comprehensive income (loss)
Bagian laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	2,579	(614)	1,965	Share of other comprehensive income (loss) of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	3,450	111,992	--	1,163	116,605	Dividend received from associates

Ventura bersama/ Joint ventures

	2019				Jumlah/ Total Rp	
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ Others Rp		
Lancar						<i>Current</i>
Kas dan setara kas	11,653	451,788	183,883	2,728,772	3,376,096	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	979,894	196,677	236,446	837,331	2,250,348	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	991,547	648,465	420,329	3,566,103	5,626,444	Total of current assets
Liabilitas keuangan						<i>Financial liabilities</i>
Utang usaha	373,389	239,934	125,548	117,224	856,095	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	588,232	173,017	829,185	1,605,584	3,196,018	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	961,621	412,951	954,733	1,722,808	4,052,113	Total current liabilities
Tidak lancar						<i>Non-current</i>
Aset	99,897	5,476,554	5,558,163	33,820,456	44,955,070	Assets
Liabilitas						<i>Liabilities</i>
Liabilitas keuangan	--	2,302,046	1,113,770	19,635,169	23,050,985	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	38,570	869,108	696,234	830,765	2,434,677	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	38,570	3,171,154	1,810,004	20,465,934	25,485,662	Total of non-current assets
Aset bersih	91,253	2,540,914	3,213,755	15,197,817	21,043,739	Net assets
% kepemilikan efektif	32.35%	36.61%	37.25%	10% - 51%	--	% of effective ownership

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ Others Rp	Jumlah/ Total Rp	
Bagian atas aset bersih ventura bersama	29,520	930,305	1,197,124	4,737,824	6,894,773	Share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	22,856	(135,419)	84,876	(434,381)	(462,068)	Adjustments of equity method
Jumlah tercatat	<u>52,376</u>	<u>794,886</u>	<u>1,282,000</u>	<u>4,303,443</u>	<u>6,432,705</u>	Total carrying value
Pendapatan	790,954	666,916	1,028,801	3,440,269	5,926,940	Revenue
Beban pokok penjualan	(744,803)	(27,282)	(450,349)	(1,945,590)	(3,168,024)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	(406)	--	(45,191)	(45,597)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	(1,239)	2,497	4,865	6,123	Interest income
Beban keuangan	(39,551)	(216,179)	(113,264)	(562,982)	(931,976)	Interest expense
Beban operasi	(33,850)	(43,788)	(131,947)	(98,034)	(307,619)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(45,474)	3,996	(21,633)	97,215	34,104	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	--	(65,159)	(93,414)	(129,797)	(288,370)	Income tax expense
Laba periode berjalan	<u>(72,724)</u>	<u>316,859</u>	<u>220,691</u>	<u>760,755</u>	<u>1,225,581</u>	Profit for the period
% kepemilikan efektif	32.35%	36.61%	37.25%	10% - 51%	--	% of effective ownership
Bagian atas laba tahun berjalan ventura bersama	<u>(23,526)</u>	<u>116,012</u>	<u>82,207</u>	<u>357,162</u>	<u>531,855</u>	Share of the profit for the year of joint ventures
Laba komprehensif lain	--	(190,449)	(249,383)	1,382,723	942,891	Other comprehensive income
Bagian atas laba komprehensif ventura bersama	--	(69,729)	(92,895)	(116,640)	(279,264)	Share of other comprehensive income of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	--	(47,448)	--	(23,824)	(71,272)	Dividend received from joint ventures

	2018					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ Others Rp	Jumlah/ Total Rp	
Lancar						Current
Kas dan setara kas	18,674	381,296	287,262	1,665,227	2,352,459	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	946,795	187,297	193,914	681,328	2,009,334	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	<u>965,469</u>	<u>568,593</u>	<u>481,176</u>	<u>2,346,555</u>	<u>4,361,793</u>	Total of current assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	268,839	61,537	437,369	83,463	851,208	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	568,902	70,883	794,314	1,403,663	2,837,762	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	<u>837,741</u>	<u>132,420</u>	<u>1,231,683</u>	<u>1,487,126</u>	<u>3,688,970</u>	Total current liabilities
Tidak lancar						Non-current
Aset	113,713	3,545,454	5,974,154	27,858,867	37,492,188	Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas keuangan	--	2,851,963	1,587,371	15,293,919	19,733,253	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	42,350	105,132	772,360	410,667	1,330,509	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	<u>42,350</u>	<u>2,957,095</u>	<u>2,359,731</u>	<u>15,704,586</u>	<u>21,063,762</u>	Total of non-current assets
Aset bersih	<u>199,091</u>	<u>1,024,532</u>	<u>2,863,916</u>	<u>13,013,710</u>	<u>17,101,249</u>	Net assets
% kepemilikan efektif	32.35%	36.61%	40.25%	10% - 51%	--	% of effective ownership
Bagian atas aset bersih ventura bersama	64,406	375,081	1,266,059	3,699,770	5,405,316	Share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	11,496	420,970	26,629	(140,737)	318,358	Adjustments of equity method
Jumlah tercatat	<u>75,902</u>	<u>796,051</u>	<u>1,292,688</u>	<u>3,559,033</u>	<u>5,723,674</u>	Total carrying value
Pendapatan	1,197,402	800,051	972,887	4,480,974	7,451,314	Revenue
Beban pokok penjualan	(1,021,225)	--	(325,552)	(3,202,389)	(4,549,166)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	(385)	--	44,155	43,770	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	729	455	165	1,349	Interest income
Beban keuangan	(31,742)	(447,633)	(144,392)	(198,644)	(822,411)	Interest expense
Beban operasi	(29,686)	(59,121)	(168,426)	3,082	(254,151)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(13,013)	(35,209)	12,598	(162,583)	(198,207)	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	(37,180)	--	(146,307)	(127,101)	(310,588)	Income tax expense
Laba periode berjalan	<u>64,556</u>	<u>258,432</u>	<u>201,263</u>	<u>837,659</u>	<u>1,361,910</u>	Profit for the period
% kepemilikan efektif	32.35%	36.61%	40.25%	10% - 51%	--	% of effective ownership
Bagian atas laba tahun berjalan ventura bersama	<u>20,884</u>	<u>94,612</u>	<u>81,008</u>	<u>257,569</u>	<u>454,073</u>	Share of the profit for the year of joint ventures
Laba komprehensif lain	--	161,836	288,559	256,346	706,741	Other comprehensive income
Bagian atas laba komprehensif ventura bersama	--	59,248	116,145	80,096	255,489	Share of other comprehensive income of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	--	(45,665)	--	(26,628)	(72,293)	Dividend received from joint ventures

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017				Jumlah/ Total Rp	
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ Others Rp		
Lancar						Current
Kas dan setara kas	4,312	298,673	418,954	1,283,778	2,005,717	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	762,443	232,188	103,087	2,290,260	3,387,978	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	766,755	530,861	522,041	3,574,038	5,393,695	Total of current assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	336,393	205,067	360,731	573,930	1,476,121	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	671,599	174,718	331,888	186,365	1,364,570	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	1,007,992	379,785	692,619	760,295	2,840,691	Total current liabilities
Tidak lancar						Non-current
Aset	371,325	5,483,604	5,525,950	14,332,155	25,713,034	Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas keuangan	--	2,637,109	2,135,612	7,916,630	12,689,351	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	41,705	808,114	--	101,977	951,796	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	41,705	3,445,223	2,135,612	8,018,607	13,641,147	Total of non-current assets
Aset bersih	88,383	2,189,457	3,219,760	9,127,291	14,624,891	Net assets
% kepemilikan efektif	32.35%	36.61%	37.25%	10% - 51%	--	% of effective ownership
Bagian atas aset bersih ventura bersama	28,592	801,560	1,199,361	2,611,060	4,640,573	Share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian ISAK 16	--	--	--	--	--	Adjustments of ISFAS 16
Penyesuaian metode ekuitas	26,426	(113,704)	(103,825)	(3,802)	(194,905)	Adjustments of equity method
Jumlah tercatat	55,018	687,856	1,095,536	2,607,258	4,445,668	Total carrying value
Pendapatan	972,228	603,700	893,348	7,114,905	9,584,181	Revenue
Beban pokok penjualan	(817,449)	(17,701)	(242,520)	(6,386,436)	(7,464,106)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	(310)	--	(55,060)	(55,370)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	--	632	13,009	13,641	Interest income
Beban keuangan	(41,529)	(241,181)	(96,250)	(274,276)	(653,236)	Interest expense
Beban operasi	(29,604)	(33,522)	(161,918)	(119,158)	(344,202)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(15,936)	19,109	25,322	(71,253)	(42,758)	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	(4,912)	(90,877)	(102,622)	(54,464)	(252,875)	Income tax expense
Laba periode berjalan	62,798	239,218	315,992	167,267	785,275	Profit for the period
% kepemilikan efektif	32.35%	36.61%	37.25%	10% - 51%	--	% of effective ownership
Bagian atas laba tahun berjalan ventura bersama	20,315	87,578	117,707	21,094	246,694	Share of the profit for the year of joint ventures
Laba komprehensif lain	--	780,126	414,266	40,415	1,234,807	Other comprehensive Share of
Bagian atas laba komprehensif ventura bersama	--	285,604	154,314	20,018	459,936	other comprehensive income of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	--	87,897	--	37,003	124,900	Dividend received from joint ventures

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

GDE

GDE didirikan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan berdasarkan kemampuan Perusahaan untuk mengarahkan operasional GDE.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Company and its subsidiaries.

GDE

GDE was established to continue the development of the Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.

The Company has significant influence the significant influence which indicated by the Company's ability to drive GDE operation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

MEB

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, PLN Batam, entitas anak, memperoleh dividen dari MEB masing-masing sebesar Rp7.500, Rp6.000, dan Rp3.450.

S2P

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari S2P masing-masing sebesar US\$10.192.000 (ekuivalen Rp145.542), US\$9.212.002 (ekuivalen Rp135.633), dan US\$8.266.312 (ekuivalen Rp111.992).

DEB

Pada tahun 2018, PLN Batam, entitas anak, memperoleh dividen dari DEB sebesar Rp527.

IPB

Pada tahun 2018 dan 2017, IP, entitas anak, memperoleh dividen dari IPB sebesar Rp1.242 dan Rp1.163.

EPI

Pada tahun 2018, HP, entitas anak, memperoleh dividen dari EPI sebesar Rp2.293.

TJK

PLN Batam, entitas anak, mempunyai pengaruh signifikan di TJK dengan mempertimbangkan adanya keterwakilan PLN Batam pada susunan Direksi TJK.

MMJ

Pada tanggal 8 Januari 2019, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan penyertaan atas 25,5% saham PT Musi Mitra Jaya ("MMJ") dengan biaya perolehan sebesar Rp257.841.

SBL

Pada tanggal 8 Januari 2019, PLN BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan penyertaan atas 25,5% saham PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL") dengan biaya perolehan sebesar Rp332.698.

SS Pewali

Pada tahun 2019, PJBI, entitas anak PJB, melakukan investasi pada SS Pewali dengan melakukan penyertaan saham sebesar US\$1.860.000 (ekuivalen Rp26.291) setara dengan kepemilikan saham sebesar 10%.

MEB

In 2019, 2018, and 2017, PLN Batam, a subsidiary, received dividends from MEB amounting to Rp7,500, Rp6,000, and Rp3,450, respectively.

S2P

In 2019, 2018, and 2017, PJB, a subsidiary, received dividends from S2P amounting to US\$10,192,000 (equivalent to Rp145,542), US\$9,212,002 (equivalent to Rp135,633), and US\$8,266,312 (equivalent to Rp111,992), respectively.

DEB

In 2018, PLN Batam, a subsidiary, received dividends from DEB amounting to Rp527.

IPB

In 2018 and 2017, IP, a subsidiary, received cash dividends from IPB amounting to Rp1,242 and Rp1,163.

EPI

In 2018, HP, a subsidiary, received dividends from EPI amounting to Rp2,293.

TJK

PLN Batam, a subsidiary, has significant influence over TJK by considering its representation in TJK's Directors.

MMJ

On January 8, 2019, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 25.5% of the shares of PT Musi Mitra Jaya ("MMJ") at a cost of Rp257,841.

SBL

On January 8, 2019, PLN BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 25.5% of the shares of PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL") at a cost of Rp332,698.

SS Pewali

In 2019, PJBI, a subsidiary of PJB, made investment to SS Pewali through purchase of shares amounting to US\$1,860,000 (equivalent to Rp26,291) equivalent to 10% ownership share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

BDSN

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari BDSN masing-masing sebesar US\$3,333,442 (ekuivalen Rp47.448), US\$3.163.779 (ekuivalen Rp45.665), dan US\$6.487.821 (ekuivalen Rp87.897).

Komipo PJB

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari Komipo PJB masing-masing sebesar Rp23.824, Rp26.628, dan Rp37.003.

SGPJB

Pada tanggal 16 Maret 2017 dan 27 September 2017, Perusahaan melakukan penambahan penyeteroran saham masing-masing sebesar US\$39.000.000 dan US\$33.000.000 (ekuivalen Rp519.324 dan Rp440.484) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

Selama tahun 2018, PJBI, entitas anak PJB menambah investasi sebesar US\$17.033.467 (ekuivalen Rp254.293) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

GCL

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, PIT, entitas anak IP, melakukan tambahan investasi masing-masing sebesar US\$875.000 (setara dengan Rp12.280), US\$7.000.000 (setara dengan Rp99.597), dan US\$21.000.000 (setara dengan Rp286.626) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

IRT

Pada tahun 2017, PIT, entitas anak IP dan PT Barito Wahana Lestari mendirikan IRT dengan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp510 dan Rp490 yang merupakan 51% dan 49% kepemilikan saham di IRT. PIT mempunyai pengendalian bersama atas IRT berdasarkan adanya keharusan kesepakatan bersama atas pengambilan keputusan penting.

Berdasarkan akta notaris No. 22 tanggal 12 Desember 2019 dari Muhammad Hanafi. S.H., Notaris di Jakarta, PIT melakukan inbreng saham IRT ke PSI sebesar Rp510 yang merupakan 51% kepemilikan saham di IRT.

Pada tahun 2019, PSI, entitas anak PIT, melakukan tambahan Investasi sebesar Rp489.141 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

BDSN

In 2019, 2018, and 2017, PJB, a subsidiary, received dividend from BDSN amounting to US\$3,333,442 (equivalent to Rp47,448), US\$3,163,779 (equivalent to Rp45,665), and US\$6,487,821 (equivalent to Rp87,897), respectively.

Komipo PJB

In 2019, 2018, and 2017, PJB, a subsidiary, received dividend from Komipo PJB amounting to Rp23,824, Rp26,628, and Rp37,003, respectively.

SGPJB

On March 16, 2017 and September 27, 2017, the Company made additional investments amounting to US\$39,000,000 and US\$33,000,000 (equivalent to Rp519,324 and Rp440,484), respectively, without changes in percentage of ownership.

During 2018, PJBI, a subsidiary of PJB added investment amounting US\$17,033,467 (equivalent to Rp254,293), without changes in percentage of ownership.

GCL

In 2019, 2018, and 2017, PIT, a subsidiary of IP, made additional investments amounting to US\$875,000 (equivalent to Rp12,280), US\$7,000,000 (equivalent to Rp99,597), and US\$21,000,000 (equivalent to Rp286,626), respectively, without changes in percentage of ownership.

IRT

In 2017, PIT, a subsidiary of IP and PT Barito Wahana Lestari established IRT with share ownership amounted to Rp510 and Rp490, respectively, which are 51% and 49% share ownership in IRT. PIT has joint control in IRT as there must be a unanimous consent on important decisions.

Based on notarial deed No. 22 dated December 12, 2019 from Muhammad Hanafi. S.H., Notary in Jakarta, PIT exchange of IRT shares to PSI for Rp510, which represents 51% ownership in IRT.

In 2019, PSI, a subsidiary of PIT, made additional investments amounting to Rp489,141 without changes in percentage of ownership.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

NSHE

Pada tanggal 29 Agustus 2017, PJBI, entitas anak PJB, melakukan investasi pada NSHE dengan melakukan penyertaan saham sebesar US\$30.497.203 (ekuivalen Rp407.076), setara dengan kepemilikan saham sebesar 25%. Pada tanggal 28 Desember 2017, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan saham sebesar US\$25.000.611 (ekuivalen Rp339.008).

Selama tahun 2018, PJBI, entitas anak PJB, menambah investasi sebesar US\$20.831.307 (ekuivalen Rp286.847) tanpa merubah presentase kepemilikan.

BAG

Pada tahun 2018, BAG, entitas anak, mendapatkan dividen dari PBM AP sebesar Rp2.746.

RDM

RE, entitas anak PJB, mempunyai pengendalian bersama atas RDM berdasarkan adanya keharusan kesepakatan bersama atas pengambilan keputusan penting. Selama tahun 2017, RE melakukan tambahan investasi sebesar Rp21.046 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

PBM AP

Pada tanggal 2 Mei 2017, BAG, entitas anak, kehilangan pengendalian atas PBM AP disebabkan penjualan 75% saham BAG di PBM AP kepada Dana Pensiun PLN ("DP PLN") dengan nilai pelepasan sebesar Rp54.250 sehingga PBM AP berubah status menjadi asosiasi.

Pada tahun 2018, BAG, entitas anak, mendapatkan dividen dari PBM AP sebesar Rp2.746

NSHE

On August 29, 2017, PJBI, a subsidiary of PJB, made investment to NSHE through purchase of shares amounting to US\$30,497,203 (equivalent to Rp407,076), equivalent to 25% total percentage of ownership. On December 28, 2017, the Company made additional investment amounting to US\$25,000,611, (equivalent to Rp339,008).

During 2018, PJBI, a subsidiary of PJB, added investment amounting US\$20,831,307 (equivalent to Rp286,847) without percentage changes in percentage of ownership.

BAG

In 2018, BAG, a subsidiary, received dividends from PBM AP amounting to Rp2,746.

RDM

RE, a subsidiary of PJB, has joint control over in RDM as there must be a unanimous consent on important decisions. During 2017, RE made additional investment amounting to Rp21,046 without changes in percentage of ownership.

PBM AP

On May 2, 2017, BAG lost its control over PBM AP due to sale of 75% of BAG's shares in PBM AP to Dana Pensiun ("DP PLN") with proceed amounted to Rp54,250 which changed PBM AP status to associate.

In 2018, BAG, a subsidiary, received dividends from PBM AP amounting to Rp2,746

9. Piutang Pihak Berelasi

9. Receivables from Related Parties

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
PT Shenhua Guohua PJB (SGPJB)	785,639	830,188	--	PT Shenhua Guohua PJB (SGPJB)
PT Perta Daya Gas (PDG)	168,878	199,576	224,742	PT Perta Daya Gas (PDG)
PT Mitra Energi Batam (MEB)	1,845	1,845	683	PT Mitra Energi Batam (MEB)
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (Komipo PJB)	--	5,582	11,447	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (Komipo PJB)
PT Dalle Energy Batam (DEB)	--	--	5,603	PT Dalle Energy Batam (DEB)
Jumlah	956,362	1,037,191	242,475	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	4,719	5,954	5,294	Less current portion
Bagian jangka panjang	951,643	1,031,237	237,181	Long-term portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

SGPJB

Pada tanggal 20 November 2018, PJBI, entitas anak PJB, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US\$56.516.733 kepada SGPJB dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, saldo piutang masing-masing sebesar US\$56.516.733 (setara dengan Rp785.639), US\$56.516.733 (setara dengan Rp818.419), dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 piutang lainnya masing-masing sebesar nihil, Rp11.769, dan nihil.

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US\$18.837.112 kepada PDG, ventura bersama, untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* ("CNG") di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi US\$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi delapan tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, saldo piutang masing-masing terdiri dari pokok dan bunga sebesar US\$11.941.878 (setara dengan Rp166.004), US\$13.498.180 (setara dengan Rp195.467), dan US\$16.197.815 (setara dengan Rp219.448). Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 piutang lainnya sebesar Rp2.874, Rp4.109, dan Rp5.294 merupakan piutang yang antara lain, piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

SGPJB

On November 20, 2018, PJBI, a PJB subsidiary, granted a long-term loan amounting to to SGPJB amounted US\$56,516,733 with interest rate of LIBOR 6 month +4%. The loan will mature on December 15, 2033. The interest will be due every January 15 and July 15 and the first installment of principal payment will be on December 15, 2021. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 the receivable amounted to US\$56,516,733 (equivalent to Rp785,639), US\$56,516,733 (equivalent to Rp818,419), and nil, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, other receivables amounting to nil, Rp11,769, and nil, respectively.

PDG

On June 12, 2013, IP, a subsidiary, granted a long-term loan amounting to US\$18,837,112 to PDG, a joint venture, for financing the *Compressed Natural Gas* ("CNG") project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 30, 2015, IP made an amendment to the long term loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan granted to become US\$18,191,529 in accordance with the fund transferred up to January 9, 2014 and the tenor of the loan was revised to eight years and due on December 1, 2023. This loan bears interest of 6.5% per annum. The total interest on the principal during the construction of the project (*Interest During Construction*) is effective from the date of cash withdrawal until May 30, 2014 and paid-in full on June 1, 2016. The principal shall be collected every 6 months from date June 1, 2016 until December 1, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding principal and accrued interest of the receivables amounted to US\$11,941,878, (equivalent to Rp166,004), US\$13,498,180 (equivalent to Rp195,467), and US\$16,197,815 (equivalent to Rp219,448). As of December 31, 2019, 2018, and 2017, other receivables amounting to Rp2,874, Rp4,109, and Rp5,294, respectively, represent interest receivables and costs of relocation of employees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Komipo PJB

Pada tanggal 29 Desember 2010, PJB, entitas anak, menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Komipo PJB dalam bentuk *shareholder loan* dengan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan Komipo PJB dana cadangan untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pengembangan Operasi dan Pemeliharaan dengan PJB, dimana Komipo PJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk enam bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Pada tanggal 29 Desember 2014, PJB melakukan amandemen atas pinjaman yang diberikan kepada Komipo PJB sehingga jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2019. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 29 Desember 2019.

MEB

Piutang ini merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa piutang pihak berelasi dapat tertagih.

Komipo PJB

On December 29, 2010, PJB, a subsidiary, agreed to provide loans to Komipo PJB, in the form of a *shareholder loan* with annual interest of 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserves for Komipo PJB in order to comply with the contractual obligations stipulated in the *Expansion Operation and Maintenance Agreement* with PJB, which requires Komipo PJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserves for six-months operation and maintenance of power plant. On December 29, 2014, PJB made an amendment on loan agreement to Komipo PJB to extend the due date to December 29, 2019. The interest will be due every December 29 and the first installment of principal payment was on December 29, 2012. This loans has been fully paid on December 29, 2019.

MEB

These receivables represent receivables on penalty of power purchase contracts.

Managements of the Company and its subsidiaries consider these receivables from related parties are collectible.

10. Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya

10. Restricted Cash in Banks and Time Deposits

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi				Lease installments and operation guarantee
Rekening bank				Cash in bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura				Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore
JPY	5,092,574	4,844,193	6,587,157	JPY
US\$	681,164	690,780	623,962	US\$
Bank Bukopin - Rupiah	792	267	49,339	Bank Bukopin - Rupiah
Jaminan bank garansi				Bank guarantee
Rekening bank - Rupiah				Cash in banks - Rupiah
Pihak berelasi:				Related parties:
Bank Mandiri	86,032	82,412	22,909	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	8,979	1,348	1,313	Bank Negara Indonesia
Pihak ketiga:				Third parties:
Bank CIMB Niaga	94,223	67,293	22,829	Bank CIMB Niaga
Bank Bukopin	16,939	--	--	Bank Bukopin
Bank Woori Saudara	--	2,419	--	Bank Woori Saudara
Deposito berjangka - Rupiah				Time deposit - Rupiah
Pihak berelasi:				Related parties:
Bank Rakyat Indonesia	--	--	75,200	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	--	--	70,000	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	--	--	35,000	Bank Mandiri
Jumlah	5,980,703	5,688,712	7,487,709	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	6.00% - 6.70%	6.00% - 6.75%	4.5% - 6%	Rupiah
US\$	1.70% - 2.40%	1.25% - 1.37%	1.25% - 1.37%	US\$
Jangka waktu				Maturity
Rupiah	1-12 Bulan/ Months	4-6 Bulan/ Months	4-6 Bulan/ Months	Rupiah
US\$	3-6 Bulan/ Months	1 Tahun/ Year	1 Tahun/ Year	US\$

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY39.796.118.675 dan US\$49.001.061 pada tanggal 31 Desember 2019, sebesar JPY36.946.110.237 dan US\$47.702.501 pada tanggal 31 Desember 2018, dan sebesar JPY54.793.251.283 dan US\$46.055.654 pada tanggal 31 Desember 2017 untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA").

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY39,796,118,675 and US\$49,001,061 as of December 31, 2019, amounting to JPY36,946,110,237 and US\$47,702,501 as of December 31, 2018, and amounting to JPY54,793,251,283 and US\$46,055,654 as of December 31, 2017 to fulfill the requirement of the *Financial Lease Agreement* ("FLA").

Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of restricted cash in bank and time deposits in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		2017		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
JPY	39,796,118,675	5,092,574	36,946,110,237	4,844,193	54,793,251,283	6,587,157	JPY
US\$	49,001,061	681,164	47,702,501	690,780	46,055,654	623,962	US\$
Jumlah		5,773,738		5,534,973		7,211,119	Total

*) Dalam jumlah penuh/ In full amount

11. Aset Tidak Lancar Lain

11. Other Non-Current Assets

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya ditangguhkan	397,074	352,344	187,941	Deferred charges
Biaya dibayar di muka				Prepaid expenses
Pembelian gas	297,207	7,017,236	1,189,825	Gas purchased
Lain-lain	708,601	141,623	93,737	Others
Subjumlah	1,402,882	7,511,203	1,471,503	Subtotal
Uang muka				Advances
Pengembangan proyek	3,429,466	3,077,867	3,032,454	Project development
Pembelian batubara	128,342	874,422	942,922	Purchased of coal
Subjumlah	3,557,808	3,952,289	3,975,376	Subtotal
Aset takberwujud				Intangible assets
Piranti lunak	583,859	727,921	605,360	Software
Biaya legal terkait perpanjangan hak atas tanah	114,377	230,042	132,441	Legal costs for renewal landrights
Subjumlah	698,236	957,963	737,801	Subtotal
Properti pertambangan	1,779,601	1,056,556	875,453	Mining properties
Investasi saham tidak terdaftar di bursa	7,368	4,751	3,964	Investment in non-listed shares
Jumlah	7,445,895	13,482,762	7,064,097	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, maka Perusahaan menyesuaikan biaya dibayar di muka pembelian gas ke jumlah terpulihkannya sebesar Rp6.200.000 (Catatan 47).

In regards to the issuance of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No.10 year 2020 regarding the Amendment of The Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 45 Year 2017 regarding the Utilization of Natural Gas for Electricity Power Plants, the Company has adjusted the prepaid expenses for gas purchased to its recoverable amount of Rp6,200,000 (Note 47).

Amortisasi aset takberwujud

Beban amortisasi aset takberwujud tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp240.817, Rp221.851, dan Rp285.676, dicatat sebagai beban usaha.

Amortization of intangible assets

Amortization of intangible assets in 2019, 2018, and 2017 were amounted to Rp240,817, Rp221,851, and Rp285,676, respectively, are recorded as operating expenses.

12. Kas dan Setara Kas

12. Cash and Cash Equivalents

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Kas	5,747	9,662	8,578	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Pihak berelasi				Related parties
Bank Rakyat Indonesia				Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	5,478,064	5,747,560	8,025,347	Rupiah
US\$	4,870,738	2,991,865	4,131,047	US\$
EUR	1,896,613	1,278,887	57,016	EUR
JPY	744,137	204,061	6,003	JPY
Bank Mandiri				Bank Mandiri
Rupiah	6,684,169	3,771,647	8,028,389	Rupiah
US\$	1,541,966	1,355,590	399,383	US\$
EUR	1,894,410	182,933	11,001	EUR
JPY	402,453	11,228	5,275	JPY
Bank Negara Indonesia				Bank Negara Indonesia
Rupiah	7,965,754	5,452,526	8,391,017	Rupiah
US\$	3,056,389	1,946,655	664,703	US\$
JPY	361,417	241,461	25,119	JPY
EUR	18,150	20,922	20,809	EUR
MYR	2,062	--	--	MYR
Bank Tabungan Negara				Bank Tabungan Negara
Rupiah	959,389	1,001,303	1,505,072	Rupiah
Bank DKI				Bank DKI
Rupiah	616,233	318,382	737,233	Rupiah
US\$	39,549	45,449	98,686	US\$
JPY	973	997	914	JPY
Jumlah pihak berelasi	<u>36,532,466</u>	<u>24,571,466</u>	<u>32,107,014</u>	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank Bukopin				Bank Bukopin
Rupiah	4,670,371	3,223,061	1,497,183	Rupiah
US\$	1,585,473	960,820	2,614,659	US\$
JPY	325,353	170,402	81,621	JPY
EUR	--	--	40,772	EUR
Bank Internasional Indonesia				Bank Internasional Indonesia
Rupiah	2,660	1,479	1,467	Rupiah
US\$	--	3	5	US\$
Bank Danamon				Bank Danamon
Rupiah	435,361	242,387	174,829	Rupiah
Bank Central Asia				Bank Central Asia
Rupiah	40,704	260,947	435,310	Rupiah
US\$	--	25,479	23,838	US\$
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)				Others (each below 5% of total)
Rupiah	922,923	1,821,303	1,422,147	Rupiah
US\$	70,498	86,738	365,489	US\$
EUR	5,041	--	4,991	EUR
Jumlah pihak ketiga	<u>8,058,384</u>	<u>6,792,619</u>	<u>6,662,311</u>	Total third parties
Jumlah kas dan bank	<u>44,596,597</u>	<u>31,373,747</u>	<u>38,777,903</u>	Total cash on hand and in banks

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u> Rp	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp	
Setara kas - deposito berjangka				Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi				Related parties
Bank Negara Indonesia				Bank Negara Indonesia
Rupiah	1,055,000	966,238	970,160	Rupiah
US\$	94,524	7,241	--	US\$
Bank Mandiri				Bank Mandiri
Rupiah	35,353	330,442	72,442	Rupiah
Bank Rakyat Indonesia				Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	357,290	242,380	1,823,842	Rupiah
US\$	97,307	--	--	
Jumlah pihak berelasi	<u>1,639,474</u>	<u>1,546,301</u>	<u>2,866,444</u>	Total Related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank Bukopin	302,000	329,000	460,000	Bank Bukopin
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	<u>60,712</u>	<u>45,512</u>	<u>187,612</u>	Others (each below 5% of total)
Jumlah pihak ketiga	<u>362,712</u>	<u>374,512</u>	<u>647,612</u>	Total third parties
Jumlah deposito berjangka	<u>2,002,186</u>	<u>1,920,813</u>	<u>3,514,056</u>	Total time deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>46,598,783</u>	<u>33,294,560</u>	<u>42,291,959</u>	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	5.75% - 6%	5.75% - 6%	6% - 7%	Rupiah
US\$	0.80%	0.80%	--	US\$
Jangka waktu	1 Bulan / Month	1 Bulan / Month	1 -3 Bulan / Month	Maturity

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows:

	<u>2019</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
US\$	816,951,292	11,356,444	668,605,846	7,419,840	612,474,922	8,297,810	US\$
EUR	244,679,781	3,814,214	89,538,915	1,482,742	8,321,241	134,588	EUR
JPY	14,334,466,962	1,834,333	4,790,819,800	628,149	989,283,918	118,932	JPY
Lain-lain **)	148,335	2,062	--	--	--	--	Others **)
Jumlah		<u>17,007,053</u>		<u>9,530,731</u>		<u>8,551,330</u>	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$, menggunakan kurs tanggal pelaporan.

**) Cash and cash equivalent in other currencies are presented in US\$ equivalent using the exchange rate prevailing at reporting date.

13. Investasi Jangka Pendek

13. Short-Term Investments

	<u>2019</u> Rp	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp	
Deposito berjangka				Time deposits
Pihak berelasi - Rupiah				Related parties - Rupiah
Bank Rakyat Indonesia				Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	260,000	1,184,511	260,000	Rupiah
US\$	13,901	--	--	US\$
Bank Mandiri				Bank Mandiri
Rupiah	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	<u>293,901</u>	<u>1,204,511</u>	<u>280,000</u>	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	<u>33,000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	Others (each below 5% of total)
Investasi lain-lain				Other investments
Rupiah	<u>7,252</u>	<u>12,375</u>	<u>6,697</u>	Rupiah
Jumlah investasi jangka pendek	<u>334,153</u>	<u>1,216,886</u>	<u>286,697</u>	Total short-term investments
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	4.00% - 7.25%	6.50% - 7.25%	6% - 6.75%	Rupiah
US\$	2.50%	--	--	US\$
Jangka waktu				Maturity
Rupiah	6 Bulan/ Months	6 - 12 Bulan/ Months	6 Bulan/ Months	Rupiah
US\$	1 Bulan/ Month	--	--	US\$

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko kredit pada aset keuangan tersebut dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan bank terkemuka dengan peringkat kredit eksternal berkualitas tinggi.

The credit risk on these financial assets is considered negligible, since the counterparties are reputable banks with high quality external credit ratings.

14. Piutang Usaha

14. Trade Receivables

a. Berdasarkan langganan

a. By debtor

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi				<i>Related parties</i>
Badan Usaha Milik Negara	823,893	596,016	583,539	<i>State-Owned Enterprises</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,057)	(2,370)	(2,546)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah pihak berelasi - bersih	<u>819,836</u>	<u>593,646</u>	<u>580,993</u>	<i>Total of related parties - net</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
Umum	24,076,371	22,747,315	21,330,953	<i>Public</i>
TNI dan Polri	807,915	499,429	634,603	<i>Indonesian Armed Forces</i>
Institusi lainnya	1,379,073	1,248,971	1,095,398	<i>Other institutions</i>
Subjumlah	26,263,359	24,495,715	23,060,954	<i>Subtotal</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,952,657)	(1,286,698)	(1,175,104)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah pihak ketiga - bersih	<u>24,310,702</u>	<u>23,209,017</u>	<u>21,885,850</u>	<i>Total of third parties - net</i>
Bersih	<u>25,130,538</u>	<u>23,802,663</u>	<u>22,466,843</u>	<i>Net</i>

b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya

b. By age category of receivables that are not impaired

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Belum jatuh tempo	23,432,282	21,628,281	20,607,638	<i>Not yet due</i>
Lewat jatuh tempo				<i>Past due</i>
1 s/d 90 hari	1,248,157	1,424,523	1,125,249	<i>1 to 90 days</i>
91 s/d 360 hari	505,665	708,925	631,327	<i>91 to 360 days</i>
Lebih dari 360 hari	1,901,148	1,330,002	1,280,279	<i>More than 360 days</i>
Jumlah	<u>27,087,252</u>	<u>25,091,731</u>	<u>23,644,493</u>	<i>Total</i>
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai				<i>Changes in the allowance for impairment losses</i>
Saldo awal tahun	(1,289,068)	(1,177,650)	(1,025,842)	<i>Balance at beginning of year</i>
Penambahan	(703,019)	(213,327)	(231,295)	<i>Additions</i>
Penghapusan	35,373	101,909	79,487	<i>Write-off</i>
Saldo akhir tahun	<u>(1,956,714)</u>	<u>(1,289,068)</u>	<u>(1,177,650)</u>	<i>Balance at end of year</i>

Piutang usaha Perusahaan dan PLN Batam dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 35).

The Company and PLN Batam trade receivables are secured by the customers' security deposits in case of default (Note 35).

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Allowance for impairment losses were made collectively for all trade receivables which are past due.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah piutang Perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar

Management believes that the allowances for impairment losses are adequate. As of December 31, 2019, the Company's receivables balance that is neither past due nor impaired amounted to Rp23,432,282. Management believes there is no

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rp23.432.282. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena Perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakupi segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Perusahaan atas piutang usaha yang baik selama beberapa tahun.

heightened risk of poor credit quality of accounts receivable because it has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Company's good historical collection rate of trade receivable across the years.

15. Piutang Subsidi Listrik

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, Perusahaan menerima kelebihan subsidi masing-masing sebesar Rp954.683, Rp816.856, dan nihil (Catatan 38). Saldo kelebihan penerimaan subsidi listrik dicatat sebagai utang kepada Pemerintah (Catatan 25).

15. Receivables on Electricity Subsidy

In 2019, 2018, and 2017, the Company collected excess receipt of electricity subsidy for budget year 2019 amounted to Rp954,683, Rp816,856, and nil (Note 38). Balance of excess receipt of electricity subsidy is recorded as Government Loan (Note 25).

16. Piutang Kompensasi

Piutang kompensasi merupakan piutang atas kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi yang diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.

16. Compensation Receivables

Compensation receivables represents compensation from Government for reimbursement of Electricity Production Cost ("BPP") of several categories of customers whose tariffs for selling electricity are lower than BPP, and not yet calculated in subsidy is recognized as income on an accrual basis.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, piutang kompensasi Perusahaan adalah sebesar nihil, Rp23.173.464, dan nihil.

As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the Company's compensation receivables is amounted nil, Rp23,173,464, and nil, respectively.

17. Piutang Lain-Lain

17. Other Receivables

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi				Related party
Piutang dari Pemerintah	45,426,981	7,456,452	--	<i>Receivable from the Government</i>
Subjumlah	45,426,981	7,456,452	--	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga				Third parties
Karyawan	518,418	376,212	419,355	<i>Employees</i>
Lain-lain	2,330,230	2,636,481	1,887,831	<i>Others</i>
Subjumlah	2,848,648	3,012,693	2,307,186	<i>Subtotal</i>
Jumlah	48,275,629	10,469,145	2,307,186	<i>Total</i>
Dikurangi bagian jangka pendek	47,451,084	9,507,768	1,672,237	<i>Less current portion</i>
Bagian jangka panjang	824,545	961,377	634,949	<i>Long-term portion</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Piutang dari Pemerintah

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 Pemerintah menyetujui penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-661/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Pemerintah menyetujui penggantian BPP dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan Penyajian Piutang Kompensasi Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 dan 2019 No.0313.BA/KEU.02.04/A010600/2020 tanggal 15 Mei 2020 antara Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Perusahaan, disepakati mengenai pencatatan dan penyajian piutang lancar sebesar Rp45.426.981.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018, Pemerintah menyetujui penggantian BPP tenaga listrik atas beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan dengan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi listrik tahun 2017, sebesar Rp7.456.452 (Catatan 47).

Sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.BA-19/AG.6.3/2019 tanggal 31 Desember 2019, dinyatakan bahwa pembayaran kewajiban Pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik tahun anggaran 2017 dilakukan melalui mekanisme *set-off* dengan liabilitas pajak Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp7.456.452.

Receivable from the Government

Based on the letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.S-360/MK.02/2020 dated May 6, 2020, The Government has approved reimbursement of Cost of Electricity supplies ("CCE") in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for nonsubsidy tariff groups for the year 2019 amounting to Rp22,253,517.

Based on the letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.S-661/MK.02/2019 dated August 15, 2019, The Government has approved reimbursement of CCE in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for nonsubsidy tariff groups for the year 2018 amounting to Rp23,173,464.

Based on Minutes of Reconciliation of Record and Presentation of the Electricity Tariff Compensation Receivables Year 2018 and 2019 No.0313.BA/KEU.02.04/A010600/2020 dated May 15, 2020 between the Directorate General of Budget, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Company, has been agreed on the recording and presentation of current receivables amounting to Rp45,426,981.

Based on the letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.S-440/MK.02/2018 dated June 28, 2018, the Government has approved the Compensation of CCE on several categories of customers whose electricity sales rates were set lower than CCE, and has not been calculated in the electricity subsidy for the year 2017 amounting to Rp7,456,452 (Note 47).

In accordance with the Verification Minutes of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.BA-19/AG.6.3/2019 dated December 31, 2019, stated that the payment of government's liabilities towards electricity tariff policies on budget year 2017 was through a set-off mechanism with the Company's tax liabilities to the Government amounting to Rp7,456,452.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Karyawan

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

Employees

Account receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.

18. Persediaan

18. Inventories

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	8,607,095	9,751,303	6,834,510	Coal, fuel and lubricants
Persediaan umum	2,519,385	2,935,361	2,841,745	General supplies
Switchgear dan jaringan	1,163,941	1,643,804	1,941,795	Switchgear and network
				Meter recording device and control equipment
Alat ukur, pembatas dan kontrol	600,747	1,042,662	966,924	Transformers
Transformator	93,702	139,098	243,968	Wire
Kabel	91,942	136,156	120,214	Total
Jumlah	13,076,812	15,648,384	12,949,156	Allowance for decline in value
Penyisihan penurunan nilai	(142,579)	(141,817)	(121,038)	Net
Bersih	12,934,233	15,506,567	12,828,118	
Mutasi penyisihan penurunan nilai				Movement in allowance for declining in value
Saldo awal tahun	(141,817)	(121,037)	(115,325)	Balance at beginning of year
Pemulihan (penambahan)	(762)	(20,780)	(5,713)	Recovery (addition)
Saldo akhir tahun	(142,579)	(141,817)	(121,038)	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance to cover the possible losses in inventories.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama tahun 2019, 2018, dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp80.239.687, Rp84.908.100, dan Rp73.262.154.

The total amount of inventories recognized as expenses during 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp80,239,687, Rp84,908,100, and Rp73,262,154, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. Pajak Dibayar di Muka

19. Prepaid Taxes

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pajak penghasilan badan lebih bayar				<i>Overpayment of corporate income tax</i>
Perusahaan				<i>The Company</i>
2019	210,827	--	--	<i>2019</i>
2018	174,702	174,702	--	<i>2018</i>
2017	--	--	91,988	<i>2017</i>
Entitas anak				<i>Subsidiaries</i>
2019	762,348	--	--	<i>2019</i>
2018	992,952	992,952	--	<i>2018</i>
2017	521,690	521,690	521,690	<i>2017</i>
2016	716,827	716,827	716,827	<i>2016</i>
Bea materai	68,218	48,370	37,343	<i>Stamp duty</i>
Pajak pertambahan nilai	2,396,809	918,877	1,198,810	<i>Value added tax</i>
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	11,789,764	2,520,702	2,430,735	<i>Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment</i>
Jumlah	17,634,137	5,894,120	4,997,393	Total

Lihat Catatan 48 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 48 for income tax expense information and tax assessment letters.

20. Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka

20. Prepaid Expenses and Advances

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya dibayar di muka				<i>Prepaid expenses</i>
Sewa	151,285	115,158	58,450	<i>Rent</i>
Premi asuransi	5,357	9,628	75,706	<i>Insurance</i>
Subjumlah	156,642	124,786	134,156	<i>Subtotal</i>
Uang muka				<i>Advances</i>
Pembelian barang	58,228	65,452	864,840	<i>Purchases</i>
Lain-lain	991,915	817,334	630,613	<i>Others</i>
Subjumlah	1,050,143	882,786	1,495,453	<i>Subtotal</i>
Jumlah	1,206,785	1,007,572	1,629,609	Total

21. Modal Saham dan Saldo Laba

21. Capital Stock and Retained Earnings

Modal saham

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Perusahaan mempunyai modal dasar masing-masing sebesar Rp439.000.000 yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain:

Capital stock

The Company's shares of stock are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia.

As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the Company has authorized capital amounted to Rp439,000,000, consisting of 439,000,000 shares, with par value of Rp1 per share.

Based on the Extraordinary Stockholders' General Meeting ("RUPS") dated July 18, 2001, as stated in Deed No.43 dated October 26, 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved among other items as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Melakukan konversi utang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp28.781.355, yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Konversi utang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No.S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp28.781.354, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp46.107.154, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2001.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak 90.226 saham atau sebesar Rp90.226. Tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perusahaan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118/MBU/2011 tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp90.226 atau sebanyak 90.226 saham. Penambahan penerbitan saham kepada Pemerintah Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674 saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan di tahun 2011.

- Convert the Company's liability to the Government amounted Rp28,781,355, arising from overdue interest and penalty on two-step loans into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No.S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.
- Increase the subscribed and paid-up capital by Rp28,781,354, resulting in the Company's total subscribed and paid-up capital amounting to Rp46,107,154 consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp1 per share.

On August 1, 2001, the additional equity participation from Government has been stated in Government Regulation No.61 year 2001.

On March 4, 2011, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 relating to the increase in the Government's equity participation in the Company, consisting of 90,226 shares or an equivalent of Rp90,226. The increase in the Government's equity participation in the Company is through the transfer of the Government's share in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Based on the decision of the Company's shareholders at the General Shareholders Meeting No. KEP-118/MBU/2011, dated May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved the new issuance of the Company's shares as stocks to the Government of Republic of Indonesia in the amount of Rp90,226, equivalent to 90,226 shares. The additional issuance of shares to the Government of the Republic of Indonesia came from the transfer of 21,674 shares of the Government of the Republic of Indonesia in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision has been effective since the date the Company received the Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares of the Government of the Republic of Indonesia to the Company in 2011.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-82/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam akte notaris No. 12 tanggal 22 Februari 2016, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp204.000.000.
- Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 9.468.627 lembar saham dengan nilai Rp9.468.627 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp55.666.007.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp439.000.000.
- Penambahan penyertaan modal negara sebesar 54.160.519 lembar saham dengan nilai Rp54.160.519 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp109.826.526, dengan rincian sebagai berikut:
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 17 tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016, sebesar masing-masing Rp8.860.208 dan Rp11.159.688.
 - Sebesar Rp10.580.623 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016.
 - Sebesar Rp23.560.000 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-220/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 5.354.476 saham dengan nilai Rp5.354.476 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp115.181.002, dengan rincian sebagai berikut:

Based on letter of Minister of BUMN No. S-82/MBU/01/2016 dated January 25, 2016, as stated in notarial deed No. 12 dated February 22, 2016, the decision of Minister of BUMN as RUPS approved items as following:

- *Increase of authorized capital stock to Rp204,000,000.*
- *Additional Government's equity participation of 9,468,627 shares amounted to Rp9,468,627, increase in subscribed and paid-up capital to Rp55,666,007.*

Based on letter of Minister of BUMN No. S-271/MBU/05/2017 dated May 4, 2017, the decision of Minister of BUMN as RUPS approved items as following:

- *Increase of authorized capital stock to Rp439,000,000.*
- *Additional Government's equity participation of 54,160,519 shares amounted to Rp54,160,519, increase in subscribed and paid-up capital to Rp109,826,526, with details as follows:*
 - *Based on Government Regulation No. 16 and No. 17 year 2016 dated May 25, 2016, amounting to Rp8,860,208 and Rp11,159,688, respectively.*
 - *Amounting to Rp10,580,623 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 33 year 2016 dated August 8, 2016.*
 - *Amounting to Rp23,560,000 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 91 year 2016 dated December 30, 2016.*

Based on letter of Minister of BUMN No. S-220/MBU/04/2019 dated April 12, 2019, the statement of the Decree of Minister of BUMN as RUPS approved additional Government's equity participation of 5,354,476 shares amounted to Rp5,354,476, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp115,181,002, with details as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Sebesar Rp132.967 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018.
- Sebesar Rp5.221.509 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Atas persetujuan Penyertaan Modal Negara tersebut, maka penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Saldo laba

Saldo laba terdiri dari:

- i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan RUPS tahun 2016 No. RIS-08/D2.MBU/05/2017 pada tanggal 26 Mei 2017, terdapat saldo laba tahun 2016 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp8.361.075.

Berdasarkan RUPS tahun 2017 No. RIS-01/D2.MBU/04/2018 pada tanggal 11 April 2018, terdapat saldo laba tahun 2017 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp4.101.495.

Berdasarkan RUPS tahun 2018 No. RIS-45/D2.MBU/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019, terdapat saldo laba tahun 2018 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp11.568.286.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No.S-941/MBU/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Perubahan Keputusan RUPS PT PLN (Persero) tanggal 29 Mei 2019 menyetujui penetapan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2018 sebesar Rp11.568.286 untuk dividen sebesar Rp4.000.000 dan untuk cadangan perusahaan sebesar Rp7.568.286.

- Amounting to Rp132,967 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 15 year 2018 dated May 8, 2018.

- Amounting to Rp5,221,509 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 58 year 2018 dated December 31, 2018.

Following the approval for the Government Participation, therefore the stock subscription from Government in issuance process has been reclassified to subscribed and paid-up capital.

Retained earnings

Retained earnings consist of:

- i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

Based on RUPS for the year 2016 No. RIS-08/D2.MBU/05/2017 dated May 26, 2017, there is an allocation of appropriated from 2016 retained earnings amounting to Rp8,361,075.

Based on RUPS for the year 2017 No. RIS-01/D2.MBU/04/2018 dated April 11, 2018, there is an allocation of appropriated from 2017 retained earnings amounting to Rp4,101,495.

Based on RUPS for the year 2018 No. RIS-45/D2.MBU/05/2019 dated May 29, 2019, there is an allocation of appropriated from the 2018 retained earnings amounting to Rp11,568,286.

Based on letter of Minister of BUMN No.S- 941/MBU/12/2019 dated December 20, 2019 regarding Amendment RUPS PT PLN (Persero) dated Mei 29, 2019, approved the allocation of net income attributable to the owner of the parent for fiscal year 2018 Rp11,568,286 for dividend Rp4,000,000 and Rp7,568,286 for retained earnings.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo laba yang dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60.334.896 atau 52%, Rp52.766.610 atau 48%, dan Rp48.665.115 atau 44% dari jumlah modal Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh.

The balance of the appropriated retained earnings as of December 31, 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp60,334,896 or 52%, Rp52,766,610 or 48%, and Rp48,665,115 or 44%, respectively, of the Company's subscribed and paid-up capital.

- ii. Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya
Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp70.997.731, Rp78.251.316, dan Rp71.093.240.

- ii. *Unappropriated retained earnings*

On December 31, 2019, 2018, and 2017 the balance of the unappropriated retained earnings amounted to Rp70,997,731, Rp78,251,316, and Rp71,093,240, respectively.

Dividen per lembar saham

Pada tahun 2019, 2018, dan 2017, Perusahaan membagikan total dividen kas untuk laba tahun 2018, 2017, dan 2016 masing-masing sejumlah Rp4.000.000 (nilai penuh) per lembar saham, Rp308.715 (nilai penuh) per lembar saham, dan Rp2.150.837 (nilai penuh) per lembar saham.

Dividends per share

In 2019, 2018, and 2017, the Company paid a total cash dividend for income in 2018, 2017, and 2016 amounted to Rp4,000,000 (full amount) per share, Rp308,715 (full amount) per share, and Rp2,150,837 (full amount) per share, respectively.

22. Tambahan Modal Disetor dan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham

22. Additional Paid-In Capital and Stock Subscription from Government in Issuance Process

a. Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor terdiri dari tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan dan sebagai akibat keikutsertaan Perusahaan dalam pengampunan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Additional paid-in capital

Additional paid-in capital consists of the Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined and as a result of the Company's participation in tax amnesty program with the following details:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya :				<i>Government's participation which status has not been determined :</i>
Bantuan proyek	1,241,253	2,117,922	2,117,922	<i>Project aid</i>
Daftar isian pelaksanaan anggaran	8,537,341	17,920,047	18,611,979	<i>List of project fund</i>
Subjumlah	9,778,594	20,037,969	20,729,901	<i>Subtotal</i>
Pengampunan pajak :				<i>Tax amnesty :</i>
Aset pengampunan pajak	141,364	141,364	141,364	<i>Tax amnesty assets</i>
Jumlah	9,919,958	20,179,333	20,871,265	Total

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (“DIPA”) merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Kementerian ESDM.

The List of Project Fund (“LFP”) represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of ESDM.

Bantuan Pemerintah daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Local Government participation represents land and electricity equipment donated by the Local Government to the Company.

b. Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2015 dan No. 125 tahun 2015 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Pemerintah) sejumlah masing-masing Rp4.468.627 dan Rp5.000.000. Sejumlah Rp5.000.000 merupakan setoran tunai, sedangkan Rp4.468.627 merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

b. Stock subscription from Government in issuance process

On December 28, 2015, the Government of Republic of Indonesia issued Regulation No. 42 year 2015 and No. 125 year 2015 regarding additional capital stock (Government’s equity participation) amounting to Rp4,468,627 and Rp5,000,000, respectively. An amount of Rp5,000,000 was in cash, whereas Rp4,468,627 was reclassified from additional paid-in capital.

Per tanggal 31 Desember 2016, sesuai dengan akta notaris dari Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 tanggal 22 Februari 2016, akun ini telah direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

As of December 31, 2016, based on notarial deed of Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 dated February 22, 2016, this account has been reclassified to subscribed and paid-up capital.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 16, No. 17, dan No. 33 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar masing-masing Rp8.860.208, Rp11.159.688 dan Rp10.580.623 yang merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

The Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 16, No. 17 and No. 33 year 2016 regarding additional capital stock (Government’s Equity Participation) amounting to Rp8,860,208, Rp11,159,688 and Rp10,580,623, respectively, which was reclassified from additional paid-in-capital.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp23.560.000.

On the December 30, 2016, the Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 91 year 2016 regarding additional capital stock (Government’s Equity Participation) amounting to Rp23,560,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, dilakukan reklasifikasi dari pernyataan modal negara dalam proses penerbitan saham ke modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp54.160.519.

Based on the Minister of BUMN's letter No. S-271/MBU/05/2017 dated May 4, 2017, the Company reclassified from stock subscription from Government in issuance process to subscribed and paid-up capital stock amounting to Rp54,160,519.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-220/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019, dilakukan reklasifikasi dari tambahan modal disetor ke modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp5.354.476.

Based on letter of Minister of BUMN's No. S-220/MBU/04/2019 dated April 12, 2019, the Company reclassified from additional paid-in capital to subscribed and paid-up capital stock amounting to Rp5,354,476.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, menetapkan penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp6.500.000.

Based on Government Regulation No. 51 year 2019 dated July 19, 2019 regarding additional government's equity participation in to the Company's capital stock, established an addition of Government's equity amounting to Rp6,500,000.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2019 tanggal 12 September 2019 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp4.028.230 yang merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

The Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 60 year 2019 dated September 12, 2019 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp4,028,230 which was resclassified from additional paid-in-capital.

23. Pendapatan Ditangguhkan

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan yang mana jasa penyambungan terkait belum diselesaikan oleh Perusahaan. Rincian pendapatan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

23. Deferred Revenue

This account represents connection fees received from customers for which the connection services have not been completed by the Company. Details of the deferred revenue are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Saldo awal tahun	929,947	1,218,400	1,147,227	<i>Balance at beginning of year</i>
Penerimaan tahun berjalan	7,053,881	7,020,719	7,184,627	<i>Addition during the year</i>
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(6,934,597)	(7,309,172)	(7,113,454)	<i>Recognized as revenue during the year</i>
Saldo akhir tahun	1,049,231	929,947	1,218,400	<i>Balance at end of year</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. Penerusan Pinjaman

24. Two-Step Loans

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are passed on to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	31 Desember/ December 31 2019 Rp	31 Desember/ December 31 2018 Rp	31 Desember/ December 31 2017 Rp	Periode/ Period *) Tahun/Year
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)				
USD				
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	408,209	563,411	654,110	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	254,560	271,063	253,598	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	2,470,985	2,410,826	1,757,035	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	497,410	515,395	446,273	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	1,266,994	1,043,409	535,092	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)				
USD				
ADB - 1982 INO - 1170	1,416,119	1,591,072	1,587,128	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	961,857	1,080,688	1,078,009	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	494,253	528,404	505,841	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	594,569	512,976	407,522	2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257	230,949	213,277	184,572	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	25,569	23,622	20,427	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KfW)				
EUR				
KfW - 95.65.136 - 934a	16,866	35,834	52,497	1996 - 2020
KfW - 10599 IND - 1179	--	--	19,048	2003 - 2018
KfW F 26180 - 1262	200,462	212,951	--	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)				
Yen				
JBIC IP 512 - 1163	4,732,311	5,195,084	5,080,887	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	1,444,286	1,585,524	1,550,671	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	5,122,730	5,610,754	5,476,357	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	57,393	61,205	58,319	2004 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	496,933	529,941	504,954	2004 - 2044
JBIC - 1187	--	16,408	45,134	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	1,719,157	1,830,532	1,741,736	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	72,474	77,169	73,426	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	1,117,196	1,206,563	1,163,385	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	548,793	14,579	135,946	2006 - 2048
JBIC IP 537 - 1220	7,439	8,058	7,791	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	2,622,438	2,376,950	1,837,286	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	1,097,519	1,188,782	1,148,902	2009 - 2037

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/ include grace periods in terms of payments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31 2019 Rp	31 Desember/ December 31 2018 Rp	31 Desember/ December 31 2017 Rp	Periode/ Period *) Tahun/Year
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)				
Yen				
JBIC IP 555 - 1231	177,020	206,232	189,093	2013 - 2039
JICAIP 556 - 1249	218,392	223,765	205,168	2013 - 2040
JICA - IP 560- 1253	462,882	439,804	121,662	2013 - 2053
JBIC IP - 1243	123,684	177,425	209,164	2012 - 2022
JBIC IP - 1188	--	--	14,949	2005 - 2018
JBIC IP - 1192	--	--	111,347	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	39,508	178,862	290,879	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	--	--	51,984	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	336	21,710	39,496	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	--	62,046	120,093	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	88,996	186,861	259,056	2008 - 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	61,877	67,293	41,701	2013 - 2025
JICA - IP 561- 1252	89,579	77,325	35,813	2013 - 2053
JICA - IP 572- 1265	28,800	17,435	5,547	2016 - 2055
Midland Bank Public Limited Company				
Midland Bank - 798	14,936	29,873	44,809	1995 - 2020
Midland Bank - 818	686	2,058	3,430	1995 - 2020
Banque Paribas				
Banque Paribas 1063- GBP EUR	55,413	74,382	92,194	1998 - 2022
Banque Paribas - 1158	26,753	59,221	87,924	2002 - 2020
Banque Paribas - 1176	--	--	14,036	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas				
EUR				
Calyon BNP Paribas - 1175	--	--	10,853	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	40,085	127,747	207,945	2006 - 2020
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR				
Kerajaan Belgia - 1185	24,652	28,059	29,231	2005 - 2033
Efic Australia - AUD 1071	35,123	51,556	68,532	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - USD	--	--	251,653	2003 - 2018
China Exim Bank 1248 - USD	1,202,774	1,400,365	1,225,522	2013 - 2027
China Exim Bank 1260 -USD	3,201,404	2,875,033	2,099,166	2015 - 2029
China Exim Bank 1261-USD	3,623,453	2,814,073	1,476,380	2015 - 2029
MKB Hungaria 1180 - US\$	--	--	4,248	2005 - 2018
AG Francaise 101901F - 1237	126,803	204,499	259,063	2010 - 2035
AFD - 1254	435,560	525,415	353,223	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H - 1259	112,029	136,515	14,663	2014 - 2026
Jumlah	38,068,216	38,692,031	34,264,769	
Biaya transaksi belum diamortisasi	(90,670)	(56,479)	(43,301)	
Jumlah bersih	37,977,546	38,635,552	34,221,468	

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/ include grace periods in terms of payments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31 2019 Rp	31 Desember/ December 31 2018 Rp	31 Desember/ December 31 2017 Rp	Periode/ Period *) Tahun/Year
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)				
USD				
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	134,964	138,170	126,999	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	11,709	5,882	--	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	116,756	52,315	--	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	10,794	--	--	2012 - 2035
Asian Development Bank (ADB)				
USD				
ADB - 1982 INO - 1170	122,663	115,867	98,567	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	83,315	78,699	66,949	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	14,319	13,530	11,481	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	45,024	21,290	20,117	2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257	12,644	9,367	--	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	1,400	1,036	--	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KfW)				
EUR				
KfW - 95.65.136 - 934a	16,866	17,917	17,499	1996 - 2020
KfW - 10599 IND - 1179	--	--	19,048	2003 - 2018
KfW F 26180 - 1262	30,069	--	--	2017 - 2027
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)				
Yen				
JBIC IP 512 - 1163	338,022	346,339	317,555	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	103,163	105,702	96,917	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	353,292	361,984	331,900	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	2,343	2,400	2,201	2004 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	20,283	20,782	19,055	2004 - 2044
JBIC - 1187	--	16,408	30,089	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	67,418	69,077	63,336	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	2,842	2,912	2,670	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	60,389	61,482	56,750	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	171	175	108,957	2006 - 2048
JBIC IP 537 - 1220	425	436	7,791	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	109,153	111,839	102,544	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	62,715	64,258	58,918	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	24,257	24,857	--	2013 - 2039
JICAIP 556 - 1249	118,040	--	--	2013 - 2040
JBIC IP - 1243	49,481	50,698	46,485	2012 - 2022
JBIC IP - 1188	--	--	14,949	2005 - 2018
JBIC IP - 1192	--	--	111,347	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	39,508	138,382	126,882	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	--	--	51,984	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	336	21,366	19,590	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	--	62,046	63,204	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	88,996	95,675	87,724	2008 - 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	26,422	40,608	2,494	2013 - 2025
Midland Bank Public Limited Company				
Midland Bank - 798	14,936	14,936	14,936	1995 - 2020
Midland Bank - 818	686	1,372	1,372	1995 - 2020

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/ include grace periods in terms of payments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31 2019 Rp	31 Desember/ December 31 2018 Rp	31 Desember/ December 31 2017 Rp	Periode/ Period *) Tahun/Year
Banque Paribas				
Banque Paribas 1063- GBP EUR	18,471	18,595	18,439	1998 - 2022
Banque Paribas - 1158	26,753	30,802	30,084	2002 - 2020
Banque Paribas - 1176	--	--	14,036	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas				
Calyon BNP Paribas - 1175	--	--	10,853	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	40,085	85,164	83,178	2006 - 2020
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR				
Kerajaan Belgia - 1185	1,761	1,871	1,827	2005 - 2033
Efic Australia - AUD 1071	14,049	14,730	15,229	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - USD	--	--	251,653	2003 - 2018
China Exim Bank 1248 - USD	141,503	147,407	104,130	2013 - 2027
China Exim Bank 1260 -USD	159,780	--	--	2015 - 2029
China Exim Bank 1261-USD	152,525	--	--	2015 - 2029
MKB Hungaria 1180 - US\$	--	--	4,248	2005 - 2018
AG Francaise 101901F - 1237	23,055	72,405	67,740	2010 - 2035
AFD - 1254	51,242	71,681	33,531	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H - 1259	13,180	19,811	733	2014 - 2026
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2,725,805	2,530,273	2,735,992	
Bagian jangka panjang	35,251,741	36,105,279	31,485,476	

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/ include grace periods in terms of payments

	2019	2018	2017	Interest rate per annum
Tingkat suku bunga per tahun				Rupiah
Rupiah	8.37%	7.50%	8.25%	Rupiah
US\$	2.7305% - 5.92%	2.105 % - 5.92%	1.8378% - 5.92%	US\$
JPY	0.012% - 4.82%	0.012% - 4.82%	0.012% - 4.82%	JPY
EUR	0.35% - 5.67%	0.35% - 5.67%	0.35% - 5.67%	EUR
AUD	3.85%	3.85%	3.85%	AUD
GBP	3.693%	3.693%	3.693%	GBP

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the two-step loans.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		2017		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
US\$	1,240,170,346	17,239,608	1,150,578,646	16,661,529	964,734,649	13,070,226	US\$
JPY	158,867,568,117	20,329,743	162,912,639,354	21,360,307	170,695,553,004	20,520,744	JPY
EUR	19,375,532	302,037	27,527,396	455,848	26,063,045	421,534	EUR
Lain-lain **)	6,512,892	90,536	8,696,746	125,938	11,863,438	160,725	Others **)
Jumlah		37,961,924		38,603,622		34,173,229	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

***) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$ menggunakan kurs tanggal pelaporan

**) Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US\$ equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

Beberapa perjanjian penerusan pinjaman mensyaratkan bahwa Perusahaan wajib memenuhi beberapa pembatasan keuangan.

Several two-step loans agreements requires the Company to comply with certain financial covenants.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga
Keuangan Pemerintah Non-bank**

**25. Government and Non-Bank Government
Financial Institution Loans**

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
PT Sarana Multi Infrastruktur	5,115,204	5,827,238	6,535,386	<i>PT Sarana Multi Infrastruktur</i>
Pengembalian subsidi				<i>Excess subsidy</i>
tahun anggaran 2018 (Catatan 15)	--	816,856	--	<i>budget years 2018 (Note 15)</i>
Pengembalian subsidi				<i>Excess subsidy</i>
tahun anggaran 2019 (Catatan 15)	954,683	--	--	<i>budget years 2019 (Note 15)</i>
Rekening Dana Investasi				<i>Investment Fund Account</i>
No. RDI-393/DP3/2001	288,158	560,184	817,580	<i>No. RDI-393/DP3/2001</i>
Jumlah	6,358,045	7,204,278	7,352,966	<i>Total</i>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1,998,476	1,860,649	1,043,793	<i>Less current maturities</i>
Bagian jangka panjang	4,359,569	5,343,629	6,309,173	<i>Long-term portion</i>
	2019	2018	2017	
Tingkat suku bunga per tahun Rupiah	4.00% - 5.25%	4.00% - 5.25%	4.00% - 5.25%	<i>Interest rate per annum Rupiah</i>

**Rekening Dana Investasi No. RDI-
393/DP3/2001**

**Investment Fund Account No. RDI-
393/DP3/2001**

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pokok pinjaman	293,793	587,585	881,378	<i>Principal</i>
Perbedaan nilai wajar	(5,635)	(27,401)	(63,798)	<i>Fair value difference</i>
Jumlah	288,158	560,184	817,580	<i>Total</i>

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001, pada tanggal 20 Juni 2001 Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5.288.268 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 30 Juli 2021. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896.

As stated on the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001, on June 20, 2001 the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of the two-step loans amounting to Rp5,288,268 to become 20 years period matured on July 30, 2021. The loan paid-in semi-annual installments of Rp146,896.

PT Sarana Multi Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pokok pinjaman	5,250,000	6,000,000	6,750,000	<i>Principal</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(12,794)	(16,434)	(20,461)	<i>Unamortized transaction cost</i>
Perbedaan nilai wajar	(122,002)	(156,328)	(194,153)	<i>Fair value difference</i>
Jumlah	5,115,204	5,827,238	6,535,386	<i>Total</i>

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from the Government Investment Center ("PIP") under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp7,500,000 with an annual interest rate of 5.25% with 15 years term.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the equipment installation of transmission and distribution and also other capital expenditures.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggungjawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, PIP and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") has signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI, including interest and responsibility in the Company's investment agreement.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

In relation to this loan facility, the Company has complied with the covenants in the borrowing agreement.

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

Government and non-bank Government Financial Institution Loans by installment schedules at nominal amount, are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Dibayarkan:				<i>Payable to:</i>
Dalam satu tahun	1,998,476	1,860,649	1,043,792	<i>Within one year</i>
Pada tahun kedua	750,000	1,043,792	1,043,793	<i>In the second year</i>
Pada tahun ketiga	750,000	750,000	1,043,793	<i>In the third year</i>
Pada tahun keempat	750,000	750,000	750,000	<i>In the fourth year</i>
Setelah lima tahun	2,250,000	3,000,000	3,750,000	<i>After five years</i>
Jumlah	6,498,476	7,404,441	7,631,378	Total

26. Utang Sewa Pembiayaan

Akun ini terdiri dari utang Perusahaan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan pembangunan kompresor gas di berbagai daerah.

26. Lease Liabilities

This account represents the Company's liabilities to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement 4x660MW on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, and several lease contracts in relation to the construction of gas compressors at the various locations.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan CJP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA"), Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 10).

In relation to the CJP Finance Lease Agreement, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. In order to fulfill the requirements of Financial Lease Agreement ("FLA"), the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease payments (Note 10).

Utang sewa pembiayaan ini akan jatuh tempo antara tahun 2022 dan 2031.

These lease liabilities will be due between 2022 and 2031.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities in 2019, 2018, and 2017 are as follows:

Berdasarkan jatuh tempo

By due date

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:				<i>Minimum lease payments due:</i>
Tidak lebih dari satu tahun	4,007,615	4,406,094	6,940,785	<i>Not later than one year</i>
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	12,810,838	16,775,304	19,173,149	<i>Later than one year and not later than five years</i>
Lebih dari lima tahun	2,079,912	2,607,402	2,693,858	<i>Later than five years</i>
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	18,898,365	23,788,800	28,807,792	<i>Total minimum lease payments</i>
Dikurangi bunga	4,788,881	6,695,835	8,222,615	<i>Less interest</i>
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	14,109,484	17,092,965	20,585,177	<i>Present value of future minimum lease payments</i>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2,540,107	2,624,629	4,871,908	<i>Less current maturity</i>
Bagian jangka panjang	11,569,377	14,468,336	15,713,269	Long-term portion

Berdasarkan pemberi sewa

By lessor

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi				<i>Related party</i>
PT Wijaya Karya Industri Energi - Rupiah	--	86,466	239,805	<i>PT Wijaya Karya Industri Energi - Rupiah</i>
Pihak Ketiga				<i>Third parties</i>
PT Central Java Power - JPY	13,262,625	15,865,228	18,898,480	<i>PT Central Java Power - JPY</i>
PT Batam Trans Gasindo - US\$	779,844	825,477	781,206	<i>PT Batam Trans Gasindo - US\$</i>
PT Enviromate Technology International - Rupiah	67,015	86,504	103,046	<i>PT Enviromate Technology International - Rupiah</i>
PT Eramas Persada Energy - US\$	--	123,942	360,189	<i>PT Eramas Persada Energy - US\$</i>
PT Muba Daya Pratama - Rupiah	--	105,348	202,451	<i>PT Muba Daya Pratama - Rupiah</i>
Jumlah	14,109,484	17,092,965	20,585,177	<i>Total</i>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2,540,107	2,624,629	4,871,908	<i>Less current maturity</i>
Bagian jangka panjang	11,569,377	14,468,336	15,713,269	Long-term portion
Tingkat suku bunga per tahun:				<i>Interest rate per annum:</i>
Rupiah	8.18% - 22.43%	8.18% - 22.43%	8.18% - 22.43%	<i>Rupiah</i>
US\$	14.01% - 18.75%	14.01% - 18.75%	14.01% - 18.75%	<i>US\$</i>
JPY	7.60% - 11.00%	7.60% - 11.00%	7.60% - 11.00%	<i>JPY</i>

Rincian utang sewa pembiayaan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the lease liabilities in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		2017		
	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> Rp	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> Rp	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> Rp	
JPY	103,641,300,467	13,262,625	121,002,299,155	15,865,228	157,201,225,947	18,898,480	JPY
US\$	56,099,845	779,844	65,563,142	949,419	84,248,160	1,141,395	US\$
Jumlah		14,042,469		16,814,647		20,039,875	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.903.022, Rp4.221.779, dan Rp3.874.639 (Catatan 46).

Interest expense and financial charges related to finance leases in 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp4,903,022, Rp4,221,779, and Rp3,874,639, respectively, (Note 46).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. Utang Bank

27. Bank Loans

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
<u>Pinjaman terkait program percepatan</u>				<u>Loans related to fast track program</u>
Pihak berelasi				Related parties
Bank Negara Indonesia	2,099,968	2,766,949	3,372,337	Bank Negara Indonesia
Bank DKI	1,827,679	2,078,962	2,401,684	Bank DKI
Bank Rakyat Indonesia	149,547	686,744	1,541,166	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	--	373,287	814,842	Bank Mandiri
Jumlah pihak berelasi	4,077,194	5,905,942	8,130,029	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
The Export-Import Bank of China	8,884,062	11,139,687	12,185,469	The Export-Import Bank of China
Barclays Bank Plc and China Development Bank	5,098,127	6,691,520	7,552,115	Barclays Bank Plc and China Development Bank
Bank of China Limited	4,121,210	6,223,761	7,628,981	Bank of China Limited
Bank Bukopin	608,270	917,523	1,226,776	Bank Bukopin
Bank Central Asia	--	146,535	368,613	Bank Central Asia
Bank Mega	--	--	672,187	Bank Mega
Jumlah pihak ketiga	18,711,669	25,119,026	29,634,141	Total third parties
Subjumlah	22,788,863	31,024,968	37,764,170	Subtotal
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u>				<u>Loans not related to fast track program</u>
Pihak berelasi				Related parties
Bank Rakyat Indonesia	33,902,610	22,584,320	33,028,751	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	23,650,000	24,525,000	15,500,000	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	16,214,286	17,571,429	18,500,000	Bank Negara Indonesia
Bank DKI	--	1,000,000	--	Bank DKI
Bank Tabungan Negara	1,500,000	--	--	Bank Tabungan Negara
Jumlah pihak berelasi	75,266,896	65,680,749	67,028,751	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	25,511,253	23,813,161	139,868	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Bank Central Asia	16,000,000	17,000,000	18,000,000	Bank Central Asia
Asian Development Bank	14,114,874	11,561,041	6,069,504	Asian Development Bank
Bank DBS Indonesia	9,730,700	--	--	DBS Bank Indonesia
Japan Bank for International Cooperation	9,631,014	5,489,422	967,128	Japan Bank for International Cooperation
Bank CIMB Niaga	7,500,000	8,000,000	--	Bank CIMB Niaga
International Bank for Reconstruction and Development	6,427,389	4,888,397	1,458,442	International Bank for Reconstruction and Development
Export Development Canada	4,952,231	5,701,894	5,842,575	Export Development Canada
Bank Maybank Indonesia	4,300,000	4,300,000	4,300,000	Bank Maybank Indonesia
Credit Agricole CIB Paris	1,662,264	208,287	--	Credit Agricole CIB Paris
Standard Chartered Bank	1,616,977	1,932,432	2,097,072	Standard Chartered Bank
Islamic Development Bank	1,464,828	288,129	--	Islamic Development Bank
Tokyo Mitsubishi Bank	1,390,100	--	--	Tokyo Mitsubishi Bank
Mizuho Bank	906,165	--	--	Mizuho Bank
Korea Exim Bank	904,723	916,845	--	Korea Exim Bank
Kreditanstalt fur Wiederaufbau	626,464	19,323	10,531	Kreditanstalt fur Wiederaufbau
BNP Paribas SA	579,271	--	--	BNP Paribas SA
Servizi Assicurativi del Commercio Estero	522,910	605,987	--	Servizi Assicurativi del Commercio Estero
Agence Francaise De Development	456,272	375,849	64,713	Agence Francaise De Development
Export Guarantee and Insurance Corporation	216,790	208,676	--	Export Guarantee and Insurance Corporation
Bank Gospodarstwa Krajowego	33,130	--	--	Bank Gospodarstwa Krajowego
Jumlah pihak ketiga	108,547,355	85,309,443	38,949,833	Total third parties
Subjumlah	183,814,251	150,990,192	105,978,584	Subtotal
Jumlah	206,603,114	182,015,160	143,742,754	Total
Biaya transaksi belum diamortisasi	(885,956)	(903,426)	(1,176,643)	Unamortized transaction cost
Jumlah bersih	205,717,158	181,111,734	142,566,111	Total net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				<i>Less current maturities</i>
Pinjaman terkait program percepatan				<u>Loans related to fast track program</u>
Pihak berelasi				Related parties
Bank Negara Indonesia	349,995	666,981	677,686	<i>Bank Negara Indonesia</i>
Bank DKI	317,857	354,881	531,477	<i>Bank DKI</i>
Bank Rakyat Indonesia	149,547	537,197	854,422	<i>Bank Rakyat Indonesia</i>
Bank Mandiri	--	373,287	441,555	<i>Bank Mandiri</i>
Jumlah pihak berelasi	817,399	1,932,346	2,505,140	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank of China Limited	1,853,274	1,930,599	1,806,212	<i>Bank of China Limited</i>
The Export-Import Bank of China	1,809,453	1,884,950	1,763,504	<i>The Export-Import Bank of China</i>
Barclays Bank Plc and China Development Bank	1,325,381	1,380,681	1,291,725	<i>Barclays Bank Plc and China Development Bank</i>
Bank Bukopin	309,253	309,253	309,253	<i>Bank Bukopin</i>
Bank Central Asia	--	146,535	222,078	<i>Bank Central Asia</i>
Bank Mega	--	--	672,187	<i>Bank Mega</i>
Jumlah pihak ketiga	5,297,361	5,652,018	6,064,959	Total third parties
Subjumlah	6,114,760	7,584,364	8,570,099	Subtotal
Pinjaman tidak terkait program percepatan				<u>Loans not related to fast track program</u>
Pihak berelasi				Related parties
Bank Rakyat Indonesia	3,214,286	7,227,178	14,457,320	<i>Bank Rakyat Indonesia</i>
Bank Negara Indonesia	2,642,858	1,357,143	928,571	<i>Bank Negara Indonesia</i>
Bank Mandiri	2,589,286	875,000	875,000	<i>Bank Mandiri</i>
Bank DKI	--	1,000,000	--	<i>Bank DKI</i>
Jumlah pihak berelasi	8,446,430	10,459,321	16,260,891	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4,170,300	4,344,300	--	<i>Sumitomo Mitsui Banking Corporation</i>
CIMB Niaga	--	4,000,000	--	<i>CIMB Niaga</i>
Bank Central Asia	1,000,000	1,000,000	1,000,000	<i>Bank Central Asia</i>
Export Development Canada	521,287	543,037	508,050	<i>Export Development Canada</i>
Japan Bank for International Corporation	835,038	--	--	<i>Japan Bank for International Corporation</i>
Standard Chartered Bank	202,122	214,715	209,707	<i>Standard Chartered Bank</i>
Kreditanstalt für Wiederaufbau	128,916	--	--	<i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>
Korean Exim Bank	82,248	--	--	<i>Korean Exim Bank</i>
Servizi Assicurativi del Commercio Estero	47,537	--	--	<i>Servizi Assicurativi del Commercio Estero</i>
Export Guarantee and Insurance Corporation	19,708	--	--	<i>Export Guarantee and Insurance Corporation</i>
Agence Francaise De Development	9,196	--	--	<i>Agence Francaise De Development</i>
Mizuho Bank	115,796	--	--	<i>Mizuho Bank</i>
Jumlah pihak ketiga	7,132,148	10,102,052	1,717,757	Total third parties
Subjumlah	15,578,578	20,561,373	17,978,648	Subtotal
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	21,693,338	28,145,737	26,548,747	<i>Total current maturities</i>
Bagian jangka panjang	184,023,820	152,965,997	116,017,364	Long-term portion
	2019	2018	2017	
Tingkat suku bunga per tahun				Interest rate per annum
Rupiah	6.3654% - 10.17%	6.2019% - 9.96%	6.2019% - 9.6119%	<i>Rupiah</i>
US\$	2.41255% - 6.7209%	1.90583% - 6.7209%	1.67894% - 5.6383%	<i>US\$</i>
JPY	1.58% - 1.74%	1.58% - 1.74%	1.58%	<i>JPY</i>
EUR	0.00% - 2.20%	0.00% - 2.20%	0.25% - 2.1%	<i>EUR</i>

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, details of bank loans in foreign currency are as follows:

	2019		2018		2017		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
US\$	6,292,235,622	87,468,367	5,043,916,295	73,040,952	3,035,228,648	41,121,278	<i>US\$</i>
EUR	304,144,617	4,741,188	177,151,348	2,933,591	134,312,461	2,172,318	<i>EUR</i>
JPY	51,897,893,380	6,641,197	31,192,959,687	4,089,868	6,012,420,140	722,804	<i>JPY</i>
Jumlah		98,850,752		80,064,411		44,016,400	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman terkait program percepatan

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (“EPC”) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Loans related to fast track program

The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85% of the value of *Engineering Procurement and Construction* (“EPC”) contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Perpres No. 91 Year 2007, which superseded Perpres No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

As of December 31, 2019, 2018, and 2017, details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ <i>Creditor and project funded</i>	Fasilitas maksimum/ <i>Maximum facility</i>		Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>			Premi asuransi/ <i>Insurance premium</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Date of maturity</i>
		US\$ *)	Rp	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp		
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/ <i>West Java</i>	592	--	779,169	785,255	733,042	55	27 Mei 2021/ <i>May 27, 2021</i>
2	The Export/ Import Bank of China/ PLTU 2 Palton, Jawa Timur/ <i>East Java</i>	331	--	344,331	335,422	321,691	32	30 Januari 2023/ <i>January 30, 2023</i>
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	2,741,298	--	195,807	391,614	--	23 Juli 2018/ <i>July 23, 2018</i>
4	The Export Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	--	335,965	327,272	313,875	27	30 Januari 2023/ <i>January 30, 2023</i>
5	Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ <i>Central Java</i>	262	--	370,944	374,767	347,762	--	3 Desember 2021/ <i>December 3, 2021</i>
6	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah PLTU Maluku Utara	--	4,732,000	37,024	295,737	676,000	--	24 April 2019/ <i>April 24, 2019</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility		Pembayaran kembali/ Repayment			Premi asuransi/ Insurance premium US\$ *)	Tanggal jatuh tempo/ Date of maturity
		US\$ *)	Rp	2019	2018	2017		
				Rp	Rp	Rp		
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia PLTU Sulawesi Selatan/ South Sulawesi PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/ South Kalimantan	--	2,074,739	--	193,903	193,903	--	30 Januari 2019/ January 30, 2019
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ Central Java	--	1,911,480	--	68,267	273,069	--	18 April 2018/ April 18, 2018
9	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat/ West Java	--	1,874,315	--	257,663	257,663	--	29 Juli 2018/ July 29, 2018
10	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	--	1,606,612	178,512	178,512	178,512	--	29 Juli 2021/ July 29, 2021
11	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	--	1,498,513	--	195,418	195,418	--	29 Juli 2018/ July 29, 2018
12	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/ West Java	--	1,272,913	--	41,106	164,422	--	23 Februari 2018/ February 23, 2018
13	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Sumatera Utara, Medan	--	1,240,661	--	115,154	115,154	--	29 Juli 2018/ July 29, 2018
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	1,077,578	--	75,543	151,086	--	18 April 2018/ April 18, 2018
15	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/ South Sulawesi PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/ South Kalimantan	--	1,151,005	41,107	164,429	164,429	--	30 Januari 2019/ January 30, 2019
16	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/ East Java	--	1,045,924	130,741	130,741	130,741	--	29 Juli 2021/ July 29, 2021
17	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	--	735,387	--	61,151	122,303	--	18 April 2018/ April 18, 2018
	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/ East Java	--	600,635	--	42,800	85,600	--	18 April 2018/ April 18, 2018
19	The Export Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	482	--	665,997	648,766	622,208	46	21 Januari 2025/ January 21, 2025
	PLTU NAD	124	--	153,434	149,464	143,346	12	21 Juli 2024/ July 21, 2024
20	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	455	--	607,678	628,421	580,756	46	4 Mei 2022/ May 4, 2022

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility		Pembayaran kembali/ Repayment			Premi asuransi/ Insurance premium US\$ *)	Tanggal jatuh tempo/ Date of maturity
		US\$ *)	Rp	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp		
21	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	--	1,155,352	41,263	165,050	165,050	--	30 Januari 2019/ January 30, 2019
22	The Export Import Bank of China/ PLTU Pacitan	293	--	359,255	349,960	335,634	29	2 Juli 2025/ July 2, 2025
23	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatera Utara/ North Sumatera	--	3,941,772	346,543	346,543	346,543	--	14 Oktober 2019/ October 14, 2019
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Mandiri/ Transmisi/ Transmission	--	2,613,012	373,287	373,287	373,287	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/ Transmisi/ Transmission	--	327,195	46,742	46,742	46,742	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
26	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	625	--	805,295	827,926	765,129	--	14 Oktober 2022/ October 14, 2022
27	China Development Bank/ PLTU Sumbang	138	--	174,192	173,739	164,157	--	14 Oktober 2022/ October 14, 2022
28	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar - awar	372	--	505,422	504,516	476,689	34	14 Desember 2022/ December 14, 2022
29	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ Transmisi/ Transmission	--	1,930,063	275,723	275,723	275,723	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
30	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/ PLTU Riau dan/ and PLTU Kalbar	--	1,080,598	99,793	99,793	99,793	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/ Transmission	--	1,067,684	149,547	149,547	149,547	--	27 Desember 2020/ December 27, 2020
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	--	2,225,000	317,857	79,464	--	--	12 November 2025/ November 12, 2025
33	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU Kalimantan Timur/ East Kalimantan	--	2,449,963	349,995	--	--	--	17 Desember 2025/ December 17, 2025
Jumlah/Total		3,958	40,353,700	7,489,816	8,657,888	9,360,888	281	

*) Dalam jutaan/In million

	2019	2018	2017	Interest rate per annum
Tingkat suku bunga per tahun				
Rupiah	6.36540% - 9.2119%	6.1398% - 9.2119%	6.2019% - 8.8625%	Rupiah
US\$	2.69925% - 6.7209%	2.4389% - 6.7209%	2.0649% - 5.6383%	US\$

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pinjaman Perusahaan 2011

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000, dengan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp875.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.750.000, Rp2.625.000, dan Rp3.500.000.

Pinjaman Perusahaan 2016

Pada tanggal 19 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.000.000.

Pinjaman Perusahaan 2018

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp9.900.000 yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp9.900.000.

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Kredit Modal Kerja 2011

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp15.000.000, dengan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit ini diubah menjadi Rp9.000.000 dengan jatuh tempo

Loans not related to fast track program

Bank Mandiri

Corporate Loan 2011

On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp7,000,000, with maturity date on October 23, 2021. The principal loan repayment as of December 31, 2019, 2018, and 2017 is amounted to Rp875,000, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp1,750,000, Rp2,625,000, and Rp3,500,000, respectively.

Corporate Loan 2016

On December 19, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by Bank Mandiri. This credit facility will mature on December 19, 2026. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000, respectively.

Corporate Loan 2018

On August 21, 2018, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp9,900,000 coordinated by Bank Mandiri. This credit facility will mature on August 21, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp9,900,000.

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Working Capital Loan 2011

In June 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facility coordinated by BRI amounting to Rp15,000,000, with maturity date on June 21, 2012. This loan facility has been amended several times. On July 8, 2015, the credit facility was changed to Rp9,000,000 with maturity date was extended to June 21, 2016.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

diperpanjang sampai 21 Juni 2016. Perubahan di tahun 2016 terjadi pada tanggal 21 Juni 2016 yaitu perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp15.000.000 dengan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2017. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 9 September 2016, yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp20.000.000. Perubahan terakhir di tahun 2016 pada tanggal 17 November 2016 yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp28.000.000. Pada 23 Juli 2018 fasilitas ini diperpanjang jatuh temponya menjadi 21 Juni 2019. Pada tanggal 19 Juli 2019, tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp23.735.602, Rp34.014.081, dan Rp37.800.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp4.012.892, dan Rp12.957.323.

Amendment during 2016 was first occurred on June 21, 2016 with changes on the amount of credit facility to become Rp15,000,000 with maturity date was extended until June 21, 2017. Further amendment was occurred on September 9, 2016 where the credit facility was amended to Rp20,000,000. The latest amendment was on November 17, 2016 where the credit facility was amended to Rp28,000,000. On July 23, 2018 the credit facility maturity date was extended to June 21, 2019. On July 19, 2019, the maturity date of the principal has been amended to June 21, 2020. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to Rp23,735,602, Rp34,014,081, and Rp37,800,000, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to nil, Rp4,012,892, and Rp12,957,323, respectively.

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia tahun 2019, 2018, dan 2017 sebagai berikut:

Cash flows of withdrawal and payment of the Bank Rakyat Indonesia loan in 2019, 2018, and 2017 are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Penarikan	19,722,711	25,069,650	37,257,322	Withdrawal
Pembayaran	(23,735,602)	(34,014,081)	(37,800,000)	Payment
Bersih	(4,012,891)	(8,944,431)	(542,678)	Net

Pinjaman Perusahaan 2012

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp8.500.000. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 November 2022. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.214.286. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.642.857, Rp4.857.143, dan Rp6.071.428.

Corporate Loan 2012

On December 21, 2012, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BRI amounting to Rp8,500,000. The maturity date of the principal is on November 23, 2022. The principal loan repayment as of December 31, 2019, 2018, and 2017 is amounted to Rp1,214,286, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp3,642,857, Rp4,857,143, and Rp6,071,428, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2014

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp2.000.000 dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018,

Corporate Loan 2014

On December 17, 2014, the Company obtained an investment credit facility from BRI amounting to Rp2,000,000, with maturity date on December 17, 2024. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp285.714, Rp285.714, dan nihil. Jumlah pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.428.572, Rp1.714.286, dan Rp2.000.000.

amounted to Rp285,714, Rp285,714, and nil, respectively. The outstanding balance of this facility as of December 31, 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp1,428,572, Rp1,714,286, and Rp2,000,000, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2015

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp12.000.000. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.714.286, nihil, dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp10.285.714, Rp12.000.000, dan Rp12.000.000.

Corporate Loan 2015

On December 17, 2015, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BRI amounting to Rp12,000,000. The maturity date of the principal is on December 17, 2025. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to Rp1,714,286, nil, and nil, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp10,285,714, Rp12,000,000, and Rp12,000,000, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2016

Pada tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dikoordinasi oleh BRI melalui skema tripartit dengan PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp4.402.500 dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 fasilitas pinjaman tersebut dialihkan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke Perusahaan seiring dengan terpenuhinya syarat pengalihan utang yang salah satunya adalah telah berakhirnya periode penarikan, sehingga debitur pinjaman berubah dari semula PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.977.388, nihil, dan nihil.

Corporate Loan 2016

On May 23, 2016, the Company obtained a syndicated credit facility coordinated by BRI through a three-part scheme with PT Waskita Karya (Persero) amounting to Rp4,402,500, with maturity date on May 23, 2023. On December 31, 2019, the loan facility has been transferred to the Company as the loan transfer requirements were met, ie. the loan withdrawal period has ended, therefore the debtor has changed from PT Waskita Karya (Persero) Tbk to the Company. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp3,977,388, nil, and nil, respectively.

Pinjaman Sindikasi 2018

Pada tanggal 14 November 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman sindikasi dari BRI sebesar Rp4.506.787 dengan tanggal jatuh tempo 14 November 2028. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.318.079 dan nihil.

Syndicated Loan 2018

On November 14, 2018, the Company obtained syndicated loan from BRI amounting to Rp4,506,787 with maturity date on November 14, 2028. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp1,318,079 and nil, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman Perusahaan 2019

Pada tanggal 23 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp13.250.000 dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 23 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp13.250.000.

Bank Negara Indonesia (“BNI”)

Pinjaman Perusahaan 2014

Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp6.500.000 yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp928.571, Rp928.571, dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.642.857, Rp5.571.429, Rp6.500.000.

Pinjaman Perusahaan 2016

Pada tanggal 9 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp428.571, nihil, dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp11.571.429, Rp12.000.000, dan Rp12.000.000.

Bank DKI

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank DKI sebesar Rp1.000.000 dengan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019. Pada tanggal 31 Mei 2019, tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 8 Juni 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.000.000 dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil dan Rp1.000.000.

Corporate Loan 2019

On April 23, 2019, the Company obtained an investment credit facility from BRI amounting to Rp13,250,000, with will mature on April 23, 2029. As of December 31, 2019, the principal loan repayment amounted to nil. As of December 31, 2019 the outstanding balance of this facility amounted to Rp13,250,000.

Bank Negara Indonesia (“BNI”)

Corporate Loan 2014

On December 18, 2014, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp6,500,000 coordinated by BNI. This credit facility will mature on December 18, 2024. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to Rp928,571, Rp928,571, and nil, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,642,857, Rp5,571,429, and Rp6,500,000, respectively.

Corporate Loan 2016

On September 9, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by BNI. This credit facility will mature on September 9, 2026. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to Rp428,571, nil, and nil, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp11,571,429, Rp12,000,000, and Rp12,000,000, respectively.

Bank DKI

On June 8, 2018, the Company obtained a bilateral working capital loan facility from Bank DKI amounting to Rp1,000,000, with maturity date on June 8, 2019. On May 31, 2019, the maturity date of the principal has been amended to June 8, 2020. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp2,000,000 and nil, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil and Rp1,000,000, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Bank Tabungan Negara (“BTN”)

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral dari BTN sebesar Rp1.500.000, dengan jatuh tempo pada 24 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp1.500.000.

Bank Central Asia (“BCA”)

Pinjaman Perusahaan 2013

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp7.000.000, dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.000.000, Rp5.000.000, dan Rp6.000.000.

Pinjaman Perusahaan 2017

Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp12.000.000, dengan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.000.000

Bank Maybank Indonesia

Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar Rp4.300.000, dengan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.300.000.

Bank Tabungan Negara (“BTN”)

On April 24, 2019, the Company obtained a bilateral capital loan facility from BTN amounting to Rp1,500,000, with maturity date on April 24, 2029. As of December 31, 2019, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to Rp1,500,000.

Bank Central Asia (“BCA”)

Corporate Loan 2013

On December 23, 2013, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BCA amounting to Rp7,000,000, with maturity date on December 23, 2023. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to Rp1,000,000, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,000,000, Rp5,000,000, and Rp6,000,000, respectively.

Corporate Loan 2017

On November 2, 2017, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BCA amounting to Rp12,000,000, with maturity date on November 2, 2027. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000, respectively.

Bank Maybank Indonesia

On November 2, 2017, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Maybank Indonesia amounting to Rp4,300,000, with maturity date on November 2, 2027. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,300,000, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Bank CIMB Niaga

Pada tanggal 6 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000 dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 and 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp2.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp4.000.000.

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp4.000.000.

Pada tanggal 23 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.500.000. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp3.500.000.

Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 26 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum perusahaan sebesar Rp1.400.000 dari Bank HSBC Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.400.000 dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Bank CIMB Niaga

On June 6, 2018, the Company obtained a bilateral working capital loan facility from Bank CIMB Niaga amounting to Rp4,000,000, with maturity date on June 6, 2019. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp4,000,000 and Rp2,000,000. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil and Rp4,000,000, respectively.

On August 21, 2018, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank CIMB Niaga amounting to Rp4,000,000. The maturity date of the principal is on August 21, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,000,000.

On April 23, 2019, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank CIMB Niaga amounting to Rp3,500,000. The maturity date of the principal is on April 23, 2029. As of December 31, 2019, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 the outstanding balance of this facility amounted to Rp3,500,000.

Bank HSBC Indonesia

On June 26, 2018, the Company obtained a bilateral general purpose credit facility amounting to Rp1,400,000 from Bank HSBC Indonesia. This credit facility will mature on June 26, 2019. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp1,400,000 and nil, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Citibank

Pada tanggal 20 Maret 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Citibank sebesar Rp500.000, dengan jatuh tempo pada 20 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp500.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 17 Juli 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum perusahaan sebesar Rp2.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman atas fasilitas ini nihil.

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *revolving onshore* dan *offshore* sebesar US\$150.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$125.000.000 (setara Rp1.758.625), US\$25.000.000 (setara Rp351.725) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing adalah nihil.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *onshore* dan *offshore* sebesar US\$1.000.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar US\$502.600.000 (setara Rp6.986.643) dan US\$197.400.000 (setara Rp2.744.057).

Citibank

On March 20, 2019, the Company obtained a working capital loan facility from Citibank amounting to Rp500,000, with maturity date on March 20, 2020. As of December 31, 2019, the principal loan repayment amounted to Rp500,000. As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to nil.

Bank DBS Indonesia

On July 17, 2018, the Company obtained a bilateral general purpose credit facility amounting to Rp2,000,000 from Bank DBS Indonesia. This credit facility will mature on July 17, 2019. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility has been amounted to nil.

On December 28, 2018, the Company obtained a revolving loan facilities onshore and offshore amounting to US\$150,000,000 from Bank DBS Indonesia. This credit facility will mature on December 28, 2022. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to US\$125,000,000 (equivalent to Rp1,758,625), US\$25,000,000 (equivalent to Rp351,725) and nil. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted nil, respectively.

On June 25, 2019, the Company obtained a loan facility onshore and offshore amounting to US\$1,000,000,000 from Bank DBS Indonesia. This credit facility will mature on June 25, 2024. As of December 31, 2019, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to US\$502,600,000 (equivalent to Rp6,986,643) and US\$197,400,000 (equivalent to Rp2,744,057).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tokyo Mitsubishi Bank

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk pendanaan investasi dan tujuan umum perusahaan sebesar US\$100.000.000 dari Tokyo Mitsubishi Bank. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar US\$100.000.000 (setara Rp1.390.100) dan nihil.

Standard Chartered Bank ("SCB")

Fasilitas Arun

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Arun sebesar EUR90.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR7.061.853 (setara Rp111.828), EUR7.061.853 (setara Rp121.703), dan EUR7.061.853 (setara Rp106.618). Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR56.494.826 (setara Rp880.675), EUR63.556.679 (setara Rp1.052.486), dan EUR70.618.532 (setara Rp1.142.156).

Fasilitas Bangkanai

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR70.850.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR5.904.167 (setara Rp93.496), EUR5.904.167 (setara Rp101.751), dan EUR5.904.167 (setara Rp89.140). Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR47.233.333 (setara Rp736.302), EUR53.137.500 (setara Rp879.946), dan EUR59.041.666 (setara Rp954.916).

Tokyo Mitsubishi Bank

On December 13, 2018, the Company obtained a credit facility to finance capital expenditure and general corporate purposes amounting to US\$100,000,000 from Tokyo Mitsubishi Bank. This credit facility will mature on December 13, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US\$100,000,000 (equivalent to Rp1,390,100) and nil, respectively.

Standard Chartered Bank ("SCB")

Arun Facility

On December 11, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Arun Solar and Steam Power Plant ("PLTMG") amounting to EUR90,000,000. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to EUR7,061,853 (equivalent to Rp111,828), EUR7,061,853 (equivalent to Rp121,703), and EUR7,061,853 (equivalent to Rp106,618), respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to EUR56,494,826 (equivalent to Rp880,675), EUR63,556,679 (equivalent to Rp1,052,486), and EUR70,618,532 (equivalent to Rp1,142,156), respectively.

Bangkanai Facility

On December 23, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Bangkanai PLTMG amounting to EUR70,850,000. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to EUR5,904,167 (equivalent to Rp93,496), EUR5,904,167 (equivalent to Rp101,751), and EUR5,904,167 (equivalent to Rp89,140), respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to EUR47,233,333 (equivalent to Rp736,302), EUR53,137,500 (equivalent to Rp879,946), and EUR59,041,666 (equivalent to Rp954,916), respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Agence Francaise De Development (“AFD”)

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar EUR100.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR28.679.640 (setara Rp447.076), EUR22.637.636 (setara Rp374.875), dan EUR4.001.121 (setara Rp64.713).

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar EUR1.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR589.943 (setara Rp9.196), EUR58.841 (setara Rp974), dan nihil.

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”)

Pada tanggal 8 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Kamojang PP sebesar EUR60.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR1.011.956 (setara Rp15.775), EUR840.564 (setara Rp13.920), dan EUR651.141 (setara Rp10.531).

Pada tanggal 8 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk 1000 Islands Renewable Energy for Electrification Program (Pilot Phase in Nusa Tenggara Timur) sebesar EUR65.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal dan 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR326.270 (setara Rp5.086), EUR326.270 (setara Rp5.403), dan nihil.

Agence Francaise De Development (“AFD”)

On May 7, 2015, the Company obtained a credit facility from AFD for Trans GIS amounting to EUR100,000,000 with maturity date until May 7, 2030. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to EUR28,679,640 (equivalent to Rp447,076), EUR22,637,636 (equivalent to Rp374,875), and EUR4,001,121 (equivalent to Rp64,713), respectively.

On May 7, 2015, the Company obtained a credit facility from AFD for Trans GIS amounting to EUR1,000,000 with maturity date until May 7, 2020. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 the outstanding balance of this facility amounted to EUR589,943 (equivalent to Rp9,196), EUR58,841 (equivalent to Rp974), and nil respectively.

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”)

On May 8, 2015, the Company obtained a credit facility from KfW for Kamojang PP amounting to EUR60,000,000 with maturity date until June 30, 2030. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to EUR1,011,956 (equivalent to Rp15,775), EUR840,564 (equivalent to Rp13,920), and EUR651,141 (equivalent to 10,531), respectively.

On May 8, 2015, the Company obtained a credit facility from KfW for 1000 Islands Renewable Energy for Electrification Program (Pilot Phase in Nusa Tenggara Timur) amounting to EUR65,000,000 with maturity date until June 30, 2030. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to EUR326,270 (equivalent to Rp5,086), EUR326,270 (equivalent to Rp5,403), and nil, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 15 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Bangkanai Peaker sebesar EUR82.699.200 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 Desember 2028. Pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR8.269.920 (setara Rp131.165), nihil, dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR38.849.075 (setara Rp605.603), nihil, dan nihil.

Asian Development Bank (“ADB”)

Pada tanggal 4 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk penguatan gardu induk regional Sumatera sebesar US\$575.000.000 dan US\$25.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 September 2035. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$556.439.836 (setara Rp7.735.070), US\$24.215.666 (setara Rp336.622); US\$444.481.255 (setara Rp6.436.533), US\$19.378.064 (setara Rp280.614); dan US\$285.564.000 (setara Rp3.868.821), US\$12.436.000 (setara Rp168.483).

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk akses energi berkelanjutan di kawasan Indonesia timur sebesar US\$600.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 Mei 2037. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$434.730.000 (setara Rp6.043.182), US\$334.500.000 (setara Rp4.843.894), dan US\$150.000.000 (setara Rp2.032.200).

**Export Development Canada (“EDC”) dan
Hungarian Export Import Bank Private
Limited Company (“HEXIM”)**

Pada tanggal 1 Mei 2017 Perusahaan memperoleh pendanaan untuk Batam mobile power plant US\$14.111.753 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar

On September 15, 2017, the Company obtained a credit facility from KfW for Bangkanai Peaker amounting to EUR82,699,200 with maturity date until December 15, 2028. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the principal loan repayment amounted to EUR8,269,920 (equivalent to Rp131,165), nil, and nil, respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to EUR38,849,075 (equivalent to Rp605,603), nil, and nil, respectively.

Asian Development Bank (“ADB”)

On December 4, 2015, the Company obtained a credit facility from ADB for grid strengthening of Sumatera region amounting to US\$575,000,000 and US\$25,000,000 with maturity date until September 15, 2035. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US\$556,439,836 (equivalent to Rp7,735,070), US\$24,215,666 (equivalent to Rp336,622); US\$444,481,255 (equivalent to Rp6,436,533), US\$19,378,064 (equivalent to Rp280,614); and US\$285,564,000 (equivalent to Rp3,868,821), US\$12,436,000 (equivalent to Rp168,483), respectively.

On October 10, 2017, the Company obtained a credit facility from ADB for sustainable energy access in eastern Indonesia amounting to US\$600,000,000 with maturity date until May 15, 2037. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to US\$434,730,000 (equivalent to Rp6,043,182), US\$334,500,000 (equivalent to Rp4,843,894), and US\$150,000,000 (equivalent to Rp2,032,200), respectively.

**Export Development Canada (“EDC”) and
Hungarian Export Import Bank Private
Limited Company (“HEXIM”)**

On May 1, 2017, the Company obtained a credit facility for Batam mobile power plant amounting to US\$14,111,753, with maturity date on January 27, 2029. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, principal loan repayment amounted to US\$1,175,979 (equivalent to Rp16,518), US\$1,175,979 (equivalent to

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

US\$1.175.979 (setara Rp16.518),
US\$1.175.979 (setara Rp16.293), dan
US\$587.989 (setara Rp7.871). Pada tanggal
31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah
pinjaman atas fasilitas ini masing-masing
sebesar US\$11.171.804 (setara Rp155.299),
US\$12.347.784 (setara Rp178.809), dan
US\$13.523.763 (setara Rp183.220).

*Rp16,293), and US\$587,989 (equivalent to
Rp7,871), respectively. As of December 31,
2019 and 2018, the outstanding balance of this
facility amounted to US\$11,171,804 (equivalent
to Rp155,299), US\$12,347,784 (equivalent to
Rp178,809), and US\$13,523,763 (equivalent to
Rp183,220), respectively.*

Pada tanggal 2 Desember 2016 Perusahaan
memperoleh pendanaan untuk Batam *mobile
power plant* sebesar US\$435.888.247 dengan
jatuh tempo 27 Januari 2029. Pada tanggal
31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah
pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini
masing-masing sebesar US\$36.324.021
(setara Rp511.461), US\$36.324.021 (setara
Rp503.269), dan US\$18.162.010 (setara
Rp243.135). Pada tanggal 31 Desember 2019,
2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas
ini masing-masing sebesar US\$345.078.196
(setara Rp4.796.932), US\$381.402.216 (setara
Rp5.523.085), dan US\$417.726.237 (setara
Rp5.659.355).

*On December, 2 2016, the Company obtained
a credit facility for Batam mobile power plant
amounting to US\$435,888,247, with maturity
date on January 27, 2029. As of December 31,
2019, 2018, and 2017, the loan repayment
amounted to US\$36,324,021 (equivalent to
Rp511,461), US\$36,324,021 (equivalent to
Rp503,269), and US\$18,162,010 (equivalent to
Rp243,135), respectively. As of December 31,
2019, 2018, and 2017, the outstanding balance
of this facility amounted to US\$345,078,196
(equivalent to Rp4,796,932), US\$381,402,216
(equivalent to Rp5,523,085), and
US\$417,726,237 (equivalent to Rp5,659,355),
respectively.*

**Japan Bank for International Cooperation
("JBIC")**

Pada tanggal 14 Maret 2016, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
("PLTU") Lontar sebesar US\$107.595.235,
US\$71.730.158, dan JPY16.429.527.239
Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada
tanggal 1 Oktober 2031. Pada tanggal
31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak
terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini.
Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan
2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-
masing sebesar US\$77.504.709 (setara
Rp1.077.393), US\$51.669.807 (setara
Rp718.262), JPY12.906.010.017 (setara
Rp1.651.538); dan US\$35.594.440 (setara
Rp515.442), US\$23.729.627 (setara
Rp343.629), JPY8.459.647.869 (setara
Rp1.109.188); dan US\$5.742.620 (setara
Rp77.801), US\$4.750.638 (setara Rp64.362),
JPY1.210.686.890 (setara Rp145.547).

**Japan Bank for International Cooperation
("JBIC")**

*On March 14, 2016, the Company obtained
credit facilities to finance the construction of
Lontar Steam Electricity Power Plant ("PLTU")
amounting to US\$107,595,235,
US\$71,730,158, and JPY16,429,527,239. This
credit facilities will mature on October 1, 2031.
As of December 31, 2019, 2018, and 2017,
there is no principal loan repayment. As of
December 31, 2019, 2018, and 2017, the
outstanding balance of this facilities amounted
to US\$77,504,709 (equivalent to Rp1,077,393),
US\$51,669,807 (equivalent to Rp718,262),
JPY12,906,010,017 (equivalent to
Rp1,651,538); and US\$35,594,440 (equivalent
to Rp515,442), US\$23,729,627 (equivalent to
Rp343,629), JPY8,459,647,869 (equivalent to
Rp1,109,188); and US\$5,742,620 (equivalent
to Rp77,801), US\$4,750,638 (equivalent to
Rp64,362), JPY1,210,686,890 (equivalent to
Rp145,547), respectively.*

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai
pembangunan PLTU Jawa 2 Priok sebesar
US\$27.224.192, US\$18.149.462, dan
JPY31.762.594.907. Fasilitas kredit tersebut

*On October 20, 2016, the Company obtained
credit facilities to finance the construction of
Jawa 2 Priok PLTU amounting to
US\$27,224,192, US\$18,149,462 and
JPY31,762,594,907 This credit facilities will*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

akan berakhir pada tanggal 30 April 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$1.890.569 (setara Rp26,765) dan JPY1.323.442.000 (setara Rp174.183), nihil, dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$27.224.192 (setara Rp378.444), US\$16.258.893 (setara Rp226.015), JPY29.503.437.209 (setara Rp3.775.455); dan US\$22.331.494 (setara Rp323.382), US\$14.887.663 (setara Rp215.588), JPY22.669.821.318 (setara Rp2.972.356); dan US\$7.540.697 (setara Rp102.161), JPY4.801.733.250 (setara Rp577.257).

Pada tanggal 10 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Fasilitas Muara Karang sebesar US\$22.338.000, US\$14.892.000, dan JPY15.449.450.242. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Maret 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$1.551.250 (setara Rp21.780), JPY643.728.000 (setara Rp82.860) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$11.323.380 (setara Rp157.406), US\$5.997.670 (setara Rp83.374), JPY4.950.355.212 (setara Rp633.480); dan US\$62.640 (setara Rp907), US\$41.760 (setara Rp605), JPY63.490.500 (setara Rp8.325); dan nihil.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Fasilitas PLTU Kalimantan Selatan sebesar US\$53.474.026, US\$35.649.351, dan JPY16.939.168.268. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$15.060.366 (setara Rp209.354), US\$10.040.244 (setara Rp139.569), JPY4.538.090.942 (setara Rp580.724); dan nihil dan nihil.

mature on April 30, 2031. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the loan repayment amounted to US\$1,890,569 (equivalent to Rp26,765), and JPY1,323,442,000 (equivalent to Rp174,183), nil, and nil. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facilities amounted to US\$27,224,192 (equivalent to Rp378,444), US\$16,258,893 (equivalent to Rp226,015), JPY29,503,437,209 (equivalent to Rp3,775,455); and US\$22,331,494 (equivalent to Rp323,382), US\$14,887,663 (equivalent to Rp215,588), JPY22,669,821,318 (equivalent to Rp2,972,356); and US\$7,540,697 (equivalent to Rp102,161), JPY4,801,733,250 (equivalent to Rp577,257), respectively.

On March 10, 2017, the Company obtained credit facilities to finance the construction of Muara Karang facilities amounting to US\$22,338,000, US\$14,892,000, and JPY15,449,450,242. This credit facilities will mature on March 10, 2032. As of December 31, 2019 and 2018, the loan repayment amounted to US\$1,551,250 (equivalent to Rp21,780), JPY643,728,000 (equivalent to Rp82,860) and nil. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facilities amounted to US\$11,323,380 (equivalent to Rp157,406), US\$5,997,670 (equivalent to Rp83,374), JPY4,950,355,212 (equivalent to Rp633,480); and US\$62,640 (equivalent to Rp907), US\$41,760 (equivalent to Rp605), JPY63,490,500 (equivalent to Rp8,325); and nil, respectively.

On June 20, 2017, the Company obtained credit facilities to finance the construction of South Kalimantan PLTU amounting to US\$53,474,026, US\$35,649,351, and JPY16,939,168,268. This credit facilities will mature on June 20, 2032. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facilities amounted to US\$15,060,366 (equivalent to Rp209,354), US\$10,040,244 (equivalent to Rp139,569), JPY4,538,090,942 (equivalent to Rp580,724); and nil, and nil, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**International Bank for Reconstruction and
Development (“IBRD”)**

Pada tanggal 20 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai *Power Distribution Development Program* sebesar US\$500.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2036. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$462.368.828 (setara Rp6.427.389), US\$337.573.154 (setara Rp4.888.397), dan US\$107.650.000 (setara Rp1.458.442).

**Korea Exim Bank (“KEXIM”), Servizi
Assicurativi del Commercio Estero
(“SACE”), dan Exportni Garancni a
Pojistovaci Spolecnost (“EGAP”)**

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Grati sebesar US\$36.000.000, US\$35.000.000, US\$17.013.000, dan EUR40.376.160. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$3.000.000 (setara Rp42.329), US\$2.916.667 (setara Rp41.153), EUR1.417.750 (setara Rp20.029), US\$3.049.488 (setara Rp48.256) dan nihil dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 jumlah pinjaman atas fasilitas ini dari KEXIM, SACE, EGAP masing-masing sebesar US\$33.000.000 (setara Rp458.733), US\$32.083.333 (setara Rp445.990), EUR33.544.367 (setara Rp522.910), US\$15.595.250 (setara Rp216.790); dan US\$32.145.544 (setara Rp465.500), US\$31.168.137 (setara Rp451.345), EUR36.593.855 (setara Rp605.987), US\$14.410.354 (setara Rp208.676); dan nihil.

**International Bank for Reconstruction and
Development (“IBRD”)**

On May 20, 2016, the Company obtained a credit facility to finance *Power Distribution Development Program* amounting to US\$500,000,000. This credit facility will mature on March 15, 2036. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to US\$462,368,828 (equivalent to Rp6,427,389), US\$337,573,154 (equivalent to Rp4,888,397), and US\$107,650,000 (equivalent to Rp1,458,442), respectively.

**Korea Exim Bank (“KEXIM”), Servizi
Assicurativi del Commercio Estero
(“SACE”), and Exportni Garancni a
Pojistovaci Spolecnost (“EGAP”)**

On June 24, 2016, the Company obtained credit facilities to finance Grati PLTGU amounting to US\$36,000,000, US\$35,000,000, US\$17,013,000, and EUR40,376,160. This credit facilities will mature on January 24, 2031. As of December 31, 2019 and 2018, the loan repayment amounted to US\$3,000,000 (equivalent to Rp42,329), US\$2,916,667 (equivalent to Rp41,153), EUR1,417,750 (equivalent to Rp20,029), US\$3,049,488 (equivalent to Rp48,256) and nil, and nil, respectively. As of December, 2019, 2018, and 2017 the outstanding balance of this facility from KEXIM, SACE, EGAP amounted to US\$33,000,000 (equivalent to Rp458,733), US\$32,083,333 (equivalent to Rp445,990), EUR33,544,367 (equivalent to Rp522,910), US\$15,595,250 (equivalent to Rp216,790); and US\$32,145,544 (equivalent to Rp465,500), US\$31,168,137 (equivalent to Rp451,345), EUR36,593,855 (equivalent to Rp605,987), US\$14,410,354 (equivalent to Rp208,676); and nil, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Islamic Development Bank (“IDB”)

Pada tanggal 10 Januari 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai *Power Grid Enhancement Program* sebesar US\$330.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2033. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$105.375.701 (setara Rp1.464.828) dan US\$19.987.032 (setara Rp288.129), dan nihil.

**Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC)**

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Pembangkit Listrik Tenaga Air (“PLTA”) Jatigede sebesar US\$73.324.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$40.209.935 (setara Rp558.958) dan US\$24.441.729 (setara Rp353.941), dan US\$10.323.880 (setara Rp139.868).

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berjangka *offshore* sebesar US\$938.285.680 dan *onshore* sebesar US\$261.714.320. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2023. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi sebesar US\$1.022.071.430 untuk porsi *offshore* dan US\$297.928.570 untuk porsi *onshore*. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$1.012.071.430 (setara Rp14.068.805), US\$307.928.570 (setara Rp4.280.515); dan US\$1.012.071.430 (setara Rp14.655.806), US\$307.928.570 (setara Rp4.459.113).

Islamic Development Bank (“IDB”)

On January 10, 2017, the Company obtained a credit facility to finance Power Grid Enhancement Project amounting to US\$330,000,000. This credit facility will mature on August 6, 2033. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 the outstanding balance of this facility amounted to US\$105,375,701 (equivalent to Rp1,464,828) and US\$19,987,032, (equivalent to Rp288,129), and nil, respectively.

**Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC)**

On March 30, 2017, the Company obtained a credit facility to finance Jatigede Water Electricity Power Plant (“PLTA”) amounting to US\$73,324,250. This credit facility will mature on March 30, 2031. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to US\$40,209,935 (equivalent to Rp558,958) and US\$24,441,729 (equivalent to Rp353,941), and US\$10,323,880 (equivalent to Rp139,868), respectively.

On August 1, 2018, the Company obtained a term loan facilities offshore amounting to US\$938,285,680 and onshore amounting to US\$261,714,320. This credit facility will mature on August 1, 2023. As of November 9, 2018, the facilities amount are amended to US\$1,022,071,430 for the offshore portion and US\$297,928,570 for the onshore portion. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US\$1,012,071,430 (equivalent to Rp14,068,805), US\$307,928,570 (equivalent to Rp4,280,515); and US\$1,012,071,430 (equivalent to Rp14,655,806), US\$307,928,570 (equivalent to Rp4,459,113), respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *revolving* bergulir *offshore* sebesar US\$209.571.420 dan *onshore* sebesar US\$90.428.580. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2021. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi sebesar US\$205.500.000 untuk porsi *offshore* dan US\$94.500.000 untuk porsi *onshore*. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$205.500.000 (setara Rp2.856.655), US\$94.500.000 (setara Rp1.313.645); dan US\$205.500.000 (setara Rp2.975.846), US\$94.500.000 (setara Rp1.368.455).

On August 1, 2018, the Company obtained a revolving loan facilities offshore amounting to US\$209,571,420 and onshore amounting to US\$90,428,580. This credit facility will mature on August 1, 2021. As of November 9, 2018, the facilities amount are amended to US\$205,500,000 for the offshore portion and US\$94,500,000 for the onshore portion. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US\$205,500,000 (equivalent to Rp2,856,655), US\$94,500,000 (equivalent to Rp1,313,645); and US\$205,500,000 (equivalent to Rp2,975,846), US\$94,500,000 (equivalent to Rp1,368,455), respectively.

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral *offshore* sebesar US\$50.000.000 dan *onshore* sebesar US\$125.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$50.000.000 (setara Rp695.050), US\$125.000.000 (setara Rp1.737.625); dan nil.

On December 18, 2018, the Company obtained a bilateral loan facilities offshore amounting to US\$50,000,000 and onshore amounting to US\$125,000,000. This credit facility will mature on December 18, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US\$50,000,000 (equivalent to Rp695,050), US\$125,000,000 (equivalent to Rp1,737,625); and nil, respectively.

Mizuho Bank

Pada tanggal 24 Mei 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Lombok Peaker sebesar EUR74.282.743. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR3.714.137 (setara Rp58.162), nihil, dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR58.129.979 (setara Rp906.165), nihil, dan nihil.

Mizuho Bank

On May 24, 2017, the Company obtained a credit facility to finance Lombok Peaker amounting to EUR74,282,743. This credit facility will mature on May 24, 2029. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the loan repayment amounted to EUR3,714,137 (equivalent to Rp58,162), nil, and nil respectively. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the outstanding balance of this facility amounted to EUR58,129,979 (equivalent to Rp906,165) nil, and nil respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Credit Agricole CIB Paris

Pada tanggal 8 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Muara Tawar sebesar US\$280.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$119.578.745 (setara Rp1.662.264) dan US\$14.383.463 (setara Rp208.287) dan nihil.

BNP Paribas SA

Pada tanggal 19 Februari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Sumbagut 2 Peaker - CESCE Covered Facility EUR41.069.311 dan SACE Covered Facility EUR66.478.750. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR14.388.126 (setara Rp224.291), EUR22.771.799 (setara Rp354.980); dan nihil.

Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")

Pada tanggal 21 Februari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTU Lombok FTP-2 EUR80.816.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2033. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR2.125.302 (setara Rp33.130) dan nihil.

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga bank sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman bank.

Credit Agricole CIB Paris

On November 8, 2017, the Company obtained a credit facility to finance PLTGU Muara Tawar amounting to US\$280,000,000. This credit facility will mature on May 8, 2032. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 the outstanding balance of this facility amounted to US\$119,578,745 (equivalent to Rp1,662,264) and US\$14,383,463 (equivalent to Rp208,287), and nil, respectively.

BNP Paribas SA

On February 19, 2018, the Company obtained a credit facility to finance Sumbagut 2 Peaker - CESCE Covered Facility EUR41,069,311 and SACE Covered Facility EUR66,478,750. This credit facility will mature on October 9, 2031. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to EUR14,388,126 (equivalent to Rp224,291), EUR22,771,799 (equivalent to Rp354,980); and nil, respectively.

Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")

On February 21, 2018, the Company obtained a credit facility to finance PLTU Lombok FTP-2 EUR80,816,250. This credit facility will mature on February 28, 2033. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to EUR2,125,302 (equivalent to Rp33,130) and nil, respectively.

The Company made payments of principle and interest of the bank loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the bank loans.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. Utang Obligasi, Sukuk Ijarah dan KIK-EBA

**28. Bonds Payable, Sukuk Ijara and KIK-EBA
loans**

a. Obligasi dan sukuk ijarah

a. Bonds and sukuk ijarah

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
<u>Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah</u>				<u>Rupiah Bonds and Sukuk Ijara</u>
Obligasi Berkelanjutan III				Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap V Tahun 2019	1,912,900	--	--	PLN V Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III				Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap V Tahun 2019	797,500	--	--	PLN V Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III				Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap IV Tahun 2019	2,953,620	--	--	PLN IV Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III				Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap IV Tahun 2019	1,250,000	--	--	PLN IV Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III				Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap III Tahun 2019	2,393,000	--	--	PLN III Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III				Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap III Tahun 2019	863,000	--	--	PLN III Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III				Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap II Tahun 2018	832,000	832,000	--	PLN II Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III				Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap II Tahun 2018	224,000	224,000	--	PLN II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan III				Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap I Tahun 2018	1,278,500	1,278,500	--	PLN I Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III				Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap I Tahun 2018	750,000	750,000	--	PLN I Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II				Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap III Tahun 2018	2,535,000	2,535,000	--	PLN III Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II				Shelf Registration Sukuk Ijara II
PLN Tahap III Tahun 2018	698,500	698,500	--	PLN III Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II				Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap II Tahun 2017	2,545,500	2,545,500	2,545,500	PLN II Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II				Shelf Registration Sukuk Ijara II
PLN Tahap II Tahun 2017	694,500	694,500	694,500	PLN II Year 2017
Obligasi Berkelanjutan II				Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap I Tahun 2017	1,600,000	1,600,000	1,600,000	PLN I Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II				Shelf Registration Sukuk Ijara II
PLN Tahap I Tahun 2017	400,000	400,000	400,000	PLN I Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I				Shelf Registration Bonds I
PLN Tahap II Tahun 2013	651,000	651,000	1,244,000	PLN II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I				Shelf Registration Sukuk Ijara I
PLN Tahap II Tahun 2013	108,000	108,000	429,000	PLN II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I				Shelf Registration Bonds I
PLN Tahap I Tahun 2013	879,000	879,000	879,000	PLN I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I				Shelf Registration Sukuk Ijara I
PLN Tahap I Tahun 2013	121,000	121,000	121,000	PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1,855,000	1,855,000	1,855,000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340,000	340,000	340,000	Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	1,783,000	1,783,000	1,783,000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	167,000	167,000	167,000	Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010
Obligasi PLN IX Tahun 2007	1,200,000	1,200,000	1,200,000	PLN IX Bonds Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	865,000	865,000	865,000	PLN VIII Bonds Year 2006
<u>Surat Utang Jangka</u>				<u>Global Medium</u>
<u> Menengah Global - US\$</u>				<u> Term Notes - US\$</u>
Penerbitan tahun 2019	33,362,400	--	--	Issued in 2019
Penerbitan tahun 2018	41,703,000	43,443,000	--	Issued in 2018
Penerbitan tahun 2017	27,802,000	28,962,000	27,096,000	Issued in 2017
Penerbitan tahun 2012	13,901,000	14,481,000	13,548,000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	13,901,000	14,481,000	13,548,000	Issued in 2011

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
<u>Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR</u>				<u>Global Medium Term Notes - EUR</u>
Penerbitan tahun 2019	7,794,300	--	--	Issued in 2018
Penerbitan tahun 2018	7,794,300	8,279,900	--	Issued in 2018
<u>Obligasi - JPY</u>				<u>Obligasi - JPY</u>
Penerbitan tahun 2019	2,968,825	--	--	Issued in 2019
<u>Obligasi Terjamin - US\$</u>				<u>Guaranteed Notes - US\$</u>
Penerbitan tahun 2009	4,693,478	7,009,919	27,096,000	Issued in 2009
Penerbitan tahun 2007	4,007,828	4,175,046	6,774,000	Issued in 2007
Subjumlah	187,625,151	140,358,865	102,185,000	Subtotal
Biaya emisi belum diamortisasi	(6,386,375)	(6,556,432)	(830,640)	Unamortized debt issuance cost
Jumlah	181,238,776	133,802,433	101,354,360	Total
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:				Presented in consolidated statements of financial position:
Liabilitas jangka pendek	6,946,478	2,120,612	914,000	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	174,292,298	131,681,821	100,440,360	Non-current liabilities
Jumlah	181,238,776	133,802,433	101,354,360	Total

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with the following details:

	Pokok/ Principal Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ ijara fee per annum *)	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019				Shelf Registration Bonds III PLN V Year 2019
Seri A	795,700	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	7.90%	Series A
Seri B	445,000	1 Oktober 2026/ October 1, 2026	8.40%	Series B
Seri C	6,200	1 Oktober 2029/ October 1, 2029	8.60%	Series C
Seri D	166,000	1 Oktober 2034/ October 1, 2034	9.40%	Series D
Seri E	500,000	1 Oktober 2039/ October 1, 2039	9.90%	Series E
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019				Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN V Year 2019
Seri A	6,500	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	Rp513	Series A
Seri B	10,000	1 Oktober 2026/ October 1, 2026	Rp840	Series B
Seri C	92,000	1 Oktober 2029/ October 1, 2029	Rp7.912	Series C
Seri D	135,000	1 Oktober 2034/ October 1, 2034	Rp12.690	Series D
Seri E	554,000	1 Oktober 2039/ October 1, 2039	Rp54.846	Series E

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ Principal Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ ijara fee per annum *)	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019				<i>Shelf Registration Bonds III PLN IV Year 2019</i>
Seri A	637,000	1 Agustus 2024/ <i>August 1, 2024</i>	8.00%	<i>Series A</i>
Seri B	315,250	1 Agustus 2026/ <i>August 1, 2026</i>	8.50%	<i>Series B</i>
Seri C	549,000	1 Agustus 2029/ <i>August 1, 2029</i>	8.70%	<i>Series C</i>
Seri D	395,000	1 Agustus 2034/ <i>August 1, 2034</i>	9.50%	<i>Series D</i>
Seri E	1,057,370	1 Agustus 2039/ <i>August 1, 2039</i>	9.98%	<i>Series E</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN IV Year 2019</i>
Seri A	274,000	1 Agustus 2024/ <i>August 1, 2024</i>	Rp21,920	<i>Series A</i>
Seri B	368,000	1 Agustus 2026/ <i>August 1, 2026</i>	Rp31,280	<i>Series B</i>
Seri C	20,000	1 Agustus 2029/ <i>August 1, 2029</i>	Rp1,740	<i>Series C</i>
Seri D	49,000	1 Agustus 2034/ <i>August 1, 2034</i>	Rp4,655	<i>Series D</i>
Seri E	539,000	1 Agustus 2039/ <i>August 1, 2039</i>	Rp53,765	<i>Series E</i>
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019				<i>Shelf Registration Bonds III PLN III Year 2019</i>
Seri A	369,000	19 Februari 2022/ <i>February 19, 2022</i>	8.50%	<i>Series A</i>
Seri B	1,212,000	19 Februari 2024/ <i>February 19, 2024</i>	9.10%	<i>Series B</i>
Seri C	183,000	19 Februari 2026/ <i>February 19, 2026</i>	9.35%	<i>Series C</i>
Seri D	211,000	19 Februari 2029/ <i>February 19, 2029</i>	9.60%	<i>Series D</i>
Seri E	263,000	19 Februari 2034/ <i>February 19, 2034</i>	9.80%	<i>Series E</i>
Seri F	155,000	19 Februari 2039/ <i>February 19, 2039</i>	9.95%	<i>Series F</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN III Year 2019</i>
Seri A	263,000	19 Februari 2022/ <i>February 19, 2022</i>	Rp22,355	<i>Series A</i>
Seri B	263,000	19 Februari 2024/ <i>February 19, 2024</i>	Rp23,933	<i>Series B</i>
Seri C	204,000	19 Februari 2026/ <i>February 19, 2026</i>	Rp19,074	<i>Series C</i>
Seri D	45,000	19 Februari 2029/ <i>February 19, 2029</i>	Rp4,320	<i>Series D</i>
Seri E	60,000	19 Februari 2034/ <i>February 19, 2034</i>	Rp5,880	<i>Series E</i>
Seri F	28,000	19 Februari 2039/ <i>February 19, 2039</i>	Rp2,786	<i>Series F</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ Principal Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ ijara fee per annum *)	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018				<i>Shelf Registration Bonds III PLN II Year 2018</i>
Seri A	210,000	10 Oktober 2023/ <i>October 10, 2023</i>	8.65%	<i>Series A</i>
Seri B	483,000	10 Oktober 2025/ <i>October 10, 2025</i>	9.00%	<i>Series B</i>
Seri C	78,000	10 Oktober 2028/ <i>October 10, 2028</i>	9.10%	<i>Series C</i>
Seri D	15,000	10 Oktober 2033/ <i>October 10, 2033</i>	9.30%	<i>Series D</i>
Seri E	46,000	10 Oktober 2038/ <i>October 10, 2038</i>	9.65%	<i>Series E</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN II Year 2018</i>
Seri A	114,000	10 Oktober 2023/ <i>October 10, 2023</i>	Rp9,861	<i>Series A</i>
Seri B	45,000	10 Oktober 2025/ <i>October 10, 2025</i>	Rp4,050	<i>Series B</i>
Seri C	15,000	10 Oktober 2028/ <i>October 10, 2028</i>	Rp1,365	<i>Series C</i>
Seri D	50,000	10 Oktober 2038/ <i>October 10, 2038</i>	Rp4,825	<i>Series D</i>
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018				<i>Shelf Registration Bonds III PLN I Year 2018</i>
Seri A	78,500	10 Juli 2023/ <i>July 10, 2023</i>	7.80%	<i>Series A</i>
Seri B	442,000	10 Juli 2025/ <i>July 10, 2025</i>	8.35%	<i>Series B</i>
Seri C	138,000	10 Juli 2028/ <i>July 10, 2028</i>	8.40%	<i>Series C</i>
Seri D	281,000	10 Juli 2033/ <i>July 10, 2033</i>	8.90%	<i>Series D</i>
Seri E	339,000	10 Juli 2038/ <i>July 10, 2038</i>	9.00%	<i>Series E</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN I Year 2018</i>
Seri A	127,000	10 Juli 2023/ <i>July 10, 2023</i>	Rp9,906	<i>Series A</i>
Seri B	150,000	10 Juli 2025/ <i>July 10, 2025</i>	Rp12,525	<i>Series B</i>
Seri C	258,000	10 Juli 2028/ <i>July 10, 2028</i>	Rp21,672	<i>Series C</i>
Seri D	105,000	10 Juli 2033/ <i>July 10, 2033</i>	Rp9,345	<i>Series D</i>
Seri E	110,000	10 Juli 2038/ <i>July 10, 2038</i>	Rp9,900	<i>Series E</i>
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018				<i>Shelf Registration Bonds II PLN III Year 2018</i>
Seri A	457,000	22 Februari 2023/ <i>February 22, 2023</i>	6,50%	<i>Series A</i>
Seri B	10,000	22 Februari 2025/ <i>February 22, 2025</i>	6,80%	<i>Series B</i>
Seri C	341,000	22 Februari 2028/ <i>February 22, 2028</i>	7,25%	<i>Series C</i>
Seri D	362,000	22 Februari 2033/ <i>February 22, 2033</i>	8,20%	<i>Series D</i>
Seri E	1,365,000	22 Februari 2038/ <i>February 22, 2038</i>	8,75%	<i>Series E</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ Principal Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ ijara fee per annum *)	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN III Year 2018</i>
Seri A	104,000	22 Februari 2023/ <i>February 22, 2023</i>	Rp6,760	<i>Series A</i>
Seri B	88,000	22 Februari 2028/ <i>February 22, 2028</i>	Rp6,380	<i>Series B</i>
Seri C	57,500	22 Februari 2033/ <i>February 22, 2033</i>	Rp4,715	<i>Series C</i>
Seri D	449,000	22 Februari 2038/ <i>February 22, 2038</i>	Rp39,287	<i>Series D</i>
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017				<i>Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017</i>
Seri A	451,500	3 November 2022/ <i>November 3, 2022</i>	7.20%	<i>Series A</i>
Seri B	201,000	3 November 2024/ <i>November 3, 2024</i>	7.50%	<i>Series B</i>
Seri C	800,000	3 November 2027/ <i>November 3, 2027</i>	8.20%	<i>Series C</i>
Seri D	1,093,000	3 November 2032/ <i>November 3, 2032</i>	8.70%	<i>Series D</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN II Year 2017</i>
Seri A	83,500	3 November 2022/ <i>November 3, 2022</i>	Rp6,012	<i>Series A</i>
Seri B	121,000	3 November 2027/ <i>November 3, 2027</i>	Rp9,922	<i>Series B</i>
Seri C	490,000	3 November 2032/ <i>November 3, 2032</i>	Rp42,630	<i>Series C</i>
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017				<i>Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017</i>
Seri A	214,000	11 Juli 2022/ <i>July 11, 2022</i>	7.70%	<i>Series A</i>
Seri B	169,000	11 Juli 2024/ <i>July 11, 2024</i>	8.10%	<i>Series B</i>
Seri C	1,217,000	11 Juli 2027/ <i>July 11, 2027</i>	8.50%	<i>Series C</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN I Year 2017</i>
Seri A	186,000	11 Juli 2022/ <i>July 11, 2022</i>	Rp14,322	<i>Series A</i>
Seri B	214,000	11 Juli 2027/ <i>July 11, 2027</i>	Rp18,190	<i>Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				<i>Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013</i>
Seri B	651,000	10 Desember 2023/ <i>December 10, 2023</i>	9.60%	<i>Series B</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				<i>Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN II Year 2013</i>
Seri B	108,000	10 Desember 2023/ <i>December 10, 2023</i>	Rp10,368	<i>Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013				<i>Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013</i>
Seri A	182,000	5 Juli 2020/ <i>July 5, 2020</i>	8.00%	<i>Series A</i>
Seri B	697,000	5 Juli 2023/ <i>July 5, 2023</i>	8.25%	<i>Series B</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ <i>Principal</i> Rp	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ <i>Coupon rate/ ijara fee per annum *)</i>	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121,000	5 Juli 2020/ <i>July 5, 2020</i>	Rp9,680	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN I Year 2013</i>
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B	1,855,000	8 Juli 2022/ <i>July 8, 2022</i>	10.40%	<i>PLN XII Bonds Year 2010 Series B</i>
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B	340,000	8 Juli 2022/ <i>July 8, 2022</i>	Rp35,360	<i>Sukuk Ijara PLN V Year 2010 Series B</i>
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B	1,783,000	12 Januari 2020/ <i>January 12, 2020</i>	12.55%	<i>PLN XI Bonds Year 2010 Series B</i>
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B	167,000	12 Januari 2020/ <i>January 12, 2020</i>	Rp20,958	<i>Sukuk Ijara PLN IV Year 2010 Series B</i>
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B	1,200,000	10 Juli 2022/ <i>July 10, 2022</i>	10.90%	<i>PLN IX Bonds Year 2007 Series B</i>
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B	865,000	21 Juni 2021/ <i>June 21, 2021</i>	13.75%	<i>PLN VIII Bonds Year 2006 Series B</i>
Jumlah	<u>29,697,020</u>			Total

*) Imbalan ijarah per tahun disajikan dalam Rupiah penuh

*) *Ijara fee per annum are presented in Rupiah full amount*

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap V Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.912.900, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Shelf Registration Bonds III PLN V Year 2019

On October 1, 2019, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase V Year 2019 with a total nominal value amounting to Rp1,912,900 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as Trustee. The payment of interest is based on quarterly basis, starting from January 1, 2020 until the maturity date of the Bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap V Tahun 2019, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap V Tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp797.500, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp513 per tahun untuk Seri A, Rp840 per tahun untuk Seri B, Rp7.912 per

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN V Year 2019

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase V Year 2019, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase V Year 2019, with a nominal value amounting to Rp797,500 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as Trustee. The total ijara fee amounted to Rp513 per annum for Series A, Rp840 per annum for Series B, Rp7,912 per annum for

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

tahun untuk Seri C, Rp12.690 per tahun untuk Seri D, dan Rp54.846 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.953.620, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap IV Tahun 2019, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap IV Tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp1.250.000, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp21.920 per tahun untuk Seri A, Rp31.280 per tahun untuk Seri B, Rp1.740 per tahun untuk Seri C, Rp4.655 per tahun untuk Seri D, dan Rp53.765 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 19 Februari 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.393.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, Obligasi Seri E, dan Obligasi Seri F dengan Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Series C, Rp12,690 per annum for Series D, and Rp54,846 per annum for Series E which is paid based on a quarterly basis starting from January 1, 2020 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Bonds III PLN IV Year 2019

On August 1 2019, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase IV Year 2019 with a total nominal value amounting to Rp2,953,620 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The payment of interest is based on quarterly basis, starting from November 1, 2019 until the maturity date of the Bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN IV Year 2019

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase IV Year 2019, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase IV Year 2019, with a nominal value amounting to Rp1,250,000, consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The total ijara fee amounted to Rp21,920 per annum for Series A, Rp31,280 per annum for Series B, Rp1,740 per annum for Series C, Rp4,655 per annum for Series D, and Rp53,765 per annum for Series E which is paid based on a quarterly basis starting from November 1, 2019 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Bonds III PLN III Year 2019

On February 19, 2019, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase III Year 2019 with a total nominal value amounting to Rp2,393,000 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, Series E, and Series F Bonds, with Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The payment of interest is based on quarterly basis, starting from May 19, 2019 until the maturity date of the bonds.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap
III Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp863.000, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Seri E, dan Seri F dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp22.355 per tahun untuk Seri A, Rp23.933 per tahun untuk Seri B, Rp19.074 per tahun untuk Seri C, Rp4.320 per tahun untuk Seri D, Rp5.880 untuk Seri E dan Rp2.786 per tahun untuk Seri F dibayarkan setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II
Tahun 2018

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap II Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp832.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II
Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap II Tahun 2018, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap II Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp224.000, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.861 per tahun untuk seri A, Rp4.050 per tahun untuk seri B, Rp1.365 per tahun untuk seri C, dan Rp4.825 per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN III
Year 2019

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase III Year 2019, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase III Year 2019, with a nominal value amounting to Rp863,000, consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, Series E and Series F with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The total ijarah fee amounted to Rp22,355 per annum for Series A, Rp23,933 per annum for Series B, Rp19,074 per annum for Series C, Rp4,320 per annum for Series D, Rp5,880 per annum for Series E and Rp2,786 per annum for Series F which is paid based on a quarterly basis starting from May 19, 2019 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Bonds III PLN II Year
2018

On October 10, 2018, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase II Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp832,000 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is based on a quarterly basis, starting from January 10, 2019 until the maturity date of the bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN II
Year 2018

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase II Year 2018, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase II Year 2018, with a nominal value amounting to Rp224,000, consisting of Series A, Series B, Series C, and Series D with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijarah per annum fee amounting to Rp9,861 for Series A, Rp4,050 for Series B, Rp1,365 for Series C, and Rp4,825 for Series D which is payable on a quarterly basis starting from January 10, 2019 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I
Tahun 2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap I Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.278.500, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I
Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap I Tahun 2018, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap I Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.906 per tahun untuk seri A, Rp12.525 per tahun untuk seri B, Rp21.672 per tahun untuk seri C, Rp9.345 untuk Seri D, dan Rp9.900 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III
Tahun 2018

Pada tanggal 23 Februari 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.535.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III
Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III Tahun 2018, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN tahap III Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp698.500,

Shelf Registration Bonds III PLN I Year
2018

On July 10, 2018, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase I Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp1,278,500 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is payment on a quarterly basis, starting from October 10, 2018 until the maturity date of the Bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN I
Year 2018

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase I Year 2018, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase I Year 2018, with a nominal value amounting to Rp750,000, consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp9,906 for Series A, Rp12,525 for Series B, Rp21,672 for Series C, Rp9,345 for series D, and Rp9,900 for Series E which is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2018 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Bonds II PLN III Year
2018

On February 23, 2018, the Company issued Shelf Registration Bonds II PLN phase III Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp2,535,500 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The payment of interest is payable on a quarterly basis, starting from May 22, 2018 until the maturity date of the Bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN III
Year 2018

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds II PLN phase III Year 2018, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN phase III Year 2018, with a nominal value amounting

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.760 per tahun untuk seri A, Rp6.380 per tahun untuk seri B, Rp4.715 per tahun untuk seri C, dan Rp39.287 per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 3 November 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap II Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.545.500, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp694.500, terdiri dari Seri A, Seri B dan Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.012 per tahun untuk Seri A, Rp9.922 per tahun untuk Seri B, dan Rp42.630 per tahun untuk Seri C dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.600.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

to Rp698,500, consisting of Series A, Series B, Series C, and Series D with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp6,760 for Series A, Rp6,380 for Series B, Rp4,715 for Series C, and Rp39,287 for Series D which is payable on a quarterly basis, starting from May 22, 2018 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017

On November 3, 2017, the Company issued Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017 with a total nominal value amounting to Rp2,545,500 consisting of Series A, Series B, Series C, and Series D Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from February 3, 2018 until the maturity date of the Bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN II Year 2017

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah II PLN II Year 2017, with a nominal value amounting to Rp694,500 consisting of Series A, Series B and Series C with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp6,012 for Series A, Rp9,922 for Series B and Rp42,630 for Series C is payable on a quarterly basis, starting from February 3, 2018 until the maturity date of the sukuk ijarah.

Shelf Registration II PLN I Year 2017

On July 12, 2017, the Company issued Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017 with a total nominal value amounting to Rp1,600,000 consisting of Series A, Series B, and Series C Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 11, 2017 until the maturity date of the Bonds.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I
Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp400.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp14.322 per tahun untuk Seri A dan Rp18.190 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II
Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp593.000 telah dibayar keseluruhannya di 2018.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II
Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp429.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp28.890 per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp10.368 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah. Sukuk ijarah Seri A senilai Rp321.000 telah dibayar keseluruhannya di 2018.

Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN I Year
2017

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara II PLN I Year 2017, with a nominal value amounting to Rp400,000, consisting of Series A and Series B with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp14,322 for Series A Bonds and Rp18,190 for Series B Bonds which is payable on a quarterly basis, starting from October 11, 2017 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Bonds I PLN II Year
2013

On December 10, 2013, the Company issued Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp1,244,000 consisting of Series A and Series B Bonds, with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the bonds. Series A bonds amounting to Rp593,000 has been fully repaid in 2018.

Shelf Registration Sukuk Ijarah I PLN II Year
2013

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, with a nominal value amounting to Rp429,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp28,890 for Series A and Rp10,368 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the Sukuk Ijarah. Series A sukuk ijarah amounting to Rp321,000 has been fully repaid in 2018.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I
Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp879.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I
Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp121.000 dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.680 per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi PLN XII tahun 2010

Pada tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.500.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp645.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN XII Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 19 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk

Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013

On July 5, 2013, the Company issued Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp879,000 consisting of Series A and Series B Bonds with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the Bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN I Year
2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN I Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara I PLN I Year 2013 with a nominal value amounting to Rp121,000 with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp9,680 is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

PLN XII Bonds Year 2010

On July 8, 2010, the Company issued PLN XII Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,500,000 consisting of Series A and Series B Bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A bonds amounting to Rp645,000 has been fully repaid in 2015.

On March 27, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN XII Bonds Year 2010, as documented in Notarial Deed No. 19 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

Sukuk Ijarah PLN V Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XII Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN V Year 2010 with a nominal value amounting to Rp500,000, consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.520 per tahun untuk Seri A dan Rp35.360 per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijarah Seri A senilai Rp160.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 28 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 20 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN XI Tahun 2010

Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.703.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp920.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 17 April 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN XI Tahun 2007 yang tertuang dalam Akta No. 7 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp297.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.535 per tahun untuk Seri A dan Rp20.958 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijarah Seri A senilai Rp130.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp15,520 for Series A and Rp35,360 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the sukuk ijarah. Series A Sukuk Ijarah amounting to Rp160,000 has been fully repaid in 2015.

On March 28, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Sukuk Ijarah PLN V Year 2010, as documented in Notarial Deed No. 20 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

PLN XI Bonds Year 2010

On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,703,000, consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the Bonds. Series A Bonds amounting to Rp920,000 has been fully repaid in 2017.

Since April 17, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN XI Bonds Year 2007, as documented in Notarial Deed No. 7 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010 with a nominal value amounting to Rp297,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp15,535 for Series A and Rp20,958 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the sukuk ijarah. Series A Sukuk Ijarah amounting to Rp130,000 has been fully repaid in 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta No. 18 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

On March 27, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010, as documented in notarial deed No. 18 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., notary in Jakarta.

Obligasi PLN IX Tahun 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp2.700.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.500.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

PLN IX Bonds Year 2007

On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value amounting to Rp2,700,000 consisting of Series A and Series B Bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the Bonds. Series A Bonds amounting Rp1,500,000 has been fully repaid in 2017.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN IX Tahun 2007 yang tertuang dalam Akta No. 16 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

On March 27, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN IX Bonds Year 2007, as documented in notarial deed No. 16 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp2.200.100, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.335.100 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2016.

PLN VIII Bonds Year 2006

On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value amounting to Rp2,200,100 with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the Bonds. Series A Bonds amounting to Rp1,335,100 has been fully repaid in 2016.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

Sehubungan dengan penerbitan seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

In relation to the issuance of all Rupiah Bonds and Sukuk Ijara above, each trustee agreement stipulates, among others that:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh Obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.
- Seluruh Obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.
- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain: (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) mengubah bidang usaha, mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: batasan rasio keuangan antara lain rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah asset, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga.

- Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan Obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018, Obligasi berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018, Obligasi berkelanjutan II PLN Tahap III tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan II PLN Tahap III tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 digunakan untuk mendanai proyek pembangkit, transmisi

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire Bonds before the maturity date.
- The Bonds are not secured by specific collateral, but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.
- The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company's assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) change the business activities and decrease the Company's authorized, subscribed and paid-up capital.

The Company is also required to comply with certain financial covenants such as a ratio of total financial liabilities to total assets, the ratio of earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) to interest expense.

- The Company was not required to provide sinking fund for such Bonds.

The proceeds from the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN V Year 2019 and Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN V Year 2019, Shelf Registration Bonds III PLN IV Year 2019 and Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN IV Year 2019, Shelf Registration Bonds III PLN III Year 2019 and Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN III Year 2019, Shelf Registration Bonds III PLN II Year 2018 and Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN II Year 2018, Shelf Registration Bonds III PLN I Year 2018 and Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN I Year 2018, Shelf Registration Bonds II PLN III Year 2018 and Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN III Year 2018, Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017 and Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN II Year 2017 were used to finance the power plant, transmission and distribution construction projects. Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017 and Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN I Year 2017,

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dan distribusi. Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk mendanai proyek transmisi dan distribusi.

Obligasi PLN IX, Obligasi PLN VIII dan Sukuk Ijarah PLN II digunakan sebagai modal kerja.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing Obligasi dan sukuk ijarah.

Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan Sukuk Ijarah yang masing *outstanding* dan dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013 and Shelf Registration Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013 and Shelf Registration Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013, PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010 were used to finance the transmission and distribution construction projects.

Bonds PLN IX, Bonds PLN VIII, and Sukuk Ijarah PLN II were used as working capital.

The Company has complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bonds and sukuk ijarah.

Rating details on all outstanding Nonds and Sukuk Ijarah bonds owned by the Company are as follows:

Obligasi/ Bonds

Obligasi/ Bonds

PLN VIII Tahun/ Year 2006

PLN IX Tahun/ Year 2007

PLN XI Tahun/ Year 2010

PLN XII Tahun/ Year 2010

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018

Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018

Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018

Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019

Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019

Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019

Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019

2019	
Peringkat/ Rating	Lembaga pemeringkat/ Rating agency
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	
	Peringkat/ Rating	Lembaga pemeringkat/ Rating agency
PLN IV Tahun/ Year 2010	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN V Tahun/ Year 2010	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 <i>Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

**Surat Utang Jangka Menengah Global
dan Obligasi Terjamin**

Rincian Surat Utang Jangka Menengah
Global dan Obligasi Terjamin adalah
sebagai berikut:

**Global Medium Term Notes and
Guaranteed Notes**

The details of Global Medium Term Notes
and Guaranteed Notes are as follows:

	Pokok/ Principal *) US\$	Harga penerbitan/ Issuing price %	Jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate %	
Surat utang					
jangka menengah global					
<u>Penerbitan tahun 2019</u>					<u>Global medium term notes Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.775%	5 Februari 2030/ February 5, 2030	3.88%	Due in 2030
Jatuh tempo 2050	500,000,000	99.567%	5 Februari 2050/ February 5, 2050	4.375%	Due in 2050
Jatuh tempo 2029	700,000,000	99.385%	17 Juli 2029/ July 17, 2029	3.88%	Due in 2029
Jatuh tempo 2049	700,000,000	98.834%	17 Juli 2049/ July 17, 2049	4.88%	Due in 2049
Subjumlah	2,400,000,000				Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2018</u>					<u>Issued in 2018</u>
Jatuh tempo 2028	1,000,000,000	99.62%	21 Mei 2028/ May 21, 2028	5.45%	Due in 2028
Jatuh tempo 2029	500,000,000	99.00%	25 Oktober 2029/ October 25, 2029	5.375%	Due in 2029
Jatuh tempo 2048	1,000,000,000	99.32%	21 Mei 2048/ May 21, 2048	6.15%	Due in 2048
Jatuh tempo 2049	500,000,000	99.29%	25 Oktober 2049/ October 25, 2049	6.25%	Due in 2049
Subjumlah	3,000,000,000				Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ Principal *) US\$	Harga penerbitan/ Issuing price %	Jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate %	
<u>Penerbitan tahun 2017</u>					<u>Issued in 2017</u>
Jatuh tempo 2027	1,500,000,000	98.99%	15 Mei 2027/ May 15, 2027	4.13%	Due in 2027
Jatuh tempo 2047	500,000,000	98.51%	15 Mei 2047/ May 15, 2047	5.25%	Due in 2047
Subjumlah	<u>2,000,000,000</u>				Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2012</u>					<u>Issued in 2012</u>
Jatuh tempo 2042	1,000,000,000	98.51%	24 Oktober 2042/ October 24, 2042	5.25%	Due in 2042
<u>Penerbitan tahun 2011</u>					<u>Issued in 2011</u>
Jatuh tempo 2021	1,000,000,000	99.05%	22 November 2021/ November 22, 2021	5.50%	Due in 2021
Obligasi terjamin					Guaranteed notes
<u>Penerbitan tahun 2009</u>					<u>Issued in 2009</u>
Jatuh tempo 2020	337,636,000	99.15%	20 Januari 2020/ January 20, 2020	7.75%	Due in 2020
Jatuh tempo 2019	146,441,000	99.15%	7 Agustus 2019/ August 7, 2019	8.00%	Due in 2019
Subjumlah	<u>484,077,000</u>				Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2007</u>					<u>Issued in 2007</u>
Jatuh tempo 2037	288,312,000	98.59%	29 Juni 2037/ June 29, 2037	7.87%	Due in 2037
Jumlah	<u>10,172,389,000</u>				Total
	Pokok/ Principal *) EUR	Harga penerbitan/ Issuing price %	Jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate %	
Surat utang jangka menengah global					Global medium term notes
<u>Penerbitan tahun 2019</u>					<u>Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2031	500,000,000	99.42%	5 November 2031/ November 5, 2031	1.88%	Due in 2031
<u>Penerbitan tahun 2018</u>					<u>Issued in 2018</u>
Jatuh tempo 2025	<u>500,000,000</u>	99.22%	25 Oktober 2025/ October 25, 2025	2.88%	Due in 2025
Jumlah	<u>1,000,000,000</u>				Total
	Pokok/ Principal *) JPY	Harga penerbitan/ Issuing price %	Jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate %	
Obligasi					Bonds
<u>Penerbitan tahun 2019</u>					<u>Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2022	3,700,000,000	100%	20 September 2022/ September 20, 2022	0,430%	Due in 2022
Jatuh tempo 2024	18,500,000,000	100%	20 September 2024/ September 20, 2024	0,870%	Due in 2024
Jatuh tempo 2029	<u>1,000,000,000</u>	100%	20 September 2029/ September 20, 2029	1,050%	Due in 2029
Jumlah	<u>23,200,000,000</u>				Total

*) dalam jumlah penuh/ in full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Obligasi

Pada tanggal 20 September 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Japanese Yen sejumlah JPY23.200.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Fiskal. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Surat Utang Jangka Menengah Global

Penerbitan tahun 2019

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.400.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 5 November 2019, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan jumlah nilai nominal sebesar US\$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 5 Februari 2020 untuk mata uang USD dan 5 November 2020 untuk mata uang EUR sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2018

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 25 April 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Bonds

On September 20, 2019, the Company issued Japanese Yen Bonds amounting to JPY23,200,000,000, with Sumitomo Mitsui Banking Corporation acting as Fiscal Agent. The interest is payable semiannually starting from March 20, 2020 until the maturity date.

Global Medium Term Notes

Issued in year 2019

On July 17, 2019, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$1,400,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 1, 2020 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

On November 5, 2019, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$1,000,000,000, and EUR500,000,000 under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semiannually starting from February 5, 2020 for USD currency and November 5, 2020 for EUR currency until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Issued in year 2018

On October 25, 2018, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$1,000,000,000 and EUR500,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from April 25, 2019 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 21 November 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Dengan penerbitan Surat Utang tanggal 21 Mei 2018 tersebut, Perusahaan melakukan pembelian kembali dengan skema pelunasan dipercepat terhadap sebagian Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan 2007. Jumlah pokok pelunasan dipercepat sebesar US\$1.727.611.000 yang terdiri atas Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 yang jatuh tempo pada tahun 2020 dan 2019 serta Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2007 yang jatuh tempo pada tahun 2037 dengan nilai pelunasan dipercepat sebagian masing-masing sebesar US\$912.364.000, US\$603.559.000 dan US\$211.688.000. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 jumlah pokok utang Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan penerbitan tahun 2007 adalah sebesar US\$772.389.000 yang terdiri atas nilai sisa Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 sebesar US\$337.636.000 dan US\$146.441.000 dan Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2007 yang sebesar US\$288.312.000.

Manajemen berpendapat bahwa pelunasan dipercepat Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan penerbitan tahun 2007 tersebut merupakan suatu transaksi modifikasi substansial sehingga mengakui penerbitan Surat Utang sebagai utang baru dan mengakui keuntungan atas penerbitan baru tersebut sebesar US\$194.087.599 ditahun yang berjalan.

Penerbitan tahun 2017

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai

On May 21, 2018, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$2,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 21, 2018 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

With the issuance of the May 21, 2018 Notes, the Company conducted a buyback portion of Guaranteed Notes with accelerated repayment scheme for bonds issued in 2009 and 2007. The amount of accelerated repayment was US\$1,727,611,000 which consist of Guaranteed Notes issued in 2009 matured in 2020 and 2019, and Guaranteed Notes issued in 2007 matured in 2037 with principal amount of partial accelerated repayment amounted to US\$912,364,000, US\$603,559,000 and US\$211,688,000, respectively. Therefore as of December 31, 2018 the principal amount of Guaranteed Notes issued in year 2009 and 2007 amounted to US\$772,389,000 that consist of residual amount of Guaranteed Notes issued in 2009 amounted to US\$337,636,000 and US\$146,441,000, and residual amount of Guaranteed Notes issued in 2007 amounted to US\$288,312,000.

Management believes that the accelerated repayment of Guaranteed Notes issued in 2009 and 2007 is a substantial modification to the transactions, and that the Company recognizes the issuance of Notes as new debt and recorded a gain on the issuance of new Notes amounted to US\$194,087,599 in the current year.

Issued in year 2017

On May 15, 2017, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$2,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 15 November 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2012

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 April 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Penerbitan tahun 2011

Pada tanggal 22 November 2011, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009

Pada tanggal 6 November 2009, MH, entitas anak, yang berdomisili di Belanda menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$1.250.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US\$912.364.000. Sehingga sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US\$337.636.000.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$750.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan

payable semi-annually starting from November 15, 2017 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Issued in year 2012

On October 24, 2012, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from April 24, 2013 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Issued in year 2011

On November 22, 2011, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 22, 2012 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Guaranteed Notes

Issued in 2009

On November 6, 2009, MH, a subsidiary, domicile in Netherlands issued Guaranteed Notes amounting to US\$1,250,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes. On May 21, 2018, the Company made a partial acceleration repayment amounted to US\$912,364,000. Therefore, the Guaranteed Notes remaining balance was amounted to US\$337,636,000.

On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US\$750,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes. On May 21, 2018, the Company made a partial acceleration

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US\$603.559.000. Sehingga, sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US\$146.441.000. Obligasi tersebut telah dibayar keseluruhan ditahun 2019.

Penerbitan tahun 2007

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$1.000.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai 28 Juni 2017. Pada Juni 2017, Obligasi Terjamin tranche A telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US\$211.688.000. Sehingga, sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US\$288.312.000.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.
- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian"; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

repayment amounted to US\$603,559,000. Therefore, the Guaranteed Notes balance was amounted to US\$146,441,000. The bonds has been fully repaid in 2019.

Issued in 2007

On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US\$1,000,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until June 28, 2017. On June 2017, Guaranteed Notes tranche A has been fully paid in 2017. On May 21, 2018, the Company made a partial acceleration repayment amounted to US\$211,688,000. Therefore, the Guaranteed Notes remaining balance was amounted to US\$288,312,000.

The Trustee stipulates that:

- *No later than 30 days following the occurrence of two separate events in which the Government of the Republic of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in which a rating declines (Change of Control Triggering Event), MH may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of MH at a certain time in the event of certain changes affecting the taxes of the Netherlands or Indonesia.*
- *Certain covenants, including, among others: the incurrence of additional indebtedness along with the "Ratio Exception"; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

The Company and its subsidiaries complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.

	Lembaga pemeringkat/ Rating agency			
	Moody's Investor Service, Inc.,	Standard and Poor's	Fitch	Japan Credit Rating
Surat utang jangka menengah global/ Global medium term notes				
Penerbitan tahun 2019/ Issued in 2019	Baa2	BBB	BBB	-
Penerbitan tahun 2018/ Issued in 2018	Baa2	-	BBB	-
Penerbitan tahun 2017/ Issued in 2017	Baa2	-	BBB	-
Penerbitan tahun 2012/ Issued in 2012	Baa2	BBB	BBB	-
Penerbitan tahun 2011/ Issued in 2011	Baa2	BBB	BBB	-
Obligasi terjamin/ Guaranteed notes				
Penerbitan tahun 2009/ Issued in 2009	Baa2	BBB	-	-
Penerbitan tahun 2007/ Issued in 2007	Baa2	BBB	-	-
Japanese Yen Bond				
Penerbitan tahun 2019/ Issued in 2019	Baa2	BBB	-	BBB

b. Kredit Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset ("KIK-EBA")

b. Collective Investment Contract – Asset Backed Securities ("KIK-EBA")

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:				<i>Minimum lease payments due:</i>
Tidak lebih dari satu tahun	748,050	909,480	909,480	<i>Not later than one year</i>
Lebih dari satu tahun	1,473,118	2,501,072	3,410,552	<i>More than one year</i>
Jumlah pembayaran minimum	2,221,168	3,410,552	4,320,032	<i>Total minimum payments</i>
Biaya keuangan	(279,906)	(502,566)	(781,446)	<i>Finance cost</i>
Jumlah	1,941,262	2,907,986	3,538,586	Total
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian:				<i>Presented in consolidated statements of financial position:</i>
Liabilitas jangka pendek	586,620	686,819	630,600	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	1,354,642	2,221,167	2,907,986	<i>Non-current liabilities</i>
Jumlah	1,941,262	2,907,986	3,538,586	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN I – Piutang Usaha ("KIK-DIPP1"). Perjanjian tersebut mengalami beberapa kali amandemen, terakhir pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

Pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang komponen A dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ("PJBTL"), Perusahaan menyetujui IP, entitas anak, untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A Suralaya ("SLA") unit 1,2,3 dan 4 atas PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diamandemen pada tanggal 22 Agustus 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Piutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

Pada tanggal 14 September 2017, IP menandatangani perjanjian pengikatan transaksi sekuritisasi piutang usaha Indonesia Power – PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan DIM dan BRI. Di dalam perjanjian tersebut, IP setuju dan mengikat diri untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga Rp4.000.000.

Sejak penandatanganan akta perjanjian ("Cessie") tersebut semua pembayaran atas piutang usaha yang dialihkan tetap dilakukan oleh Perusahaan kepada IP yang dalam hal ini akan menerima Dana hasil koleksi pelunasan Piutang Usaha, namun tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai kapasitas yang bertindak untuk dan atas nama KIK-DIPP1.

On April 25, 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") signed a deed of Collective Investment Contract Asset Backed Securities Danareksa of Indonesia Power PLN I - Accounts Receivable ("KIK-DIPP1"). The agreement has been amended several times, the latest on September 14, 2017. Based on the agreement, DIM will act as Investment Manager and BRI will act as Custodian Bank.

On September 11, 2017 based on the statement of approval for the transfer of receivables of component A under the power purchase agreement ("PJBTL"), the Company approved IP, a subsidiary, to transfer the receivables arising from the cash payment obligations of Component A Suralaya steam power plant ("SLA") unit 1,2,3 and 4 of PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 and 7 which have been amended on August 22, 2017 and applied retroactively since January 1, 2017. The receivables were transferred to third party for KIK-DIPP1, maximum amount of Rp5,000,000.

On September 14, 2017, IP entered into an agreement for trade receivables securitization transaction of Indonesia Power - PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 with DIM and BRI. Under the agreement, IP agreed and binded to sell their accounts receivable amounting to Rp4,932,107 at a value price of Rp4,000,000.

Since the signing of the deed ("Cessie") agreement, all payments made to the transferred trade receivables from the Company are still manage by the IP who will collect the Receivables settlement, however those will not for itself, but act for and on behalf of KIK-DIPP1.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1 sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian pokok dan hasil Investasi dilakukan dengan *fixed installment* (“anuitas”) berdasarkan dari nilai investasi dan *yield* 8,25%. Tanggal akhir pelunasan investasi adalah 19 September 2022. KIK-DIPP1 merupakan investasi dengan peringkat idAAA berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Pada laporan keuangan konsolidasian, penerimaan kas dari transaksi sekuritisasi tersebut dicatat sebagai utang Kredit Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (“KIK-EBA”).

Berdasarkan KIK-DIPP1, EBA diterbitkan oleh Bank Kustodian dalam 2 (dua) kelas yaitu:

1. EBA Kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp3.688.000 mewakili 92,20% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA Kelas A memiliki hak untuk menerima arus kas tetap setiap 3 (tiga) bulan sekali yang terdiri dari pelunasan bertahap pokok investasi dan pembagian hasil investasi EBA Kelas A.
2. EBA Kelas B dengan total nominal sebesar maksimum 7,80% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA kelas B memiliki hak untuk menerima arus kas tidak tetap pada setiap tanggal pelunasan bertahap dan tanggal pembagian hasil investasi EBA Kelas B.

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari Perusahaan atas piutang usaha milik IP yang disekuritisasi. Pemegang EBA kelas A mempunyai hak untuk dibayar mendahului pemegang EBA kelas B. Pemegang EBA kelas B akan menerima pembayaran pelunasan bertahap dan hasil investasi EBA kelas B setelah dilakukan pembayaran penuh atas semua EBA kelas A menurut tata urutan pembayaran (*payment waterfall*).

On September 15, 2017, DIM together with BRI initiate a public offering of KIK-DIPP1 amounting to Rp4,000,000 with a principal rate of return and investment proceeds settled with fixed installment (“annuity”) based on investment value and 8.25% yield. The final date of settlement of the investment is September 19, 2022. The KIK-DIPP1 is an investment with idAAA rating based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia.

In the consolidated financial statements, cash receipts from securitization transactions were recorded as Collective Investment Credit - Asset Backed Securities (“KIK-EBA”) loans.

Based on KIK-DIPP1, EBA is issued by Custodian Bank in 2 (two) classes, namely:

1. *Class A EBA with a total nominal value of Rp3,688,000 represents 92.20% of total financial assets. Class A EBA holders have the right to receive a fixed cash flow on every 3 (three) months consist of principal gradual settlement and investment return of Class A EBA.*
2. *Class B EBA with a nominal maximum of 7.80% of total financial assets. Class B EBA holders have the right to receive variable non-fixed cash flow on each date of principal gradual settlement and investment return of EBA Class B.*

All EBA payments are solely derived from the Company on securitized IP’s trade receivable. Class A EBA holders have the privilege to be paid before Class B EBA holders. Class B EBA holders will receive the principal gradual settlement and investment returns after full payment of all Class A EBA according to the payment waterfall.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Utang Listrik Swasta

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegotiasi dengan IPP.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
PT Paiton Energy			
2019: US\$439.164.341			
2018: US\$465.344.324			
2017: US\$490.296.755	6,104,823	6,738,651	6,642,540
PT Jawa Power			
2019: US\$52.232.386			
2018: US\$53.288.271			
2017: US\$54.167.514	726,083	771,668	733,862
Jumlah	6,830,906	7,510,319	7,376,402
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(399,458)	(394,403)	(349,968)
Bagian jangka panjang	6,431,448	7,115,916	7,026,434

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok, pada nilai nominal

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
Dibayarkan:			
Dalam satu tahun	399,458	394,403	349,968
Pada tahun kedua	421,784	416,125	368,992
Pada tahun ketiga	445,745	439,383	389,315
Pada tahun keempat	471,530	464,343	411,073
Setelah lima tahun	5,092,389	5,796,065	5,857,054
Jumlah pembayaran	6,830,906	7,510,319	7,376,402

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

30. Utang Pihak Berelasi

Utang kepada PT Riau Power, MEB dan DEB pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing – masing sebesar Rp92, Rp1.000, dan Rp794 merupakan utang oleh PLN Batam, entitas anak, atas utang setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam dan untuk pembelian *switchyard*.

29. Electricity Purchase Payable

This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with IPP.

Details according to creditors and payment schedules are as follows:

a. By creditor

PT Paiton Energy
2019: US\$439,164,341
2018: US\$465,344,324
2017: US\$490,296,755
PT Jawa Power
2019: US\$52,232,386
2018: US\$53,288,271
2017: US\$54,167,514
Total
<i>Less current maturities</i>
Long-term portion

b. By installment schedule, at nominal amount

<i>Payable in:</i>
<i>Within one year</i>
<i>In the second year</i>
<i>In the third year</i>
<i>In the fourth year</i>
<i>After five years</i>
Total payments

Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, respectively, and are payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

30. Payable to Related Parties

*Payable to PT Riau Power, MEB and DEB on December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp92, Rp1,000, and Rp794, respectively, is payable by PLN Batam for historical subscription of shares that have not been fully paid by PLN Batam and for purchases of *switchyard*.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. Utang Usaha

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi				Related parties
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	9,021,121	6,605,433	9,078,731	Purchase of fuel goods and service
Pembelian tenaga listrik	2,793,614	2,439,097	2,136,508	Purchase of electricity
Subjumlah	<u>11,814,735</u>	<u>9,044,530</u>	<u>11,215,239</u>	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	28,877,826	25,736,924	20,982,828	Purchase of fuel goods and service
Pembelian tenaga listrik	11,310,222	13,826,220	11,513,358	Purchase of electricity
Subjumlah	<u>40,188,048</u>	<u>39,563,144</u>	<u>32,496,186</u>	Subtotal
Jumlah	<u>52,002,783</u>	<u>48,607,674</u>	<u>43,711,425</u>	Total

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services.

Details of trade payables are as follows:

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of trade payables in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		2017		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
US\$	898,507,498	12,490,157	616,689,475	8,930,280	543,839,978	7,367,944	US\$
EUR	326,270	5,086	-	-	648,299	10,485	EUR
Lain **)	30,385,801	422,393	10,058,203	145,653	759,254	10,286	Others **)
Jumlah		<u>12,917,636</u>		<u>9,075,933</u>		<u>7,388,715</u>	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**) Utang usaha dalam mata uang lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

**) Trade payables in other currencies are presented in US\$ equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date

32. Utang Lain-Lain

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan				Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress
Rupiah	16,976,626	16,614,653	12,948,415	Rupiah
US\$	7,033,198	9,351,489	4,890,162	US\$
EUR	1,856,748	1,976,940	256,386	EUR
JPY	1,726,827	919,748	-	JPY
CHF	99,993	110,236	99,914	CHF
CNY	4,133	-	-	CNY
Pemerintah daerah	2,193,064	2,109,136	1,973,537	Local government
Uang muka penjualan tenaga listrik	203,386	99,873	941,967	Advances received on sale of electricity
Karyawan	63,721	145,162	86,547	Employees
Lain-lain	574,885	1,738,134	998,497	Others
Jumlah	<u>30,732,581</u>	<u>33,065,371</u>	<u>22,195,425</u>	Total
Dikurangi bagian jangka panjang	133,662	94,427	940,153	Less long-term portion
Bagian jangka pendek	<u>30,598,919</u>	<u>32,970,944</u>	<u>21,255,272</u>	Current portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pemerintah Daerah

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

Uang Muka Penjualan Tenaga Listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik Prabayar.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Local Government

The payable to Local Government represents the amount collected by the Company from the customer for streetlight taxes. This is subsequently remitted to the respective Local Government.

Advances Received on Sale of Electricity

This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

Employees

Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house installment.

33. Utang Pajak

33. Taxes Payable

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Perusahaan				The Company
Pajak kini	--	--	--	Current tax
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 21	60,416	220,338	269,754	Article 21
Pasal 22	93,169	479,337	115,596	Article 22
Pasal 23	37,858	70,273	60,699	Article 23
Pasal 15 dan 4(2)	29,147	112,058	512,847	Article 15 and 4(2)
Pajak pertambahan nilai	854,600	980,297	761,410	Value added tax
Bea materai	--	--	24,405	Stamp duty
Subjumlah	<u>1,075,190</u>	<u>1,862,303</u>	<u>1,744,711</u>	Subtotal
Entitas anak				Subsidiaries
Pajak kini	377,252	192,406	104,265	Current tax
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 21	154,715	242,449	172,665	Article 21
Pasal 22	139,000	7,270	26,165	Article 22
Pasal 23	50,974	33,487	31,331	Article 23
Pasal 15 dan 4(2)	89,260	70,214	59,854	Article 15, and 4(2)
Pajak pertambahan nilai	496,889	136,305	248,873	Value added tax
Pajak bumi dan bangunan	8	17	--	Land and building taxes
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	--	15,677	--	Tax on difference in property, plant and equipment revaluation
Subjumlah	<u>1,308,098</u>	<u>697,825</u>	<u>643,153</u>	Subtotal
Jumlah	<u>2,383,288</u>	<u>2,560,128</u>	<u>2,387,864</u>	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. Biaya Masih Harus Dibayar

34. Accrued Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Bunga dan beban keuangan				<i>Interest and financing charges</i>
Pihak berelasi				<i>Related parties</i>
Utang bank	451,137	497,711	465,511	<i>Bank loans</i>
Utang penerusan pinjaman	331,275	344,854	275,160	<i>Two-step loans</i>
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non bank	74,699	89,679	15,081	<i>Government and non bank Government financial institution loans</i>
Jumlah pihak berelasi	<u>857,111</u>	<u>932,244</u>	<u>755,752</u>	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2,862,048	2,139,946	1,500,296	<i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>
Utang bank	1,470,335	1,265,078	495,279	<i>Bank loans</i>
Utang sewa pembiayaan	997,880	889,264	411,282	<i>Lease liabilities</i>
Utang listrik swasta	45,527	50,731	48,713	<i>Electricity purchase payable</i>
Jumlah pihak ketiga	<u>5,375,790</u>	<u>4,345,019</u>	<u>2,455,570</u>	<i>Total third parties</i>
Subjumlah	<u>6,232,901</u>	<u>5,277,263</u>	<u>3,211,322</u>	<i>Subtotal</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek				<i>Employee benefit liabilities short-term</i>
Bonus dan insentif prestasi kerja	5,711,171	6,062,464	5,907,215	<i>Bonus and performance incentives</i>
Biaya operasional	4,810,568	3,469,291	2,358,900	<i>Operational charges</i>
Jumlah	<u>16,754,640</u>	<u>14,809,018</u>	<u>11,477,437</u>	Total

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		2017		
	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>equivalent</i> Rp	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>equivalent</i> Rp	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>equivalent</i> Rp	
US\$	244,021,636	3,392,147	188,553,280	2,730,440	134,199,763	1,818,138	US\$
JPY	8,882,526,820	1,136,667	7,972,462,852	1,045,310	4,561,471,496	548,373	JPY
EUR	5,459,709	85,109	1,142,063	18,912	1,058,278	17,116	EUR
Lain-lain **)	64,218	893	89,447	1,295	123,095	1,668	Others **)
Jumlah		<u>4,614,816</u>		<u>3,795,957</u>		<u>2,385,295</u>	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

**) *Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US\$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.*

35. Uang Jaminan Langganan

35. Customers' Security Deposits

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

This account represents Customers' security deposits determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

36. Utang Biaya Proyek

36. Project Cost Payable

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization (WA)* atau dokumen lain yang sejenis.

This account represents payable to contractors arising from construction expense and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account at the issuance of the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. Penjualan Tenaga Listrik

37. Sale of Electricity

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

Sale of electricity by customers is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi				Related parties
Badan Usaha Milik Negara	5,721,522	5,505,800	5,487,610	State-Owned Enterprises
Pihak ketiga				Third parties
Umum	257,889,372	246,311,630	229,444,319	Public
Lembaga dan kementerian	11,870,575	11,329,024	10,677,460	Institutions and ministries
TNI dan Polri	1,431,020	1,328,072	1,222,172	Indonesian Armed Forces
Jumlah pihak ketiga	271,190,967	258,968,726	241,343,951	Total of third parties
Jumlah	276,912,489	264,474,526	246,831,561	Total
Masa uji coba	(850,564)	(996,975)	(244,705)	Commissioning test
Jumlah penjualan bersih	276,061,925	263,477,551	246,586,856	Total sales - net

Testing dan masa uji coba (commissioning test) merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa uji coba dikapitalisasi ke Pekerjaan Dalam Pelaksanaan konstruksi dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi.

Testing and commissioning (commissioning test) are series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are going to be operated. The costs and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalized into Construction in Progress because the electrical installation has not been commercially operated.

Penjualan tenaga listrik tahun 2019, 2018, dan 2017 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Sale of electricity for the years 2019, 2018, and 2017 are based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:

- Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2019.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 38 Tahun 2015 dan peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam.

- *Regulation of the Minister of ESDM No. 28 Year 2016 with the latest amended by Regulation of the Minister of ESDM No. 19 Year 2019.*
- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 38 Year 2015 and regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 Year 2017, regarding the tariff of electricity provided by PLN Batam.*

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

The Company has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total sale of electricity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. Subsidi Listrik Pemerintah

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik periode Anggaran 31 Desember 2019 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 174/PMK.02/2019 tanggal 22 November 2019. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh ESDM c.q Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") No. SP DIPA-999.07.1.979321/2019 tanggal 31 Desember 2018, No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2018 revisi tanggal 27 Desember 2018, dan No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2017 revisi tanggal 28 Desember 2017 pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2019, 2018, dan 2017 ditetapkan masing-masing sebesar Rp59.323.456, Rp56.507.588, and Rp50.595.347. Masing-masing plafon tersebut termasuk 7% margin diatas BPP tenaga listrik.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

38. Government's Electricity Subsidy

Subsidy revenue represent the revenue from the Government of Indonesia for difference between allowable cost plus 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff group which received automatic tariff adjustment based on the Minister of ESDM Regulation No. 19 Year 2019 regarding changes on the Minister of ESDM Regulation No. 28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for calculation and payment of electricity subsidy for Budget period December 31, 2019 are using the Minister of Finance Regulation No. 174/PMK.02/2019 dated November 22, 2019. The electricity subsidy is calculated from the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff group less the cost of electricity supplies (Rp/kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by the electricity sales volume (kWh) for each tariff group. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity under the Ministry of ESDM.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List ("DIPA") No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2019 dated December 31, 2018, No.SP.DIPA- 999.07.1.979321/2018 revised dated December 27, 2018, and No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2017 revised dated December 28, 2017 the electricity subsidy plafond for budget year 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp59,323,456, Rp56,507,588, and Rp50,595,347, respectively. Each of the plafond amount includes 7% margin above the costs of electricity supplies.

The amount of the electricity subsidy within a budget year is finalized based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 28 April 2020, BPK RI menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Subsidi Listrik dan Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik tahun anggaran 2019 No.01/BA/04/2020 yang menetapkan bahwa hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2019 adalah sebesar Rp51.711.774.

On April 28, 2020 BPK RI has issued an Minutes of Audit on electricity subsidy and calculation of electricity tariff adjustment for fiscal year 2019 No.01/BA/04/2020 which determined that the audit result of electricity subsidy calculation in 2019 was amounted to Rp51,711,774.

Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:

The details of revenue from electricity subsidy are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan				Realization of subsidy from current year budget
Penerimaan tunai	51,288,854	51,207,588	45,375,200	Cash received
Saling hapus dengan pajak	1,377,603	--	--	Offset with tax
Kelebihan penerimaan subsidi tahun anggaran 2018 (Catatan 25)	--	(3,105,834)	--	Excess subsidy budget years 2018 (Note 25)
tahun anggaran 2019 (Catatan 25)	(954,683)	--	--	budget years 2019 (Note 25)
Piutang subsidi listrik berjalan (Catatan 15)	--	--	363,015	Electricity subsidy receivable budget (Note 15)
Jumlah	51,711,774	48,101,754	45,738,215	Total

39. Pendapatan Usaha Lain-Lain

39. Other Revenues

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	1,364,029	1,231,198	942,049	Telecommunication network and service
Perubahan daya tersambung dan administrasi	22,581	24,213	13,225	Upgrading of electricity power and administration fees
Sewa transformator	367,546	381,230	378,850	Transformer rental
Jasa-jasa dan lainnya	889,911	474,378	260,809	Services and others
Jumlah	2,644,067	2,111,019	1,594,933	Total

40. Beban Bahan Bakar dan Pelumas

40. Fuel and Lubricants Expense

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Bahan bakar minyak				Fuel
<i>Solar high speed diesel</i>	20,637,756	26,195,314	18,264,985	<i>Solar high speed diesel</i>
Residu	2,378,592	3,905,085	3,838,411	Residue
<i>Solar industrial diesel</i>	2,313	239	3,270	<i>Solar industrial diesel</i>
Lainnya	1,710,712	1,637,653	1,209,498	Others
Subjumlah	24,729,373	31,738,291	23,316,164	Subtotal
Bahan Bakar - Non Minyak				Nonfuel
Gas alam	58,054,184	55,438,805	47,604,339	Natural gas
Batubara	49,397,601	46,285,905	42,415,815	Coal
Panas bumi	3,406,242	3,261,672	3,022,044	Geothermal
Air	222,372	275,382	325,228	Water
Subjumlah	111,080,399	105,261,764	93,367,426	Subtotal
Minyak pelumas	274,710	266,623	264,234	Lubricants
Jumlah	136,084,482	137,266,678	116,947,824	Total

Jumlah pembelian Perusahaan dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp29.234.689, Rp29.385.495, dan Rp19.129.336 tahun 2019, 2018, dan 2017 dari PT Pertamina (Persero) (pihak berelasi) (Catatan 52).

Purchases from a single supplier exceeding 10% of the Company's total revenues were transacted with PT Pertamina (Persero) (a related party) amounting to Rp29,234,689, Rp29,385,495, and Rp19,129,336 in 2019, 2018, and 2017 respectively (Note 52).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Beban Pembelian Tenaga Listrik

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

41. Purchased Electricity Expenses

This account includes purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, purchase of electricity during the commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	<u>2019 Rp</u>	<u>2018 Rp</u>	<u>2017 Rp</u>	
Pihak berelasi				<i>Related parties</i>
PT Sumber Segara Primadaya	7,274,856	7,585,240	6,547,601	<i>PT Sumber Segara Primadaya</i>
PT Pertamina Geothermal Energy	2,529,323	2,611,244	2,076,654	<i>PT Pertamina Geothermal Energy</i>
PT Bukit Pembangkit Innovative	1,050,730	898,457	671,673	<i>PT Bukit Pembangkit Innovative</i>
PT Bajradaya Sentranusa	871,617	840,239	781,022	<i>PT Bajradaya Sentranusa</i>
PT Geo Dipa Energi	791,998	790,389	742,444	<i>PT Geo Dipa Energi</i>
PT Shenhua Guohua PJB	405,908	--	--	<i>PT Shenhua Guohua PJB</i>
PT Dalle Energy Batam	304,021	592,659	529,834	<i>PT Dalle Energy Batam</i>
Subjumlah	<u>13,228,453</u>	<u>13,318,228</u>	<u>11,349,228</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
PT Paiton Energy	13,513,202	10,793,053	13,121,901	<i>PT Paiton Energy</i>
PT Jawa Power	8,066,142	8,544,357	8,082,414	<i>PT Jawa Power</i>
PT Cirebon Energi Power	4,156,240	4,275,665	3,892,763	<i>PT Cirebon Energi Power</i>
Lain-lain (masing - masing dibawah 5% dari jumlah)	<u>44,599,954</u>	<u>47,336,308</u>	<u>35,980,335</u>	<i>Others (each under 5% of total)</i>
Subjumlah	<u>70,335,538</u>	<u>70,949,383</u>	<u>61,077,413</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah	<u>83,563,991</u>	<u>84,267,611</u>	<u>72,426,641</u>	<i>Total</i>

42. Beban Sewa

Akun ini sebagian besar merupakan biaya penyewaan mesin diesel dan genset yang ditentukan sebagai sewa operasi.

42. Lease Expenses

This account mostly represents the rental of diesel engines and gensets determined as operating leases.

43. Beban Pemeliharaan

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

43. Maintenance Expenses

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:

	<u>2019 Rp</u>	<u>2018 Rp</u>	<u>2017 Rp</u>	
Jasa borongan	16,564,535	15,003,198	13,392,384	<i>Contractor fees</i>
Pemakaian material	5,763,643	5,734,403	6,123,222	<i>Spare parts used</i>
Jumlah	<u>22,328,178</u>	<u>20,737,601</u>	<u>19,515,606</u>	<i>Total</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. Beban Kepegawaian

44. Personnel Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	7,635,501	6,379,632	6,502,303	Bonus and performance incentives
Imbalan kerja (Catatan 50)	5,935,867	5,325,595	5,242,042	Employee benefits (Note 50)
Gaji	4,765,194	4,512,217	4,463,052	Salaries
Tunjangan	3,110,165	2,958,662	2,811,243	Allowances
Lain-lain	4,462,044	3,773,981	4,105,871	Others
Jumlah	25,908,771	22,950,087	23,124,511	Total

45. Beban Usaha Lain-Lain

45. Other Operating Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Baca meter	1,659,005	1,205,846	1,132,563	Meter reading
Honorarium	1,121,225	1,204,284	765,285	Honorarium
Pengelolaan pelanggan	884,219	847,668	810,243	Customer maintenance
Teknologi informasi	737,720	846,688	641,408	Technological information
Perjalanan dinas	738,610	668,286	781,490	Travel
Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik	517,997	643,541	766,563	Billing collection and orderliness of electricity used
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	2,961,293	2,533,805	2,809,202	Others (each below 5% of total)
Jumlah	8,620,069	7,950,118	7,706,754	Total

46. Beban Keuangan

46. Financial Cost

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi				Related parties
Utang bank	5,341,726	4,288,070	5,545,937	Bank loans
Penerusan pinjaman	650,386	611,107	547,187	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	374,996	445,348	514,091	Government loans
Instrumen derivatif	295,118	199,545	62,552	Derivative instruments
Jumlah pihak berelasi	6,662,226	5,544,070	6,669,767	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Utang bank	5,911,827	5,974,801	2,929,784	Bank loans
Utang obligasi	6,621,140	5,301,020	4,504,284	Bonds payable
Utang sewa pembiayaan	4,903,022	4,221,779	3,874,639	Lease liabilities
Utang listrik swasta	439,021	470,745	457,281	Electricity purchase payable
Lain-lain	82,259	111,761	121,176	Others
Jumlah pihak ketiga	17,957,269	16,080,106	11,887,164	Total third parties
Jumlah	24,619,495	21,624,176	18,556,931	Total

47. Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Bersih

47. Other Income (Expense) – Net

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pendapatan dari Pemerintah (Catatan 17)	--	7,456,452	--	Income from the Government (Note 17)
Penyesuaian harga pembelian bahan bakar dan pelumas (Catatan 11)	(6,676,670)	4,042,614	--	adjustment of fuel and lubricant price (Note 11)
Penghasilan denda administrasi	1,792,297	2,039,146	2,038,007	Administrative penalty income
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama (Catatan 8)	967,406	1,172,345	811,191	Equity in net income of associates and joint ventures (Note 8)
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 7)	165,453	421,760	1,051,363	Increase in the fair value of investment property (Note 7)
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	185,527	88,550	45,983	Gain on sale of assets not used in operations (Note 6)
Penghasilan jasa dan klaim	50,663	47,101	47,755	Claim and service income
Beban penelitian	(39,444)	(28,338)	(33,707)	Research expenses
Program pemberdayaan lingkungan	(298,590)	(250,147)	(204,338)	Community development programs
Kerugian penurunan nilai aset tetap tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	(247,615)	(301,965)	(327,986)	Loss on impairment of asset not used in operations (Note 6)
Lain-lain	433,307	975,845	(18,327)	Others
Jumlah	(3,667,666)	15,663,363	3,409,941	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. Pajak Penghasilan

48. Income Tax

Beban pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax Expense of the Company and its subsidiaries consists of the following:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Beban pajak kini	(782,859)	(507,987)	(385,032)	Current tax
Beban pajak tangguhan	(21,014,221)	(7,817,095)	(3,730,923)	Deferred tax expenses
Jumlah beban pajak	(21,797,080)	(8,325,082)	(4,115,955)	Total tax expenses

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal losses) of the Company is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	26,119,210	19,900,838	8,544,072	Income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(23,051,680)	(15,272,113)	(11,397,167)	Income before tax attributable to subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	3,067,530	4,628,725	(2,853,095)	Income before tax - the Company
Perbedaan waktu:				Timing differences:
Sewa pembiayaan	(1,143,435)	(2,162,873)	(1,953,523)	Lease expenses
Penyambungan pelanggan	78,097	(323,256)	63,448	Customer connection fees
Penyusutan aset tetap	(20,184,284)	(19,780,252)	(19,541,433)	Depreciation of property, plant and equipment
Imbalan kerja	2,174,064	1,508,367	1,682,116	Employee benefits
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal				Nondeductible expenses (nontaxable income)
Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan nilai persediaan	679,513	208,411	208,581	Allowance for doubtful accounts and decline in value of inventories
Kesejahteraan karyawan	1,043,635	998,979	925,900	Employee welfare
Penyusutan rumah dinas	18,377	10,304	5,267	Depreciation of guest house
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(503,650)	(463,591)	(780,608)	Interest income subjected to final tax
Bunga obligasi internasional	--	--	(3,445,081)	International bond obligation
Revaluasi aset tetap	--	--	12,250,998	Property, plant and equipment revaluation
Beban lain tidak dapat dikurangkan	8,811,145	8,008,833	12,250,998	Other nondeductible expenses
Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan tahun berjalan	(5,959,008)	(7,366,353)	(13,437,430)	The Company's taxable income (fiscal loss) for the year
Rugi fiskal tahun:				Fiscal losses year:
2018	(7,366,353)	--	--	2018
2017	(8,244,060)	(8,244,060)	--	2017
2016	(40,686,691)	(40,686,691)	(40,686,691)	2016
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(62,256,112)	(56,297,104)	(54,124,121)	Accumulated fiscal losses the Company

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax is computed based on estimated taxable income. The amount used as the basis for the Annual Tax returns that was filed to the Tax Office.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Perusahaan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan "SPT" Pajak untuk masa pajak tahun 2017. Perusahaan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 107/PMK.03/2017 perihal

On July 18, 2018, the Company has done a correction regarding the Annual Tax Returns "ATR" for the year 2017. The Company has complied to the Minister of Finance Decree No. 107/PMK.03/2017 in regards to recognition of Deemed

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pengakuan *Deemed Dividend* atas kepemilikan Perusahaan pada Majapahit Holding B.V dan Majapahit Finance B.V, dimana Perusahaan melakukan pembetulan SPT tahun 2017 atas pengakuan pendapatan *Deemed Dividend* pada perhitungan pajak kini Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp5.193.370, sehingga rugi fiskal atas tahun 2017 di koreksi dari sebelumnya sebesar Rp13.437.430 menjadi Rp8.244.060.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa sebagian akumulasi kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang. Sehingga per 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 Perusahaan dan entitas anak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal masing-masing sebesar Rp6.361.386, Rp19.880.394, dan Rp19.966.029.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut:

Dividend of the Company's ownership in Majapahit Holding B.V and Majapahit Finance B.V, which the Company has done a correction on ATR year 2017 in regards to the recognition of Deemed Dividend income in the Company's calculation of current tax for the year 2017 amounted to Rp5,193,370, hence the fiscal loss for the year 2017 was corrected from previously amounted to Rp13,437,430 to Rp8,244,060.

The fiscal loss can be compensated against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that it is probable future taxable profits will be available to be utilized partial accumulated fiscal losses. Therefore as of December 31, 2019, 2018, and 2017 the Company and its subsidiaries' recognized deferred tax assets from accumulated fiscal losses amounted to Rp6,361,386, Rp19,880,394, and Rp19,966,029, respectively.

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Beban pajak kini				Current tax expense
Perusahaan	--	--	--	The Company
Entitas anak	782,859	507,987	385,032	Subsidiaries
Jumlah	<u>782,859</u>	<u>507,987</u>	<u>385,032</u>	Total
Pembayaran pajak dimuka				Prepayment of taxes
Perusahaan				The Company
Pajak penghasilan				Income tax
Pasal 22	175,055	128,950	78,632	Article 22
Pasal 23	35,772	45,752	13,356	Article 23
Jumlah	210,827	174,702	91,988	Total
Entitas anak	1,545,207	1,500,939	802,458	Subsidiaries
Jumlah	<u>1,756,034</u>	<u>1,675,641</u>	<u>894,446</u>	Total
Lebih bayar pajak kini - bersih	<u>(973,175)</u>	<u>(997,077)</u>	<u>(509,414)</u>	Current tax prepayment - net
Terdiri dari				Consist of
Utang pajak kini				Current tax payable
Perusahaan	--	--	--	The Company
Entitas anak	377,252	192,406	104,265	Subsidiaries
Jumlah utang pajak kini	<u>377,252</u>	<u>192,406</u>	<u>104,265</u>	Total current tax payable
Pajak penghasilan lebih bayar				Income tax overpayment
Perusahaan	(210,827)	(174,702)	(91,988)	The Company
Entitas anak	(762,348)	(992,952)	(521,690)	Subsidiaries
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	<u>(973,175)</u>	<u>(1,167,654)</u>	<u>(613,678)</u>	Total income tax overpayment

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

b. Deferred Tax

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income Rp	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
Aset Pajak tangguhan					Deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal	5,806,118	(2,776,072)	--	3,030,046	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	1,428,942	141,103	39,263	1,609,308	Employee benefit liabilities
Aset tetap	137,082	(2,865,070)	--	(2,727,988)	Property, plant and equipment
Bonus	200,097	15,576	--	215,673	Bonus
Penyisihan persediaan	9,563	369	--	9,932	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	17,111	2,325	--	19,436	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	(20,527)	(884)	80,967	59,556	Income from associates
Aset pajak tangguhan akhir tahun	7,578,386	(5,482,653)	120,230	2,215,963	Deferred tax assets at the end of the year
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Akumulasi rugi fiskal	14,074,276	(10,742,936)	--	3,331,340	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	10,963,931	547,187	904,727	12,415,845	Employee benefit liabilities
Pendapatan ditangguhkan	222,312	19,524	--	241,836	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	(2,801,045)	(290,363)	--	(3,091,408)	Leases
Aset tetap	(35,853,555)	(5,066,533)	--	(40,920,088)	Property, plant and equipment
Penyisihan persediaan	22	(22)	--	--	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	2,143	(809)	--	1,334	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	(27,907)	2,369	(74,563)	(100,101)	Income from associates
Lainnya	(313)	15	--	(298)	Others
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	(13,420,136)	(15,531,568)	830,164	(28,121,540)	Deferred tax liabilities at the end of the year
		(21,014,221)	950,394		

	1 Januari/ January 1, 2018 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income Rp	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	
Aset Pajak tangguhan						Deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal	13,531,030	543,246	--	(8,268,158)	5,806,118	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	11,618,700	409,032	(1,019,964)	(9,578,826)	1,428,942	Employee benefit liabilities
Pendapatan ditangguhkan	303,126	(80,814)	--	(222,312)	--	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	(2,283,580)	(514,013)	--	2,797,593	--	Leases
Aset tetap	(13,611,905)	(4,802,644)	(16,372,340)	34,923,971	137,082	Property, plant and equipment
Bonus	--	--	--	200,097	200,097	Bonus
Penyisihan persediaan	147	(147)	--	9,563	9,563	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	8,955	4,557	--	3,599	17,111	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	--	1,097	--	(21,624)	(20,527)	Income from associates
Aset pajak tangguhan akhir periode/ tahun	9,566,473	(4,439,686)	(17,392,304)	19,843,903	7,578,386	Deferred tax assets at the end of the period/ year
Liabilitas pajak tangguhan						Deferred tax liabilities
Akumulasi rugi fiskal	6,434,999	(628,881)	--	8,268,158	14,074,276	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	1,392,134	52,930	(59,959)	9,578,826	10,963,931	Employee benefit liabilities
Pendapatan ditangguhkan	12,620	(12,620)	--	222,312	222,312	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	(3,390)	(62)	--	(2,797,593)	(2,801,045)	Leases
Bonus	167,260	32,837	--	(200,097)	--	Bonus
Aset tetap	(10,040,338)	(2,831,964)	11,942,718	(34,923,971)	(35,853,555)	Property, plant and equipment
Penyisihan persediaan	8,213	1,372	--	(9,563)	22	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	3,155	2,587	--	(3,599)	2,143	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	(40,724)	6,412	(15,219)	21,624	(27,907)	Income from associates
Lainnya	(293)	(20)	--	--	(313)	Others
Liabilitas pajak tangguhan akhir periode/ tahun	(2,066,364)	(3,377,409)	11,867,540	(19,843,903)	(13,420,136)	Deferred tax liabilities at the end of the period/ year
		(7,817,095)	(5,524,764)			

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	1 Januari/ January 1, 2017 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income Rp	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	
Aset Pajak tangguhan						Deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal	16,007,239	3,958,790	--	(6,434,999)	13,531,030	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	11,139,625	459,614	1,394,191	(1,374,730)	11,618,700	Employee benefit liabilities
Pendapatan ditangguhkan	267,264	15,862	--	--	303,126	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	(1,535,196)	(748,384)	--	--	(2,283,580)	Leases
Aset tetap	(16,451,314)	(7,008,930)	--	9,848,339	(13,611,905)	Property, plant and equipment
Perbedaan temporer karena revisi surat DJP	242,298	(242,298)	--	--	--	Temporary differences due to revision of DGT letter
Bonus	203,458	(36,198)	--	(167,260)	--	Bonus
Penyisihan persediaan	8,543	(206)	--	(8,190)	147	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	4,159	4,796	--	--	8,955	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	(23,592)	10,006	3,377	10,209	--	Income from associates
Biaya ditangguhkan	(481)	481	--	--	--	Deferred charges
Aset pajak tangguhan akhir tahun	9,882,003	(3,586,467)	1,397,568	1,873,369	9,566,473	Deferred tax assets at the end of the year
Liabilitas pajak tangguhan						Deferred tax liabilities
Akumulasi rugi fiskal	20,009	(20,009)	--	6,434,999	6,434,999	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	11,525	(5,298)	11,177	1,374,730	1,392,134	Employee benefit liabilities
Pendapatan ditangguhkan	10,689	1,931	--	--	12,620	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	(2,070)	(1,320)	--	--	(3,390)	Leases
Bonus	--	--	--	167,260	167,260	Bonus
Aset tetap	(85,766)	(106,233)	--	(9,848,339)	(10,040,338)	Property, plant and equipment
Penyisihan persediaan	--	23	--	8,190	8,213	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	6,932	(3,777)	--	--	3,155	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	(20,753)	(9,771)	9	(10,209)	(40,724)	Income from associates
Lainnya	(291)	(2)	--	--	(293)	Others
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	(59,725)	(144,456)	11,186	(1,873,369)	(2,066,364)	Deferred tax liabilities at the end of the year
		(3,730,923)	1,408,754			

Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	1,970,922	7,351,615	11,081,862	Deferred tax assets to be recovered after 12 months
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	245,041	226,771	(1,515,389)	Deferred tax assets to be recovered within 12 months
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	(28,364,412)	(13,644,300)	--	Deferred tax liabilities to be recovered after 12 months
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	242,872	224,164	(2,066,364)	Deferred tax liabilities to be recovered within 12 months

Rekonsiliasi antara jumlah (manfaat) beban pajak dan hasil perkaitan laba (rugi) sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax (benefit) expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the profit (loss) before tax is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	26,119,210	19,900,838	8,544,072	Profit before tax per consolidated statements of comprehensive income
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	6,529,803	4,975,210	2,136,018	Tax expenses at prevailing rate
Pengaruh pajak atas:				Tax effect on:
Pengakuan pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal	12,232,686	--	--	Unrecognized deferred tax on Allowance for doubtful accounts and Nondeductible expenses (nontaxable income)
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal Kesejahteraan karyawan	414,830	477,203	316,303	Employee welfare
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(371,650)	(193,103)	52,636	Share in net income of associates and joint venture
Penyusutan rumah dinas	4,594	2,576	1,317	Depreciation of guest house
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	--	(147,566)	(229,254)	Interest income subjected to final tax
Bunga obligasi internasional	257,382	458,263	--	International bond obligation
Beban lain tidak dapat dikurangkan	2,729,435	2,752,499	1,838,935	Other nondeductible expenses
Jumlah	21,797,080	8,325,082	4,115,955	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

c. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Pada bulan Februari 2017, Perusahaan telah menerima keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sengketa PPh 26 tahun 2007, 2008, dan 2009 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali yang diajukan Perusahaan dikabulkan sepenuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan restitusi kepada DJP dan telah menerima sebagian restitusi sebesar Rp643.379 dan sisanya sebesar Rp925.743 dikompensasikan untuk pembayaran Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") 2016 dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka (Catatan 19).

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan telah menerima berbagai putusan pajak oleh DJP antara lain SKPLB PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp77.262 yang dikompensasikan dengan STP PPN DN 2016. Perusahaan juga menerima SKPKB atas berbagai pajak untuk tahun 2016 yaitu pajak penghasilan Pasal ("PPh") 21 sebesar Rp17.273, PPh Pasal 22 sebesar Rp1.752.392, PPh Pasal 23 sebesar Rp29.479, PPh Pasal 26 sebesar Rp140.431, PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp1.207.112, SKPKB Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") berbagai masa pada tahun 2016 sebesar Rp2.547.560, STP PPN dalam negeri selama tahun 2016 sebesar Rp5.605.040 dan STP PPN Pungut selama tahun 2016 sebesar Rp20.761. Atas berbagai putusan pajak tersebut, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.504.992, dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2017.

Atas berbagai putusan pajak antara lain SKPLB PPh badan tahun 2016, SKPKB atas berbagai pajak untuk periode tahun 2016 atas PPh 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, SKPKB PPN berbagai masa pada tahun 2016 dan PPN Pungut selama tahun 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan.

c. Tax Assessment Letters

The Company

In February 2017, the Company received the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia regarding the dispute on Income Tax Article 26 year 2007, 2008, and 2009 which stated that juridical review filled by the Company have been granted. Furthermore, the Company also submitted restitution request for the related tax to DGT and have partly received the restitution amounted to Rp643,379 and for the remaining amount of Rp925,473 were compensated for payment of Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") 2016 and recorded it as prepaid taxes (Notes 19).

In December 2017, the Company received various Tax Assessment Letter from DGT such as Tax Overpayment for Corporate Income Tax year 2016 amounted to Rp77,262 that compensated with STP domestic VAT for the year 2016. Tax Underpayment for various income tax for the 2016 such as Income Tax Article 21 amounted to Rp17,273, Article 22 amounted to Rp1,752,392, Article 23 amounted to Rp29,479, Article 26 amounted to Rp140,431, Article 4(2) amounted to Rp1,207,112, Tax Underpayment for value added tax ("VAT") for various period in 2016 amounted to Rp2,547,560, STP domestic VAT in 2016 amounted to Rp5,605,040 and STP VAT collection amounted to Rp20,761. For the various tax assessment letter above, the Company has paid amounted Rp1,504,992, and recorded them as tax prepayment in 2017.

For the various tax decision such as tax overpayment for Corporate Income Tax year 2016, tax underpayment for the various Article 21, Article 22, Article 23, Article 26, Article 4(2) year 2016, tax underpayment VAT for various period in 2016, STP collected VAT year 2016, the Company has propose objection.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 23 Februari 2018, Perusahaan telah menerima putusan DJP atas permohonan pengurangan atau pembatalan STP PPN dalam negeri masa tahun pajak 2016 yang semula sebesar Rp5.605.040 menjadi Rp564.041. Kemudian pada bulan November 2018, Perusahaan telah menerima keputusan atas keberatan SKPKB PPh Pasal 21 final, PPN DN, dan PPN Put tahun 2016. terhadap keputusan keberatan tersebut, Perusahaan akan mengajukan upaya permohonan banding ke Pengadilan Pajak.

Pada bulan April 2018, sesuai dengan surat perintah membayar kelebihan pajak ("SPMKP") yang diterbitkan oleh DJP, Perusahaan telah menerima restitusi kelebihan pembayaran PPN Dalam Negeri sebesar Rp444.367 atas berbagai masa pajak PPN.

Pada bulan Desember 2018, Perusahaan telah menerima berbagai putusan pajak oleh DJP antara lain Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh tahun 2017 sebesar Rp90.693, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas berbagai pajak tahun 2017 pajak penghasilan Pasal ("PPh") 21 sebesar Rp325.382, PPh Pasal 22 sebesar Rp912.336, PPh Pasal 23 sebesar Rp189.067, PPh Pasal 26 sebesar Rp148.456, PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp1.466.396, SKPKB Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") berbagai masa pada tahun 2017 sebesar Rp2.308.136, STP PPN dalam negeri selama tahun 2017 sebesar Rp219.486 dan STP PPN Pungut selama tahun 2016 sebesar Rp29.358. Atas berbagai putusan pajak tersebut, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp443.641, dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2018.

Pada tanggal 28 November 2019, Perusahaan telah menerima SKPKB PPN Dalam Negeri, dan PPN Pemungutan Pajak tahun pajak 2018 masing-masing sebesar Rp29.452 dan Rp1.072.402. Perusahaan telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp29.452 dan Rp536.201 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2019.

In 23 February 2018, the Company obtained a DGT decision letter regarding the Company's objection on the STP of domestic VAT year 2016 which previously amounted Rp5,605,040 to become Rp564,041. Furthermore in November 2018, the Company obtained the verdict of Tax Underpayment income tax article 21, Domestic VAT, and VAT collection for the year 2016, for the verdict the Company will propose objection to the Tax Court.

In April 2018, in accordance with the warrant letter for tax overpayment compensation ("SPMKP") issued by DGT, the Company has received refunds for domestic VAT payments amounted to Rp444,367 for various VAT tax periods.

In December 2018, the Company received various Tax Assessment Letter from DGT such as Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") of Corporate Income Tax year 2017 amounted to Rp90,693, Underpayment Tax Assessment Letter for ("SKPKB") for various income tax for the 2017 such as Income Tax Article 21 amounted to Rp325,382, Article 22 amounted to Rp912,336, Article 23 amounted to Rp189,067, Article 26 amounted to Rp148,456, Article 4(2) amounted to Rp1,466,396, SKPKB for value added tax ("VAT") for various period in 2017 amounted to Rp2,308,136, STP domestic VAT in 2017 amounted to Rp219,486 and STP VAT collection amounted to Rp29,358. For the various tax assessment letter above, the Company has paid amounted Rp443,641 and recorded them as tax prepayment in 2018.

On November 28, 2019, the Company received SKPKB Domestic VAT and VAT tax collection for fiscal years 2018 amounting to Rp29,452 and Rp1,072,402, respectively. The Company has made payments amounting to Rp29,452 and Rp536,201, respectively, which are recorded as prepaid taxes in 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Terhadap putusan pajak yang terbit tersebut, Perusahaan sedang dalam upaya untuk mengajukan permohonan keberatan ke DJP.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas berbagai SKPKB pajak tahun 2017 atas PPh 21 sebesar Rp291.795, PPh Pasal 23 sebesar Rp174.886, PPh Pasal 26 sebesar Rp7.347 dan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp8.705 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, atas pengajuan keberatan berbagai SKPKB tahun Pajak 2016 ke DJP telah ditolak oleh DJP atas PPh 21 sebesar Rp17.273, PPh 23 sebesar Rp29.479 dan PPh 26 sebesar Rp140.431. Perusahaan juga melakukan koreksi atas restitusi PPN sebesar Rp232.366.

Pada tanggal 27 dan 30 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran berbagai SKPKB tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 yang belum dibayar melalui set-off piutang kompensasi dan piutang subsidi masing-masing sebesar Rp7.262.621 dan Rp1.377.603 yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pada bulan Mei 2019 IP, entitas anak menerima SKPKB atas berbagai pajak penghasilan ("PPh") dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp110.111. IP, entitas anak telah membayar seluruh SKPKB, namun IP, entitas anak masih mengajukan keberatan dan pembatalan ke DJP sebesar Rp110.111 yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka.

Pada bulan Mei dan Juni 2019, IP, entitas anak menerima SKPLB atas PPh Badan tahun 2017 sebesar Rp279.394 dan restitusi atas PPN sebesar Rp225.978.

Pada bulan Juli 2018, IP, entitas anak telah menerima beberapa SKPKB dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas berbagai PPh dan PPN tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp408.773. IP, entitas anak telah membayar seluruh SKPKB dan SPT tersebut namun IP, entitas anak tetap mengajukan keberatan dan pembatalan ke

For those Tax Assessment Letter, the Company will propose objection to DGT.

In 2019, the Company made payments for various SKPKB fiscal years 2017 for income tax Article 21 amounting to Rp291,795, income tax Article 23 amounting to Rp174,886, income tax Article 26 amounting to Rp7,347 and Overseas VAT amounting to Rp8,705 which was recorded as prepaid tax in 2019.

In 2019, upon the appeal of various 2016 tax year SKPKB to the DGT it was rejected by the DGT for income tax Article 21 amounting to Rp17,273, income tax Article 23 amounting to Rp29,479 and income tax Article 26 amounting to Rp140,431. The Company also made corrections on VAT refunds of Rp232,366.

On December 27 and 30 2019, the Company paid the various unpaid SKPKB for the 2016, 2017 and 2018 fiscal years through the set-off of compensation receivables and Receivables on electricity subsidy amounting to Rp7,262,621 and Rp1,377,603, respectively, which have been received by the Director General of the Treasury.

In May 2019, IP, a subsidiary has received an SKPKB for various income tax ("PPh") and Value Added Tax ("VAT") for 2017 fiscal year amounting to Rp110,111. IP, a subsidiary has paid all the SKPKB, however IP, a subsidiary had submitted the objection letter and request of cancellation to DJP amounting to Rp110,111, recorded as prepaid tax.

In May and June 2019, IP, a subsidiary received a SKPLB for 2017 Corporate Income Tax amounting to Rp279,394 and a refund of VAT of Rp225,978.

In July 2018, IP, a subsidiary has received various SKPKB and Tax Collection Letter ("STP") for various PPh and VAT for 2016 fiscal year amounting to Rp408,773. IP, a subsidiary has paid all the SKPKB and STP, however IP, a subsidiary had submitted the objection letter and request of cancellation to DJP amounting to

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

DJP sebesar Rp393.434 yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan pembayaran sebesar Rp15.339 sebagai beban lain-lain.

Pada bulan Oktober 2019, IP, entitas anak menerima hasil keputusan keberatan atas pemeriksaan Pajak tahun 2016, diantaranya ditolak oleh DJP dan menjadi beban diluar operasi sebesar Rp86.184, diterima oleh DJP sebesar Rp71.010 dan penyesuaian oleh DJP dan menjadi beban luar operasi IP sebesar Rp974. IP, entitas anak mengajukan banding kembali atas PPh sebesar Rp237.201 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.

Pada bulan Juli 2018, IP, entitas anak juga menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp294.635 dan menetapkan rugi neto fiskal dari Rp11.645.083 menjadi Rp12.417.946. IP, entitas anak telah mengajukan keberatan atas penetapan rugi neto fiskal tersebut. IP, entitas anak juga menerima restitusi atas PPN sebesar Rp135.991.

d. Pengampunan Pajak

Perusahaan dan entitas anak Perusahaan berpartisipasi dalam pengampunan pajak sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Berdasarkan surat Ketetapan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET295/PP/WPJ.19/2017 tanggal 5 April 2017, jumlah aset pengampunan pajak Perusahaan yang dilaporkan adalah sebesar Rp46.987. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Rp393,434, recorded as prepaid tax and payment amounting to Rp15,339, recorded as other expense.

In October 2019, IP, a subsidiary received the results of the objection decision on the 2016 tax audit, including being rejected by the DJP and being a non-operating expense of Rp86,184, received by DJP in the amount of Rp71,010 and adjusting by the DJP and being a non-operating expense of Rp974. IP, a subsidiary appealed again the PPh in the amount of Rp237,201 which was recorded as prepaid tax.

In July 2018, IP, a subsidiary also received Tax Assessment Letter for Overpayment ("SKPLB") of corporate income tax for 2016 fiscal year amounted to Rp294,635 and amend the fiscal net loss from Rp11,645,083 to Rp12,417,946. IP, a subsidiary has filed objection letter for the amended fiscal net loss. IP, a subsidiary also received restitution of VAT amounting to Rp135,991.

d. Tax Amnesty

The Company and its subsidiaries participated in Tax Amnesty in connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No.11 of 2016 regarding Tax Amnesty, as amended by the Minister of Finance Regulation No.141/PMK.03/2016 and the Directorate General of Tax Regulation No.PER-18/PJ/2016 regarding the refund of excess payment on compensation for Tax Amnesty.

Based on Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KET-295/PP/WPJ.19/2017 dated April 5, 2017, the Company declared total tax amnesty assets amounted to Rp46,987. As of December 31, 2017, such amounts are recorded as additional paid-in capital.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. Laba (Rugi) Per Saham Dasar dan Dilusian

Laba (rugi) bersih

Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.270.922, Rp11.568.286, dan Rp4.410.210.

Jumlah saham

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba (rugi) per saham dasar pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebanyak 113.842.383, 109.826.527, dan 87.259.643 saham.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

49. Basic and Diluted Earnings Per Share

Net income

Net income (loss) for the computation of basic earnings per share in 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp4,270,922, Rp11,568,286, and Rp4,410,210, respectively.

Number of shares

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings (loss) per share as of December 31, 2019, 2018, and 2017 were amounted 113,842,383, 109,826,527, 87,259,643 shares, respectively.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share are the same as the dilutive earnings per share.

50. Liabilitas Imbalan Kerja

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:			
Imbalan pascakerja			
Program pensiun	276,443	1,067,071	463,745
Imbalan pascakerja lainnya	12,946,513	10,550,746	13,334,566
Imbalan pemeliharaan kesehatan	41,796,191	37,056,587	37,415,582
Imbalan jangka panjang lainnya	1,051,578	959,380	908,056
Jumlah	56,070,725	49,633,784	52,121,949
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			
Liabilitas jangka pendek	5,232,467	5,873,558	8,562,927
Liabilitas jangka panjang	50,838,258	43,760,226	43,559,022
Jumlah	56,070,725	49,633,784	52,121,949
Beban diakui di laba rugi (Catatan 44):			
Imbalan pascakerja			
Program pensiun	136,640	82,798	136,032
Imbalan pascakerja lainnya	1,702,376	1,610,504	1,883,208
Imbalan pemeliharaan kesehatan	3,790,974	3,245,462	2,850,567
Imbalan jangka panjang lainnya	305,877	386,831	372,235
Jumlah	5,935,867	5,325,595	5,242,042
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			
Program pensiun	(796,603)	768,526	599,757
Imbalan pascakerja lainnya	2,367,276	(2,534,451)	(296,195)
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2,205,286	(2,553,765)	5,331,453
Jumlah	3,775,959	(4,319,690)	5,635,015

Program pensiun imbalan pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang

50. Employee Benefits Liabilities

Liabilities recognized on statements of financial position:
Post-employment benefits
Pension plan
Other post-employment benefits
Health care benefits
Other long-term benefits
Total

Presented in consolidated statements of financial position:
Current liabilities
Non-current liabilities
Total

Expense recognize in profit or loss (Note 44):
Post-employment benefits
Pension plan
Other post-employment benefits
Health care benefits
Other long-term benefits
Total

Remeasurement on defined benefit plan recognized in other comprehensive income:
Pension plan
Other post-employment benefits
Health care benefits
Total

Defined benefit pension plan

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This pension

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 15,45% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas dan penghargaan kesetiaan kerja.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-20/NB.1/2017 dated on April 26, 2017 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 15.45% from basic pension income, respectively.

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

Other long-term benefits

The Company and its subsidiaries also provide other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit and loyalty benefit.

Assumption used in the calculations of employment benefits liabilities

2019, 2018 dan/ and 2017

Tabel mortalita	CSO-58	Mortality table
Tingkat pengunduran diri		Resignation rate
Usia 18 s.d. 49 tahun	0.27%	Age 18 up to 49 years old
Usia 50 s.d. 55 tahun	0.01%	Age 50 up to 55 years old
Usia pensiun normal	56 tahun/ Years old	Normal retirement age

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Perusahaan dan entitas anak. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistic and experiences by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

Penilaian aktuarial atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The actuarial calculations of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long term benefits for the years ended December 31, 2019, 2018, and 2017 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasi, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

In 2015, the Company and its subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that best suits with the Company and its subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and its subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen mortality table 2012. Based on the study, the Company and its subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and its subsidiaries' employees and pensioners is CSO-58. The Company and its subsidiaries apply CSO-58 retrospectively.

(i) Program Pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

(i) Pension Plan

The amounts recognized in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Nilai kini kewajiban yang didanai	9,420,639	9,178,377	8,633,567	<i>Present value of funded obligations</i>
Nilai wajar aset program	(9,144,196)	(8,111,306)	(8,169,822)	<i>Fair value of plan assets</i>
Defisit program yang didanai	276,443	1,067,071	463,745	<i>Deficit of funded plans</i>
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	--	--	--	<i>Present value of unfunded obligations</i>
Liabilitas pada laporan Posisi keuangan	276,443	1,067,071	463,745	<i>Liability in the statement of financial position</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement its of present value of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pada awal tahun	9,178,377	8,633,567	7,842,473	<i>At beginning of the year</i>
Dibebankan ke laba rugi:				<i>Charged to profit or loss:</i>
Biaya jasa kini	111,904	114,494	142,568	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	744,946	597,860	636,079	<i>Interest expense</i>
	856,850	712,354	778,647	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain: (Keuntungan) kerugian aktuarial dari:				<i>Charged to other comprehensive income:</i>
Perubahan asumsi keuangan	123,091	(206,962)	190,654	<i>Actuarial (gain) loss from change in: Financial assumptions</i>
Penyesuaian atas pengalaman	118,419	845,842	509,544	<i>Experience adjustment</i>
	10,276,737	9,984,801	9,321,318	
Pembayaran manfaat	(856,098)	(806,424)	(687,751)	<i>Benefit payment</i>
Pada akhir tahun	9,420,639	9,178,377	8,633,567	<i>At end of the year</i>

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pada awal tahun	8,111,306	8,169,822	7,724,438	<i>At beginning of the year</i>
Imbal hasil atas aset program	670,510	575,162	642,615	<i>Return on plan assets</i>
Iuran pemberi kerja	130,665	247,996	333,468	<i>Employer's contributions</i>
Iuran pekerja	49,700	54,394	56,611	<i>Employee's contributions</i>
Pembayaran manfaat	(856,098)	(806,424)	(687,751)	<i>Benefit payment</i>
Kerugian aktuarial pada aset program	1,038,113	(129,644)	100,441	<i>Actuarial loss on plan assets</i>
Pada akhir tahun	9,144,196	8,111,306	8,169,822	<i>At the end of the year</i>

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2019				2018				2017				
	Memiliki kuotasi harga/ Quoted price Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ Unquoted price Rp	Jumlah/ Total Rp	%	Memiliki kuotasi harga/ Quoted price Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ Unquoted price Rp	Jumlah/ Total Rp	%	Memiliki kuotasi harga/ Quoted price Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ Unquoted price Rp	Jumlah/ Total Rp	%	
Surat Berharga Negara	1,246,382	--	1,246,382	13.63%	1,170,438	--	1,170,438	14.43%	1,288,072	--	1,288,072	15.77%	<i>Government bonds</i>
Tabungan	--	103,680	103,680	1.13%	--	79,406	79,406	0.98%	--	75,935	75,935	0.93%	<i>Saving accounts</i>
Deposito on call	--	53,330	53,330	0.58%	--	19,325	19,325	0.24%	--	23,635	23,635	0.29%	<i>Deposits on call</i>
Deposito berjangka	--	630,000	630,000	6.89%	--	339,250	339,250	4.18%	--	388,155	388,155	4.75%	<i>Time deposits</i>
Saham	924,464	--	924,464	10.11%	952,624	--	952,624	11.74%	979,347	--	979,347	11.99%	<i>Shares</i>
Obligasi	2,492,698	--	2,492,698	27.26%	2,727,574	--	2,727,574	33.63%	2,750,032	--	2,750,032	33.66%	<i>Bonds</i>
Sukuk	9,959	--	9,959	0.11%	9,392	--	9,392	0.12%	9,984	--	9,984	0.12%	<i>Sukuk</i>
Unit penyertaan reksa dana	1,052,795	--	1,052,795	11.51%	940,800	--	940,800	11.60%	1,059,385	--	1,059,385	12.97%	<i>Mutual fund units</i>
Efekt beragunan aset	30,262	--	30,262	0.33%	38,451	--	38,451	0.47%	48,369	--	48,369	0.59%	<i>Asset backed securities</i>
Penempatan langsung	--	919,933	919,933	10.06%	--	691,865	691,865	8.53%	--	617,725	617,725	7.56%	<i>Direct investments</i>
Tanah	--	117,095	117,095	1.28%	--	78,274	78,274	0.96%	--	78,274	78,274	0.96%	<i>Land</i>
Bangunan	--	412,089	412,089	4.51%	--	418,488	418,488	5.16%	--	418,488	418,488	5.12%	<i>Buildings</i>
Tanah dan bangunan	--	417,094	417,094	4.56%	--	369,889	369,889	4.56%	--	369,344	369,344	4.52%	<i>Land and buildings</i>
Lain-lain	--	734,415	734,415	8.03%	--	275,530	275,530	3.40%	--	63,077	63,077	0.77%	<i>Other</i>
Total	8,756,560	3,387,636	9,144,196	100.00%	8,839,279	2,272,027	8,111,306	100.00%	8,135,189	2,034,633	8,169,822	100.00%	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	2017	
Tingkat diskonto	7.78%	8.77%	7.26%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	5.00%	<i>Salary increase rate per annum</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah Rp260.397.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ended December 31, 2019 are amounted to Rp260,397.

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

Dampak atas liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit liabilities			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ <i>Decrease by 1.51%</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	kenaikan sebesar/ <i>Increase by 1.77%</i>	Salary rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ <i>Decrease by 0.00%</i>	Mortality rate
		Kenaikan sebesar/ <i>Increase by 1.72%</i>	
		Penurunan sebesar/ <i>Decrease by 1.58%</i>	
		Kenaikan sebesar/ <i>Increase by 0.01%</i>	

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long term benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position.

(ii) Imbalan Pascakerja Lainnya

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(ii) Other Post-Employment Benefits

Movement of post-employment benefits liabilities during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pada awal tahun	10,550,746	13,334,566	13,371,371	At the beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi				Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	865,426	710,369	822,522	Current service cost
Biaya bunga	841,996	903,789	1,063,478	Interest expense
Harapan dari hasil investasi	(5,046)	(3,654)	(2,792)	Expectations on investment returns
	1,702,376	1,610,504	1,883,208	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:				Charged to other comprehensive income:
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:				Actuarial (gain) loss from change in:
Perubahan asumsi demografik	--	734	--	Demographic assumptions
Perubahan asumsi keuangan	837,046	(1,291,963)	303,549	Financial assumptions
Kombinasi perubahan asumsi	--	(204)	(200,788)	Combination of change in assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	1,530,230	(1,243,018)	(398,955)	Experience adjustment
	14,620,398	12,410,619	14,958,385	
Pembayaran manfaat	(1,673,885)	(1,859,873)	(1,623,819)	Benefit payment
Pada akhir tahun	12,946,513	10,550,746	13,334,566	At end of the year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	2017	
Tingkat diskonto	7.78%	8.52%	7.24%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8.30%	6.76%	8.30%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

Dampak atas liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit liabilities			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 7.60%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 9.03%	Salary rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.00%	Mortality rate
		Kenaikan sebesar/ Increase by 9.11%	
		Penurunan sebesar/ Decrease by 7.67%	
		Penurunan sebesar/ Decrease by 0.00%	
		Kenaikan sebesar/ Increase by 0.00%	

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

(iii) Health Care Benefits

The Company and its subsidiaries operate a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of defined benefit liabilities over the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pada awal tahun	37,056,587	37,415,582	30,152,741	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:				Changed to profit or loss:
Biaya jasa kini	650,579	566,858	411,499	Current service cost
Biaya bunga	3,140,395	2,678,604	2,439,068	Interest expense
	3,790,974	3,245,462	2,850,567	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain: (Keuntungan) kerugian aktuarial dari:				Charged to other comprehensive income:
Perubahan asumsi keuangan	4,278,197	(1,587,336)	5,473,627	Actuarial (gain) loss from change in: Financial assumptions
Kombinasi perubahan asumsi	--	(1,245,819)	--	Combination of change in assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	(2,072,911)	279,390	(142,174)	Experience adjustment
	43,052,847	38,107,279	38,334,761	
Pembayaran manfaat	(1,256,656)	(1,050,692)	(919,179)	Benefit payment
Pada akhir tahun	41,796,191	37,056,587	37,415,582	At end of the year

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	2017	
Tingkat diskonto	7.78%	9.19%	7.26%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.00%	7.00%	6.00%	Salary increase per annum
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	7.00%	7.00%	6.00%	Long-term increase rate in health costs

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas liabilitas pemeliharaan kesehatan/ Impact on defined health care benefit liabilities			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 11.42%	Kenaikan sebesar/ Increase by 14.13%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 11.14%	Penurunan sebesar/ Decrease by 9.23%	Health costs increase rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.49%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.61%	Mortality rate

(iv) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(iv) Other Long-term Employee Benefits
Movement of defined benefit liabilities during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Pada awal tahun	959,380	908,056	962,452	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi				Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	232,388	333,180	308,911	Current service cost
Biaya bunga	73,489	53,651	63,324	Interest expense
	<u>305,877</u>	<u>386,831</u>	<u>372,235</u>	
Pengukuran kembali program imbalan pasti dibebankan ke laba rugi:				Remeasurement on defined benefit plan charged to profit or loss:
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:				Actuarial (gain) loss from change in:
Perubahan asumsi demografik	--	30	--	Demographic assumptions
Perubahan asumsi keuangan	25,676	(21,285)	28,347	Financial assumptions
Kombinasi perubahan asumsi	--	7	(19)	Combination of change in assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	(25,676)	21,249	(29,695)	Experience adjustment
	<u>1,265,257</u>	<u>1,294,888</u>	<u>1,333,320</u>	
Pembayaran manfaat	(213,679)	(335,508)	(425,264)	Benefit payment
Pada akhir tahun	<u>1,051,578</u>	<u>959,380</u>	<u>908,056</u>	At end of the year

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	2017	
Tingkat diskonto	8.62%	8.62%	7.24%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.20%	7.20%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long term employee benefit liabilities			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2.90%	Kenaikan sebesar/ Increase by 3.09%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 2.98%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2.85%	Salary rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.01%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.01%	Mortality rate

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries are exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Life expectancy

The majority of the plan's obligations are to provide lifetime benefit, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Perusahaan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact for the entire class of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Company and its subsidiaries also invest in property, bonds, mutual funds and cash. The Company and its subsidiaries believe that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 21,19 tahun.

Average expected remaining service year is 21.19 year.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefit is as follows:

	2019				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year Rp	2 sampai 5 tahun/ Between 2 to 5 years Rp	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years Rp	Jumlah/ Total Rp	
Imbalan pascakerja					<i>Post-employment benefits</i>
Program pensiun	731,724	1,550,938	8,627,681	10,910,343	<i>Pension plan</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,488,765	3,858,633	115,716,132	121,063,530	<i>Health care benefits</i>
Imbalan pascakerja lainnya	2,795,736	4,232,690	138,125,408	145,153,834	<i>Other post-employment benefit</i>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	216,242	1,577,981	1,400,663	3,194,886	<i>Other long-term employee benefit</i>
Jumlah	5,232,467	11,220,242	263,869,884	280,322,593	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. Transaksi Non-Kas

51. Non-Cash Transactions

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan dan Entitas anak yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Perusahaan dan Entitas anak sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Company's and its Subsidiaries liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flow were, or future cash flows will be, classified in the Company's and its Subsidiaries consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2019 dan 2018:

For the years ended in 2019 and 2018:

	Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash flows from Financing Activities			Perubahan Transaksi Non Kas/ Non-Cash Changes			2019 Rp
	2018 Rp	Penambahan/ Additional Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Amortisasi/ Amortization Rp	Penambahan Aset Tetap/ Addition of Fixed Asset Rp	Efek selisih kurs belum ter-realisis dan yang lainnya/ Unrealized foreign exchange and others Rp	
Penerusan pinjaman/ Two-step loans	38,635,552	--	(2,566,661)	(34,191)	3,132,964	(1,190,118)	37,977,546
Utang kepada Pemerintah dan LK Pemerintah non-bank/ Government and non-bank Government LK loans	7,204,278	--	(1,043,793)	197,560	--	--	6,358,045
Utang sewa pembiayaan/ Lease liabilities	17,092,965	--	(2,624,629)	--	--	(358,852)	14,109,484
Utang bank/ Bank loans	181,111,734	77,147,139	(49,363,488)	17,473	--	(3,195,700)	205,717,158
Utang obligasi dan sukuk ijarah/ Bonds payable and sukuk ijarah	133,802,433	54,597,702	(2,279,812)	170,057	--	(5,051,604)	181,238,776
Utang listrik swasta / Electricity purchase payable	7,510,319	--	(394,405)	--	--	(285,008)	6,830,906
Utang KIK - EBA/ KIK - EBA loans	2,907,986	--	(966,724)	--	--	--	1,941,262
Jumlah/ Total	388,265,267	131,744,841	(59,239,512)	350,899	3,132,964	(10,081,282)	454,173,177

	Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash flows from Financing Activities			Perubahan Transaksi Non Kas/ Non-Cash Changes			2018 Rp
	2017 Rp	Penambahan/ Additional Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Amortisasi/ Amortization Rp	Penambahan Aset Tetap/ Addition of Fixed Asset Rp	Efek selisih kurs belum ter-realisis dan yang lainnya/ Unrealized foreign exchange and others Rp	
Penerusan pinjaman/ Two-step loans	34,221,469	--	(2,950,612)	5,032	4,547,751	2,811,912	38,635,552
Utang kepada Pemerintah/ Government loans	7,352,965	--	(1,043,793)	78,250	--	816,856	7,204,278
Utang sewa pembiayaan/ Lease liabilities	20,585,178	--	(5,186,938)	--	--	1,694,725	17,092,965
Utang bank/ Bank loans	142,566,110	93,391,854	(57,585,860)	--	--	2,739,630	181,111,734
Utang obligasi dan sukuk ijarah/ Bonds payable and sukuk ijarah	101,354,360	31,236,379	(914,000)	40,591	--	2,085,103	133,802,433
Utang listrik swasta / Electricity purchase payable	7,376,402	--	(368,142)	--	--	502,059	7,510,319
Utang KIK - EBA/ KIK - EBA loans	3,538,586	--	(630,600)	--	--	--	2,907,986
Jumlah/ Total	316,995,070	124,628,233	(68,679,945)	123,873	4,547,751	10,650,285	388,265,267

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pengungkapan tambahan atas aktivitas
investasi dan pendanaan non-kas:

*Supplemental disclosures on non-cash
investing and financing activities:*

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:				<i>Non-cash investing and financing activities:</i>
Perolehan aset sewaan melalui utang sewa pembiayaan	--	--	3,632,755	<i>Addition to leased property through lease liabilities</i>
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui: Penarikan pinjaman dan utang biaya proyek	3,132,964	4,547,751	3,933,998	<i>Additions to construction in progress through: Drawdown of loans and project cost payable</i>
Bantuan Pemerintah	--	--	308,300	<i>Government equity participation</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman	--	164,008	317,728	<i>Capitalization of borrowing costs</i>
Utang lain-lain	--	10,778,189	2,954,335	<i>Other payables</i>
Piutang lain-lain	--	656,923	1,671	<i>Other receivables</i>
Perolehan aset tetap melalui pengampunan pajak	--	--	46,987	<i>Addition of property, plant and equipment through tax amnesty</i>
Penambahan (pengurangan) nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi	(1,183,109)	48,935,803	1,051,363	<i>Addition (deduction) of value of assets through revaluation and increase in fair value of investment properties</i>
Kerugian penurunan nilai aset tetap	247,615	301,965	327,986	<i>Impairment on property, plant and equipment</i>
Penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi properti investasi	7,193	19,382	--	<i>Addition of investment property and equipment from investment property reclassification</i>
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dan penyesuaian	--	--	2,346,410	<i>Addition of investment property from property, plant and equipment reclassification and adjustment</i>

52. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

52. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Sifat Hubungan Berelasi

- Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
- Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
- Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Nature of Related Parties

- The Government is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and BUMN.
- The Company is related to other BUMN owned by the Ministry of Finance.
- The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).
- The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Republic of Indonesia</i> ("Pemerintah")	Pemegang saham akhir/ <i>Ultimate Shareholder</i>	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah/ <i>Receipt of electricity subsidy, two step loan and government loan</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan kas dan setara kas, rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ <i>Placement of cash and cash equivalents, restricted cash in bank and time deposits, short-term investment, and receipt of bank loans</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ <i>Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank/ <i>Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans</i>
PT Bank DKI ("Bank DKI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ <i>Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank Tabungan Negara")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan kas dan setara kas <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ <i>Purchase of fuels and lubricants</i>
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar/ <i>Purchase of fuels</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar/ <i>Purchase of fuels</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa konstruksi/ <i>Construction services transaction</i>
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar/ <i>Purchase of fuels</i>
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ <i>Engineering services, survey and coal measurement</i>
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ <i>Engineering services, survey and coal measurement</i>
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara/ <i>Fuels and coals transportation services transaction</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ <i>Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels</i>
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ <i>Receipt of non-bank government financial institution</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Purchase of electricity and issuance of long-term loan</i>
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Issuance of long-term loan</i>
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ <i>Post-employment benefit plan</i>	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti/ <i>Payment of contribution for defined benefit plan</i>
PT Transportasi Gas Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control Through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa penyaluran gas/ <i>Gas distribution services</i>
PT Wijaya Karya Industri Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control Through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi sewa mesin pembangkit/ <i>Lease power plant machinery</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control Through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa konstruksi/ <i>Construction services</i>

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi:

Balances and transactions with related parties:

	Catatan/ Notes	2019		2018		2017		
		Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)	
Piutang pihak berelasi	9							Receivables from related parties
PT Shenhua Guohua								PT Shenhua Guohua
Pembangkit Jawa Bali		785,639	0.05%	830,188	0.06%	--	--	Pembangkit Jawa Bali
PT Perta Daya Gas		168,878	0.01%	199,576	0.01%	224,742	0.02%	PT Perta Daya Gas
PT Mitra Energi Batam		1,845	0.00%	1,845	0.00%	683	0.00%	PT Mitra Energi Batam
PT Dalle Energy Batam		--	--	--	--	5,603	0.00%	PT Dalle Energy Batam
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		--	--	5,582	0.00%	11,447	0.00%	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
Subjumlah		956,362	0.06%	1,037,191	0.07%	242,475	0.02%	Subtotal
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10							Restricted cash in banks and time deposits
Bank Mandiri		86,032	0.01%	82,412	0.01%	57,909	0.00%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia		8,979	0.00%	1,348	0.00%	71,313	0.01%	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia		--	--	--	--	75,200	0.01%	Bank Rakyat Indonesia
Subjumlah		95,011	0.01%	83,760	0.01%	204,422	0.02%	Subtotal
Kas dan setara kas	12							Cash and cash equivalents
Bank Rakyat Indonesia		13,444,149	0.85%	10,464,753	0.70%	14,043,255	1.05%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		12,553,296	0.79%	8,635,043	0.58%	10,071,808	0.75%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		10,558,351	0.67%	5,651,840	0.38%	8,516,490	0.64%	Bank Mandiri
Bank Tabungan Negara		959,389	0.06%	1,001,303	0.07%	1,505,072	0.11%	Bank Tabungan Negara
Bank DKI		656,755	0.03%	364,828	0.02%	836,833	0.06%	Bank DKI
Subjumlah		38,171,940	2.40%	26,117,767	1.76%	34,973,458	2.61%	Subtotal
Investasi jangka pendek	13							Short-term investment
Bank Rakyat Indonesia		273,901	0.02%	1,184,511	0.08%	260,000	0.02%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri		20,000	0.00%	20,000	0.00%	20,000	0.00%	Bank Mandiri
Subjumlah		293,901	0.02%	1,204,511	0.08%	280,000	0.02%	Subtotal
Piutang usaha	14							Trade accounts receivable
Badan Usaha Milik Negara		823,893	0.05%	596,016	0.04%	583,539	0.04%	State-Owned Enterprises
Piutang subsidi listrik	15							Receivables on electricity subsidy
		--	--	--	--	7,588,977	0.57%	
Jumlah		40,341,107	2.54%	29,039,245	1.95%	43,872,871	3.28%	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019		2018		2017		
		Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)	
Penerusan pinjaman	24	37,977,546	5.81%	38,635,552	6.86%	34,221,468	7.35%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-Bank	25	6,358,045	0.97%	7,204,278	1.13%	7,352,966	1.58%	Government and non-bank Government financial institution loans
Utang sewa pembiayaan PT Wijaya Karya Industri Energi	26	--	--	86,466	0.02%	239,805	0.05%	Lease liabilities PT Wijaya Karya Industri Energi
Utang bank	27							Bank loans
Bank Rakyat Indonesia		34,052,157	5.21%	23,271,064	4.13%	34,569,917	7.43%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri		23,850,000	3.62%	24,898,287	4.42%	16,314,842	3.50%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia		18,314,254	2.80%	20,338,378	3.61%	21,872,337	4.70%	Bank Negara Indonesia
Bank DKI		1,827,679	0.28%	3,078,962	0.55%	2,401,684	0.52%	Bank DKI
Bank Tabungan Negara		1,500,000	0.23%	--	--	--	--	
Subjumlah		79,344,090	12.13%	71,586,691	12.71%	75,158,780	16.15%	Subtotal
Utang pihak berelasi	30							Payable to related parties
PT Riau Power		92	0.00%	--	--	--	--	PT Riau Power
PT Mitra Energi Batam		--	--	1,000	0.00%	--	--	PT Mitra Energi Batam
PT Dalle Energy Batam		--	--	--	--	794	0.00%	PT Dalle Energy Batam
Subjumlah		92	0.00%	1,000	0.00%	794	0.00%	Subtotal
Utang usaha	31							Trade accounts payable
PT Pertamina (Persero)		4,839,987	0.74%	572,110	0.10%	4,590,958	0.99%	PT Pertamina (Persero)
PT Nusantara Regas		1,397,554	0.21%	727,834	0.13%	505,071	0.11%	PT Nusantara Regas
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk		1,363,981	0.21%	1,396,507	--	1,041,368	0.22%	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Sumber Segara Primadaya		1,198,471	0.18%	538,466	0.10%	1,134,634	0.24%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		883,485	0.14%	247,512	0.04%	690,978	0.15%	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Pertamina Geothermal Energi		319,027	0.05%	319,336	0.06%	286,137	0.06%	PT Pertamina Geothermal Energi
PT Geo Dipa Energi		143,312	0.02%	134,620	0.02%	133,939	0.03%	PT Geo Dipa Energi
PT Bajradaya Sentranusa		128,369	0.02%	133,633	0.02%	120,694	0.03%	PT Bajradaya Sentranusa
Perum Jasa Tirta		78,163	0.01%	95,669	0.00%	11,638	0.00%	Perum Jasa Tirta
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		35,893	0.01%	--	--	--	--	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Djakarta Lloyd (Persero)		27,540	0.00%	38,881	0.00%	11,836	0.00%	PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dalle Energy Batam		16,494	0.00%	43,005	0.01%	--	--	PT Dalle Energy Batam
PT Transportasi Gas Indonesia		10,683	0.00%	7,192	0.00%	11,732	0.00%	PT Transportasi Gas Indonesia
PT Mitra Energi Batam		14,803	0.00%	14,678	0.00%	--	--	PT Mitra Energi Batam
PT Sucofindo (Persero)		--	--	--	--	11,515	0.00%	PT Sucofindo (Persero)
PT Surveyor Indonesia (Persero)		--	--	--	--	2,755	0.00%	PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk		--	--	--	--	1,512,870	0.32%	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha)		1,356,973	0.21%	4,775,087	1.12%	1,149,114	0.25%	Others (each below 5% of total trade accounts payable)
Subjumlah		11,814,735	1.81%	9,044,530	1.61%	11,215,239	2.40%	Subtotal
Biaya masih harus dibayar bunga dan beban keuangan Penerusan pinjaman	34	331,275	0.05%	344,854	0.06%	275,160	0.06%	Accrued expenses Interest and financing charges Two-step loans
Utang bank								Bank loans
Bank Mandiri		210,041	0.03%	256,703	0.05%	170,595	0.04%	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia		124,847	0.02%	109,888	0.02%	158,100	0.03%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		113,886	0.02%	126,645	0.02%	134,069	0.03%	Bank Negara Indonesia
Bank Tabungan Negara		2,363	0.00%	--	--	--	--	Bank Tabungan Negara
Bank DKI		--	--	4,475	0.00%	2,747	0.00%	Bank DKI
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		74,699	0.01%	89,679	0.02%	15,081	0.00%	Government and non-bank Government financial institution loans
Subjumlah		857,111	0.13%	932,244	0.16%	755,752	0.16%	Subtotal
Jumlah		136,351,619	20.85%	127,490,761	22.50%	128,944,804	27.69%	Total
Penjualan tenaga listrik Badan Usaha Milik Negara	37	5,721,522	2.07%	5,505,800	2.09%	5,487,610	2.23%	Sale of electricity State-Owned Enterprises
Subsidi listrik Pemerintah	38	51,711,774	100.00%	48,101,754	100.00%	45,738,215	100.00%	Government's electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas	40							Fuel and lubricants expense
PT Pertamina (Persero)		29,234,689	21.48%	29,385,495	21.39%	19,129,336	16.36%	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		10,678,506	7.85%	10,132,171	7.38%	6,976,710	5.97%	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Nusantara Regas		8,494,335	6.24%	10,193,687	7.42%	8,151,615	6.97%	PT Nusantara Regas
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk		6,955,163	5.11%	7,682,414	5.59%	5,044,782	4.31%	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
Jumlah		55,362,693	40.68%	57,393,767	33.61%	39,302,443	33.61%	Total
Beban pembelian tenaga listrik	41							Purchased electricity expenses
PT Sumber Segara Primadaya		7,274,856	8.71%	7,585,240	9.00%	6,547,601	9.04%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Pertamina Geothermal Energi		2,529,323	3.03%	2,611,244	3.10%	2,076,654	2.87%	PT Pertamina Geothermal Energi
PT Bukit Pembangkit Inovative		1,050,730	1.26%	898,457	1.07%	671,673	0.93%	PT Bukit Pembangkit Inovative
PT Bajradaya Sentranusa		871,617	1.04%	840,239	1.00%	781,022	1.08%	PT Bajradaya Sentranusa
PT Geo Dipa Energi (Persero)		791,998	0.95%	790,389	0.94%	742,444	1.03%	PT Geo Dipa Energi (Persero)
PT Sphenhua Guohua PJB		405,908	0.49%	592,659	0.70%	--	--	PT Sphenhua Guohua PJB
PT Dalle Energy Batam		304,021	0.36%	--	--	529,834	0.73%	PT Dalle Energy Batam
Jumlah		13,228,453	15.83%	13,318,228	15.81%	11,349,228	15.68%	Total
Beban pemeliharaan	43							Maintenance expenses
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		223,611	1.00%	225,224	1.09%	235,028	1.20%	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
Beban usaha lain-lain	45							Other operating expenses
Asuransi								Insurance
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		341,441	3.96%	283,607	3.57%	327,456	4.25%	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Lain - lain								Others
PT Sucofindo (Persero)		--	--	--	--	19,943	0.26%	PT Sucofindo (Persero)
PT Surveyor Indonesia (Persero)		--	--	--	--	12,131	0.16%	PT Surveyor Indonesia (Persero)
Beban keuangan	46							Financial cost
Utang bank		5,341,726	21.70%	4,288,070	19.83%	5,545,937	29.89%	Bank loans
Penerusan pinjaman		650,386	2.64%	611,107	2.83%	547,187	2.95%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		374,996	1.52%	445,348	2.06%	514,091	2.77%	Government and non-bank Government financial institution loans
Instrumen derivatif		295,118	1.20%	199,545	0.92%	62,552	0.34%	Derivative instruments
Jumlah		6,662,226	27.06%	5,544,070	25.64%	6,669,767	35.95%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/ beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp86.447, Rp74.856, dan Rp72.125.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners in 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp86,447, Rp74,856, and Rp72,125, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp250.532, Rp224.594, dan Rp217.026.

Total compensation of the Company's Directors in 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp250,532, Rp224,594, and Rp217,026, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 50.

Information about the contributions made by the Company and its subsidiaries to DP-PLN is disclosed in Note 50.

53. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing

53. Monetary Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2019, 2018, and 2017 the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2019				
	JPY *)	US\$ *)	EUR *)	Lain-lain/ Others **)	
Aset moneter					Monetary assets
Piutang pihak berelasi	--	68,458,611	--	--	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	39,796,118,675	49,001,061	--	--	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Kas dan setara kas	14,334,466,962	816,951,292	244,679,781	148,335	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	--	1,000,000	--	--	<i>Short-term Investment</i>
Jumlah aset moneter	54,130,585,637	935,410,964	244,679,781	148,335	<i>Total monetary assets</i>
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Penerusan pinjaman	158,867,568,117	1,240,170,346	19,375,532	6,512,892	<i>Two-step loans</i>
Utang sewa pembiayaan	103,641,300,467	56,099,845	--	--	<i>Lease liabilities</i>
Utang bank	51,897,893,380	6,292,235,622	304,144,617	--	<i>Bank loans</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	23,200,000,000	10,025,948,000	1,000,000,000	--	<i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>
Utang listrik swasta	--	491,396,727	--	--	<i>Electricity purchase payable</i>
Utang lain-lain	134,943,554	505,948,920	119,109,383	7,490,571	<i>Other payables</i>
Utang biaya proyek	34,466,374	1,046,916	238,610	--	<i>Project cost payable</i>
Utang usaha	--	898,507,498	326,270	30,385,801	<i>Trade payables</i>
Biaya masih harus dibayar	8,882,526,820	244,021,636	5,459,709	64,218	<i>Accrued expenses</i>
Jumlah liabilitas moneter	346,658,698,712	19,755,375,510	1,448,654,121	44,453,482	<i>Total monetary liabilities</i>
Liabilitas moneter bersih Ekuivalen Rupiah	(292,528,113,075)	(18,819,964,546)	(1,203,974,340)	(44,305,147)	<i>Net monetary liabilities Rupiah equivalent</i>
Jumlah dalam Rupiah - bersih	(318,434,403)				Total in Rupiah - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	2018				
	JPY *)	US\$ *)	EUR *)	Lain-lain/ Others **)	
Aset moneter					Monetary assets
Piutang pihak berelasi	--	71,111,379	--	--	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	36,946,110,237	47,702,501	--	--	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	4,790,819,600	512,384,448	89,538,915	--	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	41,736,929,837	631,198,328	89,538,915	--	Total monetary assets
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Penerusan pinjaman	162,912,639,354	1,150,578,646	27,527,396	8,696,746	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	121,002,299,155	65,563,142	--	--	Lease liabilities
Utang bank	31,192,959,687	5,043,916,293	177,151,348	--	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	--	7,772,389,000	500,000,000	--	Bonds payable and sukuk ijara
Utang listrik swasta	--	518,632,595	--	--	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	7,014,816,839	645,776,451	119,382,223	7,612,447	Other payables
Utang biaya proyek	246,561,105	345,310	269,257	--	Project cost payable
Utang usaha	--	616,689,475	--	10,058,203	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	7,972,462,852	188,553,280	1,142,063	89,447	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	330,341,738,992	16,002,444,192	825,472,287	26,456,843	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(288,604,808,955)	(15,371,245,864)	(735,933,372)	(26,456,843)	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah	(37,840,448)	(222,591,011)	(12,186,873)	(383,122)	Rupiah equivalent
Jumlah dalam Rupiah - bersih	(273,001,454)				Total in Rupiah - net
	2017				
	JPY *)	US\$ *)	EUR *)	Lain-lain/ Others **)	
Aset moneter					Monetary assets
Piutang pihak berelasi	--	16,197,815	--	--	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	54,793,251,283	46,055,654	--	--	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	989,283,918	612,474,922	8,321,241	--	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	55,782,535,201	674,728,391	8,321,241	--	Total monetary assets
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Penerusan pinjaman	170,695,553,004	964,734,649	26,063,045	11,863,438	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	157,201,225,947	84,248,160	--	--	Lease liabilities
Utang bank	6,012,420,140	3,035,228,648	134,312,461	--	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	--	6,500,000,000	--	--	Bonds payable and sukuk ijara
Utang listrik swasta	--	544,464,269	--	--	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	--	360,950,854	15,852,132	7,374,791	Other payables
Utang biaya proyek	49,795,559	32,935,748	2,135,535	--	Project cost payable
Utang usaha	--	543,839,978	648,299	759,254	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	4,561,471,496	134,199,763	1,058,278	123,095	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	338,520,466,146	12,200,602,069	180,069,750	20,120,578	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(282,737,930,945)	(11,525,873,678)	(171,748,509)	(20,120,578)	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(33,990,302)	(156,152,537)	(2,777,794)	(272,594)	Rupiah equivalent (in millions)
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	(193,193,227)				Total in Rupiah - net (in millions)

*) Dalam jumlah penuh

**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount

**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US\$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp9.486.326 untuk tahun 2019, rugi kurs mata uang asing bersih sebesar Rp10.926.741 untuk tahun 2018, dan rugi kurs mata uang asing bersih sebesar Rp2.935.144 untuk tahun 2017.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net gain on foreign exchange amounting to Rp9,486,326 for the year 2019, net loss on foreign exchange amounting to Rp10,926,741 for the year 2018, and net loss on foreign exchange amounting to Rp2,935,144 for the year 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 21 Juli 2020, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan mengalami kenaikan sebesar Rp21.859.947.

If assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2019 had been translated using the closing rates at issuance of July 21, 2020, the total net foreign currency liabilities of the Company and its subsidiaries would have been increased by Rp21,859,947.

54. Segmen Operasi

Informasi Wilayah Geografis

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 Perusahaan dan entitas anak dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan dan entitas anak, rinciannya adalah sebagai berikut:

54. Operating Segment

Geographical Information

The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

For management reporting purposes, as of December 31, 2019, 2018, and 2017 the Company and its subsidiaries were divided into Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report segment information, with the following details:

	2019						
	SUMATERA Rp	JAWA BALI & NUSA TENGGARA Rp	KALIMANTAN Rp	SULAWESI Rp	MALUKU & PAPUA Rp	Jumlah/ Total Rp	
Pendapatan usaha						Revenue	
Pendapatan eksternal	29,337,252	241,099,027	7,268,463	6,706,592	1,229,255	285,640,589	<i>External revenue</i>
Hasil segmen	(7,703,799)	(3,758,437)	(4,302,413)	(3,293,859)	(2,856,839)	(21,915,347)	Segment results
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						(7,885,002)	<i>Unallocated income, net</i>
Rugi usaha sebelum subsidi						(29,800,349)	<i>Operating loss before subsidy</i>
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						55,919,559	<i>Unallocated other income</i>
Manfaat pajak						(21,797,080)	<i>Tax benefit</i>
Laba tahun berjalan						4,322,130	Income for the year
Aset segmen	275,137,329	918,261,802	84,042,594	68,782,764	26,671,464	1,372,895,953	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						212,159,060	<i>Unallocated assets</i>
Jumlah aset konsolidasi						1,585,055,013	Total consolidated assets
Liabilitas segmen	272,727,614	181,556,355	89,717,939	72,416,193	30,197,225	646,615,326	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						9,059,274	<i>Unallocated liabilities</i>
Jumlah liabilitas konsolidasi						655,674,600	Total
	2018						
	SUMATERA Rp	JAWA BALI & NUSA TENGGARA Rp	KALIMANTAN Rp	SULAWESI Rp	MALUKU & PAPUA Rp	Jumlah/ Total Rp	
Pendapatan usaha						Revenue	
Pendapatan eksternal	25,062,219	233,606,498	7,726,914	5,425,117	1,076,994	272,897,742	<i>External revenue</i>
Hasil segmen	(15,008,395)	(26,978,705)	(1,953,277)	(3,605,740)	(2,875,809)	(50,421,926)	Segment results
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						15,130,779	<i>Unallocated income, net</i>
Rugi usaha sebelum subsidi						(35,291,147)	<i>Operating loss before subsidy</i>
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						55,191,985	<i>Unallocated other income</i>
Beban pajak						(8,325,082)	<i>Tax expense</i>
Laba tahun berjalan						11,575,756	Income for the year
Aset segmen	255,232,470	890,896,603	75,786,393	61,484,483	22,979,675	1,306,379,624	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan						186,108,121	<i>Unallocated assets</i>
Jumlah aset konsolidasi						1,492,487,745	Total consolidated assets
Liabilitas segmen	244,790,849	157,323,297	67,251,613	59,126,448	23,745,787	552,237,994	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						12,835,894	<i>Unallocated liabilities</i>
Jumlah liabilitas konsolidasi						565,073,888	Total consolidated liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017					Jumlah/ Total Rp	
	SUMATERA Rp	JAWA BALI & NUSA TENGGARA Rp	KALIMANTAN Rp	SULAWESI Rp	MALUKU & PAPUA Rp		
Pendapatan usaha							Revenue
Pendapatan eksternal	27,604,617	218,159,043	4,216,594	4,191,350	1,123,639	255,295,243	External revenue
Hasil segmen	(7,870,096)	(3,353,886)	(3,136,306)	(2,899,086)	(2,021,163)	(19,280,537)	Segment results
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						(898,314)	Unallocated income, net
Rugi usaha sebelum subsidi						(20,178,851)	Operating loss before subsidy
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						28,722,923	Unallocated other income
Manfaat pajak						(4,115,955)	Tax benefit
Laba tahun berjalan						4,428,117	Income for the year
Aset segmen	214,732,514	812,660,377	58,642,941	49,255,838	14,885,512	1,150,177,182	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan						184,780,475	Unallocated assets
Jumlah aset konsolidasi						1,334,957,657	Total consolidated assets
Liabilitas segmen	203,390,278	104,331,499	57,936,833	48,561,391	16,076,395	430,296,396	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						35,244,657	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasi						465,541,053	Total consolidated liabilities

55. Ikatan dan Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar

i. Gas

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period	Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity ^{d)}
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	109,717
Cilegon	PHE OSES	2019-2020	bbtu	11,979
Muara Karang - Priok	^{a)}	2004-2018 ^{f)}	bbtu	679,954
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	12,533
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	307,871
Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri	^{b)}	2011-2020	bbtu	197,185
Keramasan, Inderalaya, Borang	Medco E&P Lematang	2017-2027	bbtu	50,933
Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd ^{g)}	2012-2028	bbtu	368,700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2020	bbtu	483,490
Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd	2006-2026	bbtu	440,000
Pekanbaru	EMP Bentu Ltd. ^{f)}	2007-2021	bbtu	128,619
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	bbtu	27,375
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2021	bbtu	123,658
Tanjung Batu	PT Pertamina EP	2005-2019	bbtu	81,636
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2020	bbtu	3,359
Bontang	Mubadala Petroleum	2019-2020	bbtu	4,380
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2021	bbtu	72,270
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2019 ^{f)}	bbtu	103,255
Grati	Lapangan Oyong ^{e)}	2009-2020	bbtu	116,070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	22,251
Bangkanai	Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd ^{e)}	2013-2033	bbtu	130,000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	2012-2022	bbtu	51,945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2018-2024	bbtu	29,244
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2011-2022	bbtu	219,000
Grati	Lapangan Wortel ^{e)}	2012-2020	bbtu	55,827
	Premier Oil Natuna Sea B.V.;			
	Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.;			
Batam	Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	280,100
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	bbtu	31,793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	bbtu	5,911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2020	bbtu	8,340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd	2014-2026	bbtu	354,780

55. Commitments and Contingencies

As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows:

a. Fuel supply agreements

i. Gas

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period	Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity ^{a)}
Melibur	Kondur Petroleum SA	2012-2020	bbtu	831
Tarakan	Medco E&P Indonesia	2010-2021	bbtu	10,134
Nunukan	Pertamina EP	2012-2019	bbtu	4,200
Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Limited	2012-2019	bbtu	366
Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	kargo	191
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11,550
Bunyu Kaltim	Pertamina EP	2012-2019 ^{f)}	bbtu	609
Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	2013-2019	bbtu	49,400
Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2015-2020	bbtu	3,580
Purwodadi	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2019	bbtu	9,250
Purwodadi	PT Energasindo Heksa Karya	2019-2021	bbtu	1,056
Batam	Inti Daya Latu Prima	2012-2019	bbtu	11,685
Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2019	bbtu	39,898
Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2016-2034	kargo	696
Belawan	PTGN	2018-2020	bbtu	13,010
KKA	PHE NSO dan PHE NSB	2019-2020	bbtu	7,647
Rawa Minyak Riau Tana Tidung	Petroselat Ltd.	2015-2020	bbtu	7,802
	PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&P Simenggaris	2015-2020	bbtu	805
New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2015-2019	bbtu	4,824
Multidestinas	Pertamina (hilir)	2017-2022	kargo	^{g)}
Multidestinas	Pertamina (hulu)	2018-2022	kargo	^{g)}
Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2019	bbtu	4,564
Sumatera	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2023	bbtu	6,600
MPP 100 MW Lampung	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2021	bbtu	32,193
Mahakam	Pertagas Niaga	2017-2023	bbtu	14,256
Batam	Petrochina	2016-2023	bbtu	41,556
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	9,954
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	13,688
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	16,425
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	29,200
Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	1,314
MPP 100 MW Lampung	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	6,439
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	2,482
New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ^{h)}	2019-2030	bbtu	1,168

- a) PT Pertamina Hulu Energy ONWJ; Itochu Oil Exploration Co.Ltd.; Orchard Energy Java BV; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd. dan/and Talisman Resources (North West Java) Ltd.
- b) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd. dan/and Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.
- c) Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) dan/and Cue Sampang Pty Ltd.
- d) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
- e) Berganti nama dari / *Change name from Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.*
- f) Dalam proses perpanjangan / *In the process amendment*
- g) Penentuan volume LNG dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan / *Determination of LNG volume is set periodically based on requirement*
- h) Perjanjian PPJBG PGN Multidestinas volume yang tercantum dalam tabel adalah volume gas sesuai konfirmasi gas saat tahun ini, dimana untuk tahun berikutnya akan ditentukan kemudian/ *PPJBG PGN Multidestination volume agreement listed in the table is the volume of gas in accordance with the current gas confirmation for this year, which for the following year will be determined later*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sehubungan dengan perjanjian diatas,
Perusahaan mempunyai fasilitas
stand-by letter of credit dengan rincian
sebagai berikut:

*In relation with the above agreement,
the Company has facilities stand-by
letter of credit with the following details:*

Bank Penerbit/ Issuing Bank	Penerima Manfaat/ Beneficiary	Mata Uang/ Currency	Jumlah/ Total *)
BRI	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	US\$	19,171,800
	Santos (Sampang) Pty. Ltd	US\$	14,137,200
	Petrochina Int. Jabung	US\$	5,673,801
	Petrogas Kaltim	IDR	82,916,609,243
	SESCO	US\$	10,000,000
		MYR	79,000,000
	Ophir	US\$	8,697,673
Mandiri	PT Pertamina (Persero)	US\$	953,120
		IDR	537,969,489,451
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	US\$	11,451,021
	PEARLOIL (SSEBUKU) Ltd	US\$	1,852,200
	BP Berau Ltd. (On Behalf Of Tangguh)	US\$	2,177,665
BNI		US\$	80,476,029
	Conoco Philips	US\$	9,300,000

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Harga pembelian gas pipa pada titik
penyerahan berkisar antara US\$4,30
sampai dengan US\$11,18 per *Million
British Thermal Units* ("MMBTU") dan
Liquid Natural Gas ("LNG") antara
US\$7,38 sampai dengan US\$13,32
per MMBTU.

*Gas pipe purchase price at point of
delivery ranges from US\$4.30 to
US\$11.18 per Million British Thermal
Units ("MMBTU") and the price of
Liquid Natural Gas ("LNG") ranges
from US\$7.38 to US\$13.32 per
MMBTU.*

ii. Batubara

ii. Coal

Pemasok/ Suppliers	Kuantitas metrik ton per tahun/ Quantity per year in metric ton *)	Periode/ Period
<i>Rutin/ Regular</i>		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6,880,000	2004-2031
PT Adaro Indonesia	1,500,000	2014-2023
PT Berau Coal	3,500,000	2009-2023
PT Indominco Mandiri	500,000	2017-2022
PT Oktasan Baruna Persada	600,000	2018-2026
CV Tahiti Coal	120,000	2017-2020

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pemasok/ Suppliers	Kuantitas metrik ton per tahun/ Quantity per year in metric ton *)	Periode/ Period
<i>Rutin/ Regular</i>		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6,880,000	2004-2031
PT Adaro Indonesia	1,500,000	2014-2023
PT Berau Coal	3,500,000	2009-2023
PT Indominco Mandiri	500,000	2017-2022
PT Oktasan Baruna Persada	600,000	2018-2026
CV Tahiti Coal	120,000	2017-2020
CV Air Mata Emas	36,000	2018-2021
PT Kideco Jaya Agung	1,600,000	2019-2022
PT Kaltim Prima Coal	7,780,000	2016-2022
PT Allied Indo Coal	246,000	2017-2020
PT Arutmin Indonesia	2,400,000	2019-2021
PT Jembayan Muara Bara	500,000	2017-2022
CV Bara Mitra Kencana	90,000	2019-2022
PT Cahaya Bumi Perdana	48,000	2019-2022
CV Putri Surya Pratama Natural	48,000	2019-2022
PT Dasrat Sarana Arang Sejati	48,000	2019-2022
PT Miyor Pratama Coal	30,000	2019-2022
<i>Kerjasama konsorsium/ Consortium</i>		
PT Arutmin Indonesia dan/and PT Darma Henwa	2,005,000	2007-2027
<i>Program Percepatan/ Fast Track Program</i>		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	9,800,000	2012-2030
PT Indexim Coalindo	300,000	2018-2023
PT Titan Infra Energy ¹⁾	2,920,000	2007-2027
PT Hanson Energy	2,128,000	2011-2034
PT Lanna Harita Indonesia	300,000	2015-2020
PT Rizki Anugrah Pertama	1,186,000	2015-2021
PT Tunas Inti Abadi	600,000	2016-2021
PT Dizamatra Powerindo	500,000	2016-2021
PT Samantaka Batubara	500,000	2016-2021
PT Bara Energi Lestari	500,000	2017-2018
<i>Kerjasama konsorsium/ Consortium</i>		
PT Arutmin Indonesia dan/and PT Darma Henwa	5,553,000	2007-2027
PT Dwi Guna Laksana dan/and PT Borneo Indo Bara	1,890,000	2009-2029
PT Kasih Industri Indonesia CV Akbar dan/ and PT Sarolangun Prima Coal	1,865,000	2009-2029
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan/ and PT Buana Eltra	576,000	2011-2021
PT Eksploitasi Energi Indonesia, CV Multi Bara Persada dan/ and PT Borneo Indo Bara	1,178,520	2011-2021
PT Oktasan Baruna Persada dan/ and PT Buana Rizky Armia	1,241,000	2009-2032
PT Energi Batubara Lestari dan/ and PT Batara Batari Sinergy Nusantara	221,000	2014-2034

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

1) Berganti nama dari/ *Changes name from* PT Titan Mining Energy

Pada tanggal 9 Maret 2018, Kementerian ESDM menerbitkan surat keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Sesuai surat keputusan tersebut, harga batubara ditetapkan sebesar US\$70/ metrik ton

On March 9, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 1395 K/30/MEM/2018 regarding coal selling price for electricity supply for public interest which was retroactively valid from January 1, 2018. According to the decree, the coal price was regulated at a price of US\$70/ metric ton with

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dengan acuan pada kalori 6.322 kcal/kg. Surat keputusan tersebut juga mengatur formula untuk menghitung harga dengan spesifikasi yang berbeda seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut. Melalui surat keputusan No.1410K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018, masa berlaku surat keputusan No.1395K/30/MEM/2018 tersebut diubah menjadi berlaku sejak tanggal 12 Maret 2018.

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp300.560 sampai dengan Rp1.110.815 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT") dan *Hardgrove Grindability Index* ("HGI").

PLN Batubara, entitas anak, mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

Pemasok/ Suppliers	Lokasi/ Locations	Kuantitas metrik ton/ Quantity in metric ton *)
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>	43,396,322
PT Megapura Prima Industri	Sorong, Papua Barat/ <i>West Papua</i>	14,800,000
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah/ <i>Central Kalimantan</i>	693,680

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

iii. Bahan Bakar Minyak

Perusahaan dan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah di adendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan

iii. Fuel

The Company and PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017. PLN dan Pertamina menyetujui perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

Berdasarkan Addendum V, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 17 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Harga transaksi HSD tahun 2017:
 - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 107% dari MOPS.
 - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 104,58% dari MOPS.
- b. Harga transaksi MFO tahun 2017:
 - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 109,5% dari MOPS.
 - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 109,1% dari MOPS.

(iii) the terms of payment and penalty charges on late payment is using a monthly rate of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated May 16, 2017, PLN and Pertamina agreed to extend the period of supply until 2020.

Based on Amendment V, sales and purchase price agreement for fuel (HSD and MFO) between Pertamina dan the Company dated on October 17, 2017, the result are:

- a. *HSD transaction price for 2017:*
 - *January until June 2017 is 107% from MOPS.*
 - *July until December 2017 is 104.58% from MOPS.*
- b. *MFO transaction price for 2017:*
 - *January until June 2017 is 109.5% from MOPS.*
 - *July until December 2017 is 109.1% from MOPS.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Addendum VI, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) tahun 2018 sampai dengan 2020 antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 20 Mei 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Harga rata-rata transaksi HSD Semester I tahun 2018 adalah 104,77% dari MOPS.
- b. Harga rata-rata transaksi MFO Semester I tahun 2018 adalah 106,34% dari MOPS.
- c. Harga rata-rata transaksi HSD tahun 2019 untuk Semester I adalah 104,95% dari MOPS dan Semester II adalah 105,03% dari MOPS.
- d. Harga rata-rata transaksi MFO tahun 2019 untuk Semester I adalah 106,04% dari MOPS dan Semester II adalah 106,93%.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2019 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 23 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk untuk Lokasi Pembangkit Listrik Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai dan Semboja), dan Ketapang (Sukaharja) sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 14 Juli 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 26 Mei 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Tanjung Batu sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Based on Amendment VI, sales and purchase price agreement for fuel (HSD and MFO) 2018 until 2020 between Pertamina and the Company dated on May 20, 2018, the result are:

- a. *Average HSD transaction price for Semester I 2018 is 104.77% from MOPS.*
- b. *Average MFO transaction price for Semester I 2018 is 106.34% from MOPS.*
- c. *Average HSD transaction price for Semester I 2019 is 104.95% from MOPS and Semester II is 105.03% from MOPS.*
- d. *Average MFO transaction price for Semester I 2019 is 106.04% from MOPS and Semester II is 106.93%.*

The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2019 based on those prices.

On February 23, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk Power Plant Location in Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai and Semboja) and Ketapang (Sukaharja) for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On July 14, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On May 26, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Tanjung Batu Power Plant for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 18 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit di Bangka Belitung sebanyak 120.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

On August 18, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Power Plant in Bangka Belitung Power Plant for 120,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan dan Kalimantan Selatan dan Tengah sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

On December 29, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan and South & Central Kalimantan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

iv. Uap Panas Bumi

Pada tahun 2019, Perusahaan memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi sebagai berikut:

iv. Geothermal Steam

In 2019, the Company entered geothermal steam agreement with several suppliers, as follows:

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2040
Lahendong Unit 1	PT Pertamina Geothermal Energy	2002-2032
Lahendong Unit 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2007-2039
Lahendong Unit 4	PT Pertamina Geothermal Energy	2011-2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2042
Hululais Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun/ years *)
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun/ years *)
Kotamobagu Unit 1,2,3 & 4	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun/ years *)
Darajat Unit 1	PT Pertamina, Star Energy Geothermal Darajat I Ltd. Texaco Darajat Ltd. PT Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.	1994-2030
Gunung Salak Unit 1,2 & 3	PT Pertamina, Unocal Geothermal of Indonesia Ltd. Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.	1993-2040

*) Sejak Commercial Date / Since Commercial Date

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan PPA dan ESC dengan IPP skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegotiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PT PLN (Persero) dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract

Prior to 1997, the Company entered into PPA and ESC with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPA and ESC through a Working Group on PT PLN (Persero) Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik IPP dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

i. Sudah Beroperasi

subjects, equalization in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPP and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

As of December 31, 2019 the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPP are as follows:

i. In Operations

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF ^{b)} (%)	Periode/ Period (a)	Tanggal operasi komersial/ Commercial Operation Date
1	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulawesi selatan/ South Sulawesi	Gas	315	85	1998-2022	12 September 1998/ September, 12 1998
2	PT Cikarang Listrindo	Cikarang, Jawa Barat/ West Java	Gas	300	72	1998-2031	1 Desember 1998/ December, 1 1998
3	Pertamina, Cevron Drajat Ltd	Drajat, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	220	95	2000-2030 2007-2053	1 Februari 2000 / February, 1 2000 1 Agustus 2007/ August, 1 2007
4	Star Energy Geothermal Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	220	95	2000-2030 2009-2039	1 Juni 2000/ June, 1 2000 1 Maret 2009/ March 1, 2009
5	PT Paiton Energy	Paiton I, Jawa Timur/ East Java	Batubara/ Coal	1230	85	2000-2040	1 Juli 2000/ July, 1 2000
6	PT Jawa Power	Paiton II, Jawa Timur/ East Java	Batubara/ Coal	1220	83	2000-2030	1 November 2000/ November, 1 2000
7	Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	196.8	90	2000-2040	1 Desember 2000/ December, 1 2000
8	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng, Jawa Tengah/ Central Java	Panas bumi/ Geothermal	55	95	2002-2044	1 Oktober 2002/ October, 1 2002
9	PT Asrigita Prasarana	Palembang Timur, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Gas	150	85	2004-2024	1 September 2004/ September, 1 2004
10	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/ West Java	Tenaga Air/ Hydro	180	-	2017-2022	1 Agustus 2006/ August, 1 2006
11	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	562	80	2007-2037	1 Februari 2007/ February 1, 2007
12	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	3	80	2007-2027	31 Juli 2007/ July, 31 2007
13	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi	Batubara/ Coal	27	80	2007-2032	1 November 2007/ November 1, 2007
14	PT Meppo Gen	Gunung Megang, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Gas	110	80	2007-2027	10 November 2007/ November, 10 2007
15	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 4, Jawa Barat West Java	Panas bumi/ Geothermal	60	90	2008-2038	26 Januari 2008/ January, 26 2008
16	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	11.3	90	2008-2038	1 Agustus 2008/ August, 1 2008
17	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut 1 & 2, Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	45	83	2008-2040	20 Desember 2008/ December, 20 2008
18	PT Fajar Futura Energi Luwu	Ranteballa, Luwu, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	2.4	-	2010-2035	1 Mei 2010/ May, 1 2010
19	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumatera Utara/ Batam Island	Tenaga Air/ Hydro	180	1.175 GWh/th	2010-2040	18 Januari 2011/ January, 18 2011
20	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Tangka, Sinjai, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	10	-	2011-2036	1 Februari 2011 February, 1 2011

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF ^(b) (%)	Periode/ Period a)	Tanggal operasi komersial/ Commercial Operation Date
21	PT Eksplorasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan/ South Bontaro	Batubara/ Coal	11	80	2011-2036	14 Oktober 2011/ October, 14 2011
22	PT Paiton Energy	Paiton III, Jawa Timur/ East Java	Batubara/ Coal	815	85	2012-2042	18 Maret 2012/ March, 18 2012
23	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat/ West Java	Batubara/ Coal	660	80	2012-2042	27 Juli 2012/ July, 27 2012
24	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Batubara/ Coal	200	80	2012-2042	1 November 2012/ November, 1 2012
25	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Batubara/ Coal	250	80	2018-2048	1 April 2018/ April 1, 2018
26	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	195	845,52 GWh/Th	2012-2042	30 Desember 2012/ December, 30 2012
27	PT Bekasi Power	Bekasi, Jawa Barat/ West Java	Gas	118,8	80	2013-2033	5 Januari 2013/ January, 5 2013
28	PT GH EMM Indonesia	Simpang Belimbing Muara Enim, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	227	80	2011-2041	27 Februari 2013/ February, 27 2013
29	PT Sepoeth Daya Prima	Lampung Tengah, Sumatera	Batubara/ Coal	12	80	2014-2034	2 Mei 2014/ May, 2 2014
30	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Unit 3, Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	50	87	2014-2037	14 Agustus 2014/ August, 14 2014
31	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara/ Coal	21	80	2014-2039	13 September 2014/ September, 13 2014
32	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	55	95	2014-2056	27 September 2014/ September, 27 2014
33	PT Kerta Negara Energi Perkasa	Senjipah, Kalimantan Timur/ East Bontaro	Gas	82	85	2015-2040	17 Desember 2015/ December, 17 2015
34	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjar Sari, Lahat, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	220	80	2015-2045	29 Mei 2015 May, 29 2015
35	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara/ Coal	380	85	2015-2045	18 Juni 2015/ June, 18 2015 27 Juni 2015/ June, 27 2015 31 Juli 2015/ July, 31 2015
36	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 5, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	30	90	2015-2045	29 Juni 2015/ June, 29 2015
37	PT Harmoni Energi Indonesia	Buton, Sulawesi Tenggara/ Southeast Sulawesi	Batubara/ Coal	14	80	2015-2040	29 Oktober 2015/ October, 29 2015
38	PT Priamanaya Energi	Keban Agung, Lahat, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	240	80	2016-2046	1 Mei 2016/ May, 1 2016
39	PT Wampu Electric Power	Wampu, Sumatera Utara/ North Sumatera	Tenaga Air/ Hydro	45	315,36 GWh/Th	2016-2046	1 Mei 2016/ May, 1 2016
40	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	614	80	2016-2046	9 Juni 2016/ June, 9 2016
41	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu Unit 3, Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	55	90	2016-2046	26 Juli 2016/ July, 26 2016
42	PT Pusaka Jaya Palu Power	Tawaeli Ekspansi (Unit 4 & 5), Palu	Batubara/ Coal	30	80	2016-2041	7 September 2016/ September, 7 2016
43	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 5, Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Panas bumi/ Geothermal	20	90	2016-2046	15 September 2016/ September, 15 2016
44	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 6, Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Panas bumi/ Geothermal	20	90	2016-2046	9 Desember 2016/ December, 9 2016
45	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel 5, Banyuasin, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	300	80	2016-2041	20 Desember 2016/ December, 20 2016
46	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	110	90	2017-2047	18 Maret 2017/ March, 18 2017
47	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu Unit 4, Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	55	90	2016-2046	25 Maret 2017/ March, 25 2017
48	PT Lestari Banten Energi	Banten, Jawa Barat/ West Java	Batubara/ Coal	625	80	2017-2042	28 Maret 2017/ March, 28 2017
49	PT Lombok Energy Dinamics	Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara	Batubara/ Coal	50	80	2017-2042	10 April 2017/ April 10, 2017
50	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali Unit 2, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	110	90	2017-2047	2 Oktober 2017/ October 2, 2017
51	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali Unit 3, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	110	90	2017-2047	3 April 2018/ April 3, 2018

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF ^{b)} (%)	Periode/ Period a)	Tanggal operasi komersial/ Commercial Operation Date
52	PT Pertamina Geothermal Energy	Garut, Jawa Barat	Panas bumi/ Geothermal	30	90	2018-2048	6 April 2018/ April 6, 2018
53	PT UPC Sidrap Bayu Energi	Sulawesi Selatan / South Sulawesi	Angin/ Wind	70	100	2018-2048	5 April 2018/ April 5, 2018
54	PT Tanggamus Electric Power	Lampung, Sumatera	Tenaga Air/ Hydro	56	57	2018-2048	7 Juli 2018/ July 7, 2018
55	PT Rekind Daya Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat / West Sulawesi	Batubara/ Coal	50	80	2018-2043	18 September 2018/ September 18, 2018
56	PT Indo Ridlatama Power	Muara Jawa, Kalimantan Timur/ East Kalimantan	Batubara/ Coal	50	80	2018-2048	30 November 2018/ November 30, 2018
57	PT Rajamandala Electric Power	Cianjur, Jawa Barat / West Java	Tenaga Air/ Hydro	47	44	2019-2049	12 Mei 2019/ May 12, 2019
58	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	17.4	80	2006-2019	11 September 2005/ September, 11 2005 1 April 2006/ April, 1 2006
59	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	85.5	90	2005-2025	1 Desember 2005/ December, 1 2005
60	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	55	84	2005-2034	29 Oktober 2004 October, 29 2004
61	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	22.2	-	2014-2034	1 September 2014 September, 1 2014
62	Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam/ Batam Island	Batubara/ Coal	99	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ October, 25 2012 1 November 2012/ November, 1 2012
63	PT Energi Listrik Batam	Tanjung Uncang, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	70	85	2016-2038	1 Mei 2016 May, 1 2016
64	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaja, Sumatera Utara/ North Sumatera	Tenaga air/ Hydro	5	65	2012-2037	10 Mei 2012/ May, 10 2012
65	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	20	80	2014-2039	18 Januari 2014 January, 18 2014
66	Konsorsium / Consortium PT Wijaya Karya PT Navigat Energy	Borang, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Gas	60	80	2012-2019	29 Juni 2012 June, 29 2012
67	Konsorsium / Consortium PT Modaco Enrgy PT Elektrindo Perkasa Utama Pratt & Whitney Ps. INC Renewable Energy Poweer International	Payo Selincah, Jambi	Gas	94	60	2012-2019	8 Juni 2012 June, 8 2012
68	Konsorsium / Consortium PT PP PT Bangun Energy Resources PT Navigat Energy PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	57	60	2013-2019	11 Januari 2007 January, 11 2007
69	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	55	90	2017-2047	1 September 2019/ September 01, 2019
70	PT Energi bayu Jeneponto	PLTBayu Tolo Jeneponto Sulawesi Selatan / South Sulawesi	Angin/ Wind	60	30	20 Th	14 Mei 2019/ May 14, 2019
71	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	45	90	2019-2049	1 Oktober 2019/ October 1, 2019
72	PT DSS Power Kendari	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara/ South east Sulawesi	Batubara/ Coal	100	80	2019-2044	28 Oktober 2019/ October 28, 2019
73	PT Tanjung Power Indonesia	Kalimantan Selatan/ South Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	14 Desember 2019/ December 14, 2019
74	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	945	80	2020-2050	9 November 2019/ November 9, 2019
75	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh, Sumatera Barat/ West Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	80	90	2019-2049	16 Desember 2019/ December 16, 2019
				<u>13,195</u>			

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Perusahaan dan entitas anak juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi.

In addition to the above power purchase agreements, the Company and its subsidiaries also entered into rental agreements that falls into the category of operating leases.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)

ii. Not Yet in Operation (Development Stage)

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF ⁹⁾ (%)	Periode/ Period ¹⁰⁾	Status/ Status
1	PT Bhumi Jati Power	Jawa-4 (FTP2)	Batubara	2000	86%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
2	PT Indo Raya Tenaga	Jawa-9&10	Batubara	2000	86%	2024 - 2049	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
3	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Jawa-7 - Bojonegara	Batubara	1982	86%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
4	PT Bimasena Power Indonesia	Jawa Tengah	Batubara	1900	86%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
5	PT SKS Listrik Kalimantan	Jawa-1	LANG	1760	60%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
6	PT Tanjung Jati Power Company	Jawa-3 (FTP2)	Batubara	1320	86%	2025 - 2055	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
7	PT Huadlan Bukit Asam Power	Sumsel-3	Batubara	1200	80%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
8	PT Cirebon Energi Prasarana	Jawa-1 (FTP2)	Batubara	924	86%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
9	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Jambi Tahap 1	Batubara	600	80%	2024 - 2049	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
10	PT Pembangkitan Perkasa Daya	Jambi Tahap 2	Batubara	600	80%	2022 - 2047	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
11	PT PJB Investasi - PT Gama Energi Negeri1)	Sumut-2	Batubara	600	85%	2024 - 2049	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
12	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	Sumsel-1	Batubara	600	80%	2021 - 2051	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
13	PT North Sumatra Hydro Energy	PLTA Batang Toru	Tenaga Air/Hydro	510		2021-2051	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
14	PT Meulaboh Power Generation	Meulaboh 3&4	Batubara	400	80%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
15	PT Kerinci Merangin Hidro	PLTA Merangin	Tenaga Air/Hydro	350		2025-2055	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
16	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	Sumbagsel-1	Batubara	300	80%	2023 - 2048	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
17	PT PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Sumsel-6	Batubara	300	80%	2027 - 2052	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
18	PT Medco Ratch Power Riau	Riau	Gas Pipa	275	60%	2021 - 2041	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
19	PT Poso Energy	PLTA Poso	Tenaga Air/Hydro	260		2021-2051	Operation 195 MW COD December 2019 (60 MW) Under Construction 260 MW
20	PT Banyuasin Power Energi	Banyuasin	Batubara	250	80%	2021 - 2051	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
21	PT Supreme Energy Rajabasa	PLTP Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/Geothermal	220		2023-2053	Eksplorasi/Exploration
22	PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dedap, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	220		2019-2049	Under Construction
23	Star Energy	Wayang Windu #3,4, Jawa Barat/ West Java	Panas Bumi/Geothermal	220		2020-2050	Exploration / eksplorasi
24	PT Sejahtera Alam Energi	PLTP Balurraden, Jawa Tengah/ Central Java	Panas Bumi/Geothermal	220		2022-2052	PPA
25	PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Kalselteng-3	Batubara	200	80%	2025 - 2050	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
26	PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Kalselteng-4	Batubara	200	80%	2027 - 2052	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
27	PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Kalselteng-5	Batubara	200	80%	3)	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
28	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Kaltim-3	Batubara	200	80%	2026 - 2051	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
29	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Kaltim-5	Batubara	200	80%	2028 - 2053	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
30	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Kaltim-6	Batubara	200	80%	3)	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
31	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Bengkulu	Batubara	200	80%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
32	PT GCL Indo Tenaga	Kalbar-1	Batubara	200	80%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
33	PT SKS Listrik Kalimantan	Kalteng-1 / Kalselteng-1	Batubara	200	80%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
34	PT Graha Power Kaltim	Kaltim-2 (FTP2)	Batubara	200	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
35	PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	Kaltim-4	Batubara	200	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
36	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	198		2019-2049	COD Unit 1 tgl 1 October 2019 (42,3MW) Financing Process (197,7 MW) - 1 Unit telah COD 55 MW (1 Sept.2019) - COD Unit 3 & 4 = 2024 (2x55 MW) PPA
37	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	165		2017-2047	Eksplorasi/Exploration
38	PT Bakrie Darmakarya Energi	PLTP Telaga Ngebel, Jawa Timur/ East Java	Panas Bumi/Geothermal	165		2024-2054	Under Construction
39	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh, Sumatera Barat/ West Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	140		2019-2049	Eksplorasi/Exploration
40	PT Geo Dipa Energi	Dieng #2,3 Jawa Tengah/ Central Java	Panas Bumi/Geothermal	115		2019-2039	Tahap Pendanaan/ Financing Stage
41	PT Medco Cahaya Geothermal	PLTP Jlen, Jawa Timur/ East Java	Panas Bumi/Geothermal	110		2020-2050	Eksplorasi/Exploration
42	PT Sintesa Barten Geothermal	PLTP Rawa Dano, Banten/ Banten	Panas Bumi/Geothermal	110		2022-2052	PPA
43	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi/Geothermal	110	85	30 Years after COD	Feasibility Study and Permit.
44	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/Geothermal	110	85	30 Years after COD	Eksplorasi/Exploration
45	PT Gorontalo Listrik Perdana	Sulbagul-1	Batubara	100	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
46	PT Minahasa Cahaya Lestari	Sulut-3	Batubara	100	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
47	PT Malea Energy	PLTA Malea	Tenaga Air/Hydro	90	60%	2020-2050	Under construction
48	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi/Geothermal	80	90	30 Years after COD	Eksplorasi/Exploration
49	PT Spring Energy Sentosa	PLTP Guci, Jawa Tengah/ Central Java	Panas Bumi/Geothermal	55	90	2024-2054	PPA
50	PT Jabar Rekind Geothermal Lainnya / ⁹⁾	PLTP Cisolok Cisukarame, Jawa Barat/ West Java	Panas Bumi/Geothermal	50	90	2025-2055	PPA
Jumlah pindahan / Balance carry forward				713			
				23,622			

- Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.
- AF= Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
- Meliputi kontrak dengan 152 IPP, terdiri dari 37 IPP dalam tahap pembangunan dan 43 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 72 Power Purchase Agreement berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

- The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.
- AF= Power supply factor which should be absorbed by the Company.
- Represents contracts with 152 IPPs, consisting of 37 IPPs under construction and 43 IPPs in the financing stage, and 72 Power Purchase Agreement which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro with each power plant's capacity of less than 50 MW.

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among other subjects, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

stated in the agreement, involving, among other things, Energy Charge and Capacity Charge.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

c. Capital expenditures

As of December 31, 2019, total commitments on capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows:

	<u>Mata uang/ Currencies</u>	<u>Jumlah dalam mata uang asing/ Amount in foreign currencies *)</u>	<u>Setara/ equivalent Rp</u>	
Program percepatan				<i>Fast track program</i>
Kontrak pembangkitan	US\$	178,574,002	2,482,358	<i>Power plant contracts</i>
	EUR	14,777,789	230,365	
	NZD	542,100	5,074	
	JPY	12,242,937	1,567	
	Rupiah		7,763,115	
			<u>10,482,479</u>	
Kontrak transmisi	Rupiah		<u>797,796</u>	<i>Transmission contracts</i>
Kontrak konstruksi rutin	US\$	55,339,743	769,278	<i>Regular construction contracts</i>
	EUR	9,267,399	144,466	
	JPY	10,594,580,916	1,355,752	
	Rupiah		115,001	
			<u>2,384,497</u>	

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran dimuka yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak.

The above amount excludes the remaining advance payments that has been paid by the Company and its subsidiaries in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Company and its subsidiaries.

Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Fast Track Program

Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired PLTU at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Kontrak Pembangkitan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US\$876.217.780 dan Rp4.790.016 untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan

Penerusan pinjaman

Mata uang/ Currencies	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Setara/ Equivalent Rp
US\$	131,249,262	1,824,497
EUR	--	--
JPY	63,457,649,120	8,122,763
Jumlah/ Total		9,947,260

*) Dalam jumlah penuh/ In full amounts

Power Plant Contracts

Until December 31, 2019, the Company signed 37 EPC contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with aggregate capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

Until December 31, 2019, the Company made a total down payment of US\$876,217,780 and Rp4,790,016 for 35 EPC contracts which is recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Transmission Contracts

Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Regular Construction Contracts

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.

d. Unused loan facilities

Two-step loans

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp6.602.820 dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,40% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp3.344.440 tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2020 sampai dengan 2055.

As of December 31, 2019 the unused facilities equivalent to Rp6,602,820 bear a provision charge of 0.10% - 0.40% per annum, while the remaining facilities of Rp3,344,440 do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2020 and 2055.

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

Loan agreements for non fast track program

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities non-related to the fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period **)
<u>Fasilitas pinjaman dalam US\$/ US\$ loan facilities</u>					
1	Asian Development Bank Gardu induk/ Grid	575	19	4 Desember 2015/ December 4, 2015	20
2	Asian Development Bank Gardu induk/ Grid	25	1	4 Desember 2015/ December 4, 2015	20
3	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.A	108	30	14 Maret 2016/ March 14, 2016	16
4	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.B	72	20	14 Maret 2016/ March 14, 2016	16
5	International Bank for Reconstruction and Development/	500	38	20 Mei 2016/ May 20, 2016	20
6	Islamic Development Bank Power Grid Enhancement Project	330	225	10 Januari 2017/ January 10, 2017	15
7	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	22	11	10 Maret 2017/ March 10, 2017	15
8	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	15	7	10 Maret 2017/ March 10, 2017	15
9	Sumitomo Mitsui Banking Corporation PLTA Jatigede	73	33	30 Maret 2017/ March 30, 2017	14
10	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. A	53	38	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
11	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. B	36	26	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
12	Asian Development Bank Gardu Induk/ Grid	600	165	10 Oktober 2017/ October 10, 2017	20
13	Credit Agricole CIB Paris PLTGU Muara Tawar	280	160	8 November 2017/ November 8, 2017	15
14	HSBC PLTGU Tambak Lorok III	214	214	8 November 2017/ November 8, 2017	15
15	PT Bank DBS Indonesia Term loan facilities - DBS 2019 - Onshore	275	78	25 Juni 2019/ June 25, 2019	5
	Term loan facilities - DBS 2019 - Offshore	725	222	25 Juni 2019/ June 25, 2019	5
16	PT Bank DBS Indonesia Revolving Credit Facilities - DBS 2018 - Onshore	25	25	28 Desember 2019/ December 28, 2019	4
	Revolving Credit Facilities - DBS 2018 - Offshore	125	125	28 Desember 2019/ December 28, 2019	4
Jumlah dalam US\$/ Total in US\$		4,053	1,437		

*) Dalam jutaan/ In million

**) Termasuk masa tenggang/ Include grace period

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ <i>Creditor and project funded</i>	Fasilitas maksimum/ <i>Maximum facility *)</i>	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ <i>Unused loan facilities *)</i>	Tanggal perjanjian/ <i>Date of agreement</i>	Periode/ Period **) Tahun/ Year
<u>Fasilitas pinjaman dalam EUR/ EUR loan facilities</u>					
1	Agence Francaise De Development Trans GIS	100	72	7 Mei 2015/ May 7, 2015	15
2	Agence Francaise De Development Trans Grid	1	--	7 Mei 2015/ May 7, 2015	5
3	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Suralaya rehabilitation	175	175	8 Mei 2015/ May 8, 2015	12
4	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Kamojang rehabilitation	65	65	8 Mei 2015/ May 8, 2015	15
5	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Kamojang rehabilitation	60	59	8 Mei 2015/ May 8, 2015	15
6	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Transmisi/ <i>Transmission</i>	45	45	23 Mei 2016/ May 23, 2016	13
7	ING Bank, a Branch of ING-DiBa dan/ <i>and Societe Generale</i> PLTGU Grati	40	4	24 Juni 2016/ June 24, 2016	14.5
8	Mizuho Lombok Peaker	74	12	24 Mei 2017/ May 24, 2017	12
9	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bangkanai Peaker	83	36	15 September 2017/ September 15, 2017	11.25
10	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Power Plant Kumbih	85	85	15 Desember 2017/ December 15, 2017	15
11	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker - CESCE Covered Facility	41	27	9 Februari 2018/ February 9, 2018	12
12	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker - SACE Covered Facility	66	44	9 Februari 2018/ February 9, 2018	12
13	BGK PLTU Lombok FTP-2	81	79	21 Februari 2018/ February 21, 2018	15
14	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Geothermal Energy Program	150	150	11 Oktober 2018/ October 11, 2018	15
15	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bakaru I + II Hydro Power Project	225	225	5 September 2019/ September 5, 2019	14
16	Kreditanstalt fur Wiederaufbau 1000 Islands Renewable Energy for electrification Program	70	70	5 September 2019/ September 5, 2019	14
Jumlah dalam EUR/ Total in EUR		1,361	1,148		
<u>Fasilitas pinjaman dalam JPY/ JPY loan facilities</u>					
1	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar	16,430	3,524	14 Maret 2016/ March 14, 2016	15.5
2	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Muara Karang	15,449	9,855	10 Maret 2017/ March 10, 2017	15
3	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2	16,939	12,401	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
Jumlah dalam JPY/ Total in JPY		48,818	25,780		
*)	Dalam jutaan/ In million				
**)	Termasuk masa tenggang/ Include grace period				

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur/ Agent	Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period **) Tahun/ Year
<i>Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/ Rupiah loan facilities</i>					
1	PT Bank Rakyat Indonesia	4,506,787	3,188,708	14 November 2018/ November 14, 2018	10
2	PT Bank Negara Indonesia	5,071,000	5,071,000	18 Desember 2019/ December 18, 2019	3
3	PT Bank Mandiri Syariah	2,846,000	2,846,000	18 Desember 2019/ December 18, 2019	3
4	PT Bank Rakyat Indonesia <i>Revolving credit facilities</i>	28,000,000	28,000,000	21 Juni 2019/ June 21, 2019	1
5	PT Bank DKI <i>Revolving credit facilities</i>	1,000,000	1,000,000	8 Juni 2019/ June 8, 2019	1
6	PT Bank HSBC Indonesia <i>Revolving credit facilities</i>	1,400,000	1,400,000	26 Juni 2019/ June 26, 2019	1
7	Citibank <i>Revolving credit facilities</i>	500,000	500,000	20 Maret 2019 March 20, 2019	1
8	PT BCA Tbk <i>Revolving credit facilities</i>	1,500,000	1,500,000	6 September 2019/ September 6, 2019	1
9	PT Bank QNB Indonesia Tbk <i>Revolving credit facilities</i>	300,000	300,000	8 November 2019/ November 8, 2019	1
10	PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Revolving credit facilities</i>	1,000,000	1,000,000	12 Desember 2019/ December 12, 2019	1
Jumlah dalam Rupiah/ Total in Rupiah		46,123,787	44,805,708		

*) Dalam jutaan/ In million

**) Termasuk masa tenggang/ Include grace period

	2019	2018	2017	Interest rate per annum
Tingkat suku bunga per tahun				
Rupiah	7.80385%	--	6.4577% - 8.8625%	Rupiah
US\$	2.41255% - 4.41%	2.995% - 4.41%	1.67894% - 4.28%	US\$
JPY	1.58% - 1.74%	1.58% - 1.74%	1.58%	JPY
EUR	0.97% - 2.20%	0.84% - 2.20%	0% - 0.25%	EUR

e. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

e. Operation and maintenance programs

In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

Pembangkitan/ Power plant	Kontraktor/ Contractors	Nilai kontrak setara/ Contract amount equivalent Rp	Periode/ Period
PLTU Tanjung Jati B PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali Konsorsium/ consortium of Fortum Service OY & PT Medco Energy	1,942,479	2010-2032
		398,255	2005-2030
Jumlah/ Total		2,340,734	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

f. Litigasi

- (i) Pada tahun 2001, Perusahaan menghadapi gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pangemanan Nelwan dan kawan-kawan sebagai ahli waris dari Hendrik Meinder Nelwan terhadap tanah yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonsealama dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp54.000 di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, Perusahaan kalah.

Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado, Perusahaan melakukan Gugatan Perlawanan Ketiga atas Eksekusi (*Derden Verzet*) tanah tersebut mengingat Perusahaan merupakan *bezitter* yang baik dengan menguasai tanah serta mengoperasikan PLTA Tonsealama selama lebih dari 50 tahun, namun Gugatan Perlawanan tersebut ditolak.

Perusahaan melaporkan perbuatan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap Hendrik Meinder Nelwan (Penggugat) atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Tahun 2018 perkara pidana tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dengan amar putusan Hendrik Meinder Nelwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu dalam perkara perdata PLTA Tonsealama.

Pada bulan Agustus 2018, berdasarkan *novum* tahun 2018 putusan pidana pemalsuan dokumen perkara PLTA Tonsealama, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Perkara Perdata Pangemanan Nelwan dan kawan-kawan di Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Agustus 2019 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan upaya

f. Litigation

- (i) In 2001, Pangemanan Nelwan and co-claimants as heirs of Hendrik Meinder Nelwan filed claims for compensation over the land rights that has been utilized by the Company as hydroelectric power plant PLTA Tonsealama, which demanded compensation amounting to Rp54,000 in the District Court of Manado. In the process of court trial from District Court to Review in the Supreme Court, the Company lost.

In the preparation of Execution by District Court of Manado, the Company filed a Third Resistance of the Execution (*Derden Verzet*) regarding the land rights considering the Company is a good *bezitter* that has been effectively controlling and operating PLTA Tonsealama for more than 50 years, but the Resistance of the Execution was later denied.

The Company has filed claims for criminal action regarding document forgery in the name of Hendrik Meinder Nelwan (the Plaintiff) that were used as evidence materials against the Company for civil action. On 2018, The Supreme Court of the Republic of Indonesia has ruled that Hendrik Meinder Nelwan is proven and reassured of doing a criminal action by using false documents in the civil case of PLTA Tonsealama.

On August 2018, based on the 2018 *novum* of the criminal verdict regarding document forgery of PLTA Tonsealama, the Company has filed for a Civil Case Review against Pangemanan Nelwan and co-claimants in the Supreme Court. On August 26, 2019, the Supreme Court grant the request for Civil Case Review 2 submitted by the Company and cancel all previous

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- hukum Peninjauan Kembali 2 yang diajukan Perusahaan dan membatalkan putusan dari tingkat pengadilan negeri sampai Peninjauan kembali 1 di Mahkamah Agung.
- (ii) Pada tanggal 20 September 2017 Perusahaan menghadapi gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Putera Daya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait aset Perusahaan berupa Gardu Induk 150 kV yang terletak di Kawasan Industri Pasar Kemis. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp86.194. Pada tanggal 4 April 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian dan sewa yang dituntut oleh Penggugat. Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan perkara ini telah diputus pada tanggal 9 Januari 2020 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.
- (iii) Pada tanggal 17 November 2017 Perusahaan mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Jakarta terhadap Konsorsium PT Mega Eltra, PT Sakti Mas Mulia, dan Zibo Sangte Power Equipment Co. Ltd terkait pengembalian uang muka yang telah dibayarkan kepada konsorsium akibat wanprestasi pembangunan proyek PLTU Bau-Bau 2x10 MW dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp51.970. Perkara sudah diputus tanggal 26 Oktober 2018 dengan amar putusan menghukum konsorsium untuk membayar kepada perusahaan sebesar US\$390.711,79 dan Rp15.747. Pada tanggal 11 Desember 2018,
- verdict from District Court to Review 1 in the Supreme Court.*
- (ii) *On September 20, 2017, the Company faced a lawsuit filed by PT Putera Daya Perkasa in District Court of South Jakarta regarding the Company assets in the form of Substations 150 kV which is located in the Industrial Estate of Pasar Kemis. The Plaintiff demanded compensation amounting to Rp86,194. On April 4, 2019 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. The plaintiff has filed for an appeal in the High Court of Jakarta. The Plaintiff has filed an appeal to the High Court of Jakarta and it was decided on January 9, 2020 with a verdict in which strengthen the previous verdict of the District Court of South Jakarta. The Plaintiff has filed a cassation in the Supreme Court regarding the verdict. As of the date of the issuance of this report the case is currently still on process in the Supreme Court.*
- (iii) *On November 17, 2017, the Company filed an arbitration request to the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") Jakarta against Consortium PT Mega Eltra, PT Sakti Mas Mulia and Zibo Sangte Power Equipment Co. Ltd regarding the refund of the down payment that has been paid to the consortium due to the defaults on the construction of the PLTU Bau-Bau 2x10 MW which demanded compensation amounting to Rp51,970. The case was decided on October 26, 2018, with a verdict that the consortium has to pay to Company US\$390,711.79 and Rp15,747. On December 11, 2018, Consortium Mega Eltra filed for the annulling of the BANI verdict in the*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Konsorsium Mega Eltra mengajukan pembatalan putusan BANI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi ditolak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Februari 2019 Konsorsium PT Mas Sakti Mulia mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 10 September 2019 banding tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga terhadap putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

- (iv) Pada tanggal 29 Maret 2018 Perusahaan menghadapi gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tanah PLTA Tonselama. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp119.796. pada tanggal 24 Juni 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat. Pada tanggal 3 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jakarta.

- (v) Pada tanggal 8 Mei 2018 Perusahaan menghadapi gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ahli Waris Tjotjong bin Runah (Halimah binti Sairih dan kawan-kawan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait aset Perusahaan berupa tanah seluas 4.096 Ha yang terletak di Kawasan PLTGU Muara Tawar Blok 5 Tahap 2. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp54.196. Pada tanggal 12 Maret 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat. Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

District Court of South Jakarta and the request has been rejected. On February 26, 2019, PT Mas Sakti Mulia filed for an appeal in the Supreme Court regarding the verdict. On September, 10, 2019 the request has been rejected therefore the verdict is final Judgment, binding and executable (inkracht).

- (iv) *On March 29, 2018, the Company faces a lawsuit filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol in the District Court of South Jakarta regarding the land compensation of PLTA Tonselama. The plaintiff demanded compensation amounting to Rp119,796. On June 24, 2019 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. The Plaintiff has filed for an appeal, on July 03, 2019, the Plaintiff has filed for an appeal in the High Court of Jakarta. As of the date of the issuance of this report the case is currently still on process in the High Court of Jakarta.*

- (v) *On May 8, 2018, the Company faces a lawsuit filed by the heir of Tjotjong bin Runah (Halimah binti Sairih and co-claimants) in the District Court of South Jakarta regarding the Company's asset with land of 4,096 Ha located in PLTGU Muara Tawar Block 5 Phase 2. The plaintiff demanded compensation amounting to Rp54,196. On March 12, 2020 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. The plaintiff did not appeal therefore the verdict is final Judgment, binding and executable (inkracht).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- (vi) Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd (PCML) dan Perusahaan di *International Chamber of Commerce* (ICC) terkait kekurangan pembayaran atas biaya Gas Transport ke PLTGU Tambak Lorok. Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternative bertanggung jawab atas *Ship or Pay* 2016 senilai US\$8.853.849,22 ditambah biaya-biaya (*pre-award* dan *post-award*) dan *Ship or Pay* 2017 senilai US\$20.602.614,78 ditambah biaya-biaya (*pre-award* dan *post-award*). Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di ICC.
- (vii) Pada 27 Mei 2019, Perusahaan menghadapi gugatan dari Konsorsium Hubei Hongyuan Power Engineering, Co.Ltd dan PT Bagus Karya terkait pembayaran biaya pekerjaan pembangunan PLTU Sulawesi Selatan di BANI Jakarta. Pemohon menuntut Perusahaan membayar biaya Pekerjaan *Load Rejection* (FCB) dan *Denitrolic System* sementara Perusahaan menyatakan secara kontraktual tidak termasuk scope pekerjaan. Selain itu Pemohon juga menuntut klaim kerugian akibat menanggung bunga bank komersil sehingga total tuntutan sebesar Rp123.438. Pada tanggal 24 Januari 2020, perkara ini telah dicabut oleh BANI dari daftar perkara BANI Jakarta melalui surat No.20.206/I/BANI/WD-ed.
- (vi) On August 29, 2018, the Company faced an Arbitration Request filed by PT Kalimantan Jawa Gas as the Applicant against PC Muriah Ltd (PCML) and the Company in the *International Chamber of Commerce* (ICC) regarding the shortage of payments for Transport Gas to PLTGU Tambak Lorok. The applicant demands a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's bill since April 2018 and find that PCML or the Company alternatively, is liable for 2016 *Ship or Pay* amounting to US\$8,853,849.22 plus pre-award and post-award and for 2017 *Ship or Pay* amounting to US\$20,602,614.78 plus pre-award and post-award. As of the date of the issuance of this report, the case is currently still on process in ICC.
- (vii) On May 27, 2019 the Company faced an arbitration Request filed by Consortium of Hubei Hongyuan Power Engineering, Co.Ltd and PT Bagus Karya regarding the Contract Payment of Coal Fired Steam Power Plant Project PLTU Sulawesi Selatan in BANI Jakarta. The Plaintiff demanded Company to pay the works of Load Rejection (FCB) and Denitrolic System, that contractually not included in the scope of works. The Plaintiff also demanded the compensation of bank loan interest, so that total demands amounting to Rp123,438. On January 24, 2020, this case has been revoked by BANI from caseregister BANI Jakarta by letter No. 20.206/I/BANI/WD-ed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- (viii) Pada 22 Agustus 2019, Perusahaan menghadapi gugatan dari PT Boskalis Internasional Indonesia di BANI Jakarta terkait Klaim pekerjaan pembangunan kabel bawah laut Jawa Bali Sirkuit #3 dan #4 akibat perbedaan spesifikasi dalam izin prinsip pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi tentang kedalaman pemendaman kabel bawah laut setelah para pihak menandatangani kontrak. Pada gugatan tersebut Pemohon menuntut dalam 5 klaim dengan total tuntutan sebesar EUR8.516.490. Pada tanggal 13 Maret 2020, perkara ini telah diputus oleh BANI Jakarta dengan pertimbangan bahwa Perusahaan dan PT Boskalis harus menanggung biaya secara bersama karena tidak dapat mengantisipasi dengan baik permasalahan. Namun, Perusahaan berhasil mengurangi klaim sebesar EUR5.666.246 sehingga Perusahaan hanya membayar ganti rugi kepada PT Boskalis sebesar EUR 2.850.244 dan menolak permohonan PT Boskalis untuk selebihnya.

- (ix) Pada tanggal 31 Mei 2018, Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terhadap PT Indonesia Power, PT Perusahaan Gas Negara dan PT PLN (Persero) kepada BANI. Perselisihan ini disebabkan permintaan pengakhiran perjanjian sewa fasilitas penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priok oleh PT Indonesia Power. Dalam putusan BANI tanggal 16 Juli 2019, PT Indonesia Power harus membayar ganti rugi kepada KKLM Rp172.273.

Pada tanggal 11 September 2019, PT Indonesia Power mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dari BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diputus pada tanggal 17 Desember 2019 dengan amar putusan membatalkan putusan BANI.

- (viii) On August 22, 2019, the Company faced an arbitration Request filed PT Boskalis Internasional Indonesia in the BANI Jakarta regarding Claim installation Java Bali Submarine Cable Circuit #3 and #4 due to differentiation between specification in Principal Permit and specification in contract, it is caused by change of law about submarine cable burial depth after the parties signing the contract. In this Arbitration request, the Plaintiff demanded 5 claims amounting to EUR8,516,490. On March 13, 2020, the case was decided by BANI Jakarta with consideration that Company and Plaintiff must bear the cost together because of failure to anticipate the problems properly. However, the Company has managed to reduced the claims to EUR5,666,246 therefore the Company only paid compensation to Plaintiff amounting to EUR2,850,244 and reject the rest of the request.

- (ix) At May 31, 2018, Consortium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") filed an arbitration request for dispute settlement against PT Indonesia Power PT Perusahaan Gas Negara, and PT PLN (Persero) to BANI. The dispute was caused by PT Indonesia Power request termination of the lease of gas fuel distribution facility agreement for PLTGU Priok. At July 16, 2019, the BANI ruled in favour of KKLM and has verdict PT Indonesia Power to pay a compensation to KKLM amounted to Rp172,273.

At September 11, 2019, PT Indonesia Power submitted a petition to annul the BANI arbitration verdict to South Jakarta District Court. At December 17, 2019. The District Court of South Jakarta granted the petition by annulling arbitration verdict from BANI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 9 Januari 2020, KKLM mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 12 Mei 2020 perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menguatkan Putusan BANI. Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, PT Indonesia Power sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

On January 9, 2020, KKLM submitted an appeal for the District Court of South Jakarta decision which annulling the arbitration verdict to the Supreme Court. On Mei 12, 2020 the Supreme Court has decided to annulling the verdict from Distric court of South Jakarta and strengthen arbitration verdict from BANI. As of the date of the issuance of this report, PT Indonesia Power is preparing the terms for submit a Civil Case Review at Supreme Court.

(x) Pada tanggal 30 Oktober 2019, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Banjarnegara yang diajukan oleh Adi Wijaya (Penggugat) atas somasi yang dilayangkan oleh Perusahaan terhadap Penggugat. Pada pokoknya, somasi tersebut meminta Penggugat untuk segera mengosongkan tanah di jalur *emergency spillway* PLTA Mrica yang diduduki oleh Penggugat, sementara Penggugat telah memiliki izin untuk melakukan usaha pemecah batu pada lokasi tersebut. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan gugatan dan menuntut Perusahaan membayar kerugian materiil sebesar Rp118.500 dan kerugian immaterial sebesar Rp50.000. Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, perkara sedang dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.

(x) On October 30, 2019, the Company faces a lawsuit filed in District Court of Banjarnegara by Adi Wijaya (the Plaintiff) regarding a subpoena filed by the Company to the Plaintiff. In essence, the subpoena has requested the Plaintiff to immediately clear the land in the emergency spillway line of PLTA Mirca in which occupied by the Plaintiff, meanwhile the Plaintiff already had the permission to do a stone-breaking business in the area. The Plaintiff filed a lawsuit and sued the Company to pay material loss amounted to Rp118,500 and immaterial loss amountied to Rp50,000. As of the date of the issuance of this report, the case is still being process in the Distrcit Court of Banjarnegara.

(xi) Perusahaan dan entitas anak perusahaan juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/ distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan

(xi) The Company and its subsidiaries also face claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, in several areas of the Company's transmission/ distribution facilities, disputes with the Company's employees and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company's operations.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil litigasi-litigasi di atas belum dapat dipastikan dan estimasi andal tidak dapat ditentukan pada saat ini, atau Perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Perusahaan dan entitas anak, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigations are either still uncertain and there are no reliable estimate that can be made at this point, or the Company has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favor of the Company and subsidiaries, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

56. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal

56. Financial Instruments, Financial Risk and Capital Risk Management

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi aset keuangan:

a. Categories and classes of financial instruments

The following table discloses the details of the Company and its subsidiaries' financial asset classifications:

	2019			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instrument classification			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i> Rp	Tersedia untuk dijual/ <i>Available- for-sale</i> Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ <i>Total of financial assets and liabilities</i> Rp	
Aset keuangan				Financial assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Piutang pihak berelasi	951,643	--	951,643	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,980,703	--	5,980,703	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	824,545	--	824,545	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lain	--	7,368	7,368	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	7,756,891	7,368	7,764,259	<i>Total non-current assets</i>
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	46,598,783	--	46,598,783	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	334,153	--	334,153	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha	25,130,538	--	25,130,538	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	46,973,724	--	46,973,724	<i>Other receivables</i>
Piutang pihak berelasi	4,719	--	4,719	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lain	72,241	--	72,241	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	119,114,158	--	119,114,158	<i>Total current assets</i>
Jumlah aset keuangan	126,871,049	7,368	126,878,417	Total financial assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		2018				
		Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instrument classification				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables Rp	Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total of financial assets and liabilities Rp			
Aset keuangan						Financial assets
Aset tidak lancar						Non-current assets
Piutang pihak berelasi	1,031,237	--	1,031,237			Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,688,712	--	5,688,712			Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	961,377	--	961,377			Other receivables
Aset tidak lancar lain	--	4,751	4,751			Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	7,681,326	4,751	7,686,077			Total non-current assets
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	33,294,560	--	33,294,560			Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	1,216,886	--	1,216,886			Short-term investments
Piutang usaha	23,802,663	--	23,802,663			Trade receivables
Piutang kompensasi	23,173,464	--	23,173,464			Compensation receivables
Piutang lain-lain	9,507,768	--	9,507,768			Other receivables
Piutang pihak berelasi	5,954	--	5,954			Receivables from related parties
Aset lancar lain	5,697	--	5,697			Other current asset
Jumlah aset lancar	91,006,992	--	91,006,992			Total current assets
Jumlah aset keuangan	98,688,318	4,751	98,693,069			Total financial assets
2017						
		Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instrument classification				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables Rp	Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total of financial assets and liabilities Rp			
Aset keuangan						Financial assets
Aset tidak lancar						Non-current assets
Piutang pihak berelasi	237,181	--	237,181			Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7,487,709	--	7,487,709			Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	634,949	--	634,949			Other receivables
Aset tidak lancar lain	--	3,964	3,964			Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	8,359,839	3,964	8,363,803			Total non-current assets
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	42,291,959	--	42,291,959			Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	286,697	--	286,697			Short-term investments
Piutang usaha	22,466,843	--	22,466,843			Trade receivables
Piutang subsidi listrik	7,588,977	--	7,588,977			Receivables on electricity subsidy
Piutang lain-lain	1,672,237	--	1,672,237			Other receivables
Piutang pihak berelasi	5,294	--	5,294			Receivables from related parties
Aset lancar lain	30,124	--	30,124			Other current assets
Jumlah aset lancar	74,342,131	--	74,342,131			Total current assets
Jumlah aset keuangan	82,701,970	3,964	82,705,934			Total financial assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Seluruh liabilitas keuangan milik Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

All of the Company and its subsidiaries' financial liabilities are classified as financial liabilities measure at amortized cost, details are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi				Amortised cost measured at financial liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Penerusan pinjaman	35,251,741	36,105,279	31,485,476	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah				Government and non-bank Government Financial
Non-bank	4,359,569	5,343,629	6,309,173	Institution loan
Utang sewa pembiayaan	11,569,377	14,468,336	15,713,269	Lease liabilities
Utang bank	184,023,820	152,965,997	116,017,364	Bank loan
Utang obligasi dan sukuk ijarah	174,292,298	131,681,821	100,440,360	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	6,431,448	7,115,916	7,026,434	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	1,354,642	2,221,167	2,907,986	KIK - EBA loans
Utang pihak berelasi	92	1,000	794	Payable to related parties
Utang lain-lain	133,662	94,427	940,153	Other payables
Jumlah liabilitas jangka panjang	417,416,649	349,997,572	280,841,009	Total non-current liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	52,002,783	48,607,674	43,711,425	Trade payables
Uang jaminan langganan	14,235,879	13,465,735	12,642,333	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	150,664	315,828	723,992	Project cost payable
Biaya yang masih harus dibayar	16,754,640	14,809,018	11,477,437	Accrued expenses
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	2,725,805	2,530,273	2,735,992	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah				Government and non-bank
Lembaga Keuangan Pemerintah				Government Financial
Non-bank	1,998,476	1,860,649	1,043,793	Institution loan
Utang sewa pembiayaan	2,540,107	2,624,629	4,871,908	Lease liabilities
Utang bank	21,693,338	28,145,737	26,548,747	Bank loan
Utang obligasi dan sukuk ijarah	6,946,478	2,120,612	914,000	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	399,458	394,403	349,968	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	586,620	686,819	630,600	KIK - EBA loans
Utang lain-lain	30,395,533	32,871,070	18,339,768	Other payables
Jumlah liabilitas jangka pendek	150,429,781	148,432,447	123,989,963	Total financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	567,846,430	498,430,019	404,830,973	Total financial liabilities

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman (Catatan 24, 25, 26, 27, 28 dan 29) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba (Catatan 21), dan tambahan modal disetor (Catatan 22).

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Company and its subsidiaries' capital structure consists of debt (Notes 24, 25, 26, 27, 28 and 29) and equity shareholders of the holding that consists of capital stock, retained earnings (Note 21) and additional paid-in capital (Note 22).

The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company and its subsidiaries' capital structure. As part of this review, the Board

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

of Directors considers the cost of capital and related risks.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

The Company's loan covenants require among other things, the fulfillment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company and its subsidiaries aim to minimize the cost of debt in order to maximize their value. Therefore, in their financing policies, the Company and its subsidiaries always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

c. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Company and its subsidiaries' financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies approved by the Board of Directors.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan ("DIVMRK") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. DIVMRK bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat ("DIRREN").

In managing those risks, the Company established a Risk Management and Compliance Division ("DIVMRK") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries' management. DIVMRK is responsible to the Corporate Planning Director ("DIRREN").

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Perusahaan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang diukur pada FVTPL. Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Perusahaan dan entitas anak. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dan Catatan 56 untuk klasifikasi instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anak tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut.

The Company has established risk taxonomy by dividing risk into five categories, such as strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Company considers prioritization based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Related to financial risks, the Company has established management's policy related to hedging transactions. As a BUMN, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented at the amount of unrealized gain or loss from derivative contracts. The Company and its subsidiaries derivative contracts are classified as Financial Assets measured in FVTPL. These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payment due in the 1-3 months of the Company and its subsidiaries reporting period. Refer to Note 3 for the accounting policy of financial assets and liabilities, as well as Note 56 for the financial instruments classification. The Company and its subsidiaries does not apply hedge accounting on those transactions.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan dan entitas anak telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia ("BI") untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Perusahaan dan entitas anak kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 53.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Analisa sensitivitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK 26: Biaya Pinjaman.

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries undertake many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there is exposures to exchange rate fluctuations.

The Company and its subsidiaries held regular discussions with Bank Indonesia ("BI") to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Company and its subsidiaries then incorporated this outlook into its internal financial forecast and developed a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

The Company and its subsidiaries' foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 53.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Company's and its subsidiaries' sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalized as construction in progress assets in accordance with SFAS 26: Borrowing Costs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)				
	2019				
	USD		JPY		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan					Financial assets
Piutang pihak berelasi	(71,373,262)	71,373,262	--	--	Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(51,087,300)	51,087,300	(381,943,050)	381,943,050	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	(851,733,300)	851,733,300	(137,574,975)	137,574,975	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	(1,042,575)	1,042,575	--	--	Short-term investments
Jumlah aset keuangan	(975,236,437)	975,236,437	(519,518,025)	519,518,025	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Penerusan pinjaman	1,292,971,064	(1,292,971,064)	1,524,730,691	(1,524,730,691)	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	58,488,317	(58,488,317)	994,696,863	(994,696,863)	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	6,560,129,913	(6,560,129,913)	(498,089,772)	498,089,772	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	10,452,806,496	(10,452,806,496)	(222,661,884)	222,661,884	Bonds payable
Utang listrik swasta	512,318,127	(512,318,127)	--	--	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	527,489,885	(527,489,885)	1,295,120	(1,295,120)	Other payables
Utang biaya proyek	1,091,489	(1,091,489)	330,791	(330,791)	Project cost payable
Utang usaha	936,761,792	(936,761,792)	--	--	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	256,742,059	(256,742,059)	85,247,942	(85,247,942)	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	20,598,799,142	(20,598,799,142)	1,885,549,751	(1,885,549,752)	Total financial liabilities
Jumlah - bersih	19,623,562,705	(19,623,562,705)	1,366,031,726	(1,366,031,727)	Total - net

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)				
	2019				
	EUR		Lain-lain/Others **)		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	(286,066,051)	286,066,051	(154,650)	154,650	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	(286,066,051)	286,066,051	(154,650)	154,650	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Penerusan pinjaman	(22,652,799)	22,652,799	(5,851,863)	5,851,863	Two-step loans
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(355,589,044)	355,589,044	--	--	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	(1,169,144,625)	1,169,144,625	--	--	Bonds payable
Utang lain-lain	(139,256,095)	139,256,095	(7,809,485)	7,809,485	Other payables
Utang biaya proyek	(278,970)	278,970	--	--	Project cost payable
Utang usaha	(381,457)	381,457	(31,679,488)	31,679,488	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(6,383,173)	6,383,173	(66,952)	66,952	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(1,693,686,163)	1,693,686,163	(45,407,788)	45,407,788	Total financial liabilities
Jumlah - bersih	(1,979,752,214)	1,979,752,214	(45,562,438)	45,562,438	Total - net

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)				
	2018				
	USD		JPY		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan					Financial assets
Piutang pihak berelasi	(77,232,291)	77,232,291	--	--	Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(51,808,500)	51,808,500	(363,300,898)	363,300,898	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	(726,156,094)	726,156,094	(47,152,568)	47,152,568	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	(855,196,885)	855,196,885	(410,453,466)	410,453,466	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Penerusan pinjaman	1,249,614,703	(1,249,614,703)	1,602,023,025	(1,602,023,025)	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	71,206,489	(71,206,489)	1,189,892,142	(1,189,892,142)	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	5,478,071,390	(5,478,071,390)	(306,740,102)	306,740,102	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	8,441,397,384	(8,441,397,384)	--	--	Bonds payable
Utang listrik swasta	563,273,896	(563,273,896)	--	--	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	701,361,659	(701,361,659)	68,981,131	(68,981,131)	Other payables
Utang biaya proyek	375,033	(375,033)	2,424,591	(2,424,591)	Project cost payable
Utang usaha	669,771,022	(669,771,022)	--	--	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	204,783,004	(204,783,004)	78,398,270	(78,398,270)	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	17,379,854,580	(17,379,854,580)	2,634,979,057	(2,634,979,057)	Total financial liabilities
Jumlah - bersih	16,524,657,695	(16,524,657,695)	2,224,525,591	(2,224,525,591)	Total - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)					
		2018					
		EUR		Lain-lain/Others **)			
		10%	-10%	10%	-10%		
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	(111,205,654)	111,205,654	--	--			Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	(111,205,654)	111,205,654	--	--			Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Penerusan pinjaman	(34,188,510)	34,188,510	(9,445,318)	9,445,318			Two-step loans
Utang bank dan surat utang							Bank loans and medium
jangka menengah	(220,018,653)	220,018,653	--	--			term notes
Utang obligasi	(620,990,625)	620,990,625	--	--			Bonds payable
Utang lain-lain	(148,270,483)	148,270,483	(8,267,688)	8,267,688			Other payables
Utang biaya proyek	(334,412)	334,412	--	--			Project cost payable
Utang usaha	--	--	(10,923,963)	10,923,963			Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(1,418,421)	1,418,421	(97,146)	97,146			Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(1,025,221,104)	1,025,221,104	(28,734,115)	28,734,115			Total financial liabilities
Jumlah - bersih	(1,136,426,758)	1,136,426,758	(28,734,115)	28,734,115			Total - net
		Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)					
		2017					
		USD		JPY			
		10%	-10%	10%	-10%		
Aset keuangan							Financial assets
Piutang pihak berelasi	(16,716,323)	16,716,323	--	--			Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka							Restricted cash in banks and
dibatasi penggunaannya	(46,410,310)	46,410,310	(474,255,536)	474,255,536			time deposits
Kas dan setara kas	(548,581,755)	548,581,755	(8,562,612)	8,562,612			Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	(611,708,388)	611,708,388	(482,818,148)	482,818,148			Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Penerusan pinjaman	975,383,820	(975,383,820)	1,477,432,120	(1,477,432,120)			Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	84,948,291	(84,948,291)	1,360,633,793	(1,360,633,793)			Lease liabilities
Utang bank dan surat hutang							Bank loans and medium
jangka menengah	3,076,033,894	(3,076,033,894)	(52,039,683)	52,039,683			term notes
Utang obligasi	6,550,050,000	(6,550,050,000)	--	--			Bonds payable
Utang listrik swasta	548,656,650	(548,656,650)	--	--			Electricity purchase payable
Utang lain-lain	363,730,176	(363,730,176)	137,211	(137,211)			Other payables
Utang biaya proyek	33,189,353	(33,189,353)	430,999	(430,999)			Project cost payable
Utang usaha	548,027,544	(548,027,544)	--	--			Trade payables
Biaya masih harus dibayar	135,233,100	(135,233,100)	39,481,195	(39,481,195)			Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	12,315,252,828	(12,315,252,828)	2,826,075,635	(2,826,075,635)			Total financial liabilities
Jumlah - bersih	11,703,544,440	(11,703,544,440)	2,343,257,487	(2,343,257,487)			Total - net
		Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)					
		2017					
		EUR		Lain-lain/Others **)			
		10%	-10%	10%	-10%		
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	(8,838,125)	8,838,125	--	--			Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	(8,838,125)	8,838,125	--	--			Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Penerusan pinjaman	(27,681,984)	27,681,984	(11,954,791)	11,954,791			Two-step loans
Utang bank dan surat hutang							Bank loans and medium
jangka menengah	(142,655,274)	142,655,274	--	--			term notes
Utang lain-lain	(7,666,518)	7,666,518	--	--			Other payables
Utang biaya proyek	(2,268,186)	2,268,186	--	--			Project cost payable
Utang usaha	(688,569)	688,569	(765,072)	765,072			Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(1,124,014)	1,124,014	(124,043)	124,043			Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(182,084,545)	182,084,545	(12,843,906)	12,843,906			Total financial liabilities
Jumlah - bersih	(190,922,670)	190,922,670	(12,843,906)	12,843,906			Total - net

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman

**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$ menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) Not considering the effect of borrowing cost capitalization

**) Other foreign currencies are presented as US\$ equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dan entitas anak dengan risiko suku bunga nilai wajar. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

ii. Interest rate risk management

The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Company and its subsidiaries to fair value interest risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Company and its subsidiaries' exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax 2019 *)		
	+50 bp Rp	-50 bp Rp	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	174,745	(174,745)	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	1,253	(1,253)	Short-term investments
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	22,428	(22,428)	Restricted cash in banks and time deposits
Subjumlah laba (rugi)	198,426	(198,426)	Subtotal income (loss)
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Penerusan pinjaman	(142,416)	142,416	Two-step loans
Utang bank	(771,439)	771,439	Bank loans
Subjumlah laba (rugi)	(913,855)	913,855	Subtotal income (loss)
Total laba (rugi)	(715,429)	715,429	Total income (loss)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax 2018 *)		
	+50 bp	-50 bp	
	Rp	Rp	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	124,855	(124,855)	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	4,563	(4,563)	Short-term investments
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	21,333	(21,333)	Restricted cash in banks and time deposits
Subjumlah laba (rugi)	<u>150,751</u>	<u>(150,751)</u>	Subtotal income (loss)
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Penerusan pinjaman	(144,883)	144,883	Two-step loans
Utang bank	(679,169)	679,169	Bank loans
Subjumlah laba (rugi)	<u>(824,052)</u>	<u>824,052</u>	Subtotal income (loss)
Total laba (rugi)	<u>(673,301)</u>	<u>673,301</u>	Total income (loss)

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax 2017 *)		
	+50 bp	-50 bp	
	Rp	Rp	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	158,650	(158,650)	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	995	(995)	Short-term investments
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	28,079	(28,079)	Restricted cash in banks and time deposits
Subjumlah laba (rugi)	<u>187,724</u>	<u>(187,724)</u>	Subtotal income (loss)
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Penerusan pinjaman	(128,331)	128,331	Two-step loans
Utang bank	(534,623)	534,623	Bank loans
Subjumlah laba (rugi)	<u>(662,954)</u>	<u>662,954</u>	Subtotal income (loss)
Total laba (rugi)	<u>(475,230)</u>	<u>475,230</u>	Total income (loss)

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman

*) Not considering the effect of borrowing cost capitalization

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Company and its subsidiaries. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Company and its subsidiaries are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimizing the risk of uncollected receivables, the Company and its subsidiaries collect customers security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three-months to minimize the Company's credit risk. For cash and

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 56.a untuk rinciannya.

Kualitas kredit piutang usaha

Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena piutang usaha Perusahaan dan entitas anak tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai industri dan wilayah geografis. Perusahaan dan entitas anak juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala. Lihat Catatan 14 untuk rincian umur piutang dan analisa cadangan penurunan nilai.

Kualitas kredit piutang subsidi listrik

Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa piutang subsidi listrik dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

Kualitas kredit kas, deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya

Perusahaan dan entitas anak menempatkan kas dan setara kas, deposito berjangka dan rekening deposito yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN lainnya.

cash equivalents, the Company and its subsidiaries maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's and its subsidiaries exposure to credit risk. See Note 56.a for details.

Credit quality of trade accounts receivable

The Company and its subsidiaries believe that there is no heightened risk of poor credit quality because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries and geographic areas. The Company and its subsidiaries also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its accounts receivable. See Note 14 for detailed information of the aging of receivables and impairment assessment of trade receivables.

Credit quality of electricity subsidy

The Company and its subsidiaries believes that receivables on electricity subsidy can be fully recovered in time because it is to be collected from the Government of the Republic of Indonesia. The Company and its subsidiaries believes there is no risk of default by the Government.

Credit qualities of cash, time deposits and restricted cash

The Company and its subsidiaries placed cash and cash equivalents, time deposits and restricted cash with reputable counterparties that have good credit rating or bank standing. Consequently, the Company and its subsidiaries believe that the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and other BUMN.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Kualitas kredit piutang lainnya

Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Perusahaan dan entitas anak memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

Credit quality of other receivables

Other receivables are to be collected from the Company and its subsidiaries related parties and employees. Thus, the Company and its subsidiaries can closely monitor the collectability of these receivables. The Company and its subsidiaries have a good historical collection rate of these financial assets.

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak sebelum cadangan kerugian penurunan nilai:

The following table shows the quality of financial assets of the Company and its subsidiaries before allowance for impairment losses:

2019					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset keuangan					Financial assets
Aset tidak lancar					Non-current assets
Piutang pihak berelasi	951,643	--	--	951,643	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,980,703	--	--	5,980,703	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	824,545	--	--	824,545	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lainnya	7,368	--	--	7,368	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	7,764,259	--	--	7,764,259	Total non-current assets
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	46,598,783	--	--	46,598,783	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	334,153	--	--	334,153	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha	23,432,282	3,654,970	(1,956,714)	25,130,538	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	46,973,724	--	--	46,973,724	<i>Other receivables</i>
Piutang pihak berelasi	4,719	--	--	4,719	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lainnya	72,241	--	--	72,241	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	117,415,902	3,654,970	(1,956,714)	119,114,158	Total current assets
Jumlah aset keuangan	125,180,161	3,654,970	(1,956,714)	126,878,417	Total financial assets
2018					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset keuangan					Financial assets
Aset tidak lancar					Non-current assets
Piutang pihak berelasi	1,031,237	--	--	1,031,237	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,688,712	--	--	5,688,712	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	961,377	--	--	961,377	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lain	4,751	--	--	4,751	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	7,686,077	--	--	7,686,077	Total non-current assets
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	33,294,560	--	--	33,294,560	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	1,216,886	--	--	1,216,886	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha	21,628,281	3,463,450	(1,289,068)	23,802,663	<i>Trade receivables</i>
Piutang kompensasi	23,173,464	--	--	23,173,464	<i>Compensation receivables</i>
Piutang lain-lain	9,507,768	--	--	9,507,768	<i>Other receivables</i>
Piutang pihak berelasi	5,954	--	--	5,954	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lain	5,697	--	--	5,697	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	88,832,610	3,463,450	(1,289,068)	91,006,992	Total current assets
Jumlah aset keuangan	96,518,687	3,463,450	(1,289,068)	98,693,069	Total financial assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017			Jumlah/ Total Rp	
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i> Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i> Rp	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i> Rp		
Aset keuangan					Financial assets
Aset tidak lancar					Non-current assets
Piutang pihak berelasi	237,181	--	--	237,181	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7,487,709	--	--	7,487,709	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	634,949	--	--	634,949	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lainnya	3,964	--	--	3,964	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>8,363,803</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>8,363,803</u>	<i>Total non-current assets</i>
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	42,291,959	--	--	42,291,959	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	286,697	--	--	286,697	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha	18,252,338	3,036,855	1,177,650	22,466,843	<i>Trade receivables</i>
Piutang subsidi listrik	7,588,977	--	--	7,588,977	<i>Receivables on electricity subsidy</i>
Piutang lain-lain	1,672,237	--	--	1,672,237	<i>Other receivables</i>
Piutang pihak berelasi	5,294	--	--	5,294	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lainnya	30,124	--	--	30,124	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	<u>70,127,626</u>	<u>3,036,855</u>	<u>1,177,650</u>	<u>74,342,131</u>	<i>Total current assets</i>
Jumlah aset keuangan	<u>78,491,429</u>	<u>3,036,855</u>	<u>1,177,650</u>	<u>82,705,934</u>	Total financial assets

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries, short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of their cash collections.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2019. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

The following table details the remaining contractual maturity for its financial liabilities with an agreed repayment period as of December 31, 2019. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries are required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted cash flow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

	2019					
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years Rp	Lebih dari lima tahun/ Over five years Rp	Jumlah/ Total Rp	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Penerusan pinjaman	2,725,805	5,793,221	5,523,107	23,935,413	37,977,546	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	1,998,476	1,500,000	1,500,000	1,359,569	6,358,045	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	2,540,107	6,179,307	1,013,631	4,376,439	14,109,484	Bank loans
Utang bank	21,693,338	57,720,495	69,054,325	57,249,000	205,717,158	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang obligasi dan sukuk ijarah	6,946,478	20,201,481	8,472,082	145,618,735	181,238,776	Electricity purchase payable
Utang listrik swasta	399,458	867,530	970,890	4,593,028	6,830,906	KIK-EBA loans
Utang KIK - EBA	586,620	1,354,642	--	--	1,941,262	Related parties payables
Utang pihak berelasi	--	92	--	--	92	Trade payables
Utang usaha	52,002,783	--	--	--	52,002,783	Customer's security deposits
Uang jaminan langganan	14,235,879	--	--	--	14,235,879	Project cost payable
Utang biaya proyek	150,664	--	--	--	150,664	Accrued expenses
Biaya masih harus dibayar	16,754,640	--	--	--	16,754,640	Other payables
Utang lain-lain	30,598,919	133,662	--	--	30,732,581	
Jumlah	150,633,167	93,750,430	86,534,035	237,132,184	568,049,816	Total
	2018					
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years Rp	Lebih dari lima tahun/ Over five years Rp	Jumlah/ Total Rp	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Penerusan pinjaman	2,530,273	5,156,171	5,510,200	25,438,908	38,635,552	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	1,860,649	1,793,793	1,500,000	2,049,836	7,204,278	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	2,624,629	5,513,648	1,354,210	7,600,478	17,092,965	Bank loans
Utang bank	28,145,737	42,498,456	64,785,461	45,682,080	181,111,734	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2,120,612	20,367,695	6,876,500	104,437,626	133,802,433	Electricity purchase payable
Utang listrik swasta	394,403	855,508	955,548	5,304,860	7,510,319	KIK-EBA loans
Utang KIK - EBA	686,819	1,562,790	658,377	--	2,907,986	Related parties payables
Utang pihak berelasi	--	1,000	--	--	1,000	Trade payables
Utang usaha	48,607,674	--	--	--	48,607,674	Customer's security deposits
Uang jaminan langganan	13,465,735	--	--	--	13,465,735	Project cost payable
Utang biaya proyek	315,828	--	--	--	315,828	Accrued expenses
Biaya masih harus dibayar	14,809,018	--	--	--	14,809,018	Other payables
Utang lain-lain	32,970,944	94,427	--	--	33,065,371	
Jumlah	148,532,321	77,843,488	81,640,296	190,513,788	498,529,893	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017				Jumlah/ Total Rp	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years Rp	Lebih dari lima tahun/ Over five years Rp		
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Penerusan pinjaman	2,735,992	4,367,399	4,297,084	22,820,993	34,221,468	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	1,043,793	2,087,585	1,500,000	2,721,588	7,352,966	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	4,871,908	7,560,028	6,219,869	1,933,372	20,585,177	Bank loans
Utang bank	26,548,747	30,627,494	34,436,611	50,953,259	142,566,111	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang obligasi dan sukuk ijarah	914,000	29,349,000	18,743,000	52,348,360	101,354,360	Electricity purchase payable
Utang listrik swasta	349,968	761,221	848,708	5,416,506	7,376,403	KIK-EBA loans
Utang KIK - EBA	630,600	1,556,257	1,351,729	--	3,538,586	Related parties payables
Utang pihak berelasi	--	794	--	--	794	Trade payables
Utang usaha	43,711,425	--	--	--	43,711,425	Customer's security deposits
Uang jaminan langganan	12,642,333	--	--	--	12,642,333	Project cost payable
Utang biaya proyek	723,992	--	--	--	723,992	Accrued expenses
Biaya masih harus dibayar	11,477,437	--	--	--	11,477,437	Other payables
Utang lain-lain	21,255,272	940,154	--	--	22,195,426	
Jumlah	126,905,467	77,249,932	67,397,001	136,194,078	407,746,478	Total

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek, instrumen tersebut dijamin penuh atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities, because the instruments are fully collateralized or because they carry a market interest rate:

	2019		2018		2017		
	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	
Pinjaman diberikan dan piutang							Loans and receivables
Piutang pihak berelasi	956,362	956,362	1,037,191	1,037,191	242,475	242,475	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,980,703	5,980,703	5,688,712	5,688,712	7,487,709	7,487,709	Restricted cash in banks and time deposits
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi							Liabilities at amortised cost
Penerusan pinjaman	37,977,545	41,324,570	38,635,552	41,794,757	34,221,468	34,221,468	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan							Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	6,358,045	6,918,390	7,204,278	5,280,327	7,352,966	7,352,966	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	14,109,484	15,352,976	17,092,965	16,822,994	20,585,177	20,892,122	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang obligasi dan sukuk ijarah	181,238,776	197,211,651	133,802,433	141,499,687	101,354,360	108,501,996	Electricity purchase payable
Utang listrik swasta	6,830,906	7,432,925	7,510,319	8,531,622	7,376,402	8,295,015	Payable to related parties
Utang pihak berelasi	92	92	1,000	1,000	1,794	1,794	Bank loans
Utang bank	205,717,158	223,847,354	181,111,734	182,117,875	142,566,111	143,512,677	

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, kecuali untuk utang obligasi, ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan diatas diklasifikasikan sebagai tingkat dua dalam hirarki nilai wajar.

The fair value for the above financial instruments, except for bonds payable, was determined by discounting estimated future cash flows with credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level two of the fair value hierarchy.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dikuotasikan pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi diatas diklasifikasikan sebagai tingkat satu dalam hirarki nilai wajar.

The fair value of bonds payable is determined by quoted the closing ask price at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level one of the fair value hierarchy.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

e. Aset Derivatif

Perusahaan melaksanakan *hedging* terbatas untuk memitigasi risiko selisih kurs atas transaksi-transaksi tertentu. Jenis transaksi *hedging* yang dilaksanakan adalah kontrak-kontrak *currency swap* dengan jumlah rincian per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

e. Derivative Asset

The Company has implemented limited hedge on certain transactions to mitigate its foreign currency exposure. The type of hedge transaction is currency swap contract with details as of December 31, 2019 as follows:

Pihak lawan/ <i>Counterparties</i>	Jangka waktu <i>hedging</i> / <i>Hedging periods</i>	Jumlah Notional/ <i>Notional amount</i> Rp	Aset (Liabilitas) Derivatif/ <i>Derivative</i> Assets (<i>Liabilities</i>) Rp
BNI	> 1 Bulan/ <i>Months</i>	1,747,225	29,868
BRI	> 1 Bulan/ <i>Months</i>	1,417,075	27,709
Mandiri	> 1 Bulan/ <i>Months</i>	1,408,675	26,886
BNI	< 1 Bulan/ <i>Months</i>	703,175	(8,051)
Mandiri	< 1 Bulan/ <i>Months</i>	351,650	(4,172)
		5,627,800	72,240

57. Informasi Tambahan terkait Penerapan POJK No. 6

Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan secara prospektif POJK No.6 untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan IPP. Dampak penerapan POJK No.6 telah disesuaikan ke saldo laba 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

Sesuai POJK No.6 maka setiap transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun sebenarnya mengandung substansi selain jual beli (Catatan 3.l dan 3.w). Tabel berikut ini disajikan sebagai informasi tambahan, jika perjanjian jual beli listrik dianggap mengandung sewa.

57. Additional Information Related to Implementation of POJK No.6

Since January 1, 2016, the Company has implemented POJK No.6 prospectively for transactions based on Power Purchase Agreement with IPPs. The effect of POJK No.6 implementation has been accounted for by adjustment to retained earnings as of January 1, 2016 (Note 2.a).

In accordance with POJK No.6, all transaction based on Power Purchase Agreement is treated as a sales and purchase transaction, although it contains substance other than sales and purchase (Notes 3.l and 3.w). The following tables are presented as an additional information if a certain power purchase agreement is deemed to contain a lease.

	Dengan/ <i>Under</i> ISAK 8			
	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2019 Rp	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2018 Rp	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2017 Rp	
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>				<u>Consolidated statements of financial position</u>
Aset tidak lancar				Non current assets
Aset tetap	1,536,415,978	1,437,128,830	1,308,373,397	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	2,215,963	25,376,110	24,590,272	Deferred tax assets
Ekuitas				Equity
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	21,856,454	25,460,243	26,924,938	Retained earnings - unappropriated
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	11,480,085	--	--	Deferred Tax Payables
Utang sewa pembiayaan	208,265,236	182,580,812	175,276,384	Lease liabilities
Utang listrik swasta	5,722,992	6,474,612	6,304,485	Electricity purchase payable

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Dengan/ Under ISAK 8			
	31 Desember/ December 31 , 2019 Rp	31 Desember/ December 31 , 2018 Rp	31 Desember/ December 31 , 2017 Rp	
Liabilitas jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Utang usaha				<i>Trade payables</i>
Pihak berelasi	11,412,669	8,743,335	10,950,823	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	37,206,116	37,726,650	31,185,078	<i>Third parties</i>
Biaya masih harus dibayar	19,838,274	16,726,497	13,029,534	<i>Accrued expenses</i>
Utang listrik swasta	381,832	379,112	338,056	<i>Electricity purchase payable</i>
Utang sewa pembiayaan	8,384,288	6,758,279	9,063,151	<i>Lease liabilities</i>
Utang lain-lain	30,598,920	32,970,941	21,255,272	<i>Other payables</i>
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</u>				<u><i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i></u>
Beban usaha:				<i>Operating expenses:</i>
Bahan bakar dan pelumas	162,051,377	163,913,402	142,102,203	<i>Fuel and lubricants</i>
Pembelian tenaga listrik	7,274,063	10,636,627	4,099,806	<i>Purchased electricity</i>
Sewa	8,615,643	7,077,750	9,589,066	<i>Lease</i>
Pemeliharaan	28,430,079	26,296,539	25,052,507	<i>Maintenance</i>
Penyusutan	41,136,593	35,679,954	33,905,138	<i>Depreciation</i>
Laba usaha setelah subsidi	77,569,286	46,495,019	55,453,473	<i>Operating income after subsidy</i>
Pendapatan (beban) lain-lain				<i>Other income (expense)</i>
Beban keuangan	(59,762,120)	(55,856,045)	(49,833,656)	<i>Financial cost</i>
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	16,477,837	(21,905,908)	(4,365,296)	<i>Gain (loss) on foreign exchange - net</i>
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(3,667,667)	38,836,829	3,369,553	<i>Others income (expense) - net</i>
Laba sebelum pajak	31,372,441	8,374,216	5,690,916	<i>Income before tax</i>
Beban pajak	(23,121,783)	(5,421,231)	(3,492,016)	<i>Tax expenses</i>
Laba tahun berjalan	8,250,658	2,952,985	2,198,900	<i>Income for the year</i>
Laba per saham dasar/ (Dalam Rupiah penuh)	72,025	26,820	24,994	<i>Basic/ earning per share (In Rupiah full amount)</i>
<u>Laporan arus kas konsolidasian</u>				<u><i>Consolidated statements of cash flows</i></u>
Arus kas dari aktivitas operasi				<i>Cash flows from operating activities</i>
Pembayaran kas kepada pemasok	(211,222,660)	(216,803,330)	(171,596,023)	<i>Cash paid to suppliers</i>
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	52,683,880	37,219,439	64,533,828	<i>Cash provided by operating activities</i>
Pembayaran bunga	(57,118,326)	(53,962,154)	(49,170,854)	<i>Interest expense paid</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	43,525,315	39,335,367	61,529,254	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan				<i>Cash flows from financing activities</i>
Pembayaran utang listrik swasta	(379,115)	(355,410)	(318,250)	<i>Payments of electricity purchase payable</i>
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(6,482,730)	(9,493,013)	(9,124,879)	<i>Payments of lease liabilities</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	71,159,780	51,345,128	25,924,090	<i>Net cash provided by financing activities</i>
Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 jika perusahaan menerapkan ISAK 8 adalah sebagai berikut:				<i>The present value of minimum lease payments on lease liabilities as of December 31, 2019, 2018 and 2017 if the Company applied ISFAS 8 were as follows:</i>
	2019	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:				<i>Minimum lease payments due:</i>
Tidak lebih dari satu tahun	43,823,447	37,760,924	38,591,929	<i>Not later than one year</i>
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	162,937,336	147,209,652	141,399,663	<i>Later than one year and not later than five years</i>
Lebih dari lima tahun	496,765,186	421,833,591	417,988,237	<i>Later than five years</i>
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	703,525,969	606,804,167	597,979,829	<i>Total minimum lease payments</i>
Dikurangi bunga	486,876,445	417,465,076	413,640,294	<i>Less interest</i>
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	216,649,524	189,339,091	184,339,535	<i>Present value of future minimum lease payments</i>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	8,384,288	6,758,279	9,063,151	<i>Less current maturity</i>
Bagian jangka panjang	208,265,236	182,580,812	175,276,384	<i>Long-term portion</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

58. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a. Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Murtaqi Syamsuddin diangkat sebagai Komisaris Independen dan Dudy Purwagandhi diangkat sebagai Komisaris.
- b. Pada tanggal 18 Februari 2020, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.3 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).
- c. Pada tanggal 18 Februari 2020 Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ <i>Principal</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Tingkat kupon imbalan ijarah per tahun/ <i>Coupon rate ijarah fee per annum *</i>	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020				<i>Shelf Registration Bonds III PLN VI Year 2020</i>
Seri A	540,630	18 Februari/ <i>February 18, 2025</i>	7.20%	<i>Series A</i>
Seri B	672,500	18 Februari/ <i>February 18, 2027</i>	7.70%	<i>Series B</i>
Seri C	544,250	18 Februari/ <i>February 18, 2030</i>	8.00%	<i>Series C</i>
Seri D	1,459,000	18 Februari/ <i>February 18, 2035</i>	8.70%	<i>Series D</i>
Seri E	1,596,050	18 Februari/ <i>February 18, 2040</i>	9.05%	<i>Series E</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020				<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN VI Year 2020</i>
Seri A	40,500	18 Februari/ <i>February 18, 2027</i>	Rp3.119	<i>Series A</i>
Seri B	3,500	18 Februari/ <i>February 18, 2030</i>	Rp 280	<i>Series B</i>
Seri C	9,000	18 Februari/ <i>February 18, 2035</i>	Rp 783	<i>Series C</i>
Seri D	62,500	18 Februari/ <i>February 18, 2040</i>	Rp5.656	<i>Series D</i>
Jumlah	<u>4,927,930</u>			Total

*) Imbalan ijarah per tahun disajikan dalam Rupiah penuh

- d. Pada tanggal 5 Maret 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari MUFG Bank berjangka *offshore* sebesar JPY18.700.000.000 dan *onshore* sebesar JPY14.300.000.000 yang akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2025. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Mizuho Bank untuk membiayai pembangunan PLTMG Riau Peaker sebesar EUR84.597.923,78 dan akan berakhir pada tanggal 13 Maret 2032. Kedua pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga antara 0.98% s.d. LIBOR + 0.7% per tahun.

58. Events After Reporting Period

- a. Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020, Murtaqi Syamsuddin was appointed as Independent Commissioner and Dudy Purwagandhi was appointed as Commissioner.
- b. On February 18, 2020, the Ministry of ESDM issued Regulation of the Minister of ESDM No.3 Year 2020 regarding the fourth amendment to Regulation of the Minister of ESDM No.28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).
- c. On February 18, 2020, the Company issued Shelf Registration Bonds III Phase VI Year 2020 and Shelf Registration Sukuk Ijarah III Phase VI Year 2020 with details as follows:

*) *Ijarah fee per annum are presented in Rupiah full amount*

- d. On March 5, 2020, the Company obtained credit facilities from MUFG offshore amounting to JPY18,700,000,000 and onshore amounting to JPY14,300,000,000, respectively and will mature on March 5, 2025. Moreover, on March 13, 2020, the Company obtained a credit facility from Mizuho Bank to fund the construction of PLTMG Riau Peaker amounting to EUR84,597,923.78 and will mature on March 13, 2032. Both of the loans bear interest rate in the range of 0.98% to LIBOR + 0.7% per annum.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- e. Pada tanggal 11 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global, sekaligus merekomendasikan tindakan pencegahan dan mitigasinya pada sebagian besar negara-negara, termasuk Indonesia.

Pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi terganggu seperti sektor industri, sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, transportasi tidak terkecuali sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan kebutuhan konsumsi listrik (*demand*) dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik. Manajemen melakukan beberapa bentuk mitigasi risiko atas kondisi tersebut dengan menghentikan kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik yang tidak efisien serta penghematan biaya penyediaan tenaga listrik.

Kondisi ekonomi makro juga bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi yang melemahkan asumsi-asumsi yang telah dibangun Perusahaan pada akhir tahun 2019 dalam perencanaan korporasi seperti inflasi, *Indonesian Crude Price*, kurs, tingkat suku bunga acuan, Harga Batubara Acuan dan lain-lain yang akan berpengaruh pada hasil operasi Perusahaan, yaitu peningkatan biaya operasi, penurunan pertumbuhan penjualan, dan penerimaan dari pelanggan. Selain itu kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan nilai utang dan mengganggu perolehan sumber pendanaan yang dibutuhkan Perusahaan dari pihak eksternal.

Perusahaan menyadari bahwa pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing dan faktor inflasi akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional Perusahaan, akan tetapi manajemen telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi risiko tersebut. Selain itu sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 dan konsep *cost plus margin*, Pemerintah akan mengganti biaya dimaksud melalui subsidi dan pendapatan kompensasi. Sebagai bagian dari *prudent risk management*, Perusahaan memitigasi risiko nilai tukar atas liabilitas mata uang asing dari liabilitas pembayaran pokok dan bunga pinjaman,

- e. On March 11, 2020, the World Health Organisation has made an announcement regarding the spread of corona virus (Covid-19) as a global pandemic, simultaneously recommending preventive actions and mitigation for some of the large countries, including Indonesia.

The Covid-19 pandemic has caused disruptions to most of economic activities, for instance industrial sector, tourism sector, hospitality, trading sector, transportation and without exception to small and medium enterprises. This condition has an impact in declining demands of electricity consumption. The management has done several risk mitigations regarding this condition by stopping inefficient power plants' operational activities and cost savings of electricity supplies.

The macro economics condition has also shifted in such rapid volatility in which has weakened the preceding assumptions that has been set forth by the Company at the end of the year 2019 in the corporate planning, such as inflation, *Indonesian Crude Price*, exchange rate, reference interest rate, Coal Reference Price, and others in which will affect the Company's operation outcome such as an increase in operating cost, a decrease in sale growth and customer receipts. Moreover, this condition also potentially increases the amount of payables and interferes disrupts obtaining source of funds needed by the Company from external parties.

The Company realizes that the weakening of rupiah rate towards foreign exchange rate and inflation factors will result in an increase of Company's operational cost, however the Management has taken several strategies to anticipate those risks. Moreover, in compliance to UU No.19 year 2003 and cost plus margin concept, the government will replace such costs through subsidy and compensation income. As part of the prudent risk management, the Company mitigates the exchange rate risks on foreign exchange obligations over outstanding payment obligations and interest, invoices from IPPs and invoices

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

tagihan IPP dan tagihan energi primer dengan melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dimana manajemen konsisten melakukan lindung nilai (*hedging*) minimum 25% x net eksposur valas (selisih aset valas – liabilitas valas) dan rasio likuiditas minimum (aset valas/liabilitas valas) > 70% .

Untuk memberikan perlindungan sosial menghadapi Covid-19, Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia dan di tindak lanjuti dengan surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat No.707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 Maret 2020 memberikan diskon atas tarif tenaga listrik sebagai berikut (i) pelanggan rumah tangga reguler (pasca bayar) daya 450 VA diberikan rekening listrik gratis selama tiga bulan untuk pemakaian listrik di bulan Maret, April dan Mei 2020 (ii) pelanggan rumah tangga pra bayar daya 450 VA diberikan gratis token untuk pembelian token bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir (iii) pelanggan rumah tangga reguler (pasca bayar) daya 900 VA diberikan rekening listrik gratis 50% atas pemakaian listrik bulan Maret, April dan Mei 2020 (iv) pelanggan rumah tangga pra bayar daya 900 VA diberikan token gratis sebesar 50% untuk pembelian token bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir. Selanjutnya piutang dari golongan pelanggan tersebut akan dibayar Pemerintah kepada Perusahaan. Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon atas tarif tenaga listrik tersebut masing-masing sejumlah 24 Juta pelanggan untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan 7 Juta pelanggan untuk pelanggan dengan daya 900 VA. Kebijakan ini diperpanjang sampai dengan bulan September 2020 melalui Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral No.1005/23/DJL.3/2020 pada tanggal 5 Juni 2020.

from primary energies by hedging in accordance to Bank Indonesia regulation No. 18/4/PBI/2016 dated April 21, 2016 regarding Application of Prudential Principles in Managing Foreign Debt of Nonbank Corporations where Management consistently performs minimum hedging of 25% x foreign exchange rate net exposure (difference foreign exchange assets – foreign exchange liability) and minimum liquidity ratio of (foreign exchange assets /foreign exchange liability) > 70%.

To provide social protection against Covid-19, the Government through President of Republic of Indonesia and followed by Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources through letter No.707/26/DJL.3/2020 dated March 31, 2020, provides discounts on electricity tariffs as follows (i) 450 VA regular (postpaid) household class of electricity customer is given free electricity bills for three months for electricity usage in March, April and May 2020 (ii) 450 VA prepaid household class of electricity customers are given free tokens for the purchase of tokens in April, May and June 2020 at the highest monthly usage of the last three months usage (iii) 900 VA regular (postpaid) household class of electricity customers are given a 50% free electricity bill for electricity usage in March, April and May 2020 (iv) prepaid 900 VA household class of electricity customers are given free tokens of 50% for the purchase of tokens in April, May and June 2020 at the highest monthly usage of the last three months usage. Subsequently the receivable from those class of electricity customers will be paid by the Government to the Company. Total customer which given electricity tariff discount are 24 billion customer for 450 VA class of electricity customer and 7 billion customer for 900 VA class of electricity customer. This policy was extended until September 2020 through the Letter of the Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources No.1005/23/DJL.3/2020 dated on June 5, 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 30 April 2020, Pemerintah melalui Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral No.847/23/DJL.3/2020 memperluas pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik dengan memberikan rekening listrik gratis dan token gratis kepada golongan pelanggan Bisnis dan Industri dengan daya 450VA yang berlaku mulai bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020.

Perusahaan dan entitas anak belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah Covid-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Manajemen optimis bahwa dengan dukungan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, serta langkah-langkah strategis internal maka operasional Perusahaan dan entitas anak akan terus berjalan dan kondisi keuangan tetap terkendali.

Perusahaan telah menentukan, bahwa kejadian ini dikategorikan sebagai peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan, sehingga laporan keuangan konsolidasian ini tidak disesuaikan dengan dampak pandemik Covid-19. Proses penanganan oleh Pemerintah masih berlangsung dan tidak dapat ditentukan jangka waktunya, sehingga dampak-dampak misalnya terhadap aktivitas operasional, pendapatan, dan nilai terpulihkan dari aset dan liabilitas Perusahaan, belum dapat ditentukan secara andal.

- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 ("Peraturan") telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan. Peraturan ini salah satunya mengatur

On April 30, 2020, the Government through the Letter of the Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources no. 847/23/DJL.3/2020 expands the implementation of discount on electricity tariff rate by providing free electricity bills and token for 450 VA Business and Industries class of electricity customer from May 2020 until December 2020.

The Company and subsidiaries are yet to accurately predict and quantify how long or how far the Covid-19 pandemic will affect the operating results, financial position, and cash flows of the Company and subsidiaries. The Management is optimistic that with the help of the government and other stakeholders, followed by internal strategic steps, the operations of the Company and subsidiaries will carry on and the financial conditions remain manageable.

The Company has determined that this event is categorized as a non-adjusted event after the reporting period, so that these consolidated financial statements are not adjusted to the Covid-19 pandemic impact. The Government's handling process is still ongoing and cannot be determined for a period of time, therefore impacts such as on operational activities, the revenue and recoverable value of the Company's assets and liabilities cannot be determined reliably.

- f. *Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("the Regulation") has been issued on 31 March 2020.*

The Regulation is concerning the state financial policy and financial system stability in response to the Covid-19 pandemic and/or the threats that endanger the national economy and/or financial system stability. The Regulation, among others, regulates the adjustment of domestic Corporate Income Tax rate to

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan 20% pada tahun 2022.

Peraturan tersebut tidak berdampak kepada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini maupun tangguhan, termasuk beban terkait, yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019 dan baru berdampak pada pelaporan keuangan setelah tahun 2019. Jika Perusahaan dan entitas anak menggunakan tarif pajak 22% untuk tahun 2019, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dilaporkan oleh Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 akan turun masing-masing sebesar Rp265.916 dan Rp3.374.585.

- g. Pada tanggal 6 Mei 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VII tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Pokok/ Principal	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat kupon per tahun/ Coupon rate per annum *)	Shelf Registration Bonds III PLN VII Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020			Series A
Seri A	316,700 6 Mei/ May 6, 2023	7.92%	Series B
Seri B	99,155 6 Mei/ May 6, 2025	8.25%	Series C
Seri C	312,180 6 Mei/ May 6, 2027	8.55%	Series D
Seri D	1,009,100 6 Mei/ May 6, 2030	9.10%	

- h. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020:

- Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Dewan Direksi:
 - Sripeni Inten Cahya sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1;
 - Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2;
 - Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management;
 - Ahmad Rofiq sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

become 22% in the fiscal years of 2020 and 2021 and 20% in 2022 fiscal year.

The Regulation does not affect the measurement of the current and deferred tax assets and liabilities, including its related expenses, which were reported in the consolidated financial statements of December 31, 2019 and would only impact the financial reporting after 2019. Had the Company and subsidiaries used the 22% tax rate in 2019, the deferred tax assets and liabilities reported by the Company and subsidiaries as at December 31, 2019 would have decreased amounting to Rp265,916 and Rp3,374,585, respectively.

- g. *On 6 May 2020, the Company issued Shelf Re-gristration Bonds III Phase VII year 2020 with details as follows:*

- h. *Based on the Decision of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020:*

- *Honorably discharged members of the Board of Directors:*
 - *Sripeni Inten Cahya as Director of Strategic Procurement 1;*
 - *Djoko Rahardjo Abu Manan as Director of Strategic Procurement 2;*
 - *Muhamad Ali as Director of Human Capital Management;*
 - *Ahmad Rofiq as Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Dewan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Pengadaan Strategis 1 menjadi Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
 - Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur Energi Primer;
 - Direktur *Human Capital Management* menjadi Direktur *Human Capital dan Management*;
 - Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;

 - Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;

 - Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Mega Project.

 - Mengalihkan penugasan anggota-anggota Dewan Direksi:
 - Syofvi Felienty Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur *Human Capital dan Management*;
 - Wiluyo Kusdiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;

 - Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

 - Mengangkat anggota-anggota Dewan Direksi:
 - Muhammad Iqbal Nur sebagai Direktur Perencanaan Korporat;
 - Bob Sahril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
 - Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer;
 - M. Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.
- *Changed the nomenclature position of the members of the Company's Board of Directors as follows:*
 - *Director of Strategic Procurement 1 became Director of Commerce and Customer Management;*
 - *Director of Strategic Procurement 2 became Director of Primary Energy;*
 - *Director of Human Capital Management became Director of Human Capital and Management;*
 - *Director of Regional Business of Sumatera became Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan;*

 - *Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan became Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara;*

 - *Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara became Director of Mega Project.*

 - *Transfer the assignments of the members of the Board of Directors:*
 - *Syofvi Felienty Roekman that was previously Director of Corporate Planning to become Director of Human Capital and Management;*
 - *Wiluyo Kusdiharto that was previously Director of Regional Business of Sumatera to become Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan;*

 - *Syamsul Huda that was previously Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan to become Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara.*

 - *Appoint members of the Board of Directors:*
 - *Muhammad Iqbal Nur as Director of Corporate Planning;*
 - *Bob Sahril as Director of Commerce and Customer Management;*
 - *Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy;*
 - *M. Ikhsan Asaad as Director of Mega Project.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- i. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah Global tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- i. On 30 June 2020, the Company issued Global Medium Term Notes year 2020 with details as follows:

	Pokok/ Principal *)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat kupon per tahun/ Coupon rate per annum	
Surat Utang Jangkah Menengah Global tahun 2020 - US\$				Global Medium Term Note Issued in 2020 - US\$
Jatuh Tempo 2030	500,000,000	30 Juni/ June 30, 2030	3.00%	Due in 2030
Jatuh Tempo 2050	1,000,000,000	30 Juni/ June 30, 2050	4.00%	Due in 2050

*) dalam jumlah penuh/ in full amount

- j. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, menetapkan penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp4.632.950.

- j. Based on Government Regulation No. 36 year 2020 dated July 7, 2020 regarding additional government's equity participation in to the Company's capital stock, establish approved Additional Government's equity amounting to Rp4,632,950.

- k. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, menetapkan penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp5.000.000.

- k. Based on Government Regulation No. 37 year 2020 dated July 7, 2020 regarding additional government's equity participation in to the Company's capital stock, establish approved Additional Government's equity amounting to Rp5,000,000.

- l. Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-447/MBU/07/2020 tanggal 8 Juli 2020, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 10.528.230 saham dengan nilai Rp10.528.230 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp125.709.232 dengan rincian sebagai berikut:

- l. Based on letter of Minister of BUMN No. S-447/MBU/07/2020 dated July 8, 2020 the decision of Minister of BUMN as RUPS approved additional Government's equity participation of 10,528,230 shares amounted to Rp10,528,230, increase in subscribed and paid-up capital to Rp125,709,232 with details as follows:

- Sebesar Rp6.500.000 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019;
- Sebesar Rp4.028.230 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2019 tanggal 12 September 2019.

- Amounting to Rp6,500,000 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 51 year 2019 dated July 19, 2019;
- Amounting to Rp4,028,230 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 60 year 2019 dated September 12, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**59. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Dalam rangka rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum efek utang, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran.

Dalam laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali ini, laporan keuangan tahun 2019 disajikan dengan informasi komparatif 2018 dan 2017, perbaikan penyajian beberapa unsur dalam laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta terdapat pemutakhiran informasi yang terdapat dalam:

- Catatan 3: Kebijakan Akuntansi Penting;
- Catatan 26: Utang Sewa Pembiayaan;
- Catatan 27: Utang Bank;
- Catatan 53: Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing;
- Catatan 55: Ikatan dan Kontinjensi; dan
- Catatan 58: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan.

**60. Tanggung Jawab Manajemen dan
Persetujuan atas Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2020.

**59. Reissuance of Consolidated
Financial Statements**

With respect to the Company's plan to conduct public offering of debt securities, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2019, 2018, and 2017 for inclusion in the offering documents.

In the reissued consolidated financial statements, the 2019 financial statements are presented with comparative information for 2018 and 2017, improvement of presentation on several elements in the consolidated statements of cash flows for the year ended December 31, 2017 and there are updates to the information contained in:

- *Note 3: Significant Accounting Policies;*
- *Note 26: Lease Liabilities;*
- *Note 27: Bank Loans;*
- *Note 53: Monetary Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies;*
- *Note 55: Commitments and Contingencies; and*
- *Note 58: Events After Reporting Period.*

**60. Management's Responsibility and Approval
of the Consolidated Financial Statements**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on July 21, 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan